BI INSTITUTE

Seri Buku Sejarah & Heritage

DINAMIKA PEREKONOMIAN HULU-HILIR SUNGAI

BANK INDONESIA DALAM LINTASAN SEJARAH KALIMANTAN SELATAN

Dinamika Perekonomian Hulu-Hilir Sungai

Bank Indonesia dalam Lintasan Sejarah
Kalimantan Selatan

DINAMIKA PEREKONOMIAN HULU-HILIR SUNGAI

BANK INDONESIA DALAM LINTASAN SEJARAH KALIMANTAN SELATAN

TIM PENYUSUN

Bambang Subiyakto, Pakhri Anhar, Rahmat Dwisaputra, Rita Krisdiana, Riza Putera, Angsoka Yorintha Paundralingga, Adhi Nugroho, Nur Fadhilah, Allan Akbar

EDITOR

Imas Emalia

BANK INDONESIA INSTITUTE
BANK INDONESIA
2022

Dinamika Perekonomian Hulu-Hilir Sungai
Bank Indonesia dalam Lintasan Sejarah Kalimantan Selatan

Penanggung Jawab Produksi:
Yoga Affandi

Kepala Produksi:
Arlyana Abubakar

Tim Penyusun:
Bambang Subiyakto, Pakhri Anhar, Rahmat Dwisaputra, Rita Krisdiana, Riza Putera, Angsoka Yorintha Paundralingga, Adhi Nugroho, Nur Fadhilah, Allan Akbar

Editor:
Imas Emalia

Kontributor:
Yusuf Wicaksono, Hardini Swastiana, Ochhaj Yulid Sriwipadma Raharja, Alif Fadhiyah Chairunnisa, Ginisita Dofany, Sintya Aprina, Aryni Ayu Widiyawati

Cetakan Pertama, Agustus 2022
xxvii + 406 hlm, 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-623-5662-29-9
978-623-5662-30-5 (EPUB)

Bank Indonesia Institute
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350
Indonesia
http://www.bi.go.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

SAMBUTAN
GUBERNUR BANK INDONESIA

Kalimantan Selatan mewarisi berkah alam berupa letak geografisnya yang dialiri banyak sungai, sehingga dikenal dengan nama Kota Seribu Sungai. Kontur alam yang berbasis pelayaran sungai, telah menggerakkan perekonomiannya sejak rentang masa yang panjang. Sudah menjadi catatan sejarah bagaimana sejak lampau peradaban masyarakat telah memanfaatkan sungai dalam lalu lintas perdagangan sekaligus sebagai fondasi ekonomi. Penggambaran atas terminologi hulu-hilir sungai pun begitu terlihat melalui aktivitas ekonomi yang terjalin antara wilayah pedalaman dan pesisir Kalimantan Selatan. Demikian pula dengan terbentuknya relasi antara masyarakat lokal dengan para pendatang sehingga membangun suatu kekuatan relasi dagang yang lebih luas hingga lingkup perdagangan internasional.

Pada masa kolonial hingga memasuki abad ke-20, perkembangan ekonomi Kalimantan Selatan bercorak ekonomi perkebunan dengan sungai sebagai tulang punggung utama lalu lintas distribusi komoditas dagang. Perkembangan ini didukung dan difasilitasi dengan keberadaan De Javasche Bank (DJB) Agentschap Bandjermasin yang berdiri pada 1 Agustus 1907. Selain sebagai bank komersial, DJB ini juga menyandang peran sebagai bank sirkulasi. DJB Agentschap Bandjermasin diberikan mandat untuk

mengatur sirkulasi uang gulden dalam jumlah besar serta mengatur lalu lintas pembayaran terhadap aktivitas perekonomian dan perdagangan di Kalimantan Selatan. Disamping peran lainnya untuk memberikan bantuan pengembangan usaha melalui kredit modal kepada para pedagang dan pengusaha.

Setelah memasuki era kemerdekaan, DJB dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia sejak tahun 1953 sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia mengalami transformasi sebagai bank sentral modern sehingga peranannya sangat lebih dari sekedar bank sirkulasi di masa kolonial. Bank Indonesia selalu siap untuk mengawal dan mendukung laju pembangunan ekonomi di daerah, termasuk di Kalimantan Selatan. Kehadiran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan berperan melakukan pemantauan, evaluasi, serta merekomendasikan berbagai kebijakan atas persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi. Sinergi bersama Pemerintah Daerah menjadi kunci utamanya, melalui fungsi Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam memberikan advisory dalam upaya pengendalian inflasi, memberikan tinjauan kebijakan ekonomi, serta menjaga stabilitas moneter. Dalam upaya pengembangan ekonomi, Kantor Perwakilan BI Kalimantan Selatan juga bersinergi dalam melaksanakan berbagai tugas dan program, antara lain dengan mendorong peningkatan literasi keuangan, peningkatan akses pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kepada perbankan serta berbagai program edukasi, dan juga tentunya dalam menjaga kelancaran lalu lintas sistem pembayaran di wilayah Kalimantan Selatan.

Buku berjudul **"Dinamika Perekonomian Hulu-Hilir Sungai: Bank Indonesia dalam Lintasan Sejarah Kalimantan Selatan"** merupakan hasil kajian mendalam terhadap sejarah ekonomi wilayah Kalimantan Selatan. Uraian di dalamnya tersaji secara komprehensif melalui lintasan sejarah Kalimantan Selatan dengan segala kekhasannya. Kehadiran buku ini di tengah pembaca, dapat dinikmati tak hanya sebagai referensi akademik, tetapi juga sebagai rujukan bagi pengambil kebijakan daerah. Buku ini diharapkan dapat melengkapi dan memantik kemunculan karya sejenis

tentang pengetahuan sejarah ekonomi untuk wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Buku ini tidak hanya menjadi pengingat sejarah, namun juga menjadi referensi dalam bersama-sama mewujudkan pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan yang lebih maju.

Jakarta, Juli 2022

Perry Warjiyo

SAMBUTAN
DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA

Berbicara Kalimantan Selatan tentu tidak terlepas dari sumber daya alam yang melimpah serta sungai sebagai jalur utama lalu lintas perdagangan, hingga terbentuknya interaksi masyarakat yang kuat melalui aktivitas ekonomi yang ramai. Interaksi masyarakat dalam dunia perdagangan dengan para pedagang memberikan pengenalan terhadap sistem ekspor-impor. Nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam berbagai komoditas sumber alamnya berhasil menjadi sumber kehidupan perekonomian Kalimantan Selatan. Di sektor pertambangan, minyak bumi, batu bara, mineral, dan emas menjadi contoh komoditas yang memainkan peran penting sejak masa kolonial. Sektor pertambangan menjadi daya tarik utama bagi para investor untuk mengembangkan bisnisnya di wilayah ini. Tak kalah penting, ialah sektor perkebunan karet yang juga berhasil menjadi komoditas unggul sehingga melandasi dinamika perekonomian Kalimantan Selatan secara begitu masif.

Pesatnya perkembangan ekonomi Kalimantan Selatan pada gilirannya mendorong pemerintah kolonial memilih Banjarmasin sebagai salah satu wilayah penting untuk didirikan kantor cabang De Javasche Bank (DJB), tepatnya pada tanggal 1 Agustus 1907. Pendirian DJB Agentschap Bandjermasin merupakan bentuk respons pemerintah kolonial terhadap kebutuhan lembaga keuangan sekaligus sebagai bank sirkulasi yang akan menjaga peredaran uang Gulden di wilayah Kalimantan Selatan. Selain tentunya juga sekaligus sebagai bank komersial yang bertugas mengatur

permodalan dan perkreditan pada sektor perkebunan dan sektor pertanian.

Dalam perjalanannya, DJB Agentschap Bandjermasin turut andil dalam mendorong tumbuh kembang perekonomian Kalimantan Selatan di tengah pesatnya monetisasi dalam transaksi jual beli di daerah setempat. Keberadaannya semakin dikenal banyak pihak hingga menyentuh kalangan masyarakat pedalaman. Sejumlah perusahaan asing non-Eropa pun memiliki kesan positif dengan fasilitas yang diberikan oleh DJB Bandjermasin, khususnya terkait proses pembiayaan dan kebutuhan pelayanan finansial lainnya. Bahkan, peran DJB Agentschap Bandjermasin semakin strategis seiring keterlibatannya dalam penentuan kebijakan dengan pemangku kepentingan terkait.

Seiring masa yang terus berganti, perubahan pun turut terjadi, salah satunya nasionalisasi DJB. Setelah melalui serangkaian proses, akhirnya mengantarkan Indonesia memiliki bank sentral. Melalui UU No. 11 Tahun 1953 ditetapkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Perubahan tersebut tak hanya berlaku di tingkat nasional saja, namun juga pada tingkat daerah. DJB Agentschap Bandjermasin pun kini bertransformasi menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yang hadir melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam mengawal stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran di daerah.

Kehadiran buku **"Dinamika Perekonomian Hulu-Hilir Sungai: Bank Indonesia dalam Lintasan Sejarah Kalimantan Selatan"** di tengah masyarakat sebagai kontribusi Bank Indonesia dalam bentuk kajian sejarah ekonomi yang dapat dinikmati tak hanya sebagai referensi akademik, namun juga sebagai rujukan dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang. Buku ini diharapkan dapat menjadi media bagi Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam membangun kerja sama yang sinergis mengawal pembangunan ekonomi nasional maupun daerah yang lebih baik.

Jakarta, Juli 2022

Dody Budi Waluyo

PENGANTAR
KEPALA BANK INDONESIA INSTITUTE

Bank Indonesia Institute kembali menghadirkan referensi pengetahuan sejarah ekonomi sebagai bagian dari Buku Seri Sejarah dan *Heritage* Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Kehadiran buku publikasi Bank Indonesia Institute berjudul **"Dinamika Perekonomian Hulu-Hilir Sungai: Bank Indonesia dalam Lintasan Sejarah Kalimantan Selatan"** menjadi persembahan Bank Indonesia kepada masyarakat Kalimantan Selatan dan wilayah sekitarnya, untuk memperkaya khazanah kajian akademis terutama dalam bidang sejarah ekonomi daerah.

Buku ini menjadi sumbangsih Bank Indonesia Institute sebagai upaya untuk melengkapi dokumentasi memori institusi (*institutional memory*) Bank Indonesia. Perekaman memori ini juga ditujukan untuk membangkitkan rasa kepemilikan bersama bagi rakyat Indonesia terhadap Bank Indonesia sebagai bank sentral milik bersama. Di bidang akademis, buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh akademisi dan masyarakat luas, serta menjadi sumber refleksi bagi para pembuat kebijakan di daerah dalam merumuskan kebijakan berdasarkan hikmah dan pelajaran masa lalu. Kiranya buku ini juga dapat menjadi bagian dari referensi pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi untuk memaknai perjalanan sejarah ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Sebagai sebuah serial buku, maka Buku Seri Sejarah dan *Heritage* Kantor Perwakilan Bank Indonesia terbit dalam beberapa judul buku berdasarkan perjalanan kehadiran Bank Indonesia di beberapa daerah yang di awali oleh

De Javasche Bank. Seri buku ini menyajikan rangkaian peristiwa mengenai kiprah bank sentral di beberapa wilayah di Indonesia.

Kami menyadari bahwa dalam menulis sebuah buku, idealnya dapat memenuhi 4 (empat) unsur, yakni *uniqueness* (keunikan); novelty (kebaruan); *attractiveness* (menarik); dan *accessibility* (aksesabilitas). Maka, dalam penulisan buku ini, Tim Penulis berupaya mengisi ruang-ruang kosong yang belum banyak dikaji oleh buku-buku sejenis, antara lain dengan memanfaatkan sumber primer berupa arsip masa De Javasche Bank sebagai referensi utama dalam penelitian dan penulisan. Guna memperluas jangkauan pembaca, buku ini ditulis dengan menggunakan gaya penulisan semi populer agar lebih menarik untuk dibaca, di samping juga diterbitkan secara digital melalui link yang tersedia di *website* Bank Indonesia. Diharapkan jangkauan pembaca buku ini tidak hanya di lingkungan akademik, tetapi juga masyarakat luas khususnya generasi muda yang menaruh minat terhadap sejarah ekonomi wilayah Kalimantan Selatan.

Buku ini tidak akan terbit tanpa dukungan dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut aktif terlibat dalam proses penelitian dan penulisan buku ini. Kami berharap informasi yang termuat dalam buku ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai peran Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan ekonomi Kalimantan Selatan menuju kemakmuran.

Jakarta, Juli 2022

Yoga Affandi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Aliran Sungai Kalimantan Selatan dan Timur Masa Kolonial **15**
Gambar 1.2. Sungai Barito dan Sungai-sungai Anak Cabangnya **18**
Gambar 1.3. Kampung Cina Banjarmasin 1870 **27**
Gambar 1.4. Rumah Lanting (Terapung) di Antasan Kuin Banjarmasin 1899 **32**
Gambar 1.5. Perahu dan Kapal Crathie London Sandar di Sungai Martapura, Banjarmasin 1898 **45**
Gambar 1.6. Tambatan Perahu dan Pasar di Amuntai Akhir Abad Ke-19 **46**
Gambar 1.7. Tambatan Perahu dan Pasar di Kandangan Akhir Abad ke-19 **46**
Gambar 1.8. Tanda Larangan Melalui Sungai **50**
Gambar 1.9. Matrik Daftar Waktu Tempuh pada Trayek Pelayaran Sungai Kalimantan Selatan Abad ke-19 **52**
Gambar 1.10. Gambar Sebagian Uang Koin Edar di Kalimantan Selatan **64**
Gambar 1.11. Gambar Sebagian Uang Koin Edar di Maluka **65**
Gambar 2.1. Pencucian Rotan di Suatu Sungai di Kalimantan, 1915 **76**
Gambar 2.2. Pasar Karet Mingguan di Kalua, Hulu Sungai 1925 **78**
Gambar 2.3. Menyadap Karet di Hulu Sungai Tahun 1930-an **83**
Gambar 2.4. Penggergajian Kayu Rakyat (Wantilan) di Banjarmasin 1938 **87**
Gambar 2.5. Gedung Kantor DJB Agentschap Bandjermasin Sekitar Tahun 1920-an **96**
Gambar 2.6. Kantor Borsumij di Banjarmasin Tahun 1925 **105**
Gambar 2.7. Sejumlah Personel DJB Bandjermasin Berfoto di Depan Kantor DJB Bandjermasin **112**
Gambar 2.8. Penyadapan Karet oleh Seorang Warga Borneo Tahun 1935 **118**
Gambar 2.9. Rumah Asap Pertama di Barabai, Hulu Sungai 1936 **126**
Gambar 2.10. Suasana di Sekitar Pelabuhan Banjarmasin 1900-an **128**
Gambar 3.1. Gedung Algemeene Volkscrediet Bank Banjarmasin **141**
Gambar 3.2. Gedung Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij NV Banjarmasin **141**
Gambar 3.3. Gedung Nederlandsche Handel Maatschappij NV (NHM) Banjarmasin **142**
Gambar 3.4. Uang Kertas Sepuluh Rupiah **149**
Gambar 3.5. Uang Kertas Pecahan Lima Rupiah **149**
Gambar 3.6. Uang Kertas Pecahan Satu Rupiah **150**
Gambar 3.7. Uang Kertas Pecahan Setengah Rupiah **150**
Gambar 3.8. Penebangan Kayu Hutan Kalimantan **162**
Gambar 3.9. Rakit Kayu Melalui Sungai **162**
Gambar 3.10. Usaha Penggergajian Kayu (Wantilan) di Banjarmasin 1940-an **164**
Gambar 3.11. Pabrik Kayu di Sampit 1940-an **164**
Gambar 3.12. Sejumlah Pegawai DJB Bandjermasin **170**
Gambar 5.1. Panen Raya dalam Rangka Swasembada Beras Kalimantan Selatan **233**
Gambar 5.2. Kakap Merah Ekspor **234**
Gambar 5.3. Anak Itik Alabio **234**

Gambar 5.4. Perkebunan Kelapa Sawit **247**
Gambar 5.5. Pendulangan Intan Cempaka **264**
Gambar 5.6. Penggosokan Intan Martapura **264**
Gambar 5.7. Sumur Minyak Murung Pudak **267**
Gambar 6.1. Tujuan Ekspor Produk Kayu dari Kalimantan dan Indonesia **275**
Gambar 6.2. Rute Ekspor Ilegal Ramin (Gaharu Buaya) dari Kalimantan **275**
Gambar 6.3. Deforestasi Kalimantan 1950–2005 dan Proyeksi 2010-2020 **277**
Gambar 6.4. Gambaran Umum Statistik Perkebunan Kelapa Sawit **285**
Gambar 6.5. Grafik Ilustrasi Industri Kelapa Sawit **286**
Gambar 6.6. Perencanaan Pengembangan Kawasan Industri, RPJMN 2020–2024 **288**
Gambar 6.7. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng Wilayah Kalimantan **291**
Gambar 7.1. Ilustrasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Era Kesultanan Banjarmasin **333**
Gambar 7.2. Ilustrasi Perkembangan Wilayah Kuin **335**
Gambar 7.3. Ilustrasi Perkembangan Wilayah Tatas **338**
Gambar 7.4. Ilustrasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Era Kolonial **340**
Gambar 7.5. Ilustrasi Morfologi Jalan Lambung Mangkurat Dulu dan Sekarang **343**
Gambar 7.6. Ilustrasi Perubahan Ruang Jalan Lambung Mangkurat Dulu dan Sekarang **344**
Gambar 7.7. Lokasi Kantor DJB Bandjermasin 1907–1922 dan 1923–1986 **346**
Gambar 7.8. Pembukaan Kantor DJB di Banjarmasin Tahun 1923 **349**
Gambar 7.9. Kantor DJB di Banjarmasin antara Tahun 1900 dan 1924 **349**
Gambar 7.10. *Timeline* De Javasche Bank **350**
Gambar 7.11. Linimasa Bangunan DJB Bandjermasin dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan **351**
Gambar 7.12. De Javasche Bank dengan gaya "*Indische Empire*" **353**
Gambar 7.13. Ciri-ciri Arsitektur Gaya "*Indische Empire*" **354**
Gambar 7.14. Ciri-ciri Arsitektur Gaya "Kolonial Modern" **356**
Gambar 7.15. De Javasche Bank dengan Gaya "Kolonial Modern" **356**
Gambar 7.16. Jalan Pohon di Banjarmasin, Dilihat dari Pastori Tahun 1930 **358**
Gambar 7.17. Suasana *Resident de Haanweg* Bandjermasin **359**
Gambar 7.18. Suasana *Resident de Haanweg*, vermoedelijk te Bandjermasin 1938 **359**
Gambar 7.19. Lokasi De Javasche Bank Bandjermasin **360**
Gambar 7.20. Situasi De Javasche Bank Bandjermasin **360**
Gambar 7.21. Tiga Dimensi dan Tampak Bangunan **362**
Gambar 7.22. Rencana Awal De Javasche Bank Bandjermasin **364**
Gambar 7.23. Rekonstruksi Denah Rencana Awal De Javasche Bank Bandjermasin **364**
Gambar 7.24. Denah pada Dokumen DED De Javasche Bank Bandjermasin **365**
Gambar 7.25. Penambahan Ruang Khazanah Diperkirakan Terjadi antara Tahun 1953–1967 **365**
Gambar 7.26. Rekonstruksi Denah pada *Detail Engineering Design* De Javasche Bank Bandjermasin **366**

Gambar 7.27. Rekonstruksi Tata Ruang De Javasche Bank Bandjermasin **366**
Gambar 7.28. Interior DJB Bandjermasin **367**
Gambar 7.29. *Flat Roof Dormer* De Javasche Bank Bandjermasin **369**
Gambar 7.30. Detail Pintu dan *Entrance* De Javasche Bank Bandjermasin **369**
Gambar 7.31. Detail Sungkul De Javasche Bank Bandjermasin **370**
Gambar 7.32. Detail Jendela De Javasche Bank Bandjermasin **370**
Gambar 7.33. Aksonometri Struktur De Javasche Bank Bandjermasin **371**
Gambar 7.34. Tampak Samping Pembangunan Gedung Baru DJB Bandjermasin 1922 **371**
Gambar 7.35. Akuisisi Gedung DJB Bandjermasin menjadi Bank Indonesia. Kiri: foto peresmian gedung tahun 1923; Kanan: foto sebelum dilakukan pembongkaran 1985/1986 **373**
Gambar 7.36. Gambar perencanaan bangunan baru Bank Indonesia 1982 oleh PT Bina Karya **374**
Gambar 7.37. Tahap Konstruksi Bank Indonesia Tahun 1984–1985 oleh PT Hammer Sakti; Dari arsip foto-foto pembangunan yang ada menggambarkan proses pelaksanaan pembangunan gedung Bank Indonesia Kalimantan Selatan hingga peresmiannya pada tanggal 6 Desember 1986 **375**
Gambar 7.38. Peresmian Gedung Baru Bank Indonesia Kalimantan Selatan (6 Desember 1986) **376**
Gambar 7.39. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan tahun 2021 **376**
Gambar 7.40. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan dari arah Barat Laut **377**
Gambar 7.41. Peta Lokasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan **378**
Gambar 7.42. Situasi sekitar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan **379**
Gambar 7.43. Kiri: Isometri Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan; Kanan: *secondary skin* Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan **380**
Gambar 7.44. Kiri: Gambar Tampak dan Kanan: Gambar Potongan **380**
Gambar 7.45. Ruang-Ruang pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan **381**
Gambar 7.46. Detail *Entrance* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan **382**
Gambar 7.47. Detail *Secondary* Skin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan **383**
Gambar 7.48. Detail Fasad Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan **384**
Gambar 7.49. Detail Konstruksi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan **385**

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 2.1. Jumlah dan Luas Tanaman Karet di Kalimantan Selatan 1936–1937 **86**
Tabel 2.2. Produksi Ekspor Behn, Meyer & Co Ltd. 1909 **100**
Tabel 2.3. Kapasitas Produksi dalam Penanaman Karet Pribumi di Hulu Sungai Tahun 1924 dan 1936 **122**
Tabel 2.4. Klaim Asuransi Gudang Terbakar Lim Tjoe Keng **131**
Tabel 2.5. Perhitungan Pihak Asuransi atas Gudang Terbakar **132**
Tabel 3.1. Pinjaman pada NKG Kalimantan Selatan periode Desember 1942 **144**
Tabel 3.2. Pinjaman pada NKG Kalimantan Selatan periode November 1943 **145**
Tabel 3.3. Pemulihan Kantor DJB Tahun 1946–1947 **167**
Tabel 3.4. Pemegang Saham NV "Kinibalu" 1947 **173**
Tabel 3.5. Pembelian *Smoked Sheets* oleh Eksportir Periode Desember 1948–Februari 1949 **177**
Tabel 3.6. Pembelian *Smoked Sheets* periode Desember 1948–Februari 1949 **178**
Tabel 4.1. Daftar Nama Pegawai (Orang Indonesia) Masa Peralihan Proses Nasionalisasi Bank Indonesia **197**
Tabel 4.2. Susunan Perubahan Nama pada Bank Tunggal **203**
Tabel 4.3. Daftar Perkiraan Produksi Padi dan Pemakaian Kalimantan Selatan, 1968 **218**
Tabel 4.4. Jumlah Industri Ringan Kalimantan Selatan 1968 **223**
Tabel 4.5. Jumlah Industri Kerajinan Rakyat Kalimantan Selatan tahun 1968 **224**
Tabel 5.1. Daftar Produksi dan Pemakaian Beras Kalimantan Selatan 1963–1968* (dalam ton) **228**
Tabel 5.2. Produksi Padi Kalimantan Selatan 1969–1973 (dalam ton) **229**
Tabel 5.3. Areal Perairan Perikanan Darat Kalimantan Selatan tahun 1972 (dalam ha) **235**
Tabel 5.4. Luas Perkebunan Karet Kalimantan Selatan tahun 1972 (dalam ha) **237**
Tabel 5.5. Kebutuhan Bahan Pangan Kalimantan Selatan (dalam ton) **243**
Tabel 5.6. Daftar Nama Kepala Kantor Cabang BI Banjarmasin **250**
Tabel 5.7. Jumlah Perbankan di Wilayah Kerja Kantor Cabang BI Banjarmasin (Kalimantan Selatan) **251**
Tabel 5.8. Jumlah Perbankan di Wilayah Kerja Kantor Cabang BI Banjarmasin (Kalimantan Tengah) **251**
Tabel 5.9. Perolehan Bank-Bank Pemerintah di Wilayah Kerja Kantor Cabang BI Banjarmasin Pada Agustus 1968 s.d. Januari 1969 **252**
Tabel 5.10. Perolehan Bank Swasta/Bank Pembangunan Daerah di Wilayah Kerja Kantor Cabang BI Banjarmasin pada Agustus 1968 s.d. Januari 1969 **253**
Tabel 6.1. Perusahaan Produsen Minyak Goreng Wilayah Kalimantan **290**
Tabel 6.2. Produsen Biodiesel Wilayah Kalimantan Tahun 2021 **292**
Tabel 6.3. Perkembangan Wisman Kalimantan Selatan **311**
Tabel 6.4. Sebaran Klaster Pangan KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan **322**

Grafik 6.1. Rasio Tutupan Hutan Kalimantan **276**
Grafik 6.2. Skenario Permintaan Batu Bara Dunia **281**
Grafik 6.3. Permintaan Methanol Dunia **282**
Grafik 6.4. Perkembangan Implementasi Kebijakan Biodiesel Indonesia **292**
Grafik 6.5. Rata-Rata Sumbangan Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Nasional **300**
Grafik 6.6. Perkembangan Kedatangan Pesawat Domestik **311**
Grafik 6.7. Perkembangan Kedatangan Pelayaran **311**
Grafik 6.8. Perkembangan Tingkat Hunian Hotel **312**
Grafik 6.9. Rata-rata Pengeluaran Wisnus **313**
Grafik 6.10. Rata-rata Lama Tinggal Wisnus **313**
Grafik 6.11. Komposisi Pengeluaran Wisnus **314**
Grafik 6.12. Dampak Pengalihan Wisnus terhadap Nilai Pasar Pariwisata Kalsel **314**
Grafik 6.13. Destinasi Wisata yang Dilakukan Wisnus di Kalsel 2019 **318**

DAFTAR ISI

Sambutan Gubernur Bank Indonesia... v
Sambutan Deputi Gubernur Bank Indonesia... viii
Pengantar Kepala Bank Indonesia Institute... x
Daftar Gambar... xii
Daftar Tabel dan Grafik... xv
Daftar Isi... xvii
Daftar Istilah... xx
Daftar Singkatan... xxiii

PROLOG... 1

9 **Bab 1 Lingkungan Geografis dan Fondasi Ekonomi**

Lingkungan Geografis dan Ekologis... **14**
Karakteristik Demografi dan Sosial-Ekonomi... **26**
Transportasi dan Perdagangan Berbasis Sungai... **44**
Sistem Barter dan Peredaran Uang... **58**

71 **Bab 2 De Javasche Bank dan Dinamika Ekonomi (1901–1942)**

Internasionalisasi Perdagangan Karet Kalimantan Selatan... **73**
De Javasche Bank (DJB) Agentschap Bandjermasin... **91**
Peranan DJB dan Perkembangan Perbankan Kolonial di Kalimantan Selatan... **99**
Dampak Malaise terhadap Perekonomian Kalimantan Selatan dan Peran DJB Bandjermasin... **112**

135 **Bab 3 Bank Sirkulasi di Kalimantan Selatan dalam Dua Zaman (1942–1949)**

Likuidasi De Javasche Bank dan Hadirnya Nanpo Kaihatsu Ginko... **137**
Perekonomian Kalimantan Selatan di Bawah Pendudukan Jepang... **151**

Kalimantan Selatan Masa Revolusi Fisik... **158**
Keadaan Ekonomi Kalimantan Selatan... **161**
DJB Agentschap Bandjermasin Masa Revolusi Fisik... **166**

185 **Bab 4 Bank Indonesia dan Pemulihan Ekonomi (1950–1967)**

Pasca Konferensi Meja Bundar dan Kondisi Kalimantan Selatan Awal 1950-an... **186**
Nasionalisasi De Javasche Bank... **192**
Peran Bank Indonesia dalam Sektor Perekonomian Rakyat... **206**

225 **Bab 5 Bank Indonesia Mengawal Laju Perekonomian (1968–1998)**

Perekonomian Rakyat Kalimantan Selatan... **226**
Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pertanian... **240**
Perkembangan Perbankan dan Peran Kantor Cabang Bank Indonesia Banjarmasin... **249**
Dari Pertanian ke Pertambangan... **262**

269 **Bab 6 Bank Indonesia dan Kilas Ekonomi (1999–2020)**

Perkembangan Kelembagaan Bank Indonesia (BI) dan Implikasinya di Daerah... **270**
Mengawal Transformasi Ekonomi... **273**
Sektor Hutan dan Hasil Hutan... **273**
Sektor Pertambangan Batu Bara... **278**
Sektor Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit... **284**
Natural Resource Curse (NRC) dan *Trickle Down Effect*... **293**
The New Kalimantan... **298**
Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat... **319**

329 **Bab 7 Tata Kawasan dan Arsitektur De Javasche Bank Bandjermasin**

Tata Ruang Kota Banjarmasin Era Kesultanan Banjarmasin... **330**

Kuin sebagai Pusat Awal Pertumbuhan Kesultanan Banjarmasin... **333**
Tatas sebagai Pusat Kegiatan Baru... **335**
Tata Ruang Kota Banjarmasin Era Kolonial... **339**
Kawasan Pusat Kolonial Banjarmasin (Tatas)... **340**
Kawasan Jalan Lambung Mangkurat... **342**
De Javasche Bank Bandjermasin... **344**
Sejarah Bangunan De Javasche Bank Bandjermasin... **344**
Arsitektur De Javasche Bank Bandjermasin... **351**
Lokasi dan Situasi... **357**
Bentuk Bangunan... **361**
Fungsi dan Tata-Ruang... **362**
Detail Arsitektur... **367**
Konstruksi Bangunan... **370**
Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Selatan... **372**
Sejarah Bangunan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Selatan... **372**
Arsitektur Bangunan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Selatan... **377**
Lokasi dan Situasi... **378**
Bentuk Bangunan Baru... **379**
Fungsi dan Tata-Ruang... **381**
Detail Arsitektur... **382**
Konstruksi Bangunan... **384**

EPILOG... 387
DAFTAR PUSTAKA... 393

DAFTAR ISTILAH

Anjir	:	Kanal/saluran air yang menghubungkan dua sungai di Kalimantan yang dibuat secara tradisional oleh masyarakat Kalimantan untuk kepentingan transportasi air dan pengairan lahan pertanian
Antasan	:	Kanal/saluran air yang menghubungkan dua sungai maupun danau yang dibuat secara tradisional oleh masyarakat Banjarmasin untuk kepentingan mempersingkat perjalanan, transportasi air dari pedalaman/hutan ke kota, dan pengangkutan barang-barang dagangan
Afdeeling	:	Wilayah administratif masa Hindia Belanda setingkat Kabupaten
Agentschap	:	Kantor Cabang/Perwakilan
Bubuhan	:	Sebuah konsep sosial berupa sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat Banjar dan Dayak Meratus, Kalimantan Selatan berdasarkan pada garis keturunan, agma, tempat tinggal (seperti kelurahan dan kabupaten), kelompok solidaritas, dan kesejarahan
Bunsyu	:	Wilayah administratif masa pendudukan Jepang setingkat Kabupaten
Bunsyuco	:	Kepala/Pimpinan *Bunsyu*
Crepe	:	Lembaran yang dihasilkan dari pengolahan lateks, produk yang diolah dari karet alam
Factorij	:	Sebutan lain dari NHM (*Nederlandsche Handel Maatschappij*) yang menunjukkan pada arti agen dagang milik asing
Flat bark creppe	:	Jenis karet tanah yang dihasilkan dari lateks yang belum diolah
Gemeente	:	Sebuah kota/kotamadya yang dibentuk pemerintah Hindia Belanda dengan sistem otonomi daerah
Gezaghebber	:	Penguasa atau kepala pemerintahan lokal di tingkat distrik yang dipegang oleh orang Belanda
Gunseikan	:	Kepala Pemerintahan Militer Jepang
Gunpyo	:	Uang dari pemerintahan pendudukan Jepang
Handil	:	Kanal/saluran air yang dibuat secara tradisional dengan bentuk menjorok dari badan sungai dan berukuran lebih kecil dari anjir yang difungsikan untuk pengairan pertanian
Hinterland	:	Wilayah pedalaman atau pedesaan yang terhubung secara ekonomi dengan kota terdekat

Jung	:	Kapal atau perahu besar buatan Negeri Cina yang berlayar di wilayah Asia Tenggara utuk mengangkut orang dan barang
Kaigun	:	Angkatan Laut Jepang
Keresidenan	:	Daerah administratif yang dipimpin oleh seorang residen
Kumiai	:	Koperasi yang berdiri pada masa pendudukan Jepang
Lateks	:	Cairan getah yang didapatkan dari pohon karet
Lender of the last resort	:	Salah satu fungsi dari bank sentral untuk memberikan bantuan pendanaan kepada perbankan yang mengalami kesulitan akibat likuiditas atau penutupan
Malaise	:	Sebuah peristiwa menurunnya/merosotnya tingkat ekonomi secara drastis di seluruh dunia. Peristiwa ini di awal abad ke-20 mulai terjadi pada 1929 di Amerika Serikat yang kemudian berdampak ke seluruh negara di dunia termasuk Hindia Belanda di tahun 1930-an
Mij.	:	Singkatan dari *Maatschappij* (bahasa Belanda) yakni perseroan atau perusahaan
Natte rijsbouw	:	Penanaman padi sawah, padi lahan basah
Onderafdeeling	:	Wilayah administratif masa Hindia Belanda setingkat Kawedanan
Overscheep	:	Tempat transit kapal-kapal dari luar, pelabuhan
Rangkan	:	Jenis perahu di daerah dataran tinggi, hulu sungai
Remilling	:	Penggilingan, dalam hal ini pabrik penggilingan karet
Saka	:	Kanal/saluran air yang dibuat secara tradisional yang berukuran lebih kecil dari handil untuk pengairan pertanian
Slabs	:	Bahan olah karet yang terbuat dari lateks yang sudah digumpalkan dengan asam semut
Syomin Ginko	:	Bank rakyat
Syu	:	Wilayah administratif masa pendudukan Jepang setingkat Keresidenan
Tatah	:	Kanal/saluran air tradisional yang dibuat terutama awalnya untuk menghanyutkan atau mengangkut hasil-hasil hutan
Tonarigumi	:	Rukun Tetangga (RT); satuan pemerintahan terbawah masa pendudukan Jepang
Tokushi Ginko	:	Bank penghubung antara lembaga perbankan dengan Pemerintah Jepang
Volkscredietbank	:	Bank pinjaman/kredit rakyat
Wantilan	:	Usaha penggergajian kayu

Wasee	: Pajak
Zaibatsu	: Istilah Jepang untuk industri dan bisnis keuangan masa kekaisaran Jepang
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo	: Kalimantan (Borneo) bagian Selatan dan Timur

DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM

ABCD-Command	:	American, British, Chinese, and Dutch Command
ADO	:	Alokasi Devisa Otomatis
ALRI	:	Angkatan Laut Republik Indonesia
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Askrindo	:	Asuransi Kredit Indonesia
ATR	:	Asia Timur Raya
BBD	:	Bank Bumi Daya
BBN	:	Bahan Bakar Nabati
BBWI	:	Bangga Berwisata di Indonesia
BDI	:	Bank Dagang Indonesia
BDN	:	Bank Dagang Negara
BDP	:	Biro Deviden Perdagangan
BI	:	Bank Indonesia
Bimas	:	Bimbingan Massal
BKTN	:	Bank Koperasi Tani dan Nelayan
BNI	:	Bank Negara Indonesia
Borsumij	:	Borneo Sumatra Handel Maatschappij
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPJPH	:	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
BPM	:	Bataafsche Petroleum Maatschappij
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPU	:	Badan Pimpinan Umum
BPUPKI	:	Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BRI	:	Bank Rakyat Indonesia
BTN	:	Bank Tabungan Negara
BU	:	Badan Usaha
BUL	:	Badan Urusan Logistik
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BU BBN	:	Badan Usaha Bahan Bakar Nabati
BZO	:	Borneo's Zuid-er en Oosterafdeeling
CAD	:	*Current Account Deficit*
CHSE	:	*Cleanliness, Health, Safety,* dan *Environment Sustainability*
COP26	:	*Conference of the Parties* ke-26

CPO	:	*Crude Palm Oil*
CRO	:	*Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd*
CTM	:	*Coal to Methanol*
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DAU	:	Dana Alokasi Umum
Demas	:	Demonstrasi Massal
Demas SSBM	:	Demas Swa Sembada Bahan Makanan
Depolog	:	Depot Logistik
DJB	:	De Javasche Bank
DME	:	*Dimethyl Ether*
DPMPTSP	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTW	:	Destinasi Wisata
DWT	:	*Dead Weight Tonnage* Berat kapal keseluruhan dalam keadaan muatan penuh dan siap untuk berlayar dikurangi berat kapal kosong
EBT	:	Energi Baru dan Terbarukan
EOR	:	*Enhanced Oil Recovery*
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
Gakka	:	Gabungan Koperasi Karet
GANEFO	:	*Games of the New Emerging Forces*
Gerindo	:	Gerakan Rakyat Indonesia
Gernas	:	Gerakan Nasional
GRK	:	Gas Rumah Kaca
GVC	:	*Global Value Chain*
HBA	:	Harga Batu Bara Acuan
HPH	:	Hak Pengusahaan Hutan
HSS	:	Hulu Sungai Selatan
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
Inmas	:	Intensifikasi Massal
Insus	:	Intensifikasi Khusus
INTAN KALSEL	:	*Investment Trade and Tourism Relation Unit of* Kalimantan Selatan

IUCN	:	*International Union for Conservation of Nature*
JOB PTTL	:	Joint Operating Body Pertamina-Talisman Tanjung Limited
KBI	:	Kantor Bank Indonesia
KCBI	:	Kantor Cabang Bank Indonesia
KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
Kemenparekraf	:	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
KI	:	Kawasan Industri
KIK	:	Kredit Investasi Kecil
KKPA	:	Kredit Koperasi Primer untuk Anggota
KL	:	Kilo Liter
KLBI	:	Kredit Likuiditas Bank Indonesia
K/L	:	Kementerian/Lembaga
KMB	:	Konferensi Meja Bundar
KMKP	:	Kredit Modal Kerja Permanen
Kodeco	:	Korea Development Corporation
KPBU	:	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
KPC	:	PT Kaltim Prima Coal
KPM	:	Koninklijk Paketvaart Maatschappij
KPN	:	Kertas Perbendaharaan Negara
KPPN	:	Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional
KPw	:	Kantor Perwakilan
KSPN	:	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KUD	:	Koperasi Unit Desa
KUK DAS	:	Kredit Usahatani Konservasi Daerah Aliran Sungai
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat
KRYT	:	Kesatuan Rakyat yang Tertindas
LU	:	Lapangan Usaha
Mofdeco	:	Mitsui Overseas Development Company
MPO	:	Menghitung Pajak Orang (lain)
NEI	:	Netherlands East Indies
NHM	:	Nederlandsche Handel Maatschappij
NIAM	:	Nederlandsche Indische Aardolie Maatschappij
NIBM	:	Nederlandsche Indische Boschproducten Maatschappij
NICA	:	Netherlands Indies Civil Administration
NIGIEO	:	Nederlandsch Indische Gouvernements Import en Export Organisatie

NKG	:	Nanpo Kaihatsu Ginko
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NRC	:	*Natural Resource Curse*
NV	:	Naamloze Venootschap
OBM	:	Oost Borneo Maatschappij
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OGS	:	Operasi Gawi Sabumi
PAMOR BORNEO	:	Program Akselerasi UMKM Orientasi Ekspor di Kalimantan
PB PRI	:	Pedoman Besar Persatuan Rakyat Indonesia
PD	:	Perang Dunia
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PDN	:	Perusahaan Dalam Negeri
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PEN	:	Pemulihan Ekonomi Nasional
PELNI	:	Pelayaran Nasional Indonesia
Penpres	:	Penetapan Presiden
Peperda	:	Penguasa Perang Daerah
Perppu	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PIR	:	Perkebunan Inti Rakyat
PIR-Trans	:	Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PLTS	:	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PN	:	Perusahaan Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPKI	:	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPKM	:	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PPKS	:	Pusat Penelitian Kelapa Sawit
PPRI	:	Pemuda Persatuan Rakyat Indonesia
PSBB	:	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PSBI	:	Program Sosial Bank Indonesia
PRRI/Permesta	:	Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta
PUD	:	Penyuluhan Unit Desa
QRIS	:	*QR Code Indonesian Standard*

RAPBN	:	Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
REKDA	:	Rapat Ekonomi dan Keuangan Daerah
Repelita	:	Rencana Pembangunan Lima Tahun
RI	:	Republik Indonesia
RIPIN	:	Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
RIRU	:	*Regional Investor Relations Unit*
RIS	:	Republik Indonesia Serikat
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RRL	:	Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan
RSD	:	Rumah Sakit Daerah
RUU	:	Rancangan Undang-Undang
SAPRODI	:	Sarana Produksi
SDA	:	Sumber Daya Alam
SiApik	:	Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan
SK	:	Surat Keputusan
SKNBI	:	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
TBS	:	Tandan Buah Segar (kelapa sawit)
TKP2LH	:	Tim Koordinasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TPI	:	Tambahan Pembayaran Impor
TPID	:	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPK	:	Tingkat Penghunian Kamar
UKB	:	Uang Kertas Bank
UKP	:	Uang Kertas Perak
UL	:	Uang Logam
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU	:	Undang-Undang
VMF	:	Voedings Middelen Fonds
VOC	:	Vereenigde Oostindische Compagnie
WALHI	:	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Wisman	:	Wisatawan Mancanegara
Wisnus	:	Wisatawan Nusantara
YSB	:	Yokohama Specie Bank

PROLOG

Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah berupa produk hasil hutan, pertambangan, maupun perkebunan kelapa sawit. Potensi alam yang dimiliki Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, telah hadir sejak dalam waktu yang lama. Sejarah telah mencatat bagaimana alam Kalimantan Selatan begitu berkembang dan memainkan peran pentingnya dalam perekonomian sejak masa kolonial. Hingga kini Kalimantan begitu kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kondisi yang ada saat ini, karakteristik ekonomi wilayahnya melalui pemanfaatan sumber daya alamnya yang eksploitatif, seringkali tak dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Masyarakat kurang mendapat manfaat dari pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada kepemilikan sumber daya alam tersebut. Tak jarang eksploitasi terhadap sumber daya alamnya, khususnya batu bara, hanya memberi keuntungan segelintir pihak, bahkan berakibat lain hingga timbulnya kerusakan lingkungan. Penurunan kesuburan lahan, pencemaran sungai, hingga potensi banjir pun terjadi sebagaimana yang terjadi pada awal tahun 2021 silam. Hal ini tentu kontras dengan Kalimantan Selatan yang secara historis diketahui sebagai wilayah yang dialiri oleh banyaknya aliran sungai dan perairan lainnya.

Sejarah mencatat, wilayah Kalimantan Selatan merupakan wilayah inti warisan dari Kesultanan Banjar atau Banjarmasin[1] yang semula menghegemoni wilayah seluas sebagaimana yang disebut kemudian

1 Pada beberapa sumber terdapat perbedaan penyebutan, yakni sebagian menyebut Kesultanan Banjar, sebagian lain menyebut Kesultanan Banjarmasin. Namun, hal tersebut merujuk pada satu kesultanan yang sama. Selanjutnya pada buku ini secara konsisten akan menyebut Kesultanan Banjarmasin.

sebagai *Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo*, merupakan wilayah yang cukup luas. Provinsi Kalimantan Selatan yang beribukota Banjarmasin mempunyai sejarah kewilayahan yang sangat dinamis. Pada tahun 1848 pemerintah Hindia Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Rochussen membagi wilayah Kalimantan menjadi dua wilayah pemerintahan, yaitu: 1) Keresidenan *Westerafdeeling van Borneo* (Kalimantan Barat) dengan ibu kotanya Pontianak; dan 2) Keresidenan *Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo* (Kalimantan Selatan dan Timur) dengan ibu kotanya Banjarmasin. Keresidenan Kalimantan Selatan dan Timur yang baru terbentuk itu dipimpin oleh residen A. L. Weddik yang berkedudukan di Banjarmasin.

Meyners (1886) mengemukakan bahwa Keresidenan Kalimantan Selatan dan Timur terletak pada 110° 35′ sampai 19° Bujur Timur dan 4° 15′ Lintang Selatan. Luas wilayahnya diperkirakan lebih dari 400.000 km^2, sejalan dengan pembulatan perkiraan yang dibuat Lindblad (1993). Adapun Broersma (1927) menyatakan luas wilayah yang dimaksudkan itu sekitar 14 kali luas negeri Belanda. Wilayah Keresidenan Kalimantan Selatan dan Timur saat itu berbatasan; di utara dengan Kerajaan Solok, di timur dengan Selat Makassar, di selatan dengan Laut Jawa, dan di barat dengan Keresidenan Kalimantan Barat. Keadaan wilayah pemerintahannya tetap dipertahankan hingga pemerintahan pendudukan Jepang berakhir dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Sejak masa lampau, wilayah Kalimantan Selatan dengan Banjarmasin sebagai ibu kotanya selain menjadi pintu gerbang *(port dé entre*) komoditas dagang di provinsi, sekaligus sebagai gerbang keluar dan masuk penduduk dari berbagai wilayah luar provinsi. Kondisi geografis seperti itu menjadikan Kalimantan Selatan sebagai tempat berbagai etnik berkumpul dan berinteraksi. Di wilayah ini selain dihuni oleh penduduk asli Dayak dan Banjar, juga oleh berbagai etnik yang ada di Indonesia, seperti Jawa, Madura, Bugis-Makassar, dan Melayu-Sumatra. Selain itu, terdapat penduduk dari bangsa asing seperti Cina, Arab, India, dan Belanda. Hal ini turut dipengaruhi oleh letak geografis Kalimantan Selatan yang berada di antara sungai-sungai besar dan penting seperti Sungai Barito, Sungai Mahakam, dan Sungai Kahayan yang melahirkan suatu peradaban masyarakat sungai. Adapun sungai-sungai lainnya yang mengaliri wilayah

Kalimantan Selatan di antaranya Sungai Martapura, Sungai Riam, Sungai Riam Kiwa, Sungai Negara, dan Sungai Marampiau.

Kalimantan Selatan telah difasilitasi oleh keadaan alamnya berupa banyak aliran sungai dan perairan. Masyarakat Kalimantan Selatan pun umumnya bermukim di sekitar perairan sungai. Masyarakat di sekitar sungai memanfaatkan kondisi sungai untuk berlayar dan berlabuh sehingga terhubung dalam jalinan perdagangan. Dari sanalah mereka membentuk komunitas dagang hingga menjadi komunitas yang memiliki sistem politik dan ekonomi yang kuat. Tak hanya itu, aktivitas yang dijalankan di sekitar sungai ini juga melahirkan para bandar yang menjadi perantara dagang antara wilayah pesisir dan pedalaman Kalimantan Selatan. Hal ini menjadi gambaran atas terminologi hulu-hilir sungai yang terjadi di Kalimantan Selatan. Para bandar dagang ini memainkan peran pentingnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan dagang yang terdapat di wilayah hulu (pedalaman) untuk kemudian dibawa ke wilayah hilir yang selanjutnya dipasarkan ke pasar global. Inilah yang kemudian menjadi karakteristik utama dari peradaban masyarakat sungai di Kalimantan Selatan. Pemanfaatan sungai yang baik sebagai jalur transportasi dan ekonomi bagi masyarakat Kalimantan Selatan juga terlihat pada keberadaan pasar terapung Muara Kuin di Sungai Barito yang merupakan simbol aktivitas ekonomi di Banjarmasin sejak zaman Kesultanan Banjarmasin.[2]

Menurut catatan M. Idwar Saleh, sejarawan Kalimantan Selatan, penduduk di Kalimantan Selatan memiliki beragam dialek bahasa dan kebiasaan (*custom*). Sebagai contoh, masyarakat Banjar berdasarkan dialek dan kebiasaannya terdiri tiga kelompok, yaitu: 1) Banjar Kuala, yaitu yang bermukim umumnya di daerah hilir Barito, Kota Banjarmasin, dan Martapura. 2) Banjar Batang Banyu, yaitu yang bermukim di sepanjang tepian Sungai Negara dan Tabalong, dari Margasari sampai Negara dan Amuntai sampai Kelua. 3) Banjar Pahuluan, yaitu yang berada di daerah-daerah atas kaki bukit Meratus, dari Tanjung sampai Berabai, Kandangan, dan Rantau.

2 Pasar Terapung Muara Kuin, Sungai Barito, hingga kini terus berdenyut dalam upaya menggerakkan perekonomian daerah Kalimantan Selatan, melalui jalur perdagangan dan pariwisata.

Penduduk setempat telah terbiasa bersentuhan atau berinteraksi dengan berbagai pihak luar, baik yang kemudian menetap maupun yang singgah dalam rangka menjalankan perdagangan. Pemanfaatan aliran sungai dan perairan yang baik menjadi keuntungan lain dalam kepentingan pengangkutan barang dan penumpang. Jalur air di daerah ini dapat dikatakan sempurna. Jalur tersebut meliputi semua jenis yang dapat digunakan untuk kepentingan transportasi seperti sungai, terusan/kanal, danau, waduk, perairan pantai, dan selat sempit untuk penyeberangan. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki jalur-jalur air untuk transportasi selengkap ini. Jalur-jalur ini telah dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk mengangkut berbagai komoditas dagang dengan menggunakan perahu maupun rakit menuju ke muara untuk selanjutnya alih muat ke kapal-kapal samudra untuk dibawa keluar Kalimantan Selatan.

Melalui lalu lintas perairan sungai serta potensi alamnya yang besar menjadi keuntungan tersendiri bagi Kalimantan Selatan dalam memberi kesempatan penduduknya melaksanakan kegiatan perekonomian, baik di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Alam Kalimantan Selatan menghasilkan berbagai komoditas yang laku diperdagangkan, baik untuk di tingkat lokal maupun untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia. Oleh karena itu, sudah sejak waktu yang lama pula masyarakat di Kalimantan Selatan menjalin kontak perdagangan dengan pihak luar dan turut aktif dalam perdagangan internasional yang lebih luas.

Berbagai jenis komoditas seperti lada, kopra, beras, ikan (darat dan laut), itik Alabio, telur itik, karet, dan kelapa sawit dihasilkan dari sektor pertanian. Kemudian dari sektor kehutanan berupa berbagai jenis getah hutan (getah perca dan jelutung), kayu, rotan, tengkawang, dan sebagainya. Adapun dari hasil tambang terdapat batu bara, intan, dan minyak bumi. Komoditas-komoditas tersebut mempunyai nilai ekonomi yang dapat menghidupi perekonomian masyarakatnya, sebagaimana yang terjadi dalam masa keemasan karet pada beberapa dekade awal abad ke-20. Masyarakat Kalimantan Selatan begitu turut merasakan kebangkitan ekonomi oleh karena budidaya karet begitu menjanjikan. Kondisi perekonomian yang bergeliat seperti itulah yang berpotensi mengundang investor untuk hadir di bumi Kalimantan Selatan yang diikuti pula oleh hadirnya lembaga-lembaga perbankan seperti De Javasche Bank pada masa kolonial.

DJB Agentschap Bandjermasin berperan sebagai bank sirkulasi dan bank komersial yang memberikan jasa atau layanan perbankan di wilayah Kalimantan Selatan. Kantor cabang DJB ini juga hadir sebagai bentuk upaya untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi di Kalimantan Selatan serta pengembangan bisnis di wilayah tersebut. Peningkatan aktivitas budidaya di sektor perkebunan karet yang menguntungkan menuntut untuk lebih banyak kebutuhan uang untuk pembayaran upah dan jual-beli produk. Bantuan permodalan pun diberikan oleh DJB Bandjermasin kepada para pengusaha Eropa maupun Cina. Sebagai bank sirkulasi DJB Bandjermasin menjalankan fungsi dan perannya dalam mengawal dinamika perekonomian wilayah Kalimantan Selatan.

Pergantian periode kekuasaan menandai pula perubahan struktur pemerintahan termasuk pula kebijakan, seperti halnya yang dilakukan oleh Jepang melalui likuidasi DJB menjadi Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG). Perputaran roda masa yang begitu dinamis diikuti dengan keberhasilan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, Belanda (NICA) yang berhasil menduduki kembali wilayah Republik Indonesia membuat DJB kembali dibuka. Di Banjarmasin, DJB kembali dibuka pada tahun 1946. Dalam perjalanannya, DJB pun mengalami perubahan setelah melalui serangkaian proses nasionalisasi hingga berganti menjadi Bank Indonesia sejak 1953 sampai saat ini. Penetapan UU Pokok BI No. 11 Tahun 1953 tanggal 1 Juli 1953 mengawali pula perubahan nama De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dalam hal ini BI juga bertugas sebagai bank sirkulasi. Perubahan nama menjadi Bank Indonesia pun kala itu turut berlaku bagi kantor-kantor cabang di daerah, termasuk Kalimantan Selatan yang dulu bernama DJB Agentschap Bandjermasin kini menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

Di sisi lain, perubahan kewilayahan juga sempat dialami oleh Kalimantan. Dua hari setelah proklamasi dikumandangkan yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang memutuskan pembentukan delapan provinsi berikut gubernurnya. Satu di antaranya adalah terbentuknya Provinsi Kalimantan

dengan gubernurnya Ir. P. Mohammad Noor. Dengan demikian, sejak tahun 1945 itu terjadi penggabungan wilayah yaitu Keresidenan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur menjadi Provinsi Kalimantan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Perubahan wilayah terjadi kembali di tahun 1956 dengan dikeluarkannya UU No. 26 – 1956 yakni membagi tiga provinsi Kalimantan menjadi Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur. Namun, perubahan tersebut tidak berlaku lama. Pada tahun 1957 berdasarkan UU No. 21 – 1957 Provinsi Kalimantan Selatan dibagi dua wilayah pemerintahan yakni Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibu kotanya Palangkaraya. Sejak itu, Provinsi Kalimantan Selatan relatif tidak lagi mengalami perubahan luas wilayah dan Banjarmasin tetap berkedudukan sebagai ibu kota meskipun sejak tahun 2015 pusat pemerintahan provinsi telah dipindahkan ke Banjarbaru.

Dalam konteks ekonomi, faktor geografi wilayah, ekologi, dan demografi menjadi hal penting yang berjalan beriringan. Perdagangan dan perekonomian berjalan mengikuti untaian waktu yang tanpa henti. Maka, pada konteks semacam ini kita dapat memahami arti pentingnya sejarah perekonomian di daerah dalam dinamika jaringannya hingga menjadi fondasi ekonomi yang kuat di masa-masa berikutnya. Penggambaran tentang dinamika perekonomian Kalimantan Selatan dengan berbagai peristiwa yang melatarbelakangi dari masa ke masa, diwujudkan ke dalam penulisan sebuah buku berjudul **"Dinamika Perekonomian Hulu-Hilir Sungai: Bank Indonesia dalam Lintasan Sejarah Kalimantan Selatan"**.

Kehadiran Bank Indonesia begitu bermakna dalam mendukung perekonomian nasional maupun daerah, khususnya Kalimantan Selatan. Dalam aktivitasnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan lebih sebagai *advisor* ekonomi yang menjalankan fungsi *advisory* kebijakan kepada pemerintah daerah dalam mendukung pengendalian inflasi, pengembangan ekonomi dan keuangan daerah; melaksanakan surveilans sistem keuangan di daerah; pengumpulan data untuk pengambilan keputusan di pusat maupun daerah setempat; pengelolaan

uang kartal; melakukan komunikasi kebijakan; serta pelaksanaan program keuangan inklusif dan pengembangan UMKM.

Pada perkembangannya, Bank Indonesia terus bertransformasi dari waktu ke waktu, salah satunya perubahan yang sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam UU tersebut, ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK, sedangkan pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab Bank Indonesia (BI) dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Dengan begitu fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan yang mulanya dipegang oleh BI selanjutnya beralih ke OJK.

Di lingkup daerah, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah terus bersinergi dalam hal pengembangan ekonomi lokal dengan memanfaatkan komoditas-komoditas potensial. Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor serta membantu mewujudkan pencapaian target investasi daerah. Sebagai miniatur bank sentral di daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen mengawal pertumbuhan dan transformasi ekonomi Kalimantan Selatan.

Transformasi ekonomi Kalimantan Selatan turut berlangsung seiring dengan pergantian masa sejak era kolonial hingga kontemporer. Perubahan tersebut terlihat dari adanya pergeseran keunggulan nilai ekonomi pada sumber daya alam yang telah lama menjadi komoditas dagang Kalimantan Selatan. Dari sektor perkebunan hingga pertambangan, telah menampilkan ragam potensi alam Kalimantan Selatan yang kini menempatkan pertambangan (batu bara) dan produk industri berbasis sumber daya alam (kelapa sawit, karet olahan, dan kayu olahan) sebagai sektor penopang utama perekonomian Kalimantan Selatan sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Eksplorasi terhadap berbagai sektor unggulan yang menghasilkan nilai ekonomi bagi perekonomian Kalimantan Selatan, terus diupayakan sejalan dengan transformasi ekonomi yang dilakukan melalui *green*

economy dan *sustainable development*. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi bagi generasi mendatang dengan memperhatikan keselamatan lingkungan dan keseimbangan aktivitas ekonomi. Transformasi menuju *green economy* menjadi peluang besar bagi berkembangnya ekonomi digital yang merupakan masa depan ekonomi yang ramah lingkungan. Pemulihan ekonomi dengan membangun model pembinaan perdagangan lokal yang berbasis digital dan memanfaatkan fasilitas *marketplace* perlu dilakukan melalui sinergi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemerintah daerah serta segenap *stakeholder*. Salah satunya melalui perhatian lebih yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui kegiatan PAMOR BORNEO (Program Akselerasi UMKM Orientasi Ekspor), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan juga telah berhasil memfasilitasi UMKM Kalimantan untuk menembus pasar ekspor.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam perkembangannya telah menghasilkan beberapa program pengembangan ekonomi lokal melalui *Regional Investor Relations Unit* (RIRU) Provinsi Kalimantan Selatan dengan nama INTAN KALIMANTAN SELATAN (*Investment Trade and Tourism Relation Unit of Kalimantan Selatan*). Pembentukan RIRU sebagai wadah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan melalui promosi proyek-proyek investasi guna mewujudkan "Kalimantan Baru" yang perekonomiannya bernilai tambah, terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan (*The New Kalimantan*). Sebagai Kantor Perwakilan Koordinator wilayah Kalimantan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen dalam melakukan asesmen, kajian, merekomendasikan kebijakan sektoral dan regional wilayah, serta isu-isu strategis mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan daerah demi terwujudnya perekonomian Kalimantan Selatan yang lebih maju dan sejahtera.

BAB 1
Lingkungan Geografis dan Fondasi Ekonomi

Kalimantan Selatan merupakan wilayah pesisir, namun memiliki banyak sungai. Oleh karenanya, untuk memahami perekonomian masyarakat Kalimantan Selatan tidak bisa terlepas dari dinamika perekonomian masyarakat pesisir dan masyarakat hulu-hilir sungai. Salah satu ciri utama masyarakat pesisir di Kalimantan Selatan adalah masyarakat Banjarmasin atau yang dikenal dengan sebutan 'Orang Banjar'. Sejak sebelum masehi, kelompok masyarakat Kalimantan Selatan ini telah membentuk budaya dagang yang kuat di daerah pesisir dan di sekitar sungai-sungai yang ada di wilayah itu. Kondisi budaya seperti itu menjadikan masyarakat Kalimantan Selatan sebagai masyarakat kosmopolit sebagaimana kebudayaan wilayah pesisir lainnya di Nusantara. Tipe masyarakat kosmopolit yang utama adalah memiliki orientasi terhadap dunia luar yang kuat, sikap terbuka terhadap kebudayaan yang datang, serta memiliki jaringan yang luas terutama dalam dunia dagang.[1]

Kemampuan berdagang masyarakat Kalimantan Selatan didukung oleh kondisi geografis yang memiliki Tanah Laut di sebelah selatan, Gunung Pamaton di sebelah timur, dan banyak sungai mulai Sungai Paminggir di sebelah selatan hingga Sungai Barito di sebelah barat. Selain itu, terdapat sungai besar yaitu Sungai Negara dan Sungai Martapura. Kondisi geografi seperti itu yang secara ekologis pula melahirkan peradaban masyarakat sungai disebabkan sungai menjadi andalan kegiatan perekonomian masyarakat yang mengitarinya. Peradaban masyarakat sungai lahir terutama di sepanjang Sungai Barito yang paling ramai dan terbuka dengan berbagai tipe pendatang dari luar Kalimantan

1 Taufik Abdullah, *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 2.

Selatan, seperti Melayu, Aceh, Makassar, Riau, Jawa, Madura, Arab, dan India.[2] Kelompok-kelompok masyarakat pendatang beradaptasi dengan masyarakat Kalimantan Selatan melalui transaksi ekonomi di daerah sungai. Dinamika perekonomian inilah yang kemudian menjadikan sebuah kekuatan relasi dagang antardaerah dan antarpulau.

Secara geografis karakteristik sungai-sungai di Kalimantan Selatan memiliki permukaan yang tinggi di sepanjang aliran sungai, serta memiliki aliran air yang deras namun bersifat riam. Pada Sungai Barito yang tidak terlalu dalam, membuat masyarakat di sekitarnya memanfaatkan kondisi sungai untuk berlayar dan berlabuh dalam jalinan perdagangan, sekalipun mereka harus berjuang melewati hutan kayu bakau dan hutan nipah. Di tempat-tempat persinggahan para pedagang, yaitu baik di hulu sungai maupun hilir, masyarakat pesisir sungai membangun komunitas dagang hingga menjadi komunitas yang memiliki sistem politik dan ekonomi yang kuat. Mereka kemudian membaur bahkan berasimilasi terutama dengan komunitas Melayu di muara Sungai Barito. Dari komunitas dagang ini lahir para bandar yang menjadi perantara dagang antara wilayah pesisir dan pedalaman (*hinterland*) Kalimantan Selatan. Bandar-bandar dagang inilah yang menjadi karakteristik utama dari peradaban masyarakat sungai.

Sejak abad ke-17 peradaban masyarakat sungai di Kalimantan Selatan terbentuk di empat wilayah. Pertama, berada di sekitar Sungai Martapura dan Sungai Barito, tepatnya di daerah Bandar Patih Masih di Kuin. Kedua, berada di antara Sungai Riam dan Sungai Riam Kiwa, tepatnya di daerah Martapura atau Bumi Kencana. Ketiga, berada di antara Sungai Barito dan Sungai Negara tepatnya di daerah Bandar Kuta Arya Taranggana atau yang disebut daerah Muara Bahan atau Sungai Negara. Keempat, berada di antara Sungai Negara dan Sungai Marampiau, tepatnya di daerah Margasari atau Candi Laras. Menurut Saleh, masyarakat di daerah sekitar sungai-sungai itulah yang memanfaatkan sungai sebagai fondasi ekonominya. Mereka kemudian memperluas relasi dagangnya dengan masyarakat pedalaman untuk meluaskan kekuasaan Kesultanan Banjarmasin.[3]

---

2 *Encyklopedia van Nederlands Indie*, Jilid I, hlm. 360.

3 M. Idwar Saleh, *Sedjarah Bandjarmasin*, (Bandung: KPPK Balai Pendidikan Guru, 1958), hlm. 25. Lihat Ita Syamtasiyah Ahyat, *Kesultanan Banjarmasin Pada Abad Ke-19: Ekspansi Pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan*, (Tangerang Selatan: SAM, 2012), hlm. 17.

Sistem perekonomian yang dibangun masyarakat sungai di bawah kendali Kesultanan Banjarmasin saat itu, berpusat pada kemampuan para bandar di wilayah-wilayah sungai tersebut. Penguasaan atas perekonomian di sepanjang aliran sungai itu di bawah kontrol perekonomian para bandar mulai dari hulu hingga hilir sungai. Bagi masyarakat sungai ini, jalur transportasi yang mereka tempuh sangat menantang karena melewati medan yang sulit. Mereka harus melintasi hutan dan daratan lainnya. Sepanjang jalur perdagangan itu, mereka menggunakan moda transportasi perahu kecil dan besar. Perahu besar disebut 'perahu gondol' yang digunakan untuk mengangkut barang-barang besar atau barang-barang dalam jumlah banyak. Pada umumnya, barang yang diangkut dengan perahu gondol ini seperti kayu, rotan, tembikar, kelapa, karet, dan pisang. Adapun perahu kecil yang disebut 'perahu tambangan' digunakan untuk mengangkut hasil pertanian.

Untuk pertahanan politik dan ekonomi masyarakat sungai di Kalimantan Selatan ini, seringkali mereka melancarkan pertahanan militer namun masih dalam pengawasan para bandar. Tujuannya untuk menghadapi gangguan dan serangan pihak luar yang mencari pelabuhan bebas untuk mereka berdagang di Kalimantan Selatan. Kondisi seperti itu terus berjalan hingga abad ke-19.

Kedatangan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) di abad ke-17 yang kemudian dilanjutkan oleh kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda, telah mengubah pola perekonomian masyarakat sungai dan pesisir Kalimantan Selatan. Bangsa Eropa tertarik menguasai wilayah Kalimantan Selatan karena potensi komoditas dagang yang dimiliki Kalimantan Selatan bernilai tinggi. Potensi alam yang menjadi komoditas dagang utama masyarakat Kalimantan Selatan di antaranya berasal dari bahan tambang seperti batu bara, intan, emas, bijih besi, dan platina. Sementara komoditas dagang dari sumber hutan seperti rotan, kayu besi, damar, madu, lilin, nipah, kayu-kayuan, dan lain-lain. Adapun dari hasil pertanian, yaitu lada yang berkualitas tinggi, sayur, dan beras. Semua hasil alam ini berhasil diekspor ke luar Kalimantan seperti ke Maluku, Timor, Surabaya, Semarang, Batavia, Sumatra, Cina, India, dan Arab. Inilah yang membuat ketertarikan bangsa Eropa untuk menjalin relasi dagang dengan

masyarakat Kalimantan Selatan hingga berhasil memonopoli hak dagang, khususnya untuk komoditas lada.[4]

Pada pertengahan abad ke-19, setelah Belanda berhasil menghapuskan kekuatan Kesultanan Banjarmasin di Kalimantan Selatan (1860), Belanda membangun berbagai infrastruktur kota yang dibutuhkan untuk aktivitas perekonomiannya. Beberapa fasilitas publik yang berhasil dibangun di masa itu di antaranya gedung pengadilan, kantor pos, komplek perumahan, sekolah-sekolah, pasar, jalan darat dengan penerangannya, permukiman-permukiman penduduk, dan taman kota. Pemerintah Hindia Belanda mengatur tata permukiman di Kalimantan Selatan berdasarkan etnis yang ada. Pengaturan stratifikasi sosial ini banyak memengaruhi polarisasi perekonomian, khususnya dalam penerapan sistem upah kerja bagi para buruh tani dan buruh tambang. Ketidakpuasan masyarakat atas sistem upah kerja itu menimbulkan protes masyarakat yang dimotori oleh para petani, buruh, ulama, dan bangsawan. Peristiwa ini seperti yang dikenal dengan Amok Hantarukung yang terjadi tahun 1899. Masyarakat Kalimantan Selatan merasa dirugikan dengan aturan sistem upah itu yang menyebabkan kehilangan penghasilan, kepemilikan tanah, dan pemimpin mereka.[5] Sebetulnya protes-protes sosial seperti itu telah terjadi sebelumnya karena dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap aturan-aturan Pemerintah Hindia Belanda. Bahkan perang dan protes sosial berlarut hingga tahun 1900-an.

Peristiwa-peristiwa pemberontakan semacam itu jelas sangat memengaruhi perekonomian masyarakat, namun dunia perdagangan khususnya di kalangan para bandar, tetap menjalankan aktivitas dagangnya. Kemerosotan besar bagi mereka terutama disebabkan persaingan usaha di dunia maritim. Persaingan usaha pelayaran mereka kalah saing oleh KPM (Koninklijk Paketvaart Maatschappij) yang mendapatkan hak monopoli atas pelayaran domestik dan internasional di Hindia Belanda. Kehadiran KPM memang tidak menghentikan aktivitas perekonomian masyarakat pribumi di Jawa maupun luar Jawa, hanya saja

4 R. Z. Leirissa, dkk., *Sejarah Sosial Daerah Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984), hlm. 71.

5 M. Idwar Saleh, *Banjarmasih*, (Banjarmasin: Museum Negeri Lambung Mangkurat Prop. Kalimantan Selatan, 1981), hlm. 3.

membatasi jangkauan pelayaran dan perdagangan mereka yang hanya antarpulau saja. Bagi para pedagang pengguna sungai, mereka juga masih dapat menjual karet dan hasil alam miliknya di hulu sungai kepada para pedagang Cina. Perkebunan karet, kopra, dan kelapa yang semakin meluas dikuasai Belanda di awal abad ke-20 hanya sedikit membantu masyarakat sungai dalam kehidupannya. Mereka hanya mengandalkan upah sebagai seorang kuli, karena penjualan dalam jumlah besar sudah dikuasai para pengusaha swasta Eropa dan Cina.[6]

Dalam upaya kontrol ekonomi atas berbagai perusahaan swasta yang berkembang di Kalimantan Selatan, Pemerintah Hindia Belanda mengatur ekspor-impor komoditas penting dari Kalimantan Selatan. Fondasi ekonomi yang didasarkan pada peraturan pemerintah seperti itu bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan mengenalkan ekonomi modern terhadap masyarakat pribumi, sekalipun sistem perekonomian itu tidaklah menjadikan masyarakat lebih sejahtera sebagai solusi dari berbagai konflik yang terjadi sebelumnya. Eksploitasi hasil perkebunan karet, rotan, dan hasil tambang telah menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan di masyarakat. Dalam kondisi seperti itu pemerintah menjalankan strateginya untuk tujuan pemenuhan perekonomian pemerintah dan masyarakat. Strategi dijalankan dengan mendirikan De Javasche Bank (DJB) Bandjermasin sebagai cabang DJB ke-15 pada 1 Agustus 1907, sehingga terbentuklah DJB di Kalimantan Selatan. Pendirian DJB juga sebagai pengejawantahan modernisasi kota-kota kolonial untuk mendukung modernisasi ekonomi. Program tersebut kemudian meluas di berbagai wilayah yang ditetapkan sebagai kota modern. Modernisasi ekonomi menjadi fondasi ekonomi di masa-masa berikutnya hingga pasca kemerdekaan. Dalam pembahasan ini dapat dijelaskan bahwa fondasi ekonomi masyarakat sungai melandasi perekonomian modern yang dikembangkan pemerintah di Kalimantan Selatan.

6 Yustan Aziddin, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud, 1984), hlm. 128. Lihat Leirissa, *Op.Cit.,* 1984, hlm. 38.

LINGKUNGAN GEOGRAFIS DAN EKOLOGIS

Lingkungan geografis dan ekologis merupakan faktor penting untuk memahami sebuah peradaban masyarakat. Kedua faktor tersebut meliputi unsur fisik dan nonfisik serta seluruh kondisi yang ada di dalamnya. Baik meliputi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang menjadi subjek dan objek dari sebuah peradaban.

Kalimantan Selatan menurut banyak laporan kolonial, merupakan sebuah wilayah yang masih memiliki "kehidupan liar" yang besar potensinya dalam menyokong kehidupan penduduknya. Sejak pertengahan abad ke-16, masyarakat Kalimantan Selatan telah membudidayakan tanaman lada dan produk hutan lainnya untuk menyokong kehidupan perdagangan mereka. Selain lada dan produk hutannya, penduduk di wilayah ini semakin intens berinteraksi dengan pihak-pihak dari luar Kalimantan Selatan dengan mulai digarapnya bahan tambang seperti batu bara, intan, minyak bumi, bijih besi, emas, dan karet sebagai komoditas yang dibutuhkan. Kondisi ini ditopang oleh fasilitas alam berupa jalur-jalur air yang nyaris seluruhnya dapat dilayari. Potensi perairan tersebut menghasilkan berbagai jenis ikan air tawar dan laut.

Secara historis Kalimantan Selatan merupakan wilayah warisan kekuasaan Kesultanan Banjarmasin yang disusul kemudian Keresidenan *Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo* dengan lingkungan fisiknya dialiri oleh banyak sungai dan bentuk perairan lainnya. Di antara sungai-sungai yang sangat penting adalah Sungai Barito, Sungai Mahakam yang berada di wilayah sebelah timur, dan Sungai Kahayan di bagian sebelah barat. Keberadaan Sungai Barito di daerah ini berpengaruh besar terhadap lingkungan perairan di sekitarnya dalam jangkauan yang sangat luas. Berdasarkan laporan Komisi Ilmu Alam tahun 1848,[7] ada lebih dari 45 sungai bermuara ke Sungai Barito dan terdapat 146 kampung terletak di sepanjang tepi kiri dan kanannya. Penduduk di sepanjang kiri dan kanan sungai-sungai itu bermata pencaharian sebagai petani, termasuk sebagai pencari hasil hutan. Cabang sungai penting yang bermuara di situ adalah

7 Uraian mengenai lingkungan perairan Sungai Barito di sini menggunakan sumber utama dari ANRI Bundel *BZO* (*Borneo's Zuider- en Oosterafdeeling*) No. 260, tahun 1884.

Sungai Batang (Kapuas) Murung, Kuala Murung, Martapura, dan Sungai Negara. Sungai Batang Murung dan Kuala Murung mengelilingi delta seluas 793 km^2. Sementara Sungai Martapura melintas membagi dua kota Banjarmasin dan Sungai Negara yang menghubungkan Banjarmasin dengan tempat-tempat di daerah Hulu Sungai. Di samping cabang sungai terdapat bentuk perairan berupa danau seperti di daerah Alimudin dan Ripung serta terusan-terusan yang tidak sedikit jumlahnya.

Gambar 1.1. Peta Aliran Sungai Kalimantan Selatan dan Timur Masa Kolonial

Sumber: Graham Irwin. 1955. *Nineteenth-century Borneo, A Study in Diplomatic Rivalrys* Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Dalam laporan *BZO* (*Borneo's Zuider- en Oosterafdeeling*) No. 260 tahun 1884 itu, disebutkan tentang aliran Sungai Barito berada pada posisi 110° 35′ 3″ dan 111° 32′ 50″ Bujur Timur. Panjang Sungai Barito adalah sekitar 392.854 elo (665 km) dan lebih dari 500 km dapat dilayari.[8]

8 Data lainnya mengenai Sungai Barito lihat *The Encyclopedia Americana* vol. III, (New York: Americana Corporation, 1937), hlm. 239, menyatakan panjang 885 km dan dapat dilayari sejauh 400 km. Bandingkan juga pada *Data Kalimantan Selatan: Pelita I s/d III,* (1982), hlm. 328; panjang 950 km, dapat dilayari 650 km, lebar rata-rata 650 m dan kedalaman rata-rata 8 m.

Lebar muara Sungai Barito mencapai 2,25 km. Di bagian hulu seperti di daerah Buntong lebar sungai mencapai 210 m, adapun di daerah Tuncor selebar 182 m dan di daerah Wahau yang lebih ke arah hulu selebar 126 m. Berkaitan dengan lebar, kedalaman, kandungan air, dan besar sungai umumnya menyebabkan Sungai Barito hampir sama dengan Sungai Kapuas (Bohang) di Kalimantan Barat dan melebihi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Ketiga sungai besar ini memiliki sifat yang sama sehingga semua cabang sungai atau perairan di sekitar ketiga sungai itu menerima pengaruh yang sama pula. Kekuatan besar Sungai Barito memengaruhi arus air pada cabang dan anak-cabangnya yang tersebar ke segala arah serta jalur-jalur perairan lainnya. Tingkat kemiringan Sungai Barito sangat kecil, mirip Sungai Amazon, yang hanya 0,23 m untuk jarak 280 m. Pengaruh kekuatan hidrodinamika Sungai Barito menciptakan arus lemah bagi lingkungan perairan di Kalimantan Selatan sehingga kegiatan transportasi air dapat dengan mudah diselenggarakan di atasnya.[9]

Volume air Sungai Barito yang sangat besar dengan daya dorongnya yang besar pula menyebabkan terciptanya gerak pasang surut pada keseluruhan perairan di sekitarnya. Keadaan perairan yang demikian itu menawarkan kemungkinan luas bagi penduduk di daerah itu menyelenggarakan pelayaran sungai di samping menjalankan sistem pertanian pasang surut. Dalam waktu 24 jam sungai-sungai di wilayah Kalimantan Selatan tidak mengalir satu arah. Ada saat air mengalir ke hulu, ketika itu permukaan air naik dan merupakan saat air pasang. Sebaliknya, saat air mengalir ke hilir, permukaan air turun dan merupakan saat air surut. Peralihan antara saat air pasang dan air surut berlangsung permukaan air sungai terhenti beberapa saat, tidak terjadi gerak arus he hilir atau ke hulu. Pada saat seperti itu permukaan air sungai berada pada posisi tertinggi.

Pada saat permukaan air sedang tinggi pelayaran dengan kapal uap bisa dilakukan dari Banjarmasin hingga Lontontuor jauh di daerah

9 Dalam kaitan ini Bundel *BZO* No. 260 membandingkan pula dengan beberapa sungai penting di dunia. Uraian berikutnya terutama berasal dari sumber yang sama. Untuk melengkapi pengetahuan silakan periksa A. K. Lobeck, *Geomorfologi: Pengenalan Kepada Kajian Pandangan Darat,* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1981), hlm. 320–321. Lobeck mencontohkan banyak sungai besar dan kecil berarus tenang dan berperan sebagai media transportasi.

hulu. Dalam hal perjalanan seorang pejabat Pemerintah Hindia Belanda di daerah bagian hulu berdasarkan pengalaman, biasanya setelah perjalanan dengan menggunakan kapal uap kemudian dilanjutkan menggunakan perahu dayung untuk mencapai tempat-tempat lebih di atas. Adanya arus bolak balik (pasang-surut), untuk suatu rangkaian perjalanan yang jauh, menyebabkan ada kalanya perahu dapat melaju dengan cepat, namun sebaliknya ada saat bergerak sangat perlahan. Dalam keadaan seperti itu, sebuah kapal uap yang bertolak dari Banjarmasin menuju ke daerah hulu untuk jarak sekitar 100 km ditempuh lebih dari 20 jam. Di wilayah Kalimantan Selatan juga memiliki danau-danau yang dapat dilayari. Danau-danau di daerah sebelah timur, misalnya, kedalaman airnya rata-rata 3 m pada saat musim timur. Di lain pihak Maks (1861) dan Bangert (1860) menginformasikan bahwa di daerah sebelah barat juga terdapat danau-danau yang dapat dilayari. Danau-danau itu adalah Maninjau, Malintang, Bulan, Sembuluh, Hampangan, dan Setarum.[10]

Umumnya isi laporan perjalanan seperti oleh H. G. Maks, Bangert (1860), dan Carl Bock (1887) di atas, adalah mengenai keadaan fisik jalur-jalur air yang mereka lalui dan yang terdapat di tiap daerah yang dikunjunginya. Hal yang mereka kemukakan meliputi kedalaman, lebar, panjang, dan keadaan arus. Mereka melukiskan pula keadaan sungai dengan pelayarannya sebagai tulang punggung segala aktivitas kehidupan, terutama dalam kepentingan perekonomian penduduk setempat. Arti penting sungai bagi masyarakat Kalimantan Selatan melahirkan peradaban masyarakat sungai di wilayah ini dan menjadi fondasi kehidupan bagi para penggunanya.

J. Hageman (1857) mengemukakan tentang arti penting sungai di daerah itu, bahwa awal pertumbuhan sebuah kerajaan di Kalimantan Selatan adalah di tepi sungai. Mula-mula berpusat di daerah antara Sungai Tabalong dan Batang Pitap. Berikutnya berada di antara Sungai Balangan dan Amandit, kemudian di antara Sungai Kelai dan Labuan Amas. Terakhir yang kemudian dikenal sebagai Kesultanan Banjarmasin,

10 Periksa *Plan voor eene Expeditie naar Midden-Oost-Borneo,* 1925, hlm. 7; dan Tjilik Riwut, *Kalimantan Memanggil,* (Jakarta: Endang, 1958), hlm. 6.

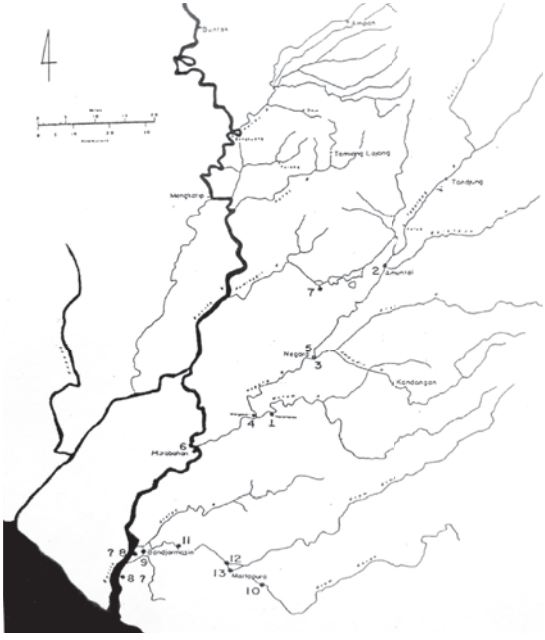

Gambar 1.2. Sungai Barito dan Sungai-sungai Anak Cabangnya

Sumber: W A van Rees. 1867. *De Bandjermasinsche Krijg van 1859-1863*. Arnhem: D A Thieme.

berpusat di antara Sungai Kuin dan Martapura.[11] Banyak aliran sungai yang mengalirkan airnya dalam jumlah sangat besar ke Laut Jawa. Sungai Barito yang berasal dari pegunungan Muller dan mengalir ke Laut Jawa di dekat Banjarmasin memiliki panjang sekitar 900 km dan merupakan sungai terpanjang kedua di Indonesia, setelah Kapuas di Kalimantan Barat. Sungai Barito bukan hanya merupakan sungai yang panjang tetapi juga lebar. Muara sungai ini mencapai empat sampai lima kilometer lebarnya sementara di dekat Banjarmasin yang berada sekitar 30 km ke dalam lebarnya antara satu sampai dua kilometer. Air tidak hanya terbatas pada

11 J. Hageman, "Bijdrage tot de Geschiedenis van Borneo", *BTG* Bag. VI, (Batavia: Lange & Co., 1857), hlm. 230, hlm. 225–246. Periksa juga, R. Broersma, *Handel en Bedrijf Zuid- en Oost-Borneo,* ('sGravenhage: G. Naeff, 1927), hlm. 19–20.

laut dan sungai. Bentangan luas kawasan litoral terdiri atas tanah basah sepanjang tahun dengan tanaman dan populasi hewan serta manusia menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Menurut Han Knapen (2001)[12] bahwa air menentukan kehidupan masyarakat di Kalimantan.

Daerah aliran Sungai Mahakam berkisar dari Melak hingga muara rawa dan menjadi bagian antara Tenggarong dan Muara Pahu, yang memunculkan danau terendah. Perubahan arus di sungai sangat terasa sampai Tenggarong. Akan tetapi, tentang pengaruh paling besar, aliran air yang muncul dari pegunungan mengakibatkan sebagian dataran rendah Kutai Barat tergenang setiap tahunnya. Itulah yang kemudian menyebabkan penduduk yang tinggal di sepanjang anak sungai-anak sungai itu membangun rumah di dataran yang lebih tinggi dalam satu rangkaian kehidupan. Hanya Tenggarong yang terletak di tepi daerah yang mudah banjir memiliki sebuah kolam sungai, namun seringkali memunculkan kesulitan. Sebagai gambaran kondisi dari sebuah desa sungai adalah sebuah daerah yang terletak di dataran tinggi yang memiliki jalan desa yang berada dengan sederet rumah di tepiannya. Di belakang deretan rumah itu terletak dataran lebih rendah yang berawa, dan di belakangnya terbentang hutan tanah berawa yang semula hanya dataran perbukitan yang kering.[13]

Sementara kolam sungai yang membentuk sebuah danau yaitu di Mahakam yang terdapat tiga danau besar yakni Kenohan Semayang dekat Kota Bangun di sebelah utara sungai, Kenohan Tempatung dekat Muara Muntai di selatan sungai, dan sedikit ke arah barat Kenohan Jempang. Sungai ini terhubung dengan danau melalui sebuah *antasan*. Permukaan air tinggi muncul di kolam secara rutin dari November sampai Mei. Posisi air terendah pada setiap Agustus–Oktober. Kondisi ini berdampak pada aktivitas petani sawah untuk menanam padi. Di masa ketika air banjir turun merupakan masa yang tepat bagi petani untuk menanam padinya, kecuali tidak sedang di musim kemarau saat terjadi kekeringan di mana danau hampir tidak berair.[14]

---

12 Han Knapen, *Forest of Fortune, The Environmental History of Southeast Borneo, 1600–18*80, (Leiden: KITLV Press, 2001), hlm. 30–31.

13 R. Broersma, Op.Cit., 1927, hlm. 202.

14 *Ibid*., hlm. 202–203.

Daerah Kayan, di aliran hilir Sungai Bulungan, menjadi delta besar dengan Muara Makapan sebagai perairan terbaik untuk mencapai Tanjung Selor, 40 mil dari pantai, ibu kota *onderafdeeling* ini. Alirannya menawarkan pemandangan lain selain Sungai Mahakam dan Sungai Berau. Jika tempat ini dipenuhi dengan pohon bakau, di Sungai Bulungan orang menemukan tanaman lain meskipun juga langka, karena terhalang oleh sungai dan laut, yang membenamkan seluruh delta yang tidak berpenghuni itu. Pada permukaan air tinggi, kapal-kapal dengan kedalaman 3,3 meter bisa menemukan jalan ke Tanjung Selor, tempat delta dimulai.[15]

Curah hujan di Kalimantan termasuk kategori tertinggi di dunia, yaitu mencapai rata-rata lebih dari 4.000 mm/tahun. Ketinggian tingkat curah hujan tersebut turut memengaruhi pasokan air sungai di daerah pedalaman Kalimantan. Daerah Samarinda memiliki curah hujan tahunan rata-rata masih 2.000 mm, dengan perincian dari November–Mei rata-rata 180 mm/bulan, dan dari Mei–November rata-rata 120 mm/bulan. Sementara di daerah danau terjadi sebaliknya, di curah hujan mencapai rata-rata 1.500 mm/tahun, dan di Long Iram lebih dari 3.000 mm/tahun. Kondisi iklim seperti itu memberikan peluang yang baik bagi perekonomian para petani. Penduduk dapat menanam padi di belakang dataran tinggi dan dataran rendah (rapak) di antara perbukitan yang ada di sebelah selatan Kota Bangun dan Danau Jempang. Penduduk yang pandai memperhitungkan masa tanam dengan musim yang ada bagi pengairan tanaman padi akan mendapatkan hasil panen yang baik.[16]

Hasil kajian Knapen (2001)[17] menginformasikan bahwa data mengenai curah hujan pertama yang tersedia untuk Kalimantan Selatan, terutama untuk Banjarmasin menunjukkan ketidakteraturan iklim. Menurutnya, sejak 1858 Banjarmasin memiliki 211 hari hujan, namun pada tahun 1860 hanya 114 hari.[18] Selain ketidakteraturan curah hujan, di daerah Kalimantan Selatan seringkali terjadi hembusan badai yang

15 R. Broersma, *Op.Cit*., 1927, hlm. 235..

16 *Ibid*., hlm. 202–203.

17 Han Knapen, *Op.Cit*., 2001, hlm. 43..

18 *Ibid.,* hlm. 37–38.

mengakibatkan kerusakan pada rumah, kebun, barang, dan tanaman. Badai tersebut muncul mulai dari daerah pesisir hingga ke pedalaman Hulu Sungai. Di samping itu angin barat yang kencang menjadikan Kalimantan Selatan sulit dijangkau oleh kapal-kapal layar. Oleh karenanya, kebanyakan perdagangan antardaerah terjadi pada musim kemarau. Pada musim badai itu, banyak kapal lenyap atau terhempas oleh gelombang di lepas pantai selatan dan timur Kalimantan. Seperti yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 1853, angin kencang menghantam sebuah kapal batu bara berbobot 400 ton hingga tenggelam. Kurang dari dua bulan sebuah gudang batu bara ambruk diterpa badai besar.

Di samping angin kencang atau badai, pada musim kemarau hal kebakaran menjadi masalah krusial di Kalimantan Selatan. Hutan Kalimantan Selatan dengan segala potensi produksinya yang sangat penting bagi penduduk seringkali mengalami kebakaran. Peristiwa kebakaran yang sering terjadi di hutan Kalimantan menjadi daya tarik para peneliti antara anggapan disebabkan oleh faktor manusia atau oleh penyinaran matahari dan fenomena alam lainnya. H. von Gaffron melaporkan tentang adanya kebakaran hutan kayu galam (*Melaleuca Leucadendron*) dekat Kotawaringin seluas 6.500 km^2 yang diduga akibat adanya benturan antar batang pohon. Kebakaran tersebut terjadi di musim kemarau tahun 1846. Menurutnya, kebakaran hutan alami dapat berakibat perubahan formasi hutan kayu ulin (*Zwageri Diroxylon*). Regenerasi yang lambat bersama dengan penebangan ceroboh dengan mudah menghilangkan sejumlah besar jenis pohon kayu ini. Pada tahun 1930 Scophuys juga mencatat seluas 772 km^2 hutan kayu ulin yang masih ada di Kalimantan Selatan pada lokasi yang sulit dimasuki sepanjang Kahayan Hulu, Kapuas, dan Barito serta beberapa darinya telah mengalami penipisan.[19] Peristiwa kebakaran hutan seperti itu memberi pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat Kalimantan yang bergantung pada potensi air dan hutan. Broersma (1927) menyatakan sesungguhnya kekayaan terbesar Kalimantan Selatan adalah hutan, setidaknya bagi penduduk di sana. Di daerah Pulaulaut, desa-desa penduduk kebanyakan terletak di daerah pantai dengan tanaman padi, kebun-kebun lada, karet,

19 Han Knapen, *Op.Cit.*, 2001, hlm. 50-51.

dan kelapa sawit. Penduduk di Pulaulaut itu memiliki cukup tanah dan hutan yang menghasilkan kayu, rotan, dan damar.[20]

Perekonomian masyarakat Kalimantan Selatan juga berkembang dengan pengolahan berbagai jenis sumber mineral yang ditemukan di daerahnya di sekitar pegunungan dan bukit. Sumber mineral yang diperdagangkan sejak lama di antaranya emas, intan, besi, batu bara, dan minyak bumi. Dari penelitian Dr. L. Horner yang laporannya melalui Komisi Ilmu Alam telah disampaikan kepada pemerintah pada tahun 1837 berisikan keterangan mengenai Sungai Barito dan daerah intan dan emas di daerah Tanah Laut. Mengenai hal ini juga dilaporkan kembali oleh Gaffron, meski dianggap berlebihan diterbitkan tahun 1859, dengan menyatakan bahwa Tanah Laut memiliki kandungan emas sangat tinggi dan telah ditambang oleh orang pribumi dan Cina.[21]

Selain emas dan intan, bahan tambang terpenting lainnya adalah batu bara. Pada pertengahan abad ke-19, Gubernur Weddik sudah menyatakan bahwa berbagai tempat di wilayah Kalimantan Selatan mengandung kekayaan bumi. Itulah sebabnya pada tanggal 19 November 1846 Ratu Belanda memutuskan penyediaan anggaran per tahun sebesar *f*50.000 untuk menggarap "daerah baru" ini. Menurut Gubernur Jenderal Rochussen, anggaran tersebut dapat dilakukan melalui aparat pemerintah setempat. Oleh karenanya, pada tahun itu bukan hanya daerah pantai timur yang menerima *gezaghebber* sipil, tetapi juga pantai selatan yang awalnya berkedudukan di Kotawaringin namun kemudian pada tahun 1848 dipindahkan ke Sampit. Pada kesempatan itu juga Rochussen memberikan instruksi untuk menambang batu bara dan memilih daerah Riam dekat Martapura. Sementara itu, *Nieuwe Rotterdamsche Courant* pada tanggal 28 Agustus 1848 memuat laporan mengenai ditemukannya bijih besi di daerah Tambaga, kurang lebih perjalanan 2,5 jam dari Pleihari yang oleh orang-orang pribumi dan Cina telah ditambang untuk mendapatkan emas.[22]

---

20 R. Broersma, *Op.Cit.*, 1927, hlm. 15 dan 94.

21 Han Knapen, *Op.Cit.*, 2001 dan R. Broersma, *Ibid*, hlm. 4-6.

22 R. Broersma, *Ibid.*, hlm. 8–9.

Penambangan batu bara di wilayah Pulaulaut diketahui dari adanya sebuah jalan pedati sepanjang 16 km menuju lokasi penambangan. Para kuli tambang batu bara mengangkut batu bara dengan melewati jalur besi ke Setagen yaitu tempat yang dibangun untuk penimbunan batu bara (*stockpile*) dan dermaga bongkar muatnya. Lokasi ini terletak di selat laut yang menghubungkan daratan Kalimantan Selatan dengan Pulaulaut. Menurut Broersma (1927) lokasi penimbunan batu bara merupakan tempat yang memilki pemandangan sangat indah di Kalimantan Selatan.[23] Wilayah Pulaulaut terhubung dengan Banjarmasin melalui perairan pantai. Masyarakat yang berkepentingan dalam urusan perekonomian dengan kedua daerah ini terlebih dahulu menyeberangi sungai dan selat hingga mencapai daerah Batulicin. Itulah yang menjadikan aktivitas masyarakat di daerah-daerah hulu sungai tetap terhubung dengan masyarakat di daerah Pelabuhan Banjarmasin. Aktivitas perekonomian masyarakat di sepanjang jalur sungai di Kalimantan Selatan juga seperti terdapat di Sungai Negara dengan anak sungai-anak sungai Tapin, Amandit, Tabodarat, Barabai, Batang Alai, dan Balangan, yang menjalin relasi dagang dari bentang timur ke barat dan bermuara di Pelabuhan Banjarmasin. Dengan demikian, Pelabuhan Banjarmasin menjadi pintu keluar dan masuk bagi berbagai komoditas dagang. Sekalipun di bagian utara wilayah ini yaitu tepatnya di Lingkas terdapat Pelabuhan Pulau Tarakan yang sama ramainya untuk muara delta Sungai Sesayap yang memiliki luas 414 km^2. Diduga bahwa pulau-pulau di delta-delta Sesayap dan Sembakung, juga di Tarakan dan Bunyu dahulu menjadi satu dengan daratan Kalimantan dan sungai-sungai serta lautnya yang membentuk parit.[24]

Broersma juga menceritakan adanya aktivitas masyarakat hulu sungai di daerah Riam Kiwa, sebuah daerah dengan pemandangan lembah rumput hijau yang luas, pepohonan, dan persawahan yang luas pula. Daerah ini terletak pada 80 km batas selatan Hulu Sungai, dekat dengan Kampung Tambarangan, serta mendekati Benua Padang. Menurutnya batas timur seluruh *afdeeling* Hulu Sungai terletak di Pegunungan Meratus, di seberang daerah Tanah Bumbu dan Pasir. Di bagian timur

23 R. Broersma, *Op.Cit.*, 1927, hlm. 15.

24 *Ibid.*, hlm. 111-112 dan 242.

onderafdeeling ini orang menjumpai daerah perbukitan, sementara *onderafdeeling* Tanjung di utaranya hampir semuanya terdiri atas tanah pegunungan rendah. Dari *onderafdeeling* lain, di bagian baratnya tampak rendah dan kebanyakan berawa—daerah aliran Sungai Negara dan Barito. Di daerah peralihan antara dataran rendah ke tanah tinggi terletak daerah persawahan padi di sekitar Rantau, Kandangan, Amuntai, dan Barabai. Hutan dataran rendah berada di sebelah barat, sementara hutan rimba di daerah pegunungan timur. Di bagian tengahnya yakni *onderafdeeling* Amuntai, Kandangan, dan Barabai, yang berpenduduk lebih padat daripada daerah lainnya di utara.

Daerah Hulu Sungai memiliki curah hujan tahunan rata-rata 2.500 mm, di daerah ini selalu ada air sungai yang mengalir perlahan ke hilir. Jika Sungai Negara dan Sungai Barito banjir yang bagi petani Banjar dianggap sebagai masa normal, maka lumpur dan air akan menggenangi tanah rawanya. Berbeda halnya pada masyarakat di dataran rendah, ketika air banjir surut mereka dapat melaksanakan aktivitas di sawah dan memanen padi dengan baik. Masyarakat Banjar menyebut istilah 'padi sala tahun' untuk pertanian padi yang fluktuatif karena berpatokan pada jumlah pasokan air dari hulu sungai dan curah hujan. Istilah "padi sala tahun" menunjukkan petani Banjar yang ketergantungan pada turunnya hujan dan pasokan air yang banyak dari hulu sungai dalam menentukan musim tanam dan musim panen padi. "Padi sala tahun" terjadi sekali dalam 3 atau 4 tahun. Penanaman padi sala tahun dilakukan oleh para petani di Amuntai, Alabiu, dan Kalua. Apabila perhitungannya tepat antara musim hujan dan pasokan air dari hulu sungai itu, mereka akan memanen padi dengan hasil yang bagus dan banyak sekitar 600.000 pikul padi, yang setelah proses penggilingan yang baik menghasilkan sekitar 200.000 pikul beras. Lain halnya apabila memasuki musim kering, petani padi mengalami gagal panen. Hama padi kebanyakan adalah tikus. Bahkan hama tikus ini pun berdampak pada kemunculan wabah pes di masyarakat Kalimantan Selatan. Wabah tikus di musim kemarau juga mematikan binatang ternak. Musim kemarau banyak menghambat aktivitas perdagangan dan pertanian di daerah ini.[25]

25 R. Broersma, *Loc.Cit.*, 1927, hlm. 113.

Menurut Bock, musim kering atau kemarau merupakan musim paceklik bagi perekonomian masyarakat. Musim kemarau juga merupakan musim penyakit. Selain wabah penyakit pes akibat hama tikus yang mengganggu area persawahan penduduk, muncul juga penyakit malaria, diare, disentri, kulit, kolera, penyakit kekurangan garam, dan cacar. Di musim penyakit ini banyak penduduk yang menjadi korban dari wabah. Angka kematian akibat malaria, cacar, dan kolera melanda Kalimantan Selatan, selain daerah lainnya di Kalimantan. Bock menuliskan bahwa "penyakit yang melanda penduduk Kalimantan, umumnya disebabkan kualitas air yang buruk yang dikonsumsi oleh penduduk di musim kemarau".[26] Dalam kondisi seperti itu, pada masyarakat Dayak dan Punan, mereka memiliki cara menghadapi wabah penyakit secara turun temurun. Seperti dengan melakukan upaya isolasi dengan caranya sendiri. Seluruh desa di kedua daerah itu menutup diri (*lockdown*) selama delapan hari dari semua hubungannya dengan pihak luar. Upaya isolasi tersebut disebutnya sebagai *tabu* atau *pamali penyakit.* Jangka waktu isolasi itu dipandang sebagai sebuah masa paling parah dalam proses persebaran penyakit. Dalam kondisi seperti itu seluruh desa di Dayak dan Punan menjadi hening atau sunyi karena tidak ada kontak sosial dan ekonomi di antara mereka dan dengan pihak luar. Dalam kondisi yang lebih parah, yaitu saat persebaran wabah penyakit melebihi dari jangka waktu 8 hari, penduduk desa mencari tempat yang lebih aman yaitu yang dipandang tidak tercemar dari bibit penyakit dan penularannya. Mereka pergi ke pedalaman untuk jangka waktu lama.[27]

Perilaku masyarakat Kalimantan Selatan dalam menyikapi persebaran penyakit tersebut menggambarkan adanya budaya hidup sehat di antara mereka. Mereka memahami kondisi lingkungan yang sehat yang bisa ditempati untuk berbagai aktivitasnya, terutama perekonomiannya. Seperti beberapa kali diungkapkan Knapen (2001)[28] bahwa sejak masa silam organisasi sosial-ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan saling keterkaitan dengan lingkungan geografis dan ekologisnya.

---

26 Bock, *Reis in Oost- en Zuid-Borneo, van Koetei naar Banjermassin*, ('sGravenhage: Martinus Nijhoff, 1887), hlm. 112; Lihat pula Han Knapen, *Forest of Fortune…*, hlm. 10–11.

27 Han Knapen, *Forest of Fortune…*, hlm. 16.

28 *Ibid*., hlm. 5 dan 37–38.

KARAKTERISTIK DEMOGRAFI DAN SOSIAL-EKONOMI

Secara keseluruhan Kalimantan berpenduduk jarang namun memiliki sumber daya alam berlimpah. Meskipun demikian, ada juga daerah-daerah dengan penduduk agak rapat seperti di daerah Hulu Sungai dan pusat-pusat populasi seperti perkotaan. Secara umum penduduk asli di kawasan Kalimantan adalah yang disebut suku Dayak dan Banjar. Berdasarkan teritorial, penduduk suku Dayak umumnya tinggal di daerah hulu (pedalaman dan dataran tinggi), sedangkan penduduk suku Banjar bersama para pendatang lebih kemudian menetap di daerah hilir (muara dan pantai). Keterangan ini hanya merupakan perkiraan kasar didasarkan pada sumber-sumber sejarah masa kolonial. Dari sumber ini pula diketahui bahwa umumnya suku Dayak dan suku Banjar serta pendatang membentuk permukiman di sepanjang tepi sungai dan pantai. Dalam kepentingan memanfaatkan sumber daya alam Kalimantan suku Dayak, Banjar, dan suku-suku bangsa pendatang, baik yang kemudian menetap maupun tidak saling berinteraksi.

Kondisi politik dan ekonomi sangat berubah akibat pengaruh asing, dalam hal ini terutama bangsa Barat yang semakin intens masuk ke pedalaman dan memengaruhi pola permukiman, pertanian, perdagangan, dan demografi Kalimantan Selatan. Daerah ini telah menjadi tempat tujuan para pedagang luar untuk mendapatkan komoditas dagang yang laku di pasar global seperti lada, damar, rotan, lilin, getah perca, sarang burung, kemudian karet, kayu, batu bara, dan minyak bumi. Berbagai komoditas dagang dari hutan Kalimantan itu diangkut dengan perahu, rakit, maupun kapal dengan menyusuri jalur-jalur air.

Relasi dagang yang terjalin antara masyarakat Kalimantan Selatan dengan pihak luar, memicu pedagang dari luar menetap di daerah ini sebagai penduduk Kalimantan Selatan. Wilayah Kalimantan sejak abad ke-15 di bawah kekuasaan para raja. Pada abad ke-16 berdiri Kesultanan Banjarmasin melanjutkan Kerajaan Dipa dan Kerajaan Daha. Oleh karenanya, para pendatang yang kemudian menetap di daerah ini harus mendapat izin tinggal dari para sultan. Dalam kelompok-kelompok

kesatuan etnis, masing-masing membangun permukiman-permukiman, terutama di daerah-daerah hilir dan pantai. Oleh sebab itu, dalam pengertian terbatas, penduduk Kalimantan Selatan terdiri dari penduduk asli yaitu Banjar dan Dayak serta para etnis pendatang seperti Jawa, Bugis, Makassar, Madura, Bali, Lombok, dan orang Melayu lainnya dari Sumatra. Para pendatang dari luar Nusantara seperti bangsa Timur Asing yaitu Cina dan Arab serta bangsa Eropa, terutama Belanda.

Gambar 1.3. Kampung Cina Banjarmasin 1870
Sumber: Koleksi KITLV IC.2927.

Meskipun demikian, pada masa kolonialisme Belanda terdapat aturan atau perjanjian antara pihak kesultanan yaitu Sultan Banjarmasin dengan pihak Belanda tentang pembagian hukum kependudukan. Perjanjian tersebut disepakati kedua belah pihak itu terutama untuk memisahkan hukum kependudukan antara Eropa dan pribumi. Berdasarkan isi ketentuan kesepakatan itu, seperti yang diberlakukan kepada para pendatang yaitu bangsa Eropa, bangsa Timur Asing, dan pribumi dari daerah lain tidak secara langsung kedudukannya berdasarkan hukum di bawah kesultanan, melainkan berada di bawah hukum dan peraturan administratif kolonial Belanda. Sementara bagi penduduk pribumi setempat, yakni Banjar dan Dayak, merupakan rakyat kerajaan yang dalam hal hukum dan peraturan berada langsung di bawah kekuasaan sultan dan perangkat kesultanan.

Seperti dalam Akta 13 Agustus 1787 pasal 7 disebutkan bahwa penduduk Cina, Bugis, Makassar, Mandar, Bali, dan lainnya yang bukan asli dari daerah setempat berada langsung di bawah peraturan dan hukum pemerintah kolonial Belanda. Hal itu dipertegas kembali melalui pasal 14 dan 15 Kesepakatan 1 Januari 1817. Pasal 14 menyatakan bahwa segala perkara pada penduduk asli, yaitu Banjar dan Dayak, mengikuti kebiasaan hukum Kesultanan Banjarmasin dan dalam hal itu diselesaikan oleh sultan dan perangkatnya. Pasal 15 menyebutkan bahwa perkara-perkara yang menyangkut orang Eropa, Cina, Arab, Bugis, Makassar, Bali, Mandar, Jawa, dan lainnya yang bukan penduduk asli, diselesaikan secara hukum dan peraturan Belanda yang dalam hal ini diselesaikan oleh residen dan perangkatnya.[29]

Berdasarkan pandangan W. F. Wertheim (1956), secara garis besar penduduk asli Kalimantan terdiri dari Melayu Tua (Dayak Umum) dan Melayu Muda. Kelompok kedua umumnya mendiami daerah sepanjang pantai selatan dan timur Kalimantan yang biasanya disebut sebagai orang Banjar. Dalam hal lebih umum, Wertheim juga menyatakan bahwa kadang-kadang etnis seperti Minangkabau di Sumatra Barat, Banjar di Kalimantan Selatan dan Timur, Betawi di Batavia, disebut orang Melayu ketika istilah itu digunakan, dan sebagai sebutan kolektif bagi bangsa-bangsa itu yang dipakai oleh rezim kolonial Belanda adalah *inlanders* (pribumi). Berbeda dengan mereka adalah minoritas asing bangsa Eropa dan bangsa Timur Asing.[30]

Menurut Wertheim memang ada suku Banjar asli, mereka ini menempati daerah-daerah Hulu Sungai, Banjarmasin, Martapura, Pleihari, dan pantai Kalimantan Selatan dan Timur pada umumnya (antara Pagatan dan Pasir).[31] Di lain pihak, J. M. Castelein mengabstraksikannya dengan pernyataan bahwa orang Banjar dari abad ke-17 sampai dengan abad ke-19 masih dalam pertumbuhan yang merupakan antitesis dengan orang

---

29 Arsip Nasional RI, *Surat-Surat Perjanjian antara Kesultanan Bandjarmasin dengan Pemerintah V.O.C., Bataafse Republik, Inggris dan Hindia-Belanda, 1635–1860*, (Jakarta: ANRI, 1965), hlm. 96, 112, 203–204.

30 W. F. Wertheim, *Indonesia Society in Transition*, (Bandung: Sumur Bandung, 1956), hlm.1, 20–21, dan 24.

31 *Ibid*., hlm. 24. Periksa juga Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun: Alam dan Kebudayaan*, (Jakarta: Jayakarta Agung, 1979), hlm. 206.

Biaju. Mereka terhubung dengan kerajaan-kerajaan Jawa, baik sebagai kawan maupun lawan, serta dalam persengketaan yang terus meningkat terhadap orang Makassar dan Bugis.[32] Sementara itu, Broersma (1927) memberikan gambaran bahwa orang Banjar, awalnya kebanyakan tinggal di Hilir Barito. Mereka merupakan percampuran Melayu, Jawa, Madura, Arab, dan lain-lain. Terdapat juga orang Bugis dan Makassar yang tinggal di daerah pantai Kalimantan Selatan dan Timur. Mereka semua menggantungkan hidupnya dari pertanian, perdagangan, nelayan, dan pertambangan. Mereka kemudian tersebar mendiami daerah-daerah aliran sungai yang terdapat di daerah Kalimantan Selatan dan Timur. Mereka secara tetap berhubungan dengan Jawa, Sumatra, dan Malaka.[33]

Penduduk Kalimantan Selatan, baik penduduk asli Banjar dan Dayak maupun pendatang, umumnya membentuk permukiman di sepanjang tepi sungai dan pantai. Dalam hal memperluas permukiman yang sudah terbentuk, bisa terjadi kemudian mereka membangun rumah-rumah baru di sepanjang jalur kanal dan di sekitar perairan danau. Konsentrasi di daerah perairan itu menumbuhkan kegiatan perdagangan, industri, pertanian, peribadatan, dan lain sebagainya yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Rumah-rumah yang mereka bangun itu tersusun berbanjar mengikuti jalur air yang ada. Untuk hubungan jarak pendek di lingkungan permukiman tersebut terdapat jalan darat setapak, namun umumnya berupa titian.

Pada tahun 1880 Bock diberitahu oleh Asisten Residen bahwa Distrik Negara memiliki penduduk 300 ribu. Selama tahun 1830-an dan 1840-an penafsiran ini berkisar pada 100 ribu jiwa. Memang penafsiran ini dibuat lebih dari 50 tahun lalu, namun diperhitungkan bahwa penduduk naik pada saat itu sekitar 200 ribu jiwa yang berarti terjadi kenaikan 4.000 per tahun. Angka yang mengejutkan ini mendorong Bock untuk menyimpulkan bahwa daerah itu tumbuh dengan makmur karena berada di bawah kekuasaan Belanda.[34]

---

32 M. Idwar Saleh, *Sedjarah Bandjarmasin*, (Bandung: KPPK Balai Pendidikan Guru, 1958), hlm. 8. Orang Biaju digolongkan sebagai salah satu suku Dayak yang pada mulanya mendiami daerah-daerah pesisir Kalimantan Tenggara. Castelein mengungkapkan bahwa permusuhan antara orang Banjar dan Bugis-Makasar berlangsung turun temurun selama abad XVIII.

33 R. Broersma, *Loc.Cit.*, 1927, hlm. 17.

34 Han Knapen, *Loc.Cit.*, 2001, hlm. 13 dan 15.

Laporan perjalanan Bangert ketika melayari Sungai Kelua ke daerah Manyaan pada tahun 1857, menjelaskan bahwa di sekitar sungai-sungai itu orang Banjar membangun permukiman secara terpisah dari permukiman orang Dayak.[35] Hal semacam itu merupakan gejala umum di daerah Kalimantan Selatan. Meskipun banyak suku bangsa yang saling berhubungan tetapi dalam hal permukiman umumnya dibangun tersendiri dalam kelompoknya masing-masing. Sementara menurut Maks (1861) yang pernah bertugas beberapa tahun di Kalimantan Selatan sebagai *civiel gezaghebber* dan sangat mengenali daerah Sungai Kahayan (Dayak Besar) dan Sungai Kapuas (Dayak Kecil), bahwa ketika ia mengunjungi Tanggulan di tahun 1854 hanya menyaksikan sebuah rumah Dayak. Akan tetapi, lima tahun kemudian (1859) telah terdapat 21 buah rumah dan beberapa di antaranya yang agak terpisah merupakan rumah orang Banjar. Perkembangan permukiman itu merupakan upaya Rott, seorang zending yang berhasil mengajak penduduk dari daerah-daerah anak sungai seperti dari Sungai Puntik, Klaten, Manusup, Penda Ketapi, Kranen, Lonok, Jangkit, Bawe, Tungo, Pitong, dan Njamo untuk bertempat tinggal di Tanggulan. Rott dalam hal ini juga berhasil mendirikan sekolah zending di Tanggulan, dengan murid sekitar 80 orang, berusia antara 6 dan 12 tahun ketika itu.[36]

Pada tahun 1850-an penduduk di daerah Pulau Petak sudah mencapai sekitar 3.000 jiwa. Mereka hidup berladang dan mengumpulkan hasil hutan seperti lilin, damar, dan rotan. Bagi mereka hutan merupakan jantung kehidupannya. Oleh karenanya, dalam tradisi mereka terdapat aturan untuk tidak melarang seorang pun di antara mereka memotong dan memperdagangkan rotan. Mereka bebas mengolah hasil hutan selama tidak merusaknya. Mereka menjalin relasi dagang dengan pihak luar sehingga banyak di antara mereka memiliki perahu untuk berdagang dari hasil ladang dan hutannya. Kontak dagang dengan dunia luar

35 Lesley Potter, "Banjarese in and Beyond Hulu Sungai, South Kalimantan: A Study of Cultural Independence, Economic Opportunity and Mobility", dalam J. Thomas Lindbland (ed). *New Chalenges in the modern Economic History of Indonesia*, (Leiden: Programme of Indonesia Studies, 1993), hlm. 268. Periksa juga A. W. Nieuwenhuis, *Di Pedalaman Borneo: Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda,* (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 297.

36 H. G. Maks, "Reis Naar Kapoeas en Kahajan in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo", *TBG* Bag. X, (Batavia: Lange & Co., 1861), hlm. 470–471.

biasanya terjadi dalam siklus tiga bulan, karena pada siklus itulah perahu-perahu dagang dari berbagai daerah luar berdatangan ke daerah itu.[37]

Selain itu, Maks mencatat tentang penduduk di daerah Kapuas (Dayak Kecil). Secara keseluruhan, penduduk di daerah Kapuas di tahun 1865 berjumlah 12.035 jiwa. Jumlah tersebut sedikit lebih besar dari yang dikemukakan Meyners yaitu 11.600 jiwa pada tahun yang sama, dan lebih kecil dari perkiraan Hoevel yaitu 16.180 jiwa untuk daerah Dayak secara keseluruhan (Kahayan dan Kapuas) pada tahun 1850-an. Meskipun demikian, baik Maks, Meyners, dan Hoevel memiliki kesepahaman dalam hal permukiman dan mata pencaharian penduduk Kalimantan Selatan. Menurut ketiganya, permukiman penduduk Kalimantan Selatan berada di sepanjang tepi jalur-jalur air dan mata pencahariannya adalah berladang, mencari hasil (hutan berupa lilin, damar, getah perca, dan rotan), dan berdagang di sepanjang sungai dengan menggunakan perahu sebagai sarana transportasinya.[38]

Dalam laporan-laporan perjalanan ketiga orang Eropa itu, tidak hanya mencatat tentang jumlah penduduk di daerah Dayak, namun juga tentang pemimpin-pemimpin dari berbagai permukiman yang ditemukannya, jenis bidang usaha penduduk, jenis rumah yang ditempati penduduk, bahkan pembagian-pembagian wilayah hingga ke tingkat distrik dan onderdistrik. Maks mencatat permukiman termasuk para pimpinannya, Hoevel (1857) mencatat jenis bidang usaha dengan menyebutkan dari 16.180 jiwa penduduk sekitar 4.550 jiwa adalah yang aktif di sektor industri kerajinan. Dia juga mencatat jenis rumah terapung (*lanting*) yang dihuni oleh sebagian penduduk Kalimantan Selatan yaitu terutama orang Bakumpai dan beberapa orang Banjar. Sementara Meyners mencatat secara rinci tentang keseluruhan daerah Kalimantan Selatan dalam pembagian wilayahnya sampai ke tingkat distrik dan onderdistrik.[39]

---

37 H. G. Maks, "Reis Naar Kapoeas en Kahajan in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo" …, hlm. 471–473.

38 *Ibid.*, hlm. 539. Lihat pula H. G. J. L. Meyners, *Bijdragen tot de geschiedenis van het Bandjermasinsche Rijk*. 1863–1886 (Leiden: E. J. Brill, 1886), hlm. 4; W. R. van Hoevel, "Opmerkingen en Aanteekeningen Gehouden op Eene Reis op de Rivier van Banjermasin", *TNI* Bag. II tahun Ke-13, Zalt bonnel: Joh Nonen en Zoon, 1857, hlm. 20.

39 H. G. J. L. Meyners, *Ibid.*, hlm. 1–11. Lihat H. G. Maks, *Ibid.*, hlm. 538–539, 540, dan 556–557.

Gambar 1.4. Rumah Lanting (Terapung) di Antasan Kuin Banjarmasin 1899
Sumber: Koleksi KITLV IC. 7437.

Di daerah Kapuas Atas yang menjadi pemimpin/kepala utama adalah Temenggung Hunjun dan yang menjadi kepala kedua adalah Mangku Pati. Sementara Pati Singa Jaya (Mawong) sebagai kepala di Sirat di bawah Temenggung Hunjun. Mereka merupakan kepala-kepala pribumi yang kemudian statusnya ditetapkan berdasarkan surat keputusan residen. Sementara di daerah Kapuas Bawah kepala utamanya adalah Temenggung Jaya Negara yang bertempat tinggal di Pulau Talu. Adapun di Mentangi dan Kapuas Tengah yang menjadi kepala utamanya adalah Temenggung Singa Negara yang bertempat tinggal di Tangguhan.[40] Pada saat Maks berkunjung ke daerah Pulau Talu (1865) jumlah penduduknya sekitar 2.200 jiwa. Mereka bermata pencaharian mengumpulkan hasil hutan seperti rotan, tengkawang, dan berbagai jenis kayu untuk bangunan seperti kayu bulan, halei, panaga, dan galam. Menurutnya, di daerah ini terdapat puluhan anak sungai di antaranya yang bermuara di bagian sebelah kiri Sungai Kapuas adalah Sungai Kumpai, Baru, Rutak, Luruk, Puntik, Tewe, Bakingking, Jajangkit, dan Baring; sedangkan yang

40 H. G. Maks, *Loc.Cit.*, 1861, hlm. 516-517 dan 539. Periksa pula Arsip Nasional RI, *Surat-Surat Perjanjian Antara Kesultanan Banjarmasin Dengan Pemerintah-Pemerintah*.

bermuara di sebelah kanan adalah Sungai Besaran, Bapalas, Malingkrik, Malinghai, Bahong, Sonbai, dan Kenamit. Di setiap sungai itu sedikitnya ada sebuah perkampungan dan sungai-sungai itu berfungsi sebagai media transportasi penduduk antarperkampungan tersebut dalam rangka mencari dan memperdagangkan hasil-hasil hutan serta sebagai sarana perhubungan antarpenduduk di daerah Pulau Talu.[41]

Berdasarkan temuan M. Idwar Saleh, masyarakat Banjar pada tahun 1860 dilihat dari dialek dan kebiasaannya (*custom)* terdiri tiga kelompok, yaitu: 1) Banjar Kuala, bermukim umumnya di daerah hilir Barito, Kota Banjarmasin dan Martapura. 2) Banjar Batang Banyu, bermukim di sepanjang tepian Sungai Negara dan Tabalong, dari Margasari sampai Negara dan Amuntai sampai Kelua. 3) Banjar Pahuluan yang berada di daerah-daerah atas pada kaki bukit Meratus, dari Tanjung sampai Berabai, Kandangan, dan Rantau.[42] Pada tahun itu total populasi untuk wilayah Kesultanan Banjarmasin dan sekitarnya mencapai 415.927 jiwa. Atau keseluruhan penduduk di wilayah Keresidenan *Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo* ketika itu tercatat 813.182 jiwa dengan kepadatan 1,8 jiwa per km^2. Sekalipun demikian, beberapa sumber menyebutkan bahwa sampai akhir abad ke-19 di keresidenan ini jumlah penduduknya masih terbatas yaitu sekitar 1,25 juta jiwa yang terpusat di Banjarmasin dan Hulu Sungai. Seperti di dalam catatan Meyners pun dijelaskan bahwa di tahun 1860-an, terutama di tahun 1865, penduduk Hulu Sungai; *afdeeling* Amuntai sekitar 153.639 jiwa, namun belum terhitung penduduk Cina, Bugis, dan Arab. Adapun dalam catatan Potter di tahun 1880 populasi di daerah itu mencapai 250.000 jiwa. Catatan itu memperlihatkan adanya pertumbuhan penduduk cukup besar selama kurun lima belas tahun. Padahal menurut Potter sendiri tahun 1880-an merupakan masa terjadinya migrasi penduduk Hulu Sungai ke tempat-tempat lain.[43]

41 H. G. Maks, "Reis Naar Kapoeas en Kahajan in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo"…, hlm. 467–468.

42 Periksa Lesley Potter, "Banjarese in and Beyond Hulu Sungai…", hlm. 265.

43 *Ibid*., hlm. 269 dan 273. Lihat juga, H. G. J. L. Meyners, *Bijdragen tot de geschiedenis van het Bandjermasinsche Rijk*…, hlm. 1 dan 9. R. Broersma, *Loc.Cit*., 1927, hlm. 16.

Sementara itu, di tahun 1860-an daerah bagian barat yaitu di Kotawaringin berpenduduk umumnya orang Dayak Ngaju dan Ot-Danum. Anak suku-anak suku Ngaju tersebar mendiami daerah Sampit, Katingan, Tamuan, Saranau, Tualam, Saruyan, dan Mantaya. Semua nama itu merupakan nama sungai sekaligus menjadi nama masing-masing anak suku Dayak Ngaju. Sedangkan masing-masing anak suku Ot-Danum mendiami daerah Sungai Sabaung, Sahiai, dan Tangguhan. Sebagian lagi tinggal di daerah aliran Sungai Kapuas (Dayak kecil). Pada tahun itu Residen Kotawaringin mengeluarkan keputusan mengangkat Kidung sebagai kepala daerah Rantau Pulut, Singa Negara untuk daerah Katingan, dan Nicodemus untuk daerah Kapuas. Masing-masing bergelar jabatan Tumenggung.[44] Di daerah bagian Timur (Kutai), jumlah penduduk di Mahakam Hulu sekitar 6.500 jiwa yang terdiri dari suku Seputan, Pnihing, Kayan, Long-Glat, Uma Suling, Bukat, Punan, dan Bahau. Suasana kehidupan lebih dikuasai oleh kegiatan orang Long-Glat yang sejak 1850 memegang supremasi di situ. Kebudayaan mereka merupakan yang termaju, namun sebagai keseluruhan telah kehilangan pengaruh politiknya setelah mereka terbagi atas beberapa permukiman di bawah pimpinan banyak kepala.[45]

J. J. Meijer (1864) menyimpulkan bahwa arsip-arsip kolonial tentang Kalimantan yang ia gunakan, menjelaskan bahwa di daerah Tanah Laut pada pertengahan abad ke-18 dihuni oleh sejumlah kecil orang Dayak, dan kampung mereka yang disebut Mantiwah merupakan kampung tertua di Tanah Laut. Sedikit ke arah Timur Pleihari, terdapat orang Bukit (Abalang) yang terdiri dari beberapa keluarga dan membentuk permukiman di Bukit Karamaian. Jumlah mereka tak lebih dari 200 jiwa yang memenuhi nafkah hidupnya dengan berladang. Namun, saat itu relasi dagang antara Tanah Laut dengan Banjarmasin belum terjalin.[46]

Pendapat tersebut relevan dengan yang diungkapkan oleh Schophuys di dalam disertasinya yang menjelaskan tentang sektor

44 H. Mallinckrodt, "De Adat Gemeenschappen in Zuid-Borneo", *Koloniale Studien,* Bag. I tahun ke-2, (Weltevreden: Albrecht & Co., 1918), hlm. 126–128 dan 136.

45 A. W. Nieuwenhuis, *Di Pedalaman Borneo* ..., hlm. 227–229.

46 J. J. Meijer, "De Tanah-Laoet", *TBG* XIV Seri 4 Bag.V, (Batavia: Lange & Co., 1864), hlm. 381–384.

pertanian penduduk di Lembah Barito. Menurutnya bahwa berbicara tentang kepadatan penduduk Kalimantan yang luasnya sekitar 22 kali luas negeri Belanda di masa kolonial, adalah hanya sekitar 4 jiwa per km^2. Oleh karenanya, orang tidak akan menduga adanya dinamika sosial-ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.[47] Padahal, didapati pula sumber-sumber kolonial bahwa kadang-kadang kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan tampak lebih makmur dan damai. Pertumbuhan penduduknya lebih besar dan terlibat dalam aktivitas ekonomi yang menguntungkan. Pandangan Nerlando Sentris mengemukakan bahwa hal itu terjadi karena kekuasaan Belanda sudah mapan di Kalimantan bagian selatan dibandingkan dengan di bagian timur. Beberapa sumber kolonial menyebutkan bahwa pada abad ke-17 di Muara Teweh yaitu di paling utara Kalimantan Selatan sudah ada pos Belanda. Laporan Carl Bock menjelaskan bahwa di Muara Teweh hukum dihormati dan diperhatikan. Kejahatan ditangani oleh aparat hukum. Tenaga kerja dihargai dan dibayar serta perdagangan relatif tumbuh baik. Sekalipun orang Melayu dan Dayak di sini hanya sesekali berhubungan dengan orang kulit putih, bekerja bersama untuk kemakmuran mereka dan kebaikan negara.[48]

Ketika penduduk langka dan sumber daya alam berlimpah, kontrol atas penduduk kecil di daerah itu dipandang sangat penting. Kontrol atas penduduk terutama dilakukan untuk kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Seperti yang disampaikan Sultan Kutai kepada Carl Bock yakni berkeinginan menjadikan Kutai sebagai negara besar dan memiliki banyak penduduk. Sultan sendiri memiliki 42 orang istri termasuk 38 sebagai gundik dan 84 orang anak. Kontrol terhadap penduduk Kutai dilakukan mulai dari keluarganya sendiri. Aturan yang diberlakukan di antaranya bahwa tidak seorang pun dari mereka untuk meninggalkan kesultanan dan mereka yang pergi harus kembali jika perlu dijemput paksa. Untuk meningkatkan jumlah penduduk, dibuat kebijakan alternatif yaitu mendatangkan orang dari tempat lain. Untuk memenuhi keinginannya dan mengembangkan sumber daya alamnya, Sultan Kutai mengirimkan kapal uap ke Banjarmasin dalam rangka mengangkut

47 Han Knapen, *Forest of Fortune*…, hlm. 7.

48 *Ibid*., hlm. 13-14.

kaum emigran untuk tinggal di Kutai. Agen-agennya menyusuri Sungai Barito sampai ke daerah Amuntai yang berpenduduk padat. Para agen ini berusaha menarik sejumlah besar emigran dengan membayarkan utang yang mereka tanggung. Para agen juga menjanjikan kepada mereka petak lahan luas yang bebas di daerah timur Kalimantan, wilayah Kutai. Pertengahan tahun 1870 mulai berdatangan masyarakat Banjar dari Amuntai ke Kutai. Motivasi perpindahannya ke Kutai adalah menempati daerah yang dijanjikan sultan secara bebas dari pungutan biaya, serta melakukan usaha menggali hasil hutan. Migran Banjar itu kemudian menempati lokasi tepi sungai di sepanjang Sungai Mahakam, antara Muara Muntai dan Kota Bangun, suatu daerah dengan kondisi alam yang mirip tempat asal mereka.[49] Pada bulan Oktober 1879 kapal uap milik sultan telah berhasil mengangkut 414 orang asal Amuntai.[50]

Meskipun demikian, pada abad ke-19 itu banyak penulis memandang masyarakat Banjar sebagai masyarakat pedagang. Potter memandang masyarakat Banjar adalah masyarakat yang memiliki mobilitas sosial tinggi, sehingga pada suatu ketika pernah terjadi "eksodus" ke tempat-tempat jauh dari tempat asalnya dan mereka menetap di tempat barunya itu. Migrasi dalam jumlah besar ke berbagai wilayah itu bertujuan untuk berdagang hingga kemudian mereka menetap di daerah Riau dan Jambi di Sumatra, di Malaysia, di Pantai Utara Jawa bagian Timur, dan sebagian di Saudi Arabia.[51]

Nampak jelas bahwa sejak kurun waktu yang lampau hingga abad ke-19 itu dinamika kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan dan Timur Banjar dikuasai orang Banjar, karena seringkali pula mereka dipandang sebagai penduduk asli pemegang supremasi di daerah itu. Namun, di tahun 1859 yang memotivasi mereka bermigrasi adalah terutama menghindari kekuasaan langsung Belanda. Kasus ini terjadi khususnya setelah perang Banjarmasin. Mula-mula mereka berpindah ke kesultanan-kesultanan lain di Kalimantan yang belum atau kurang menerima

49 Lesley Potter, "Banjarese in Beyond Hulu Sungai, …" hlm. 270. Periksa pula A. W. Nieuwenhius, *Di Pedalaman Borneo …*, hlm. 252–254.

50 Han Knapen, *Op.Cit.,* hlm. 11–12.

51 Lesley Potter, "Banjarese in Beyond Hulu Sungai, …", hlm. 278–279, 286 dan 290.

pengaruh langsung kekuasaan Belanda. Selanjutnya menyusul ke tempat-tempat lebih jauh seperti ke daerah-daerah di Sumatra dan Semenanjung Melayu. Sekalipun awalnya secara garis besar berkelompok-kelompok dan bersama membentuk masyarakat Banjar, kemudian mereka berbaur dengan masyarakat di tempat barunya dan membangun kehidupan di daerah-daerah baru itu, seperti di Krian, Riau, dan Batu Pahat.[52]

Kelompok lain yang juga melakukan perpindahan ke daerah Kutai adalah kelompok orang Bakumpai, yaitu kelompok orang Dayak yang umumnya telah muslim tetapi tidak menyebut diri orang Banjar, meskipun kadang-kadang oleh pihak lain dikategorikan dan disebut orang Banjar juga. Di bawah pimpinan bang Juk, orang Bakumpai itu berlayar ke wilayah Mahakam itu, di muara Sungai Rata, mereka membangun permukiman dan melakukan perdagangan dengan orang-orang Bahau, serta mengeksploitasi hutan milik kepala-kepala suku setempat. Dalam hal itu, mereka juga bersaing dengan pedagang-pedagang Bugis dan sejak itu menjadi saingan utama mereka. Dalam perkembangannya mereka ternyata berhasil lebih berpengaruh dan tersebar di situ dalam jumlah yang semakin besar.[53] Di daerah yang disebut Uju Tepu terdapat dua kelompok permukiman. Di tepi kanan merupakan permukiman orang Bugis sebagai warga Kesultanan Kutai, sedangkan di tepi kiri merupakan permukiman orang Bahau di samping terdapat kelompok rumah terapung *(lanting*) orang Bakumpai. Di samping itu, di daerah Tepu itu bermukim pula pedagang-pedagang Banjar.[54]

Antara tahun 1885 dan 1888 serangkaian musim kering yang dahsyat dan banjir-banjir besar menghancurkan lahan rawa tanaman ekspor di daerah Hulu Sungai. Peristiwa masa itu merupakan tekanan berat bagi sektor pertanian (*cultivation*). Akibatnya, terjadi perpindahan dengan dimulai ke Semenanjung Melayu. Perpindahan populasi terbanyak ketika itu ke Distrik Pantai Perak, Pulau Pinang, dan di bagian utara Selangor. Di lain pihak, seperti ditulis oleh Masthof, bahwa irigasi yang kurang memadai dan kemungkinan tanam padi tahap kedua yang pupus di Distrik Kelua

52 *Ibid.,* hlm. 264–265.

53 A. W. Nieuwenhuis, *Di Pedalaman Borneo …,* hlm. 253.

54 *Ibid*., hlm. 256–258.

(Utara Amuntai) pada tahun 1888, menyebabkan masyarakat bermigrasi ke berbagai daerah agar dapat mengusahakan produksi padi.[55]

Pada mulanya orang Banjar asal Hulu Sungai berpindah sendiri-sendiri sebagai "buruh kuli", suatu pekerjaan yang tidak disukai penduduk asal Banjarmasin, seperti ke Sumatra Timur dalam tahun 1880–an. Berikutnya para migran tidak lagi individual melainkan secara komunal, berdasar kepada kelompok sanak famili, atau *bubuhan*.[56] Pengalaman orang Banjar yang terbiasa melayari sungai dan perairan daratan pada umumnya, kiranya turut mendorong mereka berjiwa pemberani melayari laut menuju tempat-tempat yang baru ke luar Kalimantan. Di awal abad ke-20 migrasi orang Banjar terjadi pada dekade-dekade awal, terutama sebelum adanya lonjakan karet pada 1920-an. Setelah produksi karet meningkat yang membawa kemakmuran bagi masyarakat Kalimantan Selatan, proses migrasi sedikit dilakukan. Mereka kembali dapat bertahan di tempat asalnya yang memberikan banyak keuntungan. Potter menganalisis tindakan kepeloporan orang Banjar dalam memulai sesuatu yang baru di mana pun, baik di Sumatra Barat maupun di Semenanjung Malaysia, saat kesempatan menguntungkan di daerah mereka menipis.[57]

Dapatlah dipahami bahwa dinamika perekonomian masyarakat Kalimantan Selatan sejak sebelum masa kolonial Belanda sangat berkaitan dengan kondisi geografisnya, yaitu daerah perairan. Kondisi tersebut menggambarkan sebuah peradaban masyarakat sungai yang berkesinambungan atau kontinuitas di Kalimantan Selatan, terutama suku Banjar.

Dalam kajian Lindblad,[58] seperti ungkapan Knapen menekankan adanya perubahan kontinuitas sebagai fondasi ekonomi modern, terutama di abad ke-19. Seperti aktivitas pengambilan kayu dan minyak bumi untuk ekspor serta peran lembaga keuangan atau perbankan yang dipengaruhi sistem perdagangan Eropa. Kondisi seperti itu terutama

55 Lesley Potter, "Banjarese in Beyond Hulu Sungai, …", hlm. 264–265.

56 *Ibid*. Periksa juga "De Oprichting van Volkscredietbanken Op de Buitenbezettingen", (*TBB* Bag. Ke-48), hlm. 86.

57 Lesley Potter, "Banjarese in Beyond Hulu Sungai, …", hlm. 264–265.

58 *Ibid*., hlm. 5–6.

terjadi akibat adanya pengaruh sistem politik dan ekonomi dari luar, dalam hal ini didominasi oleh kekuasaan Belanda, baik terhadap pola permukiman, pertanian, perdagangan, dan demografi. Bagi Lindblad masa ini merupakan masa Kalimantan Selatan terintegrasi ke dalam pasar dunia juga masa ketika budaya pendatang berhadapan dengan mentalitas dan gaya hidup pribumi dalam sikap yang intens dan langsung daripada sebelumnya. Menurutnya perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi setelah tahun 1880 sangat besar yang tidak pernah berlangsung sebelumnya. Asumsi Lindblad ini tidak berarti sebagai sebuah kepastian yang menutup sama sekali bahwa pada waktu sebelumnya tidak ada interaksi dan perubahan di wilayah Kalimantan Selatan.

Hal itu dapat terlihat di tahun 1870-an, saat kebutuhan dunia terhadap getah perca, yakni jenis latek yang pada saat itu banyak digunakan untuk menyambung telegram bawah laut trans-Atlantik, sangat tinggi. Alam Kalimantan memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan dalam perekonomian global itu. Kebutuhan terhadap getah perca tersebut telah mendorong penduduk Kalimantan Selatan, terutama suku Dayak, mengumpulkan getah perca dari hutan-hutan yang ada di lingkungannya. Meskipun terdapat kesan dalam hal pengelolaannya masih tradisional yang dipandang seolah tidak mempertimbangkan kelestariannya, namun komoditas getah perca tetap dibutuhkan pasar dunia. Penduduk Kalimantan Selatan mengambil getah perca itu dengan cara mengambil jalan pintas sebagai cara mudah, yaitu dengan menebang seluruh pohon sehingga getah perca berikutnya sulit diperoleh dan semakin langka. Cara seperti itulah yang menyebabkan komoditas produk hutan menurun dan tidak dapat lagi memenuhi permintaan pasar.[59]

Getah perca bukan satu-satunya produk hutan di Kalimantan Selatan. Sebagaimana sudah disinggung pada uraian sebelumnya, hutan Kalimantan Selatan menyimpan berbagai komoditas dagang. Orang Dayak dan orang Banjar berpenghasilan dari produk hutan juga produk pertanian dan perkebunan, seperti padi, jagung, ketela, ubi, pisang, dan tebu. Perlu dicatat bahwa sejumlah tanaman di kebun Kalimantan Selatan merupakan barang mewah yang menyebar dari dunia baru setelah

59 Han Knapen, *Loc.Cit.*, 2001, hlm. 12.

penemuan Columbus. Bock merasa lebih takjub lagi ketika menuju dan tiba di Hulu Sungai, tempat usaha orang Dayak dan orang Banjar. Dalam pandangannya, standar harga penduduk di sini ditetapkan sangat tinggi. Menurut Bock, penduduk di daerah itu tumbuh dengan makmur karena berada di bawah kekuasaan Belanda.[60]

Di daerah Penda Katimpung semua produk hutan seperti kayu ukir, lanan, bangkirai, blangiran, dan rangas serta lilin dan damar diangkut penduduk dengan perahu melalui sungai utama yaitu Sungai Mangkatip menuju permukimannya masing-masing mereka. Di daerah ini juga terdapat beberapa anak sungai yang bermuara ke Sungai Mangkatip, Katunjung, dan Mangkinan, sedangkan di bagian kanannya adalah Sungai Katimpung. Sungai Katunjung dan Katimpung digunakan penduduk setempat terutama untuk menuju ke lahan-lahan pertanian mereka. Lebar kedua sungai itu antara 138 dan 205 m dengan kedalaman antara 4,5 dan 5,25 m.[61]

Pada tahun-tahun curah hujan berlebih, seringkali terjadi banjir yang memusnahkan panen padi, perkebunan pangan, rumah, dan bangunan lainnya bahkan hilangnya nyawa. Di lain sisi, tahun sangat kering menyebabkan munculnya wabah pes, kematian ternak, kebakaran hutan, dan tingkat permukaan air sungai rendah yang menghambat aktivitas perdagangan dan transportasi khususnya.[62] Gagal panen dapat menyebabkan penduduk perdalaman kekurangan beras dalam waktu yang cukup lama. Pada tahun-tahun buruk seperti itu, panen sawah mereka hampir tidak memadai untuk menutup kebutuhan. Produk kebun dan sawah mereka hanya cukup untuk menutup kebutuhan primer saja. Sebagai contoh, musim kemarau di tahun 1878 terjadi sangat lama dan menyebabkan kelaparan penduduk. Sejumlah besar dari mereka bahkan harus bertahan selama setahun dengan memakan akar dan buah-buahan liar.[63]

---

60 Han Knapen, *Loc.Cit*, 2001, hlm. 13 dan 15.

61 H. G. Maks, "Reis Naar Kapoeas en Kahajan in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo"…, hlm. 476–479.

62 Han Knapen, *Op.Cit.*, hlm. 37–38.

63 *Ibid.*, hlm. 13.

Musim kemarau yang panjang, banjir di musim hujan, dan kemunculan wabah penyakit merupakan masalah besar bagi penduduk di Kalimantan Selatan. Namun demikian, kasus-kasus tersebut tidak mengurangi pihak luar untuk datang menjalankan perdagangannya. Para pedagang asal luar Kalimantan Selatan tetap berdatangan mengincar lada, damar, rotan, lilin, getah perca, sarang burung, dan emas dari daerah ini meskipun terjadi perubahan musim. Para pedagang dari berbagai daerah Nusantara, Asia Barat, Timur, Selatan, dan Tenggara, serta bangsa-bangsa dari Eropa telah lama menjadi mitra dagang Kesultanan Banjarmasin. Selain komoditas dagang tadi, terdapat tiga jenis barang yang mendominasi impor Kalimantan Selatan dari mitra dagangnya itu, yaitu tekstil (sekitar setengah dari total impor), beras, dan barang untuk konsumsi langsung seperti minyak lampu, tepung, dan tembakau. Beras asing menunjukkan fluktuasi yang paling ekstrim secara tahunan tergantung pada keberhasilan panen lokal dan kemungkinan adanya pasokan berlebih dari Jawa. Kebutuhan beras luar negeri sangat besar pada tahun 1880, 1891, dan 1894. Seperti yang terjadi di akhir tahun 1880-an dan sesaat sebelum pergantian abad. Namun, Kalimantan Selatan mendapatkan beras sangat sedikit dari luar.

Pada pergantian abad menjelang abad ke-20 Banjarmasin dalam kondisi aman tidak banyak terjadi perang seperti sebelumnya, namun sepi dalam hal perdagangan. Kondisi seperti itu memengaruhi para pedagang luar Kalimantan yang hanya sedikit berlabuh di dermaga Sungai Martapura yaitu di seberang perairan bekas Benteng Tatas. Bahkan hanya satu kapal uap yang berangkat berdagang dari empat kapal uap yang berlabuh di sana. Juga hanya satu dari delapan kapal yang berangkat ke luar negeri. Kondisi itu memengaruhi pasokan barang-barang kebutuhan masyarakat Kalimantan yang didatangkan dari luar, termasuk beras. Penurunan suplai barang ke Kalimantan terutama di tahun 1890-an memengaruhi jumlah orang Eropa di wilayah ini, dari 450 orang menjadi 270 orang.[64] Namun secara politis, kondisi tersebut berdampak positif bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Di daerah-daerah tertentu seperti di Hulu Sungai, kekuasaan adat feodal tidak lagi dominan bahkan dikesampingkan pada

64 Han Knapen, *Op.Cit.*, hlm. 15.

masa "pasif" itu. Tindakan itu menggambarkan adanya rasa kebersamaan menghadapi kolonialisme Belanda. Tindakan itu sebagai kebencian terhadap Belanda, sekalipun secara bersamaan dalam kondisi seperti itu sikap individualisme meningkat di kalangan mereka dan memunculkan perbedaan status sosial.[65]

Gambaran di atas menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di sungai maupun di laut merupakan hal penting bagi penduduk Kalimantan Selatan. Dalam dunia perdagangan seringkali nilai materi atau kekayaan menentukan status sosial. Golongan bangsawan yang mempunyai status tinggi secara genetik bisa menjadi setara dengan golongan rakyat biasa jika gagal dalam bidang usaha. Hal itu seperti diungkapkan oleh seorang pegawai Belanda yang pernah mengadakan perjalanan di pedalaman Kalimantan Selatan dan Timur (1824) bahwa beberapa bangsawan kerabat raja yang bertempat tinggal di Martapura, Karang Intan dan Matraman mendiami rumah yang tidak begitu bagus, bahkan ada yang dibuat dari bambu, mereka hampir tidak berarti apa-apa karena seperti penduduk biasa lainnya.[66] Namun terlepas dari status sosial yang ada di daerah itu, faktor ekonomi telah menjadi pendorong mobilitas penduduk di Kalimantan Selatan. Masyarakat Banjar, khususnya asal Negara memiliki jiwa berdagang yang unggul sehingga tingkat mobilitas mereka berada di atas masyarakat Banjar pada umumnya. Dalam kaitan itu, Potter mengungkapkan bahwa meskipun mereka menerima hak istimewa dari Sultan, namun menentang bentuk campur tangan terhadap industri manufaktur dan aktivitas perdagangannya. Negara merupakan daerah asal para pedagang Banjar yang menyebarkan sendiri produknya ke seluruh Nusantara. Mereka membangun kapal-kapal dari kayu ulin dan menggunakannya sebagai pedagang keliling dalam jumlah yang besar. Dalam hal kepiawaian berdagang, mereka hanya dapat disaingi masyarakat Banjar lainnya asal Alabiu.[67]

---

65 J. Thomas Lindblad, *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*…, hlm. 123.

66 Sartono Kartodirdjo, et al., *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid IV, (Jakarta: Depdikbud, 1975), hlm. 31–32.

67 Lesley Potter, "Banjarese in Beyond Hulu Sungai, …" hlm. 267-268. Periksa pula "De Oprichting van Volkscredietbanken Op de Buitenbezettingen", *TBB* ke-48, hlm. 90.

Demikian juga di daerah pantai, seperti Tanah Laut, penduduknya melakukan hubungan dagang dengan Kota Banjarmasin melalui Sungai Batutungku, Tabonio, dan Maluka. Mereka yang berasal dari pedalaman menggunakan sungai-sungai itu dalam aktivitas perdagangannya menuju muara kemudian menyusuri pantai untuk mencapai Banjarmasin. Menurut J. J. Meijer, di abad ke-19 penduduk Tanah Laut semakin bertambah dengan makin bertambahnya para pendatang yang menetap, terutama dari Martapura dan Amuntai (Hulu Sungai). Sekitar tahun 1845 penduduk Tanah Laut diperkirakan Meijer telah mencapai 6.000 jiwa terdiri dari berbagai etnis. Kepadatan penduduk di Tanah Laut, tidak saja memudahkan mobilitas perdagangan, di sisi lain menjadi faktor percepatan persebaran wabah penyakit di saat musim penyakit tiba. Pada awal abad ke-19 terjadi epidemi "penyakit kuning" di Tanah Laut. Sebagian besar penduduknya tewas sebagai korban epidemi. Sebagian penduduk yang selamat terus melakukan hubungan dagang dengan penduduk Martapura dan Hulu Sungai.

Di Kampung Parit, Tanah Laut, terdapat etnis Cina telah menetap sebelum etnis-etnis lainnya berdatangan ke wilayah ini. Menurut Meijer, permukiman Cina pertama kali di daerah Tanah Laut terbentuk di tahun 1790-an yaitu di Maluka dan Tobania. Atas permintaan Sultan Panembahan Batu, orang-orang Cina itu mula-mula didatangkan sebanyak 13 orang kemudian ditambah lagi dengan 70 orang, langsung dari Cina. Kemudian, atas bantuan Hare didatangkan lagi sekitar 70 orang Cina asal Pontianak. Pada dasawarsa kedua abad ke-19, jumlah orang Cina lebih dari 150 orang dan diangkatlah seorang kapten Cina berdasarkan keputusan residen.[68] Di samping etnis Cina yang didatangkan hingga menetap di daerah Tanah Laut, didatangkan pula oleh Hare sekitar 4.000 pekerja asal Jawa. Mereka terutama ditempatkan di Maluka dan Pulau Sari untuk mengerjakan usahanya di bidang perkebunan dan sebagai kuli. Residen Hare meminta sejumlah besar pekerja atau kuli kepada Sultan Sulaeman, namun karena hanya sedikit yang terdapat di Kalimantan maka atas kesepakatan keduanya mendatangkan pekerja dari Jawa. Selain sedikitnya jumlah penduduk, pada umumnya penduduk dari Banjarmasin

68 J. J. Meijer, "De Tanah-Laoet"…, hlm. 381–383 dan 388–389.

dan Martapura enggan menerima pekerjaan sebagai kuli dan umumnya pula penduduk telah memiliki pekerjaannya masing-masing.[69]

TRANSPORTASI DAN PERDAGANGAN BERBASIS SUNGAI

Lingkungan geografis Kalimantan Selatan merupakan wadah bagi terselenggaranya aktivitas perdagangan dan pengangkutan. Alam Kalimantan Selatan tidak saja menyediakan berbagai komoditas yang laku di pasaran, tetapi juga proses pengangkutan (transportasi) berbagai komoditas dagang itu yang tersedia dari struktur alam berupa jalur air. Bagi daerah Kalimantan Selatan, perdagangan dan transportasi air tak ubahnya seperti sebuah mata uang dengan masing-masing menempati satu sisinya. Pada konteks tersebut, air atau sungai dengan berbagai potensinya menjadi penunjang sektor pertanian dan kehutanan. Pertanian rawa maupun hutan rawa menjadi sumber penghidupan masyarakat. Begitu juga berbagai produk yang dihasilkannya yang ditopang dengan debit air sungai yang baik sehingga menjadi komoditas unggul yang laku di pasar global.

Secara umum transportasi dimaknai sebagai pemindahan fisik baik benda maupun orang dari suatu tempat ke tempat lain. Makna lain, transportasi adalah kegiatan pengangkutan dalam bentuk menggunakan perairan sebagai prasarananya. Orang menyebutnya secara sederhana sebagai kegiatan transportasi sungai, meskipun dalam hal ini praktiknya bukan suatu penyelenggaraan kegiatan transportasi yang hanya memanfaatkan sungai sebagai prasarananya, melainkan seluruh bentuk perairan seperti danau, waduk, kanal, perairan pantai, dan penyeberangan selat sempit yang ada di suatu kawasan daratan.

Pada abad ke-19 penyelenggaraan transportasi sungai menjadi satu-satunya cara yang dipilih dan diandalkan dalam memperlancar

69 "De Bandjermasinsche Afschuwelijkheid", *BKI* Bag. III, (Batavia: G. Kolff & Co., 1860), hlm. 9–11. Lihat pula Tim Penulis, *Republik Indonesia: Propinsi Kalimantan*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953).

Gambar 1.5. Perahu dan Kapal Crathie London Sandar di Sungai Martapura, Banjarmasin 1898
Sumber: Koleksi KITLV, IC. 10660

perhubungan dan pengangkutan antartempat di wilayah Kalimantan Selatan. Pilihan itu sesuai dengan sikap dan cara yang ditempuh penduduk untuk bertahan dan beradaptasi dengan keadaan dan tantangan alam lingkungannya. Sungai berikut bentuk-bentuk perairan lainnya merupakan fasilitas alam yang dengan mudah dapat dimanfaatkan oleh penduduknya sebagai prasarana transportasi. Dalam hal inilah penduduk yang menempati sepanjang aliran air memanfaatkan jalur-jalur air yang tersedia untuk dapat mengolah berbagai komoditas yang ada di pedalaman, seperti dari hasil pertanian maupun kehutanan serta barang-barang kerajinan. Ini merupakan cara penduduk Kalimantan Selatan dalam menjalin hubungan dagang berikut pengangkutan barang-barang komoditasnya. Mereka juga memanfaatkan kayu hutan untuk bangunan sarana angkutannya, seperti perahu dan rakit.[70]

70 Mengenai pemanfaatan fasilitas alam silakan lihat lebih jauh Nursid Sumaatmadja, *Studi Geografi: Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan,* (Bandung: Alumni, 1988), hlm. 201–204.

Gambar 1.6. Tambatan Perahu dan Pasar di Amuntai Akhir Abad Ke-19
Sumber: R. Broersma. 1927. *Handel en Bedrijf in Zuid- en Oost-Borneo*. 'sGravenhage: G. Naeff.

Gambar 1.7. Tambatan Perahu dan Pasar di Kandangan Akhir Abad ke-19
Sumber: R. Broersma. 1927. *Handel en Bedrijf in Zuid- en Oost-Borneo*. 'sGravenhage: G. Naeff.

Beberapa sumber sejarah tentang Kalimantan Selatan banyak menjelaskan tentang bentuk pengangkutan barang dagang di wilayah ini dengan penggunaan transportasi sungai. Pada abad ke-19 proses pengangkutan barang dan orang dari pedalaman ke pantai atau kota dilakukan melalui jalur-jalur air. Namun demikian, tidak ada pembangunan yang berarti terhadap sektor transportasi sungai sekalipun Pemerintah

Hindia Belanda sudah menguasai wilayah ini sejak abad ke-19. Kegiatan terkait transportasi sungai di daerah itu hanya untuk penelitian.

Pada tahun 1847 Tim Peneliti Ilmu Alam melakukan penelitian tentang kemungkinan-kemungkinan pelayaran bagi kapal-kapal besar di daerah aliran Sungai Barito. Rekomendasi yang dikeluarkan dari hasil penelitian 1847 itu adalah memperkenankan kapal-kapal berbadan besar melayari jalur-jalur aliran Sungai Barito dari muaranya sampai batas cukup jauh ke bagian hulu. Sejak laporan penelitian tahun 1847 dan laporan-laporan perjalanan sampai tahun 1900, pada dasarnya dititikberatkan pada pendataan keadaan jalur-jalur air dan pengangkutan. Selanjutnya di awal abad ke-20 Tim Peneliti Pendirian Bank Kredit Rakyat membuat laporan ekspedisi untuk sebuah rekomendasi pembangunan daerah.[71] Pemerintah Hindia Belanda hanya melanjutkan proyek-proyek pembangunan kanal sistem Banjar, dermaga-dermaga sungai, dan regulasi terkait pengangkutan sungai. Baru pada dasawarsa pertama abad ke-20 pemerintah membangun jalan-jalan darat secara terbatas.

Dengan demikian, perhatian Pemerintah Hindia Belanda pada sektor pelayaran sungai belum mencerminkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sektor perairan yang baik. Perhatian pemerintah terhadap sektor ini baru terbatas pada membangun kanal penghubung berupa *antasan* atau sedikit lebih banyak yang berupa *anjir* yang kepentingan utamanya untuk sektor pertanian, sekalipun dengan sendirinya juga berfungsi sebagai prasarana transportasi.

Lebih penting lagi, pengetahuan dari hasil laporan-laporan perjalanan itu digunakan untuk upaya-upaya eksploitatif dan perluasan penguasaan teritorial pihak pemerintahan Hindia Belanda. Dalam rangka itu, kebijaksanaan pembangunan ditekankan pada mendirikan pos-pos di jalur-jalur air guna menjalankan pengawasan dan penarikan bea pengangkutan sungai. Kecuali itu, pemerintah hanya meneruskan kebiasaan dan mengambil alih inisiatif pembangunan kanal dengan mobilisasi.

---

71 Silakan periksa ANRI Bundel *BZO* No. 122 dan "De Oprichting van Volkscredietbanken op de Buitenbezettingen", *TBB,* Bag. ke-48, (Batavia : G. Kolff & Co., 1915). Periksa pula sumber-sumber sejarah mengenai laporan perjalanan, termasuk laporan perjalanan dalam ANRI Bundel *BZO* No. 127.

Di dalam sistem transportasi sungai, masyarakat Kalimantan Selatan memiliki kebiasaan membangun kanal yang menghubungkan antarsungai guna mempersingkat waktu dan jarak. Dengan begitu, arus lalu lintas pengangkutan barang dan orang menjadi lebih lancar. Di samping kanal, bagi sungai-sungai di daerah hulu yang mempunyai riam cukup berbahaya dibangun empang dan pintu air (*tabat*) sehingga sungai lebih aman dilayari.[72] J. C. Vergouwen (1921) penulis artikel *Tatah-en Soengeirechten* mengemukakan masalah aturan dan cara kebiasaan yang berlaku pada penduduk di Kalimantan Selatan, terutama Banjar dan Dayak, dalam hal penyelenggaraan pelayaran sungai. Menurutnya, penduduk Kalimantan Selatan seperti masyarakat Inggris, mereka mengenal aturan-aturan dan banyak membangun kanal untuk kepentingan transportasi air. Lebih dari itu, seperti diakui oleh Schophuys, masyarakat di Kalimantan Tenggara membangun kanal-kanal dalam sifatnya yang multifungsi[73].

Vergouwen menyatakan pula bahwa masyarakat Kalimantan Selatan mengenal berbagai aturan. Dalam tradisi adat mereka, terdapat ungkapan "dia punya hutan" dan "dia punya sungai". Kedua ungkapan itu menunjukkan penguasaan suatu famili (*bubuhan*, suku atau klan) terhadap hutan dan sungai yang ditempatinya sebagai sumber kehidupannya. Begitu juga dalam penjelasan H. Mallinckrodt (1924) bahwa dalam menguasai jalur-jalur air (sungai dan kanal/*tatah*) bubuhan atau suku di bawah kepala-kepala mereka memiliki kewenangan memungut (*tol*) 1/10 dari barang-barang hasil hutan atau pertanian. Hasil pungutan itu kemudian diangkut melalui jalur-jalur air yang mereka kuasai. Pungutan itu dalam bentuk jenis barang atau uang yang dibawanya. Pada dasarnya hasil pungutan itu bertujuan untuk biaya pemeliharaan hutan dan jalur air. Meskipun demikian, seperti dikatakan Vergouwen, hasil pungutan

72 Periksa ANRI Bundel *BZO* No. 260 dan bandingkan pula dengan J. B. Mitchell, *Historical Geography,* (London: The English Universities Press Limited, 1960), hlm. 314 dan 316–320; Periksa pula A. K. Lobeck, *Geomorpologi: Pengenalan Kepada Kajian Pandangan Darat,* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1981), hlm. 310 dan 409–410.

73 J. C. Vergouwen, "Tatah-en Soengeirechten", *Kolonial Tijdschrijft,* tahun ke-10, Redaktur/Editor G. Gonggrijf dan D. G. Stibe, 1921, hlm. 545–561. H. J. Schophuys. "Polder, Pembukaan Persawahan Pasang Surut Gaja Lama dan Gaja Baru", *Kompas*, 7 Nopember 1969. Bambang Subiyakto, "Anjir, Bubuhan dan Kayuh Baimbai, Sumber Daya Budaya Masyarakat Banjar", 2011 dalam Heddy Shri Ahimsa-Putra (ed). 2011. *Arkeologi dan Sumber Daya Budaya di Kalimantan, Masalah dan Apresiasi*. Banjarbaru: IAAI Komda Kalimantan, hlm. 26-28.

tidak saja untuk pemeliharaan sungai dan hutan melainkan juga sebagai pendapatan para kepala wilayah. Pendapat Vergouwen serupa dengan yang dikemukakan Bangert pada tahun 1860-an.[74]

Seiring dengan adanya penguasaan terhadap jalur-jalur air itu, Nieuwenhuis mengemukakan pengalamannya pada akhir abad ke-19. Menurutnya, terdapat sejumlah aturan tertentu dalam hal melayari jalur-jalur air di daerah Kalimantan Tenggara yang harus ditaati oleh semua pihak. Dalam keadaan tertentu sungai atau jalur air dapat ditutup oleh penguasanya. Nieuwenhuis mencontohkan yang ditemuinya pada masyarakat Blu'u (Kayan). Ketika itu ekspedisi Nieuwenhuis tidak bisa meneruskan pelayarannya karena menemukan tanda larangan yang mengisyaratkan bahwa jalur sungai yang akan mereka lewati sedang ditutup. Kwing Irang, kepala suku setempat, memasang rambu-rambu atau plakat sebagai isyarat bahwa sungai sedang tidak boleh dilayari untuk keperluan apa pun, termasuk kegiatan seperti mencari ikan, getah perca, rotan maupun yang lainnya selama berapa waktu.[75]

Plakat (*pakihang*/Dayak, *pamantang*/Banjar: larangan) yang dipasang berupa bentangan seutas rotan yang melintas di atas sungai. Pada bentangan itu digantungkan benda-benda yang mengisyaratkan hukuman (sanksi) bila terjadi pelanggaran. Yang digantungkan adalah lingkaran rotan vertikal, menunjukkan besarnya "gong" sebagai denda yang harus dibayar; lingkaran rotan secara horizontal tempat bertautnya miniatur sumpit dari bambu, dan tombak dari kayu berhiaskan serutan kayu serta topi perang berhiaskan bulu unggas, mengisyaratkan ancaman bunuh bagi pelanggar; lambang seorang kepala terkemuka berupa kayu berukiran bulu burung enggang putih dengan garis hitam lebar, sebagai tanda tangan si pembuat; tiga lembar kertas bekas, sebagai pertanda bahwa yang punya plakat itu seorang kepala yang kuat dan karenanya harus ditaati.

---

74 J. C. Vergouwen, *Ibid.* Lihat pula H. Mallinckrodt, "De Adat Gemeenschappen in Zuid-Borneo", *Koloniale Studien,* Bag. I tahun ke-2, (Weltevreden: Albrecht & Co., 1918), hlm. 133–136 dan 148. *Adattechtbundels XXXVI: Borneo, Zuid-Celebes, Ambon enz.,* 'sGravenhage: Martinus Nijhoff, 1933, hlm. 87. Juga lihat pula Bangert, "Verslag der Reis in de Binnenwaarts Gelegene Streeken van Doeson Ilir", dalam *TBG* Bag. IX, (Batavia: Lange & Co., 1860), hlm. 78; dan Schopphuys, *Kompas,* September 1969.

75 A. W. Nieuwenhuis, *Di Pedalaman Borneo* …, hlm. 174–176.

Nieuwenhuis pada kesempatan itu mengabadikan peristiwa terpasangnya plakat atau rambu lalu lintas air itu seperti yang tertera dalam foto sebagaimana ditunjukan pada Gambar 1.8. berikut ini.[76]

Gambar 1.8. Tanda Larangan Melalui Sungai

Sumber: A. W. Nieuwenhuis. 1994. *Di Pedalaman Borneo: Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda*. Jakarta: Gramedia.

Sayangnya, Nieuwenhuis tidak menjelaskan lebih jauh tentang sebuah kondisi dan kegunaan aturan pelarangan atau plakat itu dibuat. Namun, lebih mengarah terkait dengan adat setempat. Meskipun demikian, mengacu pada kesaksian Bock pada tahun 1870-an sebagaimana dikemukakan oleh Knapen bahwa suatu jalan sungai yang mengarah ke hutan sumber rotan bisa ditutup dengan jaringan rotan (plakat) di seberang muaranya. Penutup itu mengisyaratkan bahwa orang sedang dilarang memotong rotan yang ada di seberang sungai itu. Kemungkinan rotan di hutan yang dimaksudkan itu dicadangkan untuk sultan.[77] Nieuwenhuis sendiri dalam tulisannya berulang kali menyatakan mengenai perjalanan dan kegiatan tim ekspedisinya terhalang atau tertunda akibat adanya aturan atau pantangan adat suku-suku di

76 A. W. Nieuwenhuis, *Di Pedalaman Borneo: Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda*, (Jakarta: Gramedia, 1994).

77 *Ibid*., hlm. 174-176. dan Han Knapen, *Forest of Fortune*…, hlm. 12.

pedalaman, terutama pada saat-saat pelaksanaan adat seperti pesta penyemaian dan sebagainya. Informasi Nieuwenhuis itu menunjukkan bahwa keterlambatan-keterlambatan pengiriman komoditas dari pedalaman, yang sering dikeluhkan pihak pemerintah Hindia Belanda dan para pedagang umumnya pada abad ke-19, sedikit banyak disebabkan oleh faktor adat itu, di samping faktor-faktor lainnya.

Transportasi sungai dari Tatas ke muara Banjar yang berjarak sekitar 18 mil ditempuh selama dua hari dengan perahu. Waktu tempuh akan lebih lama lagi jika awal pelayaran dimulai dari Negara.[78] Berdasarkan sumber kolonial bahwa waktu tempuh pelayaran sungai di Kalimantan Selatan pada masa itu sudah dapat diperhitungkan. Beberapa laporan perjalanan seringkali mengemukakan mengenai hubungan antartempat dalam jarak dan waktu yang diperlukan dalam menempuhnya.

Perjalanan eksplorasi Nieuwenhuis (1894–1900) melintas Kalimantan dari Barat ke Timur melayari tiga buah sungai besar, yaitu Kapuas (Bohang), Barito, dan Mahakam dengan masing-masing puluhan anak sungainya menyebutkan pula waktu tempuhnya. Perjalanan tersebut terbilang sebagai perjalanan spektakuler. Laporannya memberikan catatan-catatan mengenai jarak dan waktu tempuh antartempat. Sebelum itu, laporan seperti dari Gallois (1855), H. G. Maks (1861), dan Carl Bock (1887) tentang hal yang sama termasuk menyebutkan jam, tanggal, dan hari keberangkatan dan lamanya perjalanan yang mereka tempuh. Catatan laporan-laporan itu kemudian menjadi dasar bagi pemerintah menyusun daftar waktu tempuh antartempat dan menentukan tarif pengangkutan. Matrik di bawah ini memperlihatkan daftar waktu tempuh pelayaran sungai Kalimantan Selatan dan Timur di abad ke-19 yang diolah berdasarkan keputusan pemerintah yang tertuang dalam *Staatsblad* No. 87 Tahun 1888.[79]

78 Goh Yoon Fong, "Trade and Politics in Banjarmasin, 1700–1747", *Tesis Doktor* pada Universitas London, (London: University of London, 1969), hlm. 191.

79 Silakan periksa pula ANRI Bundel *BZO* No. 260 Lampiran 26.

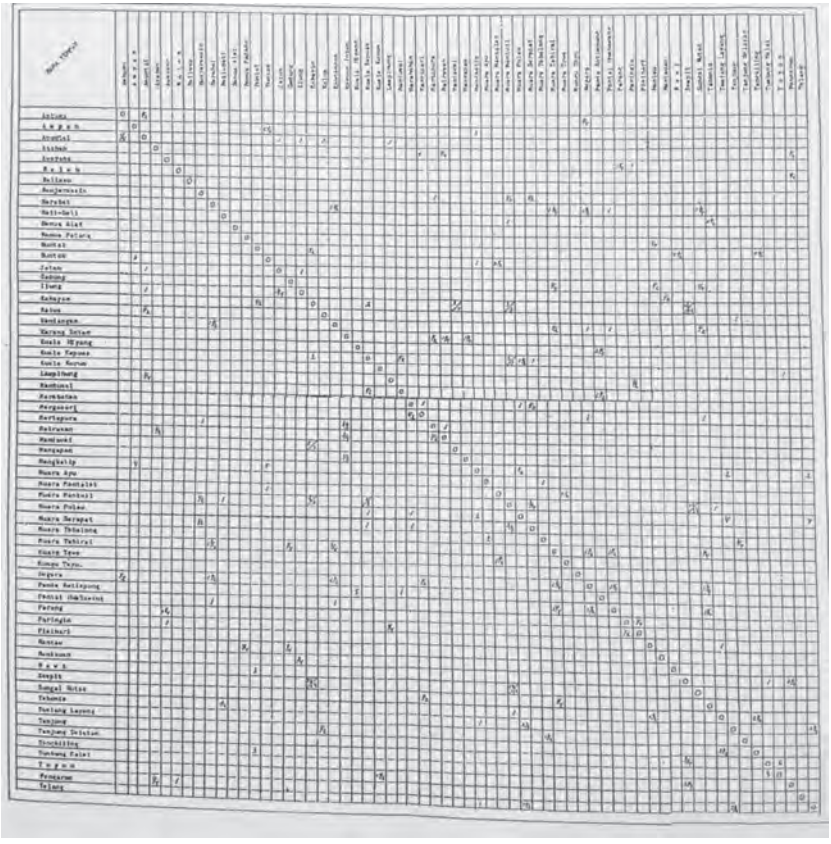

Gambar 1.9. Matrik Daftar Waktu Tempuh pada Trayek Pelayaran Sungai Kalimantan Selatan Abad ke-19

Sumber: *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, No. 87/1888, Zalt Bommel, Joh. Noman & Zoon,1889, hlm. 47–49. Keterangan: 1) Jalur sungai, terusan dan pantai, 2) Waktu tempuh dalam hitungan hari.

Berdasarkan matrik di atas, diketahui bahwa dalam perjalanan air bisa terjadi perbedaan waktu tempuh untuk jarak antara dua tempat yang sama. Hal ini berbeda, misalnya bagi waktu tempuh perjalanan darat pada jarak antara tempat pergi dan pulang yang relatif tetap sama. Pada perjalanan air, misalnya dari Ampah ke Buntok perlu waktu berlayar lima setengah hari, sebaliknya dari Buntok ke Ampah dengan kendaraan

(perahu) transportasi yang samanya perlu waktu tiga hari. Hal seperti itu terjadi terutama pada jalur-jalur air di daerah pedalaman akibat kecilnya pengaruh air pasang surut. Oleh karena itu, pelayaran ke arah hulu, seperti ke Buntok, perahu bergerak melawan arus sehingga jalannya perahu menjadi lebih lambat, tetapi sebaliknya ke hilir laju perahu akan lebih cepat karena terbantu arus yang bergerak turun.

Perbedaan waktu tempuh seperti itu juga terjadi pada perjalanan menyusuri perairan pantai. Pada jalur air ini, seperti juga ditunjukkan dalam Gambar 1.2, perbedaan waktu tempuh terjadi karena pengaruh tiupan angin. Contohnya pelayaran dari Kahayan ke Mandawai, pada musim angin timur perlu waktu berlayar tiga hari, tetapi bila dilakukan pada musim barat akan ditempuh selama lima hari. Hanya pada trayek-trayek tertentu di daerah pantai yang waktu tempuhnya baik untuk pergi maupun pulang relatif sama, misalnya antara Bati-Bati dan Muara Mantuil, baik pergi maupun pulang pelayaran ditempuh masing-masing selama satu hari. Atau antara Tabonio dan Muara Mantuil, pergi dan pulang masing-masing ditempuh selama satu setengah hari. Dan jika diteruskan ke Banjarmasin perlu ditambahkan setengah hari lagi, sehingga pelayaran dari Banjarmasin ke Tabonio perlu waktu selama dua hari, begitupun sebaliknya. Waktu tempuh yang tetap sama seperti ini, terutama juga terjadi pada pelayaran di jalur-jalur sungai dan terusan di daerah muara.

Nampak jelas bahwa pelayaran sungai memainkan perannya dalam memperlancar pengangkutan barang perdagangan. Selain hasil hutan, hasil pertanian dan perikanan merupakan komoditas utama yang umumnya diangkut. Selain itu adalah hasil tambang dan industri kerajinan tangan. Komoditas lada diangkut dari daerah produksi Negara melalui angkutan sungai menghilir menuju Banjarmasin, tempat para pedagang Inggris, Belanda, Cina, dan lain-lain menanti untuk membelinya. Akan tetapi, tidak jarang lada ataupun komoditas pedalaman lainnya yang ditunggu itu terkadang dalam jumlah yang kecil. Hal seperti itu sering terjadi karena lada ataupun komoditas ekspor lainnya telah terlebih dahulu dijual kepada pedagang-pedagang Cina dan Melayu yang membawa perahu-perahunya masuk lebih awal ke pedalaman.[80]

80 Goh Yoon Fong, "Trade and Politics in Banjarmasin…", hlm. 218–219.

Kelancaran perdagangan menjadi syarat penting bagi kontinuitas dan kepastian usaha dalam proses produksi.[81] Di lain pihak, bahwa kelancaran lalu lintas perdagangan itu pada masa dahulu sangat ditentukan oleh lancarnya pula pengangkutan. Dalam kaitan itu maka pada abad ke-19 bagi Kalimantan Selatan transportasi sungai sangat penting perannya sebagai tulang punggung pengangkutan barang-barang perdagangan dan sebagai fondasi ekonomi di masa berikutnya. Dengan demikian, produksi tetap dapat berlangsung, begitu pun pendistribusian komoditasnya.

Bagi masyarakat sungai, sungai-sungai merupakan faktor yang sangat penting dalam ekspansi dan eksplorasi sumber daya alam. Masyarakat sungai yang terdapat di Kalimantan Selatan ini sama halnya di Palembang dan Jambi. Di ketiga daerah tersebut memiliki kesamaan komoditas dagang yang laku di pasar dunia yaitu karet. Hampir semua pemilikan karet kecil terletak dalam akses sungai yang mudah. Semua kebun karet milik masyarakat di daerah Kalimantan Selatan selalu berada di tepi-tepi sungai atau masih berada dalam jangkauan tidak jauh dari sungai. Tidak hanya kebun karet, hutan-hutan pun terletak tidak jauh dari sungai. Knapen (2001) mencatat bahwa semua produk hutan selalu diangkut dengan perahu menyusuri sungai karena akses termudah untuk pengangkutan hasil hutan adalah sungai.[82]

Pada sekitar tahu 1850-an Carl Bock menyaksikan beberapa kapal bermuatan beras yang bersandar di dermaga Sungai Muara Teweh menanti diturunkan. Di sisi lain, tampak produksi utama daerah ini berupa rotan dalam jumlah besar dengan rakit yang panjang dan tinggi beriringan dikirim menyusuri sungai ke Banjarmasin. Di daerah ini pula sejumlah besar kayu yang ditebang untuk pembuatan kapal atau perahu dan pembangunan rumah diangkut melalui jalur sungai. Begitu juga lilin, getah perca, dan sarang burung yang bisa dimakan dikirim ke Banjarmasin menyusuri sungai. Perjalanan Muara Teweh ke Banjarmasin

81 Sumitro Djojohadikusomo, *Perdagangan dan Industri dalam Pembangunan,* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. viii.

82 Bambang Purwanto, "Ekonomi Karet Rakyat Indonesia, Tahun 1890-an–1940" dalam J. Thomas Lindblad, *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 207 dan Han Knapen, *Forest of Fortune*…, hlm. 13.

atau sebaliknya ditempuh melalui jalur Sungai Barito yang berkelok-kelok sehingga jaraknya mencapai ratusan kilometer.[83]

Seperti halnya teknologi transportasi yang dimiliki orang Dayak dan Banjar sejak lama yaitu berupa perahu kayu, begitu juga hunian mereka. Teknologi dasar yang ada pada masyarakat secara turun temurun itulah sebagai indikator sebuah peradaban dari masyarakat itu sendiri. Menurut Wertheim pengaruh teknologi dalam proses yang berabad-abad itu telah membentuk peradaban yang berbeda-beda. Teknologi itu sendiri dipengaruhi oleh keadaan lingkungan terdekatnya. Misalnya, *Proto-Melayu* (Dayak) yang tinggal di daerah-daerah hulu dan *Deutro-Melayu* (Banjar) di bagian hilir[84] memiliki cara berbeda dalam menjalankan perahunya. Selain itu, bentuk dan jenis perahu yang mereka buat serta bahan yang dipilih untuk membangun perahu memiliki perbedaan.

Nieuwenhuis menggambarkan perjalanannya di daerah Mahakam pada 16 Agustus 1894, bahwa ternyata hanya sebagian sungai yang cukup dalam untuk memungkinkan perahu mengapung. Akibat keadaan itu, berkali-kali para pendayung bertukar peran antara menjadi pendorong dan penarik perahu. Orang Dayak ternyata menjalankan perahu tidak selalu didayung seperti kebanyakan pada perahu orang Banjar dan Cina. Orang Dayak lebih sering menggunakan galah (bambu) untuk menjalankan perahunya sesuai keadaan daerah perairan di hulu. Seringkali terjadi bahwa perahu harus ditarik dari tepi sungai atau terpaksa dihela lewat darat. Jenis perahu yang disebut *rangkan* adalah yang paling umum mereka gunakan. Alasan ini sebagai adaptasi atas kondisi sungai di daerah hulu yang terkadang ada bagian-bagian yang sangat dangkal, juga berbatu dan terdapat riam. Akan tetapi, kondisi itu masih bisa diatasi karena perahu jenis *rangkan* dibangun dari jenis kayu ringan, tidak mudah pecah, gampang ditarik dan/atau dipikul.[85]

---

83 Han Knapen, *Forest of Fortune*…, hlm. 14–15.

84 W. F. Wertheim, *Indonesia Society in Transition*…, hlm. 2. Untuk pengaruh lingkungan hunian penduduk periksa pula di antaranya A. K Lobeck, *Geomorfologi: Pengenalan Kepada Kajian Pandangan Darat*, (Kuala Lumpur: Kementrian Pelajaran Malaysia, 1981), *Passim*.

85 A. W. Nieuwenhuis, *Di Pedalaman Borneo* …, hlm. 145–147. Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun*…, hlm. 27 dan Amarjit Kaur, *"Transport and the Sarawak Economy, 1841-1983", dalam Borneo Research Bulletin. Vol. 25. Virginia: Departement of Anthropology, College of William and Mary,* hlm. 82–84. Lihat pula ANRI Bundel *BZO* No. 260, Lampiran 11 dan Lampiran 13.

Pada abad ke-19 di Kalimantan Selatan tidak terdapat jalan raya (darat) yang memadai, sehingga untuk aktivitas berpergian dan pengangkutan barang harus melalui jalan air. Kondisi itu pula yang mengondisikan mayoritas penduduk di daerah Kalimantan Selatan dan Timur terkonsentrasi di sepanjang tepian sungai. Mereka bertahan hidup dengan kondisi alam seperti itu untuk kelancaran perekonomiannya seperti berdagang sagu, padi, getah perca, rotan, damar, jelutung, dan sebagainya. Atau melakukannya secara barter yaitu *cash* dengan barang seperti ikan asin, minyak tanah, beras, kain, dan lain-lain. Sistem barter ini berlaku tidak hanya kepada penduduk setempat juga kepada para pedagang Cina. Para pedagang itu kemudian akan menjual komoditas pedalaman yang telah mereka dapatkan kepada pedagang besar yang selanjutnya memperdagangkan ke luar daerah. Hal seperti itu merupakan pola perjalanan komoditas yang mengikuti jalur transportasi mulai dari pengangkutan sungai hingga ke pengangkutan laut.

Pada tahun 1850-an W. R. Van Hoevel menjelaskan bahwa para pedagang Bakumpai dan Banjar datang ke daerah Dusun dengan membawa garam, kain lena, porselin, tembaga, tembakau, barang hiasan, dan sebagainya. Di daerah itu mereka menjajakan dagangannya berkeliling dari kampung ke kampung dengan perahu dagangnya. Di daerah ini pun berlaku sistem barter. Berdasarkan ketentuan yang disepakati antara penjual dan pembeli, barang-barang ditukar dengan hasil setempat seperti rotan, lilin, damar, sarang burung, barang-barang kerajinan (ukiran) dari kayu, dan sebagainya. Pelayaran dagang mereka itu bisa menghabiskan waktu sedikitnya selama tujuh bulan, melayari jalur-jalur air yang ada di daerah itu sampai ke tempat asalnya di daerah hilir atau Banjarmasin.[86] Di sinilah, bahwa orang Banjar seringkali dipandang sebagai pedagang[87] sekalipun sama terkenalnya dengan posisi orang Dayak sebagai mitra dagangnya. Posisi keduanya berdasar pada aktivitas perekonomiannya yang sesuai dengan kondisi geografisnya masing-masing sebagai wilayah sungai.

86 H. G. Maks, "Reis Naar Kapoeas en Kahajan in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo"…, hlm. 480–482.

87 Lesley Potter, "Banjarese in Beyond Hulu Sungai, …", hlm. 264.

Pada abad ke-19 tiupan angin masih sangat penting bagi pelayaran sungai dan laut. Pada musim Angin Timur pelayaran dilakukan ke arah Barat dan sebaliknya pada musim Barat ke arah Timur. Secara geografi, Banjarmasin diuntungkan untuk lalu lintas pelayaran laut di kawasan Laut Jawa. Banjarmasin merupakan tempat strategis bagi persinggahan perahu-perahu dagang di segala musim. Meskipun demikian, Knapen berpendapat karena pada musim Angin Barat sering terjadi hembusan angin kencang menyebabkan perdagangan lebih ramai berlangsung pada saat musim Angin Timur (kemarau) di Kalimantan Selatan.[88] Sementara sungai-sungai besar di Kalimantan seperti Rejang, Kapuas, Barito, dan Mahakam dalam pandangan orang Barat membuka kesempatan secara terbatas bagi penetrasi politik dan ekonomi di daerah-daerah pedalaman.[89] Dalam kajiannya pada tahun 1997 tentang perubahan ekonomi di Asia Tenggara antara 1830 dan 1980, Ian Brown menyimpulkan bahwa dua faktor yang penting bagi perkembangan daerah adalah perdagangan maritim jarak jauh dan kehadiran minoritas perdagangan imigran. Dalam catatannya Brown mengungkapkan:

> "kedekatan dengan laut telah memasukkan Asia Tenggara dalam perdagangan jarak jauh dengan cara dramatis, sungai-sungai besar mendekatkan pedalaman dengan laut dan dunia yang berada di luarnya dalam hampir semua kondisi dan di hampir semua periode, air telah memberikan sarana transportasi termurah, sering satu-satunya sarana untuk mengangkut komoditi bernilai rendah atau dalam jumlah massal, dan sampai abad ke-20 sering jalan paling aman untuk memindahkan volume komoditi bernilai tinggi dalam jarak jauh".[90]

Melalui jalur-jalur sungai, berbagai komoditas dari pedalaman Kalimantan Selatan terintegrasi ke dalam perdagangan global, begitu pun sebaliknya berbagai komoditas impor masuk hingga ke pedalaman wilayah ini. Sejak masuknya kolonialisme Belanda, muncullah kebiasaan

88 Han Knapen, *Forest of Fortune*…, hlm. 43.

89 Heather Sutherland, "Geography as Destiny? The Role of Water in Southeast Asian History" dalam Peter Boomgaard, *A World of Water Rain, Rivers, and Seas in Southeast Asian Histories*, (Leiden: KITLV Press, 2007), hlm. 29.

90 *Ibid*., hlm. 54.

untuk membedakan tanaman pangan dan tanaman dagang (*crops*), yang masing-masing membuahkan hasil untuk pangan dan pertanian ekspor. Para pengusaha pribumi pun cepat menangkap kesempatan untuk berproduksi bagi pasar internasional, baik Kalimantan Tenggara, Kalimantan Barat, Jambi, maupun Palembang. Perusahaan Barat yang intensif di bidang modal dan produksi pribumi yang intensif dalam tenaga kerja keduanya saling melengkapi. Ini juga seperti yang terjadi di Palembang dan Kalimantan Tenggara.[91]

Pada awal abad ke-20 pekerjaan masyarakat Kalimantan Selatan yang penting lainnya adalah pembangunan terusan (*anjir*, *anjir* Serapat) jalur sungai yang menghubungkan Sungai Barito dengan Pulau Petak (Sungai Kapuas/Murung) untuk menghubungkan Banjarmasin dengan Kuala Kapuas yang merupakan pusat pemerintahan Tanah Dusun Bawah dan terletak dekat ke barat. Proses penggalian untuk pembangunan *anjir* yang sepanjang 38 km itu membutuhkan waktu tiga tahun. Pembangunan *anjir* tidak hanya memberikan peluang kerja bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya, tetapi juga membuka kawasan rawa-rawa yang luas sebagai daerah permukiman (dan pertanian). Di sepanjang *anjir* Serapat itu, orang Banjar dari Hulu Sungai membangun teknik pengeringan dan penanaman rawa-rawa pasang pada daerah yang semula kurang akrab. Langkah pertama adalah membersihkan hutan rawa-rawa dan menggali saluran kecil (handil) yang bermuara ke *anjir* Serapat.[92]

SISTEM BARTER DAN PEREDARAN UANG

Kalimantan Selatan merupakan daerah dengan penduduk aktif melakukan kegiatan perdagangan sejak waktu yang lama. Pendiri Kerajaan Dipa dan Daha yang merupakan cikal bakal terbentuknya Kesultanan Banjarmasin merupakan keluarga saudagar kaya raya berasal dari Keling (Jawa Timur) yang datang ke Kalimantan Selatan satu atau dua abad sebelum pertengahan abad ke-16. Ketika masa kekuasaan Kerajaan

91 Lesley Potter, "Banjarese in Beyond Hulu Sungai…", hlm. 24–25.

92 *Ibid*., hlm. 271.

Dipa dan Daha, orang-orang suku Bakumpai (sub-etnis Dayak yang umumnya telah menganut agama Islam) mendiami daerah Barito Kuala dengan pusatnya Marabahan. Suku Bakumpai ini merupakan pedagang-pedagang andal yang menguasai jalur perdagangan di sepanjang aliran Sungai Barito. Mereka bersama orang-orang Banjar berlayar membawa berbagai barang dari luar seperti garam, gula, pakaian, dan tembakau ke daerah hulu untuk ditukarkan (barter) dengan berbagai hasil hutan seperti rotan, kayu, kulit binatang, dan sebagainya milik orang Dayak di pedalaman. Para pedagang lokal menukar berbagai produk hutan dan barang kerajinan dengan candu, kain, garam, beras, perhiasan, gula, bawang, asam, ragi, kain (polos/batik), sarung, selendang, benang, barang-barang pecah belah, dan barang-barang dari kuningan juga tembaga yang sengaja dibawa oleh para pedagang dari luar.

Oleh karenanya, proses ekonomi skala besar sudah dimulai di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan sejak awal ke-16. Relasi politik dan ekonomi antara Kalimantan Selatan dengan Jawa Timur di masa itu merupakan tonggak berdirinya Kesultanan Banjarmasin. Fakta tersebut menunjukkan pula bahwa sistem kapitalisme telah terjadi di kalangan masyarakat pribumi Kalimantan Selatan dengan kendali sultan. Aktivitas perdagangan internasional saat itu tidak hanya dilakukan dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, melainkan dengan Gujarat, Cina, Melayu, dan Makassar. Indikasi kontak perdagangan dengan pihak luar tercermin dengan ditunjuknya Wiramartas oleh Empu Jatmika untuk mengemban tugas sebagai "menteri perdagangan" di Kerajaan Dipa. Wiramartas memiliki kemampuan menguasai berbagai bahasa di antaranya Arab, Parsi, Belanda, Cina, dan Jawa sehingga memudahkan hubungan politik dan ekonomi Kerajaan Dipa dengan pihak-pihak luar. Dalam perkembangan perpolitikan Kerajaan Dipa, kedatangan para pedagang turut membantu Pangeran Samudera dalam perang melawan pamannya, Mangkubumi dari Kerajaan Daha. Sementara perekonomiannya, masa menjelang berdirinya Kesultanan Banjarmasin merupakan masa meningkatnya perdagangan yang mengundang banyak pedagang Melayu, Cina, Bugis, Makassar, dan Jawa. Pada masa ini Kalimantan Selatan semakin dikenal di berbagai

negara disebabkan berbagai jenis barang ekspor dan impor yang ada di daerah ini.[93]

Pertumbuhan ekonomi Kesultanan Banjarmasin semakin pesat setelah kehadiran kolonialisme Eropa yang memperluas jenis barang yang diperdagangkan. Pada awalnya transaksi antarpedagang dilakukan dengan sistem barter (*innatura*). Sistem barter merupakan bentuk transaksi ekonomi paling kuno yang sudah dipraktikkan masyarakat Kalimantan Selatan selama berabad-abad. Pada masanya sistem barter dimaknai sebagai sistem jual beli. Sistem barter berjalan sampai adanya budaya jual beli yang menggunakan sistem uang (monetisasi). Pada masa VOC monetisasi sudah terjadi di Nusantara sejak 1658. Kepentingan monetisasi itu selain untuk kebutuhan para pengusaha VOC, untuk keuntungan Belanda atau dengan istilah "*profit on transfer*", juga untuk aktivitas perdagangan bersama para pedagang Asia. [94]

Sebelum abad ke-17 VOC menggunakan tiga mata uang yang berbeda dalam transaksi dagangnya di Asia, yaitu mata uang gulden ringan India, gulden berat India, dan gulden Belanda. Ketiganya memiliki nilai tukar yang berbeda pula. Nilai tukar seharga 125 gulden ringan India setara dengan 100 gulden berat India setara dengan 83,65 gulden Belanda. Nilai harga mata uang itu pun berubah setelah tahun 1768 disebabkan penyesuaian nilai tukar di negeri Belanda. Perubahan itu pun terjadi disebabkan tindakan VOC yang semakin diketahui dewan parlemen di negeri Belanda terkait pengambilan keuntungan secara ilegal atas laba yang dikirimkan ke negeri Belanda. Kecerobohan pembukuan keuangan VOC itu berakibat pada kemerosotan perekonomian VOC di Asia.[95]

Setelah VOC bangkrut monetisasi dilanjutkan oleh pemerintahan Inggris di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal (1811–1816) ke seluruh wilayah Nusantara. Pada masa

93 A. A Cense, *De Kroniek van Bandjarmasin*, (Amsterdam: C. A Mees, Zantpoort, 1928), hlm. 9 dan 43. Lihat pula J. J Ras, *Hikajat Bandjar*, (Leiden, The Hegue: Martinus Nijhoff, 1968), hlm. 26, 220, dan 231–234.

94 Els M. Jacobs, *Merchant in Asia: The Trade of The Dutch east India Company during the Eighteenth Century*, (Leiden: CNWS Publications, 2006), hlm. 300–304.

95 *Ibid.*

itu fungsi uang pun berkembang, tidak sekadar alat tukar namun juga sebagai investasi. Bentuk mata uang pun mengalami perkembangan sejak berakhirnya sistem barter tersebut, mulai dari kulit kerang, koin, perak, emas, tembaga, pisis dari timah, hingga kertas besar.[96]

Kedatangan koloni-koloni Eropa sejak masa Portugis hingga Belanda di Nusantara, telah membawa perubahan pada bentuk mata uang yang diberlakukan dalam sistem dagang. Pada masa Portugis mata uang banyak terbuat dari perak yaitu yang disebut mat, pasmat, real atau dolar yang dikonversi ke dalam nilai mata uang Spanyol. Sementara pada masa VOC, jenis mata uang yang beredar yaitu rijksdaalder, dukat, stuiver, gulden, dan doit. Bahan yang digunakannya terbuat dari emas, perak, tembaga, nikel, dan timah (*picis*). Bentuk mata uang tersebut bundar pipih dengan ukuran diameter yang tidak sama. Mata uang tersebut diproduksi di negeri Belanda. Setelah masa VOC yaitu masa kekuasaan Hindia Belanda di bawah pemerintahan Republik Bataaf di Belanda (1799–1806), mata uang yang dikeluarkan bertuliskan *Indiæ Batavorum* dengan satuan nilai gulden dan stuiver dengan bentuk bundar pipih dan terbuat dari tembaga. Pada masa ini nilai uang 1 gulden setara dengan 20 stuiver atau sama dengan 40 duiten. Akibat inflasi yang terjadi di awal abad ke-19, nilai uang merosot sehingga 1 gulden senilai dengan 30 stuiver senilai 120 duiten. Perubahan mata uang terjadi kembali di masa Raffles (1811–1816), dengan jenis mata uang rupee berbentuk bulat pipih terbuat dari emas, perak, tembaga, dan timah. Kedua sisinya tertera tulisan Jawa dan Arab. Mata uang ini dicetak di Batavia. Selanjutnya pada tahun 1833 satuan duiten tidak lagi digunakan. Sebagai gantinya adalah 1 gulden setara dengan 120 sen. Nilai gulden kembali mengalami penurunan di tahun 1854 yaitu 1 gulden setara dengan 100 sen.[97]

Uang *picis* diperkirakan beredar di Banjarmasin sejak awal berdirinya kesultanan ini pada pertengahan abad ke-16, yakni ketika pedagang-pedagang Cina menyinggahi Pelabuhan Banjarmasin. Selama terjalin hubungan dagang dengan Cina dan Eropa di masa ini, mata uang *picis*

96 Robert van Niel, "The Effect of Export Cultivations in Nineteenth-century Java", *Modern Asian Studies*, Vol. 15 No. 1, 1981, hlm. 35–36.

97 Hendari F. Isnaeni, "Sejarah Mata Uang", diunduh dari https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/sejarah-uang-di-nusantara/.

beredar luas dan dikenal di seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Selatan. Uang *picis* yang beredar di Kalimantan Selatan merupakan hasil transaksi dengan para pedagang Jawa. Orang Banjar membeli uang *picis* sekaligus ketika membeli dan menjual barang dagangan. Sampai abad ke-18 jenis mata uang *picis* ini beredar luas di Kalimantan Selatan.[98] Dalam perkembangannya para pedagang menggunakan mata uang *picis* untuk dipinjamkan kepada orang-orang Dayak sebagai modal dagang. Dalam sistem ekonomi kapitalis, perilaku ekonomi seperti ini menunjukkan fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar (*medium of exchage*), tetapi juga sebagai komoditas. Bahkan dalam kesempatan yang sama, uang dapat diperjualbelikan atau disewakan. Secara teori, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar. Namun, semakin bertambah dan berkembanganya peradaban manusia kegiatan perekonomian pun semakin meningkat sehingga dalam praktiknya uang digunakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan manusia saat itu. Di saat yang bersamaan, kompleksitas kebutuhan manusia dapat menciptakan sifat ganda dalam penggunaan uang (*double coincidence of wants*).[99] Inilah yang terjadi di masyarakat Kalimantan Selatan di abad ke-19 ketika lonjakan penggunaan uang meningkat.

Meskipun demikian, sistem barter di Kalimantan Selatan tidak sepenuhnya hilang. Masyarakat Kalimantan Selatan menggunakan sistem barter dan sistem uang dalam proses ekonominya sampai akhir abad ke-20. Perdagangan dengan sistem barter mulai mengalami penurunan drastis setelah terjadi Perang Banjarmasin pada April 1859. Dalam kondisi perang, orang Bakumpai yang memihak Kesultanan Banjarmasin harus mencari alternatif jalur perdagangan yang lebih aman. Perang Banjarmasin sangat memengaruhi aktivitas perdagangan di wilayah Sungai Barito. Hubungan dagang mereka dengan Jawa, Singapura, Melayu, dan lainnya menjadi terganggu. Para pedagang kemudian mengalihkan jalur perdagangannya ke daerah Sungai Katingan. Jalur perdagangan orang

98 Dana Listiana, "Permukiman Cina di Banjarmasin: Perkembangannya Hingga Awal Kemerdekaan", dalam *Potret Kampung-Kampung Pendatang di Banjarmasin*, (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2012), hlm. 80.

99 Septi Wulan Sari, "Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa", An-Nisbah, Vol. 03, No. 01, Oktober 2016. Diunduh dari https://media.neliti.com/media/publications/63979-ID-perkembangan-dan-pemikiran-uang-dari-mas.pdf.

Bakumpai dan orang Banjar dari pedalaman menuju Banjarmasin yang telah terintegrasi sebagai jalur perdagangan internasional itu kemudian menjadi sepi.

Sebaliknya, fondasi ekonomi dengan sistem monetisasi menjadi semakin mengakar seiring dengan aktivitas dagang orang Banjar dengan Eropa dan Cina. Hanya sedikit orang Dayak yang ada di pedalaman yang masih menggunakan sistem barter. Mereka masih menganggap barang-barang yang dimilikinya, terutama garam, tembakau, dan manik-manik adalah jenis barang bernilai tinggi dibandingkan nilai uang yang harus mereka gunakan saat itu.[100] Para pedagang Banjar dan Cina aktif dalam mengenalkan mata uang di Kalimantan Selatan hingga ke pedalaman. Para pedagang Cina dalam hal ini juga bertindak sebagai kreditur bagi masyarakat di pedalaman. Sesungguhnya hal yang seperti ini juga dilakukan oleh para pedagang Arab di Kalimantan Selatan. Kredit mereka kemudian bukan lagi hanya untuk pencari hasil hutan, tetapi juga diberikan kepada para petani tanaman pangan maupun tanaman untuk ekspor. Bukan bunga pinjaman yang dicari kreditur melainkan pengembalian dalam bentuk barang yang diusahakan oleh debitur dengan harga yang ditentukan kreditur. Sistem transaksi seperti ini termasuk kategori sistem *ijon*. Sejak itu, peredaran uang di Kalimantan Selatan semakin meningkat dan beragam jenisnya.

Pada akhir abad ke-19 jenis mata uang yang beredar di Kalimantan Selatan di antaranya picis, gulden (Belanda), cruzadon (Portugis), tanga (Siam), dan real (Spanyol). Jenis mata uang asing itu menambah jenis mata uang yang dikeluarkan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara saat itu. Namun, Kesultanan Banjarmasin tidak memiliki mata uang sendiri seperti Kesultanan Aceh pada masa Iskandar Muda. Di wilayah Kesultanan Banjarmasin uang yang digunakan adalah uang picis dan real Spanyol. Terkadang digunakan juga mata uang gulden Belanda. Mata uang real Spanyol menjadi tren karena disukai masyarakat lantaran peredarannya lebih banyak dan lebih luas. Mata uang ini berlaku dan diterima seperti di daerah Maluku, Malaka, Banten, Sulawesi, dan lain-lain tempat. Transaksi perdagangan dengan demikian lebih mudah dilakukan.

---

100 A. W. Nieuwenhuis, *Di Pedalaman Borneo…*, hlm. 92 dan Bock, *Reis in Oost- en Zuid-Borneo…*, hlm. 62.

Kehadiran mata uang sebagai alat pembayaran membawa babak baru bagi perkembangan perniagaan di wilayah Kalimantan Selatan. Mata uang dipergunakan sebagai alat tukar dan beredar semakin masif, terutama untuk membayar biaya sewa tanah atau membayar upah buruh perkebunan lada milik Inggris maupun Belanda. Pada saat EIC (*East India Company*) mendapatkan izin mendirikan kantor dagang di Pasir, persyaratan yang diterapkan di antaranya membayar uang sewa ke Sultan Saidillah (1685–1700). Bahkan Alexander Hare selaku kuasa usaha Inggris di Maluka Tanah Laut memalsukan uang untuk modal mengelola usahanya berupa perkebunan dan galangan kapal. Nampak jelas, praktik ganda dari fungsi uang yang mengarah pada perilaku negatif atau *double coincidence of wants* terjadi di Kalimantan Selatan dan dilakukan oleh pihak penguasa itu sendiri sebagai pemilik modal kapital.

Gambar 1.10. Gambar Sebagian Uang Koin Edar di Kalimantan Selatan
Sumber: J. P Moquette. TBG XLVIII, 1906, plaat 1

Gambar 1.11. Gambar Sebagian Uang Koin Edar di Maluka
Sumber: J. P. Moquette. TBG XLVIII, 1906, plaat

Peredaran dan penggunaan mata uang di Kalimantan dan di berbagai wilayah koloni di Nusantara semakin meluas. Diperkenalkannya kebijakan kolonial liberal oleh pemerintah Hindia Belanda, membuat bahan-bahan ekspor dari berbagai wilayah meningkat pesat. Pada akhir abad ke-19 getah perca mengalami kemerosotan akibat salah kelola atau disebabkan karena masyarakat tidak lagi peduli atas keberlanjutan hasil alam ini. Masyarakat Kalimantan Selatan kemudian beralih usaha dengan mengumpulkan jelutung yang tumbuh liar di hutan-hutan. Jelutung, semacam getah yang diambil dari spesies Dyera (*Dyera species*), waktu itu dianggap sebagai pengganti karet. Pohonnya tumbuh liar di rawa-rawa pesisir di tempat yang sekarang menjadi Kalimantan Tengah. Usaha jelutung dianggap sebagai alternatif tercepat mencari uang untuk kehidupan perekonomian mereka. Bahkan usaha jelutung mengalami

"ledakan" singkat sebagai terobosan masyarakat mengurangi kesulitan atas kepemilikan uang tunai. Antara 1908–1910 harga getah jelutung meningkat lebih dari dua kali lipat sehingga membuat para pekerja berduyun-duyun pergi ke daerah itu.[101] Jelutung menjadi tren baru setelah getah perca dalam usaha perekonomian masyarakat.

Namun demikian, ketika Belanda mengadopsi standar emas pada tahun 1872, koloni-koloninya di daerah jajahan mereka tidak segera mengikuti aturan tersebut. Baru pada Desember tahun itu sebuah komisi negara Belanda mengumumkan bahwa standar perak dapat dipertahankan di Indonesia. Komisi berpendapat ini karena di Asia perak lebih disukai daripada emas. N. P van den Berg, pada waktu itu adalah Presiden De Javasche Bank, dengan segera menganjurkan diberlakukannya standar emas untuk para koloni, sebab terdapat ketidakstabilan nilai perak. Pada tanggal 28 Maret 1877 sebuah Undang-Undang disahkan yang mengadakan uang 10 gulden emas sebagai uang logam standar. Nilai uang logam emas itu ditetapkan senilai 6,048 gram emas.[102]

Di akhir abad ke-19 kontak masyarakat Kalimantan Selatan dengan pihak luar semakin meluas. Di tahun 1879 orang Melayu dari bagian timur Kalimantan datang untuk berdagang dengan orang Dayak. Mereka tertarik dengan produk hutan yang dimiliki orang Dayak terutama rotan, getah perca, sarang burung, dan kadang batu permata. Orang Melayu menukar atau membeli hasil hutan itu dengan uang ringgit perak Belanda. Meskipun demikian, banyak penduduk pedalaman yang tidak terlalu berminat untuk terlibat dalam kontak dengan pihak luar. Bock menduga karena penduduk pedalaman merasa ketakutan eksploitasi asing terhadap lingkungan alam mereka.[103]

Dengan demikian, nampak jelas berdasarkan sumber-sumber kolonial dan laporan perjalanan orang-orang Belanda bahwa wilayah Kalimantan Selatan telah lama menjadi ajang petualangan orang asing,

101 Lesley Potter, "Banjarese in Beyond Hulu Sungai…", hlm. 394.

102 G. H. Prince, "Kebijaksanaan Moneter Indonesia dan Posisi Bank Jawa pada Masa Kolonial" dalam J. Thomas Lindblad, *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 70.

103 Han Knapen, *Forest of Fortune…*, hlm. 15.

khususnya orang Eropa. Masyarakat Kalimantan Selatan menyebut orang Eropa dengan sebuatan "Orang Bule" atau "bule". Orang Eropa di Kalimantan Selatan bertualang dalam rangka eksplorasi, tugas penelitian, sebagai pejabat pemerintah, dan berdagang. Untuk kegiatan tersebut Broersma menyebutnya sebagai "petualang pedagang". Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan persiapan matang dan maksimal sebab setiap perjalanan dilakukan akan makan waktu lama disebabkan faktor geografis Kalimantan yang berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya. Salah satu hal penting dalam pelaksanaan eksplorasi di Kalimantan Selatan pada abad ke-19 adalah membawa perbekalan berupa barang-barang yang dapat ditukar dengan barang atau keperluan lain. Selama perjalanan barang-barang seperti kain, garam, tembakau, dan manik-manik lebih bernilai daripada uang karena lebih mudah digunakan sebagai alat tukar di daerah-daerah pedalaman Borneo. Fakta sejarah ini seperti dialami Nieuwenhuis saat melakukan perjalanan melintasi wilayah Borneo dari Barat (Pontianak) ke Timur (Samarinda) tahun 1894–1900.[104]

Pengalaman serupa dialami Carl Bock di tahun 1879–1880 dalam arah perjalanan yang berlawanan dari Nieuwenhuis, yaitu dari Timur (Kutai) ke Barat bagian Selatan (Banjarmasin). Lebih awal lagi dilakukan oleh H. G. Maks selama bulan Maret–Mei 1859, sebelumnya pada tahun 1855 dan 1857. Pengalaman petualangan mereka merupakan contoh dari banyak pengalaman yang sama dialami orang-orang Barat (Belanda) dalam melakukan perjalanan melintasi daerah-daerah pedalaman Kalimantan Selatan pada abad ke-19. Keseluruhan perjalanan dilaksanakan melalui jalur-jalur air dengan selalu menyiapkan perbekalan berupa barang-barang yang mudah ditukar. Baik Maks, Carl Bock, Nieuwenhuis maupun yang lainnya selalu saja melaporkan bahwa selama perjalanan seringkali mereka melakukan transaksi dengan cara barter, dalam bentuk inatura, termasuk untuk upah jasa. Kejadian itu berlangsung terutama pada saat mereka membutuhkan perbekalan bahan pangan dan jasa tenaga. Dalam hal jasa, penduduk pedalaman memang lebih suka dibayar dengan sejumlah barang. Akan tetapi, bukan hanya dalam dua hal itu

104 R. Broersma, *Handel en Bedrijf in Zuid- en Oost-Borneo*…, hlm. 166 dan 173. A. W. Nieuwenhuis, *Di Pedalaman Borneo* …, hlm. 253 dan 258.

sesungguhnya "petualang bule" melakukan transaksi secara barter. Mereka juga melakukannya untuk barang-barang pedalaman yang dianggap punya nilai ekonomi tinggi untuk diperdagangkan di daerah hilir atau ke luar. Dengan demikian, barang-barang pedalaman bukan ditukar sekadar untuk kebutuhan pangan atau upah jasa semata selama perjalanan, melainkan sengaja juga ditukar dengan jenis barang tertentu untuk dikumpulkan yang kemudian diperdagangkan.[105]

Gambaran perkembangan perekonomian masyarakat Kalimantan Selatan sejak masa kerajaan hingga masa kolonialisme Belanda mengindikasikan bahwa sesungguhnya dalam sistem perekonomian mereka, sistem barter lebih lama dijalankan dibanding sistem monetisasi. Namun demikian, bukan karena masyarakat Kalimantan Selatan belum mengenal alat tukar berupa uang atau tidak menerima sistem monetisasi. Pada dasarnya, mereka suka menerima mata uang, namun dalam banyak kasus, mata uang (logam/koin) yang diperoleh digunakan untuk kepentingan lain sesuai keinginannya, seperti untuk perhiasan dan kelengkapan ritual atau "jimat" bahkan dilebur dijadikan barang lain. Ini yang menunjukkan adanya *double coincidence of wants* atau kebutuhan ganda berdasarkan keinginan dalam hal penggunaan mata uang. Perilaku ekonomi itu biasanya terjadi pada masyarakat modern yang mengembangkan ekonomi kapitalis. Masyarakat Kalimantan Selatan melakukan perilaku ekonomi yang bersifat *double coincidence of wants* justru tidak dalam melibatkan dirinya sebagai bagian dari sistem ekonomi kapitalis. Sampai awal abad ke-20 mereka masih melakukan barter, terutama untuk komoditas garam dan tembakau yang dibawa para petualang yang paling diinginkan penduduk sebagai penukar barang atau jasa mereka. Untuk upah jasa yang diberikan, mereka lebih suka dibayar dengan garam atau tembakau tanpa ketentuan besar jumlahnya. Mereka tidak memiliki standar baku dalam menentukan jasa tenaga sebagai alat tukar atas garam dan tembakau itu. Mereka lebih bersikap pasif dengan tidak menentukan besaran upah yang harus diterimanya.[106]

105 A. W. Nieuwenhuis, *Di Pedalaman Borneo* …, hlm. 133–140.

106 *Ibid.*

Menurut Broersma bahwa pejabat pertama di daerah pantai timur Kalimantan mencatat adanya suku Bajo yang tinggal di perahu-perahu mereka dan di rumah-rumah di Pulau Panjang. Orang Bajo itu menyerahkan tripang dan ikan kepada sultan Gunung Tabur dengan imbalan berupa kain dan makanan. Tidak ada standar baku dalam penyerahan serah terima barang tersebut, halnya serupa dalam sistem barter. Laporan serupa tentang ketentuan besaran barang dalam sistem barter diungkapkan oleh Potter, bahwa pada tahun 1861 dan 1862 ketika musim panen padi, masyarakat Kalimantan Selatan mengalami kerugian disebabkan padi mereka rusak akibat banjir dan hama serangga. Pada masa yang bersamaan harga ekspor katun dari Amuntai merosot ke titik nol sejak tahun 1858. Oleh karenanya, di beberapa daerah di Kalimantan Selatan tetap melakukan barter dengan hasil-hasil hutan yang mereka miliki sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa standar jumlah barang secara baku.[107]

Nieuwenhuis menceritakan pengalamannya bahwa pada musim paceklik, harga beras di daerah Mahakam mencapai *f*2.50 per takar (sekitar enam kilogram). Pada masa seperti itu uang tak begitu bernilai, sebaliknya barang-barang tukar lebih berguna. Nilai sebutir manik yang dibawa petualang, bisa jauh melebihi dari nilai sebenarnya. Pada tahun 1890-an di Mahakam Hilir sebutir manik berharga *f*0.5. Padahal saat itu harga beras di Singapura sama seperti di Kapuas hanya *f*1.50 per takarnya.[108] Dalam catatan Lindblad beras selalu menjadi hasil utama dalam pertanian subsisten dan juga menjadi aset perpajakan utama bagi orang pribumi. Namun, beras juga berfungsi sebagai alat pembayaran dalam mekanisme perdagangan sistem barter di wilayah Kalimantan Selatan.[109]

Dalam catatan Niewenhuis sistem barter terjadi juga pada perahu yang menjadi sarana utama dalam pelayaran dan perdagangan saat itu. Perahu sepanjang delapan depa (sekitar 21 meter) dan lebar 1,25 meter

---

107 R. Broersma, *Handel en Bedrijf in Zuid- en Oost-Borneo*…, hlm. 27 dan Lesley Potter "Banjarese in Beyond Hulu Sungai, …", hlm. 379–380.

108 *Ibid.*, hlm. 134–138, dan 160.

109 J. Thomas Lindblad, *Between Dayak and Dutch: The Economic History of Southeast Kalimantan 1880-1942,* (Holland: Foris Publication, 1988), hlm. 25.

ditukar dari penduduk oleh tim ekspedisi Niewenhuis dengan sepasang *laku* (gelang Cina), dua helai katun biru, dua buah parang, rantai besi, dan sebuah kapak. Perahu itu sebanding dengan milik Paron, Kepala Suku Cehan, yang juga dibeli oleh tim ekspedisinya dengan menggunakan mata uang senilai *f*100. Dua perahu cukup besar itu ditambah sebuah perahu ukuran 18 meter yang disediakan Kwing Irang, digunakan tim ekspedisi Niewenhuis untuk kembali dari daerah Blu'u ke Mahakam. Mereka memerlukan tiga perahu besar untuk membawa barang-barang bernilai tinggi yang didapatkan dari pedalaman ke luar Kalimantan Selatan dan Timur. Mereka yang disebut para "bule" sebagai eksplorer yang telah mengeksploitasi kekayaan Kalimantan selatan sekaligus bertindak sebagai saudagar.[110]

Pengalaman Maks, Bock, Nieuwenhuis, Potter, maupun lainnya yang menceritakan fakta dinamika sosial ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan telah membuktikan bahwa komoditas dagang, sistem barter, monetisasi, dan perilaku ekonomi ganda yang berkembang di sana telah mendasari ekonomi modern mereka. Sekalipun, tidak banyak ditemukan sumber sejarah yang menjelaskan kehadiran berbagai perusahaan dagang atau perbankan yang mendukung berbagai sistem perekonomian di sana sebagai katalisator perubahan ekonomi dari tradisional ke modern atau dari pra kapitalis menuju ekonomi kapitalis.

110 A. W. Nieuwenhuis, *Di Pedalaman Borneo* …, hlm. 207–212 dan 222.

BAB 2

De Javasche Bank dan Dinamika Ekonomi (1901–1942)

Sejak abad ke-16 sampai abad ke-20 Kota Banjarmasin sudah menjadi pusat pemerintahan sekaligus sebagai tempat tinggal para pejabat. Penataan kota juga sudah dilakukan sejak masa Kesultanan Banjarmasin sampai masa kolonial ketika Banjarmasin dibentuk sebagai Keresidenan Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo di abad ke-19. Pasca dihapuskannya Kesultanan Banjarmasin oleh pemerintah Hindia Belanda pada 11 Juni 1860, pemerintah Hindia Belanda berkuasa penuh atas Kalimantan Selatan dan Banjarmasin tetap dipertahankan sebagai pusat pemerintahan Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo di bawah pimpinan seorang residen. Orang Banjar dan orang Dayak yang semula berada di bawah hukum Kesultanan Banjarmasin selanjutnya berada langsung di bawah hukum kolonial Belanda. Di awal abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda menjadikan Banjarmasin sebagai kota kolonial atau *gemeente* dan sebagai kota dagang perdagangan yang sejahtera dengan jumlah penduduk sekitar 64.000 jiwa. Kondisi Kota Banjarmasin yang semakin meningkat pesat dalam aktivitas politik dan perekonomian masyarakatnya membuat pemerintah Hindia Belanda mendirikan kantor cabang De Javasche Bank (DJB), Nederlansch Handel Maatschappij (NHM)[1], dan

1 Nederlandsch Handel Maatschappij (NHM) merupakan perusahaan dagang Belanda yang memainkan peran pentingnya dalam menjual barang-barang hasil bumi Hindia Belanda ke wilayah Eropa. Dalam perkembangannya, NHM mulai melakukan ekspansi bisnisnya dengan bergabung ke dalam bidang perbankan dan menjadikan kegiatan perbankan sebagai fokus utamanya, khususnya pemberian kredit modal kepada pengusaha Eropa dan Cina. Darsono, dkk, *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 17. Lihat pula J. Thomas Lindblad, *Antara Dayak dan Belanda: Sejarah Ekonomi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan 1880-1942,* (Malang: Lilin Persada, 2012), hlm. 15.

Borneo-Sumatra Handelmaatschappij (Borsumij).[2] Kehadiran perusahaan-perusahaan ini turut mewarnai perubahan sistem perekonomian masyarakat dan negara. Dinamika ekonomi Banjarmasin yang berbasis sungai/maritim dengan kekayaan sumber alam yang melimpah semakin berpotensi besar bagi pengembangan lembaga keuangan negara untuk melindungi masyarakatnya dari berbagai penetrasi kapitalisme yang liar.

Memasuki abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda semakin menempatkan Banjarmasin sebagai kota strategis bagi arus ekonomi yang menghasilkan banyak pundi-pundi negara. Pemerintah juga merespons kehadiran berbagai perusahaan di Banjarmasin untuk pengembangan bisnis di daerah Kalimantan. Selain mendirikan kantor cabang DJB di Banjarmasin, secara hampir bersamaan pemerintah mendirikan DJB di Bengkalis dan Medan (Pantai Timur Sumatra) pada 13 Maret 1907. DJB Bandjermasin kemudian diresmikan pada 1 Agustus 1907 di bawah pimpinan L.W. van Suchtelen dan W. Jolles sebagai wakilnya.

Bab kedua membahas peran DJB Bandjermasin, baik sebagai bank sirkulasi maupun komersial yang mengawal perekonomian masyarakat Kalimantan Selatan. Namun demikian, pendirian DJB merupakan gambaran sistem pengelolaan keuangan kolonial yang banyak menguntungkan golongan tertentu saja, seperti pengusaha asing yang bekerja sama dengan pemerintah. Kondisi perekonomian masyarakat pribumi makin termarjinalisasi ketika para investor asing semakin menekan produksi komoditas ekspor. Sebagai dampak permintaan ekspor bahan mentah dari pasar dunia memosisikan negara sebagai pihak yang berutang. Masa ini berlanjut hingga menjelang masa resesi dunia. Bagian terakhir dari bab ini membahas dampak ekonomi global terhadap ekonomi nasional yang turut mengalami kemerosotannya hingga menghambat perekonomian lokal Kalimantan Selatan pada masa malaise 1930.

2 *Geïllustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië 1934*, hlm. 73–74.

INTERNASIONALISASI PERDAGANGAN KARET KALIMANTAN SELATAN

Pada periode antara 1880 dan 1942, Lindblad (2001) menempatkan rentang masa tersebut sebagai periode perekonomian Kalimantan Selatan yang terintegrasi ke dalam pasar dunia. Periode ini sangat memungkinkan terjadinya silang budaya antara para pendatang asing dan pribumi, sehingga ketika budaya pendatang berhadapan dengan mentalitas dan gaya hidup pribumi secara intens menjadi pembanding untuk masa-masa sebelumnya.

Menurut Lindblad perubahan besar yang terjadi di tahun 1880 baik sosial, ekonomi, maupun politik tidak pernah terjadi sebelumnya meskipun bukan berarti tidak sama sekali. Pertumbuhan ekonomi, menurut Lindblad, terjadi secara terus menerus hingga pada titik ekonomi modern. Di abad ke-19 itu penggarapan kayu di sektor kehutanan, minyak bumi dan batu bara di sektor pertambangan, serta karet di sektor perkebunan semakin meningkat.[3] Karet menjadi komoditas penting di masa perkembangan ekonomi modern di Kalimantan Selatan. Serupa dengan lada yang dihadirkan di daerah ini pada pertengahan abad ke-16, karet juga hadir dibawa masuk oleh para haji asal Hulu Sungai pada 1910-an. Mereka menanam karet di lahannya masing-masing hingga menjadi daya tarik masyarakat sekitarnya. Tidak berselang lama, masyarakat Hulu Sungai memiliki perkebunan-perkebunan karet kecil.

Di awal abad ke-20 sektor perkebunan, terutama tanaman karet, menjadi komoditas primadona yang muncul di Kalimantan Selatan. Tanaman karet telah menggeser jauh dari popularitas tanaman lada, bahkan juga jauh melampaui tanaman baru seperti tembakau, kopi, dan kopra. Sementara di sektor kehutanan, rakyat juga mendapat keuntungan karena hutan tropis Kalimantan Selatan menyediakan beragam jenis barang yang dapat dipungut untuk diperdagangkan. Sejak 1904 jenis karet hutan

3 Knappen, *Forests of Fortune? The Environmental History of Southeast Borneo, 1600-1880*, (Leiden: KITLV Press, 2001), hlm. 5–6.

yaitu getah jelutung[4] bahkan menjadi komoditas dagang yang menggeser rotan dan getah lainnya. Jelutung semakin banyak diminta di Eropa untuk dijadikan bahan pembuatan piring asberstos dan ubin. Pada awalnya tidak ada pembatasan untuk melakukan penyadapan getah di hutan liar, masing-masing eksportir mengirimkan krunya sendiri untuk melintasi sungai dan meninggalkan distribusi lapangan kerja kepada orang Melayu. Hal ini secara khusus menguntungkan bagi perusahaan dagang seperti Borsumij[5] karena mereka memiliki banyak relasi dan pengalaman lokal. Namun demikian, pada tahun 1908 pemerintah memberlakukan bahwa pengumpulan (penyadapan) jelutung masuk dalam perjanjian konsesionari seperti halnya dalam pertambangan. Kebijakan ini seakan sebagai upaya pemerintah melindungi penyadap pribumi terhadap eksploitasi oleh para perantara yang agresif. Borsumij memprotes hal ini namun gagal.[6]

Pada tahun 1909 beberapa orang Amerika dari Hollandsch-Amerikaandsche Maatschappij datang ke Banjarmasin dengan kapal uap *Nord-Deutsche Lloyd* yang bertujuan mengambil alih tanah dan meminta konsesi yang banyak atas seluruh pantai selatan Kalimantan untuk menguasai jelutung. Perusahaan ini di bawah kendali J. T. Cremer selaku presiden perusahaan, C. J. K. van Aalst sebagai Direktur, dan Elliot sebagai Wakil Umum. Kedatangan mereka mendapat dukungan dari Rockefeller. Perusahaan ini pun bekerja sama dengan Borsumij yang bertindak sebagai kantor cabang pengiriman dan keuangan di Banjarmasin yang telah terhubung juga dengan seorang pengusaha Eropa.[7]

---

4 Jelutung merupakan tumbuhan hasil hutan yang berasal dari Sumatra dan Kalimantan. Pemanfaatan utama dari jelutung ialah getahnya yang dijadikan sebagai komoditas ekonomi karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri.

5 Borsumij (Borneo-Sumatra Maatschappij) merupakan perusahaan perdagangan yang terkenal di Hindia Belanda dan paling masyhur dan disegani di wilayah Kalimantan. Borsumij didirikan oleh J. W. Schlimmer pada tahun 1883 sebagai perusahaan keluarga. Kemudian pada tahun 1894 diubah menjadi sebuah perusahaan dengan perseroan terbatas yang saat itu gudangnya berisikan barang yang senilai hampir setengah juta gulden. Kesuksesan Borsumij sebagai perusahaan dagang yang besar sebab Borsumij menjalankan usahanya dengan memonopoli komoditas serta adanya perluasan berupa pemberian kredit. Lihat J. Thomas Lindblad, *Antara Dayak dan Belanda: Sejarah Ekonomi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan 1880-1942,* Terj. Ika Diyah Candra, (Malang: Lilin Persada, 2012), hlm. 12 dan 15.

6 J. Thomas Lindblad, *Op.Cit*., 1988, hlm. 18–19.

7 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1433, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 28 Februari 1910.

Tujuan perusahaan Amerika-Belanda adalah menyampaikan bahwa produk jelutung sangat diminati di tahun-tahun terakhir reputasinya, namun para pedagang Cina dan pribumi telah memonopolinya. Para pedagang lokal itu meminta pemerintah agar menunda memberikan konsesi yang diajukan karena dapat merugikannya. Dr. Tromp de Haas dari Departemen Pertanian dan Salverda inspektur dari Boschwezen (Kehutanan) menuju Banjarmasin dari Batavia untuk misi pembatalan konsesi kepada pemerintah setempat. Di lain pihak, di daerah Sampit dan Kotawaringin jelutung telah dieksploitasi habis-habisan dengan cara penebangan dan penyadapan jelutung hingga menyebabkan pohonnya mati. Oleh keadaan ini, pihak Borsumij bersama Kapiten Cina Thio Soen Yang meminta pemerintah agar menghentikan eksploitasi semacam itu.[8] Sampai pertengahan 1930-an kepentingan Belanda pada hutan di luar Jawa terutama dipusatkan pada berbagai produk hutan bukan kayu, yaitu khususnya rotan, karet liar atau getah. Karet liar awalnya adalah produk yang paling berharga, dengan getah perca sebagai primadonanya pada tahun 1900-an, namun kemudian tergeser oleh jelutung sejak tahun 1909. Untuk melindungi pasokan jelutung di daerah pantai selatan, sejak 1914 pemerintah membentuk polisi hutan khusus untuk kawasan Kalimantan Selatan. Seorang perwira kehutanan dan petugas keamanan jelutung ditempatkan di Banjarmasin untuk masa kerja dua tahun.[9]

Tahun 1910 merupakan tahun yang kurang menjanjikan bagi perdagangan hasil hutan. Hanya mengalami peningkatan harga di bulan April dan setelahnya kembali mengalami penurunan terutama untuk produk getah perca, sehingga total pendapatan tahunan hanya 1/3 dari pendapatan yang diperoleh tahun 1909. Kerugian secara marjinal terkompensasi oleh semua peningkatan simultan dalam pengiriman getah, sekalipun rotan menempati posisi kedua sebagai komoditas ekspor hasil hutan setelah getah perca. Kemunduran harga hasil hutan terus terjadi di tahun-tahun berikutnya di pasar irregular Singapura, bahkan harga getah perca menghilang sangat cepat. Ketidakpastian muncul karena konflik antara para *supplier*. Sejumlah besar perjanjian konsesi jelutung yang

8 J. Thomas Lindblad, *Op.Cit.*, 1988, hlm. 18-19.

9 Potter, *Op.Cit.*, 2002, hlm. 374–378.

dilakukan di selatan Kalimantan Selatan pada tahun 1911 menyebabkan perbenturan dengan pihak Borsumij. J. G. Schlimmer, direktur perusahaan (Borsumij) mengkritik keinginan seorang sindikat asal Jerman yang ingin menempati posisi *supervisor* orang Eropa dalam sejumlah besar konsesi jelutung. Sementara itu, peningkatan getah perca dalam jangka pendek memikat reaksi yang terlalu optimis dari para produsen pada waktu itu dan produsen potensial lainnya. Namun demikian, di tahun 1912 konsesi jelutung milik pengusaha Eropa di Sampit menjadi cikal bakal berdirinya Nederlandsch Indische Boschproducten Maatschappij (NIBM)[10]. Akan tetapi, di daerah ini para penyadap dari Borsumij menyalahgunakan sebuah konsesi yang dibuat oleh perusahaan produk hutan itu. Alasannya, karena secara nyata mengalami hambatan terhadap konsesi kompetitor.[11]

Gambar 2.1. Pencucian Rotan di Suatu Sungai di Kalimantan, 1915
Sumber: Han Knapen. 2001. Forest of Fortune? Leiden: KITLV Press.

Pada komoditas lain, awal dekade 1910-an karet menjadi komoditas baru yang menjanjikan kemakmuran perekonomian rakyat. Dalam waktu yang bersamaan, perusahaan-perusahaan perkebunan besar milik swasta muncul untuk tujuan menghidupkan perekonomian

10 Nederlandsch Indische Boschproducten Maatschappij (NIBM) merupakan perusahaan produk hutan Hindia Belanda. Lihat J. Thomas Lindblad, *Antara Dayak dan Belanda …,* hlm. 18.

11 *Ibid*., hlm. 18 dan 47–48.

rakyat Kalimantan Selatan. Penanaman dan budidaya karet di kalangan penduduk Kalimantan Selatan mulai dilakukan selama kenaikan harga karet pada tahun 1909–1910. Minat para penduduk mengembangkan karet sebab teknologi yang digunakan sederhana dan penghasilan yang diperoleh tinggi.[12] Bibit karet pertama kali didatangkan dari Malaya. Pada saat awal penanamannya harga karet termasuk tinggi sekitar *f*12 per kg. Penawaran pasar atas harga karet yang tinggi saat itu yang telah memotivasi masyarakat Hulu Sungai untuk berkebun karet menggantikan tanaman kopi dan lada.[13] Kondisi alam Kalimantan Selatan yang berbasis sungai-sungai tidak menghambat ekspansi penanaman karet, melainkan menjadi faktor utama untuk akselerasi perekonomian modern di masa itu. Sungai menjadi sarana transportasi yang mudah untuk mengangkut karet dari pedalaman ke Pelabuhan Banjarmasin hingga diekspor ke berbagai negara. Sebuah masa keemasan kedua bagi Kalimantan Selatan dengan komoditas karet sebagai primadona dunia menggantikan lada.

Oleh karena itu, persoalan karet menjadi hal penting dalam pembahasan perekonomian masyarakat Kalimantan Selatan, terutama pada tiga dekade awal 1900-an, mulai masa *booming* hingga *Malaise*. Walaupun pada 1913 dan 1914 harga karet pernah jatuh hingga *f*40 per pikul, tetapi tidak menghentikan orang menanam karet. Keuntungan dari perdagangan karet kembali meningkat di tahun 1915 dengan harga karet naik lebih dari *f*100 per pikul. Di tahun itu jumlah perkebunan karet pun kembali meningkat.[14]

Dalam pandangan Lindblad bentuk perubahan pola perekonomian di Kalimantan Selatan (1880–1942) adalah sebagai manifestasi interaksi ekonomi antara ekonomi pasar regional dan pasar internasional yang berlangsung secara intensif. Wujud relasi ekonomi itu terlihat dalam aktivitas pasar rakyat yang intensif dilakukan setiap hari Kamis di Pasar

12 Tundjung, Karet dari Hulu Sungai: Budidaya, Perdagangan, dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian di Kalimantan Selatan, 1900-1940, (Universitas Indonesia: Disertasi, Depok, 2004).

13 Tim Penulis, *Republik Indonesia: Propinsi Kalimantan*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 190–191.

14 Bambang Purwanto, "Ekonomi Karet Rakyat Indonesia, Tahun 1890an sampai 1940", dalam J. T. Lindblad (ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 217.

Gambar 2.2. Pasar Karet Mingguan di Kalua, Hulu Sungai 1925
Sumber: J. Thomas Lindblad. 1988. *Between Dayak and Dutch*. Dordrecht: Foris Publication.

Kalua sebelah barat laut daerah Hulu Sungai. Pada saat pasar dibuka perahu-perahu dalam jumlah besar berkumpul di Sungai Tabalong dan lebih dari seratus perahu tambangan berkumpul di jalan sempit sepanjang sungai. Beberapa sumber informasi mencatat tentang kesibukan seorang pedagang Melayu (*pambalantikan*) yang pindah dari Banjarmasin ke pasar pedalaman itu. Ia bertindak sebagai perantara Banjar dalam perdagangan karet pribumi dan harus melakukannya setiap pekan pulang dan pergi antara Banjarmasin dan Hulu Sungai. Relasi dagangnya tidak hanya di Kalimantan, namun mampu menjangkau Singapura yang dilakukan dalam komunikasi telegrafis secara konstan terutama untuk mengetahui setiap perkembangan terbaru dari harga karet.[15]

15 J. Thomas Lindbland, *Between Dayak and Dutch, The Economic History of Southeast Kalimantan, 1880–1942*, (Dordrecht-Holland: Foris Publications, 1988), hlm. 47 dan 57–61; Bambang Purwanto, "Ekonomi Karet Rakyat Indonesia, Tahun 1890an sampai 1940", dalam J. T. Lindblad (ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 206–207.

Mulai tahun 1900-an karet jenis *Hevea brasiliensis* merupakan jenis karet pertama yang ditanam di Sri Lanka dan Semenanjung Malaya. Tanaman ini sampai di Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun oleh dua pihak secara mandiri, yaitu para haji di Pagat (dekat Barabai) dan administrator perkebunan tembakau yaitu Mahe. Pada masa itu perkebunan tembakau utara Hulu Sungai sudah tidak subur sehingga administratornya tertarik membawa bibit karet dari kawasan permukiman Selat Malaka. Dua relasi bisnis Mahe yaitu C. Bohmer dan W. M. Ernst mengawali perkebunan karet di Hayup dekat Tanjung. Mereka bereksperimen dengan bibit karet jenis *Hevea brasiliensis* dan *Ficus elstica*, namun kemudian mereka cenderung mengembangkan jenis pertama. Eksperimen penanaman karet jenis *Hevea brasiliensis* menarik para investor asing untuk mengembangkan perkebunan karet di pedalaman Hulu Sungai. Eksperimen tersebut berhasil menarik bank-bank di Berlin untuk mengeluarkan lebih dari 1 juta gulden dalam pendanaan konstruksi perkebunan di pedalaman Hulu Sungai itu. Broersma menyebut tanaman karet jenis *Hevea brasiliensis* sebagai tanaman karet rakyat atau 'pohon karet'. Menurutnya, tanaman ini muncul dalam dua periode, yang pertama sekitar tahun 1910-an berasal dari kaum kapitalis atau para pedagang Eropa dan kedua sekitar tahun 1919 berasal dari masyarakat. Di daerah bagian selatan Tanah Bumbu dan di Pasir, para anggota kerabat raja membudidayakan tanaman karet sebagai investasi uang yang diikuti kemudian oleh beberapa pedagang dan para pemilik uang.[16] Sejak itu transaksi jual beli karet dengan sistem uang berkembang pesat, khususnya di beberapa daerah strategis di pedalaman Kalimantan Selatan.

Dalam pendapat lain, secara garis besar Broersma menggambarkan perkembangan penerimaan karet di Kalimantan Selatan sejak awal hingga 1920-an. Menurutnya, awal abad ke-20 lalu lintas antara Banjarmasin-Singapura-Selat Malaka sangat padat. Bibit karet sudah dibawa oleh para haji dan pedagang di wilayah ini untuk dibawa ke Barabai, kampung Pagat. Seperti dalam pandangan Lindblad, Broersma juga beranggapan sama bahwa tahun 1910 merupakan awal adanya penanaman karet

16 J. Thomas Lindbland, *Loc.Cit*, 1988; dan Broersma, 1927, *Handel en Bedrijf in Zuid- en Oost-Borneo*, 'sGravenhage: G. Naeff, hlm. 86.

yang dilakukan oleh masyarakat Hayup di Hulu Sungai. Harga karet meningkat seiring dengan lonjakan permintaan pasar di tahun yang sama hingga tahun 1916. Tahun itu merupakan puncak harga karet, namun pihak pemerintah baru melakukan langkah taktis untuk memberdayakan masyarakat dalam budi daya karet di tahun 1919. Pemerintah mengutus petugas pertanian ke Barabai untuk memberikan penyuluhan mengenai perawatan, penyadapan, pengolahan, dan pemberantasan penyakit pohon karet. Di tahun 1920–1922 harga karet mengalami penurunan namun stabil. Situasi ini pun memengaruhi gairah petani karet. Mereka tidak lagi tertarik untuk mengikuti penyuluhan-penyuluhan dari pemerintah. Pada tahun 1921 pemerintah kemudian menarik para penyuluh dari Barabai untuk kembali ke Banjarmasin.[17]

Dalam hal pengusaha asing di bidang karet, data Lindblad menambahkan adanya seorang importir bibit karet jenis *Hevea brasiliensis* dari Selat Malaka, yaitu E. A. Hilckes. Dengan demikian, para pemerhati dan pengembang tanaman karet semakin bertambah di Hulu Sungai. Hilckes membangun dua perkebunan di Martapura, yaitu Tanah Intan dan Danau Salak. Pada tahun 1907 tanaman karet miliknya sudah mencapai lebih dari 100.000 tanaman. Hilckes merupakan seorang Eropa yang memiliki kemampuan memahami alam Kalimantan Selatan sehingga berhasil mengembangkan perkebunannya dan memutuskan untuk tinggal di sana. Ia juga dipandang sebagai perintis perkebunan Eropa di Kalimantan Selatan.[18] Hilckes menjadi pengusaha karet terkemuka di Kalimantan Selatan yang kemudian memiliki perusahaan Handelsvereeniging "Bandjermasin" (Serikat Perdagangan Banjarmasin) dengan aset tetap sebesar *f*600.000. Selain itu, ia memiliki beberapa toko, beberapa bidang tanah, dan sebuah pabrik es di Kota Banjarmasin. Dari modalnya itu Hilckes juga berkonsentrasi penuh pada *Cultuur- en Handel-Maatschappij Sampit* (Perusahaan Perkebunan dan Perdagangan Sampit), sebuah perkebunan karet yang dirintisnya di Sampit. Tak hanya karet, Hilckes juga memiliki konsesi jelutung di wilayah Sampit. Ia bahkan menetap di Sampit sampai akhir hidupnya di tahun 1935.[19]

17 Broersma, *Op.Cit.*, hlm. 121–122.

18 J. Thomas Lindblad, *Loc.Cit.,* 1988.

19 *Ibid.*, hlm. 47-48.

Selain Eropa, Cina, dan pribumi, pemain lain di sektor karet adalah bangsa Jepang. Selama dan sesudah Perang Dunia I perusahaan Jepang dan para petani mengadakan penanaman karet di Sumatra dan Kalimantan. Kepentingan karet bagi bangsa Jepang di kedua wilayah itu sungguh-sungguh tinggal landas sesudah Inggris di Malaya mengintroduksikan Undang-Undang Pembatasan Tanah-tanah Karet pada tahun 1917. Peraturan tersebut menetapkan orang-orang asing tidak dapat memiliki perkebunan karet lebih dari 50 acre. Artinya, secara murni merupakan tindakan anti-Jepang karena sejak tahun 1910 para pengusaha karet Jepang sudah begitu sukses di Malaya sehingga mengancam kepentingan pengusaha karet Inggris. Karena sebab itulah, Undang-Undang itu dibuat untuk merintangi perusahaan-perusahaan karet dan para petani Jepang di Malaya. Bagi Jepang bisnis karet tetap menjadi persaingan sehingga kemudian berupaya mengadu untung di Sumatra dan Kalimantan setelah upayanya di Malaya dibatasi.

Maka, pada tahun 1917 beberapa perusahaan karet milik Jepang berdiri di Kalimantan dan mengambil alih perkebunan karet Danau Salak. Pada tahun 1918 Kalimantan Gomu Kokusaku Kaisha, Nangyo Gomu Kokusaku Kaisha, Sumatra Gomu Kokusaku Kaisha, dan Meiji Seito Kokusaku Kaisha, serta Kelompok Furukawa mengambil alih beberapa perkebunan karet di Sumatra dan Kepulauan Riau. Pada tahun 1919 Jepang mendirikan Dutch Kalimantan Rubber Co di Banjarmasin untuk mengawasi kepentingan karet di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Di Kalimantan, perkebunan karet mereka berkembang pesat terutama dikaitkan dengan Nomura Hindia Timur (Nomura East Indies). Selain karet, perusahaan juga turut mengambil bagian dalam ekspor kayu Kalimantan. Untuk mengurus semua kegiatan perusahaan, Nomura mendirikan Nomura East Indies Cultuur Maatschappij pada tahun 1920 dengan markas besarnya di Banjarmasin. Perusahaan Nomura ini pun kemudian berhasil membuka cabang-cabangnya di Surabaya, Singapura, Bangkok, dan Hanoi.[20]

20 Peter Post, "Karakteristik Kewirausahaan Jepang dalam Ekonomi Indonesia sebelum Perang" dalam J. Thomas Lindblad (ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 361–363.

Tak kalah menarik ialah bagaimana proses perdagangan karet di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan. Kategori ekspansi besar untuk karet regional itu terjadi antara produsen-produsen skala kecil pribumi di Hulu Sungai. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Banjar. Secara tradisional mereka menempati istilah "manusia ekonomi" (*homo economicus*) karena mampu mengembangkan perekonomiannya pada tingkat yang unggul dibandingkan suku-suku lainnya. Mereka cepat mendapatkan kesempatan-kesempatan menguntungkan dalam memperluas sektor karet. Strategi mereka dalam membudidayakan karet di saat harga meninggi adalah dengan mempersiapkan kebun-kebun miliknya untuk tanaman karet yang muda di antara tanaman padi yang sudah ada. Mereka bekerja di kebun untuk kedua tanaman miliknya itu, yaitu memelihara padinya dan terkadang menyadap karet. Realisasi dari sebuah kombinasi pertanian subsisten dengan tanaman yang baru tidak menunjukkan banyak kesulitan, karena persyaratan pemeliharaannya ringan dan kebanyakan tempat yang disadap dilakukan di waktu pagi. Mayoritas kebun karet dioperasikan oleh satu keluarga bersama anak-anaknya. Hanya terkadang sebuah kebun ditawarkan untuk pekerja sewaan, yang digaji berdasarkan prinsip "bagi dua", yaitu proporsi yang sama untuk pemilik lahan dan petani penggarap.[21]

Pertengahan tahun 1920-an dikenang sebagai "masa keemasan" dalam sejarah perekonomian Hulu Sungai, sekalipun dikembangkan oleh petani kecil. Tidak seperti di Malaysia, di masa yang sama saat harga karet di Hulu Sungai tinggi dan tidak terdapat pembatasan produksi sehingga mengalami masa kemakmuran secara merata. Dampak perdagangan karet di masa itu telah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai. Masyarakat banyak yang mampu memperbaiki rumah-rumahnya, menjalankan ibadah haji ke Mekah, dan memiliki mobil sebagai sarana mengangkut karet ke pasar-pasar termasuk pasar di Kuala yang menggunakan kurs Singapura untuk bermacam-macam mutu karet lembaran. Para pekerja dari berbagai daerah banyak yang tertarik bekerja di Hulu Sungai, terutama pada musim kemarau ketika tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk penyadapan. Tahun 1923 harga karet mencapai *f*300

21 J. Thomas Lindblad, *Op.Cit.*, 1988, hlm. 59–61.

per 100 kati atau *f*500 per 100 kg. Adapun masa keemasan utama untuk perdagangan karet di Kalimantan Selatan terjadi di tahun 1925–1926. Tingginya harga karet menyebabkan penduduk terus menerus menanam karet bahkan hingga ke halaman rumahnya. Memasuki tahun 1930-an karet kemudian menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat Kalimantan yang merata hingga ke wilayah pedalaman.[22] Akan tetapi, sejak itu sampai tahun 1935 harga karet terus menerus turun dan berada dalam masa kejatuhan ekonomi global dunia (*Malaise*). Pemerintah Belanda berusaha mengendalikan kondisi ini dengan melarang masyarakat memperbanyak tanaman karet.[23]

Gambar 2.3. Menyadap Karet di Hulu Sungai Tahun 1930-an

Sumber: J. Thomas Lindblad. 1988. *Between Dayak and Dutch*. Dordrecht: Foris Publication.

22 Potter, *Op.Cit.*, 1998, hlm. 399–400 dan Potter, *Op.Cit.*, 2005, hlm. 375.

23 Tim Penulis, *Republik Indonesia: Propinsi Kalimantan* …, hlm. 190–191.

Aspek penting lainnya adalah adanya upaya pemerintah Hindia Belanda yang mendorong perusahaan-perusahaan Eropa, khususnya perusahaan Belanda, untuk menantang pengusaha-pengusaha Cina dalam sektor karet rakyat. Beberapa perusahaan dan perkebunan Eropa membeli karet dari rakyat dan membangun pabrik-pabrik pengolahan untuk memproses karet. Persaingan ekonomi antara Eropa dan Cina ini bahkan terlihat pada perusahaan Koninklijk Paketvaart Maatschappij (KPM) yang mengurangi biaya pengangkutan bagi para pedagang Eropa, sementara menolak mengangkut karet milik para pedagang Cina. Namun demikian, perusahaan-perusahaan Eropa tidak pernah menyaingi kesuksesan para pedagang Cina dalam sektor karet rakyat.[24]

Dampak kesuksesan karet membawa perubahan di kalangan penduduk bukan saja seperti di Kota Banjarmasin, Kuala Kapuas dan yang lainnya, tetapi juga bagi penduduk di pedalaman seperti di daerah Dayak Dusun Bawah. Namun demikian, hasil dari usaha karet itu telah membuat persaingan sosial meningkat terutama dalam hal kepemilikan harta, seperti dalam menampilkan rumah yang semakin baik dan kokoh. Sebagai dampaknya adalah meningkatnya harga kayu yang dijadikan bahan bangunan utama membangun rumah. Meski demikian, usaha penebangan kayu tidak menyaingi usaha perkebunan karet yang menarik perhatian berbagai kalangan mulai buruh hingga pengusaha.[25]

Di sisi lain, penduduk pedalaman Dayak Dusun Atas beralih usahanya menjadi petani karet sejak tanaman karet diperkenalkan ke daerah ini. Mereka antusias menanam karet dengan memanfaatkan lahan-lahan bekas ladang mereka, bahkan tidak jarang terjadi rebutan lahan di antara kalangan mereka. Ladang yang sudah lama ditinggalkan bisa terjadi direbut oleh orang lain untuk ditanami karet. Namun demikian, tidak ada ketentuan yang dibuat oleh pemerintah kolonial terkait hal itu. Akibatnya, pimpinan pemerintahan setempat mulai sering dibuat repot karena adanya pengaduan yang memperkarakan batas-batas tanah yang dianggap telah direbut pihak lain. Sebagian kecil masyarakat memang telah ada

24 Bambang Purwanto, "Ekonomi Karet Rakyat Indonesia …", hlm. 206–207.

25 *Soeara Kalimantan*, Oktober 1926.

yang memiliki ketentuan kepemilikan lahan dengan batas-batasnya dari pemerintah, namun umumnya penduduk tidak memilikinya. Maraknya berkebun karet yang diiringi oleh berbagai sengketa penguasaan tanah untuk lahan karet di kalangan masyarakat menjadi persoalan yang krusial.[26]

Penanaman karet di Kalimantan Selatan pada dasarnya dapat dibagi pada tiga periode. Pertama, sebelum tahun 1924; kedua, setelah tahun 1925; dan ketiga, pada tahun 1938. Pada tahun 1924 di seluruh Kalimantan Selatan terdapat penanaman karet sekitar 31% dari jumlah pohon karet, yakni 22.784.200 pohon di lahan seluas 25.173 ha. Jumlah perkebunan karet sejak 1924–1938 itu mengikuti peningkatan jumlah harga jual sampai tahun 1938 yang terus beranjak naik. Fluktuasi harga karet selama rentang tahun itu diatur oleh perusahaan Rubber Restriksi yang membeli karet-karet rakyat dengan harga sesuai yang ditetapkan pemerintah.[27]

Hampir di seluruh wilayah Kalimantan Selatan terdapat tanaman karet, baik yang dimiliki rakyat maupun milik perusahaan perkebunan. Di daerah Hulu Sungai ada sekitar 25% pohon karet, sedangkan yang ditanam sebelum tahun 1924 di daerah Banjarmasin dan Martapura terdapat sekitar 20% dan di daerah Barito sepanjang tepi sungai sekitar 10% dari keseluruhan tanaman karet di Kalimantan Selatan. Di Kapuas juga terdapat karet yang ditanam sebelum tahun 1924 dan di sepanjang tepi sungai dan anjir Serapat. Tanaman karet di setiap distrik diperkirakan ada 10% di Kapuas, 6% di Kahayan Hilir, dan 4% di Kahayan Hulu. Di Kotawaringin atau Sampit tanaman karet juga terdapat di tepi-tepi sungai, jumlahnya kira-kira 8% di Mantara Seruyan dan 2% di Katingan. Adapun jumlah pohon karet tahun 1936–1937 diperkirakan terdapat 22.784.200 pohon di atas lahan seluruhnya seluas 25.173 ha sebagaimana tercermin di dalam tabel di bawah.[28]

---

26 *Soeara Kalimantan,* Oktober 1926.

27 *Ibid*.

28 Tim Penulis, *Republik Indonesia: Propinsi Kalimantan* …, hlm. 192.

Tabel 2.1.
Jumlah dan Luas Tanaman Karet di Kalimantan Selatan 1936–1937

No.	Daerah	Jumlah %	Jumlah Pohon	Luas (ha)
1.	Hulu Sungai	40	18.741.200	20.596
2.	Banjar (Banjarmasin & Martapura)	20	1.249.500	1.357
3.	Barito	10	687.400	915
4.	Kapuas/Kahayan	20	1.657.400	1.706
5.	Kotawaringin/Sampit	10	448.700	599
Total		**100**	**22.784.200**	**25.173**

Sumber: Republik Indonesia, Kalimantan, 1953, hlm. 192.

Komoditas lain yang menjadi penopang perekonomian di Kalimantan Selatan pada awal abad ke-20 adalah kayu. Saat itu terdapat perusahaan kayu pertama di tepi Sungai Kahayan yang dikelola secara tradisional sehingga hasilnya tidak optimal dan cepat. Sumber kayu yang diolah penduduk berasal dari hutan-hutan yang tidak jauh dari tepi sungai itu dan dari permukiman mereka. Mereka menebangi pohon kayu, mengumpulkannya kemudian merakitnya, dan menghanyutkannya ke hilir menuju Kuala Kapuas hingga ke Banjarmasin. Di kota ini kayu-kayu diolah pada usaha penggergajian kayu tradisonal, orang Banjar menyebutnya *wantilan*, menjadi balok, papan, dan bentuk lainnya. Proses mulai dari menebang hingga menjadi bahan untuk bangunan seperti papan, balok dan sebagainya itu berlangsung dalam waktu berbulan-bulan. Hal ini juga seringkali menyebabkan kelangkaan ketersediaan bahan bangunan dari kayu sehingga harga kayu pun menjadi mahal. Pada tahun 1930 Scophuys mencatat seluas 772 km^2 hutan kayu ulin yang masih ada di Kalimantan Selatan, yaitu di lokasi yang sulit dimasuki di sepanjang Kahayan Hulu, Kapuas, Barito dan beberapa darinya telah mengalami penipisan.[29]

29 Knappen, *Forests of Fortune? The Environmental History of Southeast Borneo, 1600–1880*, (Leiden: KITLV Press, 2001), hlm. 50–51 dan Potter, *Op.Cit.*, 2005, hlm. 374–375.

Gambar 2.4. Penggergajian Kayu Rakyat (Wantilan) di Banjarmasin 1938
Sumber: Han Knapen. 2001. *Forest of Fortune*? Leiden: KITLV Press.

Usaha kayu dibuat oleh kepentingan swasta untuk mendirikan konsesi kayu, tetapi sampai pertengahan 1930-an tidak berhasil. Masuknya minat Jepang di dekat lahan minyak Tarakan pada tahun 1934 untuk membeli kayu lokal dan pengapalannya langsung ke Jepang, menyebabkan peningkatan perhatian keamanan di antara para pejabat Belanda di Tarakan. Pejabat setempat kemudian menawarkan suatu konsesi kepada orang Jepang untuk lebih ke selatan dekat Sangkulirang. Aturan-aturan juga diterapkan guna membatasi potongan kayu komersial pada petak potongan yang terdaftar atau konsesi besar. Dalam perkembangan pesat, kebanyakan kayu ekspor datang untuk dipotong dikonsesi. Perusahaan Jepang Nangyo Ringyo Kokusaku Kaisha menggunakan 3.500 pekerja dengan produksi sebagian mesin 200.000 meter kubik, sementara perusahaan Jepang lain memiliki cakupan lebih kecil atau mengontrol beberapa lokasi pemotongan. Semua kayu ini diekspor dalam kapal-kapal Jepang. Perusahaan pemerintah juga terlibat mengelola suatu penggergajian kecil di Tarakan dan terlibat dalam produksi kayu besi komersial dari kompleks

di Batu Licin di pantai tenggara. Kumpulan *Agathis borneensis* yang bisa dimasuki dengan rel ringan di pantai selatan-tengah berawa di Sampit, digunakan bagi produksi kayu lapis dan bubur kayu. Setelah gangguan yang disebabkan oleh Perang Dunia II, hanya operasi Sampit yang relatif terpencil tetap bertahan.[30]

Belanda meletakkan dasar bagi administrasi hutan masa depan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Timur selama akhir 1930-an, meskipun dana dan personil tetap terbatas di luar Jawa. Keterlibatan Jepang dan kesukaan mereka bagi konsesi campuran swasta dan pemerintah bergema dalam kebijakan kemudian. Keseganan Belanda untuk menghadapi masalah hak pribumi di hutan menunjukkan bahwa masalah khusus dialihkan kepada pemerintah baru setelah kemerdekaan.[31]

Bila ekspor produk nonkayu umumnya dikapalkan ke Singapura, maka untuk ekspor kayu skala internasional masih kecil sekalipun sudah mencapai Cina dan Jepang yang diambil dari Samarinda. Aliran kayu ke Jawa dari Kalimantan tidak sebanding dengan kayu-kayu dari Sumatra. Pengumpulan kayu bagi ekspor diatur oleh para pedagang dengan menggunakan tenaga lokal. Penebang kayu yang berkeliling ke daerah hutan di sepanjang aliran utama dibiayai oleh pedagang di kota-kota hilir atau di persimpangan sungai. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa proses menghilirkan kayu setelah melalui proses pemotongan yang diapungkan menyusuri sungai atau ditarik dalam bentuk rakit-rakit besar. Namun, proses ini memiliki risiko tinggi saat terjadi penurunan permukaan sungai yang dapat mengakibatkan gangguan untuk pasokan kayu. Hambatan dalam perdagangan kayu yang terjadi saat air sungai surut itu mengakibatkan para penebang atau perusahaan pengolah kayu menunggu dalam waktu yang lama dalam proses distribusi kayu.[32]

Kayu-kayu yang telah ditebang sebelum mencapai sungai besar menuju Banjarmasin harus terlebih dahulu melalui dua kanal (*anjir*), yakni yang terdapat menghubungkan antara Sungai Kahayan dan Sungai Kapuas (Murung) selebar 6 meter dan panjang 23 kilometer, dan satu *anjir*

30 Potter, *Loc.Cit.,* 2005, hlm. 375–376.

31 *Ibid.*

32 *Ibid.*

lagi yang menghubungkan Sungai Kapuas Murung dengan Sungai Barito sepanjang 35 kilometer. Untuk melalui *anjir-anjir* itu rakit besar terpaksa harus dirombak dulu menjadi lebih kecil yang terdiri dari gabungan tiga batang kayu saja lebarnya. Di samping merepotkan tentu saja hal ini juga kembali menyita waktu. Meskipun demikian, kayu tetap dicari dan dibutuhkan penduduk Kalimantan. Oleh karena itu, para saudagar kayu seringkali langung pergi ke pedalaman seperti daerah Dayak Dusun Bawah untuk membeli atau memesan kayu dengan memberikan uang muka untuk biaya pergi ke hutan menebang kayu.[33] Tantangan inilah yang membuat para pedagang kemudian menyukai produk nonkayu karena lebih mudah ditangani, terlebih harga kayu lebih rendah dari produk hutan lainnya, apalagi di masa depresi sekitar tahun 1929–1930 yang mengakibatkan jumlah potongan kayu terlantar di hutan.

Sebenarnya, masyarakat Kalimantan mengkhawatirkan kemerosotan usaha kayu di tahun 1920-an sebelum puncak masa resesi ekonomi global terjadi. Seperti yang diberitakan surat kabar *Soeara Kalimantan* yang terbit Oktober 1926 mengungkapkan tentang kekhawatiran itu sebagai akibat adanya isu perizinan hak penguasaan tanah dari pemerintah kepada seorang saudagar Cina, Thioe Soen Bie yang terkenal di Kuala Kapuas. Isu tersebut meresahkan penduduk Kuala Kapuas yang menduga akan bermunculan saudagar-saudagar lain untuk meminta hak penguasaan atas tanah-tanah hutan di pedalaman di wilayah mereka. Pemberian hak penguasaan tanah kepada para kapitalis diduga menjadi penyebab kehilangan mata pencaharian penduduk setempat yang hanya bertumpu pada pengerjaan produk hutan. Oleh karena itu, mereka mengharapkan pemerintah berlaku adil dan memperhatikan kepentingan penduduk lokal. Namun, kekhawatiran tersebut tidak menjadi perhatian pemerintah. Karena pemerintah lebih mengizinkan pengusaha Cina yang dapat mendukung perekonomiannya. Lebih jauh, pemerintah mengapresiasi gagasan Thioe Soen Bie untuk mendirikan pabrik penggergajian di Kuala Kapuas dengan asumsi dapat menggembirakan penduduk Dayak Dusun Bawah.

33 *Soeara Kalimantan*, Oktober 1926.

Dalam berita surat kabar itu, kegembiraan penduduk Dayak Dusun Bawah diekspresikan dengan melakukan tradisi lokal setempat yaitu dengan dipalas dengan darah dan beberapa kepala manusia. Tujuannya adalah untuk kelancaran, keselamatan, dan keuntungan dapat diraih oleh pabrik yang telah diizinkan berdiri di daerah itu sekaligus dapat berdampak baik bagi penduduk setempat. Sebagian penduduk di Kapuas masih mempercayai tradisi tersebut, sekalipun sebagian penduduk yang lainnya menggantikannya dengan kepala kerbau, sapi, babi atau bahkan cukup dengan darah ayam sebagai material ritualnya.

Secara umum, baik penduduk Dayak Dusun Bawah maupun Dayak Dusun Atas memiliki kesamaan dalam urusan mata pencaharian yakni pengerjaan produk hutan. Namun, penduduk Dayak Dusun Atas memiliki mata pencaharian lain sebagai petani dengan sistem ladang berpindah. Para lelaki dewasa atau kepala keluarga pekerjaan utamanya sebagai pengolah hutan. Adapun di ladang hanya membantu istri dan anaknya pada saat membersihkan hutan yang dibuka untuk berladang dan menanam padi. Setelah pekerjaan itu selesai mereka kembali ke pekerjaan utamanya sebagai pencari getah, rotan, dan produk hutan lainnya. Penggarapan pertanian padi selanjutnya dilakukan oleh istri dan anak-anaknya. Pekerjaan ganda seperti itu lebih kepada tujuan menopang atau melanjutkan kehidupannya tanpa mengandalkan satu jenis pekerjaan. Selain berasumsi risiko mengandalkan dari bertani padi karena adanya musim gagal panen. Kebutuhan hidup mereka bertambah dengan adanya beban membayar pajak ke pemerintah sehingga penduduk lokal berusaha untuk memilki pekerjaan ganda yaitu bekerja di hutan dan di ladang.[34]

34 *Soeara Kalimantan*, Oktober 1926.

DE JAVASCHE BANK (DJB) AGENTSCHAP BANDJERMASIN

Mengingat potensi besar di sektor ekonomi yang didukung oleh kekayaan sumber daya alam serta telah hadirnya berbagai perusahaan di Kalimantan Selatan, maka mendirikan lembaga keuangan menjadi hal penting bagi daerah ini. Memasuki abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda semakin menempatkan Banjarmasin sebagai kota strategis bagi arus ekonomi yang menghasilkan banyak pundi-pundi negara.

Mengulas sekilas awal pendirian De Javasche Bank (DJB), bahwa pada 1827–1828 Raja Willem I menerbitkan Oktroi (Hak Istimewa) pendirian DJB guna mengatasi permasalahan ekonomi dan keuangan di Koloni Hindia Belanda yang timbul pasca-kebangkrutan VOC. DJB didirikan sebagai perseroan swasta dengan peran ganda: (1) sebagai bank sirkulasi dengan hak monopoli menerbitkan dan mengedarkan uang; dan (2) sebagai bank komersial yang memberikan jasa atau layanan perbankan (*general banking services*). Sebagai instrumen pemerintahan kolonial, pendirian DJB ditujukan untuk melakukan reformasi keuangan dan menerapkan sistem moneter yang seragam di dalam wilayah Hindia Belanda. Oktroi I berakhir (kedaluwarsa) pada 1838. Akan tetapi, Kerajaan Belanda terus menerbitkan Oktroi baru sampai Oktroi VIII digantikan oleh Undang-Undang DJB (*DJB-Wet*) pada 1922.

De Javasche Bank adalah bank yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 24 Januari 1828 sebagai bank sirkulasi dengan Kerajaan Belanda sebagai penguasa keuangan. Sebuah Undang-Undang yang diberlakukan pada tahun 1854 menetapkan bahwa Hindia Belanda akan memakai mata uang yang sama seperti yang digunakan di Negeri Belanda, yaitu gulden. Gulden Belanda dan gulden Hindia Belanda mempunya nilai yang sama.[35] Pada tahap awal pemerintah kolonial telah mengambil tindakan membatasi aktivitas-aktivitas DJB. Pada tahun 1854 misalnya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Albertus Jacobus Duymaer van Twist memerintahkan plafon pengeluaran uang kertas oleh DJB.

35 G. H. A. Prince, "Kebijakan Moneter di Indonesia dan Posisi Bank Jawa" …, hlm. 69.

Sejak penetapan itu, pengeluaran uang kertas oleh DJB periode 1854–1859 ditetapkan sedikit berubah-ubah antara 5.25–6 juta gulden Hindia Belanda dan tidak ada rasio jaminan dari berbagai jenis permintaan. Pengeluaran uang kertas kemudian meningkat dari 7 juta gulden pada tahun 1860 menjadi 25 juta gulden pada tahun 1874.[36]

Sementara nilai uang logam perak secara teratur dipindahkan antara Belanda dan Hindia Belanda. Menurut G. Vissering, uang logam perak bernilai 57,5 juta gulden dipindah dari negeri induk ke koloni antara tahun 1906 dan 1913. Pembayaran-pembayaran ekspor terutama yang dilakukan para importir Belanda juga dapat dibayar dengan lembaran (surat wesel) yang dapat diperdagangkan dengan DJB setelah 1891. Pembatasan-pembatasan mengenai lembaran telah dibuang sama sekali pada tahun 1922.

Sementara perkembangan sistem pertukaran emas memungkinkan DJB mencampuri transaksi finansial asing demi kepentingan posisi finansial mereka sendiri, yang jelas terutama setelah standar emas dihentikan pada tahun 1914, yaitu ketika bank kelihatan mampu mempertahankan kurs mereka sendiri dalam pembelian dan penjualan lembaran.[37]

Mengikuti perkembangan ekonomi, DJB berupaya membuka kantor-kantor cabang di sejumlah wilayah potensial, termasuk di wilayah pedalaman karena ramainya aktivitas perkebunan pasca berlakunya Agrarische Wet (1870). Tak hanya berbasis di Pulau Jawa, perubahan pada Okroi IV (1860–1870) yang membolehkan DJB untuk mendirikan kantor cabangnya di luar Jawa, yaitu diawali di wilayah Sumatra kemudian Sulawesi. Perizinan yang diperoleh untuk mendirikan kantor cabang DJB didasari atas rekomendasi dan adanya permintaan dari pedagang maupun pengelola perkebunan.[38]

Melihat perkembangan ekonomi yang dinamis dan bergeliat itu, pada periode-periode berikutnya DJB selanjutnya membuka kantor cabangnya di beberapa wilayah di Hindia Belanda, di antaranya di wilayah Kalimantan.

---

36 G. H. A. Prince, "Kebijakan Moneter di Indonesia dan Posisi Bank Jawa", hlm. 69.

37 *Ibid.*, hlm. 71.

38 Darsono, dkk, *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

Di samping itu, berdasarkan laporan tahunan DJB 1907/1908, pemerintah kolonial melakukan upaya "Politik Guldenisasi" dalam rangka menghalau peredaran mata uang asing di Hindia Belanda. Beragamnya mata uang asing yang beredar di wilayah Hindia Belanda diprediksi dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah kolonial sebab gulden harus bersaing dengan mata uang asing lain seperti Strait Dollar yang lebih banyak digunakan dalam bertransaksi. Mata uang yang beredar secara beragam membuat kebijakan ekonomi dan moneter juga sulit dilakukan. Maka, DJB melakukan pembersihan mata uang asing (*muntzuivering*) dan menggantikannya dengan gulden sebagai alat pembayaran yang sah, termasuk juga upaya perluasan peredaran mata uang gulden hingga ke wilayah pelosok.[39]

Politik guldenisasi[40] bermula dari kerisauan yang dialami oleh Dewan Direksi DJB atas peredaran mata uang dollar di sejumlah wilayah di Hindia Belanda. Di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, pemerintah kolonial bersikeras menegakkan kedaulatan ekonomi dan hegemoni mata uang dengan menerapkan kebijakan politik guldenisasi. Tujuannya

39 Laporan Tahunan De Javasche Bank Tahun 1907/1908 dalam *Deli Courant,* "Kolonien: De Javasche Bank", 27 Juni 1908.

40 Di wilayah lain, di waktu yang hampir berdekatan, pada tahun 1906 Presiden DJB saat itu, G. Vissering, melakukan perjalanan ke Pantai Timur Sumatra untuk membuktikan persoalan yang sama terkait popularitas gulden Belanda lebih rendah daripada dollar. Hasil penelitian G. Vissering pada September hingga Oktober 1906 tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Jenderal dan Direktur Keuangan di Batavia. Berdasarkan hasil diskusi antara Dewan Direksi DJB dengan Gubernur Jenderal dan Direktur Keuangan akhirnya memperkuat gagasan untuk menetapkan gulden Hindia Belanda sebagai satu-satunya alat pembayaran di Sumatra Timur. Pada tanggal 26 Januari 1907 dikeluarkanlah Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 3 tentang larangan memasukkan uang dolar ke seluruh wilayah Keresidenan Sumatra Timur. Perjalanan G. Vissering tersebut diawali dari Medan menuju bagian utara ke Kota Pangkalan Brandan dan kembali lagi ke Medan melalui Tanjung Pura dan Binjai. Esoknya perjalanan dilanjutkan menggunakan kapal laut SS. "Brouwer" menuju Tanjung Balai (Asahan), Sungai Jawi Jawi, Labuan Bilik (Paneh), Bagan Siapi Api, dan Bengkalis. Dia juga melewati Sungai Siak untuk mengunjungi Kota Siak dan Pekanbaru. Dari Pekanbaru, G. Vissering melanjutkan perjalanan ke semenanjung dan berakhir di Singapura. Berdasarkan hasil perjalanan tersebut, dia menemukan realitas peredaran uang di Sumatra Timur kala itu yang beraneka ragam jenis dan nilainya. Keadaan demikian tidak terlepas dari kapitalisasi yang terjadi di Sumatra Timur untuk perkebunan dan pertambangan. Selain beragam mata uang yang beredar, perubahan sistem moneter di kawasan semenanjung juga ikut membawa perubahan ekonomi dan perbankan di Sumatra Timur. Oleh sebab perbedaan dominasi jenis-jenis mata uang yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lain, akibatnya tidak ada kesamaan nilai tukar meski jarak antara dua tempat tidak begitu jauh. Adapun beberapa mata uang asing yang beredar di wilayah itu antara lain Strait-dollar, dollar Meksiko, dollar Inggris, dollar Hongkong, dollar Amerika, mata uang Serawak, real Spanyol, dan Yen. Lihat Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank, *Jaarverslag van de Javasche Bank, 1907/1908*.

adalah untuk menekan dan mengendalikan peredaran mata uang asing. Langkah yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda kala itu ialah melalui DJB dengan melarang impor dan penggunaan mata uang Strait dollar dan berusaha menjadikan uang koin dan uang kertas gulden yang dicetak DJB sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Namun, upaya tersebut menemui kendala.[41] Di Kalimantan Barat, pelarangan impor dollar yang diberlakukan pemerintah kolonial kala itu justru mendorong masuknya uang kertas Singapura yang semakin meluas. Melalui laporan surat bertanggal 18 Juli 1904 Direktur Keuangan meminta saran kepada pihak DJB mengenai tindakan yang harus dilakukan untuk menjawab persoalan tersebut. Direksi DJB menindaklanjuti perihal tersebut dengan dikeluarkan surat No. 380 tanggal 1 Agustus 1904 yang mengusulkan pendirian kantor cabang DJB di Pontianak. Meski begitu, tentu perlu adanya penyelidikan terlebih dahulu untuk mengetahui efektivitas dan jaminan keberadaan kantor cabang tersebut pada masa setelahnya.[42]

Sebuah penelitian disiapkan dalam rangka persiapan pembentukan calon kantor cabang DJB di Pontianak yang dilakukan oleh Regeering (pemerintah lokal). Hasil penelitiannya dilaporkan kepada Direksi DJB dalam Surat No. 3979 tanggal 6 Oktober 1904. Menanggapi laporan tersebut, T. Reysenbach selaku Presiden DJB kemudian berangkat ke Pontianak pada 18 Januari 1905 bertemu dengan Regeering di Pontianak. Dalam laporannya, Reysenbach menyarankan untuk menutup impor dollar lama, sementara Straits dollar masih diperbolehkan untuk perdagangan. Reysenbach menambahkan bahwa pelarangan impor dollar di Kalimantan Barat harus didukung dengan berdirinya bank sirkulasi di Pontianak, sehingga membuka kantor cabang DJB di Pontianak merupakan suatu keharusan. Bank tersebut yang kemudian bekerja sama dengan Regeering untuk mengatur keuangan, peredaran uang, dan Landkas (kas negara).[43]

Penyebaran mata uang dalam prosesnya tersebut dibantu oleh pedagang dan para pemilik kepentingan. Pemerintah bekerja sama

41 Tim Penulis, *Menegakkan Kedaulatan dan Ketahanan Ekonomi: Bank Indonesia dalam Pusaran Sejarah Kalimantan Barat,* (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2019), hlm. 52.

42 *Vestiging van De Javasche Bank Agentschap Pontianak* dalam L. de Bree, *Gedenkboek van De Javasche Bank: 1828-1928,* (Weltevreden: Kolff, 1928).

43 *Ibid.*

dengan DJB agar penggunaan uang dollar di wilayah tersebut menurun dan secara bersamaan menggantinya dengan mata uang gulden cetakan DJB. Efektivitas sistem lembaga bank sirkulasi di Pontianak seperti itu menjadi harapan bagi penggunaan mata uang yang dikeluarkan DJB menjadi alat tukar satu-satunya, sementara peredaran mata uang dollar dihentikan secara menyeluruh. Pemberlakuan guldenisasi berlaku bagi seluruh rakyat, baik individu, kelompok masyarakat, maupun perusahaan. Seorang individu yang menyimpan dollar berapa pun jumlahnya akan mendapat sanksi hukum.[44]

Usulan pembukaan kantor cabang DJB di Pontianak akhirnya disetujui. Pada 1 April 1906 DJB Agentschap Pontianak resmi dibuka berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johannes Benedictus van Heutsz (1904-1909), No. 26 tanggal 26 Januari 1906**.** Kehadiran DJB di Pontianak merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan mata uang di wilayah Kalimantan Barat yang mulai menjadi lokasi investasi para pengusaha Eropa untuk membuka lahan, meskipun realitasnya persoalan nilai mata uang baru dapat terselesaikan beberapa dasawarsa dari masa pendirian DJB Pontianak.

Demikian pula di wilayah Kalimantan Selatan, wilayah ini memiliki potensi besar perekonomian masyarakatnya dan dipandang dapat menjamin keberlangsungan suatu lembaga keuangan seperti sektor perbankan. Maka menjadi keharusan pemerintah untuk menghadirkan dan mengoperasikan DJB di wilayah itu. Pemerintah Hindia Belanda merespons keadaan itu dan kemudian membuka kantor cabang DJB di Banjarmasin.

Pertumbuhan perekonomian yang massif di wilayah ini terlihat dari perkebunan karet sebagai produk unggulan yang menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar untuk Hindia Belanda dari luar Jawa.[45] Peningkatan hasil perkebunan karet diiringi dengan gencarnya investasi swasta di wilayah Banjarmasin pada awal abad ke-20. Keadaan demikian

---

44 *Vestiging van De Javasche Bank Agentschap Pontianak* dalam L. de Bree, *Gedenkboek van De Javasche Bank: 1828–1924,* (Weltevreden: Kolff, 1928).

45 J. Thomas Lindblad, "Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa 1910-1940", dalam J. Thomas Lindblad (Ed.). *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru,* (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 350.

menjadi alasan perlunya monetisasi[46] dan mendorong kebutuhan lembaga perbankan di wilayah itu. Maka hal tersebut direalisasikan dengan mendirikan kantor cabang DJB di Banjarmasin pada 1 Agustus 1907.

Gambar 2.5. Gedung Kantor DJB Agentschap Bandjermasin Sekitar Tahun 1920-an
Sumber: Tropenmuseum

Adapun rencana pendirian DJB Agentschap Bandjermasin tercantum dalam suatu laporan DJB sebagaimana berikut:

> "*De Javasche Bank is dit jaar voorgegaan met de uitbreiding van het antaal vestigingen in Nederlandsch-Indie. Op 30 Juli 1907 kon het Agentschap te Medan worden geopend; daarop volgde 1 Augustus de opening van het Agentschap te Bandjermasin. Terwjil op 27 Juni het Correspondentschap Bengkalis, op 15 Januari en 3 Februari 1908 de Correspondentschap te Tandjong Balei in Asahan en Tandjong Poera in Langkat voor het publiek worden open gesteld. Het vestige van nieuwe kantoren te Samarinda en op Bangka is in onderzoek. Uitbreiding tot nog meer plaatsen is in overweging genomen. De questie Bandoeng, waarvan in ons voorig jaarverslagsprake was, was nog steeds op eene oplossing.*"[47]

46 Darsono, dkk, *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 112.

47 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank, *Jaarverslag van de Javasche Bank, 1907/1908*.

Terjemahan:

"De Javasche Bank pada tahun ini telah mengalami kemajuan dengan perluasan pendirian beberapa kantornya di Hindia Belanda. Pada tanggal 30 Juli 1907 telah diresmikan pembukaan kantor cabang di Medan; kemudian menyusul pada 1 Agustus pembukaan kantor cabang di Banjarmasin. Sedangkan pada 27 Juni kantor koresponden di Bengkalis, pada 15 Januari dan 3 Februari 1908 kantor-kantor koresponden Tanjung Balai di Asahan dan Tanjung Pura di Langkat dibuka untuk umum. Pendirian kantor-kantor baru di Samarinda dan di Bangka sedang dalam penelitian. Perluasan ke wilayah lainnya sedang dipertimbangkan. Persoalan tentang pendirian DJB Bandung yang disebutkan dalam laporan tahunan sebelumnya masih dalam penyelesaian."

DJB Bandjermasin berdiri sebagai bank sirkulasi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam hal sirkulasi moneter di daerah Kalimantan Selatan. Seperti halnya di Kalimantan Barat, DJB Bandjermasin pun melakukan politik guldenisasi, yaitu beroperasi untuk pembersihan mata uang asing dan kuno yang masih beredar di daerah itu dan menggantinya dengan gulden. Sebagai konsekuensi dari kebijakan itu, pada masa transisi, mata uang menjadi jarang ditemukan, namun tidak dalam waktu yang lama. Hal itu seperti yang pernah terjadi di tahun 1899, saat itu Residen Kroesen dipanggil pemerintah untuk melakukan reformasi moneter karena ia ditemukan menggunakan secara luas uang kuno VOC. Meskipun pemerintah khawatir terjadi penurunan nilai tukar yang dapat merugikan konsumen pribumi secara khusus namun kebijakan itu ditunda untuk beberapa waktu.[48]

Pada 1927 sirkulasi moneter dilakukan di wilayah Kalimantan Selatan untuk keseluruhan wilayah tersebut. Pada saat itu integrasi daerah yang terlambat ke dalam sistem moneter secara keseluruhan di Hindia Belanda telah memperlihatkan betapa dalamnya segregasi aktivitas ekonomi telah mengakar.[49]

48 J. Thomas Lindblad, *Antara Dayak dan Belanda…,* hlm. 185.

49 *Ibid*.

DJB Bandjermasin hadir sebagai bentuk upaya untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi di Kalimantan Selatan serta pengembangan bisnis di wilayah tersebut. Peningkatan aktivitas budi daya di sektor perkebunan yang menguntungkan—dalam hal ini karet—menuntut untuk lebih banyak kebutuhan uang untuk pembayaran upah dan jual-beli produk. Para pengusaha asing membuka perkebunan dengan menggunakan modal dan manajemen dari Eropa.[50] Dalam upaya pembukaan dan pengembangan perkebunan karet di Kalimantan Selatan sejak awal 1900-an, para pengusaha mendapatkan bantuan pinjaman modal sekitar lebih dari 1 juta gulden dari bank-bank di Berlin.[51] Eksperimen penanaman jenis karet *Hevea Brasiliensis* yang dilakukan sejak awal abad ke-20 mampu menarik minat para pemodal asing dalam hal pembiayaan pengembangan karet di kawasan pedalaman Hulu Sungai.[52] Ekspansi budidaya karet dalam hal ini diproyeksikan lebih lanjut di masa mendatang dan tentunya mendorong peredaran mata uang. Inilah salah satu alasan lain perlunya memperkuat sirkulasi keuangan di Hindia Belanda dalam jangka panjang, khususnya di Kalimantan Selatan.[53]

Pada awal pendiriannya, DJB Bandjermasin di bawah pimpinan L.W. van Suchtelen dan W. Jolles sebagai wakilnya. Pemerintah mengirimkan keduanya dari DJB pusat di Batavia untuk memegang kendali keuangan di Kalimantan Selatan. Pada 1909 L. W. van Suchtelen dipindahkan ke DJB Medan menggantikan L. von Hemert karena cuti, dan DJB Bandjermasin dipimpin oleh W. Jolles dengan D. Serrurier Schepper sebagai wakilnya.[54] Sejalan dengan peran DJB pusat di Batavia, DJB Agentschap Bandjermasin berperan sebagai bank sirkulasi dan bank komersial yang memberikan jasa

50 Di Kalimantan Selatan, pemilik modal Eropa mulai membuka perkebunan karet pada pertengahan dekade awal tahun 1900-an setelah sebelumnya gagal membudidayakan tembakau. Perkebunan karet di Kalimantan Selatan dimulai oleh pengusaha asing dan baru kemudian muncul keinginan mengembangkan karet di kalangan rakyat/penduduk setelah adanya peningkatan harga karet selama tahun 1909-1910. Lihat Tundjung, Karet dari Hulu Sungai …, hlm. 66.

51 *Ibid.,* hlm. 69 dan Lihat pula J. Thomas Lindblad, *Antara Dayak dan Belanda…*, hlm. 57.

52 J. Thomas Lindblad, *Antara Dayak dan Belanda …*, hlm. 57.

53 *Deli Courant,* "Kolonien: Javasche Bank", 27 Juni 1908.

54 Diberitakan oleh *De Locomotief*, 18 Maret 1907; *De Sumatra Post*, 3 Agustus 1907; *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië,* 19 Agustus 1907; *Soerabaijasch Handelsblad*, 19 Agustus 1907; dan *De locomotief*, 27 Mei 1909.

atau layanan perbankan (*general banking services*) di wilayah Kalimantan Selatan. Posisi DJB Bandjermasin yang berkedudukan sebagai bank sirkulasi menjalankan fungsi dan perannya untuk mengawal dinamika perekonomian di Kalimantan Selatan. Pada awal pendiriannya, kehadiran DJB di Banjarmasin sempat menimbulkan kekhawatiran bagi NHM dan Borsumij yang telah lebih dulu hadir memberikan bantuan kredit di Banjarmasin. Pendirian DJB saat itu dianggap tepat dalam memberlakukan peraturan tentang peredaran mata uang di Nusantara.[55]

PERANAN DJB DAN PERKEMBANGAN PERBANKAN KOLONIAL DI KALIMANTAN SELATAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serupa dengan kantor cabang lain, DJB Agentschap Bandjermasin pun membangun relasi dengan para pengusaha dan pedagang yang menjalankan usahanya di Kalimantan Selatan berupa pemberian bantuan kredit. Seperti pada awal Januari 1908, berdasarkan surat dari Presiden DJB di Batavia, DJB memberikan bantuan kredit sebesar *f*25.000 kepada Tuan B. J. W. E. Broers sebagai perwakilan resmi Pangeran Abdoel Madjid Kesoema.[56]

Kegiatan kantor cabang DJB di Banjarmasin, selama semester pertama pada laporan tahunan ke-82, mengalami perkembangan. Selama masa awal pendirian DJB di Banjarmasin, salah satu perusahaan yang menjalin relasi dengan DJB ialah Behn, Meyer & Co Ltd. Meski tidak banyak keuntungan yang diperoleh dari perusahaan tersebut, namun yang menjadi keuntungan bagi DJB Bandjermasin ialah dampak positif bagi perkembangan DJB. Berkat relasi yang telah dibangun antara DJB dengan Behn, Meyer & Co Ltd itu, DJB Bandjermasin semakin dikenal oleh para penjual berbagai produk Kalimantan Selatan, penduduk

55 J. Thomas Lindblad, *Antara Dayak dan Belanda…,* hlm. 15.

56 Arsip Bank Indonesia, Koleksi De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin No. 1436, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 7 Januari 1908. Pangeran Abdoel Madjid Kesoema merupakan raja terakhir di Tanah Bumbu setelah kerajaannya dihapus oleh Gubernemen Belanda pada 1905. Lihat pula Tim Penulis, *Republik Indonesia: Propinsi Kalimantan,* Djawatan Penerangan Provinsi Kalimantan Selatan, 1953, hlm. 438.

lokal, dan para pengusaha maupun pedagang Cina. Di antara mereka yang semakin mengenal keberadaan DJB Bandjermasin ialah mayoritas penduduk (pedagang) di pedalaman. Mereka menjadi lebih akrab dengan cek keluar-masuk sebab Kepala Kantor Cabang perusahaan Behn, Meyer & Co Ltd, de Heeren H. Scaefer & Co, selalu membayar para pedagang di pedalaman dengan cek. Awalnya hal tersebut menimbulkan kesulitan, akan tetapi seiring berjalannya proses perdagangan, mereka merasa puas dengan sistem pembayaran semacam itu dan menukarkannya di kantor DJB Bandjermasin.[57]

Tabel 2.2.
Produksi Ekspor Behn, Meyer & Co Ltd. 1909

No.	Barang	Jumlah (pikul)	Nilai (gulden)
1.	Kopra	9414.22	70803.99
2.	Lada hitam	402.19	5881.44
3.	Jelutung	126.28	1086
4.	Damar batu	15.59	24.94
5.	Getah hangkang	80.30	1264.73

Sumber: Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1433, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 20 Oktober 1909

Tabel di atas menampilkan gambaran produk-produk yang diekspor oleh Behn, Meyer & Co Ltd pada tahun 1909. Saat itu perusahaan tersebut mulai memberikan uang muka untuk pembiayaan produk ekspor atas biaya kantor cabang Surabaya dengan komoditas dan jumlah yang dikeluarkan sebagaimana tertera pada tabel. Berkat relasi yang dibangun dengannya, DJB Bandjermasin semakin dikenal berbagai pihak.

Geliat perekonomian di Kalimantan Selatan terlihat sangat tinggi pada komoditas karet. Sekalipun harga karet fluktuatif dari waktu ke waktu, namun sektor ini telah mendorong berbagai lembaga keuangan untuk lebih mempersiapkan diri dan berupaya memberikan pelayanan yang baik. Kantor cabang DJB Bandjermasin, yang terbilang masih muda usianya,

57 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1433, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 20 Oktober 1909.

turut berperan dalam usaha komersialisasi karet. Salah satu pengusaha karet di Kalimantan Selatan yang menjadi mitra DJB Bandjermasin adalah Hilckes. Di akhir tahun 1909 dan awal tahun 1910, perjalanan hidup Hilckes di Kalimantan Selatan tersangkut masalah pembayaran kepemilikan tiga perusahaan utama milik orang Eropa. Ia dipandang telah menjual Tanah Intan ke perusahaan yang baru didirikannya di tahun itu, yaitu Borneo Rubber Plantation Ltd sebuah perusahaan yang berkantor pusat di London. Dari perusahaannya itu, secara instan ia mendirikan sebuah anak perusahaan di Banjarmasin, yaitu Tanah Intan Estate Ltd.[58] Isu tersebut yang kemudian memengaruhi kelancaran perdagangan karet yang diawasi pemerintah.

Menurut kajian Lindblad, selain Hilckes ada seorang pedagang perantara lainnya asal Eropa yang mengembangkan perkebunan karet, yaitu Bohmer dari perusahaan perkebunan Borneo Kautsschuk Compagnie di Banjarmasin. Namun, Bohmer juga terlibat dalam kasus Hilckes yang menjual Hayup kepada perusahaan Hayup (Dutch Borneo) Rubber Estate Ltd yang ada di London. Motif Hilckes dalam penjualan perusahaan tersebut adalah menjadi direktur untuk perusahaan tersebut. Namun, keinginannya tidak tercapai karena perkebunan karet Danau Salak diserahkan kepada H. G. Oeder yang semula menjadi manajer perkebunan Hilckes. Alasan penyerahan tanggung jawab ini karena H. G. Order dipandang mampu menjaga hubungan baik dengan bank-bank di Dusseldorf, walaupun kemudian (1917) Oeder menjualnya kepada Dutch Borneo Rubber Industry Company dari Jepang. Jelas, para pemilik perusahaan itu menerima keuntungan besar, terutama ketika karet internasional mengalami *booming*. Sebagaimana diketahui, kedua perkebunan karet di Martapura dan Hayup milik Hilckes menjalin hubungan melalui transaksi wesel di Jerman secara lancar dan saling menguntungkan. Relasi ekonomi yang dilakukan Hilckes dan Oeder secara konstan juga terjalin dengan kantor cabang DJB Bandjermasin. Dalam surat Kepala Kantor Cabang DJB Bandjermasin (28 Februari 1910) kepada pimpinan DJB di Batavia menyebutkan hal itu termasuk tentang

58 J. Thomas Lindblad, *Between Dayak and Dutch …,* hlm. 59.

perkebunan karet Tanah Intan di Martapura oleh Borneo-Kautsschuck Compagnie.[59]

Tak hanya pengusaha Eropa saja, perusahaan asal Jepang; Nomura, tumbuh menjadi perusahaan pengekspor karet terbesar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Ekspornya rata-rata 1.200 ton karet per bulan. Nomura mengoperasikan tiga perusahaan karetnya sendiri di wilayah ini. Ekspor karet Nomura berdasarkan angka ekspor total untuk wilayah Kalimantan Selatan rata-rata paling banyak 100 ton per bulan. Oleh karena itu, 1.100 ton sisanya sebenarnya merupakan karet penduduk. Untuk pengolahan karet penduduk menjadi "blanket", Nomura memiliki tiga pabrik di Kalimantan Selatan, yaitu berlokasi masing-masing di Banjarmasin, Barabai, dan Kelua. Selain itu, Nomura mengekspor jumlah secara signifikan dari produk karet populasi baru, *"Native smoked sheets"*. Ekspor jenis karet ini rata-rata mencapai 400 ton per bulan. Dengan demikian, pembelian karet penduduk oleh Nomura membutuhkan sumber daya penting yang cukup untuk mengekspor 1.100 ton karet, pengolahan kira-kira 700 ton, biaya transportasi, serta bea ekspor khusus yang harus dibayarkan rata-rata minimal *f*20 per 100 kg. Untuk bea ekspor khusus, setidaknya diperlukan 1.100 x *f*20 = *f*22.000 selama periode satu bulan. Maka, untuk memudahkan dan memenuhi kebutuhannya dalam hal pembiayaan perdagangan karet penduduk itu Nomura bekerja sama dan memiliki rekening di DJB Bandjermasin.[60]

Dalam hal ekspedisi karet, sebagian besar Nomura melakukannya ke Amerika yang sebelumnya transit terlebih dahulu di Surabaya. Ekspedisi tersebut setelah dilakukan pemilihan berdasarkan kualitas karet. Kualitas karet rendah dikirim ke Singapura dan Jepang melalui persetujuan kedua negara itu. Pembiayaan pengiriman karet ke Singapura dilakukan di Singapura. Hal itu karena Nomura memiliki kantor cabang khusus yang menangani bisnis perkapalan. Rata-rata ekspor karet ke Singapura berkisar sekitar 1.200 ton per bulan dengan harga pasar di Singapura

59 J. Thomas Lindblad, *Between Dayak and Dutch …,* hlm. 59 dan Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1433, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 28 Februari 1910.

60 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1436, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 6 September 1935.

sebesar *f*0,17 per kg selama bulan Agustus. Pendapatan selama bulan itu diperkirakan mencapai 12.000 x *f*35 = *f*420.000. Perusahaan Nomura kemudian dikenal selama beberapa tahun sebagai pengekspor karet terbesar di kawasan Kalimantan Selatan. Disusul kemudian oleh Lee Rubber Coy. Dalam hal kemudahan proses pembiayaan dan persoalan finansial, secara umum keduanya telah bekerja sama dengan pihak DJB Bandjermasin.[61]

Pihak DJB Bandjermasin tidak saja bekerja sama dengan perusahaan melainkan mengembangkan program jaminan bantuan kredit kepada para pedagang. Program tersebut telah dimulai sejak 1909. Pada saat itu DJB Bandjermasin menerapkan peminjaman dana untuk komoditas lada dengan jaminan persil (tanah) dan menekankan perhatiannya pada sektor ekspor produk lokal. Pada September 1909 DJB Bandjermasin menyediakan kredit untuk produksi lada di Kalimantan Selatan ketika produksi lada sangat pesat, namun ternyata semuanya dikirim langsung ke Singapura tanpa memanfaatkan bantuan kredit dari DJB Bandjermasin.[62]

Adapun pada sektor pertanian, DJB Bandjermasin membantu usaha yang dilakukan oleh orang Banjar di Kandangan-Rantau Kalimantan Selatan yang mencapai 87.000 ha, terutama di Hulu Sungai. Hasil panen di Kandangan dikirimkan ke daerah lain yang memiliki hasil padi lebih sedikit, seperti Sampit dan Dusun Hulu (Atas). Alat bajak yang dipakai di sawah diperkenalkan oleh orang Bugis dari Kutai, namun mereka lebih jarang menghasilkan surplus untuk pasar beras regional. Sejak tahun 1878, para petani di daerah itu membayar retribusi beras dalam bentuk tunai dan setelah masa tiga bulan penilaian hasil panen. Bentuk retribusi itu atau pajak biasanya mereka sebut dengan istilah puluhan atau drakat, yaitu sekitar 10% dari nilai perkiraan panen. Namun kemudian, sehubungan dengan menurunnya jumlah uang tunai di kalangan petani pribumi, banyak beras yang ditawarkan untuk dijual di pasar lokal segera setelah panen. Kondisi itu biasanya menyebabkan orang Dayak dan Melayu menyediakan stok beras sebesar 1/10 dari total hasil panennya.

---

61 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1436, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 6 September 1935.

62 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1433, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 20 Oktober 1909.

Kondisi itu pula yang mengharuskan mereka menjual dalam jumlah lebih besar dan dengan harga yang murah agar dapat membayar pajak beras yang tinggi.[63] Persaingan (kompetisi) dagang seperti itu tidak saja terjadi di kalangan petani dan pedagang lokal, juga berbagai perusahaan yang bermunculan turut bergerak di sektor pertanian. Para pelaku ekonomi di Kalimantan Selatan pada akhirnya saling ketergantungan dan bekerja sama satu sama lain.

Bagi DJB Bandjermasin pun tentu menjalankan fungsi komersialnya. DJB Bandjermasin mendapat saingan dari beberapa lembaga keuangan yang sudah hadir terlebih dahulu di Kalimantan Selatan. Seperti di antaranya perusahaan inkaso yang banyak tersebar di wilayah ini yang dalam enam bulan terakhir dari tahun 1909 berjumlah 221 perusahaan dengan nilai uang mencapai *f*330.571.94. Namun, kehadiran perusahaan-perusahaan di Kalimantan Selatan justru memosisikan DJB Bandjermasin sebagai lembaga keuangan yang dikenal banyak pihak. Bagi DJB Bandjermasin masalah persaingan dapat dikendalikan dengan baik. Kepala Kantor Cabang DJB Bandjermasin menilai bahwa persaingan di cabang bisnis masih di tingkat rendah. Perusahaan NHM sebagai pesaing DJB Bandjermasin pun dapat sekaligus sebagai mitra bisnis terutama untuk urusan perjalanan haji. Perusahaan NHM hanya menyediakan sedikit uang emas sehingga mudah dihadapi.[64] Meski awalnya NHM berperan sebagai perusahaan dagang, namun persaingan semakin terlihat ketika NHM terus bergerak mengembangkan ekspansi bisnisnya dan terlibat dalam pemberian kredit sebagai bank komersial. NHM juga aktif dalam perdagangan valuta asing dan menjadikan valuta asing sebagai salah satu bisnisnya. Selain itu, NHM memberikan bantuan modal kepada para pengusaha dan menjalankan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perbankan, seperti transaksi surat berharga dan pembiayaan impor di Hindia Belanda. Laporan DJB Bandjermasin menyebutkan tentang adanya persaingan bisnis antara DJB dan NHM terutama yang lebih nampak dalam urusan wesel.[65] Namun dalam perkembangannya, sejak NHM

63 J. Thomas Lindblad, *Between Dayak and Dutch* …, hlm. 25.

64 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1433, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 20 Oktober 1909.

65 *Ibid.*

hadir untuk ketiga kalinya mendirikan cabang di Banjarmasin di bawah pengawasan kantor cabang Singapura (1903), mulai Juni 1909 NHM hadir di Banjarmasin di bawah pengawasan Batavia dan Surabaya.

Kehadiran NHM di Banjarmasin juga menjadi pesaing bagi Borsumij yang merupakan perusahaan atau lembaga besar dan kuat di Kalimantan Selatan. Walaupun Borsumij menjalankan kombinasi cerdik dalam perdagangan yakni memonopoli komoditas dan perluasan kredit secara baik. Perusahaan Borsumij bekerja sangat baik sebelum ada lembaga kredit lainnya bagi para pedagang setempat. Namun, kemudian posisinya menjadi lemah akibat daya saing NHM yang terus berkembang menjadi bank komersial sepenuhnya. Kiriman uang oleh orang-orang Cina ke dan dari Singapura menjadi spesialisasi yang dibuka kantor cabang NHM di Banjarmasin. Di perusahaan ini seorang Kapiten Cina di Banjarmasin bernama Thio Sum Yang menduduki puncak daftar debitur.

Gambar 2.6. Kantor Borsumij di Banjarmasin Tahun 1925
Sumber: KITLV

Sementara itu, keadaan persaingan bisnis yang kuat juga terjadi di bidang pelayaran antara Handel- en Scheepvaart Mij "Bandjer" dan KPM di Banjarmasin. Persaingan disebabkan oleh adanya permainan

biaya kargo. Biaya kargo para pengirim jumlah besar jauh lebih rendah dibandingkan para pengirim jumlah kecil. Hal ini terjadi pada pelayaran kapal-kapal Handel- en Scheepvaart Mij "Bandjer". Kapiten Cina diketahui merupakan pengirim terbesar yang diduga ikut mengatur permainan biaya kargo tersebut. Dampaknya para pengirim kecil untuk pengiriman menggunakan jasa kapal-kapal dari KPM.

Hal yang penting juga diketahui bahwa di Kalimantan Selatan terjadi persaingan bisnis yang kurang sehat, yakni perselisihan tajam antara pelaku-pelaku bisnis Cina. Perselisihan terjadi antara pihak kapiten terhadap Kepala Handel- en Scheepvaart Mij "Bandjer" dan para pebisnis yang tidak menyukai Kapiten Cina Banjarmasin. Selanjutnya perusahaan yang telah disebutkan sebelumnya juga memiliki dua perusahaan tambang batu bara di Martapura, yang memungkinkan untuk mengolah batu baranya sendiri. Dari kedua perusahaan itu, Hilckes adalah Direkturnya. Ernst selaku petugas pengelola, saat itu memimpin kedua bisnis itu dan bekerja sebagai pegawai di keduanya.

Handel- en Scheepvaart Mij "Bandjer" memiliki tiga kapal uap: 1) de "Hilckes", untuk pelayaran *Zuidkust* (pantai selatan) Banjarmasin, Sampit, dan Kota Waringin; 2) de "Sarie Kalimantan"; dan 3) de "Sarie Bandjer" melayani rute Banjarmasin–Singapura–Surabaya dan Banjarmasin–Pantai Timur. De Sarie Kalimantan dijaminkan kepada Nederlandsche Handel Maatschappij yang sekarang harus ditebus sekitar *f*50 per bulan. Adapun De Sarie Bandjer telah diambil alih oleh firma Behn Meyer & Co di Singapura dengan kredit *f*110 per bulan disertai keputusan yang memberatkan bahwa jika perusahaan tidak melakukan pembayaran, maka kapal dapat segera dijual dan jumlah yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Hilckes dan beberapa stafnya tidak mendapat sambutan yang menyenangkan di Banjarmasin sehingga perusahaannya tidak dikenal luas. Selain itu, terjadi ketegangan hubungan antara Hilckes dan Neye, Kepala Cabang Kantor DJB Bandjermasin. Masing-masing memiliki saham dan menurut beberapa orang mereka menekan orang-orang Cina yang weselnya diambil alih oleh NHM, untuk pengiriman terutama dengan kapal-kapal Handel- en Scheepvaart Mij "Bandjer". KPM yang pasti sudah menghentikannya; Neye kemudian secara mendadak diganti

kedudukannya sebagai Kepala Cabang Kantor DJB Bandjermasin oleh Neumann yang semula sebagai Sub-Kepala Cabang.[66]

Di sisi lain, perkembangan sektor perbankan di Kalimantan Selatan terbilang dinamis. Pada tahun 1914 pemerintah kolonial mendirikan Bandjermasinsche Credietbank (Banjarmasin Credit Bank), sebuah institusi yang secara spesifik dirancang untuk melawan riba, mengembangkan pembukuan bagi penduduk pribumi, menstimulus perdagangan dan institusi-institusi pedesaan, dan untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan bank-bank kolonial besar, hanya memberikan bantuan kreditnya kepada para pengusaha Eropa dan Cina. Sementara pengusaha-pengusaha kecil tidak memiliki akses kredit untuk memajukan usahanya. Pemerintah kolonial kemudian membentuk bank perkreditan di Kalimantan Selatan dengan nama Bandjermasinsche Credietbank dengan tujuan membuka akses kredit permodalan kepada penduduk pribumi. Bank tersebut kemudian mendapatkan banyak antusiasme penduduk dan popularitasnya pun semakin meningkat. Pemberian bantuan secara eksklusif kepada wirausaha pribumi yang berbakat merupakan upaya Bandjermasinsche Credietbank menciptakan kesempatan-kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya.[67] Bandjermasinsche Credietbank memberikan bantuan modal kepada penduduk di Hulu Sungai untuk berdagang, khususnya perdagangan karet. Berkat perkebunan karet, selama harga karet mengalami kenaikan, orang-orang di Hulu Sungai misalnya, memperoleh pinjaman dari Bandjermasinsche Credietbank untuk membeli sawah, kebun karet, dan mobil.[68] Meskipun juga, sesuai konteks waktu yang berjalan, Bandjermasinsche Credietbank menjadi mitra sekaligus pesaing dalam hal bisnis atau peran komersialnya dengan DJB Bandjermasin.

Selama operasionalnya, jumlah kredit yang dikeluarkan Bandjermasinsche Credietbank meningkat dari *f*268.000 secara rata-rata antara tahun 1917 dan 1919 menjadi *f*783.000 antara tahun 1928 dan 1931. Banyak jumlah utang yang tidak mencolok, namun jumlah rata-

66 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1433, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 7 Januari 1908 dan 19 Agustus 1907.

67 J. Thomas Lindblad, *Antara Dayak dan Belanda …*, Terj. Ika Diyah Candra, hlm. 183 dan 185.

68 *Jaarverslag der Bandjermasinsche Credietbank 1927* dalam Tundjung, Karet dari Hulu Sungai: Budidaya, Perdagangan, dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian di Kalimantan Selatan, 1900-1940, (Universitas Indonesia: Disertasi, Depok, 2004), hlm. 150.

rata uang yang dipinjam dan melebihi jatuh tempo meningkat, dari *f*62 menjadi *f*133 antara tahun-tahun yang telah disebutkan. Terdapat juga pergerakan terus menerus dari penekanan awal yang berat pada kredit untuk tujuan perdagangan ke uang yang dibutuhkan untuk investasi dalam kapasitas produktif, khususnya dalam pertanian. Perkembangan itu terjadi khususnya pada tahun 1920-an dan didorong oleh keinginan untuk mengembangkan kualitas petani karet.

Keberadaan Bandjermasinsche Credietbank mampu memperoleh banyak antusias dan semakin dikenal. Namun, pada tahun 1922 ditemukan skandal yang dilakukan oleh manajernya yang terus menerus bekerja untuk institusi swasta pesaingnya. Akan tetapi, keadaan tersebut tidak melemahkan perkembangan Bandjermasinsche Credietbank. Tidak berselang lama, Bandjermasinsche Credietbank berhasil membuka empat kantor cabang di Hulu Sungai, yaitu di Amuntai, Kandangan, Rantau, dan Tanjung. Di tahun 1934 bank-bank perkreditan rakyat menjadi institusi kredit yang independen karena telah dilebur ke dalam satu institusi menjadi Algemeene Volkscredietbank (*General People's Credit Bank*, sekarang BRI) di Batavia. Perubahan administrasi mengurangi jumlah kantor namun tidak mengabaikan kebutuhan khusus regional. Pada awal tahun 1937 lebih dari *f*100.000 kredit telah diperluas ke penanam karet Banjar yang ingin berinvestasi dalam (pendirian) rumah asap.[69]

Tidak kalah menarik juga tentang perkembangan kebutuhan perbankan yang tak hanya dirasakan di wilayah Kalimantan Selatan. Pada dekade pertama tahun 1920-an, dinamika lembaga perbankan terjadi di wilayah sekitar Keresidenan Kalimantan Selatan dan Timur. Dalam arsip DJB, ditemukan suatu laporan surat DJB tanggal 26 Februari 1925 yang berisi tentang kunjungan Residen de Haan ke kantor DJB Bandjermasin. Dalam laporan itu disebutkan bahwa de Haan berkunjung ke kantor DJB Bandjermasin dan bertemu Direktur K. F. van den Berg untuk mendiskusikan keinginannya mendirikan kantor cabang DJB di Samarinda. Pada pembahasan tersebut diulas terkait nilai perdagangan dan lalu lintas di wilayah Samarinda.[70]

---

69 "De Oprichting van Volkscredietbanken op de Buitenbezittingen" dalam *TBB* Bagian 48 (hlm. 81–116). (Batavia: G. Kolff & Co., 1915), hlm. 114 dan Lindblad, *Op.Cit.*, 1988, hlm. 183.

70 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1436, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 26 Februari 1925.

Dalam perjalanan Residen di sepanjang pantai timur Kalimantan, ia telah mengumpulkan beberapa data untuk keperluan penulisan surat kepada DJB tentang usulan pembukaan kantor cabang DJB di Samarinda. Sebetulnya, penelitian yang mengarah kepada pembukaan cabang DJB Samarinda telah dilakukan jauh sebelumnya. L. von Hemert di tahun 1906, P. F. van den Berg pada Februari–Maret 1908, dan Kepala Kantor Cabang DJB Bandjermasin L. W. van Suchtelen telah melakukan penyelidikan terkait hal tersebut. Namun, dalam penyelidikannya itu tidak diketahui kelanjutan prosesnya. Sementara itu, jawaban atas keinginan mendirikan kantor cabang di Samarinda yang diusulkan pada tahun 1920-an melalui surat DJB tertanggal 26 Februari 1925 itu diperoleh keputusan bahwa jika dibandingkan dengan Banjarmasin, pendirian kantor cabang DJB di Samarinda tidak memberi kesan mendesak. Dengan kata lain, berita itu menampakkan adanya keengganan mendirikan DJB Samarinda.

Keengganan tersebut berdasarkan atas keadaan yang terjadi di wilayah Samarinda yang salah satu alasannya ialah hubungan kerja sama yang terjalin kuat antara Sultan Kutai dengan NHM. Dalam hal hubungan deposit, Kesultanan Kutai diperkirakan akan terus menjalin kerja sama dengan NHM, sehingga sedikit menyulitkan DJB untuk menjalin relasi dan menjalankan bisnisnya. Selain itu, di Samarinda sendiri hanya ada satu badan perdagangan yang memiliki hubungan dengan DJB yaitu de Samarinda Produce'Cy yang berfungsi untuk pengambilalihan wesel dalam proses pengiriman rotan ke Eropa, yang hubungannya tidak terlalu penting bagi DJB. Faktor lain adalah kehadiran Borsumij yang sangat bagus menjalankan bisnisnya di Samarinda. Pihak Borsumij bahkan secara tegas menolak rencana pendirian DJB karena menganggap pendirian lembaga perbankan di Samarinda tidak dibutuhkan dengan alasan bahwa perdagangan di wilayah Samarinda sudah bergantung kepada Borsumij.[71] Artinya animo para pelaku ekonomi di Samarinda tidak sebaik di Banjarmasin.

Gambaran kasus penolakan rencana pendirian DJB di Samarinda dikuatkan dari informasi dr. Heer J. Greve, perwakilan DJB, bahwa jika

71 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1436, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 26 Februari 1925, hlm. 2.

pendirian kantor cabang di Samarinda terjadi maka tahun pertama pendiriannya tidak akan memiliki kepentingan apapun.[72] Informasi itu memiliki kesamaan dengan informasi-informasi dan penyelidikan yang diperolehnya di lapangan, sehingga Kepala Kantor Cabang DJB Bandjermasin pun beranggapan bahwa secara komersial pendirian kantor cabang DJB di wilayah Samarinda di tahun 1925 belum tepat. Alasan itu pun setelah dibandingkan dengan kondisi daerah pedalaman Samarinda dengan pedalaman Banjarmasin yang berpotensi ekonomi cukup tinggi dengan sarana fisik daerah tangkapan air der Barito dan de Oeloe Soengei (Sungai Barito dan Hulu Sungai), sawah, dan budi daya karet penduduk yang berskala besar dari jumlah penduduk sekitar 660.000 jiwa, atau hampir 2/3 dari keseluruhan penduduk *Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo*.[73]

Sementara wilayah Samarinda, sekalipun memiliki daerah tangkapan air der Mahakam hingga Long Iran namun tingkat populasinya jauh lebih kecil dibandingkan Banjarmasin, yaitu sekitar 96.000 jiwa. Mata pencaharian penduduknya memang kebanyakan berdagang dari hasil hutan, ladang, dan penangkapan ikan yang luas. Pekerjaan bertani di sawah dan di perusahaan batu bara (kecuali Baatafsche Petroleum My dan de Oost Borneo My) sudah tidak ada. Daerah pedalaman yang seharusnya kaya akan batu bara mengalami kesulitan transportasi sehingga menghalangi eksploitasi yang menguntungkan.

Demikian juga dibandingkan dengan kondisi Balikpapan yang hanya memiliki penduduk 24.000 jiwa. Sekalipun terdapat de Bataafsche menyediakan untuk setiap bidang sesuai kebutuhan dan personilnya, yakni orang Eropa dan juga Asia. Adapun informasi yang disampaikan Kepala Kantor Cabang DJB Bandjermasin di atas pun diperoleh berdasarkan angka dan data yang didapat dari kantor Residen (de Residentiekantoor), inspektur keuangan wilayah, de Borsumij, dan beberapa individu lain.[74]

---

72 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1436, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 26 Februari 1925, hlm. 3.

73 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1436, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 26 Februari 1925, hlm. 3-4.

74 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1436, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 26 Februari 1925, hlm. 4.

Dengan demikian, diputuskanlah bahwa tidak ada alasan mendesak yang mengharuskan untuk mendirikan kantor cabang DJB di Samarinda.

Nuansa persaingan bisnis yang dialami oleh DJB Bandjermasin tidak saja hadir secara eksternal melainkan pula internal. Persoalan internal terdapat dari keluhan-keluhan para nasabah. Seperti pada tanggal 30 Desember 1920, nasabah Thio Mo Tiang pemilik Toko Tjin bersurat kepada Direktur DJB pusat di Batavia. Ia mengaku telah belasan tahun sebagai nasabah DJB Bandjermasin, tetapi di tahun itu ia mengeluhkan sulitnya berurusan dengan pihak DJB. Sejak E. Muller sebagai pimpinan DJB, ia merasa tidak mendapat pelayanan yang baik sehingga ada maksud untuk berhenti sebagai mitra DJB Bandjermasin. Di antara beberapa kesulitan yang dialaminya seperti lambatnya pencairan wesel oleh pihak DJB dari dua langganannya yang berasal dari Surabaya di mana ia terima dengan jumlahnya masing-masing sebesar *f*5.000. Keadaan ini sangat merugikannya. Ia juga meminta DJB pusat dapat membenahi kinerja DJB Bandjermasin, sekalipun telah berganti kepemimpinan atau kedudukan E. Muller telah berganti secara sepihak. Kasus nasabah Cina tersebut tentu sebagai penilaian buruk terhadap kinerja DJB Bandjermasin, bahkan keluhan-keluhan dari para mitra DJB Bandjermasin terus berdatangan baik secara langsung di daerah kerjanya maupun melalui DJB pusat.

Kasus yang datang dari nasabah lainnya terjadi juga di tahun 1923 akhir saat DJB Bandjermasin dipimpin oleh J. P. A. Ahn. Seorang nasabah yang dengan rinci mengeluhkan kinerja kasir DJB Bandjermasin bernama Lie Jauw Phek. Kasus tersebut berimbas terhadap DJB Bandjermasin dalam beberapa hal, di antaranya: 1) nasabah yang berurusan dengan DJB Bandjermasin sangat tidak nyaman; 2) mudah menerima suap; 3) beberapa nasabah DJB mulai beralih ke NHM karena dianggap berurusan lebih mudah dan cepat; 4) terdapat persekongkolan antara firma Kho Lim Yang dengan kasir tersebut sehingga bisa mencairkan wesel kosong dalam tempo sepertiga bulan yang mestinya dilarang. Permainan wesel kosong antara kasir dengan firma Kho Lim Yang telah menguntungkan kasir itu sebesar *f*100 per bulan; 5) kasir Lie Jauw Phek dikenal sebagai pejudi berat yang ketika Jolles sebagai pimpinan DJB Bandjermasin pernah diadukan oleh Kapiten Ang Lim Siang. Kasir Lie Jauw Phek mengalami kalah berjudi sampai 3.000–4.000 rupiah dan tanpa ragu meminjam uang

kepada koleganya tapi tidak melunasinya. Klien DJB Bandjermasin adalah Kho Sian Liong, firma Kho Lim Yang, Chiu Tai Ho, S. B. Teng, dan Kho Ko Hap juga disampaikan sebagai para rentenir yang mestinya tidak sesuai dengan instruksi DJB. Seperti keluhan dalam surat nasabah pada kasus sebelumnya, dalam surat ini pun nasabah berharap pimpinan baru dapat memperbaiki kinerja DJB Bandjermasin.[75]

Grafik 2.7. Sejumlah Personel DJB Bandjermasin Berfoto di Depan Kantor DJB Bandjermasin Tahun 1923

Sumber: Arsip Bank Indonesia

DAMPAK MALAISE TERHADAP PEREKONOMIAN KALIMANTAN SELATAN DAN PERAN DJB BANDJERMASIN

Krisis ekonomi global yang terjadi di tahun 1929 merupakan suatu kemunduran ekonomi terbesar dunia di awal abad ke-20. Krisis yang dikenal dengan istilah Malaise berawal saat Amerika Serikat memasuki

75 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1436, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 29 Desember 1923.

masa resesi ekonomi pada Mei–Juli 1929. Selama masa resesi tersebut, terjadi penurunan daya beli masyarakat yang berakibat pada penumpukan barang dan menghambat laju produksi. Namun, di sisi lain harga saham mengalami kenaikan.[76] Hingga Agustus–Oktober 1929 penjualan saham terjadi secara besar-besaran. Pada 24 Oktober 1929 bursa saham di Wall Street New York menjual sekitar 13 juta lembar saham sehingga membuat nilainya merosot tajam dan jatuh di bawah harga pasar yang sangat rendah. Momen kelam tersebut dikenal dengan istilah "Black Thursday". Beberapa hari berselang, gelombang kepanikan pun kembali menerpa Wall Street saat penjualan saham menembus angka 16 juta lembar. Hal tersebut berdampak langsung terhadap kemerosotan ekonomi dunia.[77]

Para ekonom dunia berpendapat bahwa depresi ekonomi yang melanda dunia pada dekade 1930-an sebagai akibat kekeliruan pengelolaan kebijakan ekonomi di masa sebelumnya. Periode tersebut ditandai dengan ledakan produksi tanpa diikuti dengan keuntungan pada petani dan pekerja. Namun, keadaan justru berbalik, yakni meningkatnya pembangunan pabrik baru yang berdampak pada barang-barang produksi yang dihasilkan jumlahnya lebih besar daripada tingkat kebutuhan konsumen. Artinya, penawaran lebih besar daripada kebutuhan permintaan sehingga menyebabkan harga-harga jatuh.

Kondisi perekonomian dunia, tentu sangat berpengaruh terhadap perekonomian lokal di beberapa negara, tidak terkecuali di Hindia Belanda, khususnya dalam pembahasan ini adalah Kalimantan Selatan. Pada masa malaise, kemerosotan ekonomi di Kalimantan Selatan datang sebagai sebuah pukulan terhadap ekonomi kolonial Hindia Belanda. Pada saat itu Hindia Belanda yang telah menjadi negara pengekspor barang-barang pertanian dan bahan mentah termasuk pula dalam kategori negara yang berutang. Keadaan sebuah negara pengekspor bahan mentah dapat dikategorikan sebagai awal memasuki kemerosotan keuangan negara. Di sisi lain, sebagai negara dengan sendirinya mendapat tekanan ekonomi pada produksi barang-barang primer ekspor di mana sebagian besar investor adalah untuk sektor bahan mentah. Organisasi finansial diizinkan

76 Anne Booth, dkk., *Sejarah Ekonomi Indonesia,* (terj.). (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 36–39.

77 *Ibid.*

berkembang secara rasional, tetapi DJB tidak dianggap sebagai sebuah bank sentral yang mencapai posisi "*banker's bank*".[78] Kondisi ekonomi global yang berdampak kepada ekonomi nasional berdampak juga terhadap ekonomi penduduk pribumi sebagai pemasok produk-produk lokal.

Jatuhnya harga karet mulai pada akhir tahun 1920-an merupakan titik balik bagi para produsen karet rakyat di Kalimantan Selatan. Hal itu karena harga-harga karet tidak pernah pulih lagi ke tingkat lebih awal. Pasar tertekan dan permintaan terhadap barang-barang mewah turun tajam. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa penanaman karet tidak lagi memberi berbagai keuntungan bagi ekonomi penduduk setempat. Meski demikian, selama 1930-an standar hidup penduduk di kebanyakan daerah penghasil karet seperti Palembang, Jambi, dan Kalimantan Selatan masih lebih baik daripada yang ditemukan di daerah-daerah lain.[79]

Kehadiran perusahaan Nomura East Indies di tahun 1930-an itu mengindikasikan perekonomian Jepang tidak seburuk Eropa, Cina, dan Amerika. Di masa itu, Jepang juga menempati posisi yang lebih unggul dalam bidang perekonomian dibandingkan negara-negara tersebut. Demikian pula pengaruhnya dalam perekonomian bagi wilayah Kalimantan dari adanya perusahaan Jepang itu dan perusahaan-perusahaan lainnya melalui investasinya di berbagai sektor, mulai perhutanan, perikanan, dan pertanian. Investasi Jepang di Hindia Belanda ternilai terbesar di masa itu, yakni dengan kepemilikan area konsesi 6.866 ha di Kalimantan dan 6.590 ha di Sumatra. Total investasi Jepang bagi sektor pertanian pada akhir tahun 1930-an diperkirakan senilai 35,5 juta gulden. Hal itu memberikan sedikit bantuan kehidupan kepada masyarakat Kalimantan di masa krisis ekonomi. Lebih dari itu, pada tahun 1939, beberapa perusahaan Jepang seperti Nangyo Ringyo Kabunshiki Kaisha, Kalimantan Bussan, dan Yukimoto Shokai telah menginvestasikan sejumlah 7,9 juta yen setara dengan 3,45 juta gulden dalam eksploitasi hutan di Kalimantan

78 Prince, "Kebijakan Moneter di Indonesia dan Posisi Bank Jawa" dalam J. Thomas Lindblad (ed), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 79-82.

79 Bambang Purwanto, *Op.Cit.*, 2002, hlm. 223.

Selatan. Untuk investasi perusahaan-perusahaan milik Jepang bagi sektor perikanan sejumlah 1,86 juta gulden yang di dalamnya melibatkan perusahaan Mitsubishi sebagai salah satu dari dua perusahaan besar di Jepang. Angka-angka investasi untuk industri manufaktur Jepang tidak disebut dalam sumber-sumber yang dipergunakan.[80]

Di masa sebelum malaise, Jepang telah memiliki perkebunan dan pertanian di Kalimantan Selatan. Sekitar tahun 1924–1925 Jepang telah mengembangkan perekonomiannya di kedua sektor tersebut, di antaranya:[81]

1. Dutch Kalimantan Rubber Industrie Co. Ltd. (Nomura), kantor di Danau Salak, perkebunan (karet) di Hulu Sungai seluas 8.052 bau (1 bau = 17.535 acre).
2. K. Kaneko, kantor Banjarmasin, perkebunan (karet) di Bawahan, luas 265 bau;
3. Neth. India Development Corp. kantor di Banjarmasin, perkebunan kopra di Binglu seluas 530 bau dan di Maluka seluas 16.568 bau;
4. Cultuur Mij Sungai Dua, kantor di Pulau Laut, perkebunan lada di Sungai Dua seluas 1.078 bau.

Perusahaan perkebunan milik Jepang itu bahkan menjadi investasi perekonomiannya sendiri di Hindia Belanda di saat terjadi resesi ekonomi. Sekalipun demikian memiliki pengaruhnya bagi perekonomian masyarakat Kalimantan Selatan, masa malaise itu terasa berdampak sangat besar pada para buruh di Kalimantan Selatan. Banyak di antara mereka yang diberhentikan dari perusahaan akibat perusahaan tidak sanggup lagi menggaji mereka. Termasuk perusahaan Jepang pun hanya mengambil para buruh yang mau digaji kecil. Dampak malaise di tahun 1934 seperti yang terjadi di sebuah perusahaan besar di wilayah Kalimantan Selatan yaitu Bataafsche Petroleum-Maatschappij (BPM). Perusahaan itu masih mendapatkan keuntungan bersih sebesar *f*40.000.000, sebuah jumlah

---

80 Peter Post, "Karakteristik Kewirausahaan Jepang dalam Ekonomi Indonesia Sebelum Perang" dalam J. Thomas Lindblad (ed), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 365.

81 *Ibid*., hlm. 369–370.

yang cukup besar kala itu. Namun, keuntungan tersebut diperoleh setelah perusahaan memberhentikan sejumlah pegawainya yang bergaji besar dan diganti dengan pegawai-pegawai yang kecil penghasilannya.[82]

Di bidang industri karet di Kalimantan Selatan yang memberi pengaruh terhadap segala kegiatan niaga penduduknya mengalami penurunan pada tahun 1929–1932. Industri karet yang menimbulkan permintaan beraneka jasa seperti pengangkutan, pembiayaan, perdagangan barang, dan sebagainya telah membuat rakyat Kalimantan Selatan sejahtera. Oleh karena itu, gerak naik turunnya harga karet berdampak besar terhadap penduduk setempat. Masa malaise terjadi pada produksi karet terutama yang tertimbun dalam jumlah besar, baik di Asia maupun di negara industri maju. Kemerosotan harga karet langsung mengakibatkan terhambatnya arus dana tunai yang kemudian menimbulkan masalah susulan pada berkurangnya kegiatan perdagangan terutama di kalangan petani kecil, terutama terkait pembayaran utang. Hal demikian dirasakan bagi petani karet kecil di wilayah Kalimantan Selatan.[83]

Menurut Anne Booth, kebanyakan petani karet di luar Jawa tidak memiliki sarana transportasi selain sungai yang dapat dilayari kapal Samudra karena kondisi inilah yang dapat menentukan pilihan lokasi kebun karet.[84] Namun hal itu, berbeda dengan para petani Kalimantan Selatan yang memiliki tempat-tempat yang mudah diakses melalui sungai. Oleh karenanya, produk perkebunan berupa karet dapat diangkut dengan berbagai alat angkutan sungai. Sementara di masa malaise ini semua penduduk mengalami kemunduran yang signifikan. Zaman depresi ekonomi membuat kejatuhan harga karet secara drastis sehingga mendorong perubahan sikap pemerintah Hindia Belanda terkait pembatasan produksi karet. Baik pihak pengusaha maupun pejabat Belanda menyadari bahwa kapasitas produksi terlampau tinggi, dan

82 Peter Post, "Karakteristik Kewirausahaan Jepang dalam Ekonomi Indonesia Sebelum Perang" dalam J. Thomas Lindblad (ed), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 274.

83 Anne Booth. "Evolusi Kebijakan Fiskal dan Peranan Pemerintah dalam Perekonomian Kolonial" dalam Anne Booth, et al (eds.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 267–268.

84 Anne Booth, dkk, *Sejarah Ekonomi Indonesia*, hlm. 277.

akan makin tinggi bila tanaman baru mulai matang dan disadap. Selain itu, perluasan produksi karet dipandang dapat memperparah kondisi perdagangan karet. Periode ini mendorong pemerintah untuk bertindak secara tegas dalam pembatasan dan pengawasan produksi karet sesuai dengan Perjanjian Pengaturan Karet Internasional.[85]

Menjelang masa malaise, harga karet sudah mengalami penurunan. Namun, kembali bangkit dan stabil di tingkat yang lebih baik. Penghapusan skema Stevenson[86] tahun 1928 adalah dampak dari harga yang tinggi dan menguranginya dari rata-rata *f*1,10 per kg menjadi *f*0,70 per kg. Pada masa malaise, persisnya di tahun 1929 yaitu menjadi rata-rata harga *f*0,55 per kg. Kemudian penurunan harga karet di tahun 1930-an berada di titik paling pesimis, yaitu *f*0,37 per kg pada tahun 1930 dan *f*0,15 pada tahun 1931. Penurunan harga karet yang terjadi secara drastis itu tentunya sangat memengaruhi biaya pengapalannya. Rendahnya harga unit tidak dapat menutupi biaya pengapalan karet dari pasar ke Banjarmasin dan dari Banjarmasin ke Singapura. Akhirnya, terjadi kelangkaan pohon karet di daerah Hulu Sungai. Orang Banjar kemudian meninggalkan aktivitas menanam karet. Pada tahun 1935 sisa produksi tanaman karet yang ada pada pedagang kecil secara terpaksa dikirimkan dengan harga tidak layak sekadar untuk menyambung hidupnya. Begitu juga perkebunan-perkebunan milik orang Eropa, sekalipun masih berproduksi namun mengalami kemunduran hingga level terendah sejak 1932.[87]

---

85 Anne Booth, dkk, *Sejarah Ekonomi Indonesia* …, hlm. 282 dan 285–286.

86 Skema Stevenson atau Restriksi Stevenson merupakan aturan atau kebijakan yang dipelopori oleh Stevenson yang dilakukan oleh produsen karet dari koloni Inggris di wilayah jajahan Inggris guna membatasi produksi agar ekspor karet ke pasar internasional berkurang sehingga harga karet naik. Kebijakan ini diberlakukan pada tahun 1922–1928. Hal ini bermula dari peningkatan permintaan karet yang meningkat pada tahun 1922 lantaran naiknya kebutuhan karet di Eropa. Saat itu Ceylon bersikeras meningkatkan ekspor karetnya dan di tahun yang sama pasokan karet ke pasar internasional meningkat sekitar 30% dari tahun sebelumnya meskipun harga karet masih rendah. Pemerintah Inggris yang menguasai karet dalam perdagangan internasional kemudian berupaya mengatasi harga karet yang rendah dengan mengeluarkan kebijakan tersebut pada November 1922. Lihat Tundjung, Karet dari Hulu Sungai …, hlm. 119.

87 J. Thomas Lindbland, *Between Dayak and Dutch: The Economic History of Southeast Kalimantan, 1880–1942*, (Dordrecht-Holland: Foris Publications, 1988), hlm. 71.

Grafik 2.8. Penyadapan Karet oleh Seorang Warga Borneo Tahun 1935
Sumber: KITLV

Strategi orang Banjar yang telah berlaku sejak terjadi penurunan harga karet di tahun 1920 dan 1922, yaitu dengan cara membatasi produksi dan mengirimkan lebih sedikit produksi karetnya. Namun, berbeda dengan di tahun 1930, strategi tersebut tidak lagi berlaku karena mereka tidak dapat lagi memproduksi dalam jumlah besar. Hanya setelah beberapa waktu, orang Banjar merevisi target produksinya menjadi lebih rendah. Strategi semacam ini mengungkapkan seberapa radikal kehidupan ekonomi di Hulu Sungai telah diubah oleh *booming* karet. Kapasitas produksi meningkat sangat besar dan penanam-petani Banjar telah menjadi lebih tergantung dengan pasar dunia. Keraguan tentang apa yang dilakukan ketika berada di ambang pintu masa depresi melambangkan tingkat integritas mereka yang lebih besar dalam perekonomian dunia.[88]

88 J. Thomas Lindbland, *Between Dayak and Dutch …*, hlm. 71.

Masa depresi ekonomi berat itu menimbulkan perselisihan hebat antara penanam perkebunan karet Eropa dan Banjar pada bulan Mei tahun 1930. Dalam usaha yang putus asa menjadikan Kalimantan Selatan sebagai daerah langka produk. Kondisi itu membuat para petani penanam melarang adanya penyadapan karet selama satu bulan per tahun, yaitu bulan Mei. Pelarangan itu dikenal dengan sebutan "Peraturan Mei". Dalam kaitan ini, produsen pribumi dinilai tidak menaati peraturan larangan itu. "Peraturan Mei" kemudian hanya mempunyai dampak yang kecil dalam upaya menyelamatkan perkebunan karet dari pendapatan yang lebih buruk. Pada waktu itu jumlah perkebunan telah meningkat menjadi total 44%. Tiga perkebunan yang tertua yaitu Hayup, Tanah Intan, dan Danau Salak masih menempati posisi pertama, dengan proporsi gabungan ketiganya adalah 85% dari jumlah produksi perkebunan karet.[89]

Dikonfrontasi dengan penurunan pendapatan, produsen karet regional berusaha keras mengurangi biaya-biaya. Cara yang paling efisien mencapai hal itu dengan mengurangi input tenaga kerja. Tenaga kerja tidak dibutuhkan lagi di perkebunan yang lebih besar di Kandangan dan Rantau. Aliran pekerja sebelumnya dari Amuntai ke Tanjung pun menjadi terhenti. Penurunan jumlah pekerja perkebunan jelas berdampak terhadap perkebunan-perkebunan milik orang Eropa. Hal itu mengakibatkan penurunan jumlah pekerja kuli. Total pekerja kuli menurun dari 3.400 di tahun 1927 menjadi 1.400 di tahun 1931. Seperti contoh di Danau Salak yang hanya memperpanjang kontrak untuk 1.300 kuli, dan di Tanah Intan memberhentikan setengah pekerjanya dalam satu kali.[90]

Upaya memberhentikan para pekerja semacam itu nampaknya tidak menunjukkan target produksi yang lebih rendah. Sebaliknya, tambahan produktivitas cukup besar dicapai sehubungan dengan pengembangan penghematan tenaga kerja disadari oleh perkebunan-perkebunan dalam anggarannya yang kurang. Produksi di Danau Salak menjadi dua kali lipat antara tahun 1927 dan 1932, meskipun jumlah kuli dikurangi secara drastis. Jumlah bagian perkebunan Eropa dalam total hasil regional lebih dari 10% pada tahun 1932 untuk pertama kalinya sejak berakhirnya

89 J. Thomas Lindblad, *Between Dayak and Dutch …,* hlm. 71.

90 *Ibid,* hlm. 73.

Perang Dunia I. Perkebunan tidak akan mendapatkan surplus tenaga kerja, tidak juga penurunan pendapatan di penjualan luar negeri.[91]

Karet memang menjadi perhatian dan melibatkan banyak pihak, tak terkecuali pemerintah dan perbankan. Pada periode Malaise, banyak aspek menyebabkan karet perlu penanganan, pengaturan, dan kebijaksanaan yang harus dikeluarkan dan dijalankan. Dari waktu ke waktu selalu ada saja persoalan terutama terkait dengan harga karet yang sangat fluktuatif dan pengaruhnya terhadap tanaman karet serta sektor ekonomi secara umum. Dalam konteks semacam ini pimpinan di daerah penting hadir dan berperan. Pada tahun 1936 dari pihak pemerintah—dalam hal ini residen—meminta diadakan pertemuan yang akan diikuti oleh Kepala Kantor Cabang DJB Bandjermasin, pejabat pemerintah, pemangku kepentingan Eropa maupun Cina di bidang perdagangan karet dan perwakilan dari bank. Tujuannya menjelaskan tentang pembatasan karet individu yang akan diberlakukan di wilayah Kalimantan Selatan mulai 1 Januari 1937. Residen menegaskan bahwa demi keberhasilan sistem pembatasan baru yang sudah menghabiskan banyak uang dan waktu, perlu terjalinnnya kerja sama penuh dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan karet. Residen akan memberi sanksi tegas berupa kurungan ataupun denda kepada yang melakukan tindakan tidak sesuai ketentuan. Disampaikannya juga bahwa pemilik kebun karet di wilayah Kalimantan Selatan akan diberikan kartu identitas yang diharapkan 90% diterbitkan hingga akhir tahun 1936.[92]

Kepemilikan kartu identitas memberikan hak eksklusif untuk menerima izin panen yang berkaitan dengan kebun karet. Kartu identitas tidak boleh jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak. Izin panen pun dikeluarkan oleh petugas distribusi pada waktu tertentu dan di daerah tertentu sesuai kartu identitas tersebut oleh bupati. Kebijakan terkait pembatasan dan kartu identitas itu disampaikan dalam tiga bahasa, yaitu Belanda, Melayu, dan Cina kepada semua pemilik kebun karet dan pihak yang berkepentingan dengan perdagangan karet. Kepemilikan kartu

91 *Ibid.*

92 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1436, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 4 Desember 1936.

identitas memberikan hak eksklusif untuk menerima izin panen yang berkaitan dengan kebun dan benar-benar bersifat pribadi, karenanya tidak dapat dipindahtangankan atau diperdagangkan.

Pemberlakuan kebijakan pembatasan karet tak hanya berdampak pada peningkatan pemberian izin panen di berbagai desa di pedalaman, tetapi juga waktu dan kerja yang ekstra untuk menukar izin tersebut dengan penugasan yang secara eksklusif dapat dipisahkan di kantor-kantor tempat dikeluarkannya izin panen tersebut. Di samping itu, kebijakan pembatasan karet telah menyebabkan kebutuhan uang di wilayah Kalimantan Selatan meningkat secara signifikan. Merespons hal itu, DJB Bandjermasin menyanggupi untuk memenuhi seberapa pun permintaan dana yang dibutuhkan.[93]

Dampak depresi ekonomi terhadap produksi karet yang menjadi primadona Kalimantan Selatan menurunkan nilai yang cukup besar. Di masa itu jumlah orang yang pergi beribadah haji dari daerah Kalimantan Selatan sangat berkurang. Daya beli penduduk sangat rendah disertai dengan meningkatnya persaingan Jepang, terutama dalam hal manufaktur dan toko kerajinan yang menawarkan penjualan siap pakai. Di masa itu Jepang berhasil menunjukkan bantuannya kepada penduduk pribumi. Hasil pertanian menunjukkan peningkatan yang cukup baik sehingga penduduk ekonominya cukup terbantu.

Sekalipun terjadi penurunan harga karet yang sangat besar, namun karet masih tetap sebagai produk ekspor terpenting dari Kalimantan Selatan. Pada awal Agustus 1930 memang langkah-langkah penghematan fase pertama sangat parah diambil. Gaji semua karyawan, baik Eropa dan pribumi sangat berkurang, sebagian besar pekerja pribumi diberhentikan dan yang berasal dari Jawa dipulangkan. Namun, karena berbagai cara dilakukan termasuk juga perusahaan yang tetap beroperasi secara optimal sekalipun merugi, dan upaya di Eropa tetap dilakukan untuk mencapai kerja sama umum antara produsen karet Eropa dan pribumi, maka nilai total ekspor karet tahun 1930 lebih baik dari tahun 1929 sebagai awal masa malaise, yaitu mencapai jumlah sekitar *f*85.240,00, yakni sekitar setengah dari total nilai ekspor karet sebelumnya.

93 *Ibid.*

Pergerakan orang Banjar dalam mengambil keuntungan dari ledakan karet tidak dapat tidak teramati di Hulu Sungai. Orang kaya di Martapura meniru haji-haji di Hulu Sungai, dan bahkan orang Pasir di pantai timur memutuskan untuk mencoba penanaman karet. Terdapat setidaknya 3,5 juta pohon Hevea di luar Hulu Sungai pada pertengahan tahun 1920-an, khususnya di dekat Martapura.

Tabel 2.3.
Kapasitas Produksi dalam Penanaman Karet Pribumi di Hulu Sungai
Tahun 1924 dan 1936

Daerah	Jumlah Kebun		Jumlah Pohon	
	1924	1936	1924	1936
Tanjung	11.507	34.606	2.895.058	15.829.567
Barabai	9.695	34.737	2.401.700	12.264.124
Amuntai	7.902	31.003	2.167.584	12.296.633
Kandangan	2.811	21.386	1.119.700	7.885.118
Rantau	1.365	*	362.900	*
Total	**33.280**	**121.732**	**8.946.942**	**48.905.642**

Keterangan: *tergabung dengan Kandangan
Sumber: J. Thomas Lindblad, *Between Dayak and Dutch*, 1988, hlm. 66.

Sebagaimana pada tabel di atas, mayoritas pohon tersebut muda dan belum berproduksi. Namun, penanaman karet meningkat tanpa henti dan pohon-pohon yang lebih tua mulai dewasa. Pada tahun 1936 terdapat 25 juta pohon potensial di Hulu Sungai. Terdapat 241.000 kebun di seluruh Kalimantan Selatan dan Timur waktu itu. Jumlah penanam-pemilik kebun, bagaimanapun lebih kecil sekitar 184.000. Hal ini menunjukkan bahwa banyak penanam menginvestasikan bagian keuntungannya dalam unit produksi kedua, bahkan juga menciptakan kesempatan kerja bagi kuli-kuli lokal.[94]

Lindblad menggambarkan suasana Kalimantan Selatan sebelum masa malaise atau sekitar tahun 1920-an. Wilayah Kalimantan Selatan yang dipenuhi jutaan pohon juga dipenuhi ribuan sepeda. Di antaranya

94 J. Thomas Lindblad, *Between Dayak and Dutch* ..., hlm. 66.

sejumlah ratusan sepeda motor milik orang Banjar yang melintasi sepanjang dermaga Banjamasin. Sejumlah jutaan gulden pun berputar di wilayah ini dalam perdagangan beras, bahan makanan lainnya, tekstil, dan perdagangan impor dengan modal regional yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai hasil yang dinikmati penduduk muslim Kalimantan Selatan, sekitar lebih dari 10.000 orang mampu berangkat haji ke Mekah di setiap musimnya dengan menaiki kapal uap. Kalimantan Selatan dan Timur mempunyai proporsi haji terbanyak di seluruh negara muslim di dunia. Lindblad juga menggambarkan kesenangan penduduk Kalimantan Selatan dalam merayakan pesta pernikahan yang mewah. Bahkan pesta tersebut menjadi kebiasaan harian di Barabai dan Amuntai. Sementara di Rantau terdapat sejumlah banyak timbunan koin perak dan terus berada dalam putaran perekonomian mereka. Masyarakat Kalimantan Selatan nampak sejahtera dari hasil alamnya sendiri. Banyak permukiman penduduk yang dibangun atau dikembangkan, banyak juga para pelajar dan dokter gigi untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam perawatan gigi. Perempuan Banjar banyak mengimpor perhiasan dan menggunakan baju yang *fashionable* produksi pabrikan dengan mesin jahit terbaru saat itu. Sementara para lelaki dewasa kaya seringkali menikmati acara malam di bioskop-bioskop baru di Barabai dan Amuntai. Suasana kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan yang menyenangkan itu menjadi terbalik atau surut di masa malaise, khususnya di tahun 1930-an. Keadaan kehidupan, terutama di daerah Hulu Sungai tidak lagi seindah sebelumnya.[95]

Perubahan itu dirasakan begitu cepat. Namun, geliat perekonomian mereka tidak berarti merosot ke titik nol. Di pertengahan tahun 1930-an, penduduk di daerah Hulu Sungai kembali memfungsikan uang-uang lama seperti koin perak yang mereka timbun itu. Pesta-pesta pernikahan secara mewah kembali dilangsungkan namun dengan sirkulasi koin perak sebagai alat transaksi kebutuhannya. Di daerah Rantau, orang Banjar memenuhi kebutuhannya sendiri dengan menggunakan uang koin yang dimiliknya. Mereka sedikit mengabaikan perkebunan karet dan penyadapannya. Namun, untuk pertanian padi sawah kembali ke status awalnya, serta

95 *Ibid.*, hlm. 70–71.

masih banyak orang Banjar yang kembali menanam lada. Sementara penduduk lainnya di Kalimantan Selatan, melakukan perjalanan ke Marabahan atau melintasi Gunung Meratus ke Tanah Bumbu dan Pulau Laut dalam rangka mencoba tanaman baru dalam kondisi yang baru. Kondisi itu menggambarkan jiwa wirausaha orang Banjar tidak tumpul dalam waktu yang buruk sekalipun.[96]

Di masa Malaise, masyarakat Banjarmasin, Balikpapan, dan Samarinda jika digabungkan terdapat 20.000 tenaga kerja orang dewasa laki-laki yang tidak digaji oleh BPM. Banyak di antara mereka adalah orang Melayu. Sebagaimana orang Cina dan Eropa, mereka juga bekerja untuk perusahaan perdagangan atau usaha jasa. Sektor tersier di Kalimantan Selatan memang kecil, namun sangat krusial untuk menggerakkan secara perlahan ekonomi regional. Sektor tersier tersebut menunjukkan heterogenitas yang kecil dan banyak fragmentasi dalam batasan garis etnis. Hal itu terutama terjadi dalam institusi pemberi kredit. NHM dan DJB Bandjermasin telah meminjamkan uang secara eksklusif kepada orang Eropa, sementara Borsumij meningkatkan hubungan yang lebih lanjut dengan pedagang Cina dan agen-agennya. Namun demikian tidak terdapat pemisahan fasilitas yang diberikan kepada pribumi, hanya saja tidak bisa langsung berhubungan dengan orang Eropa. Penduduk pribumi hanya dapat pergi ke orang Cina atau Arab ketika mereka membutuhkan uang tunai, bahkan masuk ke dalam transaksi yang sangat tinggi. Kreditur-kreditur Cina dan Arab mendapat kesempatan itu karena sikap diskriminatif dari pihak lembaga-lembaga keuangan resmi yang ada.[97]

Di sektor pertambangan, harga minyak mengalami penurunan drastis antara tahun 1929 dan 1935. Pada titik yang terendah, harga untuk satu ton minyak mentah atau minyak motor adalah hampir *f*9, sementara satu ton bensin atau kerosin hanya *f*17. Masa itu nilai ekspor luar negeri jatuh menjadi *f*30 juta pada tahun 1935, nyaris seperti yang terjadi pada tahun 1912. Akan tetapi, pasar dunia masih ekspansif dan masih mampu menyerap bahkan dengan jumlah lebih besar. Pada tahun 1933 Balikpapan

96 J. Thomas Lindblad, *Between Dayak and Dutch ...,* hlm. 66.

97 *Ibid.*, hlm. 183.

mengirimkan minyak motor sebanyak pada awal masa depresi.[98] Ekspor minyak mentah dan kerosin tidak mengalami kenaikan pendapatan secara signifikan. Penyesuaian dalam pergerakan yang merugikan dalam harga internasional membutuhkan sebuah pergeseran penekanan dari minyak mentah ke minyak sulingan. Harga produk pertambangan baru sedikit stabil setelah adanya pemulihan pasar minyak, yaitu setelah tahun 1937. Total pendapatan dari penjualan minyak meningkat menjadi *f*50–60 juta pada tahun 1937 dan 1938.[99]

Begitu juga di sektor kehutanan, harga berbagai produk jelutung, hangkang, dan katiauw yang biasa diekspor ke Amerika dan Singapura terus mengalami penurunan. Perdagangan rotan bahkan mengalami masa yang sangat buruk karena pesanan semakin sedikit. Eropa yang menjadi pengimpor utama rotan berada dalam krisis ekonomi hebat di masa itu sehingga sangat signifikan terhadap penurunan harga dan produksi rotan Kalimantan. Sementara produk kopra tidak lagi diekspor karena dianggap tidak banyak menguntungkan. Namun, semua kopra dibeli oleh pabrik minyak di Kandangan dengan harga yang lebih tinggi daripada yang mampu dibeli oleh eksportir.

Pada tahun 1938 pemerintah Hindia Belanda mengadakan tanaman baru sebanyak 5%. Berdasarkan perhitungan tahun 1936/1937 jumlah pohon karet yang boleh ditambah sebanyak 3.723.285 pohon dalam lahan seluas 7.500 ha. Untuk kegiatan pengasapan karet sebagai upaya penghematan, rumah asap karet milik rakyat telah ada sejak akhir tahun 1936 dan sebagai rumah asap pertama milik rakyat di Kuala Kapuas. Sementara di daerah Hulu Sungai yang menjadi penghasil karet terbesar di Kalimantan Selatan, sampai tahun 1935 tidak ada rumah asap milik rakyat. Rumah asap karet di daerah Hulu Sungai kebanyakan milik orang-orang Jepang yang terletak di Telaga Langsat (Kandangan), Haruyan (Barabai), dan Kalua. Baru di awal tahun 1936, rumah asap karet milik rakyat dibangun. Melalui lembaga-lembaga keuangan yang ada, pemerintah

98 Pada masa awal depresi, di tahun 1929 Balikpapan menghasilkan barang komoditas ekspor di antaranya lebih dari 500.000 ton bensin, hampir sejumlah kerosin dan 300.000 ton minyak motor. Lihat J. Thomas Lindblad, *Ibid.*

99 *Ibid*., hlm. 183. hlm. 183.

mendorong pemberian kredit kepada para petani di kampung-kampung dengan mempermudah syarat-syarat pendiriannya. Maka pada akhir tahun 1936 ekspor karet kembali dilakukan dan sebanyak 13.764 ton karet asap rakyat atau 46% merupakan produksi rakyat.[100]

Gambar 2.9. Rumah Asap Pertama di Barabai, Hulu Sungai 1936
Sumber: J. Thomas Lindblad. 1988. *Between Dayak and Dutch*. Dordrecht: Foris Publication.

Secara umum, masa Malaise telah mengacaukan semua harga dan hasil produksi di berbagai wilayah. Ekspor damar, kopal, dan harsen yang diarahkan ke Jawa dan Singapura tersendat. Ekspor lampit dan tikar ke Jawa, Sumatra, dan Amerika mengalami hal yang sama. Sektor pertambangan yang tidak saja minyak melainkan batu bara, bijih mangan, dan intan gulung tikar. Tambang batu bara Gunung Kupang dekat Martapura tutup di tahun 1930, tambang Menuhan Coal Mines Ltd. dan Gunung Batu Besar juga gulung tikar. Di sisi lain, pemerintah mengurangi izin pencarian berlian di sekitar Martapura. Nilai total berlian yang ditemukan diperkirakan mencapai *f*75.000 per tahun mengalami penurunan drastis. Sindikat pertambangan "Pengaron" mengirimkan

100 Tim Penulis, *Republik Indonesia: Propinsi Kalimantan* ..., hlm. 193–194.

sekitar 300 ton bijih mangan ke Antwerpen dan Jepang, namun karena biaya transportasi yang terlalu tinggi maka eksploitasi mangan dihentikan.

Bagi penduduk Kalimantan Selatan harapan tetap selalu ada dalam kehidupan perekonomian mereka. Pada masa yang sama, terjadi musim kering yang berkepanjangan sehingga sungai-sungai menjadi surut. Namun, justru menjadi berkah bagi penduduk Kalimantan Selatan karena pada saat itu ikan sangat melimpah dan mudah ditangkap. Ikan sungai atau rawa dijadikan ikan kering yang kemudian laku diekspor terutama ke Semarang, Batavia, dan Padang. Di masa yang sama pula, di tahun 1931, justru terjadi panen besar biji tengkawang. Panen besar itu hanya terjadi setiap tiga atau empat tahun. Kelesuan perekonomian di masa malaise ternyata tidak semua membuat terpuruk masyarakat Kalimantan Selatan. Beberapa sektor ekonomi sebagian membantu mereka selama masa resesi itu.

Walau demikian, kelesuan perekonomian secara merata menimpa para pelaku ekonomi di seluruh dunia. Para pengunjung pelabuhan Banjarmasin pun merosot jumlahnya di tahun 1930, dari 333 kapal dengan kapasitas seluruhnya 1.025.405 m^3 banyak yang terhenti. Bahkan tidak banyak diketahui terkait adanya dua kapal uap besar yang tenggelam di perairan sekitar. Pelabuhan Banjarmasin menjadi sangat sepi karena tidak lagi memfasilitasi penerimaan dan pengangkutan barang dari dermaga ke gudang, dan tidak ada penarikan barang dari dermaga ke perahu sementara kegiatan itu bergantung pada jasa kapal KPM.

Meski dalam situasi malaise, DJB tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Begitu juga hal serupa dilakukan oleh DJB Bandjermasin. Dalam memperluas ekspansinya, DJB Bandjermasin terus menjalin relasi. Hal itu terlihat dalam salinan Surat No. 5/ZB-1933 tertanggal 31 Mei 1933 yang memberitakan bahwa pihak DJB Agentschap Bandjermasin telah bermufakat dengan Sultan Gunung Tabur, Achmad Maulana Mohamad Halifatoellah Djalaloedin, beserta para mantri dalam Kesultanan tersebut. Atas permintaan dari Residen *Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo* diputuskan bahwa DJB Bandjermasin telah mengesahkan segala urusan keuangan, yakni melakukan segala bentuk kewajiban tentang urusan uang di dalam Keresidenan Kalimantan Selatan dan Timur. Tak hanya

Gambar 2.10. Suasana di Sekitar Pelabuhan Banjarmasin 1900-an
Sumber: G. L. Tichelman. 1949. *Blanken op Borneo*. Amsterdam: A.J.G Strengholt.

Kesultanan Gunung Tabur, pada waktu yang bersamaan DJB Bandjermasin pun mengambil keputusan yang sama dengan Sultan Tanah Kota Waringin, Pangeran Ratoe Sokma Alam Sjach dalam salinan Surat No. 6/ZB-1933. Sementara dalam Salinan Surat No. 13/ZB-1933 pada waktu yang sama DJB Bandjermasin juga bermufakat dengan Sultan Kutai, Adji Mohammad Parikesit beserta mantri-mantri dalam Kesultanan tersebut. Kesultanan lainnya di Kalimantan yang turut bekerja sama dengan DJB Bandjermasin ialah Kesultanan Gunung Tabur dengan Sultan Achmad Maulana Mohamad Halifatoellah dalam salinan Surat No. 17/ZB-1933), serta dengan Maulana Sultan Mohamad Djalaloedin dari Kesultanan Bulungan dan salinan Surat No. 21/ZB-1933. Semua hasil mufakat tersebut diputuskan oleh DJB Bandjermasin pada tanggal 31 Mei 1933 dengan berdasarkan permintaan Residen *Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo*.[101]

Dalam kegiatannya selama masa malaise itu, DJB Bandjermasin juga terus melakukan hubungan kerja dengan DJB Pontianak di Kalimantan

101 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1734, *Crediet Verleening van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 31 Mei 1933.

Barat dan pusat. Monitoring perdagangan karet Kalimantan yang menjadi komoditas unggulan dilakukan dengan DJB Pontianak sebagai wilayah yang sama penghasil karet. Kegiatan pengembangan perdagangan karet dan pengembangan pasarnya, pimpinan kantor cabang DJB Pontianak meminta DJB pusat di Batavia untuk menawarkan relasi karet dengan layanan yang sama seperti bank swasta. Guna menjalankan hal tersebut, diperlukan pembuatan pengaturan berimplikasi terhadap akses pencatatan karet oleh DJB Pontianak yang secara teratur di sejumlah pusat utama populasi karet di luar wilayah Kalimantan Barat, seperti Banjarmasin, Medan, Palembang, dan Jambi. Untuk itu, DJB pusat di Batavia mengirimkan surat bertanggal 5 Mei 1937 kepada DJB Bandjermasin terkait permohonan akses yang akan dilakukan oleh DJB Pontianak.[102] Perizinan akses pelaporan hubungan karet seperti itu menjadi hal yang penting sebab berkenaan dengan pengembangan pasar yang menjadi sentra penting penduduk Banjarmasin. Tujuannya agar DJB Bandjermasin dapat menjadi "jembatan" dalam membantu DJB Pontianak jika diperlukan hal-hal transaksi pembelian karet.

Di sisi lain, dalam hal pemberian bantuan biaya usaha, pada Oktober 1940 DJB Bandjermasin sempat mengalami kerugian oleh sebab kemarau panjang yang parah di tahun itu. Kemarau panjang berlangsung selama empat bulan yang berakibat gagal panen *getijsawah* di sub-afdeeling Banjarmasin-Marabahan sebesar 50% dari luas 50.000 ha. Dalam keadaan normal hasil yang diperoleh sebanyak 20 kw/ha. Namun, pada tahun kegagalan panen tersebut, turun senilai 10 kw/ha, artinya kehilangan panen sebanyak 50.000 x 10 kw = 50.000 ton gabah. Jika menempatkan pengiriman pada 70%, hitungannya seseorang telah kehilangan sekitar 35.000 ton beras. Di masa malaise itu sekitar 7 tahun (1933–1940) impor beras di Banjarmasin rata-rata berkisar 7.000 ton, sehingga kehilangan panen sebesar 35.000 ton. Kegagalan panen itu sangatlah signifikan, dari total 6 unit penggilingan padi di Banjarmasin dan Hulu Sungai, 5 di antaranya dibiayai oleh DJB.[103]

---

102 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1436, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 5 Mei 1937.

103 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1437, *Vertrouwelijk Brieven van De Javsche Bank Agentschap Bandjermasin*, 7 Oktober 1940.

Menjelang berakhirnya masa pemerintahan Hindia Belanda, DJB Bandjermasin masih tetap memberikan bantuan usaha kepada pedagang atau pengusaha. Sebagaimana terdapat dalam laporan DJB tertanggal 5 Agustus 1941, persetujuan izin pemberian bantuan modal diberikan kepada Hadji Abdoelhamid bin Hadji Mohamad Taib sebesar *f*5.000.[104]

Selain itu, pada tahun 1941 Kepala Kantor DJB Bandjermasin turut mencatat kasus kebakaran gudang kopra milik mitranya, Lim Tjoe Keng. Kopra yang juga menjadi komoditas dagang sektor perkebunan saat itu laku di pasar kopra seharga *f*3.50 dalam nilai bersih. Kuotasi penerimaan kopra di Makassar pada saat itu sebesar *f*2.65 per 100 kg untuk jenis kualitas baik (kering) termasuk kantong kemasan. Sementara stok kopra di Banjarmasin saat itu tercatat mencapai 375 ton. Lim Tjoe Keng merupakan klien DJB Bandjermasin dan mengikat kontrak dengan Borsumij yang merekomendasikan perluasan kapasitas produk kopranya. Pihak DJB telah menunjukkan kepada Lim Tjoe Keng bahwa ekspansi yang dilakukan DJB telah meningkatkan risiko bisnisnya secara signifikan dan sangat mendesak untuk menghilangkan semua risiko yang tidak perlu dan terutama yang spekulatif.[105]

Dalam catatan itu pun dijelaskan bahwa saat itu Liem Tjoe Keng tidak dapat membeli kopra yang cukup di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga untuk menjaga persediaan operasionalnya hanya menjalankan sebuah pabrik minyak kecil sesuai standar. Tujuannya agar dari waktu ke waktu sekitar 100–150 ton kopra yang tidak memenuhi persyaratan standar dapat digunakan setelah melalui pengolahan dan pencampuran bahan lainnya untuk menghasilkan minyak tertentu yang disukai oleh penduduk.[106] Adapun gudang miliknya yang terbakar di sore hari, tepatnya tanggal 30 Agustus 1941 itu, memang diberitakan telah diasuransikan kepada De Nederlanden 1846, namun memiliki jaminannya dari DJB Bandjermasin. Maka atas kasus itu, Lim Tjoe Keng mengajukan klaim

104 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1737, *Crediet Verleening van De Javsche Bank Agentschap Bandjermasin*, 5 Agustus 1941.

105 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1737, *Crediet Verleening van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 26 Agustus 1941 dan 2 September 1941.

106 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1737, *Crediet Verleening van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 2 September 1941.

kepada pihak asuransi sebesar *f*80.384 dengan perincian sebagaimana terlihat pada tabel. Sebelum kebakaran tersebut terjadi, pada tanggal 19 Agustus 1941 DJB Bandjermasin melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap gudang dan diperoleh laporan bahwa keadaannya teratur. Dari hasil pemeriksaan terhadap gedung yang terbakar diperoleh kesimpulan bahwa gudang dalam keadaan masih baik, konstruksi besi atap gudang tidak terjadi kerusakan namun isi gudang seperti kopra dan biji tengkawang hangus terbakar. Namun, sebagian kecil kopra masih dapat digunakan dan masih mempunyai nilai karena dapat dijadikan pupuk. Gudang kopra dan biji tengkawang milik Lim Tjoe Keng itu mempekerjakan sekitar 50 orang yang dipimpin oleh seorang mandor. Pihak DJB Bandjermasin memperkirakan investigasi yang dilakukan pihak kepolisian atas peristiwa kebakaran gudang itu tidak akan jauh dari kesimpulannya.[107]

Tabel 2.4.
Klaim Asuransi Gudang Terbakar Lim Tjoe Keng

No.	Material	Satuan	Harga Pasar (f)	Nilai Klaim (f)
1.	Tengkawang Hitam	116.652 kg	3.00	3.500
2.	Minyak Tengkawang	860 kaleng	3.50	3.010
3.	Kopra	375.198 kg	4.25	15.946
4.	Besi Atap	3.057 kg	0.38	1.162.32
5.	Kertas Rokok	15.465 pak	2.10	32.477
6.	Kertas Rokok	1.940 pak	2.35	4.559
7.	Benang Bola	7.075 pak	1.75	12.381
8.	Tar Batubara	104 kaleng	1.90	198
9.	Asam Format Botol	56.7 kg	1.40	397
10.	Teh Jawa	153 kotak	20.00	3.060
11.	Teh Jawa	18 bal	9.50	171
12.	Klaim Barang Lain	Polis	--	76.861
13.	Klaim Gudang	Polis	--	3.523
				80.384

Sumber: Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1737, *Crediet Verleening van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 2 September 1941.

107 *Ibid.*

Klaim yang diajukan pihak Lim Tjoe Keng lebih tinggi dibandingkan hasil perhitungan pihak DJB Bandjermasin dan De Nederlanden 1846 yaitu senilai *f*78.435.13 sehingga terdapat selisih sebesar *f*1.948.77. Berdasarkan laporan DJB dalam Surat No. 114/24 bertanggal 2 September 1941, diketahui bahwa total klaim yang akan ditanggung oleh DJB Bandjermasin terhadap kasus tersebut adalah senilai *f*78.435.13 dengan rincian sebagaimana tertera pada tabel di bawah. Tabel berikut memperlihatkan perhitungan secara terperinci dari pihak DJB Bandjermasin dan De Nederlanden 1846.

Tabel 2.5.
Perhitungan Pihak Asuransi atas Gudang Terbakar1937/38

No.	Material	Satuan	Harga Pasar (f)	Nilai Klaim (f)
1.	Tengkawang Hitam	116.652 kg	2.50	2.916.30
2.	Minyak Tengkawang	860 kaleng	2.45	2.107.00
3.	Kopra	375.198 kg	4.00	15.007.92
4.	Besi Atap	3.057 kg	0.38	1.161.66
5.	Kertas Rokok	15.465 pak	2.10	32.476.50
6.	Kertas Rokok	1.940 pak	2.35	4.559.00
7.	Benang Bola	7.075 pak	1.75	12.381.25
8.	Tar Batubara	104 kaleng	1.90	197.60
9.	Asam Format Botol	56.7 kg	1.40	396.90
10.	Teh Jawa	153 kotak	20.00	3.060.00
11.	Teh Jawa	18 bal	9.50	171
12.	Klaim Barang Lain	Polis	--	74.435.13
13.	Klaim Gudang	Polis	--	4.000
TOTAL				**78.435.13**

Sumber: Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1737, *Crediet Verleening van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 2 September 1941.

Dengan demikian, berdasarkan rekaman arsip-arsip sebagaimana tertulis pada buku ini, pola hubungan yang terjalin antara kantor cabang DJB Bandjermasin kantor DJB pusat di Batavia sangat baik. Dalam kondisi apapun, DJB Bandjermasin tetap menjalankan fungsinya. Dalam hal

pemberian kredit misalnya, alur proses pengajuannya dilakukan secara baik dan sesuai aturan. Kantor cabang DJB mengajukan terlebih dahulu kepada kantor DJB pusat terkait usulan pemberian pinjaman modal beserta informasi lengkap yang akan menghasilkan keputusan layak atau tidak penerima mendapat pinjaman. Sebelum memutuskan, kantor pusat menganalisis terlebih dahulu untuk kemudian memberikan keputusan persetujuan yang selanjutnya dieksekusi oleh kantor cabang. Layanan operasional DJB Bandjermasin terpantau terus berjalan dari masa ke masa, sekalipun saat Malaise melanda hingga menjelang pendudukan Jepang di Banjarmasin. Hal tersebut terlihat dari adanya surat-menyurat antara DJB Bandjermasin dengan DJB pusat yang terarsipkan dengan baik. Namun, keadaan berubah ketika pergantian kekuasaan, salah satunya di sektor perbankan. Narasi terkait hal itu akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

BAB 3

Bank Sirkulasi di Kalimantan Selatan dalam Dua Zaman (1942–1949)

Aksi militer Jepang yang memasuki wilayah Nusantara pada tahun 1942 menandai berakhirnya masa kekuasaan kolonialisme Belanda. Jepang mula-mula menaklukkan Tarakan pada 10 Januari 1942, kemudian berturut-turut Balikpapan pada 21 Januari 1942, selanjutnya Pontianak pada 2 Februari 1942, menyusul kemudian Martapura dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Penaklukan Jepang dilanjutkan ke Palembang pada 14 Februari 1942 disusul dengan pendaratan di tiga tempat di Pulau Jawa sejak 1 Maret 1942, yaitu Banten, Eretan Wetan (Cirebon), dan Kranggan, Rembang. Akibatnya Jenderal H. Ter Poorten menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Jenderal Hitoshi Imamura pada tanggal 7 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat.[1]

Ketika tentara pendudukan Jepang tiba di Banjarmasin hampir semua pegawai pemerintah Hindia Belanda, terutama golongan Eropa sudah mengungsi ke Puruk Cahu. Pertahanan Belanda di daerah Kalimantan Selatan semakin melemah, sehingga memudahkan tentara Jepang menguasai daerah-daerah yang didatanginya. Pasukan angkatan darat Jepang (*Rikugun*) berjalan kaki menuju Banjarmasin dengan didampingi seorang penunjuk jalan asli Banjarmasin, yaitu M. Yusá. Mereka menyusuri

1 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip R. Hardjo Santoso, *De Javasche Bank Pada Masa Peperangan. Perang Asia Pasifik 1941–1945 dan Sesudahnya*, Jakarta: 2000, hlm. 1-2 dan Rupert Lockwood, *Armada Hitam*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm. 2.

Balikpapan–Muara Uya–Tanjung–Kelua Pasar Arba–Haur Gading–Palimbangan–Amuntai–Kandangan pada tanggal 10 Februari 1942. Sedangkan pasukan angkatan laut (*Kaigun*) tiba di Banjarmasin melalui Pleihari pada 11 dan 12 Februari 1942. Wilayah pantai Kalimantan Selatan kemudian berada di bawah kekuasaan *Minseifu* di Makassar.

Maka mulai 10 Februari 1942 merupakan akhir dari riwayat kekuasaan Belanda di Kalimantan Selatan. Pasukan Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda atas Kalimantan Selatan yang secara keseluruhan menandai berkuasanya Jepang di Nusantara dan pihak Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang pada 7 Maret 1942.[2] Penyerahan Kota Banjarmasin ke pihak Jepang dilakukan oleh Walikota Banjarmasin (Van der Neulen) dan Kepala Cabang Javasche Bank (Konig). Maka sejak itu, pemerintahan Jepang berkuasa di Kalimantan Selatan dengan pusat pemerintahannya di Banjarmasin, meneruskan masa pemerintahan sebelumnya. Kedatangan Jepang di Banjarmasin dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan menjadi gerbang menguasai Kalimantan. Namun, masa kekuasaan Jepang tidak memberikan perubahan signifikan bagi Banjarmasin. Bukan karena alasan masa kekuasaannya yang tidak lama, melainkan Jepang banyak meneruskan pekerjaan yang sudah dilakukan Belanda sebelumnya. Warisan bangunan Belanda yang telah dihancurkan oleh pemerintah kolonial Belanda hanya sedikit yang diperbaiki Jepang. Di antaranya Jembatan Coen yang kemudian berubah nama menjadi Jembatan Jamat. Jepang meresmikan saluran air minum di tahun 1943 yang tidak sempat dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, dan pemindahan rumah sakit dari Fort Tatas ke Jalan Ulin di tahun 1944, namun selain informasi tersebut tidak ada lagi data tentang Jepang di Banjarmasin hingga masa kemerdekaan.[3]

Masa setelah kemerdekaan, terjadi banyak gejolak sosial di berbagai daerah di Indonesia. Di Kalimantan Selatan terjadi pertempuran akibat adanya berbagai sabotase, pembakaran pelabuhan, dan landasan Ulin. Berakhirnya Perang Pasifik dengan kemenangan di pihak Sekutu menjadi

2 *Borneo Shimboen*, Banjarmasin, 11/2/1944 Domei.

3 H. Ramli Nawawi, Tamny Ruslan, Yustan Aziddin, *Sejarah Kota Banjarmasin*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1986), hlm. 16–20.

masa kembalinya Belanda ke wilayah Indonesia. Situasi ini memicu kemunculan berbagai pertempuran di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan. Pertempuran Banjarmasin terjadi pada 9 November 1945 di Kota Banjarmasin yang banyak merugikan di berbagai sektor kehidupan. Sekalipun kemudian Belanda membangun kembali pelabuhan lama Fort Tatas dan landasan Ulin, namun gejolak-gejolak sosial terus bermunculan selama revolusi fisik ini antara 1945–1949.

Bab ketiga membahas tentang Banjarmasin dalam dua zaman yaitu sejak zaman Jepang (1942–1945) dan zaman revolusi fisik (1945–1949). Dalam bab ini akan dijelaskan terkait kondisi perbankan selama masa pendudukan Jepang, likuidasi DJB hingga hadirnya NKG di masa pendudukan Jepang. Pembahasan dilanjutkan ke masa setelah kemerdekaan yang menjelaskan tentang dibukanya kembali DJB Bandjermasin yang bertahan hingga masa revolusi fisik.

LIKUIDASI DE JAVASCHE BANK DAN HADIRNYA NANPO KAIHATSU GINKO

Ketika invasi Jepang, DJB berada dalam kendali G. G. van Buttingha Wichers sebagai Presiden DJB ke-14 dengan masa jabatan dari 1 Juli 1929 sampai 17 November 1945. Dalam laporannya di pertengahan Juni 1941 untuk Laporan Tahunan DJB Pembukuan ke-114 (1 April 1940–31 Maret 1941) ia memperingatkan perlunya memperhitungkan kemungkinan meluasnya wilayah Perang Dunia II di Eropa sampai ke Asia-Pasifik, sehingga perlu diambil suatu langkah antisipasi. Enam bulan kemudian, kekhawatiran van Buttingha Wichers menjadi kenyataan. Perang Asia-Pasifik meletus sebagai bagian dari panggung Perang Dunia II yang telah dimulai di Benua Eropa pada 10 Mei 1940. Sedikit berbeda dari Eropa, para pihak yang terlibat di dalam Perang Asia-Pasifik adalah Jepang berhadapan dengan Front Blok "ABCD-Command" (American, British, Chinese, and Dutch).[4]

4 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip R. Hardjo Santoso, *De Javasche Bank Pada Masa Peperangan. Perang Asia Pasifik 1941–1945 dan Sesudahnya*, Jakarta, 2000, hlm. 1.

Pecahnya Perang Pasifik yang oleh Jepang dinamakan "Dai Toa Sense" (Perang Asia Timur Raya) disusul dengan pidato radio Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborg Stachouwer, yang menyatakan ikut perang melawan Jepang. Perang di wilayah Hindia Belanda kenyataannya dalam keadaan kekuatan yang tidak seimbang. Empat divisi kekuatan militer Hindia Belanda atau sekitar 40.000 personel di bawah pimpinan Jenderal H. Ter Poorten, melawan enam sampai delapan divisi tentara Jepang di bawah komando Jenderal Hitoshi Imamura. Hanya dalam tempo tiga bulan Hindia Belanda sudah dapat diduduki bala tentara Dai Nippon mulai dari Tarakan (10 Januari 1942), Balikpapan (21 Januari 1942), Pontianak (2 Februari 1942), Martapura dan Banjarmasin (10 Februari 1942).[5]

Akibat penaklukan Jepang itu, sebagian besar orang Belanda dan pribumi yang setia kepada Belanda melarikan diri ke Australia dengan menggunakan ratusan kapal sehingga memadati pelabuhan-pelabuhan Brisbane, Sydney, dan Fremantle. Para pengungsi kemudian menyusun kembali 15 orang anggota Dewan Pemerintahan Hindia Belanda di Melbourne, yang terdiri dari pemimpin-pemimpin militer dan ekonomi serta sebuah perwakilan darurat dari mereka. Mereka kemudian membentuk pemerintahan Hindia Belanda dalam pengasingan di pinggiran Kota Brisbane. Meskipun demikian, baru pada 8 April 1942 van Mook mengumumkan pembentukan Komisi NEI (Netherlands East Indies) yang bertindak sebagai pemerintahan dalam pengasingan sementara untuk menangani urusan Belanda di Australia dan New Zealand di bawah pimpinan van der Plas. Adapun kedudukan van Mook adalah sebagai pejabat Gubernur Jenderal karena Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Statchouwer ditawan dan berada di sebuah kamp penjara Korea. Baik van Mook maupun van der Plas, dalam peran dan tindakannya lebih banyak mewakili Hindia Belanda daripada negeri Belanda sebagai negeri induk.[6]

5 *Ibid*., hlm. 2 dan Rupert Lockwood, *Armada Hitam*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm. 2.

6 Rupert Lockwood, *Armada Hitam*, hlm. 2, 51, dan 53.

Perang Dunia II dan berkuasanya Jepang atas Hindia Belanda merupakan bentuk perubahan keadaan politik yang berdampak pada perekonomian di berbagai daerah. Tindakan dramatis pada masa awal pendudukan Jepang setelah menaklukkan Hindia Belanda adalah dengan melikuidasi semua bank termasuk DJB yang merupakan bank sirkulasi, Bank Tabungan Pos (Spaarbank) yang nasabahnya terutama banyak orang Eropa, dan bank-bank komersial milik Inggris dan Belanda. Jepang menutup semua kantor cabang DJB. Likuidasi terhadap bank-bank yang ada, jelas bukan pada suatu kondisi normal melainkan dipaksa oleh suatu kekuatan. Likuidasi bank lazimnya dilakukan karena adanya *fraud* atau kecurangan dalam sistem manajemennya, kalah dalam persaingan, dan karena tidak mampu membayar pajak.[7]

Sejak awal pendudukan Jepang, para direksi bank-bank dipaksa untuk mengeluarkan pernyataan menyerahkan semua hak miliknya kepada tentara Jepang tanpa syarat. Ketentuan ini segera diikuti dengan pengumuman tentang penangguhan pembayaran utang-utang bank yang berlangsung sampai tanggal 20 Oktober 1942. Pada saat yang bersamaan, Jepang juga mengeluarkan peraturan likuidasi semua bank milik Belanda dan Inggris serta beberapa bank Cina. Meskipun ketentuan ini khususnya diberlakukan hanya di Pulau Jawa, namun pemerintahan Jepang di Singapura mengeluarkan peraturan yang sama untuk wilayah Sumatra. Sementara untuk wilayah Kalimantan dan Timur Besar lainnya yang diduduki *Kaigun* dikeluarkan oleh Kementerian Angkatan Laut di Tokyo. Ini artinya ada tiga instansi likuidator yang dalam beberapa segi tertentu masing-masing kantor bekerja sendiri-sendiri secara terpisah.[8]

Tindakan likuidasi atas beberapa bank milik pemerintah Hindia Belanda dan menggantikan fungsinya merupakan strategi politik ekonomi pemerintah Jepang, sekalipun saat itu tetap membiarkan beberapa bank asing lainnya, di antaranya bank milik Inggris. Untuk kepentingan perang, pemerintah Jepang mendapatkan pemasukan keuangan dari sumber

---

7 Dari Situasi Sirkulasi Mata Uang setelah Penghentian Perang, No. kode IC. 006427/6701.

8 Catatan perihal kejadian-kejadian sekitar tanggal 20 Oktober 1942 oleh R. Rahardjo Santoso, 10 Desember 1988. Lihat juga Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip R. Hardjo Santoso, 2000, *De Javasche Bank Pada Masa Peperangan. Perang Asia Pasifik 1941–1945 dan Sesudahnya*, Jakarta, hlm. 4-5.

yang terbatas, yakni dari pungutan pajak dan penjualan hasil perkebunan. Dengan begitu, pemerintah Jepang menguasai daerah-daerah beserta kekayaan alamnya.[9]

Pada Maret 1942 Jepang melikuidasi bank-bank bekas milik Belanda dan menyitanya. Likuidasi dilakukan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13/1942. Pemerintahan militer Jepang tidak membatasi perhatiannya hanya pada DJB, namun juga menutup semua bank milik pemerintah Belanda lainnya. Empat bank besar lainnya, yakni (1) Nederlandsch Indische Handelsbank NV; (2) Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij NV; (3) Nederlandsche Handel Maatschappij NV; dan (4) Batavia Bank NV merupakan bank-bank besar dengan aset yang besar, yakni Nederlandsche Handel Maatschappij memiliki lebih dari *f*280 juta, NV Nederlandsch Indische Handelsbank memiliki lebih dari *f*158 juta, dan NV Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij memiliki lebih dari *f*99 juta. Ketiga bank ini tidak saja meminjamkan uang kepada sejumlah badan usaha besar, namun juga berinvestasi pada perusahaan perkebunan bersubsidi.

Pada dasarnya aset seluruh tiga bank ini sepadan dengan 50% aset dari DJB. Tindakan penyitaan oleh militer Jepang tidak hanya berlaku bagi bank, tapi juga pada lembaga kredit, seperti Algemeene Volkscredietbank (Bank Perkreditan Rakyat Umum). Selain melikuidasi lima bank pemerintah Belanda itu, pemerintah Jepang juga melikuidasi empat bank swasta, yaitu: (1) The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd.; (2) The Chartered Bank of India, Australia, and China Ltd., (3) Bank of China; dan (4) Oversea Chinese Banking Corporation Ltd.[10] Setelah DJB dan bank-bank tersebut dilikuidasi, Gunseikanbu menetapkan dan mengumumkan Nanpo Kaihatsu Ginko[11] (NKG) sebagai bank sirkulasi bagi wilayah Asia Tenggara yang telah diduduki.[12]

---

9 Sulasman, "Panasnya Matahari Terbit Derita Rakyat Sukabumi pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945". Patanjala Vol. 5 No. 3 September 2013, hlm. 433.

10 Shibata Yoshimasa, *Op.Cit.*, 1996, hlm. 704.

11 Dalam bahasa Jepang, *Nanpo* berarti selatan, *Kaihatsu* artinya pembangunan, dan *Ginko* adalah bank. Dalam istilah bahasa Inggrisnya Nanpo Kaihatsu Ginko adalah Southern Development Bank. Lihat Southern Development Bank, *Monthly Balance of Southern Development Bank Notes* (Foreign Office Diplomacy Record, Navy-I-1-6).

12 Darsono, dkk, *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 168.

Gambar 3.1. Gedung Algemeene Volkscrediet Bank Banjarmasin
Sumber: KITLV

Gambar 3.2. Gedung Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij NV Banjarmasin
Sumber: Koleksi Tropenmuseum

Gambar 3.3. Gedung Nederlandsche Handel Maatschappij NV (NHM) Banjarmasin
Sumber: Koleksi Tropenmuseum

Pada kasus DJB, sebagaimana diketahui bahwa DJB adalah bank terbesar di Hindia Belanda sekaligus merupakan bank sirkulasi kolonial pertama di Asia. Ada banyak cabang De Javasche Bank yang semuanya dikuasai dan ditutup oleh pemerintah Jepang, termasuk kantor cabangnya di Banjarmasin. Bank-bank besar yang turut ditutup kegiatannya selama ini bukan hanya terlibat dalam keuangan komersial, tetapi juga dalam pembiayaan perkebunan. Di Kalimantan Selatan, DJB terlibat dalam pembiayaan perkebunan-perkebunan karet milik swasta, seperti pengusaha Eropa maupun Cina. Kantor cabang DJB Bandjermasin ditutup dan asetnya disita oleh tentara angkatan laut Jepang.

Fungsi dan tugas bank-bank yang dilikuidasi itu kemudian digantikan oleh bank-bank Jepang yang sudah ada sejak sebelum Jepang menguasai Hindia Belanda, yang pernah ditutup pada 8 Desember 1941 ketika Perang Asia Pasifik terjadi. Di antara bank milik Jepang adalah Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank, dan Mitsui Bank. Pada tahap pertama sesudah bank-bank dilikuidasi, pihak Jepang telah memanfaatkan tenaga-tenaga

staf dan tata usaha dari bank-bank tersebut, namun jumlahnya dikurangi hingga tersisa sejumlah kecil tenaga inti yang berasal dari DJB.[13]

Sejak tahun 1941 Jepang sebenarnya sudah merencanakan pendirian bank sirkulasi di wilayah pendudukannya yang akan diberi kewenangan menerbitkan mata uang. Pemerintah Jepang pun dalam prosesnya telah mempersiapkan pendirian lembaga perbankan yakni Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG) sejak Desember 1941 guna mengatur sistem moneter di wilayah pendudukan. NKG secara resmi mulai beroperasi pada Maret 1942 menggantikan peran DJB sebagai bank sirkulasi. Di Jawa terdapat dua bank lagi yang didirikan tentara Jepang dengan tujuan memajukan perdagangan, pertanian, dan industri. Bank-bank yang didirikan pemerintah Jepang hanya berdagang dengan firma Jepang yang memiliki cabang di Jawa, yaitu Syomin Ginko (Bank Rakyat) dan To-Indojin Ginko (Bank Hindia Timur).[14]

NKG merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan Jepang yang diizinkan beroperasi di kawasan Asia Tenggara. Sebagai bank sirkulasi baru, pada 1943 NKG mendirikan kantornya di Jakarta yang bertugas menangani persoalan bank-bank swasta yang telah dilikuidasi oleh pemerintah militer Jepang.[15] Dalam menjalankan tugasnya di wilayah Indonesia, NKG mendelegasikan tugasnya sebagai bank sirkulasi kepada dua bank Jepang. Di wilayah Jawa dan Sumatra, peran sebagai bank sirkulasi tersebut dipegang oleh Yokohama Specie Bank.[16] Sementara,

---

13 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip R. Hardjo Santoso, 2000, *De Javasche Bank Pada Masa Peperangan. Perang Asia Pasifik 1941–1945 dan Sesudahnya*, Jakarta, hlm. 5.

14 I. J. Brugmans, *Nederlandsch Indie onder Japanese bezetting 1942-1945*. Franeker: Wever B.V, 1960, hlm. 258.

15 Darsono, dkk, *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral,* … hlm. 168.

16 Dalam hal ini, NKG hanya bertindak sebagai koordinator. Namun, keberadaan Yokohama Specie Bank tetap dianggap penting sebab diindikasikan sebagai momen penting saat tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa. Saat itu NKG mengikutsertakan bankir dari Yokohama Specie Bank dalam misi membuka kembali kantor-kantor cabang sebelumnya dan mendirikan cabang baru di beberapa wilayah di Hindia Belanda. Sebetulnya Yokohama Specie Bank didirikan pada Februari 1880 di Yokohama. Bank tersebut kemudian menjadi bank yang berorientasi global dengan membuka sejumlah kantor perwakilan di beberapa negara, seperti di New York (1880), London (1881), dan San Fransisco (1886). Pada 1887 Yokohama Specie Bank diberi status khusus setingkat di bawah bank sentral Jepang (Bank of Japan) dan seperti tidak terpisahkan dari bank sentralnya. Dalam perkembangannya, Yokohama Specie Bank berekspansi ke Asia Tenggara yang diawali dengan pembukaan kantor cabang di Surabaya (1918) dan Batavia (1919). Namun, saat Perang Dunia II bergejolak, Yokohama Specie Bank dibubarkan sebab adanya tuduhan bahwa bank tersebut membantu upaya perang Jepang. Lihat Norio Tamaki, *Japanese Banking: A History, 1859-1959,* (Cambridge: Cambridge University, 1995).

di luar Jawa ditugaskan kepada Taiwan Bank.[17] Di Kalimantan Selatan, Taiwan Bank merepresentasikan tugas bank sirkulasi dalam menjalankan urusan keuangan pemerintah di wilayah angkatan laut Jepang.[18]

Di Kalimantan Selatan kantor cabang NKG berkedudukan di Banjarmasin dengan empat perwakilannya berada di Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan Tarakan.[19] Pemerintah Jepang mendukung pendirian NKG di Kalimantan Selatan dan pinjaman sebesar *f*1.628.000 dari rekening khusus pengeluaran militer sementara. Penambahan dana untuk cabang NKG Kalimantan Selatan dan Sulawesi tergantung pada pinjaman kepada rekening khusus pengeluaran militer sementara tersebut. Pemanfaatan dana terbesarnya mengalir ke sektor manufaktur yang memasukkan industri pengolahan makanan. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan menjadi debitur terbesar kedua.

Tabel 3.1.
Pinjaman pada NKG Kalimantan Selatan periode Desember 1942

No.	Sektor	Pinjaman (f) (dalam ribuan)
1.	Pembelian Barang	944
2.	Pertanian dan Kehutanan	368
3.	Manufaktur	40
Total		**1.352**

Sumber: Shibata Yoshimasa, "The Monetary Policy in the Netherlands East Indies under the Japanese Administration", dalam *BKI,* tahun 1996, nomor 4, hlm. 711.

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kalimantan Selatan, NKG mengalokasikan dananya untuk dipinjamkan dengan total sebesar *f*1.352.000. Jumlah tersebut lebih besar dari dana yang disediakan

17 Taiwan Bank (Taiwan Yinhang) merupakan bank yang dibentuk oleh pemerintah Jepang di Taiwan sebelum perang (1899), bersamaan dengan Yokohama Specie Bank dan Mitsui Bank (1876). Pendirian Taiwan Bank bertujuan untuk memperluas bisnis orang-orang Jepang dan Cina perantauan di Asia Tenggara. Taiwan Bank memiliki cabang-cabang yang didirikan saat perekonomian dan gerakan *nashin-ron* berkembang di Asia, termasuk Cina dan Asia Tenggara. Lihat Lawrence L. C. Lee, "The Development of Banking in Taiwan: The Historical Impact on Future Challenges", *Occasional Papers, Reprint Series in Contemporary Asian Studies,* Vol. 149. No. 6, 1999, hlm. 6-10.

18 Shibata Yoshimasa, "The Monetary Policy in the Netherlands East Indies under the Japanese Administration" dalam *BKI,* tahun 1996, Nomor 4, hlm. 704.

19 *Ibid.*

oleh Taiwan Bank di Kalimantan Selatan untuk dipinjamkan pada periode yang sama yakni sebesar *f*944.000.[20] Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan NKG dalam memasok jumlah uang yang jauh lebih besar dan Gunseikanbu mendorong pembiayaan pembangunan di Kalimantan Selatan. Perusahaan yang didorong oleh pemerintah Jepang di wilayah ini misalnya perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, manufaktur, komunikasi, dan transportasi. Kesemuanya merupakan perusahaan yang aktivitasnya berorientasi pada pembangunan daerah dan membutuhkan pinjaman dana dari NKG. Tabel berikut memperlihatkan dana pinjaman dari NKG Kalimantan Selatan pada periode November 1943.[21]

Tabel 3.2.
Pinjaman pada NKG Kalimantan Selatan periode November 1943

No.	Sektor	Pinjaman (f) (dalam ribuan)
1.	Pembelian Barang	5.934
2.	Rekonstruksi & Pengembangan Pertambangan	867
3.	Manufaktur	3.981
4.	Pertanian dan Kehutanan	2.745
5.	Komunikasi dan Transportasi	1.263
6.	Budaya	296
7.	Lain-lain	2.500
Total		**17.586**

Sumber: Shibata Yoshimasa, "The Monetary Policy in the Netherlands East Indies under the Japanese Administration" dalam *BKI*, tahun 1996, Nomor 4, hlm. 711.

Sebagai bank sirkulasi, NKG menerbitkan mata uangnya sebagai alat pembayaran yang sah. Akan tetapi, langkah ini tampaknya tidak menguntungkan karena terjadi lonjakan inflasi di daerah yang dikontrol oleh pemerintah.[22] NKG berkantor pusat di Tokyo. Presiden NKG untuk

20 *Ibid*., hlm. 708–709 dan 711.

21 Shibata Yoshimasa, *Op.Cit*, hlm. 708–709, 713, dan 724.

22 Pusponegoro dan Notosusanto, 1993, hlm. 44. Lihat pula Shibata Yoshimasa, *Op.Cit*., 1996, hlm. 700.

pertama kalinya dijabat oleh mantan pejabat dari Kementerian Keuangan Jepang. NKG tidak hanya memasok pemerintah dengan mata uang asing melalui kantor pusatnya, namun langsung mengucurkan pada rekening pemerintah di beberapa wilayah pendudukan. Hal itu untuk melacak bukti-bukti pinjaman seperti di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan Selatan. Dalam kapasitasnya sebagai "bank pemerintah", NKG menerima dana bagi deposito rekening pemerintah dan mengelolanya di Jawa, Sumatra, dan beberapa daerah lainnya termasuk Kalimantan Selatan.[23] Pada lembaga perbankan lainnya, Jepang pun membuka kembali Bank Tabungan Pos dengan nama Chokin Kyoku, sementara bank perkreditan rakyat yang lama segera menyusul dalam bentuk desentralisir. Akan tetapi, barang-barang milik orang Eropa dibekukan.

Dalam hal peredaran mata uang, Pemerintah pendudukan Jepang berusaha mempertahankan nilai gulden agar harga barang-barang dapat dipertahankan seperti sebelum perang, di samping mengawasi lalu lintas permodalan dan kredit. Karena itu, uang gulden Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku dan sah sebagai alat pembayaran. Sejak pecah Perang Dunia II atau sejak masa pendudukan Jepang, keadaan peredaran uang menjadi tidak menentu. Uang-uang yang beredar di Hindia Belanda pada saat mulai pecah Perang Asia-Pasifik terdiri atas:[24]

1. Uang Kertas Bank (UKB) dari DJB "Seri Wayang Orang" emisi 1934 dalam pecahan *f*1.000, *f*500, *f*200, *f*100, *f*50, *f*25, *f*10, dan *f*5.
2. UKB DJB "Seri Coen" dengan gambar Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen emisi 1924. Uang seri ini terdiri dari pecahan seperti sebelumnya ditambah pecahan dengan nilai *f*300, *f*40, *f*30, dan *f*20 Hindia Belanda yang bertanggal 15 Juni 1940, namun peredarannya sejak 1941 dalam pecahan *f*2.50 dan *f*1.00. Pecahan uang ini disebut "zilver-bonds" (Uang Kertas Perak/UKP) karena pecahan-pecahan ini sebelumnya adalah uang logam terbuat dari perak (*zilver-munt*) sehingga *f*1.00 juga disebut "seperak".

23 Shibata Yoshimasa, *Op.Cit.*, 1996, hlm. 713.

24 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip R. Hardjo Santoso, 2000, *De Javasche Bank Pada Masa Peperangan. Perang Asia Pasifik 1941–1945 dan Sesudahnya*, hlm. 8–9.

3. Uang Logam Pemerintah (ULP) emisi 1930-an terdiri dari pecahan *f*2.50, *f*1.00, *f*0.50, *f*0.25, dan *f*0.10 terbuat dari perak, pecahan *f*0.05 terbuat dari nikel serta pecahan 2 sen, 1 sen dari tembaga.

Jumlah uang yang beredar pada tahun 1942 tercatat sebanyak *f*610 juta, yang berarti adanya kenaikan sebesar *f*250 juta atau sekitar 41% dibandingkan dengan tahun 1940 yang tercatat sebesar *f*360 juta. Hal ini disebabkan karena kebutuhan pembiayaan perang. Rincian menurut jenis uang yang beredar terdiri dari UKB sebanyak *f*365 juta, UKP sebanyak *f*175 juta, ULP sebanyak *f*95 juta, dan uang logam lainnya sebanyak *f*75 juta. Bersamaan dengan penyerbuan tentara Jepang ke wilayah Hindia Belanda pada awal tahun 1942, dibawa serta uang-uang kertas Jepang yang disebut sebagai "uang invasi" atau "uang militer" (*gun-pyo*) bertanda "De Japansche Regeering Betaalt Aan Toonder" dengan menggunakan nilai "gulden" dan "cent".[25]

Secara yuridis, uang kertas Jepang yang dikeluarkan tanpa jaminan emas merupakan alat pembayaran yang tidak sah karena berdasarkan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 yang ikut diratifikasi dan ditandatangani Jepang dinyatakan bahwa pihak yang menduduki suatu negara lain dilarang mengeluarkan uangnya sendiri. Dengan demikian, penukarannya setelah perang dengan uang yang berlaku sebenarnya dapat diabaikan. Namun, untuk tidak merugikan masyarakat pemilik uang Jepang, maka penukarannya dilaksanakan dengan perbandingan nilai *f*1Nanpo = 3 sen. Selama masa pendudukan Jepang uang-uang yang telah beredar sebelumnya, baik Uang Kertas Bank (UKB) DJB, Uang Kertas Pemerintah (UKP), maupun Uang Logam Pemerintah (ULP) yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda tidak pernah dinyatakan dicabut dari peredaran sehingga tetap merupakan alat pembayaran yang sah.[26]

Situasi perang dan transisi pemerintahan dari Belanda ke Jepang berpengaruh terhadap berbagai penanganan dan pengelolaan perekonomian di beberapa daerah, termasuk dalam hal pengelolaan dan

25 *Ibid.*

26 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip R. Hardjo Santoso, 2000, *De Javasche Bank Pada Masa Peperangan. Perang Asia Pasifik 1941–1945 dan Sesudahnya.*

pengaturan keuangan oleh bank. Peranan bank dalam negeri adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam arti bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh bank menyangkut masalah uang. Kegiatannya meliputi: administrasi keuangan, penggunaan uang, penghimpunan uang, perdagangan dan penukaran, perkreditan, kiriman uang dan pengawasannya. Peranan bank dalam hubungannya dengan luar negeri yaitu sebagai jembatan antara dunia internasional dalam lalu lintas devisa serta hubungan moneter dan perdagangan. Untuk pengaturan semua itu, pemerintah pendudukan Jepang pun menerbitkan mata uang kertas dan logam baru antara tahun 1944 dan 1945. Pemerintah Jepang melalui NKG menerbitkan uang tersebut dengan sebutan "Nanpatsu" bertanda "Dai Nippon Teikoku Seihu" dan khusus menggunakan nilai "Roepiah". Uang kertas ini terdiri dari pecahan 1, 5, dan 10 rupiah, sedangkan khusus untuk Sumatra diedarkan pecahan 100 dan 1.000 rupiah. Secara sporadik Jepang mengeluarkan uang logam dari aluminium yang terdiri dari pecahan 0,5 dan 1 sen, namun peredarannya sangat terbatas.[27]

Yang pertama diterbitkan dan berlaku sejak 15 Oktober 1944 adalah mata uang kertas pecahan 10 rupiah. Kemudian menyusul pecahan Rp5 dan Rp1 diterbitkan pada Desember 1944 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1945. Berikutnya pada 20 Februari 1945 dikeluarkan mata uang logam pecahan Rp0,50 dan menyusul dikeluarkan pula mata uang kertas pecahan tertinggi yaitu Rp100. Kesemua mata uang itu beredar dan berlaku di wilayah Kalimantan Selatan.[28]

27 *Ibid.*, hlm. 10.

28 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 26 Februari 1949.

Gambar 3.4. Uang Kertas Sepuluh Rupiah. Gambar ini merupakan tampilan mata uang kertas pecahan Rp10 berwarna dasar kuning tertera gambar Raden Gatotkaca di satu sisi dan pada sisi sebaliknya tertera gambar dua stupa Borobudur terletak di kiri dan kanan.

Sumber: Koleksi Bank Indonesia

Gambar 3.5. Uang Kertas Pecahan Lima Rupiah. Merupakan tampilan mata uang kertas pecahan Rp5 berwarna dasar hijau muda tertera gambar Rumah Gadang di satu sisi dan pada sisi sebaliknya tertera gambar wanita berpakaian adat Minang.

Sumber: Koleksi Bank Indonesia

Gambar 3.6. Uang Kertas Pecahan Satu Rupiah. Tampilan mata uang kertas pecahan Rp1 berwarna dasar hijau tua tertera gambar kegiatan pertanian di satu sisi dan pada sisi sebaliknya di bagian tengah tertera gambar pohon beringin.
Sumber: Koleksi Bank Indonesia

Gambar 3.7. Uang Kertas Pecahan Setengah Rupiah.
Sumber: Koleksi Bank Indonesia

Selain administrasi keuangan, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan perbankan tentang pemberian valuta asing dalam jumlah tertentu untuk pembelian barang impor di pasar Singapura dan Hong Kong yang bersifat sementara karena situasi ekonomi membuat sistem premi ekspor diusulkan ke tingkat yang lebih kecil atau lebih besar. Hal ini terkait dengan ketentuan bahwa mata uang asing (valas) untuk barang impor akan dikurangi secara proporsional atau bahkan dihentikan. Namun, tidak ada ketentuan yang membatasi jenis barang-barang yang diberikan karena diperkirakan akan terjadi perubahan radikal dalam penawaran dan permintaan untuk barang-barang impor selama situasi Perang Dunia II itu.

PEREKONOMIAN KALIMANTAN SELATAN DI BAWAH PENDUDUKAN JEPANG

Hilangnya kekuasaan Belanda menjadikan Jepang bersemangat dalam memotivasi para pengusaha pribumi dan kaum nasionalis atas nama proyek Perang Asia Raya, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Pemerintahan Jepang juga membentuk berbagai lembaga sosial desa, seperti rukun kampung (*Tonari Gumi*) dan koperasi (*Kumiai*). *Kumiai* berfungsi untuk mengumpulkan padi dari rakyat di setiap desa dan disimpan di lumbung yang akan digunakan oleh masyarakat di daerah itu ketika mereka mengalami kekurangan. Namun dalam kenyataannya, *Kumiai* tidak dapat membantu kebutuhan masyarakat karena hanya memiliki sisa persediaan yang ada di gudang milik Borsumij di Hulu Sungai. Sebagian besar dari persediaan gudang itu sudah dibebaskan oleh pihak Belanda kepada masyarakat. Barang-barang yang didatangkan dari Jawa dan Sulawesi pun terkendala oleh gangguan tentara Sekutu yang masih menguasai daerah perairan Laut Jawa.

Untuk mengatasi kekurangan pasokan bahan-bahan pokok, Jepang memaksakan monopoli hasil terhadap seluruh produksi barang dan rakyat diharuskan menyerahkan hasil tersebut kepada Jepang atas modus pengabdian dan cinta tanah air. Kondisi tersebut mengurangi jumlah barang kebutuhan sehari-hari masyarakat sehingga mereka terpaksa harus

mencari penggantinya, seperti ubi, ketela, dan sagu. Jepang memaksa masyarakat menghasilkan minyak tanah, bensin yang dibuat dari karet, celana yang dibuat dari goni, dan tikar. Dalam misi Perang Pasifik, Jepang mendirikan perusahaan dan industri di Kalimantan Selatan. Pada 1943 perusahaan-perusahaan tersebut mulai beroperasi, seperti Mitsui Bussan Kaisha yang mengelola produksi gula, Toyo Menka Kaisha yang mengelola produksi tekstil, Mitsubishi Kabushiki Kaisha yang mengelola bahan makanan, Nomura Teindo Kabushiki Kaisha yang mengelola kayu, Borneo Suisan Kabushiki Kaisha yang mengelola ikan, Seizi Kabushiki Kaisha yang mengelola produksi kertas, Borneo Shosenshoe Kabushiki Kaisha mengelola produksi kapal laut, Toyota Kabushiki Kaisha mengelola produksi kendaraan angkutan, Kasen Ongkookai mengelola pengangkutan sungai, dan Koonan Kaiyoon mengelola pengangkutan produksi melalui laut. Pembiayaan atas berbagai perusahaan itu, Jepang mengedarkan uang kertas Jepang yang memakai teks bahasa Indonesia, mengoperasikan Taiwan Bank, mengoperasikan Syomin Ginko yang menggantikan bank perkreditan rakyat (Algemeene Volkscredietbank).

Sementara untuk memenuhi kebutuhan industri perang dan keperluan perdagangan, Jepang kemudian mendirikan beberapa pabrik, di antaranya pabrik peleburan besi di Gunung Bajuin Ketapang Pleihari, tambang mangaan di Tarimi, tambang intan di Rancah Sirang Cempaka, pabrik kertas di Sungai Bilu, pabrik tekstil di Muara Kalayan Banjarmasin, pabrik keramik di Rantau, dan pabrik minyak getah di Kandangan. Namun, memasuki tahun 1944 terjadi kegagalan panen yang memengaruhi berbagai jumlah produksi dan jumlah pekerja. Hasil panen yang diperoleh masyarakat dalam jumlah yang sangat sedikit dipaksa untuk diserahkan kepada pemerintah Jepang, sehingga masyarakat semakin miskin.[29]

Dalam konteks ini para pengusaha pribumi mulai muncul kembali di berbagai wilayah dengan misi merestrukturisasi perekonomian kolonial untuk membantu Perang Asia Raya. Dalam konteks inilah terjadi ketidakpercayaan masyarakat pribumi terhadap Jepang. Pada awalnya

29 Sutrisno Kutoyo, Sri Sutjiatiningsih (Ed.), *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977 /1978), hlm. 92–106.

mereka menyambut Jepang dengan simpati, namun karena misi yang dibawa Jepang adalah untuk kepentingan Jepang sendiri, yaitu untuk kepentingan perang maka masyarakat menjadi antipati. [30]

Di bidang kesehatan, pemerintahan Jepang di Banjarmasin membangun rumah sakit di Jalan Ulin yang diperuntukkan bagi masyarakat secara cuma-cuma. Saat itu yang menjadi pimpinan rumah sakitnya adalah dr. Sutan Diapari Siregar. Pengadaan obat-obatan didatangkan dari perusahaan obat-obatan Jepang di Makassar yaitu Makassar Ken Kyoso Kabushiki Kaisha dan obat-obatan tradisional dari masyarakat setempat. Pemerintahan Jepang banyak mendatangkan para tenaga kerja paksa (*romusha*) dari Jawa untuk kepentingan menggarap lahan kosong di Kalimantan Selatan yang belum dikuasainya. Namun, tindakan kejam Jepang sering dilakukan kepada para tenaga *romusha* ini sehingga banyak yang meninggal ketika menebang hutan, membangun jalan, membangun lapangan terbang dan sebagainya, serta serangan penyakit, hingga kelaparan.

Pembentukan berbagai lembaga dan organisasi sosial maupun politik itu adalah bertujuan untuk mengontrol para tenaga kerja *romusha* tadi. Organisasi-organisasi seperti *Seinendan Kenan Hokoku Dan*, *Bo Ei Tai Sintai*, dan *Fujinkai* didoktrin untuk memberikan semangat nasionalisme dan perasaan anti-Barat. Misi perang anti-Barat ini didukung juga oleh berbagai propaganda Jepang dalam surat kabar-surat kabar yang didirikannya, seperti harian *Borneo Shimbun* di bawah pimpinan umumnya E. Kato dan pimpinan redaksinya A. O. Hamidhan. Kedua orang ini dipercaya Jepang karena sebelumnya telah berhasil menerbitkan surat kabar harian *Kalimantan Raya*. Surat kabar *Borneo Shimbun* menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Jepang serta merupakan cabang dari surat kabar harian *Asahi Shimbun* yang terbit di Banjarmasin dan Kandangan. Di Kandangan juga terbit sebuah majalah hiburan Purnama Raya yang dipimpin oleh Haspan Hadna dan A. Jebar dengan misi penerbitannya adalah menyebarkan bahasa Jepang di Kalimantan Selatan. Bahasa

30 Peter Post, "Indonesianisasi and Japanization: The Japanese and The Shifting Fortunes of pribumi Entrepreneurship", J. Thomas Lindblad & Peter Post (eds), *Indonesian Economic Decolonization in Regional and International Perspective*, (Leiden: KITLV Press, 2009), hlm. 273.

Jepang juga disebarkan melalui pelajaran-pelajaran di sekolah dan dalam komunikasi di kalangan pegawai pemerintahan. Untuk menghibur masyarakat Kalimantan Selatan, pemerintah Jepang membangun gedung bioskop Osaka Gekijo di Banjarmasin, dua buah gedung sandiwara yaitu Sinar Surya dan Pancar Surya di bawah pimpinan M. Arifin. Sementara di daerah Pleihari, dibangun gedung sandiwara Sakura, di Amuntai, Kandangan, Barabai, dan Tanjung dibuka cabang-cabang Osaka Gekijo.[31]

Sebelum Jepang berhasil menduduki wilayah Indonesia, di Kalimantan Selatan telah lama berdiri perusahaan-perusahaan Jepang yang bergerak dalam bidang produksi hasil hutan berupa kayu, rotan, dan tikar, yaitu Nangyo Kaisha. Perusahaan tersebut mengekspor kayu dalam bentuk gelondongan dan hanya sedikit kayu belahan yang digergaji yang diekspor ke Eropa. Produk-produk hasil hutan seperti rotan, sebagaimana yang dilakukan di Kapuas, diolah menjadi tikar oleh para wanita Dayak yang kemudian diekspor ke Cina dan Filipina. Biasanya seorang wanita yang sudah cekatan dapat membuat selembar tikar dalam waktu 10 hari dan menghasilkan harga per lembarnya sekitar 70–80 rupiah. Pada masa pendudukan Jepang, wanita-wanita Dayak menerima pesanan dari pemerintahan Jepang untuk membuat topi rotan yang digunakan bagi para *Heiho* dan *Romusha*.[32] Melihat produk khas Kalimantan itu, pemerintah Jepang berkeinginan menghidupkan perekonomian rakyat Kalimantan Selatan. Dalam hal ini, kemudian Jepang melibatkan pihak bank karena pihak militer Jepang merasa kewalahan jika harus menangani urusan keuangan. Di sisi lain, meski Jepang telah berkuasa di wilayah tersebut, namun untuk sementara waktu pemerintah pendudukan Jepang tetap mempertahankan sistem pajak yang berlaku pada masa Hindia Belanda.

Seperti dalam keterangan Undang-Undang No. 1 tanggal 7 Maret 1942, Jepang masih menerapkan pajak penghasilan, pajak upah, dan pajak keuntungan perang dan sebagian mengubahnya. Akan tetapi, dalam hal cukai ekspor-impor, Jepang menghapuskannya dari aturan pemerintah Hindia Belanda, seluruhnya dihapuskan. Lembaga-lembaga

31 Sutrisno Kutoyo, Sri Sutjiatiningsih, (Ed.), *Op.Cit.*

32 Tim Penulis, *Republik Indonesia: Propinsi Kalimantan*, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 182.

keuangan yang ada sampai saat itu, terutama bank, terus berusaha meringankan beban penduduk pribumi khususnya yang berpenghasilan rendah. Beberapa pembaharuan penting yang dilakukan Jepang dalam aturan pajak meliputi: a) UU pajak pendapatan yang diperbaharui pada Juli 1943 di mana jumlah penghasilan minimum yang tidak kena pajak dinaikkan dari *f*75 menjadi *f*180 per tahun; b) Pajak upah yang dikenakan kepada individu pekerja dengan pajak *f*15 per bulan untuk upah minimum 50 sen per hari; c) UU pajak keuntungan perang yang diperbaharui pada Desember 1944 bahwa penghasilan usaha tahunan yang tidak kena pajak dalam pembaharuan ini dinaikkan dari *f*900 menjadi *f*3.000; d) Cukai konsumsi minuman keras baik sulingan maupun tidak sulingan; e) Penghapusan cukai duane dengan bea ekspor-impor, tetapi pada November 1943 pajak pengapalan karet dan kopra ditetapkan dengan harga sangat mahal. Pajak ini tidak menimpa penduduk Kalimantan Selatan justru memberi keuntungan dan kemakmuran penduduk pribumi setempat karena adanya kenaikan penghasilan pemerintahan sipil; f) Penghapusan monopoli candu dan garam dari Jawa kecuali untuk daerah Keresidenan Kalimantan Barat.[33]

Sebagaimana tujuan kebangkitan ekonomi di Kalimantan Selatan yakni melindungi dan memajukan standar hidup penduduk pribumi serta menegakkan keamanan dan ketertiban, seluruh tindakan ekonomi di daerah ini dengan demikian didasarkan pada tujuan ini. Oleh karena itu, diupayakan memperluas produksi bahan pangan, eksploitasi tambang, hutan, dan kekayaan alam lain, pembukaan industri baru untuk bisa meletakkan fondasi yang diperlukan bagi kemandirian ekonomi. Selain itu, didorong pula sektor perdagangan dengan Jepang dan kebutuhan hidup serta produksi pabrik. Selanjutnya di bidang pembiayaan dibuka bank perkreditan rakyat (Syomin Ginko) dengan tujuan melindungi usaha di bawah kepemimpinan pribumi dan memajukannya serta memperkuat semangat kerja. Dengan cara ini diupayakan bagi pembentukan modal pribumi untuk membentuk dan mempertahankan serta mengamankan

33 Terjemahan Sebuah Dokumen yang disusun dalam Bahasa Jepang, yang dijumpai di Balikpapan, Batavia 1946 kode dokumen Ned. I.C. 00468/4331 bis. Terjemahan dibuat oleh Kantor Urusan Jepang di Batavia.

standar hidup selama masa perang. Sulit mengajukan informasi konkret tentang berbagai tindakan ekonomi yang telah diambil di Kalimantan Selatan karena situasinya pada bulan-bulan belakangan menjelang September 1943 yang semakin parah.[34]

Tekanan diberikan pada penyeimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, dan pada dipertahankannya harga barang yang rendah. Hal pengeluaran dan pemasukan pada tahun 1943 dipangkas sehingga menjadi sekitar *f*200 juta. Adapun mengenai gaji misalnya ditetapkan 500 yen per bulan, suatu jumlah yang sangat tinggi sehingga tindakan diambil untuk secara perlahan menghapuskan pegawai yang bergaji tinggi. Pada kesempatan pemerintahan militer dibentuk, kira-kira *f*200 juta uang beredar. Selain itu, maksimal jumlah *f*20 juta uang militer diedarkan di wilayah Kalimantan Selatan. Pihak pemerintah dan bank mencurahkan perhatiannya guna mencegah mengalirnya sarana tukar yang tidak sah. Spekulasi dilarang keras dan terhadap lintah darat tindakan tegas diambil dengan tujuan mempertahankan sistem pertukaran yang sehat.

Pada tahun 1944 penduduk Kalimantan Selatan diperkirakan ada tiga juta jiwa terdiri dari orang Indonesia sekitar 1.900.000 orang, etnis Dayak kurang lebih 200.000 orang, dan penduduk Timur Asing sekitar 900.000 orang. Jepang menganggap pemerintah Belanda sebelumnya tidak saja telah memecah belah bangsa Indonesia, tetapi juga tidak ada upaya untuk memakmurkan penduduknya. Ketika itu kebun karet yang luas dan sumber minyak yang termasyhur di dunia misalnya diserahkan kepada kapital luar negeri. Keuntungannya hanya untuk kepentingan pemerintah Belanda semata. Sebaliknya, selama dua tahun kekuasaannya, Jepang menganggap telah berupaya membangkitkan kemakmuran rakyat dan menciptakan ikatan kebersamaan.[35]

Sampai masa ini, alam Kalimantan Selatan masih menyimpan kekayaan tambang seperti besi, intan, batu bara, bensin, emas, perak, air raksa, timah, batu mangan, antimony, dan habloer (kristal). Hutannya juga menyimpan banyak potensi seperti getah yang mulai dikirim ke

34 Dari Terjemahan Sebuah Dokumen yang disusun dalam Bahasa Jepang, yang dijumpai di Balikpapan, Batavia 1946 kode dokumen Ned. I.C. 00468/4331 bis.

35 *Borneo Shimboen*, Banjarmasin, 11 Februari 1944, Domei.

Jepang. Hasil berupa kayu hutannya telah menghasilkan kapal-kapal yang telah banyak mengarungi lautan. Kayu-kayu ini selain digunakan untuk pembuatan kapal-kapal dan alat-alat pengangkut lainnya, juga adalah bahan yang bagus sekali untuk pembuatan kertas. Jepang berusaha menghidupkan sektor industri dengan mendirikan seperti pabrik semen dan besi. Semua usaha Jepang sesungguhnya tidak lain ditujukan untuk kepentingan militer guna memenangkan perang terhadap Sekutu, dalam hal ini untuk mengalahkan Inggris dan Amerika.[36]

Pada masa pendudukannya, Jepang melihat kemungkinan untuk melancarkan aktivitas perdagangan sehingga merasa perlu mendirikan suatu maskapai dagang. Pemerintah Jepang kemudian mendirikan maskapai perkapalan yaitu Konan Kaigun Kabushiki Kaisha, Harima, dan beberapa usaha pembuatan kapal-kapal berbahan kayu-kayu lokal. Perusahaan-perusahaan ini sangat penting untuk perhubungan antardaerah di Kalimantan dan untuk sarana pengangkutan berbagai komoditas daerah ke Jawa, Sulawesi, Filipina bahkan ke Jepang. Oleh karenanya, pada kesempatan ini bank-bank yang ada berperan mengatur dan menyediakan dana operasionalnya dalam bentuk kemitraan dengan perusahaan-perusahaan di Kalimantan Selatan.[37]

Tahun 1944 daerah Kalimantan Selatan dianggap benar-benar bersih dari pengaruh kekuasaan Belanda dan dikuasai seluruhnya oleh tentara Dai Nippon. Berbagai perubahan telah dilakukan pihak Jepang termasuk dalam hal perdagangan dan perusahaan. Kalimantan Selatan diubah dengan mendasarkan pada kemakmuran dan keamanan bersama. Kalimantan Selatan menjadi bagian Asia Timur Raya (ATR) yang dapat membantu kekuatan di garis depan dalam memenangkan perang melalui hasil bumi dan tambangnya. Memasuki tahun ketiga pemerintahannya, Jepang dengan tentara Teikoku (Tentara Kekaisaran Jepang) sangat berharap mendapatkan akhir dengan kemenangan.[38]

Pada dasarnya di bawah kekuasaannya Jepang menginginkan perekonomian di wilayah Kalimantan Selatan tetap berputar. Jepang

36 *Borneo Shimboen*, Banjarmasin, 11 Februari 1944, Domei.

37 Tim Penulis, *Republik Indonesia: Propinsi Kalimantan* …, hlm. 161.

38 *Borneo Shimboen*, Banjarmasin, 11 Februari 1944, Domei.

begitu ingin mengimbangi perekonomian Tionghoa dan berupaya mendapatkan bahan-bahan mentah yang diperlukan untuk perang.[39] Terlebih lagi Jepang memerlukan dukungan untuk biaya perangnya menghadapi Sekutu. Dalam kerangka ini tidak ada pilihan bagi pemerintahan pendudukan Jepang untuk melibatkan pihak perbankan. Perekonomian akan dapat berputar jika ada pihak yang menangani masalah moneter. Akan tetapi, upaya Jepang ini tidak bisa berjalan mulus karena situasi perang yang membuat tingkat kondusivitas perekonomian terganggu. Bagi Jepang, menutup bank-bank pemerintah Belanda dan membuka atau menggantinya dengan bank-bank baru bukan perkara mudah untuk dapat menyelesaikan persoalan perekonomian di daerah.

KALIMANTAN SELATAN MASA REVOLUSI FISIK

Pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kalah kepada Sekutu sebagai isyarat pula berakhirnya masa pendudukan mereka di bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Kalimantan Selatan seusai Perang Dunia II masuk sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 sebagaimana daerah lainnya yang mengalami fase revolusi fisik. Menyerahnya Jepang kepada Sekutu dan proklamasi kemerdekaan ternyata tidak serta merta menjadikan negara Indonesia segera berdaulat dan dapat membangun negerinya sendiri. Ini karena Belanda ingin kembali berkuasa yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dengan bangsa Indonesia. Belanda beserta NICA-nya dengan membonceng tentara Sekutu segera menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya perlawanan muncul di mana-mana tak terkecuali di wilayah Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah yang menyatakan tetap setia kepada negara RI menjalankan perlawanan yang gigih menentang kembali kehadiran Belanda di wilayah mereka. Berbagai komponen rakyat Kalimantan Selatan angkat senjata untuk melawan Belanda, akibatnya keadaan kehidupan tidak dapat berjalan normal, terutama untuk sektor perekonomian.

39 Tim Penulis, *Republik Indonesia: Propinsi Kalimantan …*, hlm. 113–114.

Pada 1 September 1945 bendera merah putih dikibarkan di Kumai dekat Pangkalan Bun dan pada 5 September 1945 dikibarkan di Pangkalan Bun. Namun, segera setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Kalimantan Selatan kembali diduduki tentara Sekutu pemenang perang, yaitu pada 17 September 1945. Tentara Sekutu dari Australia di bawah pimpinan Kolonel Robson yang disertai Mayor van Assenderp pimpinan NICA, sementara masyarakat Kalimantan Selatan baru mendapat berita kemerdekaan RI di tanggal 24 Agustus 1945 yang dibawa oleh A. A. Hamidan dan adiknya A. A. Rivai.[40]

Tugas tentara Australia di Kalimantan Selatan memang bertugas untuk melucuti tentara Jepang yang telah menyerah dan kalah perang, rakyat pun berharap segala penderitaan akibat peperangan dan kekejaman Jepang segera berakhir dengan hadirnya tentara Australia. Namun, mereka tidak menduga jika di dalamnya turut serta Belanda-NICA yang kemudian mengisi kembali kantor-kantor pemerintahan. Meskipun awalnya pegawai-pegawai NICA ragu-ragu untuk memasuki kantor-kantor yang ada, namun percaya dirinya kemudian muncul setelah ada pengumuman dari Jenderal Thomas A. Blamey, panglima tertinggi tentara Australia yang disiarkan pada 24 Oktober 1945. Isi pengumuman itu menyatakan bahwa penyerahan Kalimantan oleh tentara Australia kepada NICA sebenarnya sudah ditandatangani Blamey pada 1 Oktober 1945, namun baru disiarkan beberapa hari kemudian.[41] Oleh karenanya, sampai dengan 10 Oktober 1945 pegawai-pegawai kantor merasa telah bekerja sebagai pegawai negara RI setelah diterimanya kabar kemerdekaan RI itu, sekalipun mereka tahu tentang kehadiran tentara Sekutu Australia di Kalimantan Selatan sejak 17 September 1945. Masyarakat merasa kecewa terhadap NICA ketika panglima tertinggi tentara Australia, Jenderal Blamey mengumumkan bahwa Undang-Undang Hindia Belanda akan digunakan dan dijalankan oleh NICA. Pengumuman tersebut memicu reaksi rakyat Kalimantan Selatan sehingga situasi menjadi tidak menentu karena ada dua pemerintahan.[42]

40 Hassan Basry, *Kisah Gerilya Kalimantan, dalam Revolusi Indonesia 1945–1949*, (Banjarmasin: Yayasan Lektur Lambung Mangkurat, 1961), hlm. 10.

41 *Ibid.*, hlm. 12–13.

42 Tjilik Riwut. 1953, *Op.Cit.*, hlm. 29-31 dan 33.

Perebutan pengaruh dan kekuasaan tak terhindarkan antara pejuang Kalimantan Selatan dan NICA di antaranya kemudian memicu terjadinya penyerbuan oleh pemuda-pemuda Banjarmasin terhadap pusat kekuatan NICA pada tanggal 9 November 1945. Peristiwa ini menewaskan beberapa pemuda termasuk pimpinannya M. Amin Effendi. Ia gugur sebagai pahlawan rakyat Kalimantan Selatan yang kemudian menginspirasi dan memicu semangat perlawanan bersenjata kepada Belanda-NICA pada masa-masa berikutnya.[43]

Kantor jawatan kepolisian, kantor pos, dan kantor cabang DJB Bandjermasin diisi dan dijalankan kembali oleh NICA. Barang-barang milik Jepang disita oleh NICA setelah ada penyerahan wewenang dari tentara Australia. Semua kantor dimintai daftar nama pegawainya dan inventarisasi asetnya. Sementara itu, berangsur-angsur tentara Australia kembali ke negerinya, namun terdapat dua prajurit Australia, Charles Forster dan Victor Little dari Partai Komunis Australia yang masih di Banjarmasin. Misi mereka adalah bertemu dengan tokoh pimpinan rakyat di Kalimantan Selatan untuk menyampaikan amanah dari kaum politisi Indonesia yang berada di Australia untuk pemimpin rakyat di Kalimantan Selatan. Keduanya bertemu dengan Hadariah sebagai tokoh masyarakat dan menyerahkan lima lembar pamflet yang sudah dicetak di Australia untuk diperbanyak dan disebarluaskan di Kalimantan Selatan. Isi pamflet adalah pernyataan bahwa Indonesia telah merdeka dan mengajak segenap lapisan masyarakat dan golongan, para pegawai, polisi, buruh, dan sebagainya bersatu menolak kehadiran Belanda. Hadariah bersama beberapa temannya kemudian memperbanyak dan menyebarkan pamflet itu ke kalangan masyarakat luas hingga ke daerah sehingga menimbulkan reaksi rakyat mulai menentang kehadiran Belanda-NICA. Selebihnya rakyat juga kemudian mengetahui dan menyambut gembira Pangeran Muhammad Noor yang diangkat sebagai Gubernur Kalimantan meskipun masih berkedudukan di Jawa. Di lain pihak, di Kalimantan Selatan juga telah terbentuk dua organisasi yaitu Pedoman Besar Persatuan Rakyat Indonesia (PB PRI) dan Pemuda Persatuan Rakyat Indonesia (PPRI). Keduanya kemudian bermusyawarah dan memutuskan Pangeran Musa

43 Artum Artha, *Sejarah Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin: Museum Lambung Mangkurat, 1970), hlm. 27.

Ardikusuma sebagai Residen. Akan tetapi, dalam perjalanan waktu Pangeran Musa Ardikusuma lebih memilih sebagai pegawai NICA.[44]

Penolakan bahkan perlawanan terhadap NICA mulai terjadi di mana-mana, namun tidak sedikit juga yang direkrut oleh NICA sebagai pegawainya dengan modus gaji yang tinggi. Alasan ini pula yang membuat Pangeran Musa Ardikusuma memilih sebagai pegawai NICA. Residen Kalimantan Selatan kemudian dipegang oleh M. Ruslan berdasarkan pilihan rakyat.[45] Di masa ini sebagian daerah Kalimantan Selatan berhasil dikuasai NICA dan sebagian lagi berada dalam kekuatan pejuang-pejuang kemerdekaan. Pada 17 Februari 1946 pasukan-pasukan ekspedisi yang berisi para pejuang Kalimantan dari Pulau Jawa berhasil mendarat di Kalimantan Selatan. Ekspedisi MN 1001 pimpinan Mayor Tjilik Riwut atas perintah Gubernur Kalimantan P. M. Noor berhasil sampai di Kalimantan Selatan. Setelah Tjilik Riwut kembali ke Pulau Jawa kedudukannya digantikan oleh A. Muhran yang berhasil membentuk markas-markas perjuangan di Kalimantan Selatan. Di lain pihak, pada 5–6 Mei 1946 di wilayah Kalimantan Selatan telah terbentuk laskar Saifullah yang bersifat keprajuritan di bawah pimpinan Hassan Basry. Kesatuan jiwa perjuangan itu yang menyebabkan terbentuknya ALRI Divisi IV di Pulau Jawa yang beranggotakan para pejuang asal Kalimantan. ALRI Divisi IV ini terdiri dari empat batalion, satu di antaranya adalah batalion ALRI Divisi IV A untuk wilayah Kalimantan Selatan yang dibentuk pada 18 November 1946 di bawah pimpinan Hassan Basry.[46]

KEADAAN EKONOMI KALIMANTAN SELATAN

Sejak kekalahan Jepang, gejolak politik kemudian memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat termasuk perekonomian yang kembali tidak stabil. Sejak September–Oktober 1945, gejolak politik di Kalimantan Selatan memengaruhi perdagangan kayu yang diperkirakan mengalami

44 Hassan Basry, *Op.Cit.,* 1961, hlm. 14–16 dan 21.

45 *Ibid*., hlm. 29 dan 33.

46 Hassan Basry, *Op.Cit.,* 1961, hlm. 48–49, 58, dan 93.

kehilangan sekitar 9.000 m^3 kayu. Munculnya berbagai aksi mogok buruh perusahaan dan kantor kehutanan mengakibatkan kehilangan kayu sekitar 400.000 m^3. Namun, pemerintah Indonesia berhasil mengambil alih perusahaan penggergajian yang terdapat di daerah Kapuas, Pontianak, dan Pemangkat yang semula diusahakan oleh Java Hout. Kecuali perusahaan kayu yang di Pemangkat masih dipegang oleh pengusaha Cina. Dalam tahun 1948 Java Hout telah menggergaji kayu sebanyak 5.000 m^3. Sementara di tahun 1949 hanya 2.100 m^3, namun telah menjual 7.900 m^3

Gambar 3.8. Penebangan Kayu Hutan Kalimantan
Sumber: Tim Penulis, *Republik Indonesia: Kalimantan*

Gambar 3.9. Rakit Kayu Melalui Sungai
Sumber: Tjilik Riwut. 1958. *Memanggil*. Bandung: Endang.

kayu gelondongan. Java Hout mendapat keuntungan besar dari penjualan kayu gelondongan di tahun 1949 yang diperoleh dari daerah Dayak Besar sebanyak 78.000 m^3. Secara keseluruhan produksi Kalimantan Selatan ketika itu terhitung sedikit yaitu hanya sekitar 100.000 m^3.[47]

Namun demikian, masih termasuk tinggi bila dibandingkan dengan Kalimantan Timur di tahun itu. Perusahaan kayu di Kalimantan Timur di tahun 1949 hanya menghasilkan 42.340 m^3 kayu gelondongan dan 40.358 m^3 oleh perusahaan partikelir. Untuk wilayah Kalimantan Timur, perusahaan kayu di tahun 1949 mengalami penurunan bila dibandingkan perolehannya di tahun 1947 yang mencapai 84.933 m^3 oleh partikelir 18.231 m^3. Begitu juga perbandingan perolehan kayu di tahun 1948 yang menghasilkan 63.963 m^3 oleh partikelir 31.459 m^3. Berdasar angka-angka itu tidak ada perimbangannya antara perusahaan pemerintah dan partikelir karena politik kehutanan yang dijalankan pemerintah Belanda yang senantiasa ingin tetap memonopolinya, sekalipun dari pihak rakyat dan kesultanan menginginkan adanya perubahan izin yang sifatnya dapat lebih meringankan. Situasi antara tahun 1945 dan 1949 yang secara politik berada dalam dua sistem pemerintahan, yaitu Belanda dan Indonesia, mengakibatkan kondisi perekonomian yang tidak normal dan tidak menentu. Situasi seperti itu menyebabkan dunia perbankan tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara normal pula.[48]

Sampai awal 1949 tidak ada ketentuan yang membatasi jenis barang yang diminta, padahal diperkirakan akan terjadi perubahan radikal dalam penawaran dan permintaan untuk barang-barang impor di wilayah Kalimantan Selatan. Ada gagasan residen yang disampaikan juga kepada pihak perbankan untuk mengatur saham dalam jumlah bulanan yang akan dialokasikan bagi: 1) Importir Eropa, bersatu dalam Asosiasi Perdagangan Eropa 40%; 2) Importir Indonesia, bersatu dalam Asosiasi Perdagangan Indonesia 40%; dan c) Importir Cina, bersatu dalam Asosiasi Perdagangan Cina 20%. Sebesar 40% saham importir Eropa itu akan dibagi untuk para importir Eropa di Banjarmasin berdasarkan kepentingan impor saat ketika itu di Kalimantan Selatan. NV Marba yang bergerak di bidang ekspor-

47 Tim Penulis, *Republik Indonesia*: *Propinsi Kalimantan*, *Op.Cit.*, hlm. 181.

48 *Ibid.*

Gambar 3.10. Usaha Penggergajian Kayu (Wantilan) di Banjarmasin 1940-an.
Sumber: Han Knapen. 2001. *Forests of Fortune*? Leiden: KITLV Press.

Gambar 3.11. Pabrik Kayu di Sampit 1940-an
Sumber: Republik Indonesia, *Kalimantan*

impor dikategorikan sebagai importir Eropa. Importir Indonesia akan membagi 40% saham tersebut berdasarkan kepentingan historis, yang telah dialokasikan oleh Departemen Urusan Ekonomi untuk pendatang

baru, di mana persaingan diperbolehkan jika diperlukan. Kelompok Cina akan membagi bagian yang dialokasikan di antara lima importir yang akan ditunjuk berdasarkan bagian yang sama.[49]

Dalam situasi dan kondisi politik-ekonomi yang kurang stabil, maka barang impor perlu dipasok dalam jangka pendek karenanya enam minggu setelah tanggal pemberian pertukaran (izin devisa), barang impor yang berkaitan dengan izin tukar ini dapat diberikan. Guna menghindari kesulitan, pihak bea cukai dapat menyetujui dengan harga barang dan telah ada kesepakatan atas harga-harga ini sebelum melanjutkan untuk membeli dan memasok barang ke Banjarmasin. Alokasi barang diberikan pada kelompok pedagang, toko, pabrik, barang logam, barang teknis, dan lain-lain, serta aplikasi untuk penerbitan izin valuta asing dan izin impor harus disertai dengan daftar tertentu yang menunjukkan jenis, jumlah dan nilai untuk setiap barang. Barang yang dipasok oleh importir itu hanya sampai ke "pedagang barang bekas" yang berlokasi di Kalimantan Selatan dapat dijual dengan harga terbaik. Maka, untuk hal ini berlaku "aturan pembayaran" secara gratis. Penyelenggaraan pengadaan dan penjualan barang dilakukan oleh panitia yang dibentuk dari tiga orang anggota dari asosiasi dagang tersebut, yaitu satu anggota dari masing-masing asosiasi dagang. Oleh karena itu, asosiasi dagang perlu memelihara hubungan erat satu sama lain untuk mencapai tujuan pengaturan ini. Residen berhak menerapkan sanksi ekonomi kepada mereka yang tidak bekerja sama dengan tujuan yang ditetapkan, termasuk hal penarikan saham. Demikian pengaturan-pengaturan ini merupakan hasil pembicaraan Residen bersama perwakilan para pedagang dan pihak perbankan, termasuk di dalamnya yang utama keterlibatan dari DJB Bandjermasin.[50]

Menindaklanjuti surat tertanggal 28 April 1949 tentang ketersediaan perangkat ekstra valas untuk impor barang dari negara *soft currency* bagi Kalimantan Selatan, Residen mengadakan pertemuan pada 26 Februari 1949 yang singkatnya dapat menjadi rujukan yaitu mengenai "usulan sistem premi ekspor". Terkait yang dilakukan perserikatan dagang Eropa,

49 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 26 Februari 1949.

50 *Ibid.*

Residen tidak dapat melakukan apapun. Meskipun Residen dan komisi dapat melihat kemungkinan adanya dukungan bagi produk karet dari semua pihak, namun gagasan tentang hal tersebut belum ditetapkan. Residen juga secara pribadi memprotes keras aturan valas, namun pihak di Batavia menyatakan keberatan yang serius terhadap hal ini. Dia berharap Batavia akan mengambil keputusan dalam waktu yang tidak lama lagi. Keadaan ini menggambarkan bagaimana Belanda merasa telah berkuasa kembali atas tanah jajahannya yang telah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda dalam hal ini melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA) menjalankan pemerintahannya dengan dukungan pihak perbankan mereka untuk mengatur masalah keuangan dan perdagangan.[51]

DJB AGENTSCHAP BANDJERMASIN MASA REVOLUSI FISIK

Pasca kekalahan Jepang terhadap Sekutu, Belanda kembali ke Indonesia untuk memasuki kantor-kantor besar bank-bank Jepang. Jepang kemudian menghentikan likuidasi terhadap bank-bank Belanda yang sampai saat itu masih berlangsung. Adapun bank-bank Jepang yang sampai saat-saat terakhir masih melakukan kegiatan, dinyatakan berada di bawah pengawasan pemerintah Belanda (Netherlands Indies Civil Administration, NICA). Belanda kemudian menugaskan kembali DJB untuk beroperasi seperti pada masa sebelum pendudukan Jepang.[52]

Pembentukan dan pemulihan kembali kantor pusat DJB dan kantor-kantor cabangnya pada tahun 1946–1947 dilakukan oleh pemerintah Belanda (NICA) sebagaimana dalam tabel berikut. Kantor cabang DJB di Kalimantan Selatan bagaimana pun merupakan unsur dari pemerintahan Belanda-NICA yang tidak mungkin berpihak kepada

51 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 26 Februari 1949.

52 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip R. Hardjo Santoso, *De Javasche Bank Pada Masa Peperangan*, hlm. 5.

pemerintahanIndonesia. Lembaga ini berjalan menurut garis yang ditetapkan oleh pemerintahnya. Di Kalimantan Selatan, kantor cabang DJB Bandjermasin dibuka kembali pada 29 April 1946.

Tabel 3.3.
Pemulihan Kantor DJB Tahun 1946–1947

No.	Kantor DJB	Waktu Pembentukan	Waktu Pemulihan
1.	Jakarta	8 April 1828	5 Januari 1946
2.	Bandung	1 Juni 1909	6 Mei 1946
3.	Semarang	1 Maret 1829	25 Maret 1946
4.	Surabaya	14 September 1829	6 April 1946
5.	Medan	30 Juli 1907	15 Mei 1946
6.	Banjarmasin	1 Agustus 1907	29 April 1946
7.	Pontianak	1 April 1906	1 Mei 1946
8.	Makassar	21 Desember 1864	20 Juni 1946
9.	Menado	9 September 1910	3 April 1946
10.	Palembang	20 September 1909	1 Agustus 1947
11.	Cirebon	31 Juli 1866	5 Agustus 1947
12.	Malang	1 Desember 1916	15 September 1947
13.	Padang	29 Agustus 1864	23 Oktober 1947

Sumber: Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip R. Hardjo Santoso, *De Javasche Bank Pada Masa Peperangan,* hlm. 6.

Pada saat Jepang menyerah kalah kepada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945, van Buttingha Wichers masih diakui sebagai Presiden De Javasche Bank yang sah. Akan tetapi, sebelum berlangsung resmi pemulihan DJB, pada 17 November 1945 Wichers wafat akibat serangan jantung sehingga terjadi kekosongan jabatan presidennya. Letnan Gubernur Jenderal dalam hal ini kemudian menggunakan wewenangnya sesuai Pasal 1 Ketentuan Peralihan tentang Pemerintahan Umum Hindia Belanda dengan mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 28 Februari 1946 tentang pengangkatan J. C. van Waveren sebagai pejabat sementara Presiden dan H. J. Manschot sebagai pejabat sementara Direktur De Javasche Bank.[53]

53 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip R. Hardjo Santoso, *De Javasche Bank Pada Masa Peperangan,* hlm. 6–7.

Berdasarkan Surat Keputusan Ratu Belanda tanggal 2 Maret 1943 (Staatblad No. SD), pencetakan uang terus dilakukan di masa perang oleh pemerintah Belanda. Mata uang yang dicetak Belanda saat itu terdiri dari pecahan *f*100, *f*50, *f*25, *f*10, *f*5, *f*2.50, *f*1, dan *f*0.50. Sebutan pecahan baru ini tidak hanya gulden tetapi menjadi "Nederlansch Indische Gouvernementsgulden". Akan tetapi, peredarannya setelah tahun 1945, yaitu setelah Sekutu memenangkan perang beriringan dengan kembalinya pemerintah Hindia Belanda dengan nama Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Oleh karena itu, uang baru ini kemudian lebih dikenal sebagai "Uang NICA". Selain itu, karena yang dominan adalah pecahan dengan ciri warna merah, maka uang itu disebut dengan "uang merah".

Peredarannya oleh "NICA Paymaters" mulai 1947 terbatas di wilayah yang telah diduduki kembali. Ini karena bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 sebagai negara berdaulat sehingga ketika Belanda berkehendak kembali, mereka berusaha menguasai kembali wilayah-wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan bantuan Sekutu, sebagian wilayah berhasil dikuasai NICA, namun terutama wilayah-wilayah pedalaman masih dikuasai pemerintah Republik Indonesia sehingga "Uang NICA" tidak diterima rakyat. Pengedaran uang NICA ketika itu sesungguhnya merupakan tindakan "darurat" karena masuk masa peralihan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan pasca perang, otoritas moneter khususnya DJB diperkirakan tidak akan bisa segera pulih dan kembali berfungsi dalam statusnya sebagai bank sirkulasi.

Uang NICA ini meskipun ditandatangani oleh pejabat Gubernur Jenderal H. J. van Mook juga turut ditandatangani Presiden DJB R. E. Smits yang memiliki otoritas pengedar uang, serta pengedarannya pun dilakukan oleh DJB. Meskipun demikian, uang NICA ini tidak dapat dikatakan sebagai uang kertas bank karena bukan dibuat dan dikeluarkan oleh DJB. Adapun terkait dengan penukaran uang Jepang, ditetapkan nilai tukar 100 Jepang sama dengan 3 NICA dengan batas waktu penukaran sampai tanggal 30 Oktober 1946. Akan tetapi, praktiknya baru ditutup pada 16

Juli 1948, sedangkan uang-uang gulden lainnya tetap mempunyai nilai seperti yang tertera.[54]

Meski pada masa revolusi kemerdekaan keadaan politik begitu bergejolak, namun aktivitas perekonomian terutama di Kalimantan Selatan berupaya untuk tetap bergerak. Di wilayah-wilayah yang berhasil diduduki oleh Belanda (NICA), lembaga perbankan—dalam hal ini DJB—kembali dibuka, salah satunya DJB Bandjermasin. Dalam kaitannya dengan dioperasikannya kembali sektor perbankan, pada tahun 1946 De Bank voor Nederlandsch-Indie dipindahkan dari Paramaribo (Suriname) ke Batavia untuk menyelesaikan persoalan perbankan di Hindia Belanda yang sebelumnya dilikuidasi Jepang. Keadaan bank-bank Belanda yang dilikuidasi Jepang diketahui tidak separah yang dibayangkan. Kerugian yang dialami bank-bank tersebut tidak sampai melumpuhkan mereka dan karenanya mereka ingin kembali diberikan izin untuk beroperasi. Hal ini sebagaimana kutipan surat dari Nederlandsch Indische Handelsbank (NIHB) kepada Direktur Keuangan Belanda, L. Gotzen:

> "… dapat kami jelaskan bahwa sepanjang kami ketahui sesuai dengan yang kami alami, menurut penilaian pesimistis atas kerugian kami, tidaklah sampai memengaruhi nilai-nilai yang dipercayakan kepada kami … dan … sebagian besar dari modal kami ternyata dalam keadaan selamat …"[55]

Hal serupa juga dirasakan oleh Nederlandsch Handelmaatschappij (NHM) yang menyatakan relatif kecilnya kerugian yang diderita akibat perang. Keadaan yang sama pun dirasakan oleh DJB yang mana secara finansial berhasil melewati masa krisis dengan menelan kerugian seminimal mungkin akibat Perang Dunia II. DJB berhasil memperoleh kembali persediaan cadangan emas yang sempat diamankan ke Australia dan Afrika Selatan. Berdasarkan laporan tahunan pembukuan pertama (1946/1947) pasca DJB dibuka kembali, besaran deviden yang dapat

54 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip R. Hardjo Santoso, *De Javasche Bank Pada Masa Peperangan*, hlm. 10.

55 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank, *Verslag van De Javasche Bank 1941/1947* dalam Tim Penulis, *Menegakkan Kedaulatan dan Ketahanan Ekonomi: Bank Indonesia dalam Pusaran Sejarah Kalimantan Barat*, (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2019), hlm. 127.

dibayarkan sebesar 15%. Persentase tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan deviden yang dibayarkan saat sebelum perang (1940–1941) yang angkanya mencapai 10,7%. Keuntungan tersebut diraih DJB berkat penyesuaian nilai cadangan emasnya dari harga sebelum perang sebesar *f*2.121,00 menjadi *f*2.977,73 per kilogramnya.[56]

Gambar 3.12. Sejumlah Pegawai DJB Bandjermasin
Sumber: Arsip Bank Indonesia

Sementara itu, di Kalimantan Selatan, kantor cabang DJB di Banjarmasin kembali dibuka pada 29 April 1946. Sama seperti pada masa-masa sebelum DJB dilikuidasi, persetujuan permohonan kredit dan laporan lainnya dilakukan melalui komunikasi surat-menyurat yang dilakukan oleh DJB Bandjermasin kepada DJB pusat. Tak butuh waktu lama bagi DJB Bandjermasin untuk kembali menjalankan perannya dalam hal pemberian bantuan kredit. Pada periode-periode ini, DJB mulai membuka aliran kredit kepada golongan pribumi setelah sebelumnya hanya membatasi pemberian kredit kepada para pengusaha Eropa dan Cina saja. Hal ini terlihat dalam sebuah surat permohonan bantuan kredit kepada golongan

56 Tim Penulis, *Menegakkan Kedaulatan dan Ketahanan Ekonomi: Bank Indonesia dalam Pusaran Sejarah Kalimantan Barat*, (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2019), hlm. 127. Pada perkembangannya, keberadaan De Bank voor Nederlandsch Indie dilikuidasi dan ditutup pada 31 Desember 1948.

pribumi. Dalam Salinan Surat No. 119/5 bertanggal 27 Mei 1946, adanya permintaan kredit yang dimohonkan oleh R. A. Digdokoesoemo kepada DJB Bandjermasin.[57] Permohonan kredit atas nama R. A. Digdokoesoemo pun direspons dan disetujui oleh DJB pusat dengan pemberian kredit sebesar *f*1.600 melalui surat yang bertanggal 7 Juni 1946.[58]

Di sisi lain, sekitar pertengahan 1946 kedudukan dan sikap pemerintah Belanda-NICA dituangkan dalam berbagai lembaran, yaitu dalam kaitannya dengan rekonstruksi, kemakmuran, dan kondisi ekonomi penduduk. Dalam pernyataannya disebutkan bahwa Belanda-NICA akan memberikan kesempatan kepada semua golongan penduduk, terutama pedagang di daerah ini dan bahwa mereka akan memberikan kerja sama dan dukungannya untuk membawa perdagangan menuju kemakmuran yang besar dan untuk mengejar kemajuan penduduk. Dalam kaitan ini DJB Bandjermasin harus menyoroti fakta terpenting, yaitu posisi badan perdagangan utama. Karena kerja sama DJB Bandjermasin dengan pedagang Indonesia masih jauh. Tidak ada yang dilakukan untuk benar-benar mendirikan asosiasi perdagangan yang terorganisir dan hal ini membuat Kalimantan Selatan tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia yang telah membentuk asosiasi perdagangan besar.

Sehubungan dengan hal di atas, pemerintah Belanda-NICA mendesak pedagang untuk membentuk asosiasi perdagangan, misalnya NV (Perseroan Terbatas) yang akan segera menunjukkan jalan untuk mencapai persatuan di antara para pedagang yang akan memungkinkan rakyat Kalimantan Selatan menempuh jalannya sendiri. Untuk juga menggunakan semua tenaga dan ketegasan guna mendirikan banyak perusahaan dagang besar lainnya sehingga kepentingan perdagangan ekspor dan impor dapat dilayani dengan cara ini. DJB Bandjermasin dalam hal ini sangat menghargai kesempatan ini dan dianggap sejalan dengan upaya penduduk itu sendiri untuk memulihkan perdagangan produk penduduk sebanyak mungkin dan juga untuk mencapai perluasan

57 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1737, *Crediet Verleening van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 27 Mei 1946.

58 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1737, *Crediet Verleening van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 7 Juni 1946.

kehidupan sosial kemasyarakatan. Di sini setidaknya DJB Bandjermasin mengungkapkan harapan bahwa laporan yang dibuat akan memperjelas bahwa dengan cara ini keinginan rakyat akan dikedepankan. Untuk kesejahteraan Indonesia, kerja sama yang lebih erat harus dibutuhkan terutama di bidang ekonomi dengan aksi dan semangat untuk mewujudkan perkembangan perdagangan dan mengejar kemajuan.[59]

Pada bulan Agustus 1946 sebuah pertemuan diadakan di Hulu Sungai atas prakarsa Direksi dari Manufacturen Pool. Acara ini dihadiri oleh para pedagang terkenal dan terkemuka dari seluruh daerah Hulu Sungai. Pertemuan memutuskan membentuk perserikatan dagang atau NV untuk mewakili kepentingan ekspor dan impor. Usulan ini didukung oleh semua yang hadir dan dengan demikian sebuah perusahaan didirikan sebagai perusahaan dagang dalam bentuk NV. Semua permulaan terasa sulit dan selama tiga bulan pertama perserikatan dagang yang baru didirikan itu menjalani masa sulit yang disebabkan belum memiliki pengalaman yang cukup. Merasa tidak kuat menghadapi berbagai kendala, kurang dari empat bulan perusahaan dagang ini dilikuidasi. Akan tetapi, atas desakan beberapa tokoh ternama di Kandangan yang bertekad tidak akan menyerah, mereka yakin akan berhasil jika ada penanganan secara kompeten.

Pada 6 Februari 1947 akhirnya dibentuk perusahaan dagang NV "Kinibalu" Kandangan sebagai cabang Banjarmasin. Modal awalnya sebesar *f*1.000.000 dalam saham *f*250 dan sebanyak 872 diterbitkan pada saat pendirian. Setoran awal adalah 10% telah dilakukan sebagaimana terlihat di dalam tabel berikut.

NV Kinibalu yang bergerak di sektor ekspor karet juga mengembangkan produksi lainnya seperti kapur, tikar, kampil-purun (karung dari bahan tanaman purun), dan barang lainnya yang menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat di daerah. Namun, yang menjadi kendala dan tantangannya adalah terkait dengan hal pengangkutan laut sehingga mengakibatkan NV Kinibalu mengalami kerugian hingga ± *f*40.000. Mengenai perdagangan antarpulau semacam ini masih dalam tahap awal

59 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 14 Oktober 1948.

Tabel 3.4.
Pemegang Saham NV "Kinibalu" 1947

No.	Nama	Saham (*f*)	Setoran 10% (*f*)
1.	H. Arip bin Achmad	50.000	5.000
2.	Noentji bin H. Arip	25.000	2.500
3.	H. Maran bin H. Halid	25.000	2.500
4.	Arbain	25.000	2.500
5.	H. Ardi bin H. Matseman	12.500	1.250
6.	H. Aliasri bin H. Hadari	25.000	2.500
7.	H. Amin bin Aman	25.000	2.500
8.	Marwan Ali bin H. Mohammad Ali	12.500	1.250
9.	Haris Mochtar bin H. Mochtar	5.000	500
10.	Martin Pongoh	12.500	1.250
11.	Merah Daniel Bangsawan	500	50
Jumlah		**218.000**	**21.800**

Sumber: Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 14 Oktober 1948.

atau rintisan bagi NV Kinibalu, sekalipun demikian perusahaan ini memiliki rencana untuk membuka cabang di Surabaya, Semarang, dan Batavia.

Dalam hal distribusi telah ditransfer kepada perusahaan yang membutuhkan lebih dari *f*200.000 per bulan. Pemerintah dalam hal ini menganggap perlu memberikan dukungan dan membicarakannya secara bersama. Pada bulan November 1946, melalui perantara Centraal Kantoor voor de Comptabiliteit (C.K.C) pihak DJB Bandjermasin akhirnya menerima dukungan dan kerja sama yang dijanjikan Pemerintah Belanda, yakni dukungan keuangan yang dimaksudkan untuk memajukan kepentingan distribusi. Satu hal yang sangat penting dari pembicaraan dengan pihak pemerintah terkait keuangan perusahaan ini dalam perdagangan karet hadirnya kesepakatan dengan DJB Bandjermasin.

Pada awal 1947 telah ditetapkan kuota impor Kalimantan Selatan bagi "pendatang baru" sebesar 25% yang untuk ini bagi kelompok orang Indonesia dialokasikan sebesar 11%. Menurut informasi yang diberikan oleh NHM di Banjarmasin, NV Kinibalu akan memperoleh keuntungan

yang signifikan dari penjualan barang-barang impor di dalam negeri. Pada tanggal 9 September 1948 diadakan rapat yang dipimpin oleh Residen bagi peminat ekspor karet yang membahas tentang pengeluaran ekspor karet. Antara lain, kepada perusahaan Nirub dijanjikan bahwa "pendatang baru" bisa mengandalkan informasi dan dukungannya dalam mencari hubungan luar negeri.

Selama ini, ternyata NV Kinibalu sebagai pendatang baru dari kalangan Indonesia hanya memendam harapan dalam hal ekspor. Hal ini mengingat sumber dayanya yang terbatas yang juga harus digunakan untuk urusan impor dan kurangnya organisasi penjualan. Oleh karenanya, NV Kinibalu saat ini harus dibatasi kegiatannya hanya untuk pembelian dan pelepasan lokal. Artinya perusahaan ini belum bisa melakukan ekspor. Awalnya NV Kinibalu membeli atas nama Borsumij, sementara kemudian dilaporkan bahwa perusahaan ini telah melakukan negosiasi dengan Firma Crone, Batavia, yang menegosiasikan Crone sebagai Agen-Penjualan NV Kinibalu. Pada bulan Desember 1947 NV Kinibalu mulai membeli karet di samping perusahaan-perusahaan yang sudah mapan.

Berdasarkan pembicaraan antarpihak, termasuk DJB Bandjermasin dengan pihak pemerintah Belanda diputuskan untuk mengalihkan seluruh perdagangan karet kepada pedagang swasta atau kepada perusahaan, namun dengan tujuan agar mendirikan *pool*[60]. Semua asosiasi perdagangan atau perusahaan dagang diberi kesempatan bergabung dalam *pool*. Dalam hal ini perusahaan NV Kinibalu sebenarnya menyatakan kesediaannya bergabung ke dalam *pool*, namun dikarenakan keadaan keuangan sehingga terpaksa mundur dan memilih untuk mandiri.

Hak istimewa khusus dari pihak perusahaan Nirub muncul, sebagai tanggapan atas berbagai permintaan eksportir agar *slabs* diproses oleh perusahaan Nirub. Perusahaan ini juga ingin menerapkan alokasi kuota sehubungan dengan kapasitas penggilingan ulang 300 ton *blanket* per bulan. Pembagiannya adalah kepada eksportir Eropa dan Cina sebanyak 120 ton dan kepada pendatang baru Indonesia sebanyak 180 ton. Sebagaimana diketahui bahwa perdagangan dan perkebunan karet

60 *Pool* dalam konteks ini ialah suatu perhimpunan atau perkumpulan para pedagang yang terasosiasi dalam satu perserikatan dagang.

merupakan mata pencaharian penting penduduk di daerah Hulu Sungai. Pemerintah Belanda menetapkan pedoman penting dan pada awal tahun 1947 pedagangan karet kering (asap) di bawah pemerintah dihapuskan dan diserahkan kepada organisasi perdagangan swasta.

Pengaruh atas situasi ketidakstabilan politik itu adalah terhadap produksi karet perusahaan Nirub pada tahun berikutnya (1948) yang mengalami penurunan drastis. Produksi karet yang semula sekitar 784 ton di bulan Juli menjadi 658 ton di bulan Agustus dan 485 ton di bulan September. Padahal kapasitas dan batas minimal produksi pabrik Nirub adalah 600 ton per bulan. Terkait potensi produksi lembaran karet di Kalimantan Selatan yaitu sekitar 1.900 ton per tahun. Dengan demikian, kapasitas Nirub sesungguhnya tidaklah terlalu besar. Daftar izin yang akan dikeluarkan untuk berbagai perusahaan yang direhabilitasi atau yang belum direhabilitasi juga diberikan di sini. Selain perusahaan Nirub, yakni Goey Keng Tiong (Kandangan) dan de NV Hevea (Barabai) memang terlihat sudah dapat beroperasi, sedangkan So Kay Gwan masih pada tahap uji coba. Uraian tentang kondisi produksi karet ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor Cabang DJB Bandjermasin pada 11 Oktober 1948.[61]

Dari informasi yang disampaikan oleh Kepala Kantor Cabang DJB Bandjermasin juga diketahui bahwa pada paruh kedua bulan September 1948 dari perusahaan Ek Liong Hin dan Hock Tong diizinkan mengekspor masing-masing 500 ton lembaran karet ke Singapura. Namun demikian, para eksportir ini terlebih dahulu harus berusaha membawa masing-masing 150 ton karetnya ke pabrik Nirub untuk diolah kembali.

Menurut pandangan pihak DJB Bandjermasin penurunan produksi karet pada waktu itu terutama disebabkan oleh a) Menurunnya harga pasar dunia; b) Penggarapan panen padi di Banjarmasin dan Sungai Hulu; c) Penggarapan ladang; dan d) Penghentian aturan yang akan dimulai pada 1 September 1948. Pihak DJB Bandjermasin tidak menjadikan situasi politik yang memanas mengiringi pelaksanaan agresi militer pihak Belanda sebagai alasan turunnya produksi karet di Kalimantan Selatan. Begitu

61 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 11 Oktober 1948 tentang peraturan karet yang berakhir pada 1 September 1948.

pun di bagian lain, pada awal Oktober 1948 harga beras naik menjadi sekitar 65 sen per liter, namun kemudian harga kembali menunjukkan kecenderungan menurun. Voedings Middelen Fonds (VMF)[62] dalam hal ini misalnya mendatangkan beras dari Jawa pada Juli sebanyak 317 ton dan Agustus sebanyak 982 ton untuk memenuhi kebutuhan beras di Kalimantan Selatan.[63]

Pada 1948 peningkatan modal saham dan produksi karet dialami kembali oleh NV "Kinibalu" Kandangan sebesar 120% setelah mengalami penurunan di tahun 1947. Dewan Direksi saat perusahaan ini dibentuk adalah 1) Hadji Arip bin Achmad, 2) Hadji Ardi bin Hadji Matseman, 3) Martin Pongoh, dan 4) A. A. Rivai. Sementara Wakil Direkturnya adalah Hadji Amin bin Aman dan Noentji bin Hadji Arip. Adapun para komisaris adalah 1) Hadji Aliasri bin Hadji Hadari, 2) Hadji Maran bin Hadji Halid, 3) Arbain, 4) Merah Ardansjah, 5) Merah Daniel Bangsawan, dan 6) Haris Mochtar bin Hadji Mochtar. NV "Kinibalu" bergerak dalam bidang impor dan ekspor. Berdasarkan informasi dari Kepala Kantor Cabang DJB Bandjermasin bahwa tidak tampak indikasi yang berkaitan dengan politik dalam perkembangan perusahaan ini.

Meskipun demikian, aktivitas perdagangan yang dijalankan tetap mengalami hambatan karena semua perdagangan ekspor dan impor berada di tangan pemerintah Belanda, di bawah kendali Nederlandsch Indische Gouvernements Import en Export Organisatie (NIGIEO). Penduduk Kalimantan Selatan sesungguhnya mempunyai daya beli yang tinggi, terutama terhadap barang impor. Hal ini merupakan peluang yang sangat menjanjikan bagi para importir setempat jika tidak ada monopoli pihak pemerintah Belanda selain juga karena NV Kinibalu masih sebagai pemain baru di sektor perdagangan impor-ekspor. Kebijakan Pemerintah Belanda membuka kesempatan bagi perserikatan dagang baru atau perusahaan-perusahaan dagang untuk mendaftar menjadi anggota *foundation* (yayasan) sebagai cara guna mendapatkan kerja sama dengan

62 Voedings Middelen Fonds (VMF) merupakan lembaga pengadaan bahan pangan khususnya beras yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda.

63 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 11 Oktober 1948 tentang peraturan karet yang berakhir pada 1 September 1948.

perusahaan-perusahaan yang sudah mapan dan dengan demikian dapat saling mendukung. Selain itu, pemerintah Belanda-NICA juga telah mengalihkan kontrol distribusi kepada perusahaan dagang, sehingga dapat mewakili kepentingan penduduk.[64]

Antara tahun 1946 dan 1949 pihak NICA yang hadir di Kalimantan Selatan kembali membangun fasilitas pelabuhan lama, Fort Tatas dan pelabuhan udara di Ulin yang rusak akibat penyerbuan dan sabotase oleh pejuang-pejuang Kalimantan Selatan sejak terjadinya penyerbuan 9 November 1945.[65] Situasi tersebut memengaruhi perekonomian rakyat di Kalimantan Selatan. Satu di antaranya yang terdampak adalah sektor produksi karet. Pembelian lembaran karet *smoked sheets* oleh eksportir selama periode Desember 1948–Februari 1949 tertera pada tabel berikut.

Tabel 3.5.
Pembelian *Smoked Sheets* oleh Eksportir Periode Desember 1948–Februari 1949

No.	Eksportir	Des-48		Jan-49		Feb-48	
		ton	%	ton	%	ton	%
1	Cina	622	55,9	300	66,2	488	70
2	Eropa	475	42,7	148	32,7	203	29
3	Indonesia	15	1,4	5	1,1	7	1
Jumlah		**1.112**	**100**	**453**	**100**	**698**	**100**

Sumber: Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 19 Maret 1949.

Karet yang dibeli oleh para eksportir berbenturan dengan eksportir Cina yang pembeliannya meningkat, tetapi sebaliknya mengalami penurunan pada eksportir Eropa dan Indonesia. Di samping itu, tampak dari eksportir Indonesia porsinya sangat kecil.

Dibandingkan dengan bulan Desember, produksi dan *buy-back* menurun sangat signifikan karena situasi politik, yakni adanya perjuangan mempertahankan kemerdekaan oleh ALRI Div. IVA beserta komponen-

64 Hassan Basry, *Op.Cit.*, 1961, hlm. 15. Lihat pula Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 14 Oktober 1948.

65 Ramli Nawawi, dkk, *Sejarah Kota Banjarmasin*, (Jakarta: Depdikbud, 1986), hlm. 14.

komponen lainnya sehingga sangat tidak kondusif di Hulu Sungai sebagai produsen utama *smoked sheets*. Dalam situasi seperti itu sebagian besar rumah asap di Hulu Sungai tetap ditutup. Hanya 176 dari 1.128 instalasi yang beroperasi. Juga harga pasar dunia pada periode Januari/Februari kualitas N.Y.3 berfluktuasi antara 92 1/8 dan 85 1/4 per kg dalam sen. Sebagai hasil dari aksi militer dan polisi yang gencar, beberapa perbaikan terjadi pada bulan Februari 1950 sehingga produksi dan pembelian mulai meningkat.

Tabel 3.6.
Pembelian *Smoked Sheets* periode Desember 1948–Februari 1949

No.	Daerah	Desember 1948	Januari 1949	Februari 1949
1.	Hulu Sungai	781,5 ton	247 ton	576 ton
2.	Daerah lainnya	330,5 ton	206 ton	122 ton
Jumlah		**1.112 ton**	**453 ton**	**698 ton**

Sumber: Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 19 Maret 1949.

Tabel di atas memperlihatkan penurunan pembelian karet oleh para eksportir terutama karet yang berasal di luar dari daerah Hulu Sungai. Namun demikian, *slabs* (bahan olah karet yang terbuat dari lateks yang sudah digumpalkan dengan asam semut) dibawa untuk digiling ulang di pabrik Nirub pada Desember 1948 sebanyak 281,4 ton; Januari 1949 sebanyak 286,1 ton dan Februari 1949 sebanyak 880 ton. Di Tanjung terdapat sekitar 80% penduduknya bergantung pada karet. Keadaan yang kacau telah menyebabkan tidak ada produksi karet pada bulan Januari 1950 dan baru 132 ton pada bulan Februari. Fluktuasi harga karet di daerah Hulu Sungai sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan ketertiban, serta harga karet di pasar dunia.

Dalam waktu yang sama, tak kalah pentingnya ialah persoalan harga beras sebab beras menjadi produk kebutuhan pokok khususnya bagi Kalimantan Selatan. Pada bulan Oktober 1948 diketahui dalam suatu laporan DJB situasi beras di Nusantara tidak stabil. Guna memenuhi

kebutuhan bahan pangan di Kalimantan Selatan, VMF kemudian melakukan impor beras dari Jawa pada bulan Juli sebesar 317 ton dan Agustus sebesar 982 ton. Saat itu di Banjarmasin dan Kandangan, harga beras (kualitas 2) cenderung fluktuatif. Pada September 1948 harga beras menurun, di Banjarmasin beras seharga 46 sen per liter dan di Kandangan berkisar 49 sen setelah mengalami kenaikan pada bulan-bulan sebelumnya meski tidak besar.[66] Namun, dalam perkembangannya harga beras kembali mengalami kenaikan. Hal ini sebagaimana terlihat dari rata-rata harga beras kualitas 2 di Kandangan (Hulu Sungai Selatan) adalah seharga 76 sen per kilogram per bulan Desember 1948, seharga 71 sen per kilogram per bulan Januari dan Februari 1949.[67]

Masih dalam persoalan beras, pada 29 Maret 1949 terdapat laporan DJB mengenai pembiayaan anggaran pangan. Diketahui distribusi beras tidak terbatas pada penduduk perkotaan, saat itu di seluruh Indonesia, kecuali Indonesia Timur, jumlah beras yang didistribusikan tidak kurang dari 60.000 ton per bulan, di mana 20.000 ton di antaranya di luar Jawa dan 40.000 ton di Pulau Jawa. Persoalan beras dalam hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok di Kalimantan Selatan. Adapun anggaran pangan sebagaimana dalam laporan tersebut dimaksudkan untuk memasok beras asing selama 1 April 1949 hingga 31 Maret 1950, di mana dalam jangka waktu tersebut harus diimpor sejumlah 240.000 ton beras. Dalam hitungan VMF, diperkirakan bahwa Jawa tidak akan dapat melakukan distribusi selama empat bulan pertama setelah panen, sehingga hanya dapat dilakukan distribusi selama 8 bulan, setara dengan jumlah 200.000 ton beras.

Di sisi lain, VMF juga ingin memiliki stok persediaan sekitar 50.000 ton, pembelian VMF dibatasi pada jumlah padi yang setara dengan sekitar 250.000 ton beras. Jika harga beras di wilayah-wilayah tertentu mengalami penurunan jauh atau harga beras mengalami kenaikan yang terlalu tinggi, maka sebagai lembaga pengadaan bahan pangan (beras)

66 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 11 Oktober 1948.

67 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 19 Maret 1949.

VMF akan melakukan intervensi. Untuk membiayai pembelian beras asing dan padi di Jawa, DJB bersama dengan NHM, NIHM, dan NIEM memberikan kredit kepada VMF sebesar *f*120.000.000 per 1 April 1949. Meski pembiayaan pembelian beras tersebut dalam lingkup Indonesia, namun hal tersebut juga berlaku untuk wilayah Kalimantan Selatan dan VMF di Banjarmasin pun akan selalu dilibatkan.[68]

Hingga menjelang akhir tahun 1949, DJB terus menjalankan fungsinya dalam hal pemberian bantuan kredit. Hal ini sebagaimana laporan bertanggal 13 April 1949 mengenai permintaan kredit yang disampaikan oleh NV Dajak Handel Maatschappij sebesar *f*50.000 untuk pembiayaan urusan impornya. NV Dajak Handel Maatschappij merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang impor dan ekspor. Didirikan di Banjarmasin pada 26 Agustus 1947 dengan modal awalnya sebesar *f*100.000.[69] Berdasarkan akte pendiriannya, kantor NV Dajak Handel Maatschappij berlokasi di Banjarmasin dengan cabangnya di Tamiang Lajang.[70] Adapun barang-barang impor yang didapatkan perusahaan tersebut diatur oleh Gimib (Gaboengan Importeur Indonesia Bandjermasin), yang membagi barang-barang yang akan diimpor di antara para importir Indonesia. Akan tetapi, muncul keraguan bagi DJB Bandjermasin dalam memberikan bantuan kreditnya kepada NV Dajak Handel Maatschappij karena impor ekstra untuk Kalimantan Selatan diketahui harus dijual sebesar lima kali nilai di pasar bebas. Hal ini menimbulkan keraguan karena dikhawatirkan skema penjualan yang sebesar lima kali tersebut tidak dapat dilakukan.[71]

Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 6 Oktober 1949 NV Dajak Handel Maatschappij kembali mengajukan peningkatan permohonan bantuan kredit kepada DJB. Sebelumnya W. F. Mathias selaku Direktur perusahaan tersebut mengajukan permohonan kenaikan kredit kepada

68 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1739, *Crediet Verleening van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 29 Maret 1949.

69 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1739, *Crediet Verleening van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 13 April 1949.

70 *Javasche Courant*, 7 November 1948.

71 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1739, *Crediet Verleening van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 13 April 1949.

DJB Bandjermasin. Kemudian pada 1 Oktober 1949 ia mengunjungi kantor pusat DJB di Batavia guna meminta permohonan peningkatan kredit untuk perusahaannya dari *f*50.000 menjadi *f*150.000. Peningkatan tersebut didasari atas laba yang diperoleh perusahaan tersebut pada tahun 1948 sebesar *f*67.000. Dari jumlah tersebut, sebanyak *f*50.000 disimpan di perusahaan melalui pembagian saham bonus. Direktur NV Dajak Handel Maatschappij menyatakan bahwa omzet yang diperoleh perusahaannya telah meningkat jika dibandingkan pada tahun 1948, terutama hasil hutan. Setelah melalui verifikasi data terhadap perusahaan tersebut, pada prinsipnya DJB pusat menyetujui permohonan peningkatan kredit dimaksud sebab bisnis yang dijalankan oleh NV Dajak Handel Maatschappij sangat aman sehingga disetujui kenaikan kredit menjadi *f*100.000.[72]

Dalam laporan lainnya, pada 7 Oktober 1949 DJB Bandjermasin mengirimkan surat kepada DJB pusat mengenai adanya permintaan mendesak dari Kantor Landschapkas Samarinda melalui telegram. Laporan tersebut berisi tentang pengajuan peningkatan kredit oleh Kantor Landschapkas Samarinda kepada DJB Bandjermasin sebesar *f*100.000.[73] Surat tersebut diterima dan dipelajari terlebih dahulu oleh DJB pusat. Sebagai tindak lanjut, DJB pusat kemudian memberikan jawaban dengan mengirimkan surat bertanggal 13 Oktober 1949 kepada kantor cabangnya di Banjarmasin. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa DJB menyetujui permintaan peningkatan kredit yang dimohonkan oleh Kantor Landschapkas Samarinda sejumlah *f*100.000.[74] Laporan demikian menunjukkan bahwa pemberian bantuan kredit yang dilakukan oleh DJB juga meluas ke luar kalangan pengusaha. Dalam konteks ini, DJB juga memberikan pinjaman kreditnya kepada Pemerintah Daerah Keresidenan Kalimantan Selatan melalui kantor kas daerah.

---

72 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1739, *Crediet Verleening van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 6 Oktober 1949.

73 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1739, *Crediet Verleening van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 7 Oktober 1949.

74 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1739, *Crediet Verleening van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 13 Oktober 1949.

Keadaan politik di Kalimantan Selatan memainkan peranan begitu rupa, sehingga bukan pemerintah RI yang langsung menguasai daerah-daerah, akan tetapi oleh NICA dengan tendensi ingin mengembalikan kekuasaan seperti sebelum perang. Di mana-mana di wilayah Kalimantan Selatan, NICA cepat menguasai alat kekuasaan dan kekuatannya. Bukan saja kantor-kantor pemerintahan yang segera beralih ke tangan Belanda-NICA, tambang minyak di Kalimantan bagian timur pun berhasil dibuka kembali oleh BPM dan OBM. Berturut-turut mereka bekerja dari tahun ke tahun, bahkan masih sampai tahun 1950-an meskipun penyerahan kedaulatan telah ditandatangani pada 27 Desember 1949.[75]

Pasca menyerahnya Jepang kepada Sekutu, perusahaan BPM, OBM, dan perusahaan lainnya banyak memerlukan tenaga buruh untuk membangun perusahaan mereka yang telah rusak akibat bom-bom Sekutu sendiri. Tenaga ini dapat diperoleh dengan mudahnya karena segala perusahaan dan perdagangan rakyat telah lumpuh, terutama disebabkan oleh matinya uang Jepang secara tiba-tiba, sehingga memaksa sebagian besar rakyat melakukan pekerjaan buruh, meskipun dengan gaji sekadar untuk bertahan hidup. Demikian umpamanya upah kuli BPM di Balikpapan pada masa itu ditetapkan tidak lebih dari Rp150 per hari. Ini nilai upah yang pasti tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga sekalipun hanya dengan satu anak. Pendeknya kehidupan para buruh sangat mengenaskan ketika itu. Tuntutan para buruh sedikit membawa hasil dengan dinaikkannya gaji menjadi Rp200 per hari yang tetap saja masih sangat jauh dari cukup. Upah yang diberikan oleh BPM maupun OBM masih jauh dari harapan mengingat tingginya biaya hidup kala itu.[76]

Ketidakstabilan di bidang politik maupun ekonomi Indonesia pada masa revolusi, tidak hanya dirasakan secara nasional saja, namun juga begitu terasa bagi Kalimantan Selatan. Instabilitas yang terjadi masa itu telah memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian lokal yang belum berjalan dengan baik. Salah satu sumber perekonomian yang turut merasakan dampaknya dan terlihat penurunannya ialah karet. Pada periode

75 Tim Penulis, *Republik Indonesia: Propinsi Kalimantan*, *Op.Cit*., hlm. 274.

76 *Ibid.*

revolusi, produksi karet kembali mengalami penurunan sebagai akibat dari jatuhnya harga pasar dunia. Keadaan demikian yang dialami karet hanyalah satu dari sekian banyak kelesuan yang menimpa perekonomian Kalimantan Selatan saat itu. Kekurangan barang-barang kebutuhan serta uang untuk pembiayaan atau permodalan menjadi gambaran kesulitan lain yang dialami Kalimantan Selatan pada masa revolusi.[77]

77 Dana Listiana, *Banjarmasin Akhir Abad XIX hingga Medio Abad XX: Perekonomian di Kota Dagang Kolonial,* (Pontianak: BPSNT Pontianak Press, 2011), hlm. 75-76.

BAB 4

Bank Indonesia dan Pemulihan Ekonomi (1950–1967)

Kehadiran Belanda dengan berbagai upaya yang dilakukannya untuk kembali berkuasa menyebabkan instabilitas politik dan ekonomi Indonesia sebagai negara yang baru berdiri. Keadaan yang demikian menyebabkan bangsa Indonesia tidak mudah segera menata perekonomiannya pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Keinginan Belanda untuk kembali menguasai telah mempersulit bangsa Indonesia untuk segera memiliki kedaulatan yang hakiki. Aksi Militer I dan II yang dijalankan Belanda untuk mewujudkan kembali impiannya menguasai Indonesia menyebabkan rakyat melakukan perlawanan bersenjata, mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Bidang perdagangan, perbankan dan keuangan tidak jelas otoritasnya karena adanya dualisme klaim pemerintahan, pemerintahan Belanda-NICA dan Republik Indonesia. Upaya "kompromi" dilakukan sehingga terbentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang masih dalam ikatan dengan negeri Belanda.

Di tengah situasi dan kondisi revolusi, pemerintah berupaya keras untuk dapat menghadapi berbagai tekanan baik secara politik, sosial, dan ekonomi termasuk dalam hal perbankan. Untuk mewujudkan perbankan yang independen dan terlepas dari kepemilikan asing, Pemerintah Indonesia berusaha untuk memiliki bank sentral. Usaha ini kemudian terwujud dengan berdirinya Bank Indonesia.

Bab ini membahas tentang bagian akhir perjalanan DJB pasca proklamasi kemerdekaan sampai terjadinya nasionalisasi DJB menjadi Bank Indonesia (BI). Dijelaskan pula tentang transformasi BI sebagai bank

sentral dengan beberapa kantor perwakilannya dan perkembangannya. Pembahasan dilanjutkan tentang peranan BI sebagai bank sentral. Peran yang tidak kalah penting di sini adalah tentang peranannya dalam memajukan perekonomian rakyat pada umumnya dan khususnya di Kalimantan Selatan.

PASCA KONFERENSI MEJA BUNDAR DAN KONDISI KALIMANTAN SELATAN AWAL 1950-AN

Dua hari setelah proklamasi kemerdekaan melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan membagi wilayah Republik Indonesia (RI) menjadi delapan provinsi berikut menetapkan gubernurnya masing-masing. Kalimantan menjadi satu provinsi di antara delapan provinsi tersebut dengan Pangeran Mohammad Noor sebagai Gubernurnya. Provinsi-provinsi yang terbentuk pada awal kemerdekaan ini belum mempunyai perangkat daerah yang memadai. Perangkat daerah yang dimiliki Provinsi Kalimantan sebagai warisan dari pemerintahan pendudukan Jepang dengan segera beralih ke tangan Belanda-NICA yang hadir kembali mengikuti masuknya tentara Australia ke wilayah itu. Perkantoran dan lembaga-lembaga yang ada kembali dikuasai Belanda-NICA, tak terkecuali lembaga keuangannya. DJB Bandjermasin yang sebelumnya telah dilikuidasi Jepang kemudian dibuka kembali pada 29 April 1946.

Di dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan PPKI dibahas berbagai hal terkait dengan negara baru yang diberi nama Indonesia. Tercetus pula di dalam sidang itu wacana mengenai pentingnya membentuk bank sentral. Wacana ini muncul ketika membahas materi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang kemudian disepakati dan dituangkan di dalam Penjelasan Pasal 23 UUD 1945 tentang "Hal Keuangan". Pada tanggal 16 September 1945 Sukarno-Hatta mengeluarkan Surat Kuasa kepada R. M. Margono Djojohadikoesoemo untuk mempersiapkan terbentuknya Bank Negara Indonesia (BNI). Seiring itu, pada tanggal 5 Juli 1946 terwujud

Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tentang pendirian BNI, dilanjutkan dengan meleburkan "Jajasan Poesat Bank Indonesia" ke dalam bank tersebut yang berkantor pusat di gedung eks DJB Yogyakarta.

Akan tetapi, masa revolusi fisik merupakan masa bergolak sehingga BNI tidak dapat menjalankan fungsinya dengan optimal sebagai bank sentral RI. Di lain pihak, DJB telah membuka kembali cabang-cabangnya di daerah-daerah yang dikuasai NICA pasca proklamasi kemerdekaan RI. Kantor cabang DJB Bandjermasin terus beroperasi sejak pemulihan tahun 1946 dan baru berakhir ketika dinasionalisasi pada tahun 1953 menjadi BI.

Pada tahun 1949 berlangsung Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan beberapa kesepakatan. Satu di antaranya merupakan kesepakatan terpenting yaitu pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda. Kesepakatan pengakuan kedaulatan ini sesungguhnya terasa aneh karena menempatkan RIS berada di bawah Kerajaan Belanda dan RI menjadi bagian dari RIS. Hasil KMB juga menetapkan DJB sebagai bank sirkulasi RIS, sedangkan BNI difungsikan sebagai bank umum.

Ketika RI memutuskan keluar dari RIS dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), posisi DJB tetap menjadi bank sirkulasi dengan kepemilikan saham oleh Belanda. Oleh karena itu, DJB Bandjermasin pun tetap dipegang oleh Belanda. Di lain pihak, pejuang-pejuang dan rakyat Kalimantan Selatan melalui Proklamasi 17 Mei 1949 menyatakan tetap setia kepada RI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan demikian, daerah ini tidak menjadi bagian dari RIS.

Dalam rangka terbentuknya NKRI, pada 14 Agustus 1950 ditetapkan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah provinsi. Berdasarkan peraturan tersebut ada 10 daerah provinsi yang dibentuk, satu di antaranya dan yang masih tetap ada adalah Provinsi Kalimantan. Pada tahun itu juga kedudukan Ir. Pangeran Mohammad Noor digantikan oleh Dr. Murjadi sebagai Gubernur. Hal inilah yang menjadi dasar DPRD Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan No. 2 Tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 menetapkan tanggal 14 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, bukan 19 Agustus 1945 sebagaimana pembentukan provinsi oleh PPKI.

Di sektor perbankan, meski keadaan politik maupun ekonomi masih belum stabil, DJB Bandjermasin terus menjalankan operasionalnya, sebagaimana yang tertulis pada laporan bertanggal 6 Juni 1950. Sebagai bank sirkulasi, DJB Bandjermasin melakukan pengawasan terhadap bank-bank lain yang beroperasi di wilayah tersebut. Hal ini terlihat dari adanya informasi peningkatan jumlah maksimum transfer kantor cabang Nederlandsch Indische Handelsbank (NIHB) di Banjarmasin dari *f*300.000 menjadi *f*1.000.000 terhitung sejak 1 Juni 1950.[1]

Dalam persoalan lain, tak jarang dijumpai berbagai kredit bermasalah yang menimpa DJB Bandjermasin. Pada 11 Agustus 1950 debitur DJB Bandjermasin, yakni Matkarun bin Hadji Mohamad Saad, mengalami kesulitan pelunasan utang kepada DJB. Hal ini disebabkan oleh kepemilikan benda-benda yang dialihkan kepada DJB Bandjermasin, di antaranya kayu ulin 76.711,2 m^3 dan 35.000 st bambu,[2] telah dijual dan dilenyapkan. Hal tersebut bagi DJB Bandjermasin pun dikategorikan sebagai kasus penggelapan karena dianggap telah melakukan wanprestasi.[3]

Sebagaimana telah ditetapkan melalui hasil Konferensi Meja Bundar, DJB tetap berperan sebagai bank sirkulasi di wilayah RIS. Oleh karena itu, DJB Bandjermasin pun tetap beroperasi sebagaimana termuat dalam suatu catatan laporan mengenai interaksi yang dilakukan DJB sebagai bank sirkulasi dengan bank lainnya sebagai berikut. Pada tanggal 16 September 1950 terbit surat No. 123/16 dari Bank Dagang Indonesia (BDI) yang ditujukan kepada Presiden dan para Direktur DJB di Jakarta. Surat ini ada hubungannya dengan kenyataan bahwa Bank Dagang Indonesia berencana mengalihkan semua transaksinya ke tempat lain melalui DJB. Di antara isinya mengungkapkan mengenai buku besar neraca saldo mereka untuk wilayah Kalimantan Selatan per akhir Agustus tahun 1950 yaitu[4]:

---

1 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin No. 1739, *Crediet Verleening van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 6 Juni 1950.

2 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin No. 1739, *Crediet Verleening van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 4 Agustus 1950.

3 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin No. 1739, *Crediet Verleening van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 11 Agustus 1950.

4 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 16 September 1950.

Kas	*f*122.193,52	Modal	: *f*250.750
Ned. Handel Mij	*f* 60.763, 25	Giro	: *f*481.512,56
De Javasche Bank	*f* 27.157,66	Pembagian Kreditur	: *f*103.492,70
Nat. Handelsbank	*f* 14.170,55	Provisi	: *f* 45.824,28
Pembagian Uang Muka	*f*500.207,37	Keuntungan	: *f* 21.933,55
Pembagian Debitur	*f*124.396,58		
Pengeluaran Kantor	*f* 54.624,15		
	*f*903.513,09		: *f* 903.513,09

Berbagai pembayaran uang muka yang dicairkan berkaitan dengan uang muka tanpa perjanjian kredit dengan agunan berupa produk, barang dan/atau barang tetap. Berbagai debitur adalah uang muka jangka pendek tanpa perjanjian kredit terhadap agunan properti bergerak. Jumlah yang tercantum di bawah modal adalah modal ditempatkan, terdiri dari: 1000 à 250,- gulden dibayar 10% saham dan 3 à 250,- gulden saham biasa disetor penuh pada perusahaan. Menurut aturannya modal sebesar 1.000.000,- gulden, terdiri dari 250.000,- gulden dan 750.000,- gulden modal umum. Tarif komisi BDI sama dengan suku bunga DJB.

BDI tidak membebankan bunga kepada debitur sesuai dengan suku bunga yang berlaku karena perhitungan bunga tersebut dianggap bertentangan dengan agama Islam. Sebaliknya, ketika uang muka dibuat saat membuat perjanjian kredit, model perjanjian dibuat sehubungan dengan donasi (pemberian jasa) yang akan dibuat oleh debitur kepada bank. Jumlah sumbangan ini ½ persen sampai 1 persen per bulan dari jumlah pinjaman. Hingga masa itu, remisi ke tempat lain atas rekening BDI disediakan oleh NHM dengan tarif komisi yang berlaku untuk perorangan. Berdasarkan SK No. 26 tertanggal 28 April tahun 1950 atas pernyataan Menteri Kehakiman RIS, Bank Dagang Indonesia diakui sebagai lembaga perbankan, kemudian NHM membebankan tarif komisi yang berlaku kepada bank tersebut. Keberatan terkait hal itu disampaikan oleh Direksi Bank Umum Nasional di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Bankir No. 34.[5]

5 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 16 September 1950.

Dalam perkembangannya, hal lain yang patut disorot pihak DJB Bandjermasin dan selalu dicermati perkembangannya sejak sebelum nasionalisasi DJB adalah di sektor politik. Kontroversi antara penduduk asli dan militer serta penguasa sipil yang datang dari Jawa di daerah Kalimantan Selatan setelah penyerahan kedaulatan lebih terkonsentrasi di daerah pedalaman, terungkap dari tulisan Dr. Diapari pada surat kabar *Java Bode* tanggal 23 Oktober 1950. Ia menuliskan bahwa adanya sebagian anggota TNI yang desersi dan bergabung atau membentuk kelompok-kelompok bersenjata bersama beberapa anggota masyarakat di daerah pedalaman. Kelompok-kelompok tersebut menggunakan bermacam-macam nama yang berasal dari berbagai pihak. Para anggotanya diduga kebanyakan berasal dari Partai Murba meskipun mungkin bukan berarti partai ini pengendalinya. Aktivitas kelompok-kelompok ini telah beberapa kali menimbulkan aksi bersenjata. Peran yang dimainkan oleh guru agama Hasan Basry yang bertempat di Hulu Sungai, yang diangkat sebagai atasan di TNI, sesungguhnya masih belum jelas. Di satu sisi rakyat dan kelompok bersenjata ingin mengakui dia sebagai pemimpin spiritual dan militer, tetapi di sisi lain, saat berkonsultasi dengan Komandan Sukanda, diambil tindakan untuk membasmi kelompok bersenjata yang dianggap melakukan "keonaran". Militer di Kalimantan Selatan di bawah pimpinan Kolonel Sukanda berupaya memadamkan aksi-aksi itu. Pada saat itu di daerah Hulu Sungai terpaksa diberlakukan jam malam, kendaraan dirazia dan harus terdaftar, patroli di jalan-jalan dilakukan dan komandan militer Letkol Hasan Basry menyatakan bahwa siapapun yang menemukan tulisan propaganda, memiliki informasi tentang kerusuhan dan sejenisnya harus segera menghubungi pihak yang berwenang. Di ibu kota Banjarmasin situasi seperti itu tidak dirasakan, namun bagaimana keadaan selanjutnya ketika itu belum dapat diketahui.[6]

Dalam beberapa kasus, sebagian anggota TNI dimaksud membawa senjata terbaik dan telah melarikan diri meninggalkan TNI untuk bergabung dengan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat untuk membuat pasukan mereka sendiri. Tujuan dari kelompok-kelompok ini,

6 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 27 Oktober 1950.

yang beroperasi dengan berbagai macam nama, namun belakangan ini lebih sering menggunakan nama Partai Murba, tentu saja untuk menghalangi sistem kewenangan yang ada, walaupun dapat diasumsikan bahwa Partai Murba tidak memiliki kendali atas mereka, maupun atas kekuatan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ditempati oleh orang-orang yang menyinggung mereka.[7]

Dalam keadaan yang tidak stabil tersebut, perlu upaya antisipasi dalam mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat. DJB Bandjermasin juga turut memperhatikan perkembangan koperasi di wilayah kerjanya. Menurut catatan pada tahun 1950 telah terdapat 814 koperasi yang secara keseluruhan beranggotakan 108.267 orang dengan jumlah simpanannya sebesar Rp1.657.990,22. Bahkan tahun 1951 terdapat 1.081 koperasi dengan anggota 112.761 orang dan total simpanan Rp5.653.043,83. Akan tetapi, tahun 1952 terjadi kemerosotan jumlah koperasi yakni hanya ada 413 koperasi dengan anggota 53.894 orang dan uang simpanan sebesar Rp 3.655.312,25.[8]

Sektor koperasi di Kalimantan Selatan nampaknya berkembang cukup baik dan mampu turut menggerakkan perekonomian masyarakat. Pertanian dan peternakan yang diusahakan masyarakat sedikit banyak menunjukkan perkembangan yang nyata. Demikian pula halnya dengan industri ringan. Semua ini antara lain disebabkan oleh timbulnya kesadaran di kalangan masyarakat sendiri ketika itu untuk mendirikan koperasi-koperasi guna melindungi anggota-anggotanya dan mengembangkan usaha.[9]

Sementara itu, keadaan perekonomian lokal saat itu terus berjalan. Industri asing yang ada di Balikpapan dan Tarakan telah menyatakan kesanggupan menjamin kesejahteraan sebagian rakyat. Minyak BPM yang terdapat di Kalimantan Timur, telah menghasilkan ratusan juta rupiah setiap tahunnya. Selain hasil tambang berupa minyak bumi, di daerah sepanjang Sungai Mahakam terkandung 600.000.000 kg batu

---

7 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 27 Oktober 1950.

8 Tim Penulis, *Republik Indonesia: Propinsi Kalimantan*, *Loc.Cit*.

9 M. Idwar Saleh, dkk, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Jakarta: Depdikbud, 1978, hlm. 33.

bara yang belum tersentuh. Tidak sedikit modal asing yang ditanamkan di seluruh Kalimantan, baik yang berupa perusahaan dunia seperti BPM maupun dalam bentuk NV yang kecil-kecil. Meskipun demikian, keadaan ini pada masa kekuasaan Belanda maupun Jepang tidak serta merta menyejahterakan rakyatnya. Pada dasarnya rakyat tetap saja dalam keadaan miskin dan susah hidupnya. Perusahaan tambang minyak dan batu bara di daerah Kalimantan Timur sampai tahun 1950-an sepenuhnya milik asing. Adapun perusahan kayu di daerah Sampit Kalimantan Tengah, yaitu Bruynzeel Dajak Houtbedrijven merupakan campuran modal Belanda dan Indonesia.[10]

NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK

Di tengah keadaan politik dan ekonomi saat itu, pemerintahan RIS pun tidak berlangsung lama dan kemudian dibubarkan pada 17 Agustus 1950. Pemerintahan di Indonesia kembali ke bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan pemerintahan tersebut membuka kemungkinan dan kesempatan lain untuk membentuk bank sentral yang independen dan bebas dari kepemilikan asing. Keinginan ini kemudian tertuju kepada upaya menasionalisasi DJB yang ketika itu masih berstatus bank swasta milik Belanda, di mana Pemerintah memberi DJB hak untuk beroperasi seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Guna mewujudkan tujuan tersebut, kemudian segera dibentuk Panitia Nasionalisasi.[11]

Pada tahun 1951 persiapan-persiapan itu dipegang secara serius untuk melakukan nasionalisasi DJB. Pembentukan Bank Indonesia didahului oleh proses nasionalisasi DJB NV (DJB) yang dilakukan pada Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1951 Tentang Nasionalisasi DJB NV. Melalui panitia nasionalisasi, dirumuskanlah RUU Pokok tentang bank sentral. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa RI sebagai negara merdeka dan berdaulat wajib memiliki bank sentral

10 Tim Penulis, *Republik Indonesia: Propinsi Kalimantan*, *Loc.Cit*, hlm. 180–181.

11 Tim Penulis, *Peran dan Fungsi BI Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia,* (Jakarta: Bank Indonesia, 2014), hlm. 21.

yang bersifat nasional. Oleh karenanya, menasionalisasi DJB menjadi langkah awal untuk mewujudkan bank sentral yang sepenuhnya dimiliki oleh Indonesia. Dalam prosesnya, RUU disampaikan pemerintah kepada parlemen pada bulan September 1952. Pada 10 April 1953 parlemen kemudian memberikan persetujuannya dan pada 19 Mei 1953 RUU itu akhirnya disahkan oleh Presiden Sukarno serta diumumkan pada 2 Juni 1953 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1953 melalui pemberlakuan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 11 Tahun 1953.[12] Dengan demikian, secara resmi Bank Indonesia berdiri pada 1 Juli 1953.[13] Tanggal berlakunya UU tersebut kemudian diperingati juga sebagai hari lahir BI.

Berdirinya BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang didasarkan pada UU No. 11 Tahun 1953 merupakan kelanjutan dari UU No. 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi DJB oleh Pemerintah RI. Hal tersebut juga berdasarkan keputusan KMB di Den Haag tahun 1949 yang memberi tugas kepada DJB sebagai bank sirkulasi bagi RIS yang telah mendapatkan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Selain terikat kepada keputusan KMB, sekalipun bertentangan dengan kepentingan pemerintah RI, ketetapan untuk meneruskan DJB sebagai bank sirkulasi didasarkan pada pertimbangan bahwa bank ini telah memiliki aparatur yang memadai, sehingga setelah dinasionalisasi, BI mewarisi pengalaman yang terhimpun di dalam kelembagaan DJB.[14]

Penetapan UU Pokok BI tanggal 1 Juli 1953 mengawali juga perubahan nama De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Bank sentral sangat penting dan diperlukan sebagai sebuah lembaga yang berperan melakukan tugas pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan sistem moneter dan perbankan suatu negara yang kebijakannya akan berdampak terhadap perekonomian secara luas. Berkaitan dengan tugas pokoknya sebagai bank sentral,

12 UU No.11 tahun 1953 tentang UU Pokok BI diundangkan di dalam Lembaran Negara tahun 1953 No. 40

13 Budi Harjo Sayoga, dkk, *Kamus Sejarah Indonesia II, Nation Building (1951–1998),* (Jakarta: Kemendikbud), hlm. 102. Lihat pula G. H. A Prince, "Kebijaksanaan Moneter Indoensia dan Posisi Bank Jawa pada Masa Kolonial", dalam J. T. Lindblad (ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 82.

14 Tim Penulis LP3ES, *BI dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), hlm. 3, 6– 8, dan 62.

jenis usaha BI antara lain memindahkan uang, menerima dan membayar kembali uang dalam rekening, mendiskonto, membeli dan menjual (wesel yang diakseptasi oleh suatu bank, kertas perbendaharaan atas beban negara, dan surat-surat utang negara), membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang lainnya, memberi jaminan bank (bank garansi) dengan tanggungan yang cukup, serta menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga.[15] Selain itu, bank sentral berfungsi pula sebagai sumber terakhir pinjaman bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau dikenal dengan istilah *lender of the last resort*. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bank sentral (*central bank*) adalah bank yang bertugas mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, membimbing pelaksanaan kebijakan moneter serta mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi semua perbankan. Demikian juga, BI berperan mengembangkan sistem perkreditan yang sehat.[16]

Tugas lain dari BI sebagai bank sentral adalah mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah sehingga dalam hal ini BI juga bertugas sebagai bank sirkulasi. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1953 disebutkan bahwa BI memiliki tiga fungsi dasar, yaitu fungsi terkait kebijakan moneter, kebijakan perbankan, dan memperlancar lalu lintas pembayaran. Tugas pokok BI diatur dan tercantum di dalam Bab II pasal 7 sampai dengan pasal 20 UU No. 11 tahun 1953. Di bab ini disebutkan juga bahwa tanggung jawab atas kebijakan moneter berada pada pemerintah. Kebijakan moneter ditetapkan oleh Dewan Moneter, sedangkan Direksi BI bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter umum yang ditetapkan oleh Dewan Moneter. UU ini juga menyatakan bahwa BI melakukan pengawasan terhadap urusan kredit, menyelenggarakan peredaran uang, mempermudah jalannya uang giral di Indonesia, dan memajukan jalannya pembayaran dengan luar negeri.

Sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 1953 BI sebagai bank sentral tidak hanya bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, sirkulasi rupiah, pengawasan, dan pembinaan terhadap bank-bank, serta sebagai bank

15 Lihat Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 11 Tahun 1953 Pasal 13.

16 Bank Indonesia, *Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 1965/1966*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1966), hlm. 4.

devisa. Tetapi juga mewarisi fungsi dan peran DJB sebagai bank umum yang menghimpun dana publik dan menyalurkan kembali kepada publik. Dalam dasawarsa 1950-an BI lebih banyak bertindak sebagai bank sirkulasi dan bank komersial. Bagian kas dan uang kertas bank melaksanakan fungsi sirkulasi, sedangkan bagian pemberian kredit melaksanakan fungsi komersial.[17]

Di dalam ketentuan UU No. 11 tahun 1953 pada struktur pimpinan BI terdiri atas Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasihat.[18] Setelah dinasionalisasi, pimpinan BI yang terdiri atas Gubernur BI dan sejumlah anggota direksi berada dalam unsur Direksi yang bertugas menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter.[19] Sementara di dalam unsur Dewan Moneter terdiri atas tiga orang anggota yang mempunyai hak suara yakni Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur BI yang bertugas dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan moneter. Pada pasal 22 UU ini dinyatakan mengenai tugas Dewan Moneter, yaitu: a) menetapkan kebijaksanaan moneter umum dari bank; b) memberi petunjuk-petunjuk kepada Direksi tentang kebijaksanaan bank dalam urusan-urusannya yang lain, sekadar kepentingan umum memerlukannya; c) pekerjaan-pekerjaan bank sebagai tersebut dalam Pasal 7 ayat 1, 3, dan 4; Pasal 13 ayat 9; Pasal 16 ayat 3; dan Pasal 20, begitu pula penetapan tarif-tarif bunga dari bank yang bagaimanapun dianggap sebagai urusan kebijaksanaan moneter umum atau urusan bank yang mengenai kepentingan umum. Dewan Moneter diketuai oleh Menteri Keuangan (pasal 24) yang dapat digantikan Gubernur BI jika sedang berhalangan. Sesuai tugasnya selama kurun waktu 1953–1959, Dewan Moneter telah menghasilkan beberapa ketentuan. Dari ketentuan ini, yakni Keputusan Dewan Moneter tentang Tambahan Pembayaran Impor (TPI) untuk pemasukan barang impor golongan III, yaitu barang-barang mewah, dan golongan IV, yaitu barang-barang mewah sekali sebesar 200% untuk golongan III dan 400% untuk golongan IV kemudian diimplementasikan oleh kantor-kantor cabang BI, termasuk bagi Kantor Cabang BI Banjarmasin.

17 Tim Penulis LP3ES, *Op.Cit*., 1995, hlm. 109.

18 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 11 Tahun 1953 Pasal 21.

19 Darsono, dkk, *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 237.

Sejak operasionalnya BI kemudian berupaya membuka cabang-cabangnya secara merata di beberapa daerah di Indonesia. Dalam UU No. 11 tahun 1953 pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa BI memiliki kantor-kantor cabang (agen), kantor koresponden, dan bila perlu kantor-kantor agen besar. Pada awal berdirinya, struktur organisasi BI meliputi 12 bagian di kantor pusat Jakarta, 15 kantor cabang di dalam negeri. Adapun kelima belas kantor cabang yang terdapat di dalam negeri adalah Manado, Pontianak, Kediri, Yogyakarta, Palembang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Malang, Solo, Semarang, Surabaya, Bandung, Padang, dan Cirebon. Perubahan nama pasca nasionalisasi pun berlaku bagi kantor-kantor cabang tersebut, tak terkecuali DJB Agentschap Bandjermasin yang berganti menjadi Kantor Cabang Bank Indonesia (KCBI) Banjarmasin.

Pada masa proses peralihan nasionalisasi, Bank Indonesia telah memiliki 15 kantor cabang. Kala itu, sejumlah delapan jabatan Direktur Muda, tidak ada satu pun yang dipegang oleh orang Indonesia. Begitu pula dengan beberapa jabatan lainnya yang memerlukan keahlian, seperti pengawas bank yang perannya begitu penting bagi BI sebagai bank sentral. Posisi sebagai pengawas pun sebagian besar masih dipegang oleh orang Belanda. Setidaknya dari 32 jabatan yang ada di Kantor Pusat, hanya 4 posisi yang dijabat oleh orang Indonesia. Sementara di kantor cabang, dari total 50 jabatan yang terdapat di kantor cabang, hanya ada 25 posisi saja yang dipegang oleh orang Indonesia. Adapun nama-nama pegawai (orang Indonesia) pada dua puluh lima posisi di kantor cabang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1.
Daftar Nama Pegawai (Orang Indonesia) Masa Peralihan Proses Nasionalisasi Bank Indonesia

No.	Nama Pegawai	Jabatan
1.	Tan Liang Oen	Pemimpin Cabang Pengganti Surabaya
2.	Agoes Datuk Rajo Nan Gadang	Pemimpin Cabang Manado
3.	R. B. Gandasoebrata, S.H.	Kepala Sementara Pembukuan
4.	Ong Siang Tjiong	Kepala Sementara Pembukuan
5.	M. Rifai	Pemimpin Cabang Pengganti Pontianak
6.	R. H. Djajakoesoema	Kepala Pembantu Sekretaris
7.	Go Wie Kie	Kepala Pembantu Wesel
8.	Tan Tiong Djin	Kepala Pembantu Wesel
9.	D. D. Ranty	Kuasa Kas Surabaya
10.	J. A. Fransz	Kuasa Kas Medan
11.	J. A. Sereh	Kuasa Kas Bandung
12.	R. H. Kamarga	Kuasa Kas Makassar
13.	Lay Siong Kwan	Kuasa Kas Makassar
14.	Jo Tek Soei	Kuasa Kas Yogyakarta
15.	Han Ping Yan	Kuasa Kas Malang
16.	P. de Quack	Kuasa Kas Banjarmasin
17.	Tjioe Tiang Ham	Kuasa Kas Kediri
18.	Z. J. Sahusilawane	Kuasa Kas Pontianak
19.	Saridam	Pemegang Buku Medan
20.	Hassan	Pemegang Buku Palembang
21.	Mahjoedin	Pemegang Buku Padang
22.	A. R. D. Richir	Pemegang Buku Manado
23.	Tan Thiam Yan	Pemegang Buku Cirebon
24.	R. Soeroto Dono	Pemegang Buku Pontianak
25.	R. Oemar Said	Pemegang Buku Pembantu Malang

Sumber: Noek Hartono. (1976). "Bank Indonesia: Sejarah Lahir dan Pertumbuhannya". (Naskah tidak diterbitkan). Hlm. 84–85.

Persoalan kepegawaian Bank Indonesia yang masih terdapat orang-orang Belanda, dipahami oleh Syafruddin Prawiranegara, Presiden DJB terakhir yang kemudian sebagai Gubernur BI pertama, bahwa masih adanya kekurangan pada lembaga yang dipimpinnya. Guna memperbaiki kondisi dan pengelolaan BI agar sepenuhnya dijalankan oleh pegawai

berkebangsaan Indonesia, maka diselenggarakanlah indonesianisasi pegawai melalui pelatihan dan praktik kerja bagi calon pegawai di Kantor Pusat maupun di luar negeri selama 6 tahun.[20]

Syafruddin Prawiranegara juga berpendapat bahwa Bank Sentral hendaknya diberikan kedudukan yang otonom. Pemerintah atau pihak manapun hendaknya tidak diberi kekuasaan untuk mengemudikan bank sirkulasi, agar tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang berada di luar batas-batas anggaran melalui penciptaan uang. Meskipun demikian, pemerintah diberi hak untuk mengawasi bank itu berdasar ketentuan undang-undang.

Pada bulan Januari 1955 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 tahun 1955 tentang pengawasan terhadap urusan kredit. Sejak itu BI mulai mempersiapkan organisasi dan tenaga di bidang pembinaan dan pengawasan badan-badan kredit yang secara formal kemudian terbentuk pada tahun 1956 bernama Bagian Pengawasan Urusan Kredit (Bagian PUK). Hal ini disebabkan oleh sebelum adanya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1955[21] keadaan perbankan di Indonesia berjalan tanpa adanya pengawasan yang semestinya dari BI. Hal ini terjadi lantaran belum adanya landasan hukum serta tenaga ahli yang kompeten. Akibatnya bank-bank berjalan berdasarkan kehendak para pimpinan masing-masing. Terlebih saat itu tata usaha bank-bank juga belum teratur sehingga menyulitkan BI untuk memperoleh gambaran yang tepat mengenai aktivitas dan keadaan bank-bank tersebut.[22] Sementara di bidang moneter BI mulai melakukan peran pengendalian peredaran jumlah uang di masyarakat dengan menggunakan kebijakan persyaratan penempatan cadangan (*reserves requirement*)[23] di bank sentral dan pengaturan mengenai pemberian kredit oleh bank. Sebagai bank sentral,

20 Darsono, dkk, *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral, Loc. Cit.,* hlm. 240.

21 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 dikeluarkan pada Januari 1955 yang berisi tentang kewajiban bank-bank untuk menyampaikan laporannya secara berkala kepada Bank Indonesia sebagai badan pengawasan dan pembinaan.

22 Darsono, dkk., *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral, Op.Cit.,* hlm. 243.

23 *Reserve Requirement* yakni ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.

BI berperan juga sebagai sumber terakhir pinjaman bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang lekat dengan istilah *lender of the last resort*.

Di dalam kurun waktu 1953–1965 BI mulai menambah pembukaan kantor cabangnya di sejumlah wilayah. Diawali dengan pembukaan Kantor Cabang Ambon dan Kantor Cabang Ampenan pada tahun 1956, serta kantor cabang Nusa Tenggara Barat pada tahun 1957. Dalam konteks pembukaan kantor-kantor cabang itu, hal tersebut sebagaimana tertulis dalam UU pokok BI tahun 1953 terkait dimungkinkannya pendirian kantor-kantor cabang, kantor koresponden, maupun kantor agen besar.[24]

Hadirnya kantor-kantor cabang BI di berbagai daerah menyebabkan bank ini mampu mengadakan suatu penataan wilayah kerja yang penting untuk mewujudkan fungsinya menjaga stabilitas mata uang, menyelenggarakan peredaran uang, dan memajukan serta mengawasi kegiatan perbankan dan perkreditan yang dapat meliputi seluruh wilayah. Sejak berdiri pada 1 Juli 1953, selama hampir tiga tahun BI tidak membuka kantor cabang baru selain meneruskan kantor-kantor cabang DJB yang telah dinasionalisasi. Baru pada tahun 1956 BI memulai langkah memperluas jangkauan dengan membuka kantor cabang Ambon, Maluku pada 17 Maret 1956. Berikutnya pada 15 Agustus 1957 dibuka cabang baru di Ampenan, Nusa Tenggara Barat disusul dengan kantor cabang Jember, Jawa Timur pada 8 Februari 1958. Selain dua cabang tersebut, pada 1 Juli 1958 BI juga membuka kantor perwakilan di London, Inggris. Di wilayah Kalimantan, BI membuka satu kantor cabangnya di Samarinda pada 10 November 1964. Pada akhir periode 1953–1965 BI telah memiliki 30 kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan 4 kantor perwakilan di luar negeri.

Dalam persoalan kepegawaian, pada masa proses peralihan nasionalisasi, di Kantor Cabang Banjarmasin hanya ada satu nama orang pribumi yang memegang posisi jabatan yang memerlukan keahlian, yakni P. de Quack sebagai Kuasa Kas. Ketiadaan orang-orang Indonesia

24 Tim Penulis. *Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan, dan Organisasi*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003), hlm. 14. Lihat pula Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 11 Tahun 1953 Pasal 3 ayat 2 dan 3.

yang memegang jabatan ahli ini lantaran kala itu belum banyak pegawai pribumi yang dinilai berkompeten.

Adapun tugas dan peran yang dijalankan BI pada prinsipnya juga diturunkan kepada Kantor Cabang BI Banjarmasin, sebagaimana berlaku juga bagi kantor-kantor perwakilan lainnya di Indonesia. Tugas pokok Kantor Cabang BI Banjarmasin adalah membantu pemerintah mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di wilayah kerjanya. Terjalinnya hubungan kemitraan yang baik dengan berbagai pihak di daerah menyebabkan tugas-tugas Kantor Cabang BI Banjarmasin ini dalam menjalankan tugas tanpa mendapat kendala yang berarti.

Sesuai peraturan perundang-undangan, Kantor Cabang BI Banjarmasin diberi tugas dan wewenang dalam hal pengaturan kredit dan dana perbankan di wilayah kerjanya, di samping juga bertugas mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal serta mengelola devisa dan lalu lintas pembayaran luar negeri. Tugas lainnya juga adalah memberi pelayanan perbankan kepada pemerintah daerah serta mengawasi dan membina pengembangan perbankan di wilayah kerjanya. Kantor Cabang BI Banjarmasin berkewajiban memberi saran kepada pemerintah setempat untuk hal-hal yang berkaitan dengan tujuan BI.

Kantor Cabang BI Banjarmasin menerapkan pengaturan umum tentang pembatasan kredit oleh badan kredit partikelir. Semua badan kredit partikelir yang mencatat jumlah uang giro dan deposito sekurang-kurangnya Rp75 juta wajib menyimpan sebagian dari uang tunainya dalam bentuk Kertas Perbendaharaan Negara (KPN) dan mengadakan dasar perbandingan minimum antara jumlah uang tunai dengan giro dan deposito. Bagian uang tunai yang disimpan sebagai KPN dan dasar perbandingan minimum tersebut ditetapkan oleh BI dengan persetujuan Dewan Moneter.

Pasca nasionalisasi, Indonesia kini memiliki bank sentral yang independen, yang dapat mengatur dirinya sendiri berdasarkan ketentuan UU yang berlaku. Selain itu, pasca penyerahan kedaulatan 1949 bangsa Indonesia menjadi lebih leluasa dalam mengatur dan menjalankan

pemerintahannya. Selama masa 1959–1966 yang menjabat sebagai Gubernur BI adalah R. Soetikno Slamet, diikuti kemudian Soemarmo, T. Jusuf Muda Dalam, dan Radius Prawiro selaku para pimpinan.

Dalam perjalanannya, peran BI mengalami perubahan sesuai dengan dinamika ekonomi, sosial, dan politik baik nasional maupun global. Sejalan dengan itu, UU yang menjadi dasar hukum eksistensi BI mengalami pergantian dan penyempurnaan.[25] Seiring dengan perubahan politik dan ekonomi nasional, kala itu Presiden Sukarno menetapkan berlakunya sistem ekonomi terpimpin di wilayah Indonesia. Adapun makna dari konsep ekonomi terpimpin itu sendiri ialah di mana seluruh elemen bangsa dituntut untuk berperan sebagai alat revolusi dalam mencapai tujuan revolusi. Sistem ekonomi terpimpin juga memasukkan perbankan sebagai cakupannya, di mana setiap lembaga termasuk Bank Indonesia wajib bertindak berdasarkan Garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Saat itu Gubernur Bank Sentral ditetapkan sebagai anggota kabinet (Menteri Urusan Bank Sentral), dengan begitu Dewan Moneter yang dibentuk pada tahun 1953 yang diketuai oleh Menteri Keuangan; anggota ialah Gubernur BI dan Menteri Perekonomian, selanjutnya tidak berfungsi lagi sebab bank sentral tidak lagi terpisah dengan pemerintah. Peran dalam merumuskan kebijakan moneter kemudian dipegang langsung oleh Menteri Urusan Bank Sentral dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BI dituntut untuk dapat menyesuaikan dan menyelaraskan dengan konsep ekonomi terpimpin. Presiden kemudian melalui Penetapan Presiden (Penpres) No. 6 Tahun 1960 memberikan tugas dan kebijakan

25 UU saat ini yang menjadi dasar hukum BI adalah UU No. 23 Tahun 1999 Tentang BI. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009. Badan Legislatif (Baleg) DPR mengusulkan revisi UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Peraturan kelembagaan bank sentral ini tercatat sudah dua kali diamandemen. Setelah mengalami perubahan dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 1999 kemudian disusul dengan UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2008. Sebenarnya perbedaan mendasar UU BI sebelum dan sesudah tahun 1999 terletak pada hubungan pemerintah dan bank sentral. Sesudah tahun 1999 kelembagaan BI bersifat lebih independen dan terpisah dari pemerintah. Struktur BI pun mengalami perubahan yang sebelumnya masuk ke pemerintah dengan kedudukan Gubernur BI setara menteri dan ada pula Dewan Moneter sebagai unsur pimpinan. Pasca tahun 1999 regulasinya telah menempatkan independensi bank sentral dan BI pada posisi di luar pemerintahan.

tata kerja Bank Indonesia. Penpres tersebut disebutkan bahwa BI harus menyelaraskan tugas dan tata kerjanya dengan amanat Presiden yang telah disusun oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada 1959. Guna mempertegas tugas dan kewajiban dunia perbankan, Presiden pada tahun 1961 membentuk Panitia Negara Perbankan yang tugasnya merumuskan Rancangan Undang-undang Perbankan dan Rancangan Undang-undang Bank Indonesia, berdasarkan azas-azas ekonomi terpimpin, serta bersih dari kolonialisme dan feodalisme.[26]

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, dicetuskanlah Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai pengejawantahan sistem ekonomi terpimpin oleh Presiden Sukarno pada 1963. Dekon dijadikan sebagai landasan bagi ekonomi Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum Revolusi Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan ekonomi yang sifatnya nasional, demokratis, serta terbebas dari sisa-sisa imperialisme demi terwujudnya tahap ekonomi sosialis Indonesia secara terpimpin.[27]

Di bidang perbankan lahir gagasan untuk menggabungkan seluruh lembaga perbankan milik negara dalam satu komando yang dikenal dengan "Bank Berdjoeang-Bank Tunggal". Penggabungan tersebut dengan dasar bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu alat revolusi yang bertugas untuk menegakkan amanat revolusi. Sebagai tindak lanjut, penggabungan bank-bank milik negara ini baru terlaksana melalui terbitnya Penpres No. 8 Tahun 1965 yang menyatakan bahwa dalam rangka penyederhanaan organisasi perbankan ke arah organisasi yang bersifat tunggal, ditetapkan penggabungan bank-bank umum negara dan Bank Tabungan Negara berdasarkan tahap-tahap yang sesuai kebutuhan, melalui penetapan presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Urusan Bank Sentral. Tahap pertama ialah penyatuan bank-bank pemerintah ke dalam suatu bank tunggal yakni mengintegrasikan bank-bank pemerintah ke dalam bank sentral (Bank Indonesia). Tak berselang lama, pemerintah pun melakukan penggabungan Bank Koperasi Tani dan

26 Tim Penulis Bank Indonesia, *Menudju Bank Berdjoeang Tunggal,* (Jakarta: Bank Indonesia Bagian Hubungan Masyarakat, 1965), hlm. 3.

27 Tim Penulis, *Menegakkan Kedaulatan dan Ketahanan Ekonomi: Bank Indonesia dalam Pusaran Sejarah Kalimantan Barat,* (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2019), hlm. 214.

Nelayan ke dalam Bank Indonesia. Pada 21 Juni 1965 disusul kemudian peleburan Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara, dan Bank Negara Indonesia ke dalam Bank Indonesia.[28]

Pada tahap kedua ialah diterbitkannya Penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965 tentang Pendirian Bank Tunggal milik negara. Adapun Bank Tunggal itu sendiri bernama Bank Negara Indonesia (BNI). Berdasarkan Penpres No. 17 Tahun 1965 disampaikan bahwa keberadaan Bank Tunggal sebagai satu-satunya bank milik negara yang menjalankan tugasnya sebagai bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum yang dipandang lebih tepat dan terarah sesuai program Bank Berdjoeang. Bank Tunggal diibaratkan sebagai alat revolusi dan Abdi Ampera dalam memperjuangkan revolusi rakyat Indonesia menciptakan masyarakat sosialis yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila.[29]

Penamaan "Bank Negara Indonesia" sebagai Bank Tunggal didasarkan pada pertimbangan bahwa nama tersebut digunakan pertama kali sebagai upaya pembentukan bank milik Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan kedaulatan ekonominya pada masa revolusi.[30] Adapun perubahan bank-bank yang telah diintegrasikan ke dalam Bank Tunggal adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2.
Susunan Perubahan Nama pada Bank Tunggal

No.	Nama Asal	Nama Perubahan
1.	Bank Indonesia	BNI Unit I
2.	BKTN (Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan)	BNI Unit II
3.	BNI	BNI Unit III
4.	BUN (Bank Umum Negara)	BNI Unit IV
5.	BTN (Bank Tabungan Negara)	BNI Unit V

Sumber: Arsip Bank Indonesia, *Laporan Tahunan Bank Indonesia, 1960-1965.*

28 Tim Penulis, *Sejarah Bank Indonesia Periode II: 1959-1966,* (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm. 39-40.

29 Arsip Bank Indonesia, *Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965.*

30 Tim Penulis, *Sejarah Bank Indonesia Periode II: 1959-1966,* (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm. 41.

Dalam penerapan ekonomi terpimpin masa itu, BI yang waktu itu bernama BNI Unit I, tidak lagi bersifat independen. Hal ini terlihat manakala BI harus mencetak uang dalam rangka pembiayaan besarnya defisit anggaran pemerintah, utamanya karena pengeluaran pemerintah yang banyak digunakan untuk nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Defisit anggaran terus membengkak oleh karena adanya pengeluaran untuk langkah-langkah propaganda politik kala itu, di antaranya pembebasan Irian Barat, konfrontasi Malaysia, serta proyek-proyek "mercusuar" yang dibangun masa itu seperti Gedung DPR/MPR, Monumen Nasional, dan untuk keperluan ASEAN Games dan Ganefo—dalam hal ini Gelora Bung Karno.[31]

Dalam praktiknya, Bank Tunggal berjalan tidak berlangsung lama. Setelah dikeluarkannya Penpres No. 17 Tahun 1965, Bank Tunggal berjalan hingga tahun 1968. Melalui UU No. 13 Tahun 1968 tugas BI dikembalikan sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Dalam UU tersebut juga diatur bahwa BI tidak lagi memiliki fungsi menyalurkan kredit komersial. Sementara bank-bank lain yang tergabung dalam Bank Tunggal, melalui UU No. 21 dan 22 Tahun 1968, selanjutnya berubah kembali berdiri sendiri menjadi bank pemerintah.

Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik (inflasi), serta kestabilan terhadap mata uang negara lain (kurs). Dalam konteks ini, Kantor Cabang BI Banjarmasin sesuai dengan namanya di dalam kegiatannya merupakan upaya implementatif berbagai kebijakan yang telah diambil dan diputuskan pusat. Perubahan fungsi Bank Indonesia yang tertera dalam UU No. 13/1968 menampilkan adanya perbedaan prinsip pada aturan yang lahir era Orde Lama dan Orde Baru adalah BI dilarang melakukan jenis usaha bank bersifat komersial.

Pada periode Orde Baru BI mengalami banyak perkembangan. Hal ini karena guna menyokong kebijakan pemerintahan yang sedang menjalankan pembangunan di segala bidang, terutama dalam rangka

31 Howard Dick, *The Emergence of A National Economy: An Economic History of Indonesia 1800-2000*, (University of Hawaii, 2002), hlm. 188.

pemulihan dan perbaikan ekonomi Indonesia. Terdapat perubahan tugas dari Kantor Cabang BI Banjarmasin sebagai imbas kebijakan pemerintah pusat. Pada tahun 1968 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 1968. Dalam UU No. 13/1968 ini berdampak pada Kantor Cabang BI Banjarmasin yang tidak lagi diperkenankan melakukan jenis usaha bank yang bersifat komersial. Sedangkan kebijakan UU sebelumnya masih mengizinkan kantor-kantor perwakilan bank di daerah-daerah menjalankan usaha-usaha komersial. Penghapusan fungsi komersial pada BI tersebut sejalan dengan berkembangnya kemampuan bank-bank umum pemerintah dalam melayani kebutuhan kredit masyarakat.[32] Selain bertugas mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dalam UU tersebut dinyatakan bahwa BI diberi mandat untuk mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam hal hubungan BI dan pemerintah, telah ditetapkan berdasarkan UU tersebut yang menyatakan BI bertindak sebagai pemegang kas pemerintah RI.[33]

Di lain pihak, dalam konteks kondisi yang lebih umum, pada tahun-tahun antara dekade 1950–1960, keadaan di daerah Kalimantan Selatan boleh dikatakan agak terganggu. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya gangguan keamanan dari kelompok pemberontak yang menamakan dirinya Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRYT) pimpinan Ibnu Hajar. Mereka ini merupakan kelompok tentara yang desersi. Gangguan keamanan ini sedikit banyak turut menghambat perkembangan perekonomian rakyat di daerah Kalimantan Selatan. Hal ini karena aksi para pemberontak membakar desa sehingga penduduk mengungsi ke kota, utamanya ke Banjarmasin. Akibatnya pertanian dan kehidupan ekonomi desa terganggu. Perekonomian rakyat mulai menunjukkan kemajuan sesudah tahun 1965 karena berkembangnya sarana perhubungan, serta sarana sosial ekonomi lainnya.

32 Tim Penulis LP3ES, *BI dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), hlm. 79 dan J. Soedradjad Djiwandono, dkk, *Sejarah BI Periode 1: 1945–1959/BI*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm. 35–36.

33 Lihat Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral Pasal 7 dan 34.

PERAN BANK INDONESIA DALAM SEKTOR PEREKONOMIAN RAKYAT

Nasionalisasi DJB menjadi BI memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mengelola dan mengatur bank secara mandiri, tanpa ada tekanan atau intervensi pihak asing. Secara formal dan simbolis, bagi pemerintah Indonesia, lahirnya BI merupakan tonggak tegaknya kedaulatan di bidang ekonomi dan moneter. Kelahiran BI juga mewakili semangat nasionalisme dalam bidang perbankan. Meskipun demikian, keadaan politik dan keamanan yang dihadapi bangsa Indonesia masih jauh dari stabil. Keadaan yang terus berkembang dan berubah-ubah menjadi ciri sebuah negara dan bangsa yang baru merdeka dan sedang memulai membangun dirinya. Berdasarkan kenyataan semacam itu, maka menurut Tim Penulis Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di bawah koordinasi Prof. Dawam Rahardjo (1995) ada tiga faktor utama yang menyebabkan perubahan peran BI. *Pertama*, karena perkembangan volume pekerjaan bank yang semakin besar dan beraneka ragam. *Kedua*, proses penyesuaian diri dalam rangka perkembangan menuju kepada dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi bank sentral, dengan mulai meninggalkan kegiatan komersial dan melaksanakan fungsi sebagai *the bankers bank* dan *lender of the last resort*. Oleh karena itu, BI makin aktif membina bank-bank, pasar uang dan pasar modal. *Ketiga*, perkembangan ekonomi yang dalam periode 1953–1959 dan 1959–1966 sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik.[34]

Peranan BI sendiri telah bergeser dari pemberi kredit kepada swasta pada dasawarsa 1950-an menjadi pemberi kredit kepada proyek-proyek pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara pada dasawarsa 1960-an. Situasi moneter berkaitan erat dengan kebijakan fiskal yang pengendaliannya ditangani dan dilakukan oleh pemerintah, khususnya kementerian atau Departemen Keuangan. Defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan berdampak inflasi, karena

34 Tim Penulis LP3ES, *Op.Cit.,* 1995, hlm. 118 dan ANRI, *Inventaris Arsip BI (1956–1957) 1960–1964*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2016), hlm. 6 (Djiwandono, dkk 1945–1959, 2005, hlm. 3).

defisit akan dibiayai oleh pencetakan uang yang menambah volume uang beredar. Dalam praktiknya, bank sirkulasi mengeluarkan uang kertas untuk memenuhi permintaan pemerintah atas dasar kebutuhan anggaran, berupa uang muka, demikian pula kredit likuiditas kepada bank-bank, terutama bank pemerintah. Oleh karena itu di samping defisit dalam APBN, sumber perubahan volume uang beredar adalah kredit perbankan.[35]

Defisit anggaran yang terjadi pada tahun 1950–1959 disebabkan keperluan untuk mendorong perkembangan ekonomi, terutama untuk menumbuhkan perdagangan di kalangan pribumi, program pemerintah membantu pertumbuhan pengusaha swasta nasional Indonesia, pembinaan perusahaan-perusahaan negara yang mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda pasca nasionalisasi akhir 1957, membiayai operasi-operasi militer dan politik guna mengatasi pergolakan daerah seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta), serta pembatalan KMB secara sepihak. Oleh karena keadaan yang masih jauh dari stabil itu, maka pada periode ini BI mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi krisis devisa dan defisit keuangan negara yang kronis dengan mengupayakan untuk menambah penerimaan pemerintah dan meningkatkan penerimaan devisa, yaitu kebijakan di bidang ekspor, serta membatasi pengeluaran-pengeluaran devisa dengan kebijakan di bidang impor.[36]

Dalam bidang moneter upaya untuk menahan laju inflasi dilakukan dengan membatasi jumlah uang muka BI kepada pemerintah dan pembatasan kredit perbankan secara kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan defisit anggaran pada dasawarsa 1960-an terjadi karena kebutuhan anggaran pemerintah untuk proyek-proyek politik, termasuk politik luar negeri meningkat pesat seperti penyelenggaran Asian Games tahun 1962, persiapan-persiapan Pekan Olahraga GANEFO (*Games of the New Emerging Forces*) tahun 1963, timbul sengketa regional dengan terbentuknya

35 Tim Penulis LP3ES, *Op.Cit.*, 1995, hlm. 128.

36 J. Soedradjad Djiwandono, dkk, *Op.Cit.,* 2005, hlm. 127–138.

Negara Federasi Malaysia yang berlanjut dengan Politik Konfrontasi pada tahun 1964, serta program Trikora yang dikumandangkan pada 1961 untuk merebut kembali Irian Barat hampir menyerap ¼ dana APBN.[37]

Pada masa konfrontasi dengan Malaysia ada saat pemutusan hubungan lalu lintas perekonomian dengan daerah-daerah yang menyebut dirinya "Malaysia". Menurut laporan Kepala Cabang Kantor BI Banjarmasin, H. P. Toar pada 25 November 1963, bahwa pemutusan hubungan itu mempunyai pengaruh yang kecil pada bidang ekspor di Kalimantan Selatan. Saat itu misalnya ada 85–90% ekspor Kalimantan Selatan adalah ke Singapura. Dari seluruh ekspor daerah ini, sekitar 90% berupa karet. Dari seluruh ekspor karet Kalimantan Selatan itu sekitar 90% dikirim ke Singapura. Hasil-hasil *remilling*, seperti *flatbark* dan *blankets* malahan 95–100% diekspor ke Singapura.[38]

Produksi karet rakyat—yang dimaksudkan adalah *sheets*—di Kalimantan Selatan berjumlah rata-rata 3.000 ton per bulan, sedangkan produksi *remilling* berjumlah kira-kira 2.000 ton tiap bulannya, sebagian besar terdiri dari *flatbark*. Di lain pihak, kontrak-kontrak valuta terkait dengan pemutusan hubungan itu telah dibatalkan oleh bank-bank deviden di Banjarmasin yang berjumlah 89,7 juta rupiah deviden dari jumlah 88,2 juta rupiah deviden yakni untuk karet sebanyak 4.700 ton. Dalam soal inilah menyebabkan para eksportir mencari pasaran (pembeli) baru di negara-negara lain untuk *sheets* mereka yang semula tersedia untuk diekspor ke Singapura. Berdasarkan perkiraan *sheets* yang semula akan dikirim ke Singapura, namun tidak jadi akibat pemutusan hubungan, berjumlah sekitar 3.000 ton. Dari jumlah ini sebagian besar dapat disalurkan antara lain dengan ekspor 2.000 ton ke Cina, termasuk 1.825 ton dari Gabungan Koperasi Karet (Gakka) Kalimantan Selatan, yang siap dikapalkan. Di pelabuhan Banjarmasin pada akhir November 1963 ada 3.500 ton *sheets* yang masih menunggu pengapalannya. Sebanyak 3.200 ton di antaranya destinasi negara Cina. Meskipun demikian, sebelumnya ada 850 ton karet yang sudah diangkut oleh kapal PELNI untuk *transhipp* di Tanjung Priok Jakarta.[39]

37 *Ibid.*, hlm. 118-216 dan Tim Penulis LP3ES, 1995, *Op.Cit.*, hlm 147.

38 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pemimpin Cabang Bank Indonesia Banjarmasin,* 25 November 1963.

39 *Ibid.*

Di Kalimantan Selatan berlaku tata niaga karet rakyat berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Agraria, Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan Menteri Perindustrian Rakyat No. 3/Opekon M.B. –P dan A, Perd., Kop., Peri/62 tanggal 15 November 1962. Suatu Badan Pengatur terdiri di antaranya Catur Tunggal Tingkat I sebagai anggota dan Gubernur selaku ketuanya. Tugas badan ini mengatur kebijaksanaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap tata niaga karet rakyat di Kalimantan Selatan. Gabungan Koperasi Karet (Gakka) Kalimantan Selatan adalah pelaksana penyaluran tunggal yang bertanggung jawab terhadap Badan Pengatur. Gakka juga dalam hal ini melaksanakan ekspor sebanyak 50% dari hasil pembeliannya dari para petani karet dan 50% lainnya jatah bagi para PDN dan para eksportir swasta.[40]

Oleh karena adanya tata niaga tunggal mengenai karet rakyat, maka pembelian karet dari petani dilakukan oleh Gakka yang hingga menjelang akhir 1963 berlangsung sebagaimana biasa, termasuk harga pembeliannya pun tidak ada perubahan, begitupun dengan harga-harga penjualannya kepada PDN dan eksportir swasta. Sejauh tidak ada *problem* berarti terhadap niaga karet, kecuali utang Gakka kepada para petani yang belum terlunasi keseluruhannya, karena keuangan yang belum kuat meski ada bantuan kredit dari BKTN. Menurut keterangan pihak Gakka utang mereka sebesar 75 juta rupiah, namun BI Kalimantan Selatan menerima informasi bahwa utangnya mencapai 100 juta rupiah bahkan mungkin lebih dari itu.

Uraian di atas terkait dengan karet *sheets* yang berbeda dengan hasil-hasil *remilling* atau yang lazim disebut *remills*, seperti *flatbark* dan *blanket*. Untuk *remills* boleh dikatakan 95–100% diekspor ke Singapura dengan kualitas yang disebut dengan "tipe Singapura" yang lebih rendah dari kualitas standar. Pada tahun 1963 itu ada stok sekitar 2.500 ton *remills* di perusahaan-perusahaan *remilling*, sedangkan pada GPEIS ada stok sekitar 4.000 ton. Dengan begitu ada 6.500 ton karet yang sebagian besar berupa *flatbark*. Harga lokal pada saat itu turun dengan 35–40% dengan tidak ada pembelinya.

40 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pemimpin Cabang Banjarmasin*, 25 November 1963.

Para pengusaha *remills* tengah berusaha: a) menjual di tempat *remills* mereka, dengan harapan tipis, sebab harga sudah turun dan tidak ada pembeli; b) memperbaiki mutu namun akan menelan biaya besar; c) mencari pasar baru di luar dari daerah-daerah yang mengalami pemutusan hubungan perekonomian (kasus "Malaysia"); d) sementara waktu tidak membeli bahan baku (*lumps*, *scraps*, dan *slabs*) baru dengan mengerjakan terus stok yang masih tersisa; dan e) berhubung uang tertahan karena tertahannya *remills*, maka berusaha mendapatkan bantuan kredit dari bank.[41]

Dampak dari pemutusan hubungan lalu lintas ekonomi dengan daerah-daerah yang menyebut diri "Malaysia" terhadap impor ke Kalimantan Selatan, dalam hal ini dengan tujuan pelabuhan Banjarmasin, Sampit, dan Samarinda yang *transhipp* di Singapura diberlakukan terutama untuk komoditas berasal dari Jepang dan Cina. Berhubung keadaan ini, maka atas permintaan dari pemasok di luar negeri, terutama Jepang, para importir mengajukan permintaan kepada Biro Deviden Perdagangan (BDP) untuk mengubah pelabuhan-pelabuhan tujuan di Kalimantan menjadi ke Tanjung Priok atau Tanjung Perak. Permintaan ini oleh BDP pusat ditolak. Destinasi harus tetap Banjarmasin dan komoditas tidak diperbolehkan dibongkar di Tanjung Priok maupun Tanjung Perak.

Berhubung dengan adanya keterlambatan ekspor dan khususnya kemacetan dalam penjualan lokal serta ekspor hasil *remilling*, maka beberapa para pengusaha *remills* dan eksportir telah mendekati bank-bank setempat, khususnya bank pemerintah, guna mendapatkan bantuan kredit, baik kredit baru maupun penambahan kredit-kredit yang telah ada yang kini telah mencapai maksimum. Jenis-jenis kredit yang diminta adalah kredit produksi untuk *remills* dan kredit ekspor. Mengenai jumlah seluruh permintaan kredit atau jumlah masing-masing sektor, bank-bank itu belum dapat memberikan angka-angka ke pihak BI Kalimantan Selatan. Antara lain oleh cabang BNI telah disinggung persoalan bantuan kredit likuiditas dari BI, mengenai hal konfrontasi dengan Malaysia belum mendapat instruksi baru dari kantor pusat, khususnya mengenai pendislokasian kredit-kredit likuidasi.

41 *Ibid.*

Dampak pemutusan hubungan lalu lintas ekonomi agak terasa dialami di bidang perkapalan. Pengangkutan barang-barang ekspor dari pelabuhan Banjarmasin ke atau melalui Singapura, selain oleh PELNI dan perusahaan-perusahaan perkapalan swasta nasional, sebagian terbesar dilakukan oleh kapal-kapal dari perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Singapura seperti: Guan Guan, Kie Hock, Straits Shipping, dan Ek Liong Hin dengan jumlah kapal tujuh buah dan kapasitas kargo seluruhnya sebesar kira-kira 7.000 ton per bulannya, dan ini merupakan kira-kira 70% kapasitas kargo dari kapal-kapal seluruhnya yang melayani pelabuhan Banjarmasin. Dengan keadaan pemutusan ini tidak ada lagi kapal-kapal asing itu melakukan pelayaran dari atau ke Banjarmasin. Guna mengisi kekosongan ini pihak PELNI mengerahkan tiga buah kapalnya untuk melayani pelayaran Banjarmasin ke pelabuhan-pelabuhan utama di Jawa pergi pulang. Sebelumnya sudah ada dua kapal PELNI dengan kapasitas muatan sebesar 6.500 ton per bulan. Selain itu, pihak PELNI juga sudah mengadakan persetujuan dengan perusahaan-perusahaan perkapalan swasta nasional setempat yang menyatakan bahwa kapal-kapal perusahaan-perusahaan swasta itu dapat bertindak sebagai pengangkut pertama dalam pengangkutan "muatan lanjutan" dari luar pelabuhan atas nama pihak PELNI sesuai dengan syarat-syarat "*through bill of lading*" PELNI.

Berdasarkan laporan R. Soewigno S pimpinan Kantor Cabang BI Banjarmasin bahwa pemutusan hubungan lalu lintas ekonomi yang diberlakukan tidak memengaruhi keadaan kas bank yang ia pimpin. Kantor BI di sini dapat dikatakan terus-menerus mengalami *out flowing cash* (kas keluar). Selama 10 bulan, yaitu hingga akhir Oktober 1963, rata-rata 280 juta rupiah mengalir keluar per bulan dengan catatan angka-angka yang terendah sebesar 42 juta rupiah dalam bulan Maret dan 53 juta rupiah bulan Agustus, sedangkan angka-angka yang tertinggi tercatat dalam bulan Juni sebesar 621 juta rupiah dan dalam bulan Juli sebesar 641 juta rupiah. Dari tanggal 1 sampai 15 November 1963 telah mengalir keluar sebesar 150 juta rupiah.[42]

42 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Tjabang Banjarmasin pada Konferensi BERDIKARI 4 s.d. 8 Mei 1965 di Kantor Pusat Jakarta*, Jakarta: Bank Indonesia.

Pada 12 Januari 1965 telah dilaporkan bahwa proyek penting yang dapat dilaksanakan di Kalimantan Selatan namun sudah dimasukkan dalam pola proyek Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan pola proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dari *statement* dalam wawancara Menteri Urusan Bank Sentral mengenai PN2 *Public Utilities* seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dalam kenyataannya pembagian listrik belum dapat merata. Untuk ini, BI Kalimantan Selatan telah menghubungi pihak PLN setempat yang kemudian menjelaskan bahwa dalam bulan Januari 1965 telah dikerjakan penambahan mesin listrik diesel berkekuatan 1.000 kilo watt. Di lain pihak pada saat itu PN Postel sedang membangun kantor baru yang megah. Dalam kaitan ini BI Kalimantan Selatan tidak berani mengadakan kredit untuk kepentingan proyek itu.[43]

Masalah sulitnya perhubungan menjadi alasan pihak BI Kalimantan Selatan dalam melakukan pembinaan bank-bank yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Namun demikian, pimpinan BI Kalimantan Selatan tetap berkomitmen terhadap penerapan UU No. 17/1964 tentang larangan penarikan cek kosong. Sebelum terbitnya UU ini dilaporkan pernah ada delapan kasus penarikan cek kosong, kasus seperti itu tidak terjadi lagi sampai pada bulan Mei 1965 ini. Disampaikan pula di sini bahwa di wilayah kerja BI Kalimantan Selatan terdapat dua Bank Pembangunan Daerah, yaitu: 1) BPD Kalimantan Tengah di Palangkaraya, dan 2) BPD Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Kedua bank telah mendapat perhatian khusus dari Kantor Cabang BI Banjarmasin.[44]

UU No. 13/1963 menyebut bahwa "Bank tidak menerima uang giro dan tidak menjalankan tugas-tugas bank umum". Mengingat hal ini, maka BPD Kalimantan Tengah telah melanggar ketentuan UU itu karena telah melakukan praktik menerima uang giro. Hal sama dilakukan pula oleh BPD Kalimantan Selatan. Bahkan lebih dari itu, BPD ini ternyata telah menjalankan usaha perbankannya sebelum izin usaha dikeluarkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral sebagai suatu yang melanggar UU No. 13/1962 pasal 3 ayat 2. Juga BPD ini telah melanggar pasal 7 ayat 1, sebab

43 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Tjabang Banjarmasin pada Konferensi BERDIKARI 4 s.d. 8 Mei 1965 di Kantor Pusat Jakarta, Jakarta*: Bank Indonesia, hlm. 22.

44 *Ibid*.

sebelum menyetor modal sebesar 20 juta rupiah telah melakukan usaha. Ketika BPD Kalimantan Selatan ini mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan usaha bank yang diterima oleh BI Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Januari 1965, saldo rekeningnya hanya menunjukkan sisa Rp5.920.025. BPD Kalimantan Selatan mendapat izin usaha bank berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur BI No. Kep. 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965.[45]

Keterlibatan BI Kalimantan Selatan dengan masyarakat tercermin dari 1) dipercaya sebagai Koordinator Hansip Unit Bank; 2) Sebagai Perwira Staf, Asisten III Resimen Antasari; 3) Anggota badan pengatur tata niaga karet rakyat; 4) Anggota Badan Penasihat Ahli Gakka; 5) Anggota Perwakilan Bukaret Kalimantan Selatan; 6) Anggota *Port Authority*; 7) Anggota Pembimbing Pramuka Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan; 8) Anggota Pengurus Dana Sukarelawan Dwikora; 9) Ketua Badan Kontak Bank-Bank Pemerintah/Swasta; dan 10) Ketua Pengurus Harian Persahi Cabang Banjarmasin.

Menurut laporan Oesman Ibrahim, pimpinan Cabang BI Banjarmasin, tanggal 15 Maret 1969, wilayah kerja Kantor Cabang BI Banjarmasin meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Keseluruhannya terdapat 42 bank yang beroperasi di kedua provinsi ini yang di bawah pengawasan dan pembinaan dari Kantor Cabang BI Banjarmasin. Sampai tahun 1969 ini 33 bank berada di Provinsi Kalimantan Selatan dan sembilan bank berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Bank-bank itu berupa bank pemerintah, bank swasta, bank pembangunan daerah, dan bank sekunder. Selain itu ada PT Bank Pasar Kalimantan yang juga sudah beroperasi namun belum mempunyai dasar hukum.[46]

Potensi kegiatan perdagangan di Kalimantan Selatan sampai waktu ini hampir seluruhnya terkonsentrasi pada perdagangan karet untuk ekspor. Tak pelak lagi, maka bank-bank pemerintah utamanya dengan kemampuan modalnya sangat berperan di dalam pemberian kredit, sedangkan bank-bank swasta yang benar-benar mau bekerja dengan

45 *Ibid.*

46 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Tjabang Banjarmasin Tahun 1969*, Jakarta: Bank Indonesia, hlm. 2.

sungguh-sungguh dengan kemampuan likuidasinya yang terbatas harus mengerahkan seluruh kemampuannya agar dapat bertahan. Di bidang pemupukan dana dan perputaran *clearing* kembali bank-bank pemerintah yang memegang peranan, sedangkan bank swasta hanya dua buah bank saja yang menunjukkan perputaran kliring yang lumayan. Kesemuanya ini dalam rangka pelayanan diarahkan untuk kepentingan perekonomian rakyat di daerah.

Di BPD Kalimantan Selatan hampir seluruhnya giro bersumber dari keuangan pemerintah daerah, sedangkan dalam jumlah angka perkembangan pemberian kreditnya, lebih dari separuh merupakan kredit yang macet dan sukar dapat ditagih kembali. Pimpinan BI Kalimantan Selatan hingga ketika itu menganggap tidak perlu ada penambahan bank baru di wilayah kerjanya. Yang diperlukan adalah bagaimana BI dapat berperan membina dan memupuk bank-bank swasta yang lemah dalam permodalan yang menyebabkan geraknya sangat terbatas. Dalam hal ini BI dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan kredit likuidasi biasa.

Dalam hal pembinaan bank di wilayah kerjanya, BI Kalimantan Selatan mengenakan skorsing dari kliring sejak pertengahan tahun 1968 terhadap dua buah bank setempat dan nampaknya belum berhasil merehabilitasi keadaannya. Catatan lain dari Kantor Cabang BI Banjarmasin adalah berkenaan dengan Bank Bumi Daya (BBD) bahwa pengeluaran garansi bank yang dilakukannya untuk suatu transaksi komoditas gula seorang nasabahnya dengan Depolog sejumlah Rp2.750.000 yang sama sekali tanpa jaminan (*ongecekt*). Hal yang demikian tentu tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan perbankan. Yang juga mendapat catatan khusus adalah Bank Dagang Negara (BDN) yang melakukan penarikan *cash* yang berkisar Rp5.000.000 hingga Rp15.000.000 per harinya.[47] Meskipun demikian, harus diakui bahwa pengawasan oleh BI Kalimantan Selatan belum dapat dilakukan secara optimal sebab belum diperolehnya gambaran perkiraan (prognosis) perkreditan di daerah serta kemampuan-kemampuan produksi dalam wilayah kerjanya. Dari bank terkait juga hanya dapat menyampaikan angka perkiraan kasar mengenai rencana-rencana pembiayaan dari bulan yang berlangsung.

47 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Tjabang Banjarmasin Tahun 1969, Op.Cit.,* hlm. 3.

Adapun Bank Rakyat Indonesia mendapat catatan terkait dengan dislokasi kredit untuk pupuk, obat-obatan, dan *sprayers* dalam rangka Bimas (Bimbingan Massal) pada sektor pertanian sejak tahun 1965 hingga 1969 yang belum pernah berhasil. Hal ini disebabkan: a) keadaan tanah di beberapa daerah (pasang surut); b) prosedur dan cara pemupukan yang dianggap terlalu sulit (di antaranya terkait masalah irigasi); c) pemupukan dilakukan untuk tanaman lainnya di luar padi, sedangkan antara biaya pemupukan tidak seimbang dengan hasil yang diperoleh; dan d) kebiasaan para petani di Kalimantan Selatan dengan budidaya padi basah (*natte rijsbouw*).[48]

Kantor Cabang BI Banjarmasin mencatat dan turut menyelesaikan adanya tindak pidana cek kosong, selama tahun 1968 yang jumlahnya mencapai 62 perkara dengan 118 lembar cek kosong bernilai nominal seluruhnya Rp10.341.339,50. Dari jumlah ini telah dapat diselesaikan sebanyak 21 perkara melalui Pengadilan Negeri dengan jumlah nominal Rp4.281.159 dan satu perkara dinilai karena kesalahan administrasi bank dengan nominal Rp64.647,50. Adapun perkara-perkara lainnya yang telah ditangani oleh pihak Kejaksaan atau Kepolisian hampir semuanya telah dapat diserahkan kepada pihak Pengadilan Negeri.[49]

Banyak hal yang dihadapi Kantor Cabang BI Banjarmasin. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, BI setempat terus berupaya melaksanakan pengawasan dan pembinaan kegiatan bank-bank yang ada di wilayah kerjanya juga terhadap perkembangan perekonomian di daerahnya. Persoalan yang kemudian juga muncul adalah berkenaan dengan pembelian beras BUL tahun 1969/1970. Target pembelian beras untuk tahun 1968 sebagaimana telah ditetapkan sebanyak 13.200 ton, namun kenyataannya yang terealisasi hanya 3.750 ton.[50] Alasan yang dikemukakan karena banyaknya beras yang dikirim ke luar daerah, baik yang secara resmi maupun yang ilegal. Selain karena faktor harga yang ditetapkan Bulog jauh lebih rendah dari pasaran

48 *Ibid.*

49 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Tjabang Banjarmasin Tahun 1969.*

50 *Ibid.,* hlm. 4.

beras setempat. Bagaimanapun menurut pandangan BI, alasan ini tidak dapat menghapuskan kesalahan yang telah dilakukan. Kantor Cabang BI Banjarmasin sebagai mitra sudah mengetahui akan adanya kebijakan pemerintah daerah mengizinkan pengiriman beras ke luar daerah dengan alasan: a) untuk membantu petani dalam keseimbangan harga karena dianggap terlalu murah; dan b) memperoleh keuntungan untuk menutupi defisit anggaran keuangan daerah. Adapun target pembelian beras untuk tahun 1969/1970 ditetapkan sebesar 8.000 ton. Target ini menurut pandangan BI setempat dapat dicapai jika: a) diperhatikan faktor penetapan harga; dan b) pengawasan beras keluar daerah lebih diperketat.

Kantor Cabang BI Banjarmasin turut memantau dan mencatat terhadap dampak dari hadirnya Surat Keputusan Menteri Perdagangan tertanggal 5 November 1968 mengenai larangan bahan-bahan ekspor karet *lower-grade* merupakan pukulan terhadap dunia perdagangan di Kalimantan Selatan. Meskipun daerah ini secara nasional menduduki posisi nomor lima sebagai penghasil karet rakyat, namun tidak urung para pengusaha karet khususnya para pemilik pabrik *remilling* sangat merasakan dampaknya. Selain itu, pengiriman pabrik-pabrik *crumbrubber* masih memerlukan proses sedikitnya selama enam bulan, di samping masalah pemasarannya dan selisih harga antara *sheets* dan *crumbrubber* yang sangat sedikit sehingga para pengusaha masih nampak ragu untuk menginvestasikan modalnya ke arah itu.

Dampak Keputusan Menperdag bagi daerah Kalimantan Selatan di antaranya adalah: 1) ditutupnya hampir seluruh pabrik *remilling* atau rumah asap. Dari 22 *remilling-bedrijven* yang masih berproduksi, hanya ada 2–3 saja yang dapat bertahan, dan masih memproduksi *smoled blankets* (kualitas di atas *flatbarkcrepe*); 2) berpotensi menimbulkan pengangguran yang dapat berdampak meningkatnya kriminalitas; 3) berkurangnya penghasilan ADO (Alokasi Devisa Otomatis) yang akan menjadi penghambat kelancaran pembangunan daerah, lebih-lebih masa pelaksanaan Repelita; 4) penghasilan daerah berupa pajak dan pungutan-pungutan resmi lainnya menurun; dan 5) pemasukan pemerintah berasal dari MPO (Menghitung Pajak Orang (lain)) dan bea-bea masuk serta

pemasukan devisa akan merosot, sehingga dapat memengaruhi RAPBN dan neraca perdagangan Indonesia.[51]

Dalam hal realisasi ekspor tahun 1968 BI Kalimantan Selatan mencatat capaian sebesar US$14.084.000, dari jumlah ini sebagian merupakan realisasi ekspor Kalimantan Tengah. Angka ekspor ini terdiri dari golongan A (95%) dan golongan B (5%). Untuk angka ekspor ini peranan terbesar berada pada BDN mencapai US$6.079.000 kemudian berturut-turut oleh BNI 1946 senilai US$4.163.000; Bank Exim sebesar US$1.850.000; BBD sebesar US$1.567.000; dan BI sendiri sebesar US$425.000. Adapun capaian impor tahun 1968 sebesar US$169.000 menunjukkan keadaan impor daerah Kalimantan Selatan mulai suram, hanya mencapai 25% dibanding impor yang dicapai tahun 1967 yakni sebesar US$675.000. Hal ini selain disebabkan oleh adanya peraturan 27 Mei 1968, juga karena pasaran barang-barang impor di daerah ini sangat terbatas, sehingga lebih suka dan lebih murah mendatangkan dari Jawa.[52]

Di bidang perkreditan, BI Kalimantan Selatan mencatat mengenai pembelian beras Badan Urusan Logistik (BUL) 1969/1970 dan luas potensi persawahan dan ladang di Kalimantan Selatan yang mencapai 885.000 ha. Dari persawahan pada tahun 1964 ditanami seluas 250.000 ha yang terdiri dari ladang seluas 29.000 ha, sawah barat seluas 86.000 ha, sawah timur seluas 55.000 ha, dan sawah pasang surut 80.000 ha. Diperkirakan dari lahan seluas itu akan dihasilkan panen 258.181 ton beras. Dalam tahun 1968 target kebutuhan makan per jiwa per tahun untuk Kalimantan Selatan ditetapkan 100 kg beras. Dengan jumlah penduduk 1.737.430 jiwa maka diperkirakan dibutuhkan sebanyak 173.743 ton atau dibulatkan menjadi 180.000 ton beras. Untuk keperluan bibit dan sebagainya diperkirakan 12.500 ton padi, sehingga untuk tahun 1968 Kalimantan Selatan terdapat surplus sekitar 65.000 ton. Dengan adanya surplus itu Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan mengizinkan mengirimkan beras ke luar daerah. Tujuannya: 1) membantu petani dalam keseimbangan harga karena dianggap terlalu murah; dan 2) memperoleh keuntungan untuk menutupi defisit anggaran keuangan daerah 1968 sebesar 50 juta

51 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Tjabang Banjarmasin Tahun 1969*, *Op.Cit.*, hlm. 5.

52 Arsip Bank Indonesia, Laporan Pimpinan Tjabang Banjarmasin Tahun 1969, *Op.Cit.*, hlm. 6.

rupiah dan memperbesar bantuan berproduksi para petani. Akan tetapi, kenyataannya ketika itu masih diperlukan *dropping* beras dari pusat sekitar 100.000 ton.[53]

Apabila ditinjau bahwa daerah pasang surut terbuka hanya 80.000 ha (10%) dan masih bisa dikembangkan lebih dari 400.000 ha, maka usaha menambah produksi masih terbuka luas di Kalimantan Selatan. Musim panen di daerah Kalimantan Selatan dan Tengah berlangsung setiap tahun pada bulan Juni–September.

Tabel 4.3.
Daftar Perkiraan Produksi Padi dan Pemakaian Kalimantan Selatan Tahun 1968

No.	Tahun	Penduduk	Produksi	Kebutuhan	Kekurangan
		(jiwa)	(ton)	(ton)	(ton)
1.	1963	1.542.371	283.025	462.556	179.531
2.	1964	1.582.034	386.508	475.018	88.510
3.	1965	1.618.822	288.558	485.444	196.886
4.	1966	1.655.646	414.332	497.827	83.493
5.	1967	1.693.725	382.700	508.510	125.810
6.	1968	1.752.681	432.000	522.766	90.766

Sumber: Arsip Bank Indonesia, Laporan Pimpinan Cabang Bank Indonesia Kalimantan Selatan 1970, hlm. 14.

Menurut penjelasan Kepala Depolog Kalimantan Selatan bahwa target pembelian beras tahun 1968 ditetapkan sebanyak 13.200 ton beras. Berhubung banyaknya beras mengalir ke luar daerah, maka target hanya dapat dipenuhi sebanyak 3.750 ton beras, sedangkan untuk tahun 1969/1970 direncanakan target pembelian beras sebanyak 8.000 ton. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya, BI Kalimantan Selatan menerima penjelasan dari Kepala Depolog Kalimantan Selatan mengenai adanya rekening-rekening yang sedang berjalan atas nama Depolog Kalimantan Selatan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Banjarmasin, yaitu masing-masing terdiri dari rekening "eksploitasi" dan "Manajemen". Ditambahkan bahwa rekening-rekening didasarkan pada instruksi Bulog

53 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Cabang Bank Indonesia Banjarmasin Tahun 1970*, hlm. 13.

Jakarta. Jika ingin dialihkan ke BI, Kepala Depolog minta agar instruksi Bulog Jakarta itu dicabut.

Bekerja sama dengan pihak Depolog adalah bentuk BI Kalimantan Selatan melaksanakan tugas turut mengatur/mengendalikan perdagangan di Kalimantan Selatan, khusus di sektor pangan berupa beras. Pihak BI Kalimantan Selatan senantiasa menerima atau meminta laporan mengenai pengeluaran dan pemasukan beras serta mengenai ketersediaannya di Kalimantan Selatan. Dari sini misalnya mengenai rekening koran atas nama Depolog dapat diketahui pula setiap saat dan dicek kembali mengenai penyetoran jumlah dan nilai beras yang telah disetor maupun yang telah ditransfer melalui BI ke BUL Pusat. BI Kalimantan Selatan juga tidak segan memberikan masukan atau saran kepada Depolog misalnya tentang penyaluran beras yang dijual secara kredit. Untuk ini Depolog disarankan agar membuat laporan harian khusus yang mencantumkan nama, alamat, jumlah nilai beras, jangka waktu kredit berakhir, dan keterangan lainnya.

Peran BI Kalimantan Selatan dalam rangka penanaman modal dan kredit luar negeri, berdasarkan keputusan panitia Menteri Urusan Kredit Luar Negeri No. Kpts 17/PT.S/WLN/1965 tanggal 6 Desember 1965 yang menyetujui Kontrak Kredit atas dasar *production sharing* untuk pengolahan hutan di Kalimantan, oleh Kantor Pusat Jakarta telah disalurkan melalui BI Kalimantan Selatan pelaksanaan ekspornya yang meliputi daerah-daerah Kalimantan Selatan dan Tengah. Adapun kontrak kredit itu ditutup antara Badan Pimpinan Umum (BPU) Perhutani dengan Mitsui & Co. Ltd. dan Nanpo Ringyo Kaisha Ltd. Selanjutnya kedua perusahaan ini telah mendirikan suatu perusahaan baru yaitu Mitsui Overseas Forestry Development Company (Mofdeco) yang menggantikan mereka sebagai BPU Perhutani. Dalam *General Agreement*-nya dicantumkan bahwa proyek ini terdiri dari Kalimantan Tengah (Sampit) sebesar US$1.990.258,86 dan Kalimantan Selatan (Pulau Laut) sebesar US$3.360.812,40. Sementara itu, untuk masing-masing proyek dibuat kontrak kredit tersendiri yang mendasarkan pada *General Agreement* itu. Kontrak kredit ini ditandatangani tanggal 31 Agustus 1965 dan berlaku sejak 6 Desember 1965 serta akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1975.

Adapun ekspor dalam rangka berbagi produk rencananya akan direalisasi pada November/Desember 1967. Ditetapkan pula bahwa bila saat akhir kerja sama Perhutani masih belum dapat melunasi seluruh kreditnya, maka dalam waktu enam bulan setelah akhir kerja sama, Perhutani harus menutup sisa kredit dengan *logs* (kayu gelondongan). Bila setelah jangka waktu enam bulan masih juga terdapat sisa, maka pembayarannya dijamin oleh BI setempat. Jadi, untuk proyek ini bank memberikan jaminan pada akhir kerja sama. Adapun jenis-jenis ekspor kayu itu terdiri dari: 1) kayu agatis (*Agathis dammara*) dan *plywood* dari Kalimantan Tengah di Sampit; dan 2) kayu meranti (*Shorea spp.*) dari Kalimantan Selatan di Kotabaru Pulau Laut.[54]

BI Kalimantan Selatan juga berperan dalam terlaksana dan lancarnya pembangunan daerah Kalimantan Selatan. Masalah penanaman modal dan kredit luar negeri BI Kalimantan Selatan adalah dalam konteks pembangunan di Kalimantan Selatan yang difokuskan pada dua sektor, yaitu sektor kehutanan dan pertambangan. Untuk hak pengusahaan hutan dalam investasi langsung (*straight investment*), perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh Surat Keputusannya adalah Korea Development Corp. (Kodeco) (Korea Selatan) seluas 270.000 ha dan Valgosons Indonesian Corp. (Filipina) seluas 80.000 ha. Dalam rangka penanaman modal asing langsung itu telah pula dilaksanakan kerja sama antara PN Perhutani dengan perusahaan-perusahaan asing, yaitu: a) Mitsui Overseas Development Company (Mofdeco) Jepang seluas 20.000 ha, berdasarkan kredit *production sharing*; b) Mofdeco (Jepang) seluas 60.000 ha berdasarkan usaha bersama (*joint enterprise*); c) Mitsui & Corp (Jepang) seluas 50.000 ha berdasarkan *joint enterprise* untuk hutan bakau; dan d) Chuetsu Pulp (Jepang) seluas 206.000 ha berdasarkan *joint enterprise* untuk hutan galam (*Melaleuca leucadendron*) dan meranti.[55]

Dalam hal *straight investment* mencakup pula Kalimantan Tengah khususnya Sampit karena termasuk wilayah kerja BI Kalimantan Selatan dan telah melaksanakan ekspor perdananya berupa kayu agatis dan *pulpwood* pada permulaan tahun 1968 atas dasar *production sharing*

54 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Cabang Bank Indonesia Banjarmasin Tahun 1970*, hlm. 28.

55 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Cabang Bank Indonesia Banjarmasin Tahun 1970*, hlm. 29.

sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Di samping perusahaan-perusahaan asing, terdapat pula perusahaan-perusahaan swasta nasional yang beroperasi di Kalimantan Selatan seperti: 1) Kalimantan Plywood Factory seluas 60.000 ha, yang berencana akan bekerja sama dengan pihak swasta asing Amerika Serikat; 2) CV Sjuhada seluas 100.000 ha; dan 3) CV Hanafi Brothers seluas 100.000 ha; dan 4) PT Zamain.

Pada sektor pertambangan di daerah Kalimantan Selatan telah diusahakan minyak bumi sejak tahun 1937 di daerah Tanjung. Hasilnya yang berupa minyak mentah disalurkan melalui pipa sejauh 250 km ke Balikpapan untuk diolah. Produksi tahun 1967 tercatat 946,5 x 183 m^3. PN Permina bersama kontraktor-kontraktor asing, yaitu Coneco dan Kyusho Oil Co. sedang mengupayakan menemukan sumber-sumber minyak yang baru di daratan maupun di daerah pantai Kalimantan Selatan. Sejauh ini belum diketahui hasil eksplorasinya, namun yang sudah pasti telah ditemukan dan telah ditambang di daerah bagian selatan ini adalah adanya bijih besi dan telah ditambang adalah batu bara.

Mengenai penanaman modal atau kredit luar negeri secara terperinci BI Kalimantan Selatan terkait dengan pihak-pihak perusahaan yang bergiat di sektor[56]:

1. Kehutanan (kayu):
    a. Korea Development Corp. (Kodeco, Korea)
    b. Mitsui Overseas Forestry Development Company (Mofdeco, Jepang)
    c. Valgosons Indonesian Corp. (Filipina)
    d. Kalimantan Plywood Factory (Amerika Serikat), gagal.
2. Pertambangan/minyak bumi:
    a. Coneco
    b. Kyusho Oil Co.
3. Perikanan Laut: Toyo Meinka Kaisha

56 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Cabang Bank Indonesia Banjarmasin Tahun 1970, Op.Cit.*, hlm. 30.

Peran dan kedudukan BI Kalimantan Selatan dalam perencanaan dan implementasi pembangunan daerah Kalimantan Selatan adalah turut menyukseskan pembangunan yang ditempuh melalui kebijaksanaan menggunakan Alokasi Devisa Otomatis (ADO) sebagai berikut:

I. Penjualan atau pencairan ADO dengan maksud untuk mendapatkan rupiah guna mencukupi sebagian pembiayaan pembangunan (prasarana ekonomi)

II. Mengimpor barang-barang
    1. Mengimpor barang-barang keperluan rehabilitasi ekonomi daerah yang antara lain mencakup: 1) Alat-alat *upgrading* karet yaitu mengels, latexmeter, bak pembeku, saringan, dan cuka karet; 2) Aspal; 3) Alat-alat perikanan berupa net-nylon; dan 4) Bahan-bahan bangunan berupa semen, kaca, dan seng.
    2. Mengimpor barang-barang keperluan pemerintah daerah sendiri seperti: 1) Alat-alat kedokteran dan obat-obatan; 2) Alat-alat telekomunikasi; 3) Kendaraan (Jeep); dan 4) Mesin tik.
    3. Mengimpor barang-barang keperluan masyarakat yang tidak diimpor oleh para importir, antara lain: 1) Truk; 2) *Spareparts*; 3) Kertas Koran; 4) Terpal; dan 5) Ban mobil

III. Dikreditkan kepada para importir Kalimantan Selatan. Dasar pertimbangan pemberian ADO ini adalah: a) Membantu menggiatkan usaha para importir nasional di daerah Kalimantan Selatan; b) Memperbesar pemasukan atau peredaran barang-barang kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan; dan c) Memperoleh efisiensi dan pemanfaatan hasil ADO guna menambah penghasilan daerah.

Hasil yang dapat dicapai BI Kalimantan Selatan sampai akhir tahun 1969 berjumlah Rp135.183.580,87. Jumlah ini bagi Kalimantan Selatan dinilai cukup baik, sekalipun dilihat dari sisi angka belum dapat dianggap memuaskan. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat di daerah ini menganggap "tabu makan bunga" bank. Oleh sebab itu, dari daftar pemasukan deposito persentase terbesar adalah berasal dari para penduduk pendatang. Dari nama-nama perorangan mereka yang terdaftar itu kebanyakan berkedudukan sebagai bendaharawan.

Sementara itu, dalam perkembangan ekonomi Kalimantan Selatan, bidang industri ringan turut menggerakkan perekonomian masyarakat. Pada akhir bulan Mei 1968 misalnya, telah tercatat adanya industri-industri ringan yang tersebar di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Hal ini sebagaimana tertera di dalam tabel berikut.[57]

Tabel 4.4.
Jumlah Industri Ringan Kalimantan Selatan Tahun 1968

No.	Daerah	Jumlah
1.	Kota Banjarmasin	115
2.	Kabupaten Banjar	15
3.	Kabupaten Tanah Laut	1
4.	Kabupaten Tapin	4
5.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	17
6.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	33
7.	Kabupaten Huli Sungai Utara	24
8.	Kabupaten Tabalong	3
9.	Kabupaten Barito Kuala	1
10.	Kabupaten Pulau Laut	11
Total		**224**

Sumber: M. Idwar Saleh, dkk, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Jakarta: Depdikbud, 1978.

Sedangkan perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam kategori industri tekstil yang ada di Kalimantan Selatan keseluruhannya ada 58 buah dengan rincian sebagai berikut:

1. Kota Banjarmasin : 8 buah
2. Kabupaten Hulu Sungai Tengah : 1 buah
3. Kabupaten Hulu Sungai Utara : 47 buah
4. Kabupaten Pulau Laut : 11 buah

Adapun perusahaan-perusahaan yang tergolong industri kerajinan rakyat pada tahun 1968 itu sebagaimana terlihat di dalam tabel berikut.

57 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Cabang Bank Indonesia Banjarmasin Tahun 1970*, *Op.Cit.*, hlm. 33–34.

Tabel 4.5.
Jumlah Industri Kerajinan Rakyat Kalimantan Selatan Tahun 1968

No.	Daerah	Jumlah
1.	Kota Banjarmasin	367
2.	Kabupaten Banjar	35
3.	Kabupaten Tanah Laut	7
4.	Kabupaten Tapin	21
5.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	183
6.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	75
7.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	104
8.	Kabupaten Tabalong	14
9.	Kabupaten Pulau Laut	607
10.	Kabupaten Barito Kuala	--
Total		**1.413**

Sumber: M. Idwar Saleh, dkk, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Jakarta: Depdikbud, 1978, hlm. 34–35

Tidak mudah bagi Kalimantan Selatan dalam hal memajukan perekonomian rakyatnya sekalipun kemerdekaan Indonesia telah diraih. Dua dasawarsa pertama pasca proklamasi perhatian rakyat dan pemerintah terbelah antara politik, keamanan, dan perekonomian. Selama periode itu, antara 1945 hingga 1965 rakyat dan Pemerintah Indonesia nyaris tidak dapat memusatkan perhatian pada pembangunan ekonomi. Begitupun yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Meskipun demikian, upaya-upaya ke arah pemulihan perekonomian rakyat terus dilakukan di dalam situasi apapun. Sebagaimana telah digambarkan di dalam uraian-uraian sebelumnya pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak perbankan, dalam hal ini menjalin kemitraan dengan Kantor Cabang BI Banjarmasin, selalu berupaya memperbaiki dan mengembangkan perekonomian rakyat.

BAB 5

Bank Indonesia Mengawal Laju Perekonomian (1968–1998)

Bumi Kalimantan, Kalimantan Selatan khususnya, memiliki sumber daya alam yang mencukupi —jika tak ingin menyebutnya melimpah— untuk memenuhi kebutuhan kehidupan penduduknya. Di dalam buminya terkandung berbagai bahan tambang meliputi intan, emas, minyak bumi, batu bara, dan bijih besi yang menjadi sumber usaha penduduk di sektor pertambangan. Sementara di atasnya, penduduk mengusahakan kegiatan pertanian dalam arti luas yang meliputi perkebunan, peternakan, dan perikanan, ditambah pula dengan mengumpulkan hasil hutan. Meskipun demikian, segala yang diusahakan tidaklah mudah dan serta merta dapat dinikmati, selain perlu proses dan ketekunan juga ada kendala, baik yang berasal dari ulah manusia maupun alam yang dapat menyebabkan kesulitan berkepanjangan. Situasi politik dan keamanan yang tidak stabil misalnya dapat menghambat bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, dan daerah khususnya. Seperti halnya situasi politik dan keamanan selama sekitar dua dasawarsa sejak kemerdekaan (1945–1965) yang kurang kondusif mengakibatkan terhambatnya perkembangan perekonomian rakyat Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan. Realitas historis ini menjadi pelajaran bagi pemerintahan sesudahnya. Faktor stabilitas keamanan kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam proses pembangunan perekonomian bangsa.

Pada bab ini akan dibahas tentang perkembangan perekonomian rakyat di Kalimantan Selatan. Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, beragam sektor perekonomian rakyat berkembang di sana baik itu pertanian, perkebunan, perikanan darat dan laut, ataupun pertambangan. Bank Indonesia selaku bank sentral hadir di wilayah ini dalam mengawal laju perkembangan ekonomi Kalimantan Selatan. Peranan Bank Indonesia pada setiap masa akan dibahas pula pada bab ini.

PEREKONOMIAN RAKYAT KALIMANTAN SELATAN

Secara umum sektor pertanian merupakan usaha atau mata pencaharian utama sebagian besar penduduk Kalimantan Selatan. Dalam memenuhi kebutuhannya, berbagai upaya dikembangkan agar dapat berkembang lebih baik. Upaya memperbaiki perekonomian ini menjadi perhatian bersama dengan harapan agar kehidupan rakyat bisa lebih sejahtera. Salah satu organisasi yang memiliki perhatian terhadap hal itu adalah Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Gerindo merupakan sebuah organisasi pergerakan yang dibentuk pada tanggal 24 Mei 1937 di Jakarta yang diprakarsai dan dipimpin di antaranya oleh A. K. Gani dan Mohammad Yamin. Organisasi ini telah mempunyai cabangnya di Kalimantan Selatan dan turut berupaya memberikan pemikiran dan kegiatan bimbingan serta penyuluhan mengenai cara meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan, serta koperasi sebagai unsur penunjangnya. Mereka menyadari potensi alam Kalimantan Selatan dalam menunjang sektor pertanian cukup besar sehingga rakyat petani perlu mendapat penyuluhan dan bimbingan mengenai tata cara bertani yang baik yang dapat meningkatkan produksinya.[1]

Tidak hanya Gerindo, terdapat pula organisasi-organisasi pergerakan lainnya yang sebenarnya melakukan hal yang kurang lebih sama. Secara politis, kondisi itu dikarenakan mereka perlu mendapatkan simpati dari rakyat petani. Lebih dari itu, apabila menengok kembali masa sebelumnya,

1 M. Idwar Saleh, dkk, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Depdikbud, 1978), hlm. 76–77.

Pemerintah Hindia Belanda telah mendirikan *Landbouw Cursus* pada tahun 1937, yakni sebuah kursus untuk memajukan pertanian di daerah Kalimantan Selatan. Meski organisasi semacam ini hadir pada masa Hindia Belanda, namun aktivitas mengenai pengembangan sektor pertanian khususnya di Kalimantan Selatan perlu untuk terus dikembangkan.

Pada masa Jepang, masih banyak lahan yang berpotensi untuk pertanian belum tergarap. Pemerintah pendudukan Jepang kemudian mendatangkan tenaga kerja paksa (Romusha) dari Jawa untuk membuka hutan di Kalimantan Selatan guna dijadikan tanah persawahan. Pemerintah Jepang juga mendirikan sekolah pertanian yang disebut *Nogyo Cu Gakko* di Kandangan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan pertanian. Sekolah ini merekrut 75 siswa di bawah bimbingan lima orang guru pertanian. Upaya-upaya di sektor pertanian semacam itu terus dilakukan sepanjang waktu dalam keadaan apapun oleh berbagai pihak. Dalam perkembangannya kemudian, Kalimantan Selatan berhasil menjadi satu di antara beberapa daerah di Indonesia yang mengalami surplus beras.[2]

Keadaan di atas menampilkan bagaimana pertanian menjadi salah satu sektor penting di Kalimantan Selatan yang menjadi perhatian, baik dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan maupun komersial. Beranjak ke era Orde Baru, mengenai perkembangan pertanian sawah, Kepala Kantor Cabang BI Banjarmasin, Oesman Ibrahim, menyampaikan laporannya pada tahun 1969 bahwa luas potensi persawahan dan ladang di Kalimantan Selatan meliputi 885.000 ha.[3] Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 1964 wilayah itu telah ditanami seluas 250.000 ha yang terdiri dari ladang 29.000 ha, sawah barat 86.000 ha, sawah timur 55.000 ha, dan sawah pasang surut seluas 80.000 ha. Hasil panen dari luas keseluruhan sawah yang ada sebesar 258.180 ton beras. Dalam perkembangannya, pada tahun 1968 target kebutuhan makan per jiwa per tahun untuk Kalimantan Selatan ditetapkan 100 kg beras. Dengan jumlah penduduk 1.737.430 jiwa, maka diperkirakan dibutuhkan

2 M. Idwar Saleh, dkk, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan, (Jakarta: Depdikbud, 1978),* hlm. 85, 97, dan 101.

3 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Tjabang Banjarmasin Tahun 1969*, Jakarta: Bank Indonesia.

beras sebanyak 173.743 ton yang dibulatkan menjadi 180.000 ton. Untuk keperluan bibit diperkirakan 12.500 ton padi. Perhatian atas pertanian sawah membuat Kalimantan Selatan mengalami surplus sekitar 65.000 ton beras di tahun 1968. Berdasarkan kondisi itu Pemerintah Kalimantan Selatan memberikan izin pengiriman beras ke luar daerah. Tujuannya adalah membantu petani dalam keseimbangan harga, keuntungan yang didapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran keuangan daerah 1968 sebesar 50 juta rupiah, dan memperbesar bantuan berproduksi para petani di daerah.[4] Adapun jumlah produksi dan pemakaian beras di Kalimantan Selatan selama beberapa tahun pada dekade 1960 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.
Daftar Produksi dan Pemakaian Beras Kalimantan Selatan Tahun 1963-1968*
(dalam ton)

No.	Tahun	Penduduk	Produksi	Kebutuhan	Kekurangan
1.	1963	1.542.371	283.025	462.556	179.531
2.	1964	1.582.034	386.508	475.018	88.510
3.	1965	1.618.822	288.558	485.444	196.886
4.	1966	1.655.646	414.332	497.827	83.495
5.	1967	1.693.725	382.700	508.510	125.810
6.	1968	1.752.681	432.000	522.766	90.766

* Catatan: angka untuk tahun 1968 berdasarkan perkiraan. Jumlah penduduk 1963 berdasarkan sensus penduduk tahun 1961 dengan pertumbuhan 2,3% per tahun. Untuk tahun 1964 terdapat tambahan penduduk transmigrasi sebanyak 4.988 jiwa.
Sumber: Arsip Bank Indonesia, *Laporan Kepala Kantor Cabang BI Banjarmasin 15 Maret 1969*, hlm. 14.

Masih dalam persoalan padi (beras), pada tahun-tahun berikutnya kemajuan peningkatan produksi padi di Kalimantan Selatan menampakkan hasil yang fluktuatif di beberapa kota/kabupaten. Meski kecenderungan naik turun produksi padi terjadi di seluruh daerah, di antara daerah-daerah tersebut, Banjar menjadi wilayah dengan perolehan produksi terbesar dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

4 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Tjabang Banjarmasin Tahun 1969*, Jakarta: Bank Indonesia, hlm. 13.

Tabel 5.2.
Produksi Padi Kalimantan Selatan Tahun 1969-1973 (dalam ton)

No.	Kota/Kabupaten	1969	1970	1971	1972	1973
1.	Banjarmasin	8.529	9.382	5.455	6.247	6.511
2.	Banjar	114.406	132.831	87.889	104.352	99.162
3.	Tanah Laut	21.828	50.876	35.489	41.704	54.136
4.	Barito Kuala	73.324	70.366	82.033	98.758	130.161
5.	Tapin	39.162	41.449	56.237	45.447	63.777
6.	Hulu Sungai Selatan	11.988	47.506	40.764	47.639	86.971
7.	Hulu Sungai Tengah	21.074	61.246	68.772	65.785	70.866
8.	Hulu Sungai Utara	50.749	66.660	63.079	78.477	60.984
9.	Tabalong	26.954	27.093	32.639	31.333	30.881
10.	Kotabaru	10.616	18.870	14.773	14.745	15.522
Jumlah		**378.630**	**526.279**	**487.130**	**534.487**	**618.971**

Sumber: M. Idwar Saleh, dkk, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Depdikbud, 1978), hlm. 135–136.

Dalam rentang periode Orde Baru, desa menjadi wilayah potensial dan mendapat perhatian khusus bagi pemerintah sebagai kawasan penopang ekonomi, khususnya di sektor pertanian pangan.[5] Di Kalimantan Selatan, sektor pangan berupa beras menempatkan posisinya begitu strategis, tak hanya diperuntukkan untuk kebutuhan pokok melainkan pula sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Pada periode Repelita I dan II[6], di Kabupaten Hulu Sungai Tengah misalnya, terdapat tiga desa yang menjadi gambaran desa di kawasan dataran tinggi di mana pertanian sebagai

5 Tim Penulis, *Sejarah Pengaruh Pelita terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 2.

6 Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun merupakan program rencana ekonomi lima tahunan yang dirancang oleh pemerintah Orde Baru. Repelita I dimulai sejak tahun 1969–1974 dan dilanjutkan oleh Repelita II tahun 1974–1979, dst. Secara nasional, pada Repelita I terjadi peningkatan di bidang pertanian, khususnya beras yang mengalami kenaikan rata-rata berkisar 4% setahun. Produksi beras mengalami peningkatan lantaran adanya perluasan areal sawah serta kenaikan hasil per hektar. Meningkatnya areal persawahan disebabkan oleh semakin membaiknya sarana irigasi. Sementara kenaikan hasil produksi didukung oleh terselenggaranya intensifikasi melalui bimas dan inmas, serta penggunaan bibit unggul, pupuk, dan obat pembasmi hama. Lihat Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, dkk (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Cet. Kelima, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 578–579.

sumber mata pencahariannya. Ketiga desa tersebut antara lain Mahang Karang Jawa, Paya Besar, dan Perumahan. Dari ketiga desa tersebut, Mahang Karang Jawa merupakan desa yang banyak melakukan kegiatan pengembangan produksi pertanian, seperti pembuatan saluran irigasi, melakukan percobaan berbagai jenis bibit baru untuk padi, dan sebagainya. Desa Mahang Karang Jawa terletak di wilayah dengan ketersediaan air yang cukup dan terhindar dari banjir. Selain karena tanahnya yang juga subur, kelebihan Desa Mahang Karang Jawa dibandingkan desa lainnya dalam mengembangkan pertanian pangan ialah penduduk-penduduknya yang telah terdidik.[7] Perolehan hasil produksi pertanian rakyat di desa ini dalam setahun sudah mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduk, sehingga tidak perlu mendatangkan lagi beras dari desa lain.

Dalam perkembangannya, sektor pangan (beras) di Kalimantan Selatan memainkan andil yang cukup tinggi bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor ini juga cukup besar dalam menyerap angkatan kerja pedesaan dan menjadi stabilitator serta dinamisator bagi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lain.[8] Sebagaimana yang terjadi pada dekade tahun 1980, produksi beras mengalami peningkatan dan melewati laju kenaikan konsumsi, sebagaimana yang terjadi pada tahun 1987. Pada tahun 1987 angka perolehan produksi padi mencapai lebih dari 939.000 ton. Jumlah perolehan produksi padi seperti itu terjadi setiap tahun bahkan mendapat surplus yang cukup besar yang diperoleh dari hasil selisih antara jumlah produksi dengan jumlah konsumsi. Selain itu surplus didapatkan dari kebutuhan padi lainnya seperti benih, kompensasi kehilangan pasca panen, keperluan industri dan *bufferstock* yang angkanya hanya 613.000 ton.[9] Kelebihan produksi yang dialami Kalimantan Selatan telah terjadi sejak tahun 1983. Pada tahun itu angka kelebihan produksi beras mencapai hampir 150.000 ton. Setiap tahunnya mengalami kenaikan hingga kemudian di tahun 1987 jumlah surplusnya melebihi 325.000 ton. Selama kurun tahun 1983–1987 angka kenaikan

7 Tim Penulis, *Sejarah Pengaruh Pelita terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Kalimantan Selatan*, Jakarta: Depdikbud, 1993, hlm. 45.

8 Tim Penulis, *Wajah Kalimantan Selatan 1989* …, hlm. 51.

9 *Ibid.*

produksi beras mencapai rata-rata 4,1% per tahun, sementara angka kenaikan konsumsi hanya berkisar 1,6% per tahun.[10]

Keberhasilan di sektor pertanian ini salah satu faktornya ialah adanya pencanangan Operasi Kindai Limpar I dan II yang secara terpadu melakukan intensifikasi produksi padi. Dari situlah diperoleh surplus padi Kalimantan Selatan yang dapat menyuplai provinsi-provinsi sekitar. Meskipun swasembada beras telah tercapai, namun upaya peningkatan produksi padi masih perlu dilakukan sebab peluangnya masih terbuka lebar. Lahan di Kalimantan Selatan sebagian besar masih merupakan "areal tidur"[11] dan produktivitas berbagai tanaman pangan masih relatif rendah, karenanya peluang untuk meningkatkan produktivitas masih sangat terbuka guna mencapai tingkat optimal. Dalam upaya meningkatkan produktivitas bahan pangan, tentu dihadapkan oleh berbagai persoalan, antara lain meningkatnya permintaan hasil produksi; perluasan areal dan pemanfaatan lahan yang belum mencapai sasaran; serta pola pengembangan komoditas pangan yang belum didasarkan pada kesesuaian agro ekologi dan agro ekonomi wilayah. Persoalan lainnya ialah benih unggul bermutu yang masih jauh dari harapan; penanganan pasca panen; masih rendahnya pemasaran di tingkat petani terutama komoditas padi; dan ketersediaan anggaran.[12]

Di sisi lain, sektor pertanian pangan lekat dengan sarana dan prasarana penunjang yakni pengairan. Di Kalimantan Selatan, hingga tahun 1989 dari sekitar lebih 400 ribu hektar areal persawahan dan 300 ribu hektar non persawahan, hanya sedikit yang memiliki pengairan. Data yang diperoleh menunjukkan di wilayah persawahan, hanya ada lebih dari 5.000 hektar yang memiliki pengairan teknis; 4.000 hektar lebih pengairan setengah teknis; dan pengairan sederhana PU seluas lebih 11.000 hektar. Jika dibandingkan dengan luas keseluruhan arealnya, hal ini menampilkan suatu keadaan bahwa fasilitas pengairan di Kalimantan Selatan masih belum mencukupi. Fasilitas pengairan dianggap salah satu

10 Tim Penulis, *Wajah Kalimantan Selatan 1989* …, hlm. 51.

11 Areal atau lahan tidur merupakan lahan pertanian yang sudah tidak digunakan selama lebih dari dua tahun dan merupakan bagian dari sistem ladang berpindah.

12 Tim Penulis, *Wajah Kalimantan Selatan 1989* …, hlm. 52.

faktor penunjang yang diperlukan sebab pengairan dapat membantu meningkatkan produksi usaha di sektor pertanian. Pengairan dianggap penting tidak hanya untuk pengembangan usaha tani, namun juga dalam hal intensifikasi. Oleh sebab itu, guna mendukung upaya pelestarian dan peningkatan produksi beras di Kalimantan Selatan, saat itu perlu dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, perluasan areal tanaman pada "areal tidur" dengan cara meningkatkan intensitas tanaman yang tentunya harus diiringi dengan upaya intensifikasi. Kedua, peningkatan mutu intensifikasi yakni dengan meningkatkan kualitas setiap tingkat intensifikasi khusus.[13]

Dalam perkembangannya sektor pertanian berjalan bukan tanpa hambatan. Sejak dimulainya eksploitasi tambang batu bara, telah menciptakan pencemaran terhadap Sungai Balangan yang berdampak terhadap kebutuhan air bagi masyarakat dan juga terhadap pertanian. Eksploitasi batu bara yang dilaksanakan oleh para perusahaan tambang mengakibatkan sungai keruh kecoklatan tidak seperti sebelumnya yang masih jernih. Berkaitan dengan ini, Gubernur Kalimantan Selatan, H. M. Said (1994) memberikan teguran kepada pihak perusahaan sekaligus menugaskan Tim Koordinasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (TKP2LH) dari Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Wilayah Daerah (Setwilda) Provinsi Kalimantan Selatan untuk meninjau ke lapangan. Tim ini diketuai oleh Eddy Rosasi, Asisten III Setwilda Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa benar terjadi pencemaran sebagaimana dikeluhkan warga masyarakat. Diketahui bahwa perusahaan telah membuat empat *lagoon* (sumur penampungan) guna memproses limbah batu bara, namun dari sumur-sumur itu kemudian dialirkan ke Sungai Panangkaran dan Sungai Balida yang merupakan anak Sungai Balangan.[14]

13 Tim Penulis, *Wajah Kalimantan Selatan 1989* …, hlm. 53.

14 Kompas, "Sungai Balangan di Kalimantan Selatan Tercemar Limbah Batu Bara", 19 Maret 1994.

Gambar 5.1. Panen Raya dalam Rangka Swasembada Beras Kalimantan Selatan
Sumber: Tim Penulis. 1989. *Wajah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Sekretariat Wilayah Daerah

Selain pertanian, sektor potensial lain di Kalimantan Selatan adalah perikanan. Hal ini mengingat bahwa wilayah Kalimantan Selatan memiliki daerah perairan rawa dan pantai yang sangat luas sehingga berpotensi bagi diupayakannya perikanan darat maupun laut. Hasilnya tidak saja cukup untuk memenuhi kebutuhan ikan di daerah, tetapi juga kelebihannya dapat dikirim ke luar untuk memenuhi kebutuhan ikan di daerah lain. Akan tetapi, hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan maupun hutan yang diperdagangkan tidak mudah dan segera dapat sampai ke konsumen. Keadaan ini tentu kurang menguntungkan bagi perkembangan perekonomian rakyat di daerah lantaran infrastruktur yang kurang mendukung. Infrastruktur yang kurang difasilitasi dengan baik tersebut sebagaimana telah terjadi pada era pasca kemerdekaan sampai tahun 1950-an. Saat itu jalan-jalan di daerah Kalimantan Selatan yang dapat dianggap baik kondisinya hanyalah jalan raya Banjarmasin–Hulu Sungai sepanjang 290 km dan jalan antara Banjarmasin dan Pleihari sepanjang 130 km. Adapun jalan lain selebihnya keadaannya sangat buruk sehingga memerlukan perbaikan yang segera. Dalam kondisi yang demikian ini maka sungai, terusan, dan danau menjadi jalur-jalur air yang tetap penting fungsinya untuk pengangkutan berbagai jenis komoditas.[15]

15 M. Idwar Saleh, dkk., *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan...*, hlm. 129.

Gambar 5.2. Kakap Merah Ekspor
Sumber: Tim Penulis. 1989. *Wajah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Sekretariat Wilayah Daerah

Gambar 5.3. Anak Itik Alabio
Sumber: Tim Penulis. 1989. *Wajah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Sekretariat Wilayah Daerah

Pada sektor perikanan, baik perikanan darat maupun perikanan laut, daerah Kalimantan Selatan dianggap sebagai daerah produsen yang cukup besar. Kalimantan Selatan selain memiliki daerah perairan rawa juga mempunyai daerah perairan pantai yang cukup panjang. Umumnya penduduk yang menghuni daerah pantai itu bermatapencaharian sebagai nelayan. Perkampungan mereka berada di sepanjang pantai-pantai yang ada. Kabupaten Pulau Laut dan Tanah Laut merupakan daerah penghasil ikan laut potensial Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun daerah perikanan darat (mencakup perairan sungai, danau, dan rawa) merata terdapat di semua daerah. Untuk mengetahui bagaimana luasnya wilayah potensial sektor perikanan, tabel di bawah memperlihatkan luas areal tangkapan ikan darat di Kalimantan selatan pada tahun 1972.

Di lain pihak, sektor lain yang juga turut berkembang di Kalimantan Selatan adalah peternakan. Sektor peternakan juga tidak kalah pentingnya bagi perekonomian rakyat di Kalimantan Selatan. Di daerah ini hewan-hewan seperti kerbau, kambing, ayam, terutama itik diternakkan dan menjadi mata pencaharian masyarakat. Daerah Alabio terbilang terkenal dan menjadi sentra peternakan itik Kalimantan Selatan. Di daerah ini tidak sedikit penduduk yang bermatapencaharian sebagai peternak itik terutama untuk menghasilkan telurnya. Alabio menjadi daerah penyuplai telur itik ke daerah-daerah lain. Perkembangan ternak itik Alabio bahkan

Tabel 5.3.
Areal Perairan Perikanan Darat Kalimantan Selatan Tahun 1972 (dalam ha)

No.	Kota/Kabupaten	Rawa	Danau	Sungai	Genangan	Jumlah
1.	Banjarmasin	2.000	1.500	5.000	2.348	10.848
2.	Banjar	127.000	5.000	37.310	55.000	222.500
3.	Tapin	55.150	8.175	38.960	11.750	114.075
4.	Hulu Sungai Selatan	62.000	25.000	25.000	23.161	135.161
5.	Hulu Sungai Tengah	15.000	14.000	15.000	24.267	78.767
6.	Hulu Sungai Utara	7.000	49.000	58.000	28.840	177.840
7.	Tabalong	17.000	--	10.000	10.000	37.000
8.	Barito Kuala	174.000	21.500	42.500	90.200	378.000
9.	Tanahlaut	45.000	17.500	22.500	15.000	100.000
10.	Kotabaru	66.250	26.500	139.000	13.250	265.000
Jumlah		**570.400**	**168.175**	**393.270**	**273.816**	**1.519.191**

Sumber: M. Idwar Saleh, dkk, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Depdikbud, 1978), hlm. 136.

sudah dilakukan sejak periode sebelum-sebelumnya, misalnya pada masa sebelum pendudukan Jepang, diketahui total ekspor telur Kalimantan Selatan melalui pelabuhan Banjarmasin separuhnya berasal dari daerah Alabio. Ketika itu ekspor telur ke tempat-tempat di luar Alabio berjumlah 3.055.055 butir telur segar dan 1.727.300 butir telur asin, yang keseluruhannya mencapai nilai *f*56.093.[16]

Dari masa ke masa, potensi ekonomi lain yang begitu masyhur di Kalimantan Selatan berada pada sektor perkebunan. Seperti yang telah diceritakan pada bab-bab sebelumnya, sektor perkebunan yang terpenting bagi daerah Kalimantan Selatan adalah perkebunan karet. Dalam uraian-uraian terdahulu diketahui bahwa karet terkait dengan harganya sangat fluktuatif. Mengambil contoh kasus yang terjadi tahun 1952 misalnya, harga karet di pasaran dunia kembali merosot. Akibatnya pada waktu itu banyak rumah asap yang terpaksa tutup untuk menghindari kerugian

16 B. Schuitemakker. 1938. "Korte Schets van den Landbouw in het Oosmoesson Rijstggebied in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo" dalam Vereeniging van Landbouwconsulenten in Nederlandsc-Indie, "Landbouw" Landbouwkundig Tijschrijft voor Nederlandsch-Indie, Veertiende Jaargang 1938, (Buitenzorg: Archipel Drukkerij, 1938), hlm. 770 dan M. Idwar Saleh, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 131–132.

yang lebih besar. Rendahnya harga karet mengakibatkan turunnya pendapatan para petaninya yang berujung pada tekanan ekonomi bagi para keluarga petani karet. Karet di Kalimantan Selatan diakui sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian rakyat secara keseluruhan. Namun demikian, karet masih terus diusahakan oleh rakyat. Jika harga karet sedang kurang menguntungkan, rakyat masih bisa menyelingnya dengan menanam tanaman lain atau mencari hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[17]

Sejak pemerintahan Hindia Belanda, regulasi mengenai perkebunan karet banyak mengalami perubahan hingga masa pemerintahan Orde Baru berakhir. Selain itu, banyak pihak juga terlibat di dalam urusan karet. Berbagai hal diatur, baik menyangkut kualitas dan kualifikasi, perkebunan, dan pengolahan. Pada 5 November 1968 misalnya Menteri Perdagangan mengeluarkan keputusan mengenai larangan bahan-bahan ekspor karet *lower-grade*. Dalam hal ini pihak BI Banjarmasin pun turut mencermati surat keputusan itu dan menilai sebagai pukulan terhadap dunia perdagangan karet di daerahnya. Meskipun Kalimantan Selatan hanya berada pada urutan kelima dalam menghasilkan karet rakyat, namun tidak urung para pengusaha karet khususnya para pemilik *remilling* sangat merasakan dampaknya. Tujuan keputusan menteri adalah untuk meningkatkan mutu barang ekspor dan menimbulkan efek yang luas di dalam perdagangan luar negeri Indonesia. Berdasar laporan Oesman Ibrahim Kepala Kantor Cabang BI Banjarmasin bahwa keputusan Menteri Perdagangan itu berakibat pada:[18]

1) Ditutupnya hampir seluruh pabrik *remilling* (rumah asap), yakni dari yang semula ada 22 rumah asap produktif tinggal lagi 2–3 buah saja yang masih dapat bertahan dan dapat menghasilkan *smoked blankets* dengan mutu lebih tinggi dari pada *flatbarkrepe*;
2) Sosial ekonomi, yakni munculnya pengangguran yang pada gilirannya meningkatkan kriminalitas;
3) Berkurangnya ADO (Alokasi Devisa Otomatis) yang akan menghambat kelancaran usaha pembangunan daerah;

17 M. Idwar Saleh, dkk, *Op.Cit.*, 1978, hlm. 133.

18 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Kepala Kantor Cabang BI Banjarmasin 15 Maret 1969*, hlm. 5.

4) Penghasilan daerah berupa pajak dan pungutan resmi lainnya menurun; dan

5) Pemasukan pemerintah berasal dari menghitung pajak orang (MPO) dan bea-bea masuk serta pemasukan devisa merosot sehingga dapat memengaruhi Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan neraca perdagangan Indonesia.

Dalam laporan Oesman Ibrahim disampaikan pula bahwa realisasi ekspor karet Kalimantan Selatan di tahun 1968 mencapai $14.084.000. Dalam hal ekspor ini peranan terbesar dipegang oleh Bank Dagang Negara yaitu $6.079.000 kemudian berturut-turut oleh BNI 1946 sebesar $4.163.000, Bank Exim sebesar $1.850.000, Bank Bumi Daya sebesar $1.567.000, dan BI sebesar $425.000. Realisasi ekspor karet untuk bulan Januari 1969 tercatat sebesar $1.095.000 dan pada bulan Februari 1969 sebesar $1.195.000. Adapun peran BI pada konteks ini bersifat pembagian produksi.[19]

Dalam perkembangannya, luas perkebunan karet berdasarkan perkiraan tahun 1972 per daerah tingkat II di Provinsi Kalimantan Selatan tergambar di dalam tabel sebagaimana berikut.

Tabel 5.4.
Luas Perkebunan Karet Kalimantan Selatan Tahun 1972 (dalam ha)

No.	Kota/Kabupaten	Luas
1.	Banjarmasin	13
2.	Banjar	6.645
3.	Tanahlaut	481
4.	Barito Kuala	1.067
5.	Tapin Hulu	3.802
6.	Hulu Sungai Selatan	6.987
7.	Hulu Sungai Tengah	16.131
8.	Hulu Sungai Utara	11.200
9.	Tabalong	22.845
10.	Kotabaru	5.027

Sumber: M. Idwar Saleh, dkk, Sejarah Daerah Kalimantan Selatan, (Jakarta: Depdikbud, 1978), hlm. 137

19 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Kepala Kantor Cabang BI Banjarmasin 15 Maret 1969*, hlm. 6.

Dari tabel tersebut diperoleh gambaran bahwa pada tahun 1972 di antara wilayah-wilayah di atas, Tabalong menjadi wilayah dengan luas perkebunan karet paling luas di Kalimantan Selatan yakni 22.845 ha. Disusul kemudian oleh Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara. Sementara Banjarmasin menjadi wilayah dengan luas perkebunan karet paling kecil dibanding lainnya.

Sejak zaman kerajaan pun, pengalaman di bidang pemerintahan dan luasnya akses orang Banjar ke luar daerahnya tidak dapat digunakan untuk menggambarkan kemajuan ekonomi rakyat di wilayah dengan luas 3.753.052 hektare itu. Namun demikian, kemapanan masyarakat dalam pengelolaan perkebunan menjadi kebanggaan Kalimantan Selatan. Selain itu, kemapanan di bidang perkebunan membuat petani Kalimantan Selatan merasa puas dengan pekerjaan monokultur dan teknik budi daya yang diwarisi turun temurun sekalipun pada masa tertentu peremajaan tanaman menjadi terabaikan, begitu juga teknologi budi daya tidak berkembang hingga produksi merosot dari tahun ke tahun.

Pada perkembangan berikutnya, sebelum adanya pembenahan intensif, produksi karet di tahun 1986 mengalami penurunan. Produksi karet rakyat misalnya, merosot ke titik 10.450 ton dari hasil produksi 33.526 ton di tahun 1980.[20] Padahal produksi karet di masa awal Orde Baru pernah mengalami angka ekspor yang tinggi.

Seperti di masa-masa sebelumnya, selain berkegiatan sebagai petani perkebunan karet, penduduk di Kalimantan Selatan ada pula yang menekuni perkebunan tebu. Antara tahun 1982 sampai 2001 di provinsi ini sempat berdiri pabrik gula di Desa Ambungan Kabupaten Tanah Laut. Hal ini turut menyemarakkan sektor pertanian dengan dibukanya lahan-lahan perkebunan tebu yang dikerjakan oleh rakyat. Sayangnya oleh berbagai sebab pabrik gula dan perkebunan tebu di bawah pengelolaan PT Perkebunan Nasional XXIV–XXV itu resmi dilikuidasi oleh pemerintah pada tanggal 25 Oktober 2001.

Dalam persoalan perkebunan tebu, faktor kegagalan lebih disebabkan oleh tingkat kesulitan yang dialami petani dalam mengelola

20 M. Idwar Saleh, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 159.

kebunnya. Para petani di daerah Kalimantan Selatan tidak terbiasa bertani tebu, oleh karenanya pekerjaan menanam tebu merupakan hal baru bagi mereka. Terlebih berbeda dengan perkebunan karet rakyat yang lahannya memang dimiliki oleh rakyat, pada perkebunan tebu lahannya dimiliki oleh perusahaan dan seluruh petani hanya berfungsi sebagai pekerja atau buruh.[21] Hal serupa disampaikan oleh Mursyahbani (66)—seorang pensiunan BI Banjarmasin—yang menyatakan bahwa masyarakat di daerah Tanah Laut misalnya, umumnya bertani padi dan nelayan. Masyarakat di daerah itu sulit mengubah kebiasaannya dari petani padi dan nelayan menjadi petani tebu. Mereka jarang yang mau bekerja mengelola perkebunan tebu sehingga suplai tebu untuk kebutuhan pabrik gula kurang lancar dan optimal.[22]

Berhentinya pabrik gula Tanah Laut itu seperti mengulang nasib pabrik kertas Martapura yang terlihat lebih tragis karena beroperasi hanya dalam waktu jauh lebih singkat dari beroperasinya pabrik gula, yaitu antara 1970-an sampai dengan 1978. Usaha ini dapat dikategorikan termasuk pertanian karena bahan baku kertas berasal dari kayu jenis pinus atau agathis yang dapat dibudidayakan seperti halnya karet. Hingga kini masih ada peninggalan perkebunan pohon pinus yang terletak di wilayah Banjarbaru dan sangat dekat dengan berdirinya pabrik kertas Martapura yang sekarang lokasinya sudah menjadi areal Pasar Sekumpul Martapura dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Ratu Zalecha Martapura. Kebun pinus yang oleh masyarakat setempat disebut dengan "hutan pinus" dahulunya digunakan untuk menyuplai pabrik kertas, namun sesungguhnya, terutama jenis kayu agathis yang digunakan lebih banyak didatangkan dari daerah-daerah di Kalimantan Tengah. Areal hutan pinus itu sebagian masih dipertahankan dan sempat dalam status quo antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Akan tetapi, saat tahun 1970-an nampaknya telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru untuk

21 Disampaikan oleh Way Hudi Anden (pensiunan pegawai Kantor Perwakilan BI Prov. Kalimantan Selatan) pada kegiatan FGD Sejarah Lisan Penulisan Buku Sejarah dan Heritage KPwBI Kalimantan Selatan Rabu, 18 Agustus 2021.

22 Disampaikan oleh Mursyahbani (pensiunan pegawai Kantor Perwakilan BI Prov. Kalimantan Selatan) pada kegiatan FGD Sejarah Lisan Penulisan Buku Sejarah dan Heritage KPwBI Kalimantan Selatan Rabu, 18 Agustus 2021.

pengelolaannya. Pabrik kertas sebagaimana disebutkan resminya berdiri pada 1 April 1974 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1974 dan secara resmi pula pemerintah mengambil keputusan membubarkannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1978 tertanggal 23 September 1978.

EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PERTANIAN

Pada tahun 1960-an pemerintah memberikan perhatian lebih dalam perbaikan dan pengembangan di sektor pertanian. Atas inisiatif Universitas Gadjah Mada (UGM) dibuatlah program Demonstrasi Massal (Demas) guna meningkatkan produksi hasil pangan. UGM dalam hal ini aktif membantu pemerintah pada pelaksanaan program Demas tahun 1964. Ketika itu UGM menerjunkan para mahasiswanya dari Fakultas Pertanian ke daerah-daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan program Demas. Program ini berisikan panca usaha pertanian, yang memberikan pemahaman tentang peningkatan produksi padi kepada masyarakat. Panca usaha pertanian itu meliputi penyediaan bibit unggul, pemupukan, pengairan, pemberantasan hama, dan metode bercocok tanam yang lebih baik.

Program tersebut kemudian dipraktikkan di mana pada tahun 1965 sebanyak 128 mahasiswa tingkat Doktoral I dan Doktoral II dikerahkan untuk membantu program yang disebut Demas Swa Sembada Bahan Makanan (Demas SSBM) sebagai pelaksana utama. Para mahasiswa saat itu ditempatkan di 64 unit yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama enam bulan mereka berada di tengah-tengah masyarakat tani untuk membimbing pelaksanaan panca usaha pertanian yang luasnya mencapai 3.250 hektare.[23]

Selain meningkatkan produksi tani, program Demas juga bertujuan memperbaiki kesejahteraan hidup para petani. Program ini berhasil memberikan kenaikan hasil sebesar 100% hingga 300%. Pada tahun

23 Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada, "BIMAS, Perwujudan Panca Usaha Pertanian, 27 Maret 2022", https://pengabdian.ugm.ac.id/2020/03/27/bimas/.

yang sama, proyek ini ditingkatkan menjadi 11.000 unit dengan luas seluruhnya 55.500 ha di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mahasiswa yang dilibatkan dalam pengabdian masyarakat seperti ini diperluas dari berbagai fakultas, di antaranya Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Ekonomi. Mengingat program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para petani, program Demas kemudian diadopsi oleh pemerintah dan diubah namanya menjadi Bimbingan Massal (Bimas).[24]

Meskipun program Bimas berhasil meningkatkan produksi padi, namun para petani nampak masih kesulitan dalam pengembalian kredit yang diberikan pemerintah. Pada tahun 1969 Prof. Ir. Soedarsono Hadisapoetro (Guru Besar Fakultas Pertanian UGM) mengajukan konsep perbaikan pelaksanaan Bimas yang disempurnakan dengan Unit Desa. Konsep yang diberikannya menekankan kegiatan-kegiatan di pedesaan meliputi percontohan, penyuluhan, penyaluran sarana produksi (saprodi), perkreditan, dan pemasaran yang kesemuannya ini tidak ditangani oleh satu badan.

Konsep Unit Desa ini terdiri dari 18 unit yang masing-masing meliputi lahan sawah seluas 600–1.000 ha. Setiap wilayah Unit Desa dilengkapi dengan yang disebut Catur Sarana Unit Desa, seperti Kios Sarana Produksi, BRI Unit Desa, Penyuluhan Unit Desa (PUD), dan Koperasi Unit Desa (KUD). Kios Sarana Produksi berfungsi menyediakan pupuk, pestisida, bibit, dan peralatan pertanian lainnya. Sehingga tugas utama bagi mahasiswa yang menjadi petugas Bimas adalah melakukan penyuluhan dan meyakinkan masyarakat akan pentingnya program pemerintah itu.[25]

Metode Bimas tidak saja kemudian terkenal di Indonesia, tetapi juga di negara-negara tetangga dan negara lainnya sebagai pendekatan terpadu dalam upaya peningkatan produksi beras. Metode Bimas kemudian diterapkan pula pada berbagai komoditas seperti palawija, ayam ternak dan potong, industri kecil, dan lain-lain. Namun, pelaksanaan yang paling lengkap adalah pada tanaman padi. Maka yang lebih dikenal adalah bahwa metode Bimas merupakan metode penyediaan sarana produksi padi yang lengkap dan penyuluhan-penyuluhannya, sehingga

24 Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada, *Op.Cit*.

25 *Ibid.*

keseluruhannya mencakup apa yang dikenal dengan "Panca Usaha". Keterpaduan dalam penyediaan dan pengaturan kelima sarana itulah merupakan kunci keberhasilan Bimas. Sudah terbukti berulang kali bahwa kekurangan dalam satu atau lebih sarana produksi akan mengurangi efisiensi dan efektivitas sarana produksi lainnya.[26]

Keberhasilan program Bimas dalam produksi harus diikuti dengan pengaturan pemasaran, termasuk hal pengolahan dan kebijaksanaan harga. Masalah kebijaksanaan harga dan organisasi pemasaran ini sudah banyak dibahas oleh para ahli ekonomi pertanian. Namun, yang perlu ditekankan bahwa sistem Bimas memungkinkan dikoordinasikannya banyak instansi teknis, ekonomi, sosial dan politik, untuk mendukung dan menjamin keberhasilan program-programnya. Selain itu, perlunya sebuah keterpaduan antara pembangunan desa dan pembangunan pertanian. Sejak awal, Bimas sudah menekankan upaya meningkatkan produksi beras yang menjadi permasalahan utama di tingkat nasional di akhir tahun 1960-an dalam upaya mencukupi kebutuhan pangan penduduk.[27]

Dalam catatan Mubyarto, desa-desa di Kalimantan pada umumnya dan Kalimantan Selatan khususnya, dikenal dengan adanya empat macam pola usaha tani, yaitu:

1) Pola usaha tani perladangan, yang berpindah ke usaha tambahan perkebunan karet, mencari hasil hutan, perikanan, pertambangan, dan ternak. Pola usaha tani seperti itu terutama terdapat di daerah Hulu Sungai;
2) Pola usaha tani perikanan, khususnya perikanan darat (sungai dan danau) dengan usaha sampingan perladangan, mencari hasil hutan, ternak, dan perkebunan. Desa-desa yang demikian terdapat di daerah-daerah tepian seperti Sungai Barito, Martapura, dan Negara;
3) Pola usaha tani tanaman pangan pasang surut dengan usaha tambahan dari sektor perkebunan, perikanan, dan peternakan. Pola semacam ini terdapat misalnya di daerah Martapura dan Amuntai; dan

26 Mubyarto dan Sartono Kartodirdjo, *Pembangunan Pedesaan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberti dan P3PK UGM, 1988), hlm. 55–56.

27 *Ibid.*

4) Pola usaha tani perkebunan inti rakyat (PIR) dengan usaha tambahan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan industri kerajinan rumah tangga. Pola usaha tani seperti ini hadir di desa-desa atau kelurahan di Martapura, Amuntai, dan Kandangan.[28]

Namun, program Bimas yang dirintis pemerintah dan bekerja sama dengan UGM saat itu belum menyentuh daerah luar Jawa Tengah dan DIY. Meskipun demikian, Kalimantan Selatan juga telah memiliki program memajukan sektor pertaniannya. Untuk itu, pada masa di penghujung kekuasaan Orde Lama, Penguasa Perang Daerah (Peperda) Kalimantan Selatan berinisiatif mengeluarkan perintah operasi dengan nama "Operasi Gawi Sabumi" (OGS) yang maknanya kurang lebih adalah gotong royong. Isi OGS adalah menetapkan garis-garis besar pelaksanaan mencapai target produksi pangan di tahun 1965. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5.
Kebutuhan Bahan Pangan Kalimantan Selatan (dalam ton)

No.	Bahan Pangan	Produksi 1964	Target Produksi 1965
1.	Padi kering	386.507,67	408.946,00
2.	Jagung pilil	4.519,57	4.000,00
3.	Ubi kayu	46.295,83	100.000,00
4.	Ubi jalar	13.637,50	17.000,00
5.	Kacang tanah	3.025,55	2.000,00
6.	Kacang kedele	276,74	600,00
7.	Kacang hijau	115,55	240,00
8.	Sayuran daun hijau	58,40	59,00
9.	Sayuran buah kuning	689,15	953,00
10.	Sayuran lainnya	724,10	1.975,00
11.	Buah-buahan	2.031,50	2.313,00
12.	Ikan basah	46.605,150	74.045,00
13.	Daging	862, 753	1.593,65
14.	Telur	2.225,941	4.510,69
15.	Susu	86,004	86.04
16.	Gula	--	19.583,64
17.	Minyak goreng	--	11.913,31
18.	Garam	--	20.413,16

Sumber: Arsip Bank Indonesia, *Laporan R. Soewigno Soerjokoesoemo Pimpinan Cabang BI Banjarmasin 4 Mei 1965 Pada Konferensi Kerja Pimpinan Cabang 4-8 Mei 1965*, hlm. 7–8.

28 Mubyarto, dkk., *Desa-Desa Kalimantan*, (Yogyakarta: Aditya Media dan P3PK UGM, 1993), hlm. xvii.

Pada pelaksanaannya, rencana yang terperinci dibuat oleh masing-masing pimpinan jawatan, dinas, badan, perusahaan, dan instansi bersangkutan. Terkait sandang-pangan, Kepala Cabang BI Banjarmasin berpandangan perlunya data jumlah penduduk yang membutuhkannya. Berdasarkan hasil sensus 1961 dan pertambahan penduduk yang diperkirakan bertambah 2,3% per tahun, maka menurutnya penduduk Kalimantan Selatan pada akhir tahun 1965 adalah 1.631.922 jiwa atau sekitar 1.632.000 jiwa.[29]

R. Soewigno Soerjokoesoemo selaku Kepala Cabang BI Banjarmasin pada tahun 1965 melaporkan mengenai proyek-proyek penting yang dikerjakan di Kalimantan Selatan, di antaranya yang menyangkut pertanian pangan, yaitu proyek dari PN Mekatani III Pulau Beruang Kabupaten Banjar. PN Mekatani III Pulau Beruang merupakan proyek dari Departemen Pertanian dan Agraria bidang produksi pangan. Cakupan kegiatannya selain pertanian pangan ternyata juga mencakup pertanian komersial (karet). Pada tahun 1964 kegiatan itu meliputi kegiatan penanaman: 1) padi di daerah tanah kering seluas 530 ha; 2) jagung seluas 14 ha; 3) kacang tanah seluas 10 ha; 4) jahe seluas 1,5 ha; 5) serai seluas 8 ha; 6) karet seluas seluas 600 ha; dan 7) pembibitan karet seluas 4 ha.[30]

Selain itu, proyek PN Mekatani III Pulau Beruang juga melakukan kegiatan sampingan seperti: 1) pembukaan tanah rakyat seluas 859 ha; 2) perusahaan penggilingan padi di Sungai Tabuk dan Sarang Halang; 3) perusahaan kapur; 4) perbengkelan; dan 5) pengangkutan. Kegiatan sampingan ini bertujuan mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk menutupi biaya-biaya eksploitasi. Akan tetapi, pada tahun 1964 hasilnya belum optimal.[31]

Dalam percobaan mekanisasi pertanian yang dilakukan oleh PN Mekatani III Pulau Beruang dengan menggunakan traktor di lahan basah hanya dapat dilakukan pada saat musim kering dan menunjukkan

29 Arsip Bank Indonesia, *Laporan R. Soewigno Soerjokoesoemo Pimpinan Cabang BI Banjarmasin 4 Mei 1965 pada Konferensi Kerja Pimpinan Cabang 4–8 Mei 1965*, hlm. 7.

30 *Ibid.*, hlm. 10.

31 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Cabang BI Banjarmasin pada Konferensi Kerja Pimpinan Cabang, 4–8 Mei 1965*, hlm. 10.

akan adanya kemungkinan mendapatkan kenaikan produksi sebesar 40%. Sementara itu, pilot proyek yang dilaksanakan di Desa Gagas dengan melibatkan 15 kepala keluarga menggunakan sistem kolektif menunjukkan adanya kemungkinan yang baik untuk transmigrasi di lahan kering. Meskipun demikian, secara keseluruhan proyek PN Mekatani III Pulau Beruang menurut penilaian Kepala Kantor Cabang BI Banjarmasin masih jauh dari harapan yang disebabkan oleh berbagai kendala seperti *spareparts* peralatan mekanik yang terbatas, begitupun dengan bahan bakar dan pelumas serta peralatan-peralatan yang kurang cocok dengan keadaan tanah setempat. Kendala lainnya menyangkut sumber daya manusianya yang juga terbatas serta penggajian yang rendah. Anggaran dari pusat yang disetujui jauh di bawah dari yang diajukan dan lambat pencairannya.[32]

Perkembangan penting di sektor pertanian terjadi pada masa Orde Baru ketika pada tahun 1970-an pemerintah mengambil kebijakan menerapkan konsep revolusi hijau (*Green Revolution*) yang telah diperkenalkan oleh Norman Barlaog tahun 1968. Melalui program ini, Presiden Soeharto menekankan ketersediaan bahan pangan dalam rangka menciptakan stabilitas dalam proses pembangunan nasional. Revolusi hijau dapat disebut dengan gerakan perubahan di bidang pertanian. Perubahan yang dilakukan adalah perubahan dari cara menanam, penggunaan alat, dan lainnya. Beberapa langkah yang diadakan dalam mengimplementasikan revolusi hijau adalah sebagai berikut. *Pertama*, program Bimas merupakan pelaksanaan kegiatan penyuluhan bertujuan meningkatkan hasil produksi pertanian. *Kedua,* program Intensifikasi Massal (Inmas) sebagai tahapan lanjutan dari program Bimas. Program Bimas ini difokuskan pada pengolahan tanah, irigasi, hingga pengendalian hama penyakit.

Dalam rangka mendorong upaya peningkatan produksi pertanian, pemerintah juga menerapkan program ekstensifikasi dan intensifikasi. Kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian pada dasarnya ditujukan untuk mendukung upaya mempertahankan kemandirian

32 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Cabang BI Banjarmasin pada Konferensi Kerja Pimpinan Cabang, 4–8 Mei 1965*, hlm. 10.

di bidang pangan, khususnya beras, dan menunjang peningkatan produksi pertanian lainnya, dengan tersedianya berbagai prasarana dan sarana yang baik. Satu di antaranya adalah tersedianya jaringan irigasi. Pada tahun pertama Repelita VI Pemerintah Orde Baru melaksanakan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 85 ribu hektare pada lahan tadah hujan maupun pembukaan lahan baru, antara lain di daerah irigasi Komering di Sumatra Selatan, Riam Kanan di Kalimantan Selatan, Pengga di NTB, Lembor dan Mautenda di NTT, Langkeme dan Bila di Sulawesi Selatan. Pembangunannya meliputi saluran primer dan saluran sekunder sepanjang 690 km, bendungan 39 unit, serta pencetakan sawah baru seluas 30 ribu hektare.[33]

Program itu ditujukan untuk menyediakan lahan produksi, baik untuk pertanian maupun perikanan darat, melalui pengaturan tata air daerah rawa. Lahan reklamasi rawa selain dimanfaatkan bagi areal produksi tanaman pangan, khususnya di lokasi transmigrasi, di beberapa lokasi juga dikembangkan untuk tanaman perkebunan, seperti kelapa sawit dan kelapa hibrida. Pada tahun pertama Repelita VI dilakukan peningkatan tata saluran drainase rawa pasang surut dan rawa non pasang surut seluas 113 ribu hektare, terdiri atas peningkatan saluran primer dan saluran sekunder sepanjang 714 km, antara lain di daerah Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Irian Jaya. Dalam perkembangannya, areal tebu rakyat intensifikasi di Kalimantan Selatan tahun 1989 seluas 5.656 ha, tahun 1990 seluas 5.665 ha, tahun 1991 seluas 5.296 ha, tahun 1992 seluas 6.252 ha, tahun 1993 seluas 6.188 ha, dan tahun 1994 seluas 6.738 ha.[34]

Penerapan teknologi pertanian modern di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari penggunaan masukan-masukan produksi yang berenergi tinggi seperti varietas unggul, pupuk buatan, pengairan, pertisida, dan mekanisasi. Tanpa digunakannya masukan produksi itu sasaran produksi tinggi tidak akan tercapai. Penerapan teknologi pertanian modern di Indonesia diwujudkan dalam usaha intensifikasi yang secara operasional

33 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Cabang BI Banjarmasin pada Konferensi Kerja Pimpinan Cabang, 4–8 Mei 1965*, hlm. 10.

34 *Ibid.*

Gambar 5.4. Perkebunan Kelapa Sawit

Sumber: Tim Penulis. 1989. *Wajah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Sekretariat Wilayah Daerah

dalam bentuk program Bimas, Inmas, kemudian program Insus (Intensifikasi Khusus). Penerapan teknologi itu tidak hanya pada tanaman pangan saja tetapi juga pada komoditas perkebunan. Menurut data statistik Bimas pada 1970–1979 rata-rata produksi padi meningkat 1,3 kali sedangkan penggunaan varietas unggul meningkat lima kali, penggunaan pupuk nitrogen meningkat 3,5 kali, dan penggunaan pestisida meningkat sampai tujuh kali.[35]

Melihat perkembangannya, ekstensifikasi dan intensifikasi di sektor pertanian yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasilnya pada paruh kedua tahun 1980-an. Pada tahun 1980–1990-an Kalimantan Selatan kembali berhasil menjadi daerah surplus beras yang mampu menyuplai daerah-daerah lain. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ir. H.M. Said selama 10 tahun terakhir, Kalimantan Selatan dengan susah payah mencoba bangkit.

Sudah tentu untuk tanaman padi, di mana Kalimantan Selatan pernah mengalami surplus beras yang berkualitas sangat baik. Pada tahun 1989/1990 produksi padi mencapai 924.445 ton dan meningkat

35 Alumnus Fak. Pertanian UGM, *Sistem Pertanian Hemat Energi*, (Yogyakarta, 1981), hlm. 2–3.

dalam waktu lima tahun menjadi 1.200.848 ton. Jumlah stok padi surplus 339.658 ton dari kebutuhan lokal 861.190 ton yang disuplai untuk provinsi tetangga dan cadangan nasional. Meski demikian, sekalipun terjadi perkembangan pendapatan per kapita yang menggembirakan dari Rp696.872 (1989) menjadi Rp1.004.304 (1992), namun kecemasan tetap ada. Pertumbuhan penduduk yang rata-rata 2,32% per tahun menjadi beban berat bila dilihat dari keterbatasan sumber daya alam dan lahan di provinsi ini. Di lain pihak, lahan seluas 1,7 juta hektare yang belum diusahakan, sebagian merupakan daerah kritis berupa padang ilalang dan semak.

Pada komoditas lainnya, karet kembali menjadi komoditas utama daerah Kalimantan Selatan di tahun 1993 yang mencapai angka produksi 45.814 ton, meski masih lebih rendah dibanding tahun 1989 yaitu 51.139 ton. Peningkatan berarti juga terjadi pada komoditas kelapa, kopi, cengkeh, lada, tebu, kakao, dan casiavera. Kecuali rosella yang turun dari 911 ton (1989) menjadi hanya 452 ton (1993). Pada tahun 1994, sedikitnya ada tiga investor besar turun ke kawasan timur Kalimantan Selatan. Mereka terjun di bidang kehutanan, industri besi baja, dan semen dengan total investasi Rp3,5 triliun. Sebelumnya, sudah ada investor swasta nasional dan asing yang bergiat di perkebunan kelapa sawit, kelapa hibrida, hutan tanaman industri, dan penambangan batu bara.

Kelebihan prasarana perhubungan yang dimiliki Kalimantan Selatan jika dibandingkan tiga provinsi lainnya di Kalimantan, merupakan modal dasar untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan membuat daya tarik para investor. Berdasarkan data, tiap 100 km^2 luas wilayahnya ada sekitar 4,6 km jalan yang mudah dilalui kendaraan roda empat atau mendekati angka rata-rata nasional yaitu 4,8 km. Selain tiga provinsi lainnya, kondisi Kalimantan Selatan lebih baik. Kalimantan Barat luas jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat baru sekitar 1,0 km; Kalimantan Tengah 0,5 km; dan Kalimantan Timur 0,4 km per 100 km^2 wilayah.

Pada tahun 1995 Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan telah menuntaskan program semua desa bisa dijangkau minimal dengan kendaraan roda dua. Kecuali menuntaskan 568 desa miskin yang sangat berkaitan dengan masalah pertanahan. Seperti dikemukakan Gubernur HM Said, penyediaan lahan untuk berbagai keperluan terkendala oleh

sudah teralokasikannya lahan bagi perkebunan besar dan hutan tanaman industri (HTI). Sementara lahan yang tersisa kebanyakan berupa rawa dan lahan kritis yang lokasinya tidak berada dalam satu kesatuan. Soal yang tak kalah pelik adalah keterbatasan penyediaan bahan baku bagi industri perkayuan di Kalimantan Selatan. Wilayah ini hanya memiliki hutan yang bisa menghasilkan 700.000 m^3, sementara kebutuhan bahan baku industri 4,5 juta m^3 per tahun. Ketimpangan itu merupakan pemicu merajalelanya tebangan liar.[36]

Ketersediaan prasarana transportasi yang jauh menjangkau pedesaaan menjadi modal dasar untuk terus meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang berbasis sektor pertanian pangan, peternakan, perkebunan, dan industri. Di sini, peluang yang semakin terbuka adalah memantapkan potensi produsen hortikultura yang secara tradisional sudah memasok kebutuhan provinsi tetangga, terutama kota-kota di Kalimantan Timur.

PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN PERAN KANTOR CABANG BANK INDONESIA BANJARMASIN

Menyusul berkuasanya pemerintahan Soeharto pada tahun 1967, Indonesia memasuki masa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik yang meningkat. Periode stabilitas yang relatif lebih kondusif ini menyebabkan diperkenalkannya sejumlah reformasi ekonomi struktural, termasuk di dalam sistem perbankan. Reformasi perbankan awal yang paling penting adalah pengesahan Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967. Undang-undang ini serta peraturan dan keputusan tambahan yang diperlukan untuk pelaksanaannya menciptakan kerangka peraturan bagi industri perbankan. Kerangka ini berlangsung hingga berlakunya UU Perbankan pada tahun 1992.[37] Kebijakan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah menyelenggarakan pembangunan di segala bidang, termasuk di bidang pertanian dan industri.

---

36 Kompas, "Kalimantan Selatan Melepaskan Diri dari Kemapanan", 24 Februari 1995.

37 Michael S. Bennet. Banking Deregulation In Indonesia, U.Pa. J.Int'l Bus.L., 1995, hlm. 455.

Di lain pihak, seiring perkembangannya Kantor Cabang Bank Indonesia Banjarmasin pun mengalami perubahan pimpinan dari masa ke masa. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.6.
Daftar Nama Kepala Kantor Cabang BI Banjarmasin

No.	Nama	Periode
1.	R. Soemartono	1958-1960
2.	E. A. Koetin	1960-1963
3.	H. P. Toar	1963-1964
4.	R. Soewigno Soerjokoesoemo	1964-1965
5.	R. K. Sastrodipoero	1965-1968
6.	Oesman Ibrahim	1968-1971
7.	W. T. Lunggono	1971-1972
8.	Sumatri Hadisuryatno	1972-1976
9.	Tom Hartono	1976-1981
10.	A. Bakri Pangoriseng	1981-1985
11.	Suryono Joyoprayitno	1985-1990
12.	Djedi	1990-1993
13.	Maskan Iskandar	1993-1998
14.	Suryanto	1998-2001
15.	M. Zaeni Aboe Amin	2001-2005
16.	Endoong Abdul Gani	2005-2007
17.	Bramudija Hadinoto	2008-2010
18.	Khairil Anwar	2010-2013
19.	Mokh. Dadi Aryadi	2013-2014
20.	Harymurthy Gunawan	2014-2018
21.	Herawanto	2018-2020
22.	Amanlison Sembiring	2020-2021
23.	Imam Subarkah	2021-sekarang

Sumber: Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pemimpin Cabang BI Banjarmasin* 1963 dan 1965; Arsip Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

Berbicara mengenai perkembangan perbankan di Kalimantan Selatan, pada laporan pimpinan cabang BI Banjarmasin tahun 1969, dalam

menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan bank-bank, hingga tahun tersebut jumlah perbankan dalam wilayah kerja BI Kalsel yang meliputi Provinsi Kalsel dan Kalteng di antaranya sebagai berikut.

Tabel 5.7.
Jumlah Perbankan di Wilayah Kerja Kantor Cabang BI Banjarmasin (Kalimantan Selatan)

Kalimantan Selatan				
Jenis Bank		Kantor Pusat	Kantor Wilayah (Cabang/Cabang Pembantu)	Jumlah
Dalam Kota Banjarmasin	Bank Pemerintah	-	11	11
	Bank Pembangunan Daerah (Kalimantan Selatan)	1	-	1
	Bank Swasta	4	1	5
	Bank Sekunder	2	-	2
Luar Kota Banjarmasin	Bank Pemerintah	-	13	13
	Bank Pembangunan Daerah	-	-	-
	Bank Swasta	-	1	1
	Bank Sekunder	-	-	-
Jumlah				**33**

Sumber: Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Cabang BI Tahun 1969*, hlm. 1

Tabel 5.8.
Jumlah Perbankan di Wilayah Kerja Kantor Cabang BI Banjarmasin (Kalimantan Tengah)

Kalimantan Tengah			
	Kantor Pusat	Kantor Wilayah (Cabang/ Cabang Pembantu)	Jumlah
Bank Pemerintah	-	8	8
Bank Pembangunan Daerah (Kalimantan Tengah)	1	-	1
Bank Swasta	-	-	-
Bank Sekunder	-	-	-
Jumlah			**9**

Sumber: Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Cabang BI Tahun 1969*, hlm. 1

Dari tabel di atas diketahui bahwa berdasarkan wilayah kerja Kantor Cabang BI Banjarmasin, jumlah keseluruhan bank yang beroperasi di Kalimantan Selatan sebanyak 33 bank yang terdiri atas bank pemerintah dan bank pembangunan daerah. Sementara di Kalimantan Tengah, sejumlah 9 bank beroperasi di wilayah tersebut dengan jenis bank yang sama dengan yang terdapat di Kalimantan Selatan, yakni bank pemerintah dan bank pembangunan daerah. Total keseluruhan bank yang beroperasi di wilayah kerja Kantor Cabang BI Banjarmasin selama tahun laporan tersebut ialah sebanyak 42 bank. Adapun rincian bank pemerintah yang terdapat dalam tabel di atas di antaranya Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Negara Indonesia 1946, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia. Sedangkan bank-bank swasta antara lain PT. Bank Dagang Indonesia, PT. Bank Swasta Indonesia, PT. Bank Kalimantan Tengah, PT. Bank Hasil Bumi, PT. Bank Antar Indonesia. Serta dua bank sekunder yakni Bank Pasar Kalimantan dan Bank Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di dalam Kota Banjarmasin.[38]

Dalam laporan tersebut disampaikan juga tentang perkembangan aktivitas lembaga perbankan di wilayah kerja BI Banjarmasin. Dari sejumlah bank yang hadir di wilayah tersebut, jenis bank yang memegang peran penting, baik dari segi pemupukan dana, pemberian kredit, maupun perputaran kliring, adalah bank-bank pemerintah yang mencatatkan angka pada masa Agustus 1968 s.d. Januari 1969 sebagai berikut.

Tabel 5.9.
Perolehan Bank-Bank Pemerintah di Wilayah Kerja Kantor Cabang BI Banjarmasin pada Agustus 1968 s.d. Januari 1969

Jenis	Jumlah
Giro	Rp257.909 ribu
Tabungan	Rp5.217 ribu
Deposito	Rp52.836 ribu
Pemberian Kredit	Rp558.380 ribu
Perputaran Kliring D	Rp3.589.259 ribu
Perputaran Kliring K	Rp4.410.781 ribu

Sumber: Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Cabang BI Tahun 1969,* hlm. 3.

38 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Cabang BI Tahun 1969*.

Sementara pada bank-bank swasta, dalam masa yang sama perolehan angka yang didapat tercatat pada tabel di bawah.

Tabel 5.10.
Perolehan Bank Swasta/Bank Pembangunan Daerah di Wilayah Kerja Kantor Cabang BI Banjarmasin pada Agustus 1968 s.d. Januari 1969

Jenis	Jumlah
Giro	Rp69.867 ribu
Tabungan	Rp441 ribu
Deposito	Rp5.488 ribu
Pemberian Kredit	Rp58.829 ribu
Perputaran Kliring D	Rp1.580.724 ribu
Perputaran Kliring K	Rp759.202 ribu

Sumber: Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Cabang BI Tahun 1969*, hlm. 3.

Perbedaan yang terlihat antara perolehan yang diraih oleh kedua jenis bank pada tabel di atas menunjukkan bahwa peran bank swasta/pembangunan daerah kurang menampilkan peran pentingnya. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya ruang gerak jenis bank tersebut sebagai akibat dari faktor-faktor modal, kapasitas aparat intern, dan potensi-potensi ekonomis masyarakat di daerah yang serba terbatas. Selain hal tersebut, sumber-sumber keuangan utama bank swasta saat itu pun tidak seelastis bank-bank pemerintah sehingga bank-bank swasta harus bekerja keras untuk memperoleh dan menarik dana dari masyarakat banyak.[39]

Jika melihat potensi kegiatan perdagangan di daerah Kalimantan Selatan, hampir seluruhnya berpusat pada perdagangan karet. Kegiatan potensial perdagangan di daerah itu terutama dititikberatkan pada bidang ekspor. Aktivitas perdagangan ekspor karet ditampung oleh bank-bank pemerintah yang telah ada. Dalam hal ini perdagangan karet di Kalimantan Selatan didukung oleh keberadaan bank-bank pemerintah yang memegang perannya dalam memberikan bantuan kredit. Jika dibandingkan dengan bank-bank swasta, fasilitas layanan yang dijalankan oleh bank-bank swasta di Kalimantan Selatan pada masa itu belum seperti apa yang dilakukan oleh bank-bank pemerintah.[40] Meskipun

39 Arsip Bank Indonesia, Laporan Pimpinan Cabang BI Tahun 1969.

40 *Ibid.* hlm. 2.

memang pada masa tersebut dari segi kebutuhan kredit, kegiatan ekspor belum dapat dijalani seoptimal mungkin oleh perbankan yang ada di Kalimantan Selatan, namun kebutuhan akan hadirnya bank-bank baru di wilayah tersebut belum dirasa perlu sebab masih mampu ditopang oleh keberadaan bank-bank pemerintah.[41]

Dalam perjalanannya, tentu terdapat rintangan berupa kesulitan-kesulitan umum yang dihadapi Kantor Cabang Bank Indonesia Banjarmasin selama masa beroperasi tersebut, di antaranya[42]:

a. Hubungan komunikasi yang minim. Terjadinya kendala dalam jaringan-jaringan perhubungan beserta fasilitasnya yang menghubungkan daerah antar daerah dan daerah dengan kantor pusat yang berjalan sangat lambat.
b. Keadaan masyarakat.
c. Kemampuan dalam bidang permodalan yang sangat terbatas. Para pemilik modal yang berdomisili di Kalimantan Selatan jumlahnya sangat sedikit. Di samping itu, para pengusaha yang mudah maju dan ingin melebarkan usahanya sering memindahkan kegiatan usahanya ke kota-kota yang lebih besar seperti Jakarta dan Surabaya.
d. Bank beserta fungsinya hanya dikenal di kota-kota besar dan kota pelabuhan saja.
e. Praktik penggunaan kredit yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kredit atau bank seringkali tidak sesuai dengan rencana yang telah disetujui semula yang sering menjurus ke usaha-usaha spekulatif.

Persoalan dan permasalahan yang dialami oleh perbankan di Kalimantan Selatan pada praktiknya telah melalui pembahasan dan diskusi yang kemudian diputuskan bersama. Sebagaimana tertulis pada laporan pimpinan cabang BI Banjarmasin, Oesman Ibrahim dalam laporan tersebut menerangkan bahwa aktivitas Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Selatan selama masa tersebut (1968/1969) cukup baik dan terus melakukan pertemuan secara berkala sebulan sekali. Pertemuan berkala ini pula yang kemudian terjalin kerja sama yang baik di antara para pimpinan bank beserta anggota-anggotanya. Badan Musyawarah

41 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Cabang BI Tahun 1969.,* hlm. 5.

42 *Ibid.*

Perbankan Daerah (BMPD) selalu bertindak atas nama perbankan daerah Kalimantan Selatan dalam menghadapi berbagai isu dan permasalahan di Kalimantan Selatan, maupun dengan pihak luar. Tak hanya sebatas pada lembaga perbankan di Kalimantan Selatan saja, BMPD juga diintensifkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan pihak non perbankan berupa pertukaran gagasan dengan instansi-instansi pemerintah dan perguruan tinggi. Kerja sama semacam ini dapat dilakukan dalam bentuk survei mengenai potensi perekonomian di suatu daerah yang selanjutnya diperoleh informasi untuk kemudian ditindaklanjuti dan melakukan *upgrading* yang bertujuan meningkatkan pengetahuan para karyawan-karyawan bank.[43]

Dalam perjalanannya, perkembangan perbankan begitu dinamis namun tak luput pula dijumpai persoalan yang melemahkan sistem perbankan. Dalam upaya mengatasi kelemahan sistem perbankan di Indonesia, pemerintah Indonesia dalam tahun 1980 memperkenalkan tiga reformasi perbankan besar di bawah BI. Reformasi yang dilakukan oleh BI meliputi: (1) penghapusan kontrol Bank Indonesia atas suku bunga simpanan dan pinjaman; (2) penghapusan pagu kredit bagi bank-bank BUMN; dan (3) menghapus praktik pendanaan bank-bank BUMN melalui kredit likuiditas pemerintah secara bertahap. Reformasi dimaksudkan untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih berorientasi pasar yang akan menarik lebih banyak dana domestik.[44]

Pada persoalan pinjaman, mengacu kepada laporan pemerintah yang dikemukakan Michael S. Bennet bahwa jenis-jenis kebijakan pemberian pinjaman yang tidak hati-hati yang diikuti oleh banyak bank di Indonesia meliputi: (1) melakukan sedikit atau tidak sama sekali investigasi terhadap calon peminjam; (2) meminjamkan tanpa jaminan tanpa memerlukan bukti yang memadai tentang kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjamannya; (3) gagal membatasi atau memantau penggunaan hasil pinjaman oleh peminjam; dan (4) "peminjaman memo" atau pinjaman atas dasar rekomendasi dari orang yang terkemuka atau memiliki hubungan politik yang baik.[45]

43 Arsip Bank Indonesia, *Laporan Pimpinan Cabang BI Tahun 1969*, hlm. 11.

44 Michael S. Bennet, *Op.Cit.*, 1995, hlm. 458–459.

45 *Ibid.,* hlm. 447.

Regulator utama industri perbankan Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Kementerian Keuangan memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur seluruh sistem keuangan Indonesia, termasuk sektor perbankan. Bank Indonesia adalah bank sentral negara dan pada prinsipnya bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan moneter pemerintah dengan mengendalikan jumlah uang beredar, kebijakan kredit dan valuta asing, dan suku bunga. Selain itu, Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengawasan bank serta pengaturan dan penatausahaan sehari-hari di bidang perbankan.[46]

Pada perkembangannya, reformasi perbankan sempat dilakukan yang merupakan bagian dari paket deregulasi yang dikeluarkan pada 27 Oktober 1988 kemudian dikenal sebagai Pakto '88. Paket deregulasi ini membuat banyak perubahan spesifik pada struktur regulasi industri perbankan. Tujuan utama dari reformasi adalah untuk menyuntikkan tingkat persaingan yang lebih besar ke dalam sektor perbankan dan untuk meningkatkan ketersediaan kredit di seluruh negeri. Salah satu elemen kunci dari Pakto '88 adalah pelonggaran pembatasan bank asing.[47] Paket deregulasi Pakto '88 memiliki lima karakteristik dominan: (1) pertumbuhan kredit yang cepat; (2) masuknya secara tiba-tiba sejumlah besar bank yang bermodal buruk; (3) meningkatnya persaingan antarbank untuk memperebutkan nasabah secara signifikan; (4) *overexposure* bank yang signifikan kepada nasabah tunggal; dan (5) kurangnya perlindungan peraturan yang memadai. Berdasarkan karakteristik tersebut tidak mengherankan jika kredit macet berkembang pesat dalam sistem perbankan Indonesia.[48]

Pakto '88 bersama dengan paket kebijakan 25 Maret 1989 (Pakmar) dan Pakjan, menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa di sektor perbankan Indonesia sehubungan dengan jumlah bank yang beroperasi di negara ini dan jumlah kredit yang diberikan oleh industri perbankan.[49] Permasalahan yang dihadapi perbankan Indonesia sejak tahun 1988

46 Michael S. Bennet, *Op.Cit.*, 1995, hlm. 453.

47 *Ibid.*, hlm. 460.

48 *Ibid.*, hlm. 470.

49 *Ibid.*, hlm. 462.

menimbulkan pertanyaan yang cukup berarti tentang hikmah dari upaya deregulasi yang dilakukan pemerintah. Paket deregulasi dimaksudkan untuk merangsang pembangunan ekonomi di dalam negeri dengan menyuntikkan persaingan ke dalam sistem perbankan yang telah dikendalikan oleh sejumlah kecil bank milik negara yang dikelola dengan buruk dan sangat tidak efisien.[50]

BI pada perkembangannya memberlakukan tambahan paket reformasi perbankan yang dikenal dengan Paket 29 Januari 1990. Fokus paket ini adalah pemberian KUK kepada masyarakat dan para pengusaha kecil. Elemen utama Paket Januari 1990 yang kadang juga disingkat dengan Pakjan adalah instruksi kepada bank untuk mengalokasikan setidaknya 20% dari portofolio kredit mereka untuk pinjaman usaha kecil.

Pesatnya pertumbuhan industri perbankan setelah deregulasi pada akhir 1980-an membuat banyak bank di Indonesia berada dalam posisi keuangan yang lemah. Bagi banyak bank, ekspansi kredit dicapai dengan mengorbankan kualitas kredit. Akibatnya, pertumbuhan kredit yang agresif antara tahun 1988 dan 1990 menyebabkan kualitas pinjaman secara keseluruhan dari sistem perbankan Indonesia menurun secara substansial.[51]

Selain itu, pemerintah memberlakukan standar kehati-hatian yang lebih ketat pada bank di beberapa bidang. Standar kehati-hatian baru diberlakukan oleh BI sejak Februari 1991. Aturan tersebut ditujukan untuk mengendalikan pertumbuhan kredit dan memperkuat peran pengawasan bank sentral terhadap bank-bank di Indonesia, untuk lebih memastikan kesehatan sistem perbankan.[52]

Sebagai kantor cabang di daerah, BI Banjarmasin merupakan mitra Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas kebijakan perekonomian di daerah agar dapat tumbuh dan berkembang. BI berupaya untuk mengendalikan inflasi di daerah, khususnya Kalimantan Selatan, dengan membuat kebijakan-kebijakan terkait perkembangan

50 Michael S. Bennet, *Op.Cit.*, 1995, hlm. 447.

51 *Ibid.*, hlm. 464.

52 *Ibid.*, hlm. 467.

perekonomian di wilayah tersebut. Dalam hal pengendalian inflasi, BI berperan menjadi motornya dengan memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah daerah setempat. BI juga berperan melihat angka-angka secara detail yang bisa membuat para pengambil kebijakan di pemerintahan daerah dapat mengembangkan perekonomian daerah Kalimantan Selatan dengan baik. Maka dalam kemitraannya itu, BI Kalimantan Selatan membantu pemerintah mengembangkan perekonomian daerah seperti melalui program Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA). Program ini merupakan jenis kredit, baik merupakan kredit investasi maupun kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada koperasi primer untuk diteruskan kepada anggotanya guna membiayai usaha yang produktif, dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.[53]

Terkait dengan program KKPA, pemberian fasilitas kredit tersebut oleh Kantor Cabang BI Banjarmasin nyatanya tidak semua berjalan optimal. Pada sektor perkebunan tebu misalnya, BI Banjarmasin berupaya menunjang usaha perkebunan tebu melalui KKPA, namun hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh petani perkebunan tebu. Seperti halnya yang terjadi di Tanah Laut. Dalam suatu kesempatan, BI Banjarmasin melakukan *monitoring* ke perkebunan tebu, akan tetapi masyarakat di daerah tersebut kesulitan mengubah kebiasaannya dari petani padi dan nelayan menjadi petani tebu. Hal-hal semacam ini diketahui menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkebunan tebu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal pemberian KKPA pun BI Banjarmasin menemukan persoalan lain. Pada prinsipnya, KKPA diajukan dengan menggunakan nama-nama petani yang merupakan para pekerja perusahaan di pabrik gula/tebu. Namun, hal berbeda ditemui saat pihak BI Banjarmasin melakukan pengawasan ke lapangan dan dijumpai bahwa nama-nama yang diajukan melalui program KKPA tersebut seluruhnya fiktif.[54]

53 Disampaikan oleh Way Hudi Anden dan Mursyahbani pada kegiatan FGD Sejarah Lisan Penulisan Buku Sejarah dan Heritage KPwBI Kalimantan Selatan Rabu, 18 Agustus 2021.

54 *Ibid.*

Tak hanya KKPA, BI juga menghadirkan dan menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu suatu program untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan pola penjaminan. Selain itu, fasilitas kredit lain yang dimiliki BI ialah Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), yaitu kredit produksi atau eksploitasi yang digunakan untuk menutup biaya produksi perusahaan, seperti pembelian bahan baku, pembelian bahan penunjang, biaya iklan dan promosi serta lain-lain yang berkaitan langsung dengan proses produksi, dan terus mendapat pembinaan hingga benar-benar mapan.[55]

Dari uraian di atas, jelas bahwa BI sangat berperan dalam memajukan perekonomian rakyat. Beraneka ragam kredit telah diberikan BI dalam rangka menunjang program ekstensifikasi dan intensifikasi di sektor pertanian. Pada program Inmas (Intensifikasi Massal) misalnya, petani diberikan kesempatan untuk mengajukan pinjaman ke bank. Meski begitu, dalam praktiknya tidak semua pemohon yang mengajukan kredit akan disetujui seluruhnya. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar *Kompas* bahwa dari 226 pemohon yang mengajukan KIK (Kredit Investasi Kecil) dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) selama tahun 1976 hanya ada dua pemohon yang berhasil mendapatkannya. Pemohon pertama memperoleh bantuan kredit sebesar Rp5 juta dan pemohon lainnya senilai Rp2,5 juta. Hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah yang ditunjang perbankan belum berjalan efektif.[56] Barulah pada tahun 1978 lebih dari lima milyar rupiah kredit telah dicairkan BI untuk membantu mereka yang berekonomi lemah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Poernomo HS, Pejabat BI Banjarmasin kepada *Kompas* dalam peluncuran program bantuan Kredit Investasi Kecil (KIK).[57]

Tak hanya pada sektor pertanian, program bantuan kredit melalui BI Banjarmasin juga dilakukan untuk kebutuhan sektor perekonomian

55 Disampaikan oleh Way Hudi Anden dan Mursyahbani pada kegiatan FGD Sejarah Lisan Penulisan Buku Sejarah dan Heritage KPwBI Kalimantan Selatan Rabu, 18 Agustus 2021

56 Kompas, "Berita Daerah: Baru Dua Perusahaan Kalimantan Selatan dapat KIK & KMKP, Kurang Pengertian tentang Intern Bank", 6 Desember 1976.

57 Kompas, "Rp 5 Milyar Lebih Kredit bagi Pengusaha Lemah", 12 September 1978.

lainnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Kalimantan Selatan. Bank Indonesia memberi kesempatan kepada eksportir daerah untuk menggunakan kredit ekspor dengan menggunakan L/C (*Letter of Credit*) lokal. Pembiayaan yang diperoleh dari kredit tersebut di antaranya proses produksi hingga pelaksanaan ekspor dan biaya persediaan barang berupa rotan mentah dan setengah jadi. Hanya saja saat itu (1988) menurut Kadinda Kalimantan Selatan, fasilitas kredit tersebut belum dapat dimanfaatkan seutuhnya dan belum memungkinkan bagi eksportir daerah untuk memanfaatkan L/C lokal karena berbagai kendala yang ada. Kendala tersebut salah satunya ialah kesulitan yang dihadapi para pengumpul rotan di pedalaman yang belum terbiasa bertransaksi melalui bank sebab belum adanya bank di pedalaman.[58] Akibat kendala seperti ini, para eksportir di daerah, khususnya Kalimantan Selatan, terpaksa memperoleh pinjaman uang dari luar bank dengan bunga yang tinggi dan memberatkan. Hal tersebut tetap dilakukan sebab usaha ekspor rotan mereka harus terus berjalan, meskipun risikonya terlilit utang karena tidak mampu membayar bunga kredit yang tinggi.[59]

Sementara itu, dua tahun berselang (1990), Kadinda Kalimantan Selatan mengupayakan kembali perolehan bantuan Kredit Usaha Kecil (KUK) melalui BI Banjarmasin. Pengajuan program KUK tersebut ditujukan untuk membantu sejumlah eksportir terdaftar lampit rotan (ETLR) yang tidak mampu lagi berusaha pada masa tersebut. H. A. Syamsuri Darham, Ketua Umum Kadinda Kalimantan Selatan, menuturkan bahwa kredit tersebut digunakan untuk membiayai diversifikasi usaha ke nonlampit, seperti keranjang rotan, bantal rotan, rak rotan, *baby seat,* dan sebagainya yang dianggap masih berpotensi untuk diproduksi dan dipasarkan. Terkait hal tersebut pimpinan BI Banjarmasin memahami dan pada prinsipnya permohonan KUK oleh Kadinda Kalimantan Selatan diterima dengan baik.[60]

58 Kompas, "L/C Lokal belum Dimanfaatkan", 6 Agustus 1988.

59 *Ibid.*

60 Kompas, "Diperjuangkan, Kredit bagi Eksportir Lampit Rotan", 3 Agustus 1990.

Terkait dengan bantuan pemberian modal atau kredit, mulai tahun 1993/1994 para petani lahan kering di kawasan daerah aliran sungai (DAS) di 21 provinsi mencakup 98 kabupaten, diberi bantuan permodalan atau Kredit Usahatani Konservasi DAS (KUK-DAS). Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan mereka, sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan sekitarnya yang kritis. Persetujuan pengaturan administrasi KUK-DAS tersebut ditandatangani di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta pada hari Jumat (30/4/1993), masing-masing oleh Dirjen RRL (Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan) dari Departemen Kehutanan, Armada Darsidi, dan 21 Dirut BPD (Bank Pembangunan Daerah) dari seluruh Indonesia. Acara ini disaksikan Menteri Kehutanan, Djamaloedin Soerjohadikoesoemo.[61] Dirjen RRL, Armada Darsidi, menjelaskan masa pinjaman ditetapkan selama lima tahun dengan beban bunga hanya 12% per tahun menurun, serta masa tenggang pengembalian kredit satu tahun. Sedangkan pencairan kredit disesuaikan dengan kebutuhan para petani peserta proyek, serta angsuran kredit dijadwalkan per semester (setiap enam bulan). Dana kredit tersebut bersumber dari KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia). Sedangkan Departemen Kehutanan menempatkan Dana Reboisasi (DR) sebagai dana jaminan kredit tersebut pada bank pemberi kredit sebesar Rp 1 milyar.

Bank pemberi kredit dilaksanakan oleh BPD setempat, sedangkan penjamin risiko kegagalan kredit dibebankan kepada Departemen Kehutanan, PT (Persero) Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia), dan BPD masing-masing sebesar 67 persen, 23 persen, dan 10 persen. Luas lahan kering dan kritis di kawasan DAS di 21 provinsi yang didanai pemerintah itu seluruhnya mencapai 4.000 hektare, tersebar di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Barat, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Selatan.[62]

Melihat perkembangan kredit perbankan di Kalimantan, hingga Desember 1994, penyaluran kredit di Kalimantan Selatan menempati posisi ketiga dibandingkan empat provinsi lainnya. Ekspansi kredit perbankan

61 Kompas, "Petani Lahan Kering Mendapat Bantuan Modal", 1 Mei 1993.

62 *Ibid*.

di provinsi tersebut paling besar ialah Kalimantan Barat sebesar Rp1,73 triliyun; disusul oleh Kalimantan Timur sebesar Rp1,57 triliyun; kemudian Kalimantan Selatan senilai Rp1,21 triliyun; dan terakhir Kalimantan Tengah yakni Rp334,7 milyar. Di sisi lain, dalam masa yang sama pertumbuhan rata-rata dana yang dihimpun dari masyarakat Kalimantan Selatan sebesar 33,21 persen. Angka tersebut di atas Kalimantan Barat yang hanya sebesar 26 persen per tahun sebagaimana disampaikan oleh Pemimpin Cabang Bank Indonesia Pontianak.[63] Berdasarkan uraian-uraian di atas, pada dasarnya dapatlah diketahui bahwa kehadiran perbankan di daerah memainkan peranan cukup penting dalam menyediakan dana untuk pembiayaan investasi.

DARI PERTANIAN KE PERTAMBANGAN

Sementara itu sektor lain mulai pula tumbuh dan berkembang di Kalimantan Selatan di antaranya adalah sektor pertambangan. Pada tahun 1980-an telah diwacanakan akan adanya tiga proyek besar di Kalimantan Selatan, yaitu pendirian pabrik gula, pabrik semen, dan penambangan batu bara. Penambangan batu bara di Kalimantan Selatan sesungguhnya bukan hal baru karena sejak pemerintahan Hindia Belanda hingga tahun 1948 batu bara sudah ditambang. Lebih dari itu, tambang ini menjadi suatu penyebab bagi meletusnya Perang Banjarmasin yang berujung pada dibubarkannya Kesultanan Banjarmasin, lenyapnya ratusan nyawa dan ribuan orang yang terluka dari kedua belah pihak, dan kacaunya keadaan politik keamanan dan ekonomi selama beberapa tahun. Penambangan batu bara kemudian sempat terbengkalai hingga masa Orde Baru.

Pada tahun 1981 telah diajukan perjanjian kontrak kerja sama untuk mengembangkan usaha pertambangan batu bara antara Perum Tambang dari pihak pemerintah dengan beberapa perusahaan asing, yaitu PT Arutmin Indonesia dengan wilayah kerja di Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Laut, PT Adaro Indonesia Mining dengan wilayah kerja

63 Kompas, "Ekspansi Kredit Bank di Kalbar Paling Besar", 24 Maret 1995.

di Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya pada tahun 1985 Perum Tambang kembali menandatangani kontrak kerja sama dengan PT Chung Hua Overseas Mining untuk wilayah kerja di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tapin.[64]

Pada tahun 1981 PT Adaro didirikan sebagai sebuah perusahaan pertambangan, namun baru mulai beroperasi menambang batu bara pada tahun 1992, setelah melakukan eksplorasi di Kalimantan Selatan pada tahun 1982–1989. Sementara jenis tambang yang lain seperti intan yang sudah sangat lama dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Selatan secara turun temurun di daerah Cempaka, Banjarbaru tetap dilakukan. Di Kalimantan Selatan, khususnya Martapura telah dikenal sebagai penghasil intan terpenting di Indonesia. Mendulang intan merupakan mata pencaharian turun temurun bagi masyarakat di daerah Cempaka yang kini telah menjadi bagian wilayah Banjarbaru. Dalam mencari intan lazimnya dilakukan secara berkelompok yang setiap kelompok bisa terdiri dari 5 sampai 10 orang atau lebih. Menggunakan peralatan sederhana pencari intan menggali lubang hingga sedalam 10 meter lebih dan ini disebut dengan pendulangan lubang dalam. Selain itu, ada pula pendulangan intan lubang surut. Setiap intan yang didapat kemudian dibawa ke penggosokan intan untuk diolah dan dibentuk. Tempat penggosokan intan ini terdapat di Kota Martapura. Setelah digosok intan-intan itu kemudian dijadikan mata cincin, gelang, kalung, bros atau anting.

Intan yang dihasilkan menjadi ikon bersejarah bagi daerah Kalimantan Selatan. Intan Kalimantan Selatan memiliki kualitas yang sangat baik dengan ukuran yang cukup besar dan nilainya yang tinggi. Intan itu pertama adalah yang diberi nama "Intan Trisakti" dan "Intan Cempaka" yang ditemukan antara tahun 1965 dan 1970-an.[65] Pencarian intan masih terus berlangsung dilakukan oleh masyarakat, sedangkan batu bara seolah kembali bangkit pada akhir 1980 dan awal 1990-an. Batu bara dieksploitasi besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan di antaranya PT Adaro Indonesia Mining, PT Arutmin Indonesia, PT Energi

64 Tim Penulis, Wajah Kalimantan Selatan, *Op.Cit.*, hlm. 94.

65 Kompas, "Meredupnya Kilau Intan Martapura", 19 Agustus 1997.

Batubara Lestari, dan PT Jholin Baratama sejak 1990 hingga sekarang dengan dampak ekonomi dan lingkungan yang luar biasa. Dampak terhadap ekonomi karena memberikan keuntungan yang luar biasa kepada perusahaan yang mengekspolitasinya dan sebaliknya kerusakan lingkungan terjadi cukup parah di daerah penambangan batu bara dan sekitarnya. Sementara itu, intan memberikan catatan sejarah yang lain karena gagalnya dua perusahaan tambang, yaitu PT Aneka Tambang tahun 1970–1980-an dan PT Cempaka akhir tahun 1990–2000-an yang bekerja secara mekanik dalam menggali intan.

Gambar 5.5. Pendulangan Intan Cempaka

Sumber: Tim Penulis. 1989. *Wajah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Sekretariat Wilayah Daerah

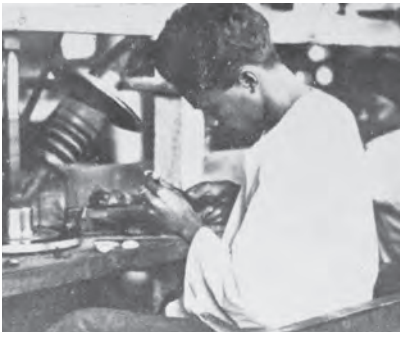

Gambar 5.6. Penggosokan Intan Martapura

Sumber: G.L Tichelman. 1949. Blanken Op Borneo.

Di lain pihak, Idwar Saleh memberikan catatan mengenai keadaan sektor pertambangan di Kalimantan Selatan. Menurutnya, sektor pertambangan intan, batu bara, dan minyak bumi sejak masa kolonialisme Belanda hingga masa Orde Baru telah memberi andil yang cukup bagi perekonomian daerah. Tidak saja sektor kehutanan yang menghasilkan damar, rotan, kayu, dan sebagainya yang penting bagi perekonomian penduduknya,[66] sektor pertambangan merupakan komoditas untuk dipasarkan ke luar daerah melalui Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Martapura. Peti kemas yang masuk dan keluar pelabuhan ini rata-rata

66 M. Idwar Saleh, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 132.

102.000 buah per tahun, dan sekitar sejumlah 130 peti kemas yang dibongkar per hari. Pelabuhan Trisakti telah dilengkapi dengan terminal khusus batu bara seluas 4.5 ha dengan kapasitas 1,5 juta ton per tahun.[67]

Kegiatan dari sektor pertanian ke sektor pertambangan di daerah Kalimantan Selatan tidak diartikan sebagai pergantian kegiatan ekonomi. Semuanya berlangsung sebagaimana adanya. Dilihat dari peran dan fungsinya sama pentingnya antara kedua sektor tersebut, namun dari sisi keuntungannya yang luar biasa adalah pada sektor pertambangan yang seolah kedudukannya menggantikan sektor pertanian. Padahal beras dan karet merupakan barang yang tidak bisa dihentikan produksinya dan bersifat berkesinambungan, sementara hasil tambang dapat habis jika diproduksi terus menerus. Akan tetapi, reputasi yang bisa diraih di sektor pertambangan dari sisi keuntungan finansial sangat luar biasa sehingga para investor seolah tidak ragu untuk menanamkan modalnya ke sektor pertambangan, terutama batu bara dan minyak bumi. Sementara di sektor pertanian terjadi hal sebaliknya.

Itulah kemudian, dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan adalah dengan menggali potensi perut bumi wilayah ini. Batu bara, emas, bijih besi, dan intan sebagai produk alam Kalimantan Selatan tersebar di beberapa kabupaten seperti Banjar, Tapin, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Daerah-daerah ini sangat diminati para investor. Bahan galian tambang yang ditemukan di wilayah Kalimantan Selatan terdiri atas bahan galian energi, bahan galian logam, dan bahan galian industri. Bahan galian batu bara, bijih besi, dan intan tetap menjadi komoditas unggulan yang menjadikan sektor pertambangan menjadi salah satu *leading sector* dalam menopang perekonomian Kalimantan Selatan. Pendulangan dan penggosokan intan dapat dijumpai di Kota Martapura, Kabupaten Banjar.

Adapun potensi minyak bumi terbesar di Kalimantan Selatan yang sudah sejak masa kolonialisme Belanda dieksploitasi terdapat di Kabupaten Tabalong, khususnya di Kecamatan Murung Pudak. Pada tahun 1898 perusahaan tambang Belanda Mijnbouw Maattschappij telah

67 Kompas, "Pelabuhan Banjarmasin Perlu Dikembangkan", 7 Agustus 1998.

melakukan eksplorasi minyak di daerah Warukin. Eksplorasi ini kemudian diteruskan oleh Dortsche Petroleum Maattschappij pada tahun 1912. Sejak tahun 1930 pencarian minyak dilanjutkan oleh Bataafsche Petroleum Maattschappij (BPM) dan berhasil menemukan struktur minyak bumi di Tanjung (1934), Warukin (1937), dan Kambitin (1939). Oleh karena situasi yang tidak kondusif, baru pada tahun 1957 potensi minyak bumi di daerah Kabupaten Tabalong mulai diekspoitasi oleh BPM hingga berhasil membangun saluran minyak sepanjang 238,6 km dari Murung Pudak menuju Balikpapan di tahun 1958. Pipa saluran minyak ini dilengkapi dengan fasilitas pompanya yang selesai dibangun dan dioperasikan pada tahun 1961. Namun, eksploitasi tidak dilakukan oleh BPM melainkan oleh PT Shell Indonesia.[68]

Berdasarkan Undang-Undang No. 44 tahun 1960 pemerintah Indonesia melikuidasi BPM dan membentuk PN Permindo. Sedangkan sebagian saham PN Permindo adalah milik PT Shell Indonesia. Namun, dalam hal ini PT Shell Indonesia yang melaksanakan operasional termasuk di Tabalong. PN Permindo adalah perusahaan negara hasil likuidasi dari perusahaan Belanda Nederlands Indonesische *Aard-olie Maatschappij* (NIAM), sedangkan PT Shell Indonesia adalah bentukan baru dari BPM. Kerja sama ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 1961 pemerintah Indonesia mengambil alih saham PT Shell Indonesia, dan mendirikan sebuah perusahaan negara dengan nama PN Pertambangan Minyak Nasional (Permina) atas dasar PP No. 198 tahun 1961.[69]

Pada tanggal 31 Desember 1965 pemerintah Republik Indonesia telah membeli perusahaan PT Shell Indonesia dengan harga US$110 juta sehingga seluruh unit-unit PT Shell di Indonesia menjadi milik Perusahaan Negara (PN) Permina. Setelah dua perusahaan negara PN Permina dan PN Pertamina yang bergerak di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilebur menjadi satu perusahaan dengan nama PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Pertamina) dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968 tanggal 20 Agustus 1968, maka seluruh kegiatan penambangan minyak dan gas di wilayah Indonesia telah dikontrol

68 Nur Indarto, "Ladang Minyak Tabalong 1898–Sekarang (Seri Sejarah #6)", 8 Juni 2011, https://nurindarto.blogspot.com/2011/06/ladang-minyak-tabalong-1898-sekarang.html

69 *Ibid.*

Gambar 5.7. Sumur Minyak Murung Pudak
Sumber: Dinas Pertambangan Kalsel

dan diorganisasikan oleh perusahaan pemerintah Republik Indonesia. Ketika itu pemerintah mengintegrasikan PN Permina dan PN Pertamina menjadi satu perusahaan yang kemudian diberi nama Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN Pertamina). Beberapa perusahaan asing yang menjalin kerja sama dengan PN Pertamina untuk mengelola minyak bumi di Kabupaten Tabalong di antaranya adalah PT Southern Cross, PT Bow Valley, dan yang terakhir sampai saat ini adalah PT Talisman dari Kanada. Kerja sama pengelolaan minyak bumi di Tanjung (Murung Pudak) tersebut kemudian dikenal dengan nama JOB PTTL (Joint Operating Body Pertamina Talisman Tanjung Limited).

Data PT Pertamina Unit Bisnis EP Tanjung memperlihatkan bahwa di Kecamatan Murung Pudak terdapat 164 buah sumur minyak dan ada 100 sumur di Tanjung Raya, 11 sumur di Warukin Selatan, 6 sumur di Warukin Tengah, 8 sumur di Tepian Timur, dan 2 sumur di Kambitin. Setelah puluhan tahun dieksploitasi sumur-sumur itu sudah mulai sulit mengeluarkan minyak. Dalam hal ini diperlukan suatu teknologi eksploitasi minyak bumi yang harus diadopsi untuk kembali meningkatkan produksi sumur-sumur minyak di Kabupaten Tabalong. Nama teknologi ini adalah *Enhanced Oil Recovery* (EOR), teknik ini bertujuan agar minyak bumi dalam sebuah sumur dapat berproduksi kembali dengan cara memberikan sebuah energi tekan berupa bahan kimia, air atau lainnya yang diinjeksikan

ke dalam sebuah sumur minyak sehingga minyak bumi dapat memancar ke permukaan tanah.

Pada tahun 1989 Pertamina Tanjung kembali harus menggandeng perusahaan asing untuk melaksanakan EOR yang ditandai dengan ditandatanganinya kontrak EOR selama 15 tahun antara Pertamina Tanjung dengan dua perusahaan mitra yaitu Southern Cross Ltd dan Bonham Ltd pada tanggal 11 September 1989. Pada tahun 1992 terjadi pengalihan hak dan kewajiban EOR dari mitra Southern Cross Ltd dan Bonham Ltd kepada Bow Valley Ltd. Namun, pada bulan Agustus 1994 kontrak EOR kembali beralih kepada Talisman Ltd dengan *Participating Interest* 50% Pertamina dan 50% Talisman Energy – Canada.

Tidak hanya sumur-sumur minyak yang mengalami masalah, tetapi juga pipa-pipa minyak yang mulai mengalami kerusakan dan harus diganti setelah eksploitasi minyak bumi selama puluhan tahun dilakukan. Di stasiun booster I Batu Butok misalnya ada 10 titik lokasi pipa yang harus segera diganti yakni di kilometer 49 Solan; kilometer 53,4 Batu Babi; kilometer 63 Maliri; kilometer 63 Ramubia; kilometer 63,8 Tiwau; kilometer 85,6 Gunung Raja (Serakit); kilometer 88,5 Busui; kilometer 93,7 Songka; kilometer 100 Batu Kajang; dan kilometer 104,5 Setiu. Selain stasiun booster I Batu Butok, pelaksanaan penggantian pipa juga akan dilakukan di stasiun booster II Long Ikis. Sebelumnya untuk perawatan perpipaan yang ada di Tanjung hingga Balikpapan merupakan tanggung jawab Talisman Ltd yakni sejak Agustus 1994.[70]

Maka dalam hal ini, kecuali intan, jenis tambang lainnya lebih mendapat perhatian dari pihak pemerintah maupun perbankan. Mendulang intan umumnya dilakukan oleh rakyat dengan cara dan peralatan sederhana sehingga hasilnya tidak menentu dan tidak mudah mendapatkannya. Pola usaha rakyat seperti itu menyebabkan sulit bagi pemerintah maupun bank untuk menyediakan kredit bagi usaha mereka. Berbeda dengan produksi tambang lainnya yang lebih konstan dan terukur hasilnya sehingga pihak bank tidak merasa ragu di samping juga karena dilakukan oleh usaha-usaha berbadan hukum.

70 "Menelusuri Tempat Bersejarah di Kalsel, Penggalian Minyak di Murung Pudak", 4 November 2020, https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/11/04/menelusuri-tempat-bersejarah-di-kalsel-penggalian-minyak-di-murung-pudak

BAB 6

Bank Indonesia dan Kilas Ekonomi (1999–2020)

Bank Indonesia (BI) memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi di wilayah Kalimantan Selatan. Bahkan sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, hal tersebut telah dilakukan sejak masa kolonial melalui kehadiran DJB *Agentschap* Bandjermasin pada tahun 1907, di tahun yang sama dengan DJB *Agentschap* Medan. Sejak saat itu sampai dengan tahun 1999, Kantor BI Banjarmasin terus memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Kalimantan Selatan, khususnya melalui pembiayaan kepada sektor riil terutama pertanian, perkebunan, dan usaha rakyat lainnya.

Bab ini akan membahas dinamika kelembagaan BI setelah krisis moneter 1997–1998, meliputi perubahan fungsi dan tugas hingga posisi BI sebagai bank sentral yang independen. Selain itu, juga akan dibahas mengenai kontribusi Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan dalam fungsi *advisory* untuk mengawal dan meningkatkan ekonomi di Kalimantan Selatan dan wilayah Kalimantan secara umum. Tugas dan peran Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan meliputi pengendalian inflasi, perumusan asesmen ekonomi dan keuangan daerah, pengembangan UMKM dan ekonomi syariah, serta pemelihara stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Periodisasi pembahasan pada bab ini difokuskan sejak tahun 1999, pasca krisis ekonomi yang melahirkan independensi BI dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang BI hingga tahun 2021.

PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA (BI) DAN IMPLIKASINYA DI DAERAH

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memberi banyak pelajaran bagi Indonesia bahwa kebijakan moneter harus dipisahkan dari kebijakan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968, fungsi BI sebagai bank sentral yang harus menjaga stabilitas nilai tukar, kontraproduktif dengan fungsi sebagai agen pembangunan. Sebagai agen pembangunan, BI memiliki target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang pencapaiannya seringkali diikuti dengan kenaikan harga-harga atau inflasi. Inflasi yang tinggi akan mengganggu kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam penyusunan kebijakan apabila kedua target tersebut berada di bawah satu otoritas yang sama.

Belajar dari krisis tahun 1997, BI diberikan kedudukan independen di luar pemerintah dengan mandat tunggal dalam mencapai dan memelihara stabilitas Rupiah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999. Berdasarkan mandat itu, BI memiliki tiga fungsi, yaitu: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan (iii) mengatur dan mengawasi bank.

Selanjutnya kedudukan BI sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 semakin diperkuat melalui beberapa regulasi sebagai berikut:

1. Amandemen UUD 1945 Pasal 23D Tahun 2002 yang berbunyi "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang-Undang." Lahirnya pasal ini merupakan penguatan terhadap kedudukan bank sentral sebagai otoritas moneter.
2. UU No. 3 Tahun 2004 yang berisi tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang BI, yang berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan BI.
3. UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI menjadi UU. Adapun Perpu No. 2 Tahun 2008 memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai *lender of the last resort*.

4. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan dan pengawasan perbankan. Dalam hal ini ruang lingkup yang dilakukan oleh OJK adalah mikroprudensial, sementara BI adalah makroprudensial (stabilitas sistem keuangan).

Dinamika kelembagaan BI memberikan konsekuensi terhadap perubahan struktur organisasi internal BI termasuk nomenklatur atau penamaan satuan kerja BI, baik di pusat maupun daerah. Di daerah, Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan juga mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum 1996 satuan kerja BI di daerah bernama Kantor Cabang BI (KCBI). Sejak 5 September 1996, KCBI diubah menjadi Kantor BI (KBI). KBI Banjarmasin ditetapkan sebagai salah satu dari tujuh koordinator KBI bersama Medan, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Ujungpandang.[1] Satuan kerja yang berada di bawah koordinasi KBI Banjarmasin yaitu KBI Pontianak, KBI Balikpapan, KBI Palangkaraya, KBI Samarinda, dan KBI Sampit.

Sejak 2 April 2012[2], KBI Banjarmasin diubah menjadi Kantor Perwakilan BI Wilayah II (Kalimantan).[3] Selanjutnya, pada 2016 mengalami penyesuaian kembali menjadi Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan.[4] Sejak 2018, seluruh Kantor Perwakilan BI Dalam Negeri, termasuk Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki empat tugas.

---

1 Arsip Bank Indonesia, Surat Edaran No.29/8/INTERN tanggal 5 Juni 1996 tentang Penyempurnaan Organisasi Kantor BI

2 Arsip Bank Indonesia, Surat Edaran No.14/10/INTERN tanggal 2 April 2012 tentang Nama Jabatan, Nama dan Rubrik Satuan Kerja dan Unit Kerja di BI

3 Arsip Bank Indonesia, Peraturan Dewan Gubernur No.14/3/PDG/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Pangkat, Jabatan, Satuan Kerja, dan Eselon di BI

4 Arsip Bank Indonesia, Peraturan Dewan Gubernur No.18/13/INTERN tanggal 30 Maret 2016 tentang Organisasi BI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Gubernur No.15/10/PDG/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Arsip BI, Surat Edaran No.18/13/INTERN tanggal 30 Maret 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran No.15/62/INTERN perihal Organisasi Kantor Perwakilan BI Dalam Negeri (KPwDN), yang diubah dengan SE No.18/81/INTERN tanggal 30 September 2016 tentang Organisasi Kantor Perwakilan BI Dalam Negeri Kelompok A.

Tugas pertama, adalah:

(i) Perumusan Kebijakan Ekonomi

(ii) Implementasi Kebijakan Ekonomi

(iii) Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah, dan Keuangan Inklusif

(iv) Implementasi Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

(v) Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah

(vi) Manajemen Intern

Beberapa produk (*deliverables*) dari tugas Perumusan Kebijakan Ekonomi antara lain Ringkasan Ekonomi Regional, Laporan Perekonomian Provinsi, Bahan Asesmen Rapat Ekonomi dan Keuangan Daerah (REKDA), Kajian Pengembangan Destinasi yang Beriorientasi pada Pariwisata Berkualitas, serta Kajian Pemetaan dan Strategi Penguatan *Local Value Chain*/Substitusi Impor Hilirisasi Sawit.

Tugas kedua, adalah Implementasi Kebijakan Ekonomi. Dalam pelaksanaannya, Kantor Perwakilan BI Kalimantan Selatan menghasilkan beberapa *deliverables,* antara lain pembentukan *Regional Investor Relations Unit* (RIRU) Provinsi Kalimantan Selatan dengan nama INTAN KALIMANTAN SELATAN (*Investment Trade and Tourism Relation Unit of Kalimantan Selatan*). RIRU dibentuk sebagai wadah untuk menggalang pendanaan dan investasi dari dalam dan luar negeri. RIRU juga berfungsi mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan melalui promosi proyek-proyek investasi untuk mewujudkan "Kalimantan Baru" yang perekonomiannya bernilai tambah, terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan (*The New Kalimantan*). Selain RIRU, pengembangan UMKM dan ekonomi syariah juga menjadi *deliverables* tugas Implementasi Kebijakan Ekonomi. Pengembangan UMKM diarahkan untuk menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru Kalimantan Selatan melalui peningkatan kapasitas UMKM dari aspek pembiayaan, pemasaran, korporatisasi, dan digitalisasi. Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil memfasilitasi UMKM Kalimantan untuk menembus pasar ekspor melalui kegiatan PAMOR BORNEO (Program Akselerasi UMKM Orientasi Ekspor).

Tugas ketiga, adalah yang terkait dengan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana pada butir (iii), (iv), dan (v). Pengelolaan Uang Rupiah di Kalimantan Selatan, khususnya pengedaran uang, menghadapi tantangan karena infrastruktur yang belum memadai serta kondisi geografis yang didominasi oleh sungai dan rawa. Oleh sebab itu, pengawasan sistem pembayaran dan pengembangan keuangan inklusif melalui digitalisasi pembayaran dan bantuan sosial menjadi penting untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat.

Tugas keempat, merupakan tugas Manajemen Intern yang meliputi: (i) administrasi dan kepegawaian; (ii) logistik, sekretariat, arsip, dan pengamanan; (iii) *accounting*, *budgeting*, *tax*, *asset management*, *inventory*, dan *purchasing*; (iv) *travel management* dan *benefit claim*; dan (v) keprotokolan.

MENGAWAL TRANSFORMASI EKONOMI

Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang juga dikaruniai dengan berbagai sumber daya alam yang melimpah berupa kayu dan produk kehutanan, batu bara dan kelapa sawit. Dalam tiga dekade terakhir, eksploitasi ketiga sumber daya alam tersebut hanya memberikan keuntungan pada segelintir pelaku ekonomi dan menimbulkan kerusakan lingkungan, oleh karena itu transformasi ekonomi Kalimantan menjadi penting.

SEKTOR HUTAN DAN HASIL HUTAN

Secara nasional, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan tropis terbesar di dunia. Indonesia menempati posisi ketiga setelah Brazil dengan hutan Amazon dan Kongo. Hutan hujan tropis Indonesia sebagian besar ada di wilayah Kalimantan dengan bentuk hutan rawa gambut. Sektor kehutanan juga menjadi bagian penting ekonomi Kalimantan, bahkan sejak era kolonial, lengkap dengan

dukungan perangkat hukumnya. Namun di masa itu, pengelolaan hutan tidak pernah benar-benar menjadi ujung tombak ekonomi Hindia Belanda karena pemerintah kolonial terhalang oleh berbagai aturan adat lokal yang tak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, pendapatan dari sektor kehutanan masih kalah dibandingkan dengan sektor perdagangan rempah dan perkebunan. Tonggak awal eksploitasi sumber daya hutan di Indonesia justru bermula setelah Indonesia merdeka.

Hutan dan hasil hutan Kalimantan dalam bentuk ekspor kayu (*timber*) pada masa awal Orde Baru sampai dengan tahun 1990-an menjadi salah satu sumber devisa terbesar bagi perekonomian Indonesia. Pada masa itu, insentif pajak dan lisensi atau perizinan usaha kehutanan jangka panjang yang diberikan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan berhasil menarik investasi asing di sektor kehutanan terutama di Kalimantan. Investor asing yang memanfaatkan insentif tersebut adalah perusahaan penebangan kayu (*logging*) dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Filipina yang mencari bahan baku kayu berkualitas dan murah untuk memasok kebutuhan industri pengolahan kayu di negara masing-masing[5] karena dilarang untuk mengambil kayu dari hutan negaranya sendiri. Di tahun 1978 *timber* menjadi sektor ketiga yang paling menarik bagi investor asing setelah sektor pengolahan dan pertambangan, sebesar US$ 376 juta atau 7% PDB dan 20% dari ekspor non-migas.[6]

Kartografer Hugo Ahlenius dalam laporannya di tahun 2006 memetakan tujuan ekspor produk kayu dari Indonesia, dengan tujuan akhir seperti Cina, Jepang, dan Amerika Utara. Hampir tiga perempat dari kayu-kayu tersebut berakhir di tujuan di Asia. Namun, sayangnya sebagian besar prosesnya berlangsung ilegal sehingga berujung di pasar gelap. Penyelundup mengubah negara asal dan label serta klasifikasi kayu saat diselundupkan. Kayu Ramin atau Gaharu Buaya, *Gonystylus sp.*, adalah sekelompok spesies kayu keras tropis di Asia Tenggara yang terdaftar

5 M. L. Ross, *Timber Booms and Institution Breakdown in Southeast Asia*, (New York: Cambridge University Press, 2001).

6 M. Poffenberger, *Rethinking Indonesian Forest Policy: Beyond The Timber Barons*. (Asian Survey, 1997), hlm. 453–469.

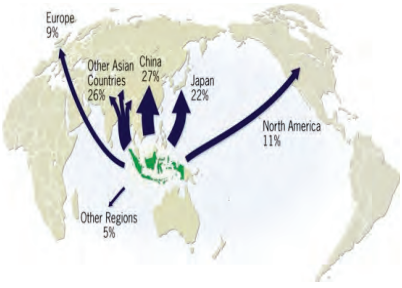

Gambar 6.1. Tujuan Ekspor Produk Kayu dari Kalimantan dan Indonesia

Gambar 6.2. Rute Ekspor Ilegal Ramin (Gaharu Buaya) dari Kalimantan

dalam daftar merah *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) atau tergolong sebagai kayu rentan dan akan punah. Penebangan liar pohon dengan spesies ini sering terjadi di Indonesia, bahkan di kawasan hutan lindung. Kayu diangkut ke pabrik penggergajian di Kalimantan, Indonesia dan Malaysia dan selanjutnya diekspor ke tujuan di Asia, Amerika Utara, Eropa dan tempat lain (Gambar 6.2). Harga pasar akhir mencapai US$1,000 per meter kubik.[7]

Undang-undang No. 5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan juga memiliki dampak negatif pada lingkungan ketika banyak korporasi berlomba-lomba mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Dalam periode 1967–1980, Orde Baru tercatat menerbitkan 519 HPH dengan luas lahan konsesi sekitar 53 juta ha. Penerbitan HPH yang eksesif tersebut menjadi pemicu deforestasi. Luas hutan di Indonesia berdasarkan data FAO pada tahun 1950 mencapai 152 juta ha, namun pada 1990 luas tutupan hutan Indonesia tersisa 109 juta ha.[8] Dengan demikian, dalam periode kurang lebih 40 tahun dari tahun 1950 hingga 1990, di Indonesia sudah terjadi penurunan luas hutan 43 juta ha. Sampai tahun

7 https://www.grida.no/resources/8328 dan https://www.grida.no/resources/8325 Dilaporkan oleh PEACE (2007), dalam publikasi "Extent of deforestation in Borneo 1950–2005, and Projection Towards 2020", sebagai bagian dari laporan "Indonesia and Climate Change: Current Status and Policies", (based on UNEP/GRID-Arendal, 2007) dan "Last Stand of the Orangutan, Rapid Response Assessment"

8 Azriansyah A. Agoes, "The Politics of Natural Resource Use: a Comparative Study of Forest Exploitation in Indonesia and Cambodia", (Northern Illinois University, 2016).

1995, pemerintah mencatat telah mengeluarkan 586 HPH dengan luas keseluruhan 63 juta ha. Dengan demikian, apabila konsesi itu digunakan secara maksimal, maka setelah tahun 1995 luas tutupan hutan Indonesia hanya akan tersisa kurang dari 50% luasan tutupan hutan pada tahun 1990.

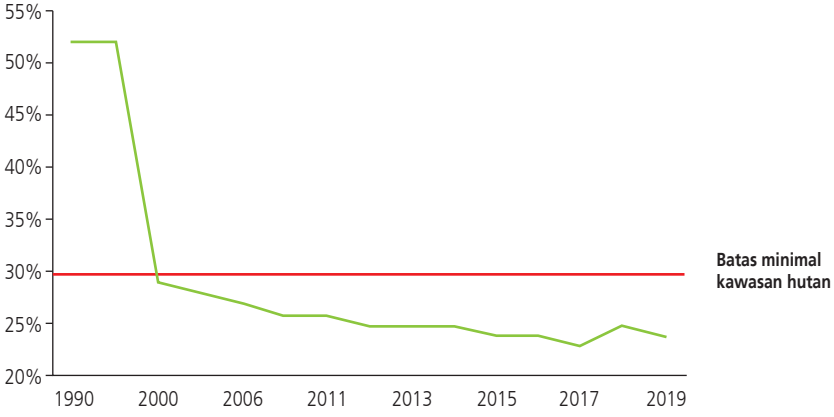

Grafik 6.1. Rasio Tutupan Hutan Kalimantan
Sumber: KLHK

Khusus di wilayah Kalimantan pada tahun 1990, dari luas hutan 34,73 juta ha, sebesar 10,79 juta ha merupakan hutan produksi dan sudah ditebang untuk produksi seluas 5,95 juta ha. Seperti terlihat di Grafik 6.1., selama 29 tahun (1990–2019), hutan Kalimantan Selatan hilang seluas 1.012.541 ha atau hilang sebanyak 28% dan menyisakan rasio tutupan hutan terhadap wilayah provinsi sebesar 24%.[9] Secara khusus Greenpeace menyatakan angka deforestasi di Kalimantan pada 2000–2005 mencapai sekitar 1,23 juta ha. Pada periode tersebut, 673 ha hutan di Kalimantan mengalami deforestasi setiap hari. Greenpeace memperkirakan hutan di Kalimantan hanya tersisa 25,5 juta di tahun 2010.[10]

9 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Data Hutan Kalimantan Selatan", 2021, https://www.forestdigest.com/detail/989/data-hutan-kalimantan-selatan

10 "Foto Hijaunya Hutan Kalimantan yang Jadi Paru-Paru Dunia", https://news.detik.com/foto-news/d-5310684/foto-hijaunya-hutan-kalimantan-yang-jadi-paru-paru-dunia/

Seiring perjalanan waktu dan pengelolaan hutan yang tidak berkesinambungan, produksi hasil hutan Kalimantan yang awalnya cukup besar terhadap perekonomian kini terus mengalami penurunan. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2015, jumlah produksi kayu bulat Kalimantan Selatan masih mencapai 144,325 m^3, dan jumlah ini menurun 80% menjadi 28,973 m^3 pada tahun 2019.

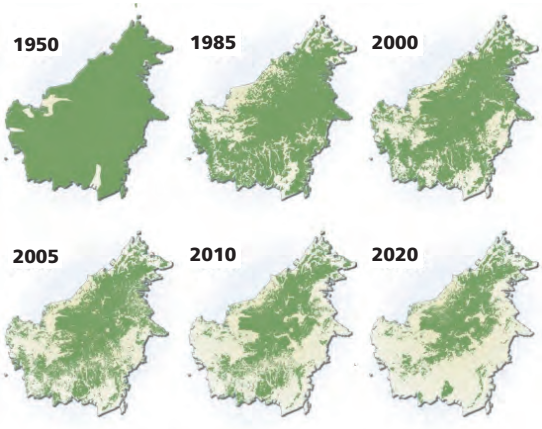

Gambar 6.3. Deforestasi Kalimantan 1950–2005 dan Proyeksi 2010-2020
Sumber: United Nations Environment Programme (UNEP)/GRID-Arendal

Dengan menggunakan data dari tahun 1950 sampai 2005, Hugo Ahlenius, mempublikasikan kecepatan deforestasi pembakaran hutan, penebangan dan pembukaan hutan, untuk diubah menjadi lahan pertanian, kawasan pemukiman atau perkebunan kelapa sawit dalam Gambar 6.3. Sejak berakhirnya perang dunia kedua hutan tropis dataran rendah dan dataran tinggi Kalimantan, termasuk hamparan hutan hujan yang luas yang menjadi habitat bagi orangutan dan gajah berkurang dengan sangat cepat.[11]

11 https://www.grida.no/resources/8324. Dilaporkan oleh PEACE (2007), dalam publikasi "Extent of deforestation in Borneo 1950 – 2005, and Projection Towards 2020", sebagai bagian dari laporan "Indonesia and Climate Change: Current Status and Policies", (based on UNEP/GRID-Arendal, 2007) dan "Last Stand of the Orangutan, Rapid Response Assessment"

SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA

Komoditas yang menjadi sumber eksploitasi berikutnya adalah batu bara. Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia untuk produksi batu bara terbesar, setelah Cina dan India. Meski masuk top 3 produsen batu bara dunia, Indonesia bukan pemilik cadangan batu bara terbesar di dunia. Berdasarkan data BP Statistical Review 2021, Amerika Serikat adalah negara yang memiliki cadangan batu bara terbesar di dunia dengan jumlah cadangan 248,94 miliar ton, diikuti oleh Rusia dengan jumlah cadangan mencapai 162,17 miliar ton. Indonesia berada di peringkat lima di bawah Jerman dengan jumlah cadangan terbukti sebesar 34,87 miliar ton, sementara Jerman mencapai 35,9 miliar ton. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki angka yang sedikit berbeda, dengan cadangan batu bara Indonesia sebesar 38,84 miliar ton. Dengan rata-rata produksi batu bara sebesar 600 juta ton per tahun, maka umur cadangan batu bara Indonesia masih 65 tahun apabila diasumsikan tidak ada temuan cadangan baru atau kurang lebih sampai dengan tahun 2085.

Kalimantan menyimpan 62,1% dari total potensi cadangan dan sumber daya batu bara terbesar di Indonesia, yaitu 88,31 miliar ton sumber daya dan cadangan 25,84 miliar ton. Selanjutnya, wilayah lain yang punya potensi tinggi adalah Sumatra dengan 55,08 miliar ton (sumber daya) dan 12,96 miliar ton (cadangan). Untuk wilayah Kalimantan, sumber daya batu bara Kalimantan tersebar secara spasial di Kalimantan Timur 34%, Kalimantan Tengah 14%, dan Kalimantan Selatan 12%. Sedangkan dari sisi cadangan, batu bara Kalimantan sebesar 54,23% dari cadangan nasional atau sebesar 25,84 miliar ton.

Dari sisi produksi, pada periode 1996–2017 produksi batu bara meningkat sangat signifikan yaitu dari kurang lebih 50 juta ton pada 1996 menjadi kurang lebih 177,73 juta ton pada tahun 2020. Kalimantan memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi batu bara nasional, di mana pangsanya sebesar 85,28% terhadap produksi nasional. Pada triwulan II 2021, produksi batu bara di Kalimantan tertinggi di Kalimantan Timur dengan persentase 56,45%, disusul oleh Kalimantan Selatan 35,10%, Kalimantan Tengah 4,44%, dan terakhir Kalimantan Utara

4,01%. Dari produksi tersebut dan sebesar 74,26% diekspor ke Cina, India, Jepang, dan Eropa.[12] Hal tersebut menjadikan sektor pertambangan batu bara merupakan lapangan usaha utama penyumbang PDRB Kalimantan Selatan dan Kalimantan.

Sejarah pertambangan batu bara di Kalimantan sudah dilakukan sejak zaman Belanda, namun tidak berlanjut. Di awal tahun 1990-an sektor pertambangan Kalimantan menggeser sektor kehutanan dan sektor industri hasil kehutanan (*plywood*) dengan mulai tumbuh berkembangnya kegiatan pertambangan batu bara. Pada era tersebut penambangan batu bara dilakukan oleh masyarakat, koperasi, dan penambang lokal Kalimantan dengan skala kecil namun dengan jumlah yang sangat banyak. Seiring dengan waktu mulai beroperasi penambang dengan modal besar seperti PT Arutmin di Kabupaten Kotabaru (saat itu Batulicin masih bagian dari Kabupaten Kotabaru), PT Adaro Indonesia, PT PAMA dan lainnya, beberapa penambang lokal mulai berkolaborasi dengan pemodal yang datang dari luar Kalimantan. Penambangan batu bara di Kalimantan sebagian besar dilakukan dengan cara *open pit* atau pertambangan terbuka.

Sesudah krisis nilai tukar dan memasuki masa reformasi, pelaku pertambangan batu bara di Kalimantan bertambah sangat signifikan. Sektor pertambangan batu bara mengalami masa keemasan sejak masa reformasi tahun 2001 sampai dengan tahun 2018. Penurunan produksi hasil hutan sejak awal tahun 2000-an juga turut andil dalam memaksa pelaku ekonomi untuk mencari sumber pendapatan baru dari pertambangan batu bara. Secara khusus, perubahan tersebut membuat *share* pertambangan dalam perekonomian Kalimantan Selatan meningkat tajam. Dengan produksi batu bara Kalimantan Selatan yang berkisar 12 juta ton, menjadikan komoditas ini sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru pada masa itu.

Permintaan batu bara diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan perkiraan peningkatan permintaan elektrifikasi yang meningkat tiga kali dari 2011 sampai dengan 2035 di negara-negara ASEAN.

12 Hilmawan, Rian dan Amalia, Siti (2019) *"Coal and Mineral and its impact on human development index: An Empirical Study in South and East Kalimantan Region, Indonesia"*

Sedangkan permintaan batu bara untuk elektrifikasi di Indonesia diperkirakan meningkat 4,8% dari sebesar 76 juta ton di 2015 menjadi 151 juta ton di 2022. Batu bara Indonesia memiliki karakteristik batu bara hijau yaitu batu bara dengan kandungan *ash* dan *sulphur* yang rendah, cocok dan sebagian besar digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik.[13] Fokus pemerintah Indonesia saat ini adalah ketahanan energi dengan batu bara menjadi salah satu sumber utama energi dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi, di tengah peningkatan tren pengurangan pemakaian batu bara oleh masyarakat internasional sebagai akibat dari dampak lingkungan dan dampak terhadap kesehatan yang ditimbulkan oleh batu bara.[14]

COP 26 atau *Conference of the Parties* ke-26 di Glasgow, Skotlandia, adalah badan pembuat keputusan tertinggi dari *United Nations Framework Convention on Climate Change*, yang ditandatangani pada 1992. Dalam forum tingkat tinggi tahunan ini, ada 197 negara yang terlibat pertemuan untuk membicarakan dan menanggulangi isu perubahan iklim global. Tujuan utama konferensi ini adalah untuk mendorong komitmen pemerintah setiap negara agar menetapkan target netral karbon sampai 2060, sehingga suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat celsius. Selain itu, mereka juga bertugas menagih komitmen negara maju untuk memobilisasi pendanaan terkait perubahan iklim. Sesuai kesepakatan, seharusnya sejak tahun 2020 sudah ada pendanaan $100 miliar per tahun kepada negara berkembang. Pada COP 26, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa di sektor energi Indonesia akan berfokus mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terbesar se-Asia Tenggara, pengembangan energi terbarukan termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis energi bersih. Dua hal terakhir, yaitu biofuel dan energi bersih melibatkan Kalimantan.

Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebanyak 29% di tahun 2030 dengan usaha sendiri atau

13 Ai Li, (2020), "*Analysis on the Current Situation and Future Outlook of Coal Market in Indonesia*", E3S Web of Conferences.

14 Rofikoh Rokhim, Wardatul Adawiyah, Ruri Eka Fauziah Nasution, (2018) "*The Negative Impact of Coal Mining Company on Health, Environment, Climate Change, Economic Sustainability and Macroeconomic*", E3S Web of Conferences.

41% dengan bantuan internasional. Energi merupakan sektor yang akan berkontribusi besar terhadap target ini. Saat ini, pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan untuk transisi menuju emisi nol bersih (Net Zero Emission) paling lambat di tahun 2060. Pengurangan ketergantungan pembangkit listrik bertenaga batu bara adalah satu bagian penting dari transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Upaya transisi menuju energi hijau menghadapi tantangan tuntutan penyelamatan lingkungan dan keseimbangan aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, kebijakan ekonomi yang diambil harus menjadikan komitmen pengurangan emisi karbon sebagai prioritas. Dalam rangka mendukung Indonesia sebagai Presidensi G20 pada tahun 2022, terdapat dua isu penting terkait batu bara yang tertuang dalam *Joint G20 Energy-Climate Ministerial Communiqué* pada 23 Juli 2021 di Naples, Italia, yaitu: (i) percepatan proses dekarbonisasi dalam satu dekade ke depan di mana akan ditetapkan tanggal penghapusan penggunaan batu bara; dan (ii) penghentian pembiayaan publik internasional untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang masih terus berlangsung dan penghapusan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien dalam kurun waktu tertentu.

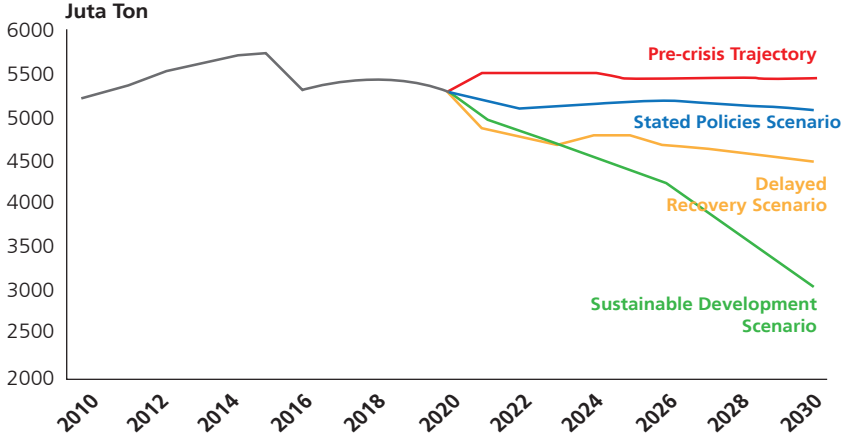

Grafik 6.2. Skenario Permintaan Batu Bara Dunia

Sumber: IEA – International Energy Agency

Terkait tuntutan penerapan *green economy* dan *sustainable development*, diperkirakan *demand* dan harga batu bara akan mengalami penurunan dalam beberapa tahun karena beberapa negara mulai mengadopsi kebijakan yang lebih memihak Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Tuntutan tersebut terlihat dari Grafik 6.2. dengan *sustainable development scenario.* Dengan menggunakan *gravity model*, pengenaan *carbon tax* dari negara mitra dagang utama (Cina, India, dan Jepang) akan menurunkan daya saing ekspor batu bara Kalimantan. Meski demikian, terdapat peluang untuk pengembangan industri methanol seiring dengan tren peningkatan global *demand* dan harga, yang ditunjukkan oleh Grafik 6.3. Dengan demikian, pengembangan industri *Coal to Methanol* (CTM) berpotensi untuk meningkatkan penerimaan ekspor yang lebih besar daripada ekspor batu bara mentah.

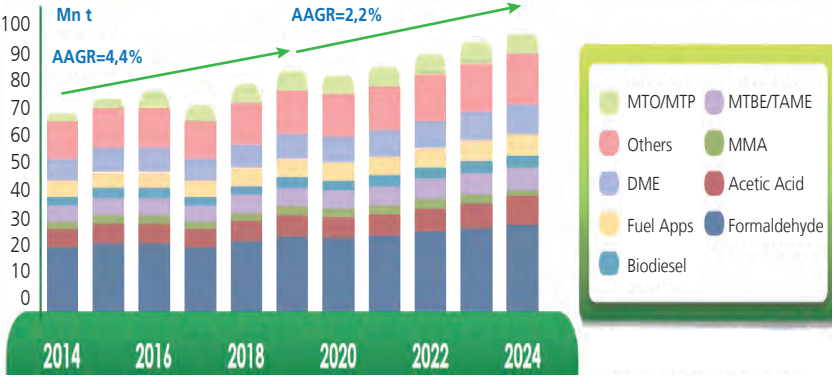

Grafik 6.3. Permintaan Methanol Dunia
Sumber: Argus Media

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB nasional sangat besar sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penghasil produksi batu bara terbesar kedua setelah Kalimantan Timur yang mampu berperan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pendapatan menengah. Kalimantan Selatan memiliki peran penting terhadap perekonomian nasional, namun tidak berperan signifikan terhadap perekonomian

Kalimantan Selatan sendiri terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat seperti pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan tingkat pengangguran. Dominasi batu bara terhadap ekonomi Kalimantan Selatan juga belum berdampak signifikan terhadap kemakmuran masyarakat lokal karena usaha pertambangan batu bara membutuhkan modal yang besar, sehingga pelaku usaha yang mampu beroperasi di subsektor tersebut pada umumnya perusahaan besar yang berasal dari luar Kalimantan. Mayoritas perusahaan tersebut berkantor di Jakarta sehingga dengan kondisi tersebut, keuntungan yang didapat dari usaha pertambangan batu bara akan direpatriasi ke daerah asal, terutama Jawa. Selain itu, tenaga kerja yang bekerja mayoritas bukan penduduk lokal tapi merupakan tenaga kerja migran dari luar daerah Kalimantan Selatan. Seperti halnya sektor kehutanan, eksplorasi batu bara juga membawa dampak bagi perekonomian lokal dengan kerusakan lingkungan, penurunan kesuburan lahan, hingga potensi banjir.

Pada tahun 2019, terjadi penurunan harga batu bara dan perubahan UU otonomi daerah yang mengatur kewenangan izin usaha pertambangan. Pemberian izin tidak lagi dilakukan oleh kabupaten, namun diberikan ke provinsi dan kemudian di tahun 2020 dikeluarkan lagi kebijakan yang mengatur bahwa semua izin usaha pertambangan diserahkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Pengawasan perpajakan perusahaan tambang dengan izin PKP2B langsung dari KPP Madya tidak lagi di KPP Pratama juga berpengaruh terhadap aktivitas produksi sektor pertambangan. Produksi batu bara yang tinggi menjadikan Kalimantan sebagai salah satu wilayah kontributor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor sumber daya alam tidak terbarukan (pertambangan dan penggalian). Di sisi lain, pemungutan pajak pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya memperoleh sebagian kecil melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, penerimaan DAU/DAK tersebut belum optimal untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan operasional saja belum mencukupi.

SEKTOR PERKEBUNAN DAN PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

Sektor perkebunan adalah sektor ketiga yang menjadi penopang ekonomi Kalimantan Selatan. Jenis komoditas perkebunan yang menjadi primadona adalah kelapa sawit, jauh melebihi komoditas perkebunan lain seperti karet dan kelapa. Dukungan pemerintah terhadap pengembangan kelapa sawit melalui program PIR-Trans (Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi) adalah salah satu yang membuat komoditas kelapa sawit menjadi primadona di Kalimantan Selatan. Berbeda dengan pengusahaan batu bara yang padat modal, usaha perkebunan kelapa sawit dan turunannya relatif lebih inklusif, karena kepemilikan lahan sawit lebih beragam dan dapat dimiliki oleh masyarakat umum, sehingga masyarakat lebih merasakan manfaatnya. Komoditas ini dikembangkan oleh perusahaan besar negara, perusahaan besar swasta, maupun perkebunan rakyat.

Secara nasional, Indonesia merupakan negara produsen sekaligus eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Dari 72,77 juta ton produksi minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) global pada tahun 2019, Indonesia menyumbang hingga 58% atau 47,12 juta ton dari total produksi CPO global. Berdasarkan wilayah, terdapat dua sentra penghasil CPO di Indonesia yaitu Sumatra dan Kalimantan dengan pangsa masing-masing sebesar 57,5% dan 39,1% terhadap total produksi CPO nasional (Gambar 6.4). Sebagai salah satu daerah sentra penghasil, luas perkebunan kelapa sawit Kalimantan pada tahun 2021 mencapai 6,12 juta ha dengan produktivitas sebesar 3,79 ton/ha per tahun.

Berbagai kebijakan dan program dilakukan pemerintah untuk memajukan sektor perkebunan, antara lain dengan cara peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia petani pekebun, pengembangan agribisnis dan produksi perkebunan serta peningkatan mutu dan pemasaran hasil perkebunan. Di tahun 2013, luas area komoditas kelapa sawit di Kalimantan Selatan tahun 2013 mencapai 372.720 ha dengan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat melalui pemanfaatan dana program kredit koperasi untuk anggota (KKPA) untuk kelapa sawit yang dilaksanakan oleh 5 PBS yang bertindak sebagai inti dan melibatkan petani

plasma sebanyak 76.487 KK. Pada tahun 2020 telah meluas mencapai 425.932 ha, di mana luas perkebunan sawit perusahaan atau swasta 74%, BUMN 5,7%, dan sisanya 20,3% adalah perkebunan rakyat.[15] Sedangkan produksi kelapa sawit tahun 2020 sebesar 1.120.053 ton dengan produksi CPO sebesar 585.713 ton (Gambar 6.4.).[16] Tren peningkatan luas perkebunan sawit ini terus berlanjut hingga data terakhir pada tahun 2021 mencapai 504.919 ha. Secara spasial, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit terbesar di Kalimantan.

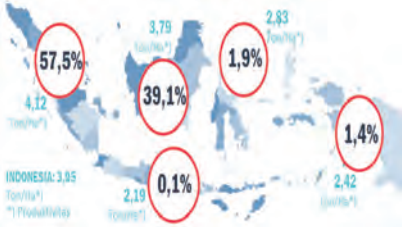

Provinsi	Produksi (Ton)	Luas Lahan (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)
Kalimantan Barat	5.635.683	2.070.272	3,35
Kalimantan Tengan	7.920.460	2.049.790	4,45
Kalimantan Selatan	1.608.256	504.919	3,86
Kalimantan Timur	3.939.049	1.333.905	3,56
Kalimantan Uatara	310.667	160.089	2,35
KALIMANTAN	**19.414.117**	**6.118.975**	**3,79**
NASIONAL	**49.710.345**	**15.081.021**	**3,95**

Gambar 6.4. Gambaran Umum Statistik Perkebunan Kelapa Sawit
Sumber: Statistik Perkebunan Kelapa Sawit (2019–2021), Kementerian Pertanian

Kinerja minyak kelapa sawit yang cukup besar turut mendorong peranan sektor pertanian dan sektor industri pengolahan dalam kegiatan perekonomian di Kalimantan Selatan dan Kalimantan secara keseluruhan, tercermin dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan hingga semester I 2021 yang cukup besar, yaitu masing-masing sekitar 25,4% dan 16,3% dan menempati urutan kedua dan ketiga setelah sektor pertambangan.

Program kemitraan yang menonjol dan masih berlangsung di Kalimantan Selatan adalah kemitraan inti plasma seperti program PIR untuk tanaman karet dan program KKPA untuk kelapa sawit. Sedangkan

15 "Kalsel Dorong Pengembangan Industri Kelapa Sawit", https://mediaindonesia.com/nusantara/218033/Kalsel-dorong-pengembangan-industri-kelapa-sawit.

16 "Kalsel Tertinggi Ekspor Pertanian, Paman Birin Bersyukur", https://www.astra-agro.co.id/2021/09/19/Kalsel-tertinggi-ekspor-pertanian-paman-birin-bersyukur/

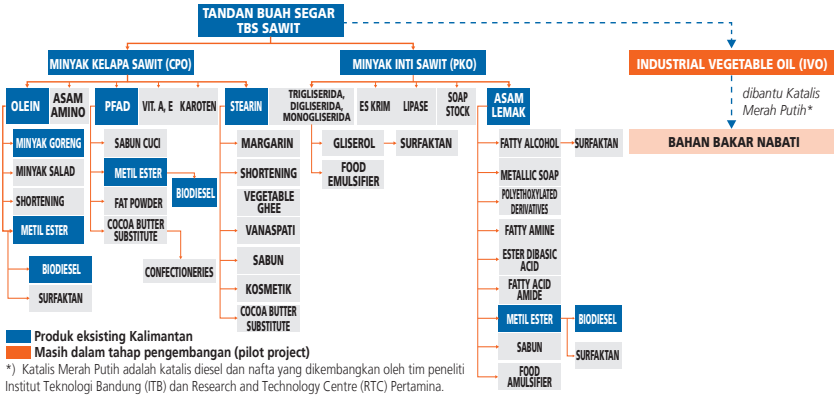

Gambar 6.5. Grafik Ilustrasi Industri Kelapa Sawit

Sumber: Diolah dari Kementerian Perindustrian

kemitraan lainnya adalah waralaba perbenihan kelapa sawit, khususnya Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dengan beberapa penangkar bibit.

Perkembangan perkebunan kelapa sawit yang pesat mendorong tumbuhnya industri turunan berupa minyak kelapa sawit (CPO). Kementerian Perindustrian memetakan industri turunan ini dalam Gambar 6.5. Dalam sepuluh tahun terakhir, CPO Kalimantan Selatan telah menjadi sumber penerimaan ekspor utama setelah batu bara. Tidak hanya untuk Kalimantan Selatan, CPO sebagai bahan baku juga menjadi industri prioritas Kalimantan.

Menurut data DPMPTSP Kalimantan Selatan, saat ini terdapat 33 pabrik CPO yang tersebar di beberapa kabupaten, seperti Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, dan Barito Kuala dengan kapasitas terpasang 1.500 ton TBS/jam. Di Kalimantan Selatan juga terdapat 2 pabrik minyak goreng (*refinery*) yang terletak di Kabupaten Kotabaru, yaitu PT Smart Tbk dengan kapasitas 3.000 ton/hari dan PT Golden Hope Nusantara dengan kapasitas 2.500 ton/hari.

Secara nasional, pada tahun 2020, sektor industri hilir CPO menunjukkan kinerja produksi dan ekspor yang tinggi dengan nilai mencapai US$22,73 miliar. Lebih lanjut, ekspor minyak sawit mentah

cenderung mengalami penurunan seiring serapan domestik yang terus membaik didorong implementasi program B30 dalam rangka menekan impor BBM. Program hilirisasi industri CPO tersebut merupakan wujud kesuksesan industrialisasi sumber daya alam yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, komoditas kelapa sawit dan minyak kelapa sawit semakin digemari pasar global untuk keperluan 6F: *Food* (pangan), *Fuel* (bahan bakar terbarukan), *Fine Chemical* (sabun dan *personal wash*), *Fito-nutrient* (vitamin dan nutrisi), *Feed* (pakan ternak), dan *Fiber* (serat untuk material baru) (Kemenperin, 2021). Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015–2035, pengolahan produk turunan CPO dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu oleo-kimia (*oleochemical)*, oleo-pangan (*oleofood*), dan biodiesel.

Kelapa sawit merupakan komoditas ekspor utama Kalimantan Selatan yang tidak hanya berkontribusi menghasilkan devisa dan membuka lapangan kerja, tetapi juga menawarkan berbagai potensi nilai tambah seperti kapasitas *refinery*[17], hingga ke produk-produk hilir terkait makanan, energi, dan industri. Terkait hal tersebut, produk turunan sawit yang dihasilkan di Kalimantan Selatan umumnya masih terbatas pada produk turunan satu dan/atau dua yang sederhana dan diolah dengan teknologi rendah *(low tech),* berupa barang setengah jadi seperti *olein* dan *stearin* (Gambar 6.5.). Masih terbatasnya peningkatan nilai tambah produk CPO Kalimantan Selatan melalui hilirisasi disebabkan oleh kendala struktural. Dukungan dan ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai, terutama fasilitas pelabuhan laut dalam membuat sebagian besar CPO[18] dari Kalimantan Selatan dikirim ke beberapa pabrik di Sumatra, Jawa, dan Malaysia untuk diolah lebih lanjut menjadi produk turunan yang lebih kompleks. Keadaan di Kalimantan Selatan ini juga terjadi di seluruh wilayah Kalimantan. Faktor penahan lainnya yang menyebabkan hilirisasi CPO di Kalimantan relatif terbatas dibandingkan

17 Kapasitas *refinery* terdiri dari kapasitas produksi minyak goreng (28–30 juta ton), biodiesel (2,02 juta KL), sabun dan detergen (3,6 juta on), oleokimia dasar (1,7 juta ton), dan margarin/*shortening* (0,8 juta ton).

18 Berdasarkan hasil *liaison* Bank Indonesia, terdapat sekitar 44 perusahaan CPO di wilayah Kalimantan dan hanya 6 di antaranya yang telah mengembangkan produk hilir seperti minyak goreng dan biodiesel. Sisanya terbatas pada pengolahan TBS menjadi minyak kelapa sawit (CPO).

dengan Sumatra dan Jawa adalah adopsi teknologi tinggi yang masih terkendala oleh nilai investasi yang mahal, serta pertimbangan *economic of scale* oleh pelaku usaha.

Gambar 6.6. Perencanaan Pengembangan Kawasan Industri, RPJMN 2020–2024

Sumber: Bappenas
Keterangan: Kawasan Industri Prioritas (font merah), Kawasan Industri Pengembangan (font hitam).

Sebagai upaya untuk mendorong penguatan industri CPO di Kalimantan, saat ini pemerintah tengah melakukan pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang didukung fasilitas pelabuhan laut dalam. Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 mengutamakan pembangunan KI di luar Pulau Jawa yang mencakup 9 KI prioritas yang difokuskan pada percepatan penyediaan sarana penunjang, fasilitas perizinan, peningkatan investasi, revitalisasi pasca bencana, serta Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dari 6 KI di Kalimantan yang masuk dalam RPJMN 2020–2024, salah satunya berada di Kalimantan Selatan, yaitu Kawasan Industri Batulicin. Pemetaan tersebut tergambar di Gambar 6.6. Saat ini tengah dilakukan pembangunan fasilitas pelabuhan laut dalam yang terintegrasi dengan KI Batulicin dengan perkembangan

terkini adalah pembangunan dermaga pelabuhan sepanjang ±300 meter untuk memfasilitasi sandaran bagi kapal bermuatan besar (40.000 DWT), sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan aktivitas ekspor CPO. Dua Kawasan Industri merupakan KI Prioritas yaitu KI Ketapang di Kalimantan Barat dan KI Surya Borneo di Kalimantan Tengah (Gambar 6.6.) dengan fokus industri untuk hilirisasi kelapa sawit, yang telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung antara lain *multipurpose jetty, tank farm,* dan *refinery* CPO dengan kapasitas 2.500 ton/hari. Sementara tiga KI yang lain, yaitu KI Tanah Kuning (Kalimantan Utara), KI Jorong (Kalimantan Selatan), dan KI Batanjung (Kalimantan Tengah) akan dikembangkan untuk industri pengolahan lainnya. Selain itu, beberapa proyek pembangunan pelabuhan laut dalam lainnya juga terus dilakukan, antara lain Pelabuhan Kizing di KEK Mempawah, Kalimantan Barat dan Pelabuhan Maloy di KEK Maloy Batuta, Kalimantan Timur.

Beberapa perusahaan CPO berskala besar dan berorientasi ekspor yang beroperasi di wilayah Kalimantan telah mampu mengolah produk turunan CPO berupa minyak goreng dan biodiesel. Terdapat 5 pabrik minyak goreng yang telah beroperasi di Kalimantan dengan kapasitas produksi berkisar antara 2.000 ton/hari sampai dengan 3.000 ton/hari (Tabel 6.1). Pabrik tersebut tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Produk minyak goreng yang dihasilkan umumnya dikirim ke berbagai provinsi di Kalimantan, seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, dikirim ke pabrik di Jawa untuk *supporting* industri dan proses pengemasan, serta di ekspor ke Malaysia. Selain itu, beberapa produk minyak goreng juga masih dalam bentuk kemasan bantal dikarenakan kapasitas dari pabrik pengemasan eksisting di Kalimantan yang relatif kecil, hanya 120 ton/hari. Pengembangan produk minyak goreng di Kalimantan memiliki potensi yang cukup besar untuk terus dikembangkan karena kebutuhan minyak goreng saat ini masih ada yang dipenuhi dari daerah luar Kalimantan, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung (Gambar 6.7).

Tabel 6.1.
Perusahaan Produsen Minyak Goreng Wilayah Kalimantan

No.	Nama Perusahaan	Kapasitas	Pemasaran
1.	Sime Darby Oil Plantation (Kalimantan Selatan)	2.500 ton/hari	Produk dipasarkan dengan merk dagang Alif yang mayoritas diekspor ke Malaysia dengan kemasan 0,5/1/2 liter. Untuk penjualan domestik masih kecil karena belum bekerja sama dengan retail modern. Hanya bergantung pada distributor PT Sari Mekar Cahaya Persada di Pasar 5 Banjarmasin.
2.	PT SMART Tbk (Kalimantan Selatan)	3.000 ton/hari	Penjualan produk minyak goreng dalam bentuk curah dan dipasarkan ke Semarang dan Makassar, serta sebagian dijual ke perusahaan dalam satu grup.
3.	PT Sinar Alam Permai (Kalimantan Tengah)	3.000 ton/hari	Produk minyak goreng terdiri dari minyak goreng kemasan (Sania, Fortune, dan merk lain sesuai pengemasan UMKM lokal sekitar) dan minyak goreng tidak berkemasan/curah. Namun, saat ini perusahaan telah berencana memasarkan produknya yang sebelumnya curah menjadi kemasan bermerk yaitu Minyak Kita dalam bentuk *pillow-pack* kemungkinan rilis bulan April 2021. Untuk produk minyak goreng kemasan dipasarkan di wilayah Kalimantan Tengah dan dikirim ke Jawa dalam bentuk curah.
4.	PT Sukajadi Sawit Mekar (Kalimantan Tengah)	3.000 ton/hari	Minyak goreng yang diproduksi secara lokal di pabrik Bagendang adalah minyak goreng kemasan bantal dengan merk M&M (untuk area Kalimantan Tengah dan Medan) dan minyak goreng kemasan besar Sunco yang diproses di pabrik Surabaya.
5.	Wilmar Cahaya Indonesia (Kalimantan Barat)	3.000 ton/hari	Produk minyak goreng yang dipasarkan bermerk Sania, Sofia, dan merk lainnya untuk memenuhi kebutuhan Kalbar dan sisanya akan dikirimkan ke Jawa. Adapun untuk pemasaran minyak goreng curah disalurkan oleh agen-agen ke pasar dan minimarket di Kalbar.

Sumber: Liasion Bank Indonesia

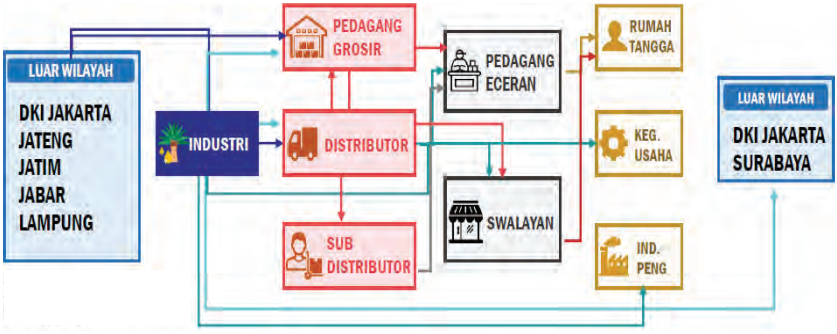

Gambar 6.7. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng Wilayah Kalimantan
Sumber: Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Indonesia Tahun 2019, diolah dari data BPS

Selain minyak goreng, produk hilir turunan CPO yang banyak berkembang di Kalimantan adalah biodiesel. Hal ini sejalan dengan penerapan kebijakan pemanfaatan biofuel, khususnya biodiesel oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi nasional melalui Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2008, dimulai dari volume pencampuran 2,5% dan terus meningkat hingga mencapai volume pencampuran sebesar 30% terhitung sejak 1 Januari 2020 atau disebut program B30. Total kapasitas terpasang (aktif) industri biodiesel nasional tercatat sebesar 13,43 juta KL, dengan kapasitas terbesar adalah Sumatra (7,79 juta KL atau 58,0%) dan Jawa (3,14 juta KL atau 23,4%). Saat ini terdapat empat Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang bertanggung jawab dalam pengalokasian biodiesel di wilayah Kalimantan, yaitu PT SMART (Kalimantan Selatan), PT Sukajadi Sawit Mekar (Kalimantan Tengah), PT Energi Unggul Persada (Kalimantan Timur), dan PT Kutai Refinery Nusantara (Kalimantan Timur) dengan total kapasitas terpasang mencapai 2,02 juta KL atau berkontribusi sebesar 15,0% dari total kapasitas terpasang nasional (Tabel 6.2).

Tabel 6.2.
Produsen Biodiesel Wilayah Kalimantan Tahun 2021

Perusahaan	Provinsi	Kapasitas (KL)	Alokasi (KL)	Utilisasi (%)
PT SMART Tbk	Kalsel	440.517	352.782	80,08%
PT Sukajadi Sawit Mekar	Kalteng	402.299	261.767	65,07%
PT Energi Unggul Persada	Kaltim	758.621	318.953	42,04%
PT Kutai Refinery Nusantara	Kaltim	419.540	398.979	95,10%
Total		**2.020.977**	**1.332.481**	**65.93%**

Sumber: Diolah dari data Kementerian ESDM – EBTKE, APROBI

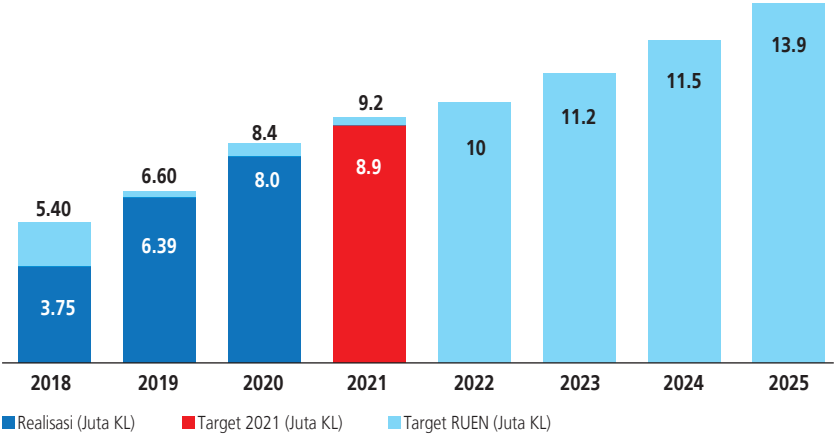

Grafik 6.4. Perkembangan Implementasi Kebijakan Biodiesel Indonesia

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)

Keterangan: Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

Pemerintah telah menetapkan besaran alokasi B30 pada tahun 2021 adalah 9,2 juta KL (Grafik 6.4.). Alokasi[19] B30 untuk wilayah Kalimantan pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,33 juta KL, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 1,06 juta KL didorong oleh penambahan 1 (satu) BU BBN yaitu PT Energi Unggul Persada. Implementasi program B30 bertujuan untuk menjaga ketahanan

19 Alokasi merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 252.K/10/MEM/2020.

energi nasional, meningkatkan nilai tambah ekonomi, mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), mendukung ekonomi domestik, dan menekan impor bahan bakar fosil. Dengan besaran alokasi yang telah ditetapkan Pemerintah, program B30 pada tahun 2021 berpotensi menurunkan impor solar sebesar US$3,91 miliar untuk skala nasional dan US$0,57 miliar untuk skala Kalimantan. Lebih lanjut, akan mendorong peningkatan nilai tambah[20] CPO baik nasional maupun Kalimantan, masing-masing sebesar Rp11,26 triliun dan Rp1,63 triliun; serta serapan tenaga kerja masing-masing sebanyak 1,15 juta orang untuk nasional dan 0,17 juta orang untuk Kalimantan.[21]

Berbeda dengan sektor batu bara yang hanya dikuasai oleh sebagian kecil masyarakat, usaha perkebunan kelapa sawit dan turunannya relatif lebih inklusif, karena kepemilikan lahan sawit lebih beragam dan dapat dimiliki oleh masyarakat umum, sehingga masyarakat lebih merasakan manfaatnya. Perekonomian daerah yang mengandalkan sumber daya alam kehutanan, hasil CPO kelapa sawit, dan pertambangan secara perlahan jika tidak ada kebijakan yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan seperti hilirisasi sumber daya alam, maka pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih tinggi tidak dapat dipertahankan. Dampak pertumbuhan ekonomi yang melemah adalah jumlah pengangguran dan penduduk miskin yang bertambah di tengah sumber daya alam berupa kelapa sawit dan batu bara yang berlimpah.

NATURAL RESOURCE CURSE (NRC) DAN *TRICKLE DOWN EFFECT*

Sejak reformasi tahun 1998, perekonomian Kalimantan Selatan mulai bergeser dari perekonomian agraris tradisional khususnya tanaman pertanian—padi, kepada perekonomian yang mendasarkan pada pertanian perkebunan seperti sawit serta sektor pertambangan yang bersifat ekstraktif seperti batu bara. Hal tersebut ditandai dengan

20 Nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan, ataupun penyimpanan dalam suatu produksi (Kementerian Keuangan, 2012).

21 Perhitungan oleh Bank Indonesia Provinsi Kalsel dengan merujuk kepada simulasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

kemunculan banyak perkebunan sawit dan perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kalimantan Selatan.

Perkembangan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan periode di mana perekonomian masih didominasi pertanian agraris. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2010–2019 tercatat sebesar 5,14% per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan periode 2001–2010 sebesar 5,08%. Sektor pertambangan yang menjadi muara dari aktivitas pertambangan batu bara masih berada pada peringkat satu. Sektor pertambangan batu bara pada tahun 2001 memiliki pangsa sebesar 21,05% kemudian sempat naik menjadi 21,34% pada tahun 2002, sampai mencapai rekor tertinggi 28,48% pada tahun 2011, namun perlahan menurun menjadi 16,46% pada tahun 2020. Sektor terbesar berikutnya adalah kelapa sawit, dalam hal ini perkebunan dan industri pengolahan CPO, yang menduduki pangsa sebesar 12,46% pada tahun 2020, turun dari pangsa 13,6% pada tahun 2010. Perubahan struktur perekonomian Kalimantan Selatan tersebut telah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang terkait dengan kedua sektor tersebut, antara lain sektor industri pengolahan untuk produk turunan sawit dan sektor pendukung pertambangan antara lain jasa penyewaan alat pertambangan, *leasing* kendaraan maupun penyewaan alat berat. Selain itu, aktivitas perekonomian secara umum di kota-kota yang dekat dengan lokasi tambang seperti Kotabaru dan Tabalong juga bergerak lebih cepat seperti terlihat dari beberapa indikator antara lain keberadaan hotel, restauran, dan sarana hiburan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM (2020), mayoritas perusahaan tambang yang beroperasi di Kalimantan Selatan merupakan perusahaan terbuka besar yang berskala nasional meski ada beberapa di antaranya yang merupakan perusahaan lokal kecil. Hal tersebut menyebabkan lokasi kantor pusat perusahaan umumnya tidak berada di Kalimantan Selatan tetapi mayoritas berada di Pulau Jawa, di Kalimantan Selatan hanya berupa kantor operasional. Sementara di sektor perkebunan sawit, kepemilikan kebun relatif beragam. Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan (2019), kepemilikan kebun sawit di Kalimantan Selatan terdiri dari Perkebunan Besar Swasta

(73,53%), Perkebunan Rakyat (24,95%), dan Perkebunan Besar Negara (1,52%).

Sementara itu, perubahan cepat perekonomian Kalimantan Selatan dari pertanian agraris ke perkebunan dan ke pertambangan tidak selalu berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sektor pertambangan merupakan sektor yang bersifat padat modal sehingga ketika perusahaan meningkatkan jumlah produksi, maka yang lebih ditekankan adalah peningkatan produktivitas barang modal—mesin daripada produktivitas maupun penambahan jumlah tenaga kerja.[22] Berdasarkan data BPS (2020), sektor pertambangan menyerap tenaga kerja sebanyak 70.700 orang atau 3,23% persen dari angkatan kerja di Kalimantan Selatan.

Selain faktor penyerapan tenaga kerja yang rendah, kondisi ketenagakerjaan di sektor pertambangan juga diperparah dengan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Sektor pertambangan yang memerlukan dukungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian, lebih banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar Kalimantan Selatan. Indeks pembangunan manusia Kalimantan Selatan di bidang pendidikan masih relatif rendah, yaitu 70,91 pada tahun 2020. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian perkebunan sawit relatif lebih baik. Berdasarkan data BPS (2020), sektor pertanian khususnya perkebunan sawit di Kalimantan Selatan menggunakan tenaga kerja sebanyak 694.450 orang atau 31,75% persen dari angkatan kerja.

Keberadaan usaha pertambangan yang marak di Kalimantan Selatan, selain menghasilkan nilai ekonomi bagi perekonomian Kalimantan Selatan tapi juga menimbulkan permasalahan ikutan antara lain kerusakan lingkungan. WALHI Kalimantan Selatan mencatat bahwa luas tutupan hutan Kalimantan Selatan terus mengalami penurunan. Tahun 1990, luas tutupan hutan Kalimantan Selatan seluas 1.915.225 ha. Luasan tersebut mengalami penurunan menjadi 1.079.595 ha di tahun 2000. Selain masalah luasan hutan tersebut, permasalahan lainnya adalah masalah polusi, kerusakan lingkungan dan fasilitas umum di daerah-daerah yang berdekatan dan berada di jalur transportasi hasil tambang.

22 Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Indonesia*, (Yogyakarta: 2014).

Selain terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan dan kerusakan lingkungan, ketergantungan perekonomian Kalimantan Selatan terhadap sektor pertambangan khususnya batu bara juga memiliki dimensi lain utamanya terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Keberadaan perusahaan tambang batu bara yang memiliki skala usaha besar dan bersifat padat modal, tidak terlalu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Struktur industri yang skala besar dan padat modal tersebut membuat pendapatan dari bisnis batu bara sedikit sekali mempunyai efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Berdasarkan data ekspor pada Agustus 2021, ekspor batu bara Kalimantan Selatan tercatat senilai US$ 635 juta. Jumlah tersebut meningkat cukup tajam dibandingkan dengan Agustus 2020, yang sebesar US$ 340,25 juta. Namun demikian, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan tidak mengalami perubahan yang signifikan, di mana pendapatan per kapita masyarakat Kalimantan Selatan pada kuartal kedua 2021 tercatat Rp11.058.508, hanya naik sedikit dibandingkan dengan kuartal kedua 2020 yang sebesar Rp10.191.503.

Dalam tataran akademis, dikenal fenomena Kutukan Sumber Daya Alam atau *Natural Resource Curse* (NRC) yang terjadi di banyak negara. Indikator tersebut merupakan komposit dari berbagai indikator yang menunjukkan ketergantungan satu daerah terhadap sumber daya alam dan bagaimana industri manufaktur mulai tumbuh untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru. Definisi tersebut pertama kali diungkapkan oleh Auty (1993) yang menemukan bahwa negara-negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam tidak mampu memanfaatkan kekayaan tersebut untuk mendorong perekonomian mereka. Hasilnya adalah negara yang kaya SDA tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan negara yang miskin SDA. Melalui penelitian tersebut, didapatkan indikator ketergantungan suatu negara pada SDA. Studi empiris yang pertama dilakukan oleh Sachs dan Warner (1995) membuktikan adanya pengaruh negatif antara indikator ketergantungan SDA dan pertumbuhan ekonomi.[23] Penelitian Sachs dan Warner menjadi

23 Jeffrey D Sachs & Andrew M. Warner, (1995), "*Natural Resource Abundance and Economic Growth*," NBER Working Papers 5398.

inisiator kajian empiris yang menggunakan beragam pendekatan dan alat analisis untuk menunjukkan terjadinya fenomena tersebut di banyak negara.

Secara nasional, Indonesia tidak termasuk negara yang mengalami NRC karena berhasil menjadikan industri pengolahan sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Namun, secara spasial provinsi yang menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi Indonesia justru terjebak dalam NRC. Penelitian Rahma (2019), menemukan fenomena NRC di Indonesia pada level provinsi, di mana Provinsi Kalimantan Timur, dengan sumber daya dan cadangan batu bara tertinggi menduduki peringkat pertama daerah dengan NRC, disusul Kalimantan Selatan di urutan ke-6, Kalimantan Tengah ke-11, dan Kalimantan Barat ke-21.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain, ketergantungan yang besar terhadap SDA tambang tidak menjamin suatu daerah menjadi sejahtera dan memiliki kinerja pembangunan yang berkelanjutan. Akibat berikutnya, fenomena NRC membuat suatu provinsi dengan ketergantungan SDA tambang yang lebih besar lebih rentan terhadap gejolak eksternal.

Kalimantan Selatan bertumpu pada sektor pertambangan yang tidak mengandalkan *intensive labor* sehingga pertumbuhannya hanya dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat. Asesmen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan (2020) terhadap perdagangan batu bara, juga menunjukkan bahwa pertambangan batu bara tidak memiliki *trickle-down effect* terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan, dalam jangka pendek maupun panjang. Hal ini terlihat dari pengujian *Impulse Response Function*, di mana perubahan harga batu bara tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat konsumsi masyarakat yang direfleksikan dengan tingkat inflasi di Kalimantan Selatan. Hal ini mengindikasikan tidak ada geliat peningkatan konsumsi masyarakat saat harga batu bara naik. Salah satu penyebabnya adalah kantor pusat perusahaan pertambangan yang berada di luar Kalimantan sehingga transaksi keuangan tidak di wilayah Kalimantan. Selain itu, pertambangan batu bara juga tidak mempekerjakan tenaga kerja lokal yang mengakibatkan perubahan harga batu bara tidak memberi dampak terhadap inflasi Kalimantan, baik dalam jangka pendek maupun jangka

panjang. Sebaliknya, kenaikan harga CPO lebih memiliki dampak terhadap inflasi Kalimantan Selatan. Dampak terhadap inflasi, menjadi indikator bagaimana lapangan usaha utama daerah menjadi sumber penggerak konsumsi masyarakat setempat, melalui jalur gaji/upah dan kepemilikan modal. Dampak yang berbeda tersebut terkait dengan perbedaan struktur kepemilikan dari kedua industri di mana sektor pertambangan yang padat modal didominasi oleh perusahaan besar sementara sektor pertanian-perkebunan yang menjadi input industri CPO memiliki kepemilikan yang lebih beragam. Industri CPO juga menyerap tenaga kerja lokal yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan industri pertambangan batu bara yang banyak menggunakan alat berat.

THE NEW KALIMANTAN

Kalimantan Selatan mendapat hadiah awal tahun 2021 berupa banjir besar, untuk pertama kali selama 50 tahun terakhir. Di tahun yang sama, pada triwulan empat, banjir tersebut juga dialami oleh banyak provinsi di Kalimantan. Bencana tersebut menjadi sekian banyak tanda terjadinya anomali cuaca, yang kemudian dikaitkan dengan perubahan iklim. Secara global, di tahun 2015 juga terjadi bencana polusi yang didokumentasikan dalam film dokumenter *Under The Dome*. Oleh karena itu, periode ini adalah periode paling menantang dalam sejarah, di mana akan terjadi perubahan lanskap ekonomi dalam beberapa tahun ke depan. Keputusan dan kebijakan ekonomi yang diambil saat ini akan berdampak untuk puluhan generasi di depan. Selama ini, pertumbuhan ekonomi Kalimantan, didukung oleh kinerja LU Pertambangan yang memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Kalimantan. Ditinjau dari struktur pendukungnya, sektor pertambangan memberi kontribusi terhadap perekonomian Kalimantan sebesar 26,94%. Subsektor pertambangan batu bara dan lignit memberi kontribusi terbesar sebesar 72,31% dengan kontribusi terbesar berasal dari Kaltim sebesar 78,33% dan menyusul Kalimantan Selatan sebesar 12,08%.

Pada tahun 2021, produksi batu bara Kalimantan, termasuk Kalimantan Selatan diproyeksikan akan meningkat karena dorongan harga batu bara global yang masih terus naik, dengan tren Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang masih naik sampai akhir tahun 2021. Produksi batu bara 2022 diprakirakan naik menjadi 642 juta ton. Dari domestik, peningkatan permintaan terutama untuk kebutuhan industri pengolahan dan pemurnian, serta PLTU. Selain itu, permintaan luar negeri khususnya dari India dan Cina juga masih tinggi.

Meskipun kontribusi batu bara Kalimantan terhadap ekspor batu bara nasional sangat signifikan, namun sangat disayangkan, batu bara masih dijual mentah, yang terindikasi dari kontribusi subsektor industri pengolahan batu bara yang kecil. Dengan demikian, batu bara belum memberikan nilai tambah yang optimal terhadap PDRB Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, dengan cadangan yang melimpah, tugas berikutnya adalah mendorong peningkatan nilai tambah dengan sentuhan teknologi untuk dapat memaksimalkan nilai ekonomisnya. Pengolahan atau hilirisasi batu bara di Kalimantan, menjadi suatu keharusan dan peluang sebagai sumber ekonomi baru untuk "New Kalimantan". Untuk mewujudkan "Kalimantan Baru", reformasi struktural dan transformasi industri bagi Kalimantan Selatan dan Kalimantan adalah satu satunya pilihan.

Reformasi struktural dalam bentuk transformasi industri adalah kunci utama tidak hanya untuk masa depan Kalimantan Selatan, namun juga untuk Indonesia. Reformasi struktural ini harus dapat menaikkan sekaligus memperbaiki profil ekspor Indonesia, dari sektor primer yang ekstraktif ke sektor sekunder yang berbasis industri manufaktur, untuk menurunkan *Current Account Deficit* (CAD) yang selama ini menjadi kendala bagi perekonomian Indonesia untuk dapat tumbuh lebih tinggi dan berkelanjutan. Upaya ini strategis dan penting dilakukan, agar Indonesia dapat terlepas dari masalah '*middle income trap*' dan bertransformasi menjadi negara maju berpendapatan tinggi (*high income country*).

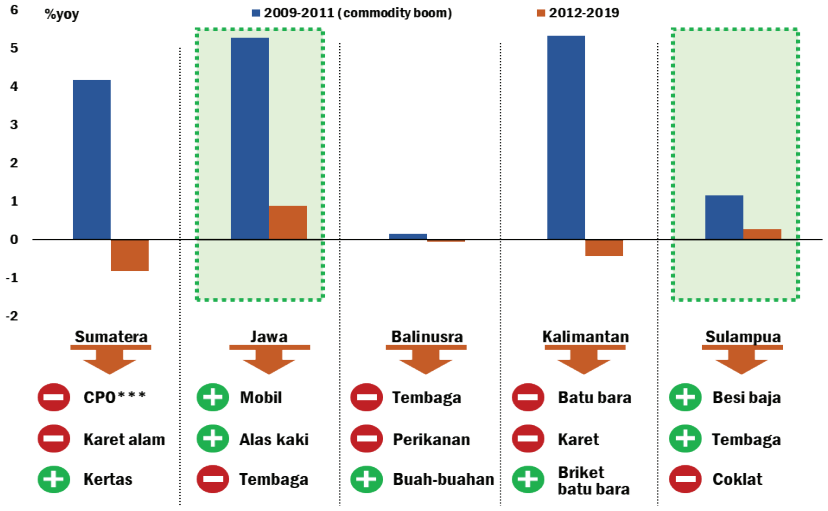

Grafik 6.5. Rata-Rata Sumbangan Wilayah terhadap Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Nasional

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, daerah yang bergantung pada ekspor produk yang bernilai tambah memiliki daya tahan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang bergantung pada komoditas primer.

Grafik 6.5. menggambarkan ekonomi pasca *commodity boom* (2009–2011) di mana hanya Jawa (sebagai pusat industri) dan Sulampua yang masih berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekspor karena ditopang ekspor produk manufaktur. Ekonomi Jawa tumbuh karena dukungan sektor sekunder atau industri manufaktur, dan sektor tersier atau jasa, sementara ekonomi Kalimantan tumbuh hanya karena dukungan sektor primer, dalam hal ini pertambangan. Tanpa industri yang kuat, niscaya ekonomi Kalimantan Selatan akan tetap rentan terhadap pergerakan harga komoditas global dan permintaan negara mitra dagang.

Dunia saat ini sedang menghadapi transisi energi dan membutuhkan tata kelola dunia yang baru untuk memajukan pertumbuhan ekonomi tanpa merusak bumi. Di tengah target Paris Agreement dan kesepakatan

G7 yang menghentikan pembiayaan proyek eksplorasi batu bara di akhir tahun 2021, serta kesepakatan G20 untuk menghentikan pembiayaan internasional terhadap proyek batu bara pada tahun 2025, Presiden Jokowi menjawabnya dengan komitmen untuk melakukan hilirisasi Sumber Daya Alam. Bahkan secara khusus, hilirisasi batu bara dan energi hijau menjadi dua dari tiga strategi ekonomi Presiden Jokowi yang dipaparkan pada tanggal 26 Agustus 2021 di depan 100 ekonom. Hilirisasi batu bara adalah sebuah keniscayaan dan kepastian. Tidak ada pilihan, selain melakukan perubahan.

Dalam jangka menengah dan panjang, mempertimbangkan arah kebijakan energi dunia yang lebih ramah lingkungan, upaya mendapatkan nilai tambah yang tinggi untuk produk SDA, dan meminimalisir dampak fluktuasi harga komoditas, maka hilirisasi batu bara perlu terus didorong. RIPIN atau Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015–2035 menetapkan hilirisasi batu bara dalam bentuk gasifikasi menjadi methanol atau *Coal to Methanol* (CTM) serta batu bara ke *Dimethyl Ether* (DME). Berdasarkan *roadmap* Kementerian ESDM, dari 7 jenis hilirisasi, 2 di antaranya sudah mulai dilakukan di Kalimantan yaitu *cokes making* (kokas dan semikokas di Kalimantan Utara) dan CTM di Kalimantan Timur oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional).

Upaya *upgrading* batu bara menjadi semi kokas ini dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi Kalimantan dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan industri baja dan smelter nikel di Sulawesi (LVC). Hilirisasi juga telah masuk dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Di samping proyek hilirisasi oleh KPC di Kalimantan Timur, Adaro juga akan memulai proyek hilirisasi besar mereka di Kalimantan Selatan. Hilirisasi melalui gasifikasi akan membawa banyak manfaat. Pertama, upaya ini akan membawa dampak lanjutan (*forward linkage*) dengan tumbuhnya berbagai industri petrokimia baru. Diperkirakan, hilirisasi batu bara menjadi DME akan menekan kebutuhan defisit impor LPG nasional dan memberi nilai tambah 8 kali lipat dibandingkan dengan menjual batu bara mentah. Sementara hilirisasi batu bara menjadi *methanol* akan memberi nilai tambah 6 kali lipat sekaligus menjadi jawaban dari berbagai kebutuhan impor. Dengan demikian, prospek hilirisasi batu bara melalui

gasifikasi sangat besar, karena sejalan dengan tren transisi energi global yang akan memberikan konsekuensi terhadap konsumsi batu bara dan lebih lanjut akan memengaruhi kinerja ekspor karena memberikan nilai tambah ekspor yang tinggi.

Kedua, gasifikasi batu bara akan menjadi energi alternatif masa depan sehingga upaya ini juga bertujuan untuk mengurangi impor bahan bakar, meningkatkan ketahanan energi, dan mengurangi emisi. Selain itu, juga memberikan *forward linkage* terhadap industri petrokimia yang memegang peranan sangat penting bagi pengembangan industri di hilirnya. Ketiga, hilirisasi batu bara akan memberi peluang inovasi bagi industri dan membawa kemakmuran bagi negeri. Percepatan hilirisasi batu bara terus dilakukan oleh pemerintah, melalui insentif fiskal maupun nonfiskal.

Investasi akan menjadi kata kunci proses transformasi ke ekonomi hijau, termasuk hilirisasi batu bara ini. Pada tahun 2017, investasi global di bidang energi terbarukan dan efisiensi energi turun sebesar 3% dan bahkan berisiko akan melambat lebih lanjut. Secara umum, bahan bakar fosil memang masih mendominasi investasi energi yang dapat mengancam perkembangan energi hijau. Bahkan, beberapa negara maju dan berkembang masih mengikuti kebijakan energi yang pro-batu bara. Karbon ekstra yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga batu bara baru tersebut akan lebih dari cukup untuk menghapus pengurangan emisi yang dibuat oleh negara lain. Di balik kebijakan publik tersebut, pembiayaan akan menjadi mesin pembangunan proyek infrastruktur termasuk di dalamnya proyek energi hijau. Oleh karena itu, peningkatan investasi jangka panjang dan pembiayaan infrastruktur di sektor ini harus menjadi tujuan kebijakan pemerintah. Secara umum, lembaga keuangan lebih tertarik pada proyek bahan bakar fosil daripada proyek hijau, terutama karena risiko yang terkait dengan teknologi baru ini dan tingkat pengembaliannya yang relatif lebih rendah. Sektor publik di sebagian besar negara, terutama di negara berkembang, tidak mampu mengatasi kesenjangan investasi yang besar ini, sementara di sisi lain sektor swasta tidak menunjukkan minat yang cukup. Alasan utama sektor swasta tidak tertarik untuk memasuki pembiayaan jangka panjang proyek infrastruktur,

termasuk proyek energi hijau, adalah tingkat pengembalian yang rendah dan risiko terkait.[24]

Pentingnya investasi dan dukungan pembiayaan di sektor energi hijau dan secara khusus hilirisasi industri batu bara ini, mendorong Bank Indonesia Kalimantan Selatan untuk berpartisipasi aktif dalam mendorong penawaran investasi ke investor dalam dan luar negeri. Upaya tersebut dilakukan dengan pembentukan *Regional Investor Relation Unit* atau RIRU bekerja sama dengan pemerintah daerah. RIRU Kalimantan Selatan, yang merupakan kerja sama Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah Kalimantan Selatan dengan Pemprov Kalimantan Selatan bertajuk RIRU Intan Kalimantan Selatan.

Secara umum, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan *added value* (nilai tambah) pada seluruh komoditas potensial yang berasal dari hasil alam di wilayah Kalimantan sampai saat ini masih perlu ditingkatkan. Peningkatan nilai tambah diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang baik dan sehat dalam rangka peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri di wilayah Kalimantan Tengah tentu akan sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah yang juga pasti akan turut bersumbangsih terhadap peningkatan perekonomian nasional. Hilirisasi industri juga akan menyerap tenaga kerja masyarakat setempat sehingga turut memberikan kontrol terhadap keberlangsungan industri karena proses industri yang sangat dekat dengan masyarakat setempat.

Kebijakan pemerintah pusat akan sangat memengaruhi program hilirisasi industri sumber daya alam (SDA) di Kalimantan. Kebijakan yang dimaksud adalah regulasi yang jelas dan mengikat. Perusahan yang ingin melakukan hilirisasi juga harus dikategorikan secara jelas sesuai sektor usaha masing-masing.

Industri kayu merupakan contoh minimnya peran pemerintah dalam menyeimbangkan antara eksploitasi alam, peningkatan ekonomi setempat dan keberlangsungan lingkungan hidup. Dalam hal ini, pemerintah pusat

24 Jeffrey D Sachs, Wing Thye Woo, Naoyuki Yoshino, dan Farhad Taghizadeh-Hesary (2019) "*Why Is Green Finance Important?*" (January 22, 2019). ADBI Working Paper 917.

perlu didesak untuk membangun industri di Kalimantan. Pilihan lainnya adalah melakukan moratorium kayu log sehingga tidak boleh keluar dari Kalimantan, kecuali sudah menjadi barang jadi atau setengah jadi.[25]

Proses hilirisasi memerlukan dukungan SDM unggul dan terampil, melalui peningkatan partisipasi sekolah di tingkat menengah untuk bisa menyediakan pekerja yang sesuai kebutuhan industri. Akses pendidikan juga perlu ditingkatkan agar lebih merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penyiapan keterampilan kerja juga sama pentingnya, melalui pembaharuan kurikulum balai-balai latihan kerja dan pendidikan vokasional.

Green economy pada dasarnya adalah sebuah pendekatan untuk mencapai sejumlah tujuan simultan yang membawa kita lebih dekat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang sejati, yakni menghindari dan mengurangi emisi gas rumah kaca, membangun ketahanan terhadap iklim ekstrem dan perubahan jangka panjang, menggunakan sumber daya secara lebih efisien, memberikan peningkatan PDB dan standar hidup yang berkelanjutan dan didistribusikan secara merata, serta menghargai modal alam yang sering tidak terlihat secara ekonomi walaupun telah mendukung keberhasilan ekonomi selama berabad-abad.

Kalimantan telah mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam yang terbarukan secara sistematis untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi bagi generasi mendatang. Di Kalimantan Timur misalnya, mulai tahun 2009 telah dilakukan peletakan dasar transformasi sosial dan ekonomi menuju ke arah ekonomi berbasis sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dengan menerapkan skenario pertumbuhan *green economy* disertai dengan penguatan daya saing berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan. Dengan diterapkannya strategi ini, disertai proses transformasi yang berjalan secara konsisten, maka pada tahun 2030 sektor agroindustri dan agribisnis akan menjadi sektor andalan yang menggerakkan perekonomian di Kalimantan Timur.

25 *Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pacu Hilirisasi Sektor Industri*. Diakses 1 September 2021 https://kalteng.go.id/berita/read/1456/pemerintah-provinsi-kalimantan-tengah-pacu-hilirisasi-sektor-industri

Ekonomi Kalimantan Selatan yang tercipta dari upaya transformasi ekonomi akan memiliki kinerja yang lebih baik dalam jangka panjang. Walaupun pada jangka pendek dan menengah pertumbuhan ekonomi akan mengalami fluktuasi, namun sesudah terjadi transformasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan meningkat dengan kualitas yang lebih baik, mampu menurunkan tingkat pengangguran dan sekaligus tingkat kemiskinan. Selain Kalimantan Selatan, beberapa pemerintah daerah di Kalimantan, seperti Kalimantan Timur juga sudah memasukkan inisiasi ekonomi hijau dalam RPJMD mereka.[26]

Perubahan menuju *green economy* merupakan peluang yang besar bagi berkembangnya ekonomi digital yang merupakan masa depan ekonomi yang ramah lingkungan. Di era digital sekarang ini, pemasaran daring dan kemasan produk menjadi sangat penting terutama untuk memperluas daerah pemasaran dan untuk menghadapi persaingan yang cenderung mengglobal. Karena itu pemerintah daerah perlu membuat suatu *task force* khusus pemulihan ekonomi dengan membangun model pembinaan perdagangan daring dan fasilitas *marketplace* untuk perdagangan lokal.

Perhatian lebih juga harus diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peranan penting bagi perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM pada tahun 2021 mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,86 triliun. Sementara jumlah UMKM di Kalimantan Selatan tercatat sebanyak 461.762 dengan kontribusi terhadap PDRB Kalimantan Selatan sebesar 61,05%. Lebih lanjut, UMKM turut mendorong serapan tenaga kerja di Kalimantan Selatan hingga 54,81% atau sebanyak 1,16 juta pekerja. Namun, peran besar UMKM tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk kondisi pandemi COVID-19 yang mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas di masyarakat.

26 *Minatur Green Economy Kaltim* dan *Program Pertumbuhan Hijau Kalsel.* Diakses 1 September 2021 https://bappeda.kaltimprov.go.id/postingan/714-miniatur

http://bappeda.kalselprov.go.id/pembahasan-awal-ruang-lingkup-pelaksanaan-program-pertumbuhan-hijau-di-provinsi-kalimantan-selatan/

UMKM memiliki ketahanan yang tinggi sehingga mendapat status sebagai bantalan perekonomian Indonesia, karena memiliki kemampuan untuk bertahan pada periode tekanan dan dapat tumbuh kembali lebih cepat dan tinggi pasca pandemi. Penerapan PPKM memberikan dampak negatif terhadap aktivitas operasional UKM. Hasil survei ketahanan UKM Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa 69% UKM terdampak negatif dari penerapan PPKM Level 4. Dampak negatif bagi pelaku UMKM di Kalimantan Selatan juga terlihat dari banyaknya pelaku UMKM yang dipaksa gulung tikar karena rendahnya daya beli masyarakat di Kalimantan Selatan serta minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait pemanfaatan industri 4.0 baik berupa cara penggunaan *digital marketing* maupun interaksi di dunia digital.[27]

Dampak negatif yang dirasakan terutama disebabkan oleh penjualan/permintaan produk yang menurun, proses distribusi yang terhambat, dan kendala proses produksi. Sebagai upaya untuk memitigasi dampak PPKM tersebut, UKM melakukan berbagai strategi antara lain diverifikasi saluran penjualan, baik melalui penjualan *online* (38%) maupun penitipan produk di toko/outlet (24%). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar UKM telah menyadari perubahan pada pola konsumsi barang di masyarakat yang cenderung memilih aktivitas belanja *online* seiring pembatasan aktivitas dan mobilitas di masa pandemi. Lebih lanjut, kondisi ini berpotensi menjadi momentum untuk akselerasi transformasi digital.

Mayoritas UKM telah terhubung dan memanfaatkan akses internet, namun masih terbatas untuk aktivitas-aktivitas tertentu. Hasil survei menunjukkan bahwa 69% UKM di Kalimantan Selatan telah menggunakan akses internet dalam menjalankan proses bisnis. Fasilitas internet terutama digunakan untuk promosi produk dan pencarian informasi terkait pengembangan usaha. Sementara itu, pemanfaatan akses internet untuk proses pemasaran produk masih sangat minim, yaitu 14%. Relatif rendahnya proses pemasaran menggunakan internet sejalan dengan porsi penjualan UKM melalui *e-commerce* yang juga rendah atau

27 F. Setiawan, "Strategi Peningkatan Sektor UMKM dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah pada Digitalisasi dalam Mengakselerasi Pengembangan UMKM". *Jurnal Administrasi Publik Vol. 7 No. 2 (2021).*

kurang dari 25%. Literasi digital yang masih rendah merupakan kendala utama yang dihadapi UKM dalam penjualan di *e-commerce*. Hasil survei juga mengonfirmasi kondisi tersebut, di mana 22% UKM mengatakan ketidaktahuan terhadap *platform* dan penggunaan *e-commerce* dalam pemasaran produk.

Selain mendorong akseptasi penjualan digital, UKM juga terus diarahkan untuk melakukan ekspansi pasar hingga menembus skala internasional. Pemerintah melalui sinergitas kementerian/lembaga berupaya meningkatkan daya saing UKM berorientasi ekspor dengan mendorong peningkatan kualitas produk-produk UKM agar mampu bersaing di pasar global. Hal ini dikarenakan terdapat fenomena *hollow in the middle*[28], yang ditandai dengan dominasi usaha skala mikro dalam struktur pelaku usaha dan sumbangan nilai tambah. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi pelaku UKM untuk memasarkan produk di pasar ekspor.

Partisipasi UKM Kalimantan Selatan dalam pasar global untuk mendukung *Global Value Chain* (GVC) masih minim. Hal ini tercermin dari hasil survei yang menunjukkan bahwa 69% UKM tidak melakukan kegiatan ekspor dan 72% UKM tidak berencana untuk melakukan ekspor dalam 1 (satu) tahun ke depan. Keterlibatan UKM dalam pasar global yang masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain produk yang dihasilkan oleh UKM terlalu spesifik *(niche market)*, kesulitan dalam memperoleh informasi terkait mekanisme ekspor, dan kendala bahasa asing. Dari sisi kemitraan, mayoritas UKM yang telah berhasil menembus pasar ekspor adalah UKM yang menjalin pola kemitraan perdagangan umum. Meski demikian, beberapa *buyer* cenderung tidak melanjutkan term pembayaran dikarenakan skala produksi UKM yang masih rendah sehingga sustainabilitas produk belum terjaga, serta kendala SDM maupun bahan baku untuk peningkatan kapasitas produksi.

Aspek pembiayaan juga menjadi hal penting untuk mendukung peningkatan kapasitas maupun skala usaha UKM. Selain itu, dukungan

28 Fenomena ini menunjukkan lebih besarnya sektor kecil (lebih dari 90%), sementara sektor menengah hampir tidak sebanding, yang menunjukkan tidak ada proses perkembangan dari usaha kecil ke menengah.

pembiayaan juga bisa menjadi kunci bagi UKM untuk dapat bertahan dan bertransformasi di masa pandemi. Akan tetapi, pada level nasional, kredit perbankan untuk UMKM masih di bawah 20%. Angka tersebut relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, seperti Singapura dengan kredit perbankan UMKM yang sebesar 39% atau Korea Selatan dengan porsi pembiayaan kredit UMKM yang telah mencapai 81%. Pembiayaan UMKM yang masih rendah juga terjadi di Kalimantan Selatan, tercermin dari hasil survei yang menunjukkan bahwa sumber pembiayaan utama bagi UKM bersumber dari modal pribadi atau sebesar 43%, sedangkan sumber pembiayaan dari perbankan hanya sebesar 30%. Lebih lanjut, sejumlah faktor yang menyebabkan UKM enggan untuk mengakses pinjaman perbankan antara lain tidak butuh, kendala agunan, suku bunga yang dinilai masih tinggi, pola pembayaran angsuran yang bersifat segera, dan skema pembiayaan yang kurang fleksibel.

Bank Indonesia bersama pemerintah, K/L terkait, dan *stakeholders* lainnya terus memperkuat sinergi untuk mendorong UMKM naik kelas. Bank Indonesia (BI) melalui program pengembangan UMKM telah menyusun kriteria tahapan peningkatan kapasitas UMKM, yang terbagi atas UMKM Potensial, UMKM Sukses, UMKM Digital, dan UMKM Ekspor. Pada tahapan UMKM Potensial, BI Kalimantan Selatan memberikan pelatihan laporan keuangan menggunakan SiApik (Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan) melalui program magang mahasiswa selama 3 bulan. Pada tahapan UMKM Sukses, BI Kalimantan Selatan memfasilitasi pelatihan *packaging* dan sertifikasi halal kepada UMKM bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pada tahapan UMKM Digital, BI Kalimantan Selatan bekerja sama dengan *e-commerce* untuk memfasilitasi *e-catalogue* UMKM Unggulan. Selanjutnya, pada tahapan UMKM Ekspor, BI Kalimantan Selatan mendorong UMKM melalui penyelenggaraan Pamor Borneo bekerja sama dengan 2 (dua) kurator multinasional, yaitu NetAsia dan Tanivest untuk penetrasi pasar Singapura.

Penggunaan metode pembayaran digital melalui QRIS (*QR Code Indonesian Standard*) berpotensi mendorong UMKM naik kelas. Hingga 8 Oktober 2021, sebaran *merchant* QRIS di Kalimantan Selatan telah

mencapai 138.747 merchant, yang didominasi oleh sektor UMKM sebesar 96,4%. Penggunaan QRIS secara langsung dapat membantu pelaku usaha dan UMKM mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Hal ini dikarenakan data transaksi yang tercatat dalam QRIS dapat mempermudah bank dalam melakukan analisis atau *profiling* pada pelaku UMKM. Data transaksi tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar penetapan *credit scoring* untuk mendorong keyakinan perbankan dalam menyalurkan kredit.

Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, Kalimantan Selatan adalah etalase percontohan UMKM yang mulai menggunakan sistem pembayaran digital tersebut. Dengan QRIS, transaksi perdagangan di pasar terapung diharapkan lebih mudah dan aman serta sejalan dengan protokol kesehatan. Bank Indonesia bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dan layanan keuangan digital *LinkAja* melakukan akuisisi QRIS serta memfasilitasi pembukaan akses layanan perbankan kepada 150 pedagang Pasar Terapung Lok Baintan. Pencanangan digitalisasi pembayaran pada pedagang pasar terapung dilakukan di Banjarmasin.[29]

Digitalisasi sistem pembayaran ini tidak hanya penting untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, namun juga integrasi ekonomi dan keuangan digital untuk Kalimantan. Selain QRIS, Bank Indonesia juga melakukan kebijakan elektronifikasi, BI FAST, dan *regulatory reform*. BI FAST adalah layanan transfer kredit dan debit yang merupakan modernisasi SKNBI (Sistem Kliring Nasional BI) dan diluncurkan pada bulan Desember 2021. Sistem ini akan mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam penggunaan layanan transfer dana yang cepat (*real time*) dan tersedia setiap saat.

Penerapan ekonomi digital secara khusus juga dilakukan untuk *digital farming*. Saat ini, Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat adalah satu-satunya kabupaten yang sudah menerapkan *digital farming* di Kalimantan. Melalui program ini, dua alat pemancar dipasang di hamparan lahan padi seluas 100 hektar. Setiap satu pemancar bertanggung jawab

29 *Pasar Terapung di Kalsel Mulai Terapkan Pembayaran Digital*. Diakses 1 September 2021 https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/04/09/pasar-terapung-di-Kalsel-mulai-terapkan-digitalisasi-pembayaran/

terhadap 50 hektar hamparan lahan. Alat pemancar tersebut dapat membaca jumlah keasaman tanah, kadar air, perhitungan masa tanam, perhitungan panen dan perhitungan waktu pestisida. Dengan demikian, alat ini dapat menghemat biaya tanam dan ongkos kerja buruh harian, karena dapat mendeteksi keasaman tanah, kelembaban tanah, hama/OPT, dan curah hujan. Uji coba *Farming Go Digital* di beberapa tempat menunjukkan peningkatan hasil antara 15–20%.

Pariwisata juga merupakan sektor ekonomi di Kalimantan Selatan yang berpotensi sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mendukung memperbaiki kondisi CAD. Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan potensi wisata alam, budaya, dan religi yang dapat dikembangkan secara intensif untuk menjadi destinasi wisata baru selain Bali, Kalimantan Selatan memiliki dua Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu Banjarmasin kota dan sekitarnya dan KPPN Martapura dan sekitarnya. Selain KPPN, Kalimantan Selatan juga memiliki Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu Lhoksado yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang layak menjadi tujuan destinasi potensial yang menawarkan keanekaragaman wisata alam, religi, dan budaya masyarakat adat setempat yang tinggi.

Popularitas Kalimantan Selatan bagi wisatawan mancanegara (wisman) dapat menjadi modal dasar pengembangan ke depan. Kunjungan wisman dalam lima tahun terakhir (2013–2017) tercatat rata-rata lebih dari dua puluh enam ribu orang dengan pertumbuhan wisman dan pengeluaran rerata masing-masing sebesar 2,22% (yoy) dan US$12,73 juta.

Wisman yang berkunjung sebagian besar berasal dari kawasan Asia, Eropa, dan Amerika, dengan rerata lama menginap tiga hari. Sebelum pandemi, di tahun 2020, terdapat 418 penginapan di Kalimantan Selatan, di mana sebagian besar adalah hotel lokal. Geliat pariwisata Kalimantan Selatan juga ditunjukkan oleh penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam tren meningkat.

Tabel 6.3.
Perkembangan Wisman Kalimantan Selatan

Tahun	Jumlah	Hari Tinggal	Rata-Rata Belanja	Total Pengeluaran
2012	24,869	3	$ 125	$ 9,325,875
2013	25,862	3	$ 160	$ 12,413,760
2014	25,632	3	$ 160	$ 12,303,360
2015	26,395	3	$ 160	$ 12,669,600
2016	26,934	3	$ 160	$ 12,928,320
2017	27,742	3	$ 160	$ 13,316,160

Sumber: Dispanprov Kalimantan Selatan

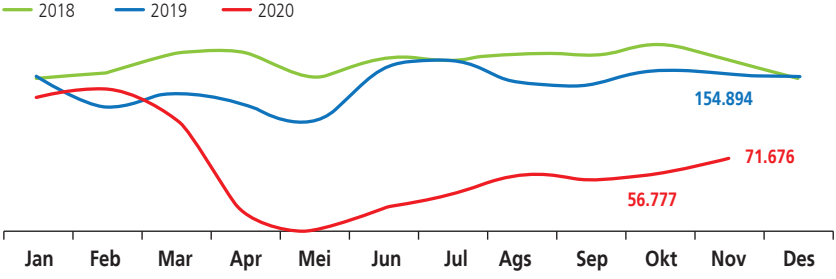

Grafik 6.6. Perkembangan Kedatangan Pesawat Domestik
Sumber: FGD Bappeda Provinsi Kalsel

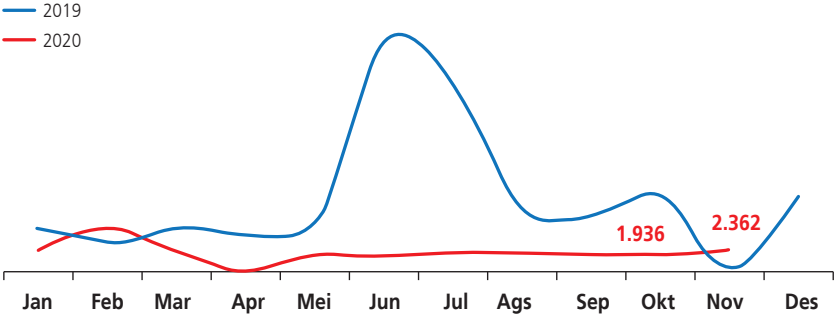

Grafik 6.7. Perkembangan Kedatangan Pelayaran

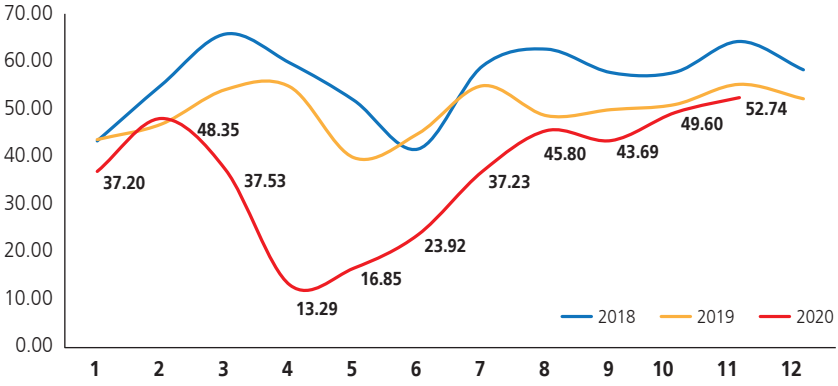

Grafik 6.8. Perkembangan Tingkat Hunian Hotel

Selama pandemi, kinerja sektor pariwisata di Kalimantan Selatan menurun signifikan, terutama sejak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Total kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) selama tahun 2020 tercatat 7 ribu orang (terkontraksi 59,04%, yoy). Meski demikian, di tengah kinerja wisman yang menurun, aktivitas wisatawan nusantara (wisnus) secara gradual menunjukkan perbaikan. Pasca relaksasi PSBB pada bulan Juni 2020, aktivitas wisnus menunjukkan peningkatan, tercermin dari kedatangan pesawat domestik melalui bandara dan pelayaran serta kenaikan tingkat penghunian kamar (TPK) (Grafik 6.6. – Grafik 6.8). Dominasi pangsa wisnus terhadap total wisatawan di Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 95,66% menyebabkan penurunan kinerja wisman selama 2020 berdampak minimal terhadap kinerja pariwisata secara keseluruhan.

Dalam masa pemulihan ekonomi Kalimantan Selatan, pariwisata domestik berperan penting. Rata-rata pengeluaran wisnus yang berkunjung ke Kalimantan Selatan pada tahun 2019 sebesar Rp1,03 juta, lebih tinggi dari rata-rata pengeluaran wisnus nasional yang sebesar Rp961 ribu, meski dengan rata-rata lama bepergian yang lebih rendah dari nasional yaitu sebesar 2,42 hari (Grafik 6.9 – 6.10).

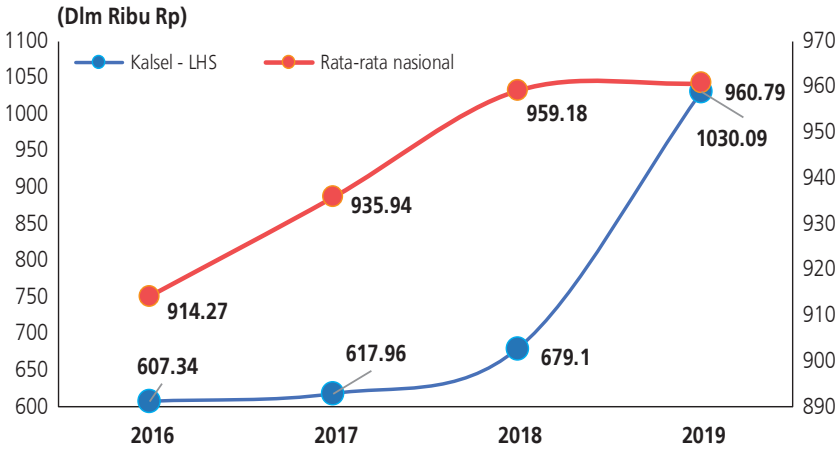

Grafik 6.9. Rata-rata Pengeluaran Wisnus

Sumber: Publikasi Analisa Pasar Pariwisata Kalsel 2020

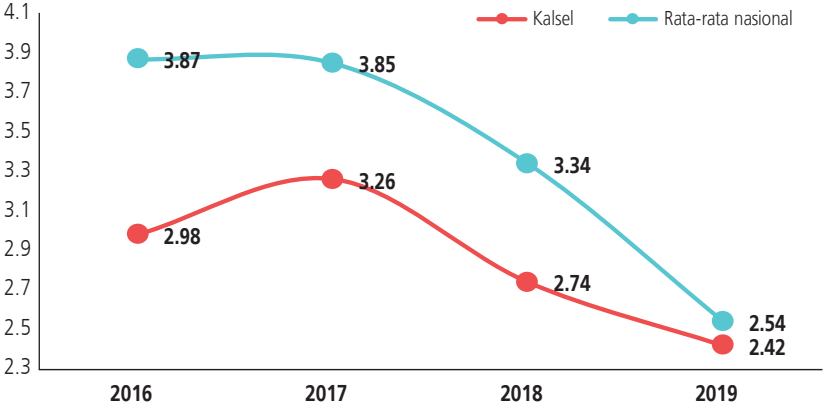

Grafik 6.10. Rata-rata Lama Tinggal Wisnus

Jenis pengeluaran	Komposisi pengeluaran Wisnus ke Kalsel 2019 (%)	
	Kalsel	Nasional
Angkutan/Transportasi	29	33
Akomodasi	5	6
Hiburan dan rekreasi	2	4
Belanja dan cinderamata	30	23
Makanan dan minuman	28	24
Jasa pariwisata lainnya	1	4
Lainnya	7	6
Jumlah	100	100

Grafik 6.11. Komposisi Pengeluaran Wisnus
Sumber: Publikasi Analisa Pasar Pariwisata Kalsel 2020

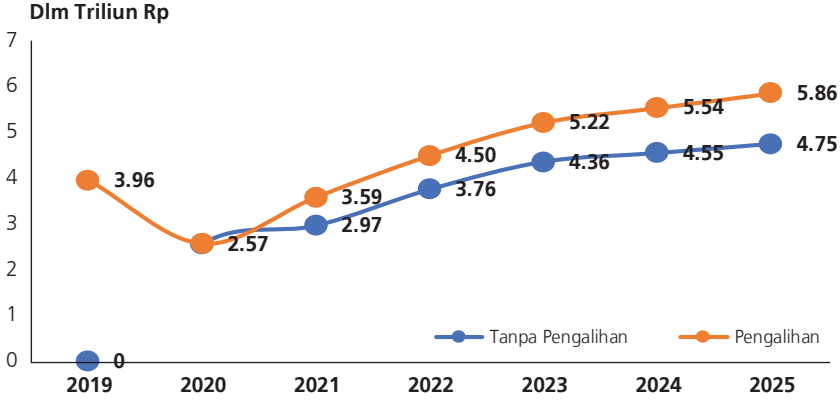

Grafik 6.12. Dampak Pengalihan Wisnus terhadap Nilai Pasar Pariwisata Kalsel

Sebagian besar pengeluaran wisnus yang berkunjung ke Kalimantan Selatan digunakan untuk belanja dan cinderamata (30%) dengan tujuan wisata terutama untuk wisata religi (Grafik 6.11.). Selain itu, pangsa pengeluaran wisman yang berkunjung ke Kalimantan Selatan (Rp0,16 triliun) yang masih kecil jika dibandingkan dengan nilai pengeluaran wisatawan asal Kalimantan Selatan yang berkunjung ke luar negeri (*outbound*) yang sebesar Rp1,23 triliun menjadi potensi yang dapat

dimanfaatkan untuk pemulihan pariwisata di Kalimantan Selatan. Dari hasil perhitungan Dinas Pariwisata Provinsi (Disparprov) Kalimantan Selatan, terdapat potensi kenaikan nilai ekonomi pariwisata sebesar 17% pada tahun 2025 apabila terdapat upaya dari Pemda dan *stakeholder* terkait untuk pengalihan wisatawan domestik (*outbound*) secara bertahap ke destinasi wisata di dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Dari skenario tersebut terdapat potensi percepatan pemulihan kinerja pariwisata di Kalimantan Selatan dari yang semula di tahun 2022 menjadi setahun lebih singkat yaitu di tahun 2021 (Grafik 6.12.).

Peningkatan kunjungan wisnus ke Kalimantan Selatan tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Pusat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dana hibah yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah disalurkan kepada 6 pelaku usaha hotel dan 29 restoran untuk membantu kegiatan operasional dan sisanya (25% dari dana hibah) digunakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin untuk mendukung implementasi program *Cleanliness, Health, Safety,* dan *Environment Sustainability* (CHSE) di destinasi wisata. Program tersebut antara lain revitalisasi sarana dan prasarana (Sarpras) CHSE untuk hotel dan restoran, bimbingan teknis program CHSE untuk pegawai hotel dan restoran serta masyarakat, serta pengawasan penerapan protokol kesehatan pada hotel dan restoran. Walaupun beberapa hotel belum tersertifikasi CHSE, hotel tersebut telah menerapkan protokol kesehatan. Ke depan, sosialisasi kepada pelaku usaha dan wisatawan mengenai proses pengurusan dan manfaat CHSE perlu terus didorong serta hibah PEN perlu terus dilanjutkan mengingat manfaat hibah yang dirasakan oleh pelaku usaha pariwisata yang cukup besar. Di samping itu, percepatan vaksinasi COVID-19 di Kalimantan Selatan perlu dilakukan. Sampai awal tahun 2021, realisasi vaksinasi baru mencapai 51,16% dari target. Sementara hasil survei preferensi wisnus di Kalimantan Selatan menyatakan bahwa 67,35% yakin bahwa pemberian vaksin dapat mendorong perbaikan wisata.

Objek wisata potensial Kalimantan Selatan dipusatkan pada dua KPPN dan satu KSPN yang memiliki jenis atraksi yang berbeda. KPPN Banjarmasin kota dan sekitarnya serta KPPN Martapura dan sekitarnya juga memiliki daya tarik wisata alam, selain objek wisata religi dan

budaya. Sebelum pandemi, telah direncanakan pengembangan kota pusaka sebagai bagian dari pengembangan konsep wisata berwawasan lingkungan berbasis masyarakat dan desa di Kabupaten Banjar. Sementara itu, juga sedang dikembangkan Kampung Wisata Kampung Banjar Sungai Jingah sebagai salah satu alternatif atraksi wisata susur sungai yang berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan di KSPN Banjarmasin kota dan sekitarnya. KSPN Lhoksado memiliki daya tarik wisata alam yang akan terus dikembangkan oleh Pemda untuk fokus pada tiga spot wisata yaitu kawasan Delta Amandit dan Dermaga Singgah, Air Panas Tanuhi, dan Air Terjun Haratai.

Penguatan lebih lanjut diperlukan untuk mendorong kinerja menjadi destinasi wisata kelompok *Quality Tourism*. Dengan melihat beberapa fasilitas yang sudah ditawarkan oleh Bali dan beberapa kawasan pariwisata prioritas lainnya, penguatan dan perbaikan, khususnya terkait 3A (Atraksi, Amenitas, dan Akses) yang perlu menjadi perhatian. Dengan kondisi destinasi wisata Kalimantan Selatan, beberapa penguatan yang diperlukan antara lain: i) penguatan diferensiasi wisata antardestinasi, ii) peningkatan ketersediaan amenitas (akomodasi, sarana dan prasarana umum), dan iii) penguatan konektivitas.

Dalam rangka reaktivasi destinasi pariwisata di Kalimantan Selatan sesudah pandemi, Pemda Kalimantan Selatan mendukung penguatan program pemerintah pusat melalui sosialisasi program Sapta Pesona (SP) dan protokol kesehatan. Melalui program ini diharapkan dapat memberikan semangat bagi pelaku usaha untuk menyiapkan destinasi yang bersih, aman, sehat, dan lestari. Lebih lanjut, Pemda juga terus berupaya menyempurnakan aturan dan kebijakan untuk mendukung pemulihan pariwisata di Kalimantan Selatan melalui penyusunan *draft* protokol kesehatan kegiatan pariwisata sebagai acuan pembukaan Destinasi Wisata (DTW) agar tidak menimbulkan klaster baru.

Sinergi dengan program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) #DiIndonesiaAja menjadi strategi peningkatan wisnus utama tahun 2021. Sinergi tersebut dapat dilakukan melalui promosi paket wisata atau subsidi *voucher* pembelian produk wisata Kalimantan Selatan. Pelaksanaan program bersinergi tersebut juga didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyiapan

dan perluasan penggunaan pembayaran nontunai melalui QRIS secara *end-to-end* di beberapa objek wisata di Kalimantan Selatan yang disertai dengan edukasi kepada seluruh pihak selain pengembangan galeri UMKM di bandara dan pengembangan konsep desa wisata yang terintegrasi. Galeri UMKM diharapkan mampu membangkitkan ekonomi UMKM dan membantu pemasaran produk yang dapat disajikan sebagai cinderamata bagi wisatawan.

Pengembangan paket wisata yang terintegrasi antarkabupaten dan penambahan atraksi alternatif dapat meningkatkan kunjungan dan *length of stay*. Paket wisata terintegrasi ke beberapa spot wisata di Kalimantan Selatan dengan berbagai pilihan seperti kategori paket wisata dasar *(basic)*, menengah *(medium)*, dan premium, dapat menyasar seluruh segmen wisatawan dan berpotensi meningkatkan belanja wisatawan. Strategi ini perlu juga dilengkapi dengan pemetaan zonasi fokus pengembangan atraksi seperti wisata alam, budaya, dan religi. Sementara percepatan pembentukan desa wisata dan kota pusaka di beberapa destinasi menjadi solusi pendukung yang dapat menawarkan budaya lokal sehingga dapat memperkaya dan melengkapi atraksi yang ada dari sisi *cultural experience*.

Untuk mendukung kenyamanan wisatawan, penyediaan amenitas yang berkualitas perlu terus diperkuat. Terkait hal ini, ketersediaan akomodasi yang memadai dan berkualitas terutama hotel yang terhubung dengan jaringan internasional masih terbatas. Di tahun 2018, sebelum pandemi baru terdapat 418 penginapan di Kalimantan Selatan, atau hanya 8,6% dari jumlah hotel berbintang di Bali pada tahun yang sama. Akomodasi tersebut belum mampu menampung kunjungan wisatawan yang datang pada saat *peak season*. Selain jumlah akomodasi, fokus pengembangan amenitas juga perlu diarahkan untuk peningkatan fasilitas umum dan fasilitas pendukung, seperti air bersih, listrik, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Penyediaan jasa sistem pembayaran, seperti perbankan dan *money changer*, sebagai faktor pendukung perlu ditingkatkan untuk menarik wisatawan mancanegara. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, peran investasi swasta dalam mengembangkan pariwisata lokal, dan kegiatan promosi juga tetap harus ditingkatkan (2P, promosi dan pelaku).

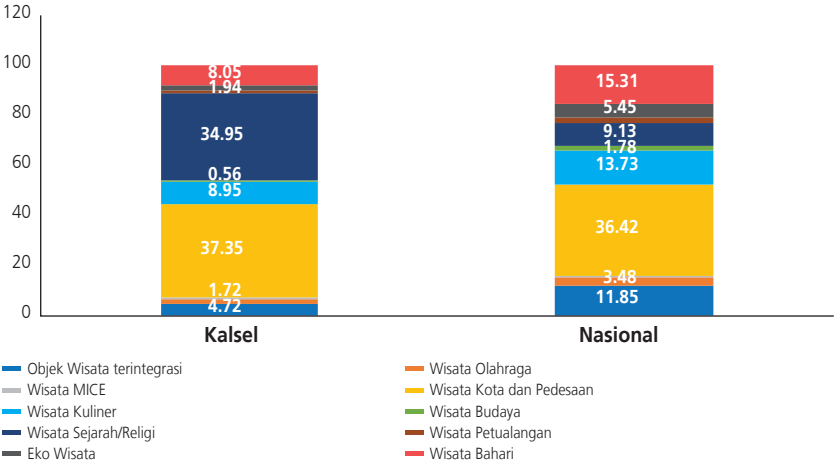

Grafik 6.13. Destinasi Wisata yang Dilakukan Wisnus di Kalimantan Selatan 2019
Sumber: Publikasi Analisa Pasar Pariwisata Kalimantan Selatan 2020

Pemda Kalimantan Selatan terus melanjutkan pengembangan amenitas pendukung atraksi guna menambah kunjungan wisnus. Pemda Kalimantan Selatan juga terus mengembangkan destinasi pariwisata melalui peningkatan amenitas yang mendukung atraksi. Upaya tersebut terutama terlihat pada pengembangan beberapa destinasi wisata unggulan. Pengembangan amenitas untuk memberikan rasa nyaman kepada pengunjung dilakukan melalui pembangunan gazebo dan spot foto di Lhoksado, pintu gerbang/gapura dan galeri terapung Sasirangan di Kampung Banjar Sungai Jingah, penataan untuk memperindah Masjid Sultan Suriansyah, peningkatan dermaga di Kampung Biru, dan Rumah Lanting di Pulau Bromo.

Upaya pengalihan wisatawan domestik (*outbound*) ke Kalimantan Selatan perlu mengoptimalkan sejumlah peluang yang ada. Dalam jangka pendek, perlu upaya sinergi kerja sama antara Pemda, Biro Perjalanan, dan penyedia jasa daring dan luring oleh pelaku ekonomi kreatif untuk perluasan dan penguatan promosi melalui media digital seperti penggunaan layanan *virtual tour* menjelajahi destinasi wisata yang dapat menyasar segmen wisatawan yang masih enggan melakukan kunjungan

wisata. Pemberian diskon khusus kepada wisatawan yang menginap oleh pelaku usaha hotel juga dapat mendorong kinerja wisnus untuk menyambut tren perubahan wisata dalam melakukan aktivitas wisata di AKB yaitu *Staycation*. Dalam jangka menengah, perlu upaya peningkatan jumlah atraksi selain wisata religi. Melihat aktivitas ekowisata yang masih minim, wisata olahraga, dan wisata petualangan yang dilakukan oleh wisatawan ketika berkunjung ke Kalimantan Selatan, jika dibandingkan dengan nasional (Grafik 6.13.), pengembangan *Integrated Tourism* antara wisata religi di Banjarbaru dan Banjarmasin dengan wisata alam di daerah sekitarnya (Lhoksado, Air Terjun Haratai, Tahura Sultan Adam, Puncak Matang Kaladan, dan Bukit Batas Aranio) berpotensi dapat menarik kunjungan wisatawan dan memperpanjang *length of stay* ke depan. Destinasi religi menjadi tujuan nomor dua di Kalimantan Selatan dengan pangsa 34.95%, sementara Kalimantan dikenal dunia sebagai paru-paru dunia dengan wisata alamnya. Hal tersebut menunjukkan perlunya perubahan paradigma pariwisata di Kalimantan dan Kalimantan Selatan.

PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN RAKYAT

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sumbangan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 61,1%, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 97,1%, dan pangsa ekspor hingga 14,4%. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada 1997–1998, UMKM mampu bertahan dan tetap menjadi tulang punggung perekonomian.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral terus berupaya meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian. Pengembangan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia tidak terlepas dari tujuan tunggal berupa mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, sehingga arah pengembangan UMKM di Bank Indonesia difokuskan pada tiga hal, yaitu:

(i) mendukung upaya pengendalian inflasi khususnya inflasi *volatile food*, yang dilakukan dari sisi suplai; (ii) mendorong UMKM potensi ekspor dan pendukung pariwisata untuk mendukung upaya penurunan defisit transaksi berjalan; serta (iii) meningkatkan akses keuangan UMKM untuk mendukung stabilitas sistem keuangan.

Dengan peran strategis tersebut, UMKM berperan penting dalam mendukung bauran kebijakan Bank Indonesia guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, sekaligus upaya nasional untuk mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju. Berbagai upaya penguatan UMKM terus dilakukan secara *end-to-end*, termasuk oleh Bank Indonesia. Pascapandemi Covid-19, transformasi UMKM terus diperkuat melalui optimalisasi penggunaan teknologi digital sehingga dapat menarik manfaat dari salah satu pelajaran utama krisis kesehatan, yaitu penggunaan teknologi digital untuk kegiatan sehari-hari.

Pengembangan *end-to-end* UMKM dilakukan melalui pilar kebijakan korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan; guna mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan adaptif. Penguatan korporatisasi dilakukan pada aspek kelembagaan UMKM untuk mendorong terciptanya ekosistem usaha yang terintegrasi dan mendorong peningkatan skala ekonomi usaha. Sementara itu, peningkatan kapasitas difokuskan untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi, serta digitalisasi proses bisnis dan pembayaran sehingga mendorong perbaikan daya saing UMKM.

Peningkatan kapasitas itu dilaksanakan secara terintegrasi yang mencakup penguatan manajemen usaha, kualitas produk, akses pasar, kapasitas keuangan, dan kapasitas SDM, termasuk penguasaan teknologi digital. Adaptasi pada perkembangan teknologi digital tersebut sebagai salah satu kunci UMKM untuk naik kelas menjadi lebih kuat dan maju. Pada aspek pembiayaan, perluasan akses terus didorong untuk kemudahan ekspansi usaha dengan pembiayaan UMKM yang lebih sehat. Pengembangan UMKM mengacu pada peta jalan UMKM naik kelas yang produktif, inovatif, dan adaptif dengan empat tahapan, yakni kegiatan produksi dan kelembagaan, perluasan pangsa pasar, digitalisasi dan pembiayaan, dan akses pasar ekspor.

Upaya pengembangan UMKM juga menjadi fokus Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Sejak 2006, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan program pengembangan klaster UMKM produsen komoditas unggulan daerah maupun komoditas ekspor. Program ini bertujuan mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui peningkatan kinerja UMKM yang tergabung dalam klaster. Berbagai intervensi dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi proses usaha tani dari hulu sampai hilir antara lain dari aspek budidaya, aspek pengolahan pascapanen, hingga pemasaran produk.

Seiring dengan perkembangan situasi dan arah kebijakan Bank Indonesia, sejak tahun 2014 pengembangan klaster lebih difokuskan pada komoditas yang mendukung ketahanan pangan, komoditas berorientasi ekspor, dan komoditas sumber tekanan inflasi/*volatile foods*. Penyesuaian arah fokus kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam rangka memperkecil celah antara penawaran dan permintaan sehingga meminimalisasi tekanan harga yang mendorong inflasi. Selain itu, program klaster juga bertujuan memberdayakan UMKM karena melibatkan banyak petani dan UMKM.

Dalam rangka menjaga dan mengendalikan inflasi di Kalimantan Selatan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beragam klaster pangan yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Klaster pangan adalah sekelompok UMKM yang memproduksi bahan pangan sejenis yang terkonsentrasi dan saling berhubungan dari hulu ke hilir. Klaster pangan beserta komoditas, rincian, dan status pembinaan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan ditampilkan dalam tabel berikut.

Selain pembinaan klaster pangan, pengembangan UMKM di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan juga berfokus pada upaya menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Melalui kerangka tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan bantuan dalam bentuk pemberian alat serta pelatihan, baik secara *offline* maupun *online*.

Tabel 6.4.
Sebaran Klaster Pangan KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Kabupaten	Komoditas	Tahun Pembinaan	Status
1.	Barito Kuala	a. Padi Lokal	a. 2011–2013	a. *Phasing Out*
2.	Hulu Sungai Tengah	a. Ikan Air Tawar b. Ikan Air Tawar (lanjutan)	a. 2014–2018 b. 2018–2021	a. Dilanjutkan b. *On Going*
3.	Hulu Sungai Selatan	a. Cabai Besar Merah	a. 2013–2015	a. *Phasing Out*
4.	Hulu Sungai Utara	a. Ampulung b. Ampulung (berbasis *online*)	a. 2013–2017 b. 2017–2020	a. Dilanjutkan b. *Phasing Out*
5.	Kotabaru	a. Udang	a. 2019–2021	a. *On Going*
6.	Tabalong	a. Karet b. Bawang Merah	a. 2012–2014 b. 2021–sekarang	a. *Phasing Out* b. *On Going*
7.	Tapin	a. Bawang Merah b. Bawang Merah (lanjutan)	a. 2014–2017 b. 2017–2020	a. Dilanjutkan b. *Phasing Out*
8.	Tanah Bumbu	a. Padi Unggul b. Padi Unggul Organik c. Padi Unggul Organik Terintegrasi	a. 2013–2015 b. 2015–2018 c. 2018–2020	a. Dilanjutkan b. Dilanjutkan c. *Phasing Out*
9.	Tanah Laut	b. Sapi	a. 2013–2015	a. *Phasing Out*

Pada 2020 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan dalam kerangka Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) sebesar Rp3,48 miliar. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk: (i) pembuatan sarana budidaya ikan metode bioflok untuk Pesantren Misbahul Munir di Kota Banjarbaru; (ii) pembangunan gudang bawang merah untuk Kelompok Tani Sido Muncul di Kabupaten Tabalong; (iii) pembangunan gudang pengolahan pupuk organik untuk Pondok Pesantren Ushuluddin di Kabupaten Banjar; (iv) bantuan sumur bor, traktor tangan, dan laboratorium di Kabupaten Barito Kuala; (v) bantuan pengembangan desa wisata untuk Desa Wisata Karang Taruna Dewa Katar di Kabupaten Tanah Laut; (vi) bantuan paket pembesaran ikan gabus untuk Kelompok Pembudidayaan Ikan (Pokdakan) Usaha

Bersama Kabupaten Hulu Sungai Selatan; (vii) bantuan kandang komunal dan mesin penetas untuk kelompok peternak Tambah Jaya Kabupaten Hulu Sungai Utara; (viii) bantuan sarana kemandirian benih udang untuk Pokdakan Mutiara Biru di Kabupaten Kotabaru; dan lain-lain.

Selain bantuan teknis berupa barang dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang produktivitas, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan pelatihan teknik lanjutan budidaya tanaman secara organik, pelatihan pembuatan laporan keuangan, dan pelatihan budidaya ikan haruan inti dan plasma. Dengan mengusung semangat pengembangan untuk mendorong kemajuan klaster pangan yang masih sama, pada 2021 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk tetap memberikan bantuan teknis serta pelatihan yang sama bagi klaster pangan.

Pengembangan UMKM berorientasi ekspor juga tidak lepas dari fokus Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini berkaitan dengan mandat kebijakan makroprudensial untuk mengembangkan UMKM yang meliputi empat tahapan, yaitu UMKM potensial, UMKM *success/link to market and finance,* UMKM *go digital,* dan UMKM *go export.*

Hingga 2021, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan telah membantu pengembangan 20 pelaku UMKM yang berorientasi ekspor, tersebar dalam kedua kelompok besar yaitu *fashion and home decor* dan *food and beverage*. Untuk UMKM *fashion and home decor* di antaranya: (i) PT Sarikaya Sega Utama yang menjual rotan lampit ke Jepang; (ii) Cempaka Sasirangan, Refa Gallery, dan Ecomel Sasirangan yang menjual kain sasirangan; (iii) Itha Arts, Duta Dare, Uwei Pambelom, dan Banjaru Bag yang memproduksi tas purun; dan lain-lain. Di samping itu, beberapa UMKM *food and beverage* yang telah dikembangkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan adalah Teh Gaharu (Masindo), Bumbu Dandaman, Arcia Oil, Bawang Goreng Mak Yem, Madu Bantal, dan Wadaikoe.

Pengembangan UMKM berorientasi ekspor perlu didukung dengan perluasan akses pasar dan digitalisasi. Berkaitan dengan itu, berbagai upaya telah dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendorong digitalisasi UMKM, antara lain melalui

pelatihan/webinar secara *online*, penyelenggaraan pameran UMKM baik secara langsung maupun virtual, serta pembentukan agregator UMKM oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Kalimantan Selatan.

Bersama dengan Pemda, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan telah menyelenggarakan: (i) UMKM *Go Digital*, berupa webinar serta monitoring/pendampingan pasca pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan dilaksanakannya kurasi UMKM terpilih untuk seleksi IKRA (Industri Kreatif Syariah); (ii) UMKM *Connect*, program yang menghubungkan UMKM dengan konsumen untuk melakukan promosi produk dan meningkatkan akses pemasaran melalui pameran/bazar virtual produk kuliner dengan dinas/instansi terkait serta asosiasi UMKM dan *marketplace*; (iii) Agregator UMKM, berupa pembentukan agregator oleh pemangku kepentingan yang ada di daerah seperti Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), BUMD, dan lain-lain, untuk membantu penyerapan, pemasaran, dan publikasi produk UMKM secara lebih struktural dan masif; dan (iv) Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), merupakan rangkaian kegiatan berupa pameran UMKM secara virtual, kurasi produk, fasilitasi *business matching*, dan relasi bisnis UMKM.

Untuk memperluas akses pasar UMKM, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan pameran UMKM secara digital bertajuk "Karya Gawi Borneo" pada 15–17 September 2020. Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual ini turut melibatkan 40 UMKM terpilih. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Selatan dalam mengumpulkan *database* UMKM Champion dan UMKM Potensial untuk dapat terhubung dengan *landing page* Blibli.com. Pelaksanaan expo UMKM ini merupakan bagian dari kegiatan *onboarding* UMKM, Gernas BBI, penghubung UMKM dengan lembaga keuangan, dan juga mendukung digitalisasi UMKM.

Di samping itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan juga menyelenggarakan Program Akselerasi UMKM Berorientasi Ekspor Bank Indonesia Kalimantan Selatan (Pamor Baintan) pada Oktober–November 2020. Rangkaian kegiatan Pamor Baintan berupa pelatihan

ekspor kepada UMKM mitra dan binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan kepada 12 UMKM yang bergerak di bidang perikanan (udang), industri kreatif (*fashion*, aksesoris, dan *handicraft*) dan makanan olahan. Pelatihan ini memberikan berbagai pemahaman terkait peluang dan strategi yang harus dimiliki UMKM agar siap ekspor, dengan berbagai narasumber profesional di bidangnya, yaitu Sekolah Ekspor Indonesia, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan, dan akademisi terkait. Selain itu, kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia ini juga berfokus pada upaya mengurasi produk UMKM berpotensi ekspor untuk mendapatkan perluasan akses pasar, khususnya pasar ekspor, bekerja sama dengan *Indonesia in Your Hand*.

Pamor Baintan juga dimeriahkan dengan seremonial pelepasan ekspor udang dari kelompok pembudidaya udang tambak binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Pokdakan Mutiara Biru, Cahaya Benur, dan Mandiri bekerja sama dengan PT Misaja Mitra dengan tujuan ekspor ke Jepang. Total produksi udang yang berhasil diekspor dari ketiga kelompok pembudidaya udang tersebut, yaitu pada tahun 2019 mencapai 334,9 ton atau senilai Rp26,7 miliar, dan pada tahun 2020 sampai dengan bulan September mencapai 189 ton atau Rp15,1 miliar.

Ekspor menjadi salah satu sumber pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, upaya pengembangan UMKM berorientasi ekspor terus dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pada 2021, salah satunya dalam bentuk kegiatan bernama Pembukaan Program Akselerasi UMKM Berorientasi Ekspor (Pamor Borneo). Acara yang dihadiri oleh Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia ini merupakan bentuk nyata kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Singapura serta Kementerian Koperasi & UMKM Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Duta Besar RI untuk Singapura, Pemerintah Provinsi, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah di wilayah Kalimantan, dalam mendukung pengembangan UMKM sebagai

sumber kekuatan baru perekonomian nasional dengan mendorong UMKM wilayah Kalimantan *Go Export* dan menembus pasar Singapura.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan kurasi terhadap 60 UMKM dengan menggandeng dua agregator internasional, yaitu NetAsia dan Tanivest. Dari 60 UMKM yang dikurasi, terdapat 19 UMKM unggulan wilayah Kalimantan yang lulus dan telah diikutkan pada rangkaian kegiatan Pamor Borneo di Singapura. UMKM yang mengikuti kegiatan Pamor Borneo terbagi menjadi 8 UMKM di bidang *accessoris & fashion*, 5 UMKM di bidang *home deco*, dan 6 (enam) UMKM di bidang *food & beverage*.

Pamor Borneo berupaya mempromosikan produk UMKM secara *offline* dan *online*, antara lain dengan: (i) bekerja sama dengan *local influencer* di Singapura sejak tanggal 27 Juli 2021; (ii) peluncuran *marketplace* Pamor Borneo di *e-commerce* multinasional Shopify pada tanggal 8 Agustus 2021; dan (iii) Pameran di Suntec City Mall, Singapura pada tanggal 14 Agustus 2021–29 Agustus 2021. Kegiatan Pamor Borneo juga menampilkan *capacity building* untuk UMKM berupa webinar dengan tema "Peluang dan Tantangan Ekspor ke Singapura" yang diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2021. Melalui kegiatan Pamor Borneo, terdapat lebih dari 250 kunjungan di lokasi pameran di Singapura dan sudah menghasilkan transaksi lebih dari 2.500 Singapore Dollar. Melihat tingginya permintaan terhadap produk UMKM, pembelian melalui skema *pre-order* pun sudah mulai dilakukan terhadap 2 (dua) UMKM, yaitu Pradeya Art (*home deco*) dan Refa Gallery (*fashion & accessoris*).

Selain itu, BI Kalimantan Selatan juga bekerja sama dengan BI Singapura untuk melaksanakan "Program Akselerasi UMKM" Berorientasi Ekspor di Kalimantan (Pamor Borneo)" yaitu kegiatan promosi perdagangan dalam bentuk pameran produk UMKM di Singapura yang tidak hanya menampilkan produk dari Kalimantan Selatan, namun juga dari wilayah Kalimantan lain yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kegiatan pameran ini akan dilangsungkan secara paralel baik *online* di *marketplace* maupun *offline* di Singapura.

Ke depan, optimalisasi peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi akan terus diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melalui adaptasi perubahan digital. Kebijakan pengembangan *end-to-end* UMKM terus dilakukan melalui tiga pilar kebijakan korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan serta didukung sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan para penggiat usaha. Pengembangan UMKM diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam jangka pendek dan menjaga ketahanan perekonomian nasional pada jangka menengah. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut, prioritas penguatan UMKM diarahkan untuk mendukung potensi ekspor dan pengembangan pariwisata, serta memperkuat pasokan dan distribusi komoditas pangan strategis. Langkah prioritisasi tersebut dilakukan melalui sinergi kebijakan dan program yang harmonis bersama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga menghasilkan UMKM unggulan di tingkat nasional dan daerah.

BAB 7

Tata Kawasan dan Arsitektur De Javasche Bank Bandjermasin

Kota Banjarmasin telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan atribut yang khas dimilikinya sejak abad ke-15, yaitu Kota Dagang dan Kota Seribu Sungai. Sedikitnya tercatat 135 sungai yang mengaliri Kota Banjarmasin, baik sungai besar hingga sungai kecil memberikan karakter lanskap kota yang menjadi unggulan pariwisata Kota Banjarmasin saat ini. Kehidupan masyarakat di Kota Banjarmasin tidak dapat terpisahkan dengan Sungai Barito beserta anak-anak sungainya. Pertemuan antara Sungai Barito dan Sungai Martapura menjadikan Kota Banjarmasin sebagai wilayah strategis dalam bidang perekonomian, terutama kegiatan perdagangan antarpulau.

Kondisi geografis seperti itu menjadi fondasi dasar bagi pengembangan kota yang mendukung perekonomian negara oleh pemerintah Hindia Belanda sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Sebagai bukti dari pembangunan Kota Banjarmasin yang berbasis maritim adalah adanya pelabuhan yang dijadikan pelabuhan transito untuk kapal-kapal dari Singapura dan Jawa.

Pada awal abad ke-20 juga, perkembangan industri mulai berkembang dengan baik. Di antaranya pabrik es yang dikelola oleh orang Eropa secara individu, galangan kapal kecil oleh perusahaan Borneo Industri Mij, perdagangan ekspor-impor oleh perusahaan Borneo Soematra

Handel Mij, Heinnenman & Co, dan Kantor Cabang Javasche Bank en Factorij. Sejak Kota Banjarmasin ditetapkan *gemeente* di tahun 1918 hingga kemudian ditingkatkan menjadi *stadsgemeente* dan mendapat otonomi daerah di tahun 1938, Kota Banjarmasin menjadi pusat kegiatan pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat permukiman. Pemerintah menjadikan Kota Banjarmasin sebagai pintu gerbang kegiatan ekonomi nasional sehingga untuk melengkapi kebutuhan itu dibangun berbagai infrastruktur. Sejak masa Residen C. J. van Kempen (1919–1924) hingga Residen W. G. Morggeustrom (1933–1937) Kota Banjarmasin dilengkapi berbagai bangunan dan tata ruang yang memiliki fungsinya masing-masing. Salah satu bangunan peninggalan Belanda yang memiliki karakter khas adalah gedung kantor eks De Javasche Bank Bandjermasin, yang telah didemolisi untuk kemudian dibangun gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Prov. Kalimantan Selatan yang ada saat ini.

Bab ketujuh akan membahas tentang perjalanan fisik gedung kantor eks De Javasche Bank Bandjermasin hingga menjadi gedung KPw Bank Indonesia Prov. Kalimantan Selatan. Pembahasan ini meliputi aspek-aspek arsitektural, tata ruang, nilai fungsional gedung dan filosofis, serta sejarah pembangunan dan perkembangannya dari masa ke masa.

TATA RUANG KOTA BANJARMASIN ERA KESULTANAN BANJARMASIN

Berdasarkan catatan sejarah, Kota Banjarmasin bermula dari Kesultanan Banjarmasin yang berdiri tahun 1526 M. Kesultanan Banjarmasin tumbuh di sepanjang bantaran Sungai Kuin yang berkembang sebagai titik pusat peradaban Islam pertama di tanah Banjar. Kesultanan Banjarmasin merupakan bentuk peradaban terpimpin keempat di Kalimantan bagian selatan. Pada awalnya Kesultanan Banjarmasin merupakan kerajaan bercorak Hindu yang dirintis oleh Negeri Nansarunai dan dilanjutkan oleh Negara Daha dan Negara Dipa. Letak Kesultanan Banjarmasin berada sekitar 300 km dari Kota Banjarmasin saat ini. Proses terbentuknya Kesultanan Banjarmasin sarat dengan nilai filosofis bahkan mitologis. Dalam konteks wilayahnya, proses pencarian wilayah kerajaan

baru (Kesultanan Banjarmasin) saat itu diharuskan mencari "*tanah panas berbau harum*" serta dikaitkan pada mitos Putri Junjung Buih. Secara harfiah tanah panas berbau harum ini merupakan bentuk pencarian Mpu Djatmika di tanah hujung. Dalam pencariannya itu, Mpu Djatmika mencium langsung tanah tersebut sebagai bentuk keyakinannya dalam menandai sebuah wilayah tersebut cocok untuk dibangun sebuah negeri baru. Secara filosofis tanah panas berbau harum diartikan sebagai wilayah yang subur dan kaya akan sumber daya alam yang salah satunya adalah air yang dijaga oleh sosok mitologis, yaitu Putri Junjung Buih.

Masyarakat Kalimantan meyakini kedua mitos tersebut sebagai perlindungan atas keberlangsungan kekuasaan pemimpinnya. Putri Junjung Buih yang menjadi Ratu di Kerajaan Dipa diyakini masyarakat sebagai putri yang muncul dari muara Sungai Barito untuk melindungi Kerajaan Dipa. Begitu juga pendampingnya, yaitu Raden Putra, diyakini sebagai seorang putra matahari. Raden Putra atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Suryanata bersama Putri Junjung Buih memiliki 3 orang anak yang salah satunya adalah Putri Kalungsu yang merupakan ibu dari Raden Sekar Sungsang. Putri Kalungsu inilah yang berperan penting dalam pembentukan Kerajaan Daha setelah Kerajaan Dipa mengalami kemunduran. Selanjutnya, cucu dari Putri Kalungsu atau anak dari Raden Sekar merupakan Raja Banjar Pertama yang dikenal dengan sebutan Raden Samudera atau Sultan Suriansyah.[1] Raden Samudera menempati wilayah kampung Melayu yang saat itu menjadi bandar atau pusat perdagangan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab satu, kampung Melayu kemudian dikenal dengan sebutan Bandar Masih yang beribukota di Kuin. Pada masa ini perekonomian komersial semakin berkembang di Kota Banjarmasin. Perkembangan perekonomian Banjarmasin menjadi titik sentral perekonomian Kalimantan Selatan dari masa ke masa, dan banyak mewariskan tinggalan budaya baik berupa material maupun khazanah lainnya.

---

1 Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan, *Urang Banjar dan Kebudayaannya*, Banjarmasin: Pustaka Banua, 2005. Lihat pula M Jusi, Indonesia. Angkatan Darat. Komando Daerah Militer X Lambung Mangkurat, *Kodam X/LM Membangun*, Bandjarmasin, 1962. Dalam dua buku ini diceritakan tentang mitos penemuan Putri Junjung Buih sebagai permaisuri raja yang melahirkan garis keturunan raja di Kerajaan Negara Dipa dan Kerajaan Negara Daha hingga Kesultanan Banjarmasin. Lihat Ita Syamtasiyah Ahyat, *Kesultanan Banjarmasin Pada Abad Ke-19: Ekspansi Pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan*, SAM, Tangerang Selatan, SAM, 2012.

Sejak awal berdirinya, struktur ruang Kesultanan Banjarmasin mengikuti pola kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara bagian barat, seperti yang terdapat di Sumatra, Malaysia, dan Thailand. Secara umum, struktur tata ruang makro Kesultanan Banjarmasin memiliki kemiripan dengan tiga belas kerajaan Islam lainnya, seperti kerajaan Islam di Siak Indrapura, Kerajaan Al Qadrie di Pontianak, Kerajaan Patani di Thailand, Kerajaan Sharif Kabungsuwan di Filipina, Kerajaan Palembang di Sumatra Selatan, Kerajaan Bandar Sri Begawan di Brunei Darussalam, Kerajaan Tenggarong di Kalimantan Timur, Kerajaan Kuala Terengganu di Malaysia, Kerajaan Kuala Petis di Malaysia, Kerajaan Kuantan di Malaysia, dan Kerajaan Kotawaringin Lama di Kalimantan Tengah. Namun, secara spesifik memiliki identitas tersendiri sebagai kerajaan maritim, yaitu dikembangkan sesuai kebutuhan transportasi sungai sebagai jalur utamanya, memiliki pasar apung dan area bandar sebagai pusat perdagangan, memiliki masjid sebagai pusat peribadatan, dan adanya istana sebagai pusat kerajaan. Perkembangan Kesultanan Banjarmasin sangat pesat di abad ke-17. Hal ini didukung oleh sektor ekonomi dan perdagangan yang menjangkau pasar hingga negeri Cina dan India saat itu. Komoditas utama dalam perdagangannya saat itu adalah pala, lada, dan jenis rempah lainnya. Nilai komoditas rempah yang tinggi di pasar global inilah yang menyebabkan masyarakat pedagang asal Banjar menetap di wilayah dagangnya, yaitu di luar Pulau Kalimantan. Mereka membentuk kampung-kampung Banjar sebagai bentuk ikatan kekeluargaan sesama Urang Banjar (Orang Banjar).[2]

Pada masa pemerintahan Sultan Adam Al Wasik Billah (1826–1857) terdapat tiga jenis pembagian teritorial Kesultanan Banjarmasin yaitu: Negara Agung, Mancanegara, dan Pesisir. Negara Agung dipahami sebagai wilayah pusat kerajaan yang disebut sebagai wilayah Kuin. Sekitar wilayah Negara Agung merupakan wilayah istana Kesultanan Banjarmasin. Bentuk teritori ini merupakan bentuk akhir dari sejarah Kesultanan Banjarmasin sebelum berpindah kekuasaan ke pemerintah kolonial Belanda.[3]

2 H. Ramli Nawawi, Tamny Ruslan, Yustan Azidin, *Sejarah Kota Banjarmasin*, Jakarta: Depdikbud, 1986.

3 Kompas.com, "Kesultanan Banjar Sejarah Sistem Pemerintahan dan Masa Kejayaan", 14 April 2021 https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/14/135847779/ kesultanan-banjar-sejarah-sistem-pemerintahan-dan-masa-kejayaan?page=all. Diakses tanggal 15 Mei 2021, dan http://p2k.um-surabaya.ac.id/id3/2-3045-2942/Kerajaan-Banjar_41792_p2k-um-surabaya.html. Diakses 10 Agustus 2021.

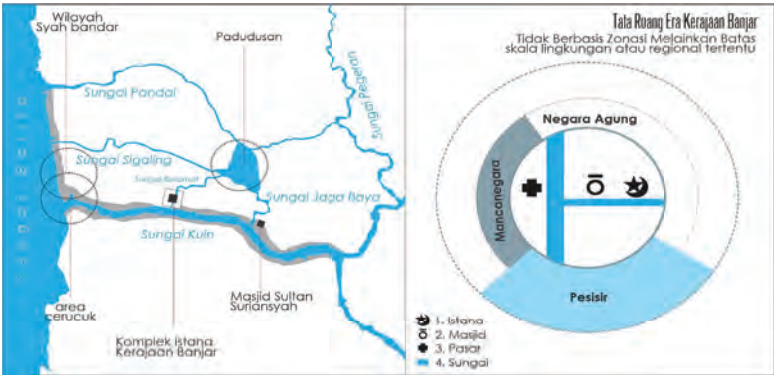

Gambar 7.1. Ilustrasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Era Kesultanan Banjarmasin

Sumber: Diadopsi dari Seman (1982) dan Alqadrie (2011).[4]

KUIN SEBAGAI PUSAT AWAL PERTUMBUHAN KESULTANAN BANJARMASIN

Secara administratif saat ini Kuin berstatus sebagai kelurahan dari bagian Kecamatan Banjarmasin Utara. Secara toponimi nama Kuin merupakan bentuk wilayah yang dipengaruhi oleh nama sungai di sekitar kawasan Kota Banjarmasin. Seperti umumnya nama-nama wilayah di Kota Banjarmasin, baik nama kelurahan maupun nama jalan, banyak mengadopsi nama sungai. Kawasan Kuin yang menjadi pusat peradaban Kesultanan Banjarmasin, awalnya dihuni oleh suku Dayak Ngaju yang kemudian proses amalgamasi meluas hingga membentuk masyarakat Banjar sebagai bentuk kelompok besar terdiri atas berbagai suku. Dalam proses pembentukannya, Kuin merupakan wilayah yang terpilih sebagai pusat kerajaan baru atas pergeseran pusat kerajaan awal yang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sejak Kesultanan Banjarmasin berdiri, Kuin berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dengan titik sentralnya di wilayah muara Sungai Kuin yang menghubungkan aktivitas perdagangan antara hulu dan hilir dengan pelayaran perdagangan

4 Syamsiar Seman, *Rumah Adat Banjar*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982; Dian Rosandra Alqadrie, Morfologi Kota Pontianak, Yogyakarta: Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2011.

seberang pulau hingga menuju luar Nusantara. Relasi dagang yang sudah terbentuk di wilayah muara Sungai Kuin menjangkau negeri India, Arab, dan Cina. Kondisi ini yang kemudian melahirkan *hibriditas*, baik dalam budaya maupun genetika. Salah satu bukti adanya silang budaya ini adalah terdapat silsilah keluarga dari salah seorang syahbandar asal Gujarat yaitu Goja Babouw. Syahbandar Goja Babouw memiliki agen dagang yang menjadi perantara bisnis dengan pihak asing.[5]

Dinamika pelayaran dan perdagangan di wilayah muara Sungai Kuin memposisikan wilayah ini sebagai gerbang masuk Kesultanan Banjarmasin. Ketika terjadi anomali seperti perang dan pemberontakan, masyarakat membuat benteng di wilayah ini yang terbuat dari kayu guna menghalangi kapal-kapal dagang yang hendak masuk ke muara sungai. Sebagai contoh, ketika perang antarsuku terjadi di tahun 1689, masyarakat Kuin membentengi muara Sungai Kuin dengan batang kayu sebagai pagar penghalang kapal masuk ke area gerbang. Pemasangan batang kayu ini dikenal dengan sebutan *cerucuk,* yang kemudian dijadikan nama dari salah satu kelurahan di Kota Banjarmasin. Toponimi lainnya adalah pada Kelurahan Pangeran yang diidentikkan dengan nama Sungai Pegeran/Pangeran. Penamaan Sungai Pangeran disandarkan pada asal peristiwa yang diyakini masyarakat di wilayah ini bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah penting yang pernah menjadi pusat aktivitas dan permukiman keluarga raja.[6]

Memasuki abad ke-18, masyarakat di wilayah Kuin membakar pusat pemerintahan dalam rangka mengusir Inggris dari Banjarmasin. Peristiwa itu berdampak pada pemindahan pusat kota ke Pulau Tatas, sekitar 6 mil ke arah hulu sungai. Pemerintah kolonial Belanda berhasil menata kembali Banjarmasin di tahun 1747 dan membuat loji di Tatas, bahkan berhasil membagun Pelabuhan Tatas.

---

5 M. Suriansyah Ideham, *Urang Banjar dan Kebudayaannya*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007.

6 Daud, Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: Rajawali Press, 1997; Saleh, Idwar, *Bandarmasih*, Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, 1997; Hadinata, Irwan Yudha, Transformasi Kota Sungai-Rawa Banjarmasin, Yogyakarta: Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2017.

Gambar 7.2. Ilustrasi Perkembangan Wilayah Kuin
Sumber: Diadopsi dari Peta KITLV

TATAS SEBAGAI PUSAT KEGIATAN BARU

Berdasarkan kontrak dagang pada 18 Desember tahun 1660 yang menyatakan bahwa VOC diperbolehkan kembali berdagang di wilayah Kesultanan Banjarmasin merupakan momentum awal masuknya perusahaan asing secara resmi. Sebelumnya, terdapat perlawanan-perlawanan masyarakat untuk menentang dominasi VOC di Kesultanan Banjarmasin, seperti yang terjadi pada tahun 1638–1642 yang mengakibatkan kerugian di kedua pihak. Pada tahun 1661, perjanjian dagang diperbaharui yang secara eksplisit memberikan arahan untuk para perusahaan dagang VOC hanya boleh berjualan di kapal dan di daerah loji yang telah ditetapkan. Daerah loji yang disebutkan dalam perjanjian itu berada di wilayah Tatas (sekarang, sekitar wilayah Masjid Raya Sabillal Muhtadien). Daerah-daerah loji juga berkembang sebagai Benteng Tatas atas penguasaan wilayah baru VOC yang ingin memonopoli perdagangan di wilayah itu.[7]

7 Mansyur Sammy, "Melintas Batas Benteng Tatas Dibina Inggris hingga Bumi Hangus", https://jejakrekam.com/2019/08/30/melintas-batas-benteng-tatas-dibina-inggris-hingga-bumi-hangus/. Diakses 22 Mei 2021. Tahun 1606 kedatangan VOC berlabuh di perairan Sungai Barito, mereka belum tertarik wilayah tatas, begitu pula dengan kedatangan Gillies Michelzoon tahun 1612 yang memimpin armada dagang VOC. Baru pada tahun 1747 terjadi kontrak/perjanjian sewa wilayah tatas antara Sultan Banjar dengan Pihak VOC Belanda, dan kemudian traktat Karang Intan memperkuat kekuasaan Belanda di Wilayah Kesultanan Banjarmasin dan pusatnya adalah wilayah tatas yang menjadi cikal bakal Kota Banjarmasin modern.

Benteng Tatas ini dimungkinkan mengalami pembangunan kembali di tahun 1701. Dalam perjanjian Ratu Anom dengan pihak Belanda di tahun 1756 secara eksplisit menjelaskan bahwa sudah terdapat bangunan benteng pada tahun tersebut yang diperkirakan dibangun tahun 1701. Perjanjian itu berlangsung di sekitar wilayah Benteng Tatas. Pada Perjanjian 'Traktat Karang Intan' tanggal 13 Agustus 1787 merupakan bentuk penegasan kembali atas kekuasaan wilayah VOC di wilayah Banjar khususnya wilayah Tatas yang kemudian berkembang sebagai pusat kegiatan baru, khususnya oleh kolega dari perusahaan dagang VOC.[8]

Tercatat dalam gambar peta yang diolah oleh pemerintah kolonial bahwa sejak tahun 1843 infrastruktur Kanal Belitung dan Kanal Antasan Besar sudah dibangun yang memotong sisi barat Kota Banjarmasin dan berpusat menuju Benteng Tatas sebagai jalur penghubung langsung antara pusat benteng dengan Sungai Barito. Selain Benteng Tatas, pemerintah kolonial juga mendirikan Benteng van Tuyll yang diletakkan di muara Sungai Martapura di wilayah Mantuil. Adanya kontrol benteng di muara dan adanya kanal sebagai akses langsung menuju Tatas, maka terjadi penurunan kegiatan perdagangan di wilayah muara Sungai Kuin. Hal ini yang menyebabkan masyarakat di wilayah Kesultanan Banjarmasin berpindah menyebar ke berbagai daerah guna pengamanan atas perlawanannya terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Pada akhir abad ke-19 terjadi Perang Banjar (1859–1905) antara masyarakat Banjarmasin dengan pihak Belanda. Perang dipicu oleh pihak Belanda yang menurunkan Sultan Tamjidillah dari tahta kerajaannya (25 Juni 1859) dan mengumumkan penghapusan Kesultanan Banjarmasin (11 Juni 1869) melalui pengumuman Nieuwenhyzen di Banjarmasin, dan menyatukan bekas wilayah Kesultanan Banjarmasin menjadi wilayah Hindia Belanda yang disebut *Zuider en Oosterafdeeling van Borneo*. Kekecewaan masyarakat Banjarmasin atas keputusan sepihak pemerintah

8 "Dari Benteng Tatas, Tata Kota Banjarmasin Digagas", https://jejakrekam.com/2017/02/09/dari-benteng-tatas-tata-kota-banjarmasin-digagas/. Diakses 22 Mei 2021, menyatakan bahwa dengan kontrol yang kuat itu, VOC Belanda berhasil memaksakan kekuasaan dengan lahirnya Traktat Karang Intan pada 13 Agustus 1787. Para penguasa Tanah Banjar, Sultan Nata Alam, Sultan Sulaiman, Sultan Adam dan Ratu Anom Ismail membubuhkan tanda tangannya dengan stempel kerajaan menyetujui penyerahan beberapa wilayah vazal Kesultanan Banjarmasin kepada perwakilan VOC Belanda, Cr Hoffman.

Hindia Belanda berakibat pada perang besar yang berlangsung lama di Banjarmasin, khususnya wilayah Tatas. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur dan fasilitas pertahanan militer Belanda di wilayah Tatas berkembang pesat, terutama untuk lokasi pusat pemerintahan.[9]

Ketetapan penghapusan Kesultanan Banjarmasin (1869) memberi angin segar bagi para pedagang asing. Sampai tahun 1900 pemerintah memberikan hak atas tanah/*afdeeling* di sekitar Tatas kepada para kolega dagangnya baik dari Arab, Cina, Bugis, Melayu, dan Jawa. Para pedagang inilah yang kemudian membentuk kampung-kampung etnis di wilayah Tatas, yaitu kampung Arab, kampung Cina, kampung Bugis, kampung Melayu, dan kampung Jawa. Keberadaan kampung-kampung ini ditandai dalam peta Belanda tahun 1882 yang menjelaskan tentang kawasan Tatas yang sudah berkembang pesat dari area militer menjadi wilayah pusat kegiatan baru di Kota Banjarmasin. Selanjutnya peta Belanda di tahun 1900-an menjelaskan tentang adanya kawasan Pasar Lama yang menjadi pusat perdagangan utama di Kota Banjarmasin di tahun 1889–1900 di bawah penguasaan pemerintah. Sejak 1920 hingga saat ini, wilayah Pasar Lama tetap sebagai pusat pasar induk di Kota Banjarmasin.

Sejak 1950 sampai saat ini wilayah Tatas berkembang sangat pesat. Berbagai bangunan peninggalan Belanda masih kokoh di tengah kota. Tatas menjadi sebuah pusat kegiatan baru meneruskan Kuin sebagai fondasi pertumbuhan Kota Banjarmasin. Sebagian besar warisan peninggalan Belanda difungsikan untuk kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tatas. Di antaranya adalah bangunan-bangunan di lingkungan benteng bekas tentara Belanda diperbaharui untuk difungsikan menjadi asrama TNI. Pemerintah RI banyak mengubah bentuk dan mengalihfungsikan bangunan-bangunan besar peninggalan Belanda. Hanya sedikit lokasi dan fungsi yang masih asli seperti Gereja Protestan (GPIB), Gereja Dayak (GKE), dan Katedral sekalipun dari segi bentuk banyak mengalami pemugaran.

Pada tengah tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, pemerintah RI banyak membangun dan memperbaiki infrastruktur di Kota Banjarmasin. Pembangunan dan peremajaan infrastruktur ditandai

9 H. Ramli Nawawi, Tamny Ruslan, Yustan Azidin, *Sejarah Kota Banjarmasin*, Jakarta: Depdikbud, 1986, hlm. 12– 13.

dengan pembangunan jembatan-jembatan baru, seperti Jembatan Pasar Lama dan Jembatan Antasari sebagai jalur alternatif penghubung baru ke wilayah Tatas. Selain itu, pemerintah juga membangun pelebaran jalan. Sekalipun pelebaran jalan itu mempersempit ruang kanal yang digunakan lalu lintas sungai sebelumnya, namun melengkapi kebutuhan mobilitas kendaraan darat yang mulai banyak di masa ini. Kanal-kanal penting warisan Belanda yang terdampak pelebaran jalan di masa ini di antaranya di Jalan Andalas, Jalan S Parman, Jalan Lambung Mangkurat, dan salah satu sisi Jalan Sutoyo S. Pengembangan infrastruktur jalan di masa Orde Baru awal ini merupakan implementasi program pembangunan rencana lima tahun tahap pertama (Repelita 1).

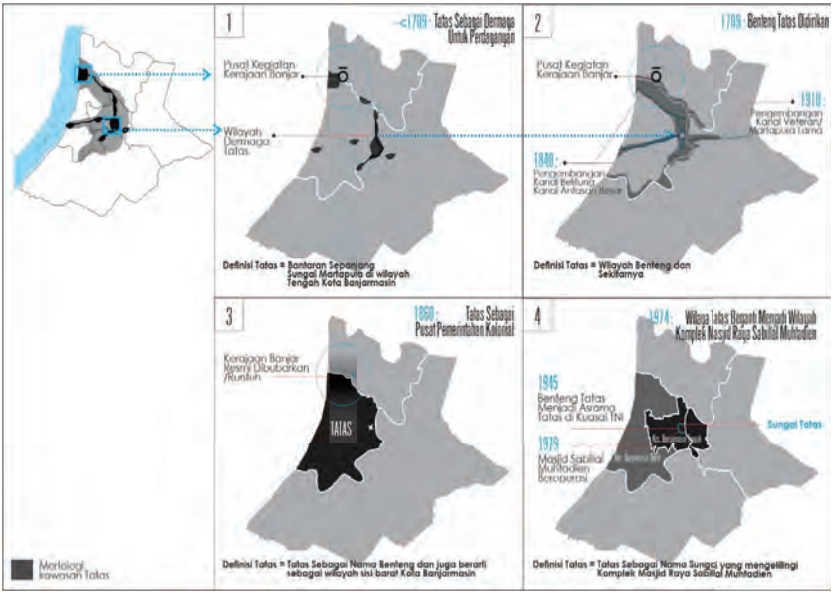

Gambar 7.3. Ilustrasi Perkembangan Wilayah Tatas
Sumber: Diadopsi dari Peta KITLV

TATA RUANG KOTA BANJARMASIN ERA KOLONIAL

Dalam perspektif tata ruang di era pemerintah kolonial Belanda merupakan tonggak baru dalam cara-cara pengaturan wilayah, khususnya dalam penataan jaringan jalan maupun bangunan. Bilamana Kesultanan Banjarmasin bertumpu kepada bangunan penting seperti istana, masjid, dan pasar, maka hal ini berbeda dengan cara penataan era kolonial yang lebih menekankan kepada sistem *zoning* yang akhirnya berkembang dalam berbagai macam jenis hak atas zonasi tersebut seperti hak *Eigendom*, *Erfpacht*, *Opstal*, *Gebruik*. Dalam perspektif perkotaan, istilah kota sudah muncul pada era kolonial ini, seperti sejalan dengan lahirnya pemikiran-pemikiran pasca revolusi industri tentang bentuk-bentuk kota yang ideal di Eropa.

Pada tahun 1905 terdapat beberapa perencanaan kota yang digagas oleh Ir. Sebiga Mulder yang mengarahkan pelabuhan lama dipindah ke muara Sungai Alalak dan menjadikannya sebagai pelabuhan besar, pelebaran antasan awang/Sungai Awang, dan pengembangan pembangunan kota diarahkan ke wilayah Sungai Andai dan Banua Anyar. Pada tahun itu, Kota Banjarmasin masih berfungsi sebagai kota sungai dan kota dagang. Penataan ruang kota masih bertumpu kepada sistem jalur air yang menjadi jalur utama perdagangan. Selain itu, penataan permukiman dilakukan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di wilayah Tatas. Pada tahun 1937, penataan kota dilanjutkan oleh Ir. Kartens yang dilakukan secara komprehensif dalam memetakan kondisi tata ruang Kota Banjarmasin. Benteng Tatas dipindahkan ke luar kota dan lokasi benteng dijadikan sebagai bangunan modern. Adapun bangunan penjara dan perusahaan listrik ANIEM dipandang tidak sesuai lagi berada di dalam kota sehingga dipindahkan ke luar kota. Dalam perencanaan tata ruang kota di tahun itu tampak pembangunan pusat pemerintahan di wilayah Tatas sudah berkembang pesat sehingga beberapa fungsi yang seharusnya berada di daerah tepian wilayah sudah masuk dalam wilayah kota.[10]

10 Dari berbagai sumber dalam Irwan Yudha Hadinata, Transformasi Kota Sungai-Rawa Banjarmasin, Yogyakarta: Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2017.

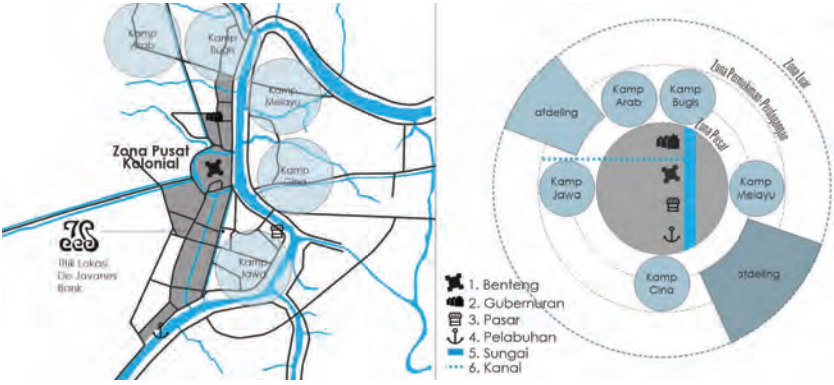

Gambar 7.4. Ilustrasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Era Kolonial

KAWASAN PUSAT KOLONIAL BANJARMASIN (TATAS)

Kawasan Pusat Kolonial Banjarmasin ditandai dari daerah Pasar Lama sampai wilayah Pelabuhan Lama atau sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sampai Jalan R. E. Martadinata. Pada tahun 1882 kawasan ini merupakan jaringan jalan yang terhubung antara keresidenan sampai wilayah pelabuhan yang sepanjang jalannya memuat fungsi-fungsi penting dari bangunan-bangunan saat itu, seperti kantor gubernur (*woning van den resident*), Benteng Tatas (*versterking tatas*), wilayah pekuburan (*kerkhof*) penjara, kantor pelabuhan (*pakhuis en havenkantoor*), dan permukiman etnis (*wijkenstelsel). Sejak Kota Banjarmasin berada dalam pusaran dinamika perekonomian global,* permukiman etnis semakin memadati wajah kota ini. Kampung Jawa, kampung Bugis, kampung Melayu, kampung Arab, dan kampung Cina mengisi ruang bantaran sungai sekitar kawasan pusat kolonial.

Pada tahun 1920, pemerintah meresmikan Pasar Baru sebagai pusat perdagangan menggantikan Pasar Lama. Awalnya, pusat perdagangan di wilayah Pasar Lama sempit, kemudian direlokasi ke wilayah yang kemudian disebut Pasar Baru yang lebih luas. Di wilayah Pasar Baru kemudian dilengkapi dengan Gereja Dayak, Gereja Protestan, Gereja

Komplek Katedral Katolik, Komplek Pastur Zending, De Javasche Bank (kini BI), Rumah Sakit Jiwa (*Krankzinnige Gesticht*), Lapangan Merdeka, Barak Militer, Penjara (Kantor Pos, saat ini), dan Kantor Pos (kini Kavling Hook Jembatan Dewi) yang semuanya bergaya arsitektur kolonial. Kota Banjarmasin terus berkembang hingga saat ini, namun masih menggunakan struktur ruang kota era kolonial.

Gedung-gedung bergaya arsitektur kolonial Belanda itu tidak lagi kokoh di tahun 1942. Ketika terjadi penyerangan tentara Rikugun Jepang ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan pada 6 Februari 1942, Kota Banjarmasin menjadi lautan api. Pada 8 Februari 1942, *Algemeene Vernielings Corps* (AVC) yaitu korps perusak bangunan membakar aset bangunan-bangunan di kota agar tidak dimanfaatkan oleh tentara Jepang. Bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan berat saat itu seperti benteng, Jembatan Coen, gudang (*Mac Laine* dan *Watson*), pabrik karet Hok Tong, dan perusahaan listrik ANIEM. Pembakaran oleh AVC ini mengakibatkan kawasan pusat kolonial menjadi lumpuh total. Kerusakan bangunan berdampak pada kerusuhan sosial yang menjalar ke berbagai daerah. Masyarakat melakukan penjarahan atas gudang-gudang dan rumah milik orang Belanda, pertokoan, dan hotel. Wilayah Pasar Baru terbakar dalam waktu yang bersamaan. Pada masa Jepang tidak banyak pembangunan yang dilakukan, hanya Jembatan Coen dibangun kembali untuk transportasi darat, dan diberi nama Jembatan Jamat.[11]

Pada perkembangan selanjutnya, mulai dari tahun 1955 hingga sekarang, sebagaimana telah diulas di atas, bangunan-bangunan di Banjarmasin masih mengikuti struktur tata ruang bangunan Belanda. Pemerintah hanya melakukan perbaikan bentuk bangunan yang rusak. Hanya beberapa bangunan yang diubah fungsi dan bentuknya seperti difungsikan untuk asrama TNI dengan area yang lebih terbuka, eks rumah-rumah residen di sepanjang Jalan Lambung Mangkurat difungsikan untuk para petinggi militer angkatan darat dan laut, eks kantor dan fasilitas umum Belanda difungsikan dan diubah nama dari *De Kapel* menjadi Balai

11 Idwar Saleh, *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan, Jakarta: Depdikbud, 1986. Lihat* H. Ramli Nawawi, Tamny Ruslan, Yustan Azidin, *Sejarah Kota Banjarmasin*, Jakarta: Depdikbud, 1986, hlm. 14.

Pemuda, *Gouvernementkantoor* menjadi Balai Kota Praja, *Krankzinnigen Gesticht* menjadi komplek sekolah SMP 1 Banjarmasin (Mahligai Pancasila, saat ini).

KAWASAN JALAN LAMBUNG MANGKURAT

Prasarana dan sarana publik penting lainnya yang melengkapi kebutuhan di kota adalah jalan raya. Jalan Lambung Mangkurat (*resident de haanweg)* adalah poros jalan utama yang menghubungkan antara wilayah pusat pemerintahan (Jalan Sudirman/*Noordolinde weg*) dengan pelabuhan (*Haven weg*).

Penamaan Jalan Lambung Mangkurat ditetapkan pasca kemerdekaan yang mengangkat nama dari patih Kerajaan Dipa yang merupakan asal kerajaan pertama di tanah Banjar. Sampai saat ini Jalan Lambung Mangkurat berfungsi sebagai jalan protokol kota serta berfungsi ganda untuk lokasi perkantoran kantor-kantor utama pemerintahan, swasta, dan komersial berskala besar. Meskipun demikian, fungsi jalan ini sudah berlaku sejak tahun 1882 sebagai jalan utama dengan dilengkapi berbagai bangunan penting di kiri-kanannya. Koridor Jalan Lambung Mangkurat memiliki dua persimpangan yaitu persimpangan kecil yang menghubungkan wilayah timur Kota Banjarmasin melalui Jalan Hasanuddin HM (*school weg*) ke Jalan A. Yani (*oelin weg*) dan persimpangan besar (simpang empat) yang menghubungkan dengan wilayah pasar dan wilayah pemakaman umum (saat ini menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH)/taman kamboja).

Pada masa Orde Baru periode Repelita I, koridor Jalan Lambung Mangkurat dan jalan-jalan lainnya di Kota Banjarmasin diperlebar. Pelebaran ini membuka ruang jalan lebih luas namun mempersempit kanal yang difungsikan sebagai jalur drainase kota. Pola ruang jalan dengan koridor vegetasi di tengahnya adalah pola tata ruang terbuka peninggalan Belanda, namun dipertahankan oleh pemerintah Indonesia. Pada akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 1990-an, yaitu periode Repelita II dan III, pembangunan jalan raya terus dituntaskan dan koridor Jalan Lambung Mangkurat terus berkembang dengan sangat pesat. Di sepanjang jalan ini

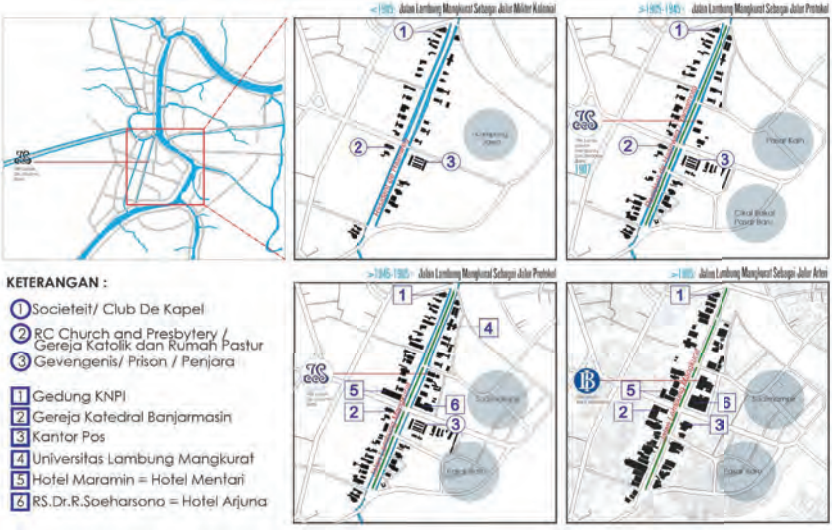

Gambar 7.5. Ilustrasi Morfologi Jalan Lambung Mangkurat Dulu dan Sekarang

terdapat Hotel Maramin (kini Hotel Mentari lama), Kantor Bank Indonesia, Plaza Junjung Buih (kini A Hotel), Kantor Bank BCA, Kantor Dewan Pimpinan Partai Golkar, Universitas Lambung Mangkurat (kini Kantor Kanwil IX mandiri), dan Pelabuhan *speedboat* (saat ini di area Jembatan Merdeka).

Perkembangan ini berlanjut pada awal tahun 2000-an setelah berakhirnya Orde Baru (1999) dan berkembang era reformasi yang menekankan otonomi daerah. Otonomi daerah diatur dalam undang-undang negara Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 dan No. 23 tahun 2014. Otonomi daerah menjadikan koridor Jalan Lambung Mangkurat dipadati perkantoran, seperti kantor perwakilan perusahaan negara, perbankan, hotel, dan kantor bisnis lainnya. Hingga saat ini, Jalan Lambung Mangkurat merupakan wilayah pusat perekonomian atau CBD (*Central Business District*) di Kota Banjarmasin.

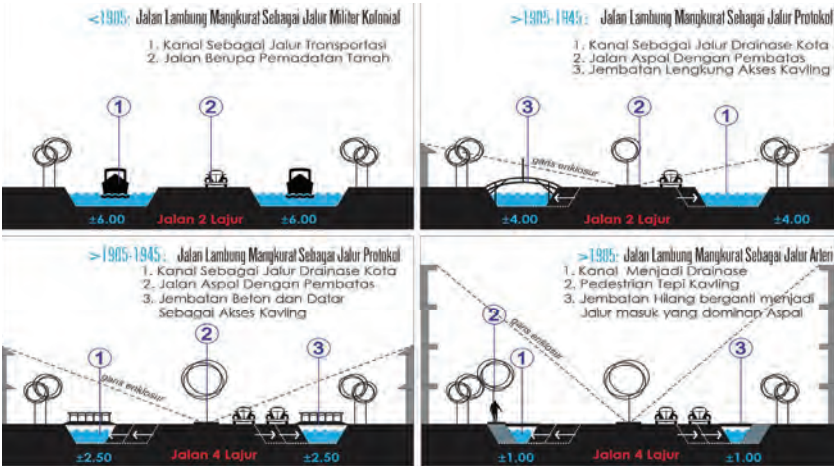

Gambar 7.6. Ilustrasi Perubahan Ruang Jalan Lambung Mangkurat Dulu dan Sekarang

DE JAVASCHE BANK BANDJERMASIN

SEJARAH BANGUNAN DE JAVASCHE BANK BANDJERMASIN

Sejak awal pendirian hingga tahun 1942 De Javasche Bank (DJB) telah membuka dan mengoperasikan 16 kantor cabang di kota-kota yang dianggap strategis di Hindia Belanda, yaitu Semarang (1829), Surabaya (1829), Padang (1864), Makassar (1864), Cirebon (1866), Solo (1867), Yogyakarta (1879), Pontianak (1906), Medan (1907), **Banjarmasin (1907)**, Bandung (1909), Palembang (1909), Manado (1910), Malang (1916), Banda Aceh/Kutaraja (1918), dan Kediri (1923). Dari informasi ini diketahui bahwa kantor DJB Agentschap Bandjermasin dibuka pada tahun 1907, namun proses perencanaan bangunan kantornya tercatat dimulai pada tahun 1919 dan diresmikan pada tahun 1923 (Gambar 7.8.).[12]

12 Lihat Darsono, dkk, *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral, Op.Cit.*, hlm. 6, 77, dan 122. Selain kantor-kantor cabang yang disebutkan di atas, DJB juga mendirikan kantor cabang di sejumlah wilayah, namun mengalami penutupan setelah sekian lama beroperasi. Kantor-kantor cabang dimaksud di antaranya Pasuruan (1867–1890), Bengkalis (1907–1932), Tanjung Balai (1908–1938), Tanjungpura (1908–1927), Pematang Siantar (1923–1932), dan Madiun (1928–1933).

Sejak berdiri hingga pembukaan cabang di wilayah Hindia Belanda, kantor-kantor DJB berikut tempat tinggal pimpinan masing-masing cabangnya kebanyakan menempati bangunan-bangunan dalam pengawasan pemerintah kolonial Belanda yang telah ada sebelumnya. Seperti DJB Padang (1864) yang menempati bangunan bekas di Nipalaan Verponding No. 1140, DJB Solo (1867) yang menempati sebuah losmen, DJB Yogyakarta (1879) yang menempati sebuah rumah di Gondomanan sebagai kantor sekaligus tempat tinggal pemimpin cabang (agen), DJB Pontianak (1906) yang menempati rumah dinas pemimpin cabang (agen), DJB Bandung (1909) yang menempati persil sewaan Firma van Arcken & Co. di Braga Weg, DJB Palembang (1909) yang menempati rumah berpekarangan luas milik Kapten Cina Tjoa Han Hien, dan DJB Malang (1916) yang menempati rumah di samping alun-alun.

Sama halnya dengan Kantor DJB Yogyakarta dan Pontianak, kantor DJB Bandjermasin sejak 1907–1923 menempati rumah dinas pemimpin cabang (agen) DJB Bandjermasin di jalan *Resident De Haan Weg (voorheen Boomstraat* atau Jalan Lambung Mangkurat). Rumah ini lokasinya berdekatan dengan kantor DJB Bandjermasin yang diresmikan tahun 1923. Hal ini diketahui dari arsip De Javasche Bank dan Surat Nomor 93/1 tanggal 14 Juni 1920 tentang "*Borsumij (Borneo Sumatra Handel Mij) en Nieuwe Gebouw van De Javasche Bank Bandjermasin*" (Borsumij (Borneo Sumatra Handel Mij) dan bangunan Baru DJB Bandjermasin)" yang isinya sebagai berikut:[13]

> *"Borsumij (Borneo Sumatra Handel Mij) mengirimi saya peta yang menunjukkan wilayahnya. Ia memiliki, antara lain, 2 persil/kavling, yang saling berdampingan dan terletak di sebelah gedung DJB*

13 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1436, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 8 April 1922. Surat menyurat dan lokasi rumah dinas pemimpin cabang (agen) DJB Bandjermasin yang terletak di Jl. *Resident De Haan Weg,* ternyata nama jalannya sama dengan *voorheen Boomstraat*, atau sekarang Jl. Lambung Mangkurat, dan rumah dinas ini berdampingan dengan kavling 48 dan 49 yang diusulkan. Dari analisis ini memberikan arti bahwa kantor DJB Bandjermasin dari 1907–1923 adalah rumah dinas agen (kavling 47), kemudian pada tahun 1919 di kavling 49 mulai dirancang dan dibangun kantor DJB Bandjermasin oleh Biro Arsitek Biro Hulswit-Cuypers, diresmikan dan dipergunakan pada tahun 1923–1986, pada kavling 48 tahun 1955 diperkirakan dibangun Rumah Dinas Pimpinan Bank Indonesia, dan selanjutnya dari 1986 di lahan tersebut (kavling 47 dan 48) berdiri gedung Bank Indonesia Kalimantan Selatan yang dapat dilihat hingga sekarang ini (kavling 49 menjadi area parkir).

sekarang (No. 48 dan 49) dengan lebar depan 54 M dan kedalaman sekitar 80 M di sudut Boomstraat dan jalan menuju Martapoera. Menurut peta, tanah tersebut lebih dari 4000 m², sedangkan tanah DJB saat ini memiliki luas 4900 m².”

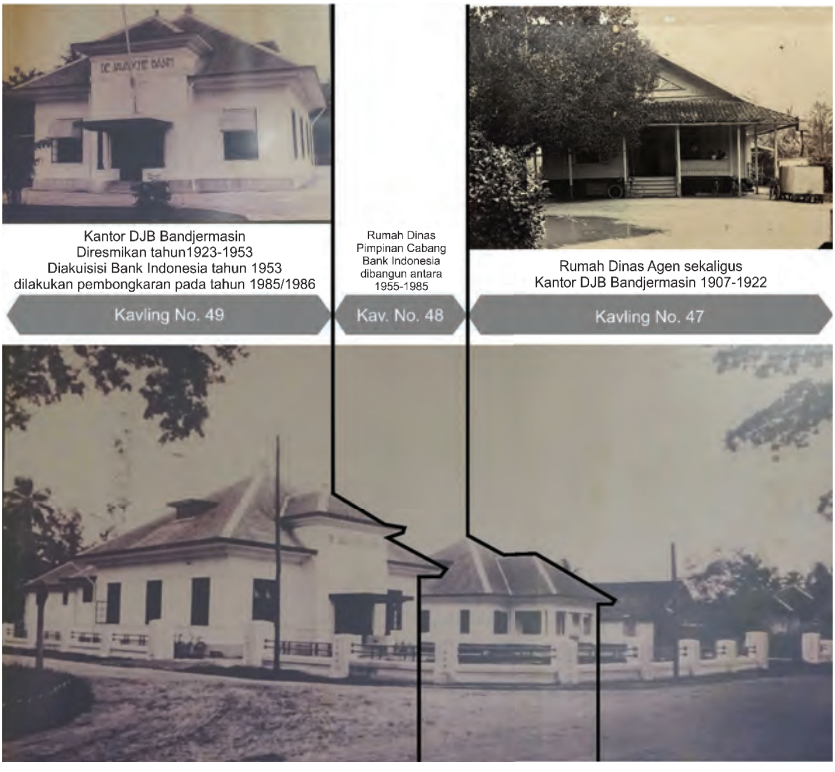

Gambar 7.7. Lokasi Kantor DJB *Bandjermasin* 1907–1922 dan 1923–1986
Sumber: Arsip Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, 2021

Proses perencanaan dan pembangunan bangunan kantor DJB Bandjermasin dirintis mulai tahun 1919. Hal ini berdasarkan surat dari pimpinan cabang DJB Bandjermasin ke Presiden Direktur DJB di Batavia Nomor 92/2 tanggal 21 November 1919 dan kemudian dilanjutkan

dengan Surat Nomor 93/1 tanggal 14 Juni 1920 tentang "*Borsumij en Nieuwe Gebouw van De Javasche Bank Bandjermasin*" (Borsumij dan bangunan baru DJB Bandjermasin)".[14]

Bangunan DJB di Hindia Belanda dibangun dengan durasi pembangunan selama 25 tahun, terhitung sejak 1910 hingga 1935 oleh N.V. Architecten-Ingenieursbureau Hulswit en Fermont te Weltevreden en Ed. Cuypers te Amsterdam (Biro Fermont-Cuypers). Perusahaan itu pun merupakan perusahaan yang baru berdiri di tahun itu (1910) atas prakarsa M. J. Hulswit dan Eduard H.G.H Cuypers. Namun sebelum proyek pembangunan itu selesai, pada tahun 1921 M. J. Hulswit meninggal dunia.[15] Proyek perencanaan dan pembangunan DJB, termasuk DJB Bandjermasin, dilanjutkan oleh Eduard H.G.H Cuypers yang bekerja sama dengan Arthur Amandus Fermont (Fermont). Bukti atas keterlibatan Fermont selama proses pembangunan DJB sejak tahun 1921 dijelaskan dalam surat menyurat antara pimpinan cabang DJB Bandjermasin dan Direktur DJB di Batavia Nomor 95/1 tanggal 22 April 1922 tentang *Nieuwe Gebouw De Javasche Bank Bandjermasin* (bangunan baru DJB *Bandjermasin*), sebagai berikut:[16]

> *"Selain itu, Tuan Fermont membuat kami memperhatikan hal tersebut bahwa dalam kasus-kasus ketika bukaan pintu dibuat sesuai ukuran, hanya mungkin untuk mengisi ruang terbuka kecil hanya dengan beton. Dalam kasus khazanah di DJB Bandjermasin ini, tidak hanya beton, tetapi juga melibatkan tulangan besi, sehingga pintu darurat terpasang lebih kuat dari yang seharusnya."*

Atas dasar surat kesepakatan di atas, diperkirakan pada tahun 1922 proses pembangunan DJB masih berlangsung dilakukan. Dalam isi surat menyurat antara pimpinan cabang DJB Bandjermasin dan Direktur DJB di

14 Arip Bank Indonesia, "Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1436", *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 21 November 1919 dan 14 Juni 1920.

15 Hartono, S. and Handinoto, H., "The Amsterdam School dan Perkembangan Arsitektur Kolonial di Hindia Belanda antara 1915–1940". *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*, *35*(1), 2007, hlm. 46.

16 Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1436, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 22 April 1922. Surat yang menjelaskan proses perencanaan dan pembangunan kantor DJB Bandjermasin oleh Biro Arsitek Hulswit en Fermont te Weltevreden en Ed. Cuypers.

Batavia Nomor 93/1 tanggal 8 April 1922 tentang *Nieuwe Bankgebouw* (Bangunan Kantor Baru) juga menjelaskan hal yang sama tentang proses pembangunan DJB Bandjermasin. Surat pertama (8 April 1922) berupa laporan dari pimpinan cabang DJB Bandjermasin kepada Direktur DJB pusat tentang pengerjaan ruang khazanah DJB Bandjermasin yang menggunakan beton bertulang oleh Tuan Dumans. Sementara surat kedua (22 April 1922) berupa tanggapan atas surat pertama yang menyatakan bahwa pihak Direktur DJB pusat di Batavia tidak keberatan dengan pekerjaan Tuan Dumans.[17]

Pengerjaan bangunan DJB Bandjermasin selesai di tahun 1923 yang kemudian diresmikan pada 28 Februari 1923. Berdasarkan arsip Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan dan rekam foto koleksi Tropenmuseum (Gambar 7.8.) tentang *Opening van het kantoor van de Javasche Bank in Bandjermasin (stadsgemeente)* 1923 memberikan gambaran bahwa pembukaan Kantor DJB di Kota Banjarmasin adalah di tahun 1923.

Sejak itu, DJB Bandjermasin beroperasi hingga tahun 1949 saat Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia dan mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Empat tahun setelahnya, pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, bahwa terhitung mulai 1 Juli 1953 DJB berubah menjadi Bank Indonesia (BI) dan secara resmi BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut sekaligus menjelaskan adanya pembelian saham oleh BI dan sejak itu seluruh aset DJB menjadi aset BI. DJB Bandjermasin akhirnya diakuisisi menjadi kantor BI Kalimantan Selatan. Namun, bangunan DJB Bandjermasin tidak banyak diubah dan bertahan hingga dilakukan pembongkaran pada tahun 1985. Kemudian pada tahun 1986 bangunan BI mulai dibangun dan diremajakan.

17 *Ibid.* Surat-menyurat berkaitan dengan proses pembangunan pekerjaan ruang khazanah DJB Bandjermasin.

Gambar 7.8. Pembukaan Kantor DJB di Banjarmasin Tahun 1923
Sumber: Tropenmuseum

Gambar 7.9. Kantor De Javasche Bank di Banjarmasin antara Tahun 1900 dan 1924
Sumber: Tropenmuseum

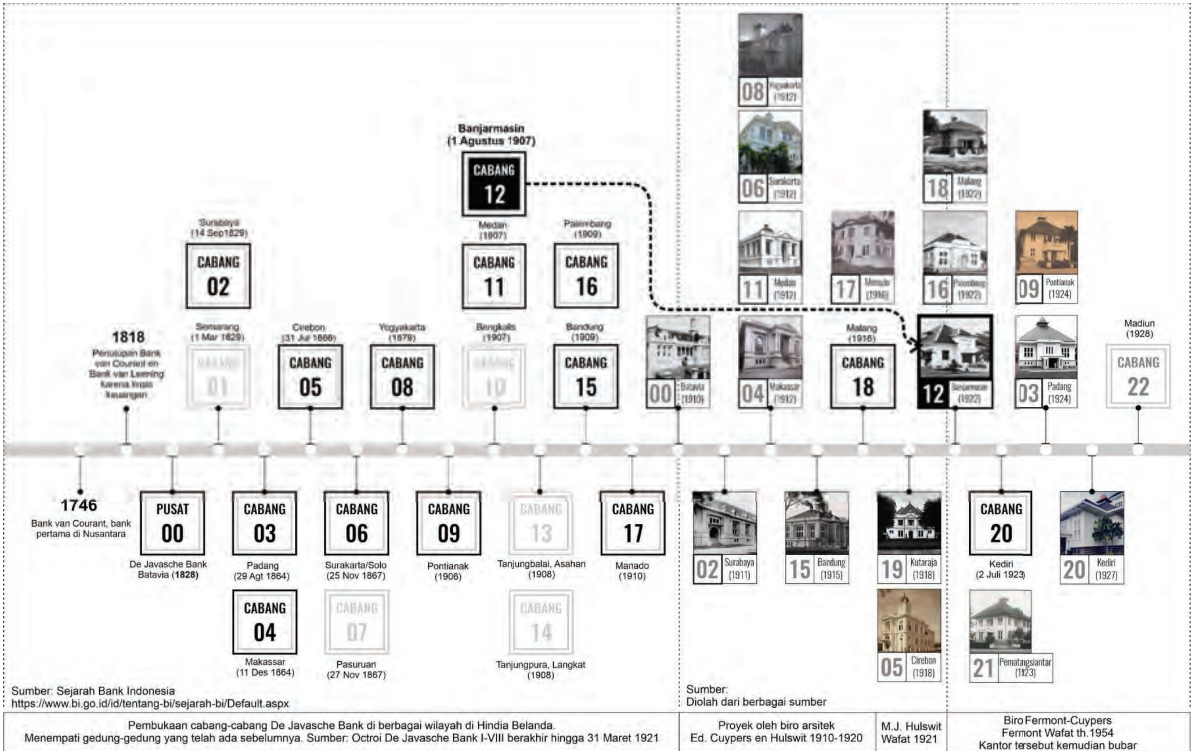

Gambar 7.10. *Timeline* De Javasche Bank

Sumber: diolah Aufa (2021) berdasar https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/Default.aspx dan sumber referensi lainnya.

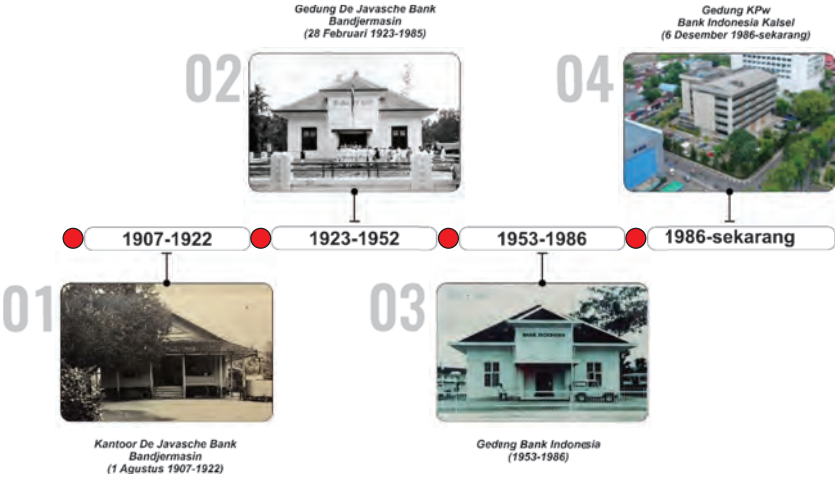

Gambar 7.11. Linimasa Bangunan DJB Bandjermasin dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan

Sumber: digambar oleh Aufa (2021) dari berbagai sumber

ARSITEKTUR DE JAVASCHE BANK BANDJERMASIN

Pembicaraan s*tyle* atau gaya arsitektur DJB di Hindia Belanda merupakan hal diskusi menarik seputar ide atau gagasan tentang seni rancang bangun, budaya, dan konstruksi tata ruang. Dalam perkembangannya, seni arsitektur ini mengalami perubahan di setiap zamannya mengikuti ide, gagasan, model, dan inovasi dari seorang arsiteknya. Abad ke-18 yang merupakan era *aufklarung* atau pencerahan (*the age of reason*) merupakan era transisi dalam bidang teknologi dan budaya. Para ilmuan banyak berinovasi di masa ini termasuk dalam arsitektur baru. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia banyak memengaruhi gaya arsitektur di setiap daerah yang dikunjunginya. Sekalipun pada awalnya mengikuti kebutuhan dan cara hidup mereka yang memaksanya beradaptasi dengan kondisi geografis setempat. Namun kemudian, faktor geografis Hindia Belanda yang tidak membuat nyaman bagi bangsa Eropa, menyebabkan arsitektur Eropa yang diterapkan di wilayah koloni-koloni Eropa. Pemerintah Hindia

Belanda kemudian menggunakan para arsitek Eropa untuk berbagai pembangunan infrastruktur di daerah jajahannya. Arsitektur di masa ini lebih bersifat *vernacular* atau Vernaculus, yaitu gaya bangunan yang menyesuaikan dengan budaya masyarakat lokal dan ketersediaan bahan di lingkungan tersebut.

Berbeda dengan gaya arsitektur modern yang berkembang di awal abad ke-20 hingga sekarang yang sudah menggunakan teknik bangun yang lebih maju, *simple*, dan fungsional dengan penggunaan berbagai material baru seperti beji, beton, dan kaca. Kebanyakan gaya arsitektur di masa ini lebih kepada pengembangan profesionalitas para arsiteknya. Di Hindia Belanda, bangunan-bangunan yang dibangun di abad ke-20 dapat dipastikan menggunakan langgam arsitektur kolonial Eropa. Menurut Hartono dan Hadinoto,[18] arsitektur kolonial merupakan arsitektur yang memadukan antara budaya Barat dan Timur, yang memiliki ciri-ciri spesifik sebagai hasil kompromi dari arsitektur modern yang berkembang di Belanda dengan arsitektur Nusantara karena budaya dan kondisi iklim yang berbeda jauh dari kedua negara tersebut. Langgam arsitektur kolonial di Hindia Belanda dibagi ke dalam tiga periode, yaitu:

1) *Indische Empire* (Abad ke-18–19);
2) Arsitektur Peralihan (1890–1915); dan
3) Arsitektur Kolonial Modern (1915–1940).

Abad ke-18 dan 19, arsitektur di Hindia Belanda didominasi oleh gaya arsitektur yang disebut sebagai "*Indische Empire*" seperti yang diungkapkan oleh Hartono dan Hadinoto[19] sehingga dalam kajian sejarah arsitektur, bangunan-bangunan periode kolonial di Hindia Belanda sering disebut sebagai bangunan Indis, yaitu bangunan yang merupakan hasil asimilasi antara gaya Eropa dan tradisional. Dalam perkembangannya, arsitektur gaya Eropa menyesuaikan dengan kondisi iklim tropis dengan penampilan arsitektur tradisional. Lebih jauh lagi, budaya Indis ini tidak saja memengaruhi seni bangunan melainkan gaya hidup masyarakat

18 Handinoto, H. and Hartono, S., "Arsitektur Transisi di Nusantara dari Akhir Abad 19 ke Awal Abad 20 (Studi Kasus Komplek Bangunan Militer di Jawa pada Peralihan Abad 19 ke 20)". *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*, *34*(2), 2006, hlm. 81–92.

19 *Ibid.*

yang sudah mengalami adaptasi budaya dan genetika. Untuk kajian ini, Sukiman menyebutnya sebagai kebudayaan Indis atau budaya Indis.[20] Bangunan-bangunan DJB yang dibangun pada periode abad ke-18 hingga 19 mencerminkan dengan jelas gaya *Indische Empire*, seperti pada Gambar 7.12.

DJB Bandung

DJB Makassar

DJB Medan

DJB Batavia

DJB Surabaya

DJB Cirebon

Gambar 7.12. De Javasche Bank dengan gaya "*Indische Empire*"
Sumber: Tropenmuseum dan sumber lainnya

Handinoto dan Hartono mencatat beberapa ciri khusus yang dimiliki jenis arsitektur gaya *Indische Empire*, yaitu:[21]

1. Denah

   Denah berbentuk simetris dengan ruang tengah yang disebut dengan "*Central Room*" yang berhubungan langsung dengan teras depan (*Voor Galerij*) dan teras belakang (*Achter Galerij*), selain itu juga terdapat teras keliling (*portico*) yang mengelilingi bangunan.

20 Djoko Sukiman, Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII-medio abad XX), Yogyakarta, Bentang Budaya, 2000.

21 Handinoto, H. and Hartono, S., "Arsitektur Transisi di Nusantara dari Akhir Abad 19 ke Awal Abad 20 …", *Op. Cit.*

2. Tampak

   Tampak tersusun atas barisan kolom gaya Yunani pada teras keliling (*portico*), teras depan (*Voor Galerij*) dan teras belakang (*Achter Galerij*). Bentuk tampak yang simetri merupakan ciri khas arsitektur pada zaman ini.

3. Material

   Material konstruksi utamanya adalah batu bata, baik pada kolom maupun pada tembok/dinding. Selain batu bata, kayu juga digunakan terutama pada kuda-kuda, kusen jendela, kusen pintu, dan pada pintunya. Material kaca tidak terlalu mendominasi.

4. Konstruksi

   Sistem konstruksi menggunakan susunan batu bata sebagai dinding pemikul dengan barisan kolom yang menopang balok atap. Konstruksi atap menggunakan material kayu pada kuda-kuda yang membentuk atap perisai dengan penutup atap dari genteng.

Gambar 7.13. Ciri-ciri Arsitektur Gaya "*Indische Empire*"
Sumber: digambar oleh Aufa (2021) dari berbagai referensi

Berdasarkan periodisasi pembangunannya, bangunan DJB Bandjermasin (1919–1922) berada pada periode arsitektur kolonial modern yang berkembang dalam rentang masa 1915–1940 yang sering disebut sebagai arsitektur gaya *Nieuwe Bouwen*. Ciri khusus dari arsitektur kolonial modern ini melekat pada wujud dan tampak bangunan DJB Bandjermasin yang tidak lagi didominasi oleh teras keliling (*portico*), teras depan (*Voor Galerij*), teras belakang (*Achter Galerij*), dan deretan kolom-kolom bergaya Yunani.

Handinoto[22] menyebut gaya arsitektur kolonial modern merupakan sebuah protes terhadap arsitek Belanda setelah tahun 1900 atas gaya *Indische Empire* yang masih digunakannya. Pengaruh politik etis (1901) di Hindia Belanda yang mendatangkan banyak para ilmuwan Eropa termasuk para arsitek Belanda menambah ketakjubannya atas gaya *Indische Empire* yang digunakan di Hindia Belanda. Gaya arsitektur ini mendapat sambutan dan berkembang di Prancis namun tidak di Belanda, sehingga para ilmuwan Belanda memandang asing atas gaya arsitektur ini.[23] Itulah kemudian mereka lebih mengembangkan gaya arsitektur modern atau arsitektur kolonial modern.

Hartono dan Handinoto mencatat ciri-ciri arsitektur kolonial modern sebagai berikut:[24]

1. Denah

   Denah lebih variatif dan mengikuti khazanah arsitektur modern, *form follow function*. Bentuk denah simetris dan teras keliling (*portico*) cenderung dihindari. Sebagai ganti teras keliling digunakan kanopi untuk menghalau sinar matahari dan tampias hujan.

2. Tampak

   Tampak setiap sisi bangunannya berbeda. Tampak bangunan juga mengikuti khazanah arsitektur modern, *form follow function* atau "*Clean Design*" tanpa deretan kolom Yunani.

3. Material

   Material beton mulai mendominasi dan digunakan secara masif pada bangunan. Demikian juga dengan penggunaan material kaca untuk bukaan yang cukup lebar.

4. Konstruksi

   Konstruksi beton menggunakan beban dipikul oleh kolom dan balok, sehingga dinding hanya berfungsi sebagai pengisi/penutup. Bentuk atap masih menggunakan bentuk atap pelana dan perisai, dengan bahan penutup genteng atau sirap. Beberapa bangunan mulai menggunakan atap dak beton, yang belum pernah ada sebelumnya.

---

22 Handinoto, "Arsitek G.C. Citroen dan Perkembangan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya (1915-1940)". *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 19*, Surabaya: Universitas Kristen Petra press, 1993, hlm. 1–16.

23 *Ibid.*

24 Handinoto, H. dan Hartono, S. "Arsitektur Transisi di Nusantara dari Akhir Abad 19 ke Awal Abad 20 …", *Op.Cit.*

DENAH

TAMPAK

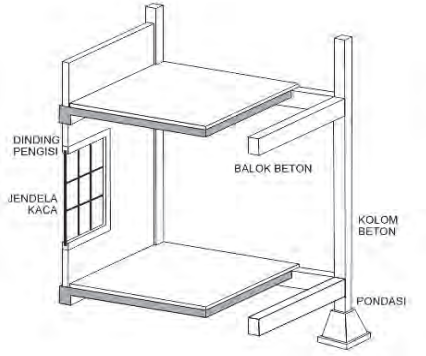

MATERIAL | KONSTRUKSI

Gambar 7.14. Ciri-ciri Arsitektur Gaya "Kolonial Modern"
Sumber: digambar oleh Aufa (2021) dari berbagai referensi

Foto di bawah (Gambar 7.15.) menggambarkan beberapa bangunan DJB lain yang bergaya arsitektur kolonial modern.

DJB Bandjermasin

DJB Kediri

DJB Padang

DJB Pematang Siantar

DJB Manado

DJB Pontianak

Gambar 7.15. De Javasche Bank dengan Gaya "kolonial modern"
Sumber: Tropenmuseum dan sumber lainnya

LOKASI DAN SITUASI

Pemerintah Hindia Belanda mendirikan bangunan DJB Bandjermasin di lokasi pusat pemerintahan untuk mendukung kegiatan perekonomian negara. Tepatnya, bangunan ini dibangun di Jalan *Resident de Haanweg* (jalanan kampung Belanda, mulai dari jembatan Telawang sampai jembatan kamar bola "de kapel"). Lokasi itu mengalami perubahan nama namun tidak mengubah posisi bangunan DJB. Secara geografis letak DJB Bandjermasin berada di titik koordinat 3°19'24"S dan 114°35'30"E—sekarang menjadi kavling Bank Indonesia.

Pada 12 Februari 1942, Jepang berhasil menguasai wilayah Kalimantan Selatan, dan Banjarmasin diserahkan oleh Walikota Banjarmasin Van der Neulen dan Kepala DJB Bandjermasin Konig kepada pemerintah pendudukan Jepang di bawah pengawasan *Rikugun* (Angkatan Darat) dan Walikota drg. Shogenhaji. Kedatangan Jepang di Banjarmasin telah mengubah struktur pemerintahan secara total. Sesuai ideologi *Hakko I Chiu* (delapan penjuru bumi di bawah kaisar Jepang) yaitu slogan fasisme Jepang di masa Perang Dunia II, Jepang merombak struktur pemerintahan sebelumnya, mulai ideologi, politik, ekonomi, infrastruktur, dan kebudayaan dengan tujuan menghapus warisan Belanda di wilayah pendudukan. Namun karena sifatnya darurat perang, maka pemerintahan pendudukan Jepang tidak berhasil mengembangkan bentuk pemerintahannya di wilayah jajahannya. Namun, pada masa ini, sumber surat kabar menyebutkan adanya perubahan nama-nama jalan di wilayah Kota Banjarmasin. Seperti yang terjadi di lokasi bangunan DJB yang semula nama lokasi jalannya disebut *Resident de Haanweg* menjadi Jalan Yamamoto. Demikian juga perubahan nama jalan terjadi untuk *Schoolweg* yang menjadi Jalan Kataoka, dan *Emmastraat* menjadi Jalan dr. Shogenji. Informasi perubahan nama-nama jalan tersebut di antaranya disebutkan dalam surat kabar Kalimantan Raya No. 28 (8 April 1942) dalam artikel yang berjudul "Perubahan Nama-nama Djalanan".[25]

25 Surat Kabar *Kalimantan Raya*, No. 28 tanggal 8 April 1942. Penjelasan perubahan nama-nama jalan mempertegas tentang kawasan atau lokasi tersebut sebagai lokasi penting dan sangat sentral dalam perkembangan Kota Banjarmasin.

Pada perkembangannya (2021) nama jalan *Resident de Haanweg/ Yamamoto* berubah menjadi Jalan Lambung Mangkurat, Jalan *Schoolweg/ Kataoka* menjadi Jalan Hasanuddin yang membentang mulai dari Jalan Lambung Mangkurat sampai *Koenbrug*/Jembatan Koen (sekarang Jembatan Dewi), Jalan *Emmastraat/dr. Shogenji* menjadi Jalan Pangeran Samudera, dan ada penambahan nama Jalan Bank Rakyat yang tidak tercatat pada masa pemerintahan Hindia Belanda menghubungkan Jalan Hasanuddin dan Jalan Pangeran Samudera.

Suasana kawasan pusat perkotaan Banjarmasin, di masa pemerintahan Hindia Belanda hingga Jepang masih sangat rindang yang dipenuhi oleh pohon-pohon (flora) endemik Kalimantan seperti, pohon kelapa (*Cocos nucifera*), pohon galam (*Melaleuca leucadendra L.*), pohon jingah (*Gluta renghas)*, dan pohon rambai (*Baccaurea motleyana*). Kondisi tersebut tergambarkan dalam foto di bawah ini (Gambar 7.16, 7.17., 7.18) sebagai ilustrasi lokasi bangunan DJB Bandjermasin.

Gambar 7.16. Jalan Pohon di Banjarmasin, Dilihat dari Pastori Tahun 1930
Sumber: KITLV

Gambar 7.17. Suasana *Resident de Haanweg* Bandjermasin

Sumber: https://ramlinawawiutun.blogspot.com/2009/08/jln-di-pusat-kota-bjm-th-1936-ini.html?m=1

Gambar 7.18. Suasana *Resident de Haanweg, Vermoedelijk te* Bandjermasin 1938

Sumber: KITLV

Gambar 7.19. Lokasi De Javasche Bank Bandjermasin Bandjermasin 1938

Sumber: digambar oleh Aufa (2021) berdasar artikel yang berjudul "Perubahan Nama-Nama Djalanan" dalam surat kabar *Kalimantan Raya* No. 28 tanggal 8 April 1942

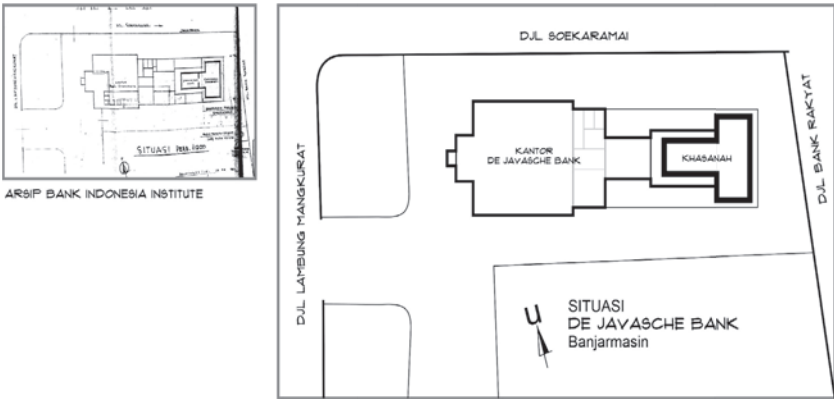

Gambar 7.20. Situasi De Javasche Bank Bandjermasin

Sumber: digambar ulang oleh Aufa (2021) berdasar Arsip Bank Indonesia

BENTUK BANGUNAN

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa gaya arsitektur DJB Bandjermasin bercorak *Nieuwe Bouwen* atau modern. Bentuk bangunan DJB Bandjermasin berbeda dengan bangunan DJB lainnya yang ada di Indonesia. Gaya arsitektur bangunan DJB Bandjermasin memiliki tampilan sederhana layaknya bangunan rumah tinggal. Ornamen dan kolom-kolom Yunani yang umumnya menghiasi bangunan DJB, tidak terlihat pada bangunan DJB Bandjermasin. Keindahan diciptakan murni dari bentuk yang sesuai dengan fungsi bangunannya. Prinsip arsitektur modern *form follow function* jelas terlihat pada bangunan ini.

Hartono dan Hadinoto menggambarkan tentang langgam arsitektur kolonial di Indonesia yang dibagi menjadi tiga periode di mana bangunan DJB Bandjermasin (1919–1922), berada pada periode arsitektur kolonial modern. Pada awalnya, biro arsitek yang menangani proyek DJB di wilayah Hindia Belanda adalah biro Ed. Cuypers en Hulswit, namun Hulswit meninggal dunia pada 1921 yang kemudian digantikan oleh arsitek-arsitek muda yang beraliran modern, sehingga desain arsitektur kolonial modern melekat pada bangunan DJB Bandjermasin. Hal inilah yang membedakan bentuk arsitektur DJB Bandjermasin dengan DJB lainnya di Indonesia.

Dilihat dari tampak depan bangunan DJB Bandjermasin berbentuk simetris dan tersusun atas dua bagian, yaitu bagian badan dan bagian atap. Badan bangunan berbentuk persegi panjang yang tersusun atas dinding, jendela, dan pintu. Atap bangunannya berbentuk piramida/ perisai (*pyramid hip roof*) yang dihiasi *flat roof dormer* dan sungkul dengan desain khusus.[26]

26 Handinoto H. dan Hartono, S. "Arsitektur Transisi di Nusantara dari Akhir Abad 19 ke Awal Abad 20 …", *Op.Cit.* Mempertegas adanya langgam arsitektur kolonial di Indonesia yang dibagi menjadi 3 periode, yaitu*: Indische Empire* (Abad ke-18–19); Arsitektur Peralihan (1890-1915); dan Arsitektur Kolonial Modern (1915-1940).

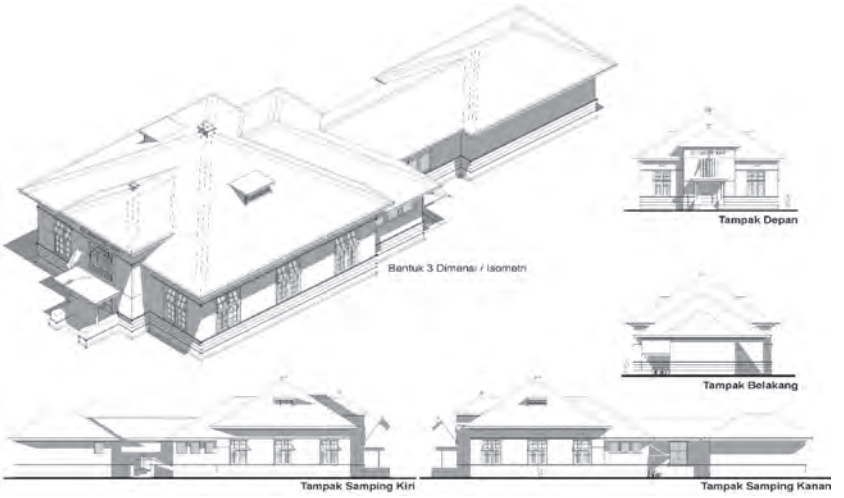

Gambar 7.21. Tiga Dimensi dan Tampak Bangunan
Sumber: Sumber: digambar ulang oleh Heldiansyah (2021) berdasar Arsip Bank Indonesia

FUNGSI DAN TATA-RUANG

Secara fungsinya, bangunan DJB Bandjermasin hanya memiliki satu lantai yang digunakan untuk berbagai fungsi. DJB Bandjermasin ini memiliki tata ruang yang secara umum dapat dideskripsikan seperti denah bangunan simetris dan berbentuk persegi panjang, tata ruang di bagian dalam yang dibagi dengan menggunakan dinding bata dan dinding partisi. Dilihat dari dinding penyekat dan atap yang menutupinya, denah ruang ini terbagi menjadi tiga kelompok ruang, yaitu:

1. Kelompok ruang pertama merupakan kelompok ruang yang mewadahi fungsi-fungsi utama yaitu *hall* publik (*hall publiek*); ruang kerja (*wachtkamer*); ruang pimpinan cabang (*agent*); ruang pembukuan dan kas (*kas en boekhouding*); ruang kasir (*kassiers*); dan ruang rapat (*groote stortingen*). Ruang-ruang ini terletak di bagian depan bangunan. Denah bersifat terbuka dengan partisi yang terbuat dari material semi permanen, yaitu panil kayu.

2. Kelompok ruang kedua merupakan kelompok ruang yang mewadahi fungsi-fungsi pendukung, yaitu ruang penyimpanan (*bergruimte*); w-c; toilet (*toilette*); jalan masuk (*doorgang*); dan ruang arsip (*archief*). Ruang-ruang ini terletak di bagian tengah bangunan. Denah bersifat tertutup, dibatasi secara permanen oleh dinding yang terbuat dari material bata merah.
3. Kelompok ruang ketiga merupakan kelompok ruang yang mewadahi fungsi penting/krusial, yaitu ruang setoran uang besar (*grote geldstortingen*) dan ruang khazanah (*kluis*). Ruang-ruang ini terletak di bagian belakang bangunan. Denahnya bersifat sangat tertutup, dibatasi secara permanen oleh dinding yang terbuat dari material beton bertulang dengan tebal 40 cm.

Sejak kantor DJB Bandjermasin diresmikan (1923) hingga periode awal kemerdekaan, bangunan De Javasche Bank Bandjermasin ini tidak banyak mengalami perubahan. Dari rekam jejak dokumen gambar yang ditemukan dalam arsip Bank Indonesia, diketahui pernah terjadi penambahan luas ruang khazanah (*kluis*).

Penambahan ruang khazanah diperkirakan terjadi antara tahun 1953–1967. Hal ini pertama dilihat dari dokumen-dokumen gambar awal DJB Bandjermasin yang menggunakan bahasa Belanda (Gambar 7.22. dan 7.24). Penambahan ruang diketahui dari adanya dokumen gambar (Gambar 7.25.) yang menggunakan ejaan *Charles Adriaan van Ophuijsen* (1901–1947) dalam *Kitab Logat Melajoe* (1901).[27] Selanjutnya, dari dokumen penambahan ruang khazanah (Gambar 7.25) juga diketahui

27 Sudaryanto, S., Rahayu, A. dan Wakhidah, S., "Ejaan van Ophuijsen (1901–1947)" dalam Iklan Tempo Doeloe dan Kebermaknaannya dalam Pengembangan Bahasa Indonesia. *Jurnal Lentera (Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Bahasa Indonesia)*, *2*(2), 2019, hlm. 154–166. Menurut Sudaryanto, ejaan *van Ophuijsen* ditandai dengan penggunaan bunyi *[u]* ditulis *oe* dan bunyi *[y]* ditulis *j*. Ejaan *van Ophuijsen* tergantikan sejak ejaan LBK (Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, pendahulu Pusat Bahasa) diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Sarino Mangun Pranoto, dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.062/67, tanggal 19 September 1967. Dalam ejaan LBK huruf 'tj' diganti 'c', j diganti 'y,' 'nj' diganti 'ny,' 'sj 'menjadi 'sy,' dan 'ch' menjadi 'kh'. Perubahan ejaan tulisan ini mengungkapkan bahwa DJB saat itu sudah diakuisisi dan menjadi Bank Indonesia (1 Juli 1953) dan penambahan ruang khazanah diperkirakan terjadi antara tahun 1953–1967 sesuai dengan proses perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia.

bahwa penambahan ini terjadi pada saat DJB sudah diakuisisi dan menjadi BI (1 Juli 1953). Sehingga disimpulkan penambahan ruang khazanah diperkirakan terjadi antara tahun 1953–1967.[28]

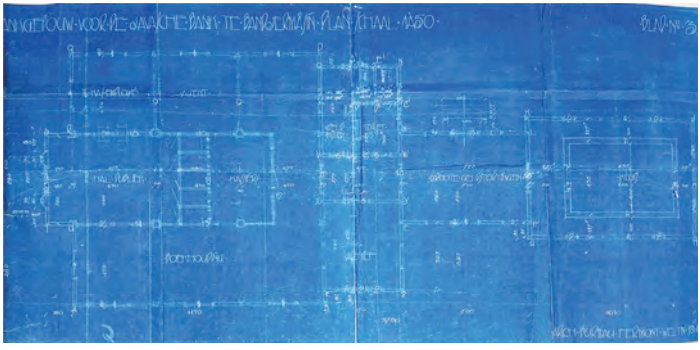

Gambar 7.22. Rencana Awal De Javasche Bank Bandjermasin
Sumber: Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank

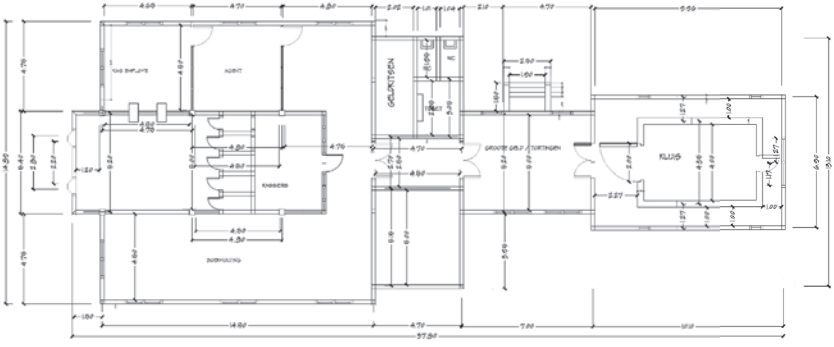

Gambar 7.23. Rekonstruksi Denah Rencana Awal De Javasche Bank Bandjermasin
Sumber: digambar oleh Heldiansyah (2021)

28 *Ibid.*, hlm. 154-166.

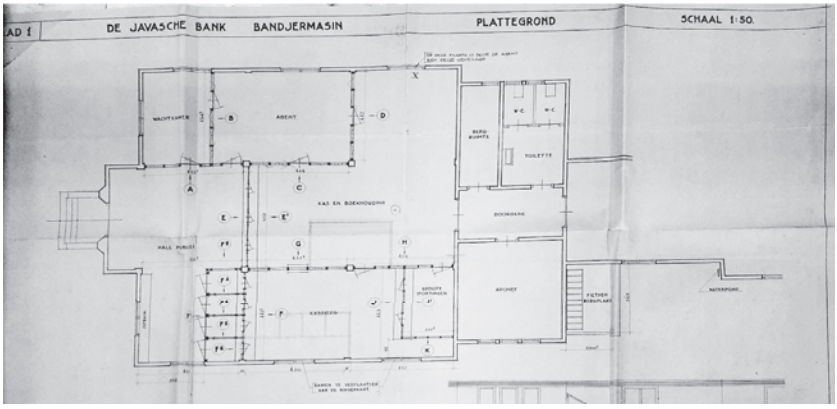

Gambar 7.24. Denah pada Dokumen *Detail Engineering Design* (DED) De Javasche Bank Bandjermasin

Sumber: Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank

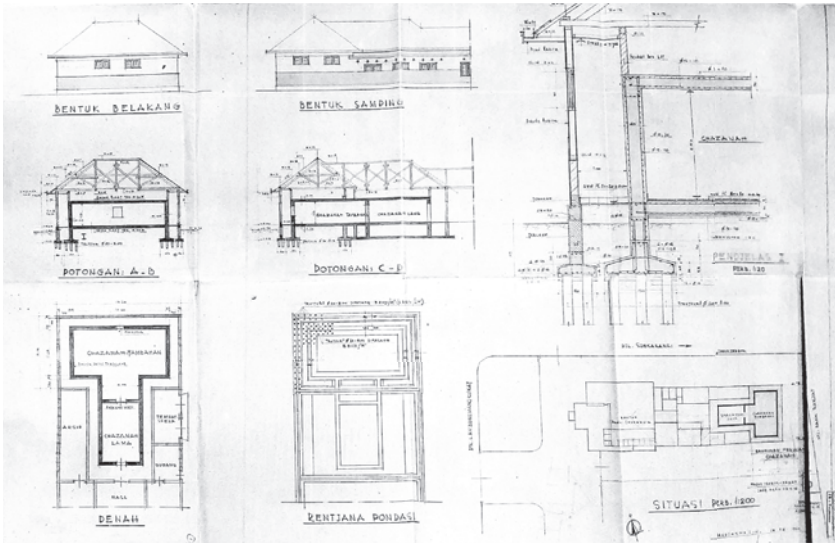

Gambar 7.25. Penambahan Ruang Khazanah Diperkirakan Terjadi antara Tahun 1953-1967

Sumber: Arsip Bank Indonesia, Koleksi Arsip De Javasche Bank

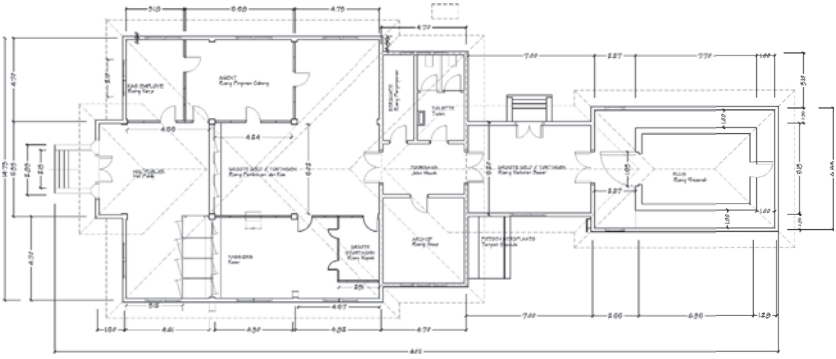

Gambar 7.26. Rekonstruksi Denah pada *Detail Engineering Design* De Javasche Bank Bandjermasin

Sumber: digambar oleh Heldiansyah (2021)

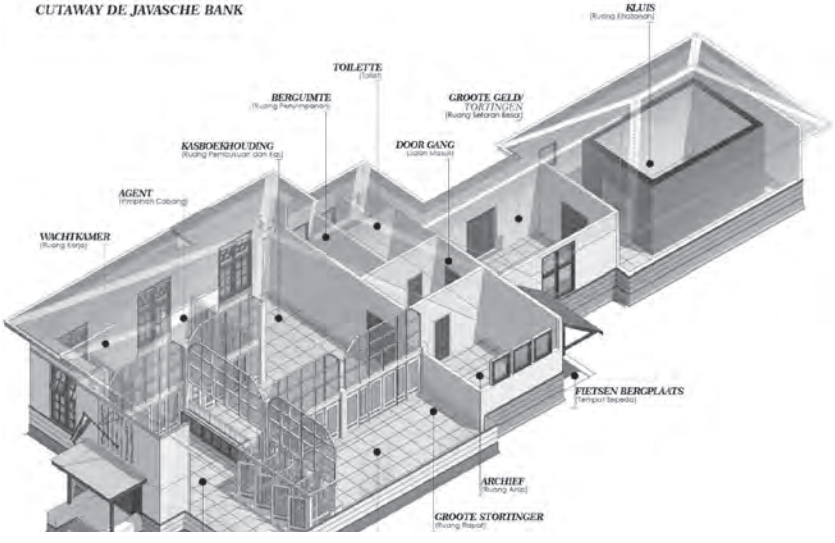

Gambar 7.27. Rekonstruksi Tata Ruang De Javasche Bank Bandjermasin Bandjermasin

Sumber: digambar oleh Heldiansyah (2021)

Gambar 7.28. Interior DJB Bandjermasin
Sumber: ANRI KIT Kalimantan No.1187

DETAIL ARSITEKTUR

Arsitektur bangunan DJB Bandjermasin yang tersusun atas dua bagian (badan dan atap) itu, secara detail bangunan dapat dirincikan, yaitu bagian badan bangunan berbentuk persegi panjang yang tersusun atas dinding, jendela, dan pintu. Dinding bangunan didominasi oleh cat warna putih untuk bagian atas, sementara bagian bawahnya berwarna gelap yang diperkirakan dari warna beton ekspos yang tidak tuntas atau *finishing* dengan cat. Selain sebagai penanda tinggi lantai, bagian yang berwarna gelap ini untuk menutupi kekurangan permukaan dinding bawah dari pengaruh hujan dan kelembaban di lahan basah. Pada bagian tengah dinding terdapat penonjolan muka dinding atau *cornice* yang mengapit bagian atas dan bagian bawah kusen jendela. Dinding bangunan ini dilengkapi jendela yang terdapat di semua sisi bangunan dan pintu masuk yang terdapat di bagian depan dan belakang bangunan. Baik jendela maupun pintunya berbentuk geometris, sederhana, tanpa warna, dan tanpa ornamen.

Sementara bagian atap bangunan memiliki lima bagian, yaitu atap pada *entrance*, atap pada ruang utama, atap pada ruang pendukung, atap pada ruang antara, dan atap pada ruang khazanah.

1. Atap pada *entrance* menginduk pada atap ruang utama, posisinya berada di bagian depan atap ruang utama. Atap berbentuk atap perisai dengan bahan penutup atap berupa genteng dan seng sebagai bahan penutup jurai. Di puncak atap terdapat sungkul dengan desain khusus (Gambar 7.30). Pada bagian bawah atap, ditutup plafon dengan beberapa lapisan penonjolan permukaan atau *cornice*. *Entrance* terdiri dari pintu masuk dan pintu masuk utama diberi kanopi sederhana berupa atap datar (*flat roof*) yang ditopang oleh dua buah tiang kayu.
2. Atap pada ruang utama lebih besar dari atap *entrance*. Atapnya berbentuk piramida/limas (*pyramid hip roof*) dengan bahan penutup atap berupa genteng dan seng sebagai bahan penutup jurai. Atap dihiasi *flat roof dormer* di sisi kanan dan kiri bangunan. Di puncak atap terdapat sungkul dengan desain khusus (Gambar 7.30). Pada bagian bawah atap, ditutup plafon dengan beberapa lapisan penonjolan permukaan atau *cornice*.
3. Atap ruang pendukung menginduk pada atap ruang utama, posisinya berada di bagian belakang atap ruang utama. Tinggi atap ini lebih rendah dari atap ruang utama karena lebar ruang yang dinaungi juga lebih kecil. Bentuk atap, material penutup atap, material penutup jurai, dan plafonnya sama dengan atap ruang *entrance*.
4. Atap pada ruang antara menaungi ruang setoran uang besar (*grote geldstortingen*). Atapnya menginduk pada atap ruang pendukung dan atap ruang khazanah. Material penutup atap, material penutup jurai, dan plafonnya sama dengan atap lainnya.
5. Atap ruang khazanah berbentuk perisai memanjang ke arah belakang. Posisinya berada paling belakang. Pada saat terjadi penambahan luas ruang khazanah, atap ruang khazanah berubah bentuk menjadi atap perisai berbentuk *letter* T.

Untuk *Entrance* bangunan, didesain khusus sebagai garda depan bangunan. Atap ini berbentuk piramida/limas (*pyramid hip roof*) yang berfungsi untuk menaungi ruang penghubung menuju teras dengan *public hall*. Sementara atap datar (*flat roof*) yang ditopang oleh tiang kayu yang berfungsi menaungi terasnya. Teras bangunan bersifat berundak

sebanyak tiga anak tangga yang dalam istilah arsitektur Yunani disebut *crepidoma*. Teras dan anak tangga itu diapit oleh border yang terbuat dari beton. Di bawah atap *entrance* dipasang plang nama yang bertuliskan DE JAVASCHE BANK dengan huruf kapital dan menggunakan font tulisan tangan arsiteknya (N.V. Architecten-Ingenieursbureau Hulswit en Fermont te Weltevreden en Ed. Cuypers te Amsterdam (Biro Fermont-Cuypers)). Bentuk tulisan yang digunakan pada plang nama tersebut diduga ada kesamaan huruf yang digunakan pada gambar kerja. Di bawah plang nama itu terdapat ornamen berupa penonjolan tujuh garis vertikal, dan di bawah ornamen itulah letak posisi atap datar yang menaungi teras berundak.

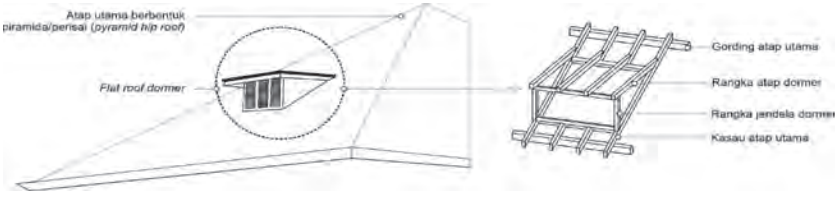

Gambar 7.29. *Flat Roof Dormer* De Javasche Bank Bandjermasin
Sumber: digambar oleh Aufa (2021)

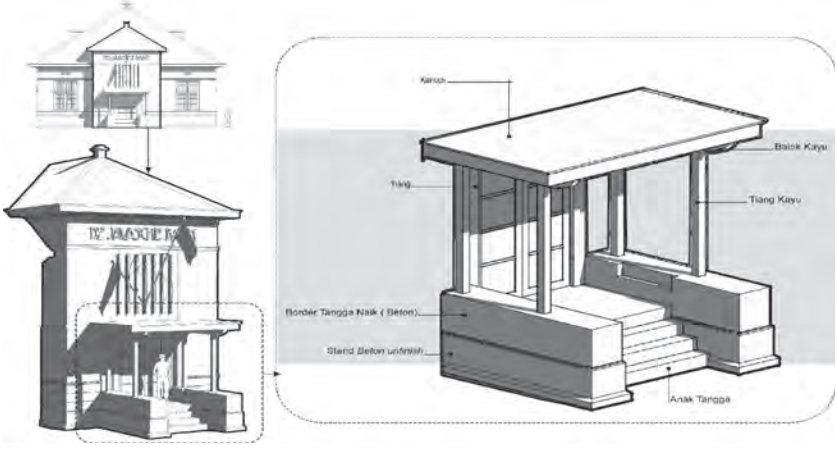

Gambar 7.30. Detail Pintu dan *Entrance* De Javasche Bank Bandjermasin
Sumber: digambar oleh Heldiansyah (2021)

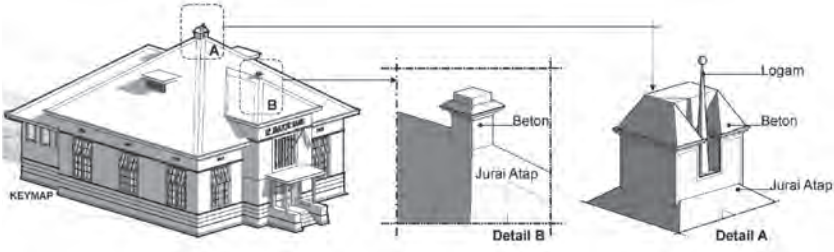

Gambar 7.31. Detail Sungkul De Javasche Bank Bandjermasin
Sumber: digambar oleh Heldiansyah (2021)

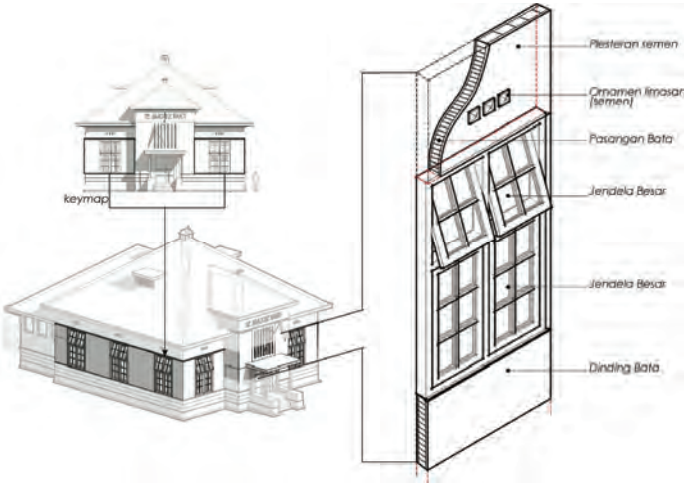

Gambar 7.32. Detail Jendela De Javasche Bank Bandjermasin
Sumber: digambar oleh Heldiansyah (2021)

KONSTRUKSI BANGUNAN

Konstruksi bangunan DJB Bandjermasin dirancang khusus di atas lahan rawa, yang menjadi pembeda lainnya dengan semua DJB yang ada di Indonesia. Dengan denah yang sederhana berbentuk persegi, bangunan DJB Bandjermasin dibuat dengan konstruksi yang mengandalkan kolom dan balok beton bertulang sebagai pemikul beban. Dinding di sekeliling

bangunan hanya sebagai dinding pengisi, sedangkan dinding di bagian dalam cenderung mengandalkan dinding partisi yang terbuat dari kayu jati.

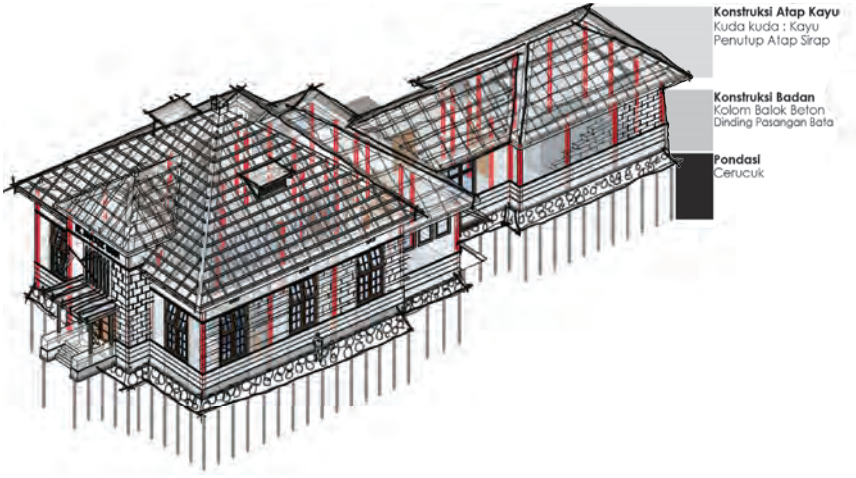

Gambar 7.33. Aksonometri Struktur De Javasche Bank Bandjermasin
Sumber: Arsip Bank Indonesia dan digambar kembali oleh Heldiansyah (2021)

Gambar 7.34. Tampak Samping Pembangunan Gedung Baru DJB Bandjermasin 1922
Sumber: Arsip Bank Indonesia

GEDUNG KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPWBI) KALIMANTAN SELATAN

Setelah konferensi Meja Bundar tahun 1949, Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia dan mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dua tahun setelahnya (1951), muncul desakan untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Indonesia. Selanjutnya pemerintah membentuk Panitia Nasionalisasi DJB. Proses nasionalisasi kemudian dilakukan melalui pembelian saham DJB hingga kepemilikan saham 97% oleh pemerintah Indonesia. Berdasar UU No.11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, maka terhitung mulai tanggal 1 Juli 1953 Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.[29] Dengan adanya pembelian saham dan terbitnya UU No. 11 tahun 1953 tersebut di atas, maka seluruh aset DJB menjadi aset BI. DJB Bandjermasin akhirnya berubah menjadi Kantor Cabang BI Kalimantan Selatan.

SEJARAH BANGUNAN KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPWBI) KALIMANTAN SELATAN

Sejak kantor DJB Bandjermasin diresmikan hingga periode awal kemerdekaan, bangunan DJB Bandjermasin ini tidak banyak mengalami perubahan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penambahan ruang diketahui terjadi hanya pada ruang khazanah. Penambahan ruang ini diperkirakan terjadi pada tahun 1953–1967. Bangunan DJB Bandjermasin bertahan hingga tahun 1985.

Masa Orde Baru, perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pemerintah RI mengeluarkan kebijakan terkait pembangunan kantor-kantor BI di berbagai daerah, termasuk di Kota

29 https://www.bi.go.id. Alur dalam situs ini menjelaskan proses berdirinya Bank Sentral Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953.

Gambar 7.35. Akuisisi Gedung DJB Bandjermasin menjadi Bank Indonesia. Kiri: foto peresmian gedung tahun 1923; Kanan: foto sebelum dilakukan pembongkaran tahun 1985/1986

Sumber: Arsip Bank Indonesia Kalimantan Selatan

Banjarmasin. Dalam proses pembangunan itu, pemerintah memberikan kesempatan dua cara selama, antara lain: renovasi total, renovasi sebagian, pembangunan baru di lokasi yang baru, demolisi atau pembongkaran bangunan lama, dan penambahan bangunan baru di lokasi yang sama. Untuk BI Kalimantan Selatan dilakukan penambahan bangunan baru di lokasi yang sama, sebagaimana dapat dilihat pada foto pembangunan BI Kalimantan Selatan atau pada gambar 7.35.[30]

Perencanaan bangunan baru itu dibuat oleh konsultan PT. Bina Karya pada 1982. Namun, dalam pelaksanaannya pembangunan atas bangunan baru BI Kalimantan Selatan dilakukan oleh kontraktor PT. Hammer Sakti. Dalam perencanaan pembangunan itu ada upaya untuk mempertahankan bentuk bangunan lama dari DJB Bandjermasin, namun kemudian pada 1985–1986 rencana itu tidak direalisasikan. Bangunan lama DJB Bandjermasin kemudian didemolisi pada tahun 1985–1986 sehingga rekam jejak wujud fisik arsitektur lama tidak dapat ditemukan lagi pada saat peresmian bangunan baru BI Banjarmasin, 6 Desember 1986.

30 Arsip Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Arsip ini menunjukkan beberapa data tambahan bangunan yang dilakukan selama masa Orde Baru hingga dilaksanakan renovasi total pada tahun 1984–1986.

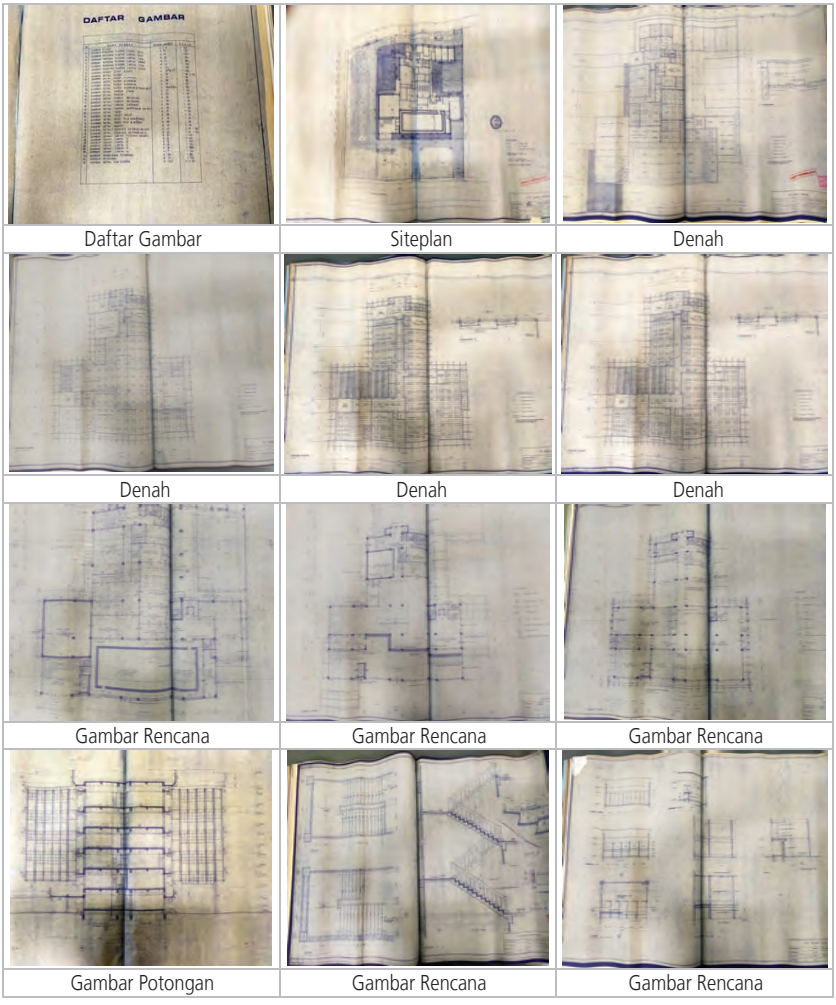

Gambar 7.36. Gambar perencanaan bangunan baru Bank Indonesia Tahun 1982 oleh PT. Bina Karya

Sumber: Arsip Bank Indonesia Kalimantan Selatan

Aanwijzing 6-8 Agustus 1984

Selamatan Agustus 1984

Tradisi Manajak Kepala Sapi 1984

Pembersihan Lokasi
Rumah Kepala Cabang didemolisi

Persiapan Pembangunan
Persiapan Pemancangan

Pemasangan
Tiang Pancang

Proses Konstruksi 1
Tahap 1: Pembangunan *Entrance*

Proses Konstruksi 2
Tahap 1: Pembangunan *Entrance*

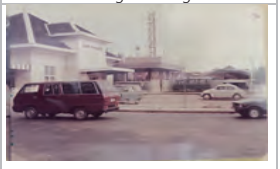

Proses Konstruksi 3
Tahap 1: Pembangunan *Entrance*

Proses Konstruksi 4
Tahap 1: Pembangunan *Entrance*

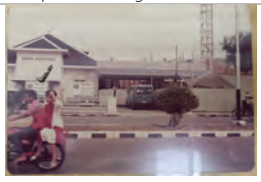

Proses Konstruksi 5
Tahap 1: Pembangunan *Entrance*

Proses Konstruksi 6
Tahap 2: Pembangunan Gedung

Proses Konstruksi 7
Tahap 2: Pembangunan Gedung

Proses Konstruksi 8
Tahap 2: Pembangunan Gedung

Proses Konstruksi 9
Tahap 2: Pembangunan Gedung

Gambar 7.37. Tahap Konstruksi Bank Indonesia tahun 1984–1985 oleh PT. Hammer Sakti; dari arsip foto-foto pembangunan yang ada menggambarkan proses pelaksanaan pembangunan gedung Bank Indonesia Kalimantan Selatan hingga peresmiannya pada tanggal 6 Desember 1986.

Sumber: Arsip Bank Indonesia Kalimantan Selatan

Gambar 7.38. Peresmian Gedung Baru Bank Indonesia (6 Desember 1986)
Sumber: Arsip Bank Indonesia Kalimantan Selatan

Gedung KPw Bank Indonesia Kalsel
dari arah Barat Laut

Gedung KPw Bank Indonesia Kalsel
dari arah Barat Laut

Gedung KPw Bank Indonesia Kalsel
Dari arah Timur Laut

Gedung KPw Bank Indonesia Kalsel
dari arah Barat (Jl. Lambung Mangkurat)

Gambar 7.39. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan tahun 2021
Sumber: Arsip Bank Indonesia Kalimantan Selatan

ARSITEKTUR BANGUNAN KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPWBI) KALIMANTAN SELATAN

Langgam dan ornamen gedung baru BI Kalimantan Selatan mengambil langgam arsitektur modern, yaitu bangunan dengan karakteristik yang menonjolkan kesederhanaan bentuk dan meminimalisir penggunaan ornamen. Pada periode perkembangan langgam arsitektur modern ini berkembang gaya *international style*, semboyan *form follows function,* dan *less is more*. Bentuk arsitekturnya didominasi oleh bentuk-bentuk *platonic solid*, geometris, persegi/kotak, dan mengandalkan pengulangan bentuk yang membentuk tekstur maupun motif geometris lainnya. Pada bangunan baru BI Kalimantan Selatan ini terlihat jelas karakteristik-karakteristik tersebut baik dari bentuk, material, teknik, dan teknologi yang digunakan dalam proses pembangunannya.[31]

Gambar 7.40. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan dari arah Barat Laut
Sumber: Arsip Bank Indonesia Kalimantan Selatan

31 Yulianto Sumalyo, *Arsitektur Modern: Akhir Abad XIX dan Abad XX*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), serta dari berbagai sumber tentang arsitektur modern.

LOKASI DAN SITUASI

Pada saat ini, gedung BI Kalimantan Selatan berlokasi di Jalan Lambung Mangkurat, Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231 pada koordinat 3°19'24"S 114°35'30"E. Sampai saat ini kawasan BI Kalimantan Selatan masih mewarisi posisinya sebagai pusat perkotaan yang strategis di Kota Banjarmasin. Kawasan Kavling BI dikelilingi jalan-jalan utama Kota Banjarmasin, yaitu Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Bank Rakyat yang terhubung dengan Jalan Hasanuddin HM, dan Jalan Bank Rakyat yang terhubung dengan Jalan Pangeran Samudera. Pada saat ini, Kavling BI berbatasan dengan Hotel A atau Hotel Arum yang letaknya tepat di perempatan Jalan Lambung Mangkurat dan Jalan Pangeran Samudera.

Gambar 7.41. Peta Lokasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan
Sumber: dimodifikasi oleh Aufa (2021) dari peta wikimapia

Gambar 7.42. Situasi sekitar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel
Sumber: Arsip Bank Indonesia Kalimantan Selatan

BENTUK BANGUNAN BARU

Seperti sebelum mengalami perombakan, gedung BI memiliki denah desain yang simetris. Bentuk ini pun tidak mengalami perubahan yang signifikan karena masih menampilkan denah bangunan yang tetap simetris. Seperti pada gambar 7.41, denah bangunan berbentuk *letter* T dengan bentuk atapnya yang datar sehingga memperkuat kesan karakteristik bangunan berlanggam arsitektur modern. Material konstruksinya menggunakan beton bertulang dan fasadnya ditutup dengan menggunakan *secondary skin* yang terbuat dari material kaca ber-*frame* aluminium yang menggantung pada kantilever beton bertulang. *Secondary skin* ini berada sejajar dengan kaca yang melekat pada bangunan. *Secondary skin* ini

memberikan pembayangan pada interior bangunan dan melindungi bangunan dari panas matahari yang terik. Selubung permukaan bangunan yang tidak ditutupi oleh kaca berupa dinding terbuat dari bata merah yang diplester dan di-*finishing* dengan keramik berwarna putih dan warna merah. Bagian bawah bangunan ditutup dengan granit berwarna abu-abu.

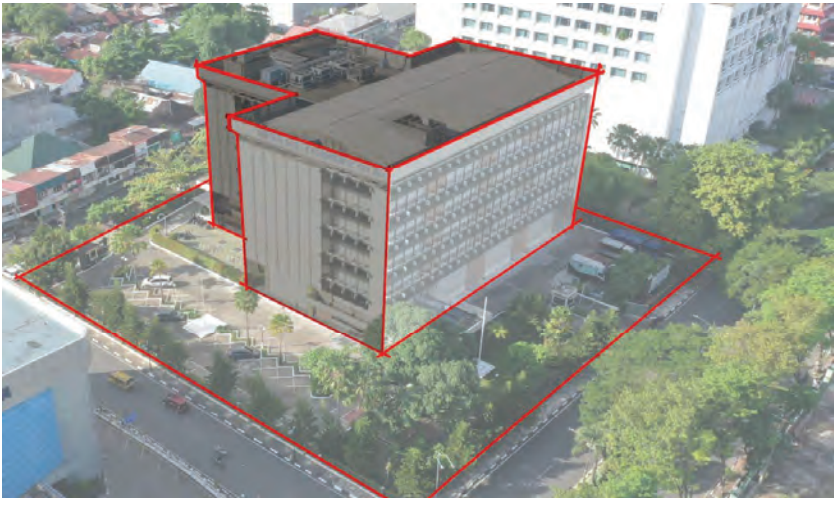

Gambar 7.43. Kiri: Isometri Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan; Kanan: *Secondary Skin* Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan

Sumber: digambar oleh Heldiansyah (2021) dan Arsip Bank Indonesia Kalimantan Selatan

Gambar 7.44. Kiri Gambar Tampak dan Kanan Gambar Potongan

Sumber: Arsip Bank Indonesia

FUNGSI DAN TATA-RUANG

Bangunan BI Kalimantan Selatan memiliki enam lantai utama. Dilihat dari fungsinya, tata ruang pada bangunan baru BI Kalimantan Selatan sangat fungsional dan proporsional di setiap lantainya. Lantai paling bawah (*basement*) berfungsi sebagai ruang khazanah uang dan khazanah arsip. Lantai kedua berfungsi sebagai ruang publik, seperti *public hall*. Lantai ketiga berfungsi sebagai ruang pimpinan. Lantai kelima dan keenam berfungsi sebagai ruang kerja dan ruang rapat pegawai. Pada lantai keenam difungsikan untuk ruang pertemuan.

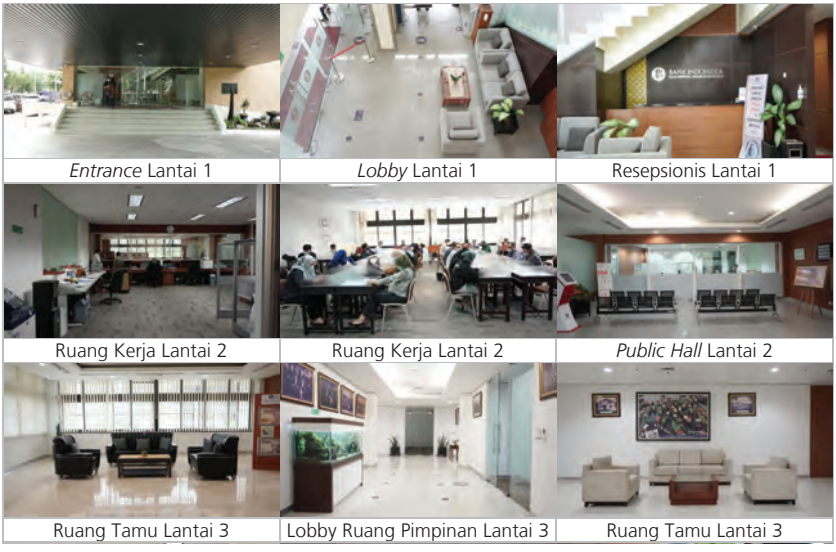

Entrance Lantai 1	*Lobby* Lantai 1	Resepsionis Lantai 1
Ruang Kerja Lantai 2	Ruang Kerja Lantai 2	*Public Hall* Lantai 2
Ruang Tamu Lantai 3	Lobby Ruang Pimpinan Lantai 3	Ruang Tamu Lantai 3

Gambar 7.45. Ruang-Ruang pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan

Sumber: Arsip Bank Indonesia Kalimantan Selatan

Perpustakaan Lantai 4

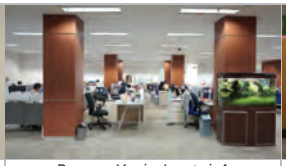

Ruang Kerja Lantai 4

Ruang Bermain Anak Lantai 4

Musholla Lantai 5

Ruang Diskusi Lantai 5

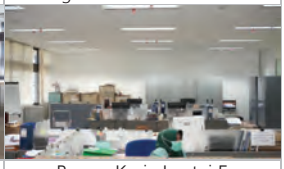

Ruang Kerja Lantai 5

Gambar 7.45. Ruang-Ruang pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan *(Lanjutan)*

Sumber: Arsip Bank Indonesia Kalimantan Selatan

DETAIL ARSITEKTUR

Detail arsitektural bangunan baru BI Kalimantan Selatan terdiri atas tiga komponen, yaitu *entrance*, fasad, dan selubung bangunan. *Entrance* adalah bagian pertama yang dikerjakan sebelum bangunan utama proyek pembangunan. *Entrance* bangunan berbentuk balok yang terkesan mengambang, namun sebenarnya ditopang oleh tiang. Fungsi e*ntrance* adalah untuk menaungi area *drop off* dan teras yang berundak di mana terdapat ramp pada samping kiri teras. Pintu masuk menuju ke dalam bangunan ini terbuat dari kaca.

Tampak Samping Kiri

Bagian dalam *Entrance*

Tampak Samping Kanan

Gambar 7.46. Detail *Entrance* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan

Sumber: Arsip Bank Indonesia Kalimantan Selatan

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa untuk fasad bangunan didominasi oleh *secondary skin* yang terbuat dari material kaca ber-*frame* aluminium yang menggantung pada kantilever beton bertulang. *Secondary skin* ini berada sejajar dengan kaca yang melekat pada bangunan. *Secondary skin* ini memberikan pembayangan pada interior bangunan dan melindungi bangunan dari cahaya terik matahari. Untuk selubung permukaan bangunan yang tidak ditutupi oleh kaca, yaitu berupa dinding terbuat dari bata merah yang diplester dan di-*finishing* dengan keramik berwarna putih dan warna merah. Ukuran keramik-keramiknya dibuat secara seragam dengan ukuran kurang lebih 10 x 20 cm. Untuk bagian bawah bangunan ditutup dengan granit berwarna abu-abu.

Detail Secondary Skin	*Detail Secondary Skin*	*Detail Secondary Skin*

Gambar 7.47. Detail *Secondary Skin* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan

Sumber: Arsip Bank Indonesia Kalimantan Selatan

Keramik Merah pada Fasad | *Keramik Putih pada Fasad*

Gambar 7.48. Detail Fasad Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan
Sumber: Arsip Bank Indonesia Kalimantan Selatan

KONSTRUKSI BANGUNAN

Pada 1984, gaya arsitektur yang digunakan oleh gedung KPw BI Kalimantan Selatan memiliki banyak bagian atau lantai sebagai karakter dari gaya arsitektur modern. Karakteristik langgam arsitektur modern yang paling menonjol dari bangunan KPw BI Kalimantan Selatan ini adalah dari jenis material, mesin, dan teknologi yang digunakannya. Beberapa dokumentasi memperlihatkan adanya penggunaan jenis material, mesin, dan teknologi modern saat proses pembangunan dilakukan (1984–1986), baik dari fondasi hingga atap paling atas bangunan. Untuk fondasi bangunan digunakan tiang pancang beton, sementara untuk kolom, balok, dan plat lantai digunakan konstruksi beton bertulang. Dinding bangunan menggunakan dinding pengisi berupa pasangan batu bata merah yang permukaanya di-*finishing* dengan material marmer.

Bangunan Sekitar *Site* (1984)	Fondasi Tiang Pancang	Pemasangan Fondasi
Pemasangan Fondasi	Dinding Pengisi dari Bata Merah	Dinding Pengisi dari Bata Merah
Pembesian Kolom dan Balok	Pembesian Kolom dan Balok	Pembesian Kolom, Balok dan Lantai
Bekisting	Bekisting	Pembesian Kolom, Balok, dan Lantai

Gambar 7.49. Detail Konstruksi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan
Sumber: Arsip Bank Indonesia Kalimantan Selatan

BAB 8
Epilog

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan merupakan nama resmi yang di dalam buku ini sering disebut secara singkat Bank Indonesia (BI) Kalimantan Selatan. Serupa dengan sebutan resminya De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin (1907), di dalam tulisan ini sering hanya disebut De Javasche Bank (DJB) Bandjermasin. Sebagaimana telah diketahui bahwa yang disebut BI tidak lain merupakan hasil nasionalisasi terhadap DJB oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1953. Perubahan ini dengan sendirinya turut mengubah DJB Bandjermasin menjadi sebagaimana yang sekarang disebut Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. BI Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, membimbing pelaksanaan kebijakan moneter dan mengoordinasikan, serta membina dan mengawasi semua perbankan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, BI Kalimantan Selatan bertugas sebagai bank sirkulasi yang mempunyai hak tunggal mengedarkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah kerjanya.

Meskipun demikian, di dalam dinamikanya BI Kalimantan Selatan berkembang mengiringi keadaan zamannya. Politik kekuasaan sangat berpengaruh terhadap keberadaan BI (baca: sejak bernama DJB) sehingga berpengaruh pula terhadap peran dan tugasnya. Demikian hal itu sebagaimana digambarkan di dalam buku ini. Yang penting diketahui adalah bahwa BI dihadirkan di daerah Kalimantan Selatan sejak masih bernama DJB, itu merupakan bentuk respons pemerintah terhadap potensi besar perekonomian di daerah ini yang didukung oleh kekayaan alamnya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tidak semua daerah berkesempatan dipilih sebagai tempat beroperasinya DJB. Ketika itu,

Kalimantan Selatan masih merupakan daerah sangat luas yang disebut Kalimantan bagian Selatan dan Timur (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) dipilih sebagai tempat didirikannya kantor cabang DJB. Menghadirkan DJB di daerah Kalimantan Selatan mengindikasi bahwa daerah ini cukup penting dilihat dari perkembangan perekonomiannya yang didukung oleh sumber daya alamnya yang besar. Bahkan jauh sebelum DJB Bandjermasin dibuka, pada tanggal 19 November 1846 Ratu Belanda memutuskan penyediaan anggaran per tahun sebesar *f*50.000 untuk menggarap kekayaan alam Kalimantan bagian Selatan dan Timur.

Sumber daya alam Kalimantan Selatan yang terdiri dari mineral, emas, intan, besi, batu bara, dan minyak bumi merupakan jenis-jenis komoditas yang dicari dan laku di pasaran dunia. Hasil pertambangan ini dengan sendirinya turut menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakatnya. Sektor pertambangan menjadi faktor yang menarik bagi hadirnya investor dari luar. Tidak hanya itu, berbagai produk kehutanan juga menjadi komoditas yang penting bagi perekonomian setempat. Berbagai produk hutan seperti kayu, beragam jenis getah, rotan, biji tengkawang, damar, dan sebagainya menjadi komoditas yang diperdagangkan. Dalam sektor pertanian pun Kalimantan Selatan memiliki sumber daya yang sangat menguntungkan. Sebagaimana diketahui sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan bermatapencaharian sebagai petani, khususnya pertanian padi dalam memenuhi kebutuhannya. Meskipun demikian, sudah sejak lama masyarakat Kalimantan Selatan membudidayakan tanaman lada yang laku dijual kepada pihak luar. Dalam dinamika perekonomiannya, masyarakat Kalimantan Selatan kemudian menggarap perkebunan karet, sawit, kelapa hibrida, dan tebu karena komoditas pertanian tersebut semakin dicari dan laku dijual ke luar wilayah ini. Seiring dengan pesatnya sektor pertanian pada komoditas flora, komoditas fauna pun mengalami hal serupa yang memberikan penghasilan penting bagi masyarakat di Kalimantan Selatan, yaitu peternakan itik Alabio, perikanan darat, dan laut.

Keterlibatan masyarakat Kalimantan Selatan dalam dunia perniagaan yang menghadirkan pihak luar menyebabkan mereka mengenal sistem ekspor-impor. Mereka tidak semata bergerak untuk kepentingannya

sendiri (domestik), akan tetapi mampu menggarap dan memproduksi jenis-jenis komoditas ekspor di berbagai sektor mulai pertanian, perhutanan, dan pertambangan. Dalam kegiatan impor barang dagangan, para pelaku usaha di Kalimantan Selatan menjalin hubungan dagang dengan wilayah-wilayah luar seperti Singapura dan Hongkong. Mereka mengimpor barang-barang seperti tekstil, perhiasan, peralatan perikanan, perlengkapan mesin pengolahan karet, berbagai mesin, sepeda, sepeda motor, dan mobil, berbagai *spareparts*, bahan bangunan, semen, besi, dan seng. Pintu keluar dan masuk Kalimantan Selatan melalui Pelabuhan Banjarmasin, selain Sampit di bagian barat dan Samarinda di bagian timur.

Di awal abad ke-19 hingga awal abad ke-21, berbagai komoditas yang keluar dan masuk wilayah ini berlangsung secara lancar yang ditunjang oleh tersedianya berbagai fasilitas transportasi perairan berupa jalur-jalur sungai, kanal, danau, dan pantai. Kekuatan hidrodinamika sungai-sungai besar seperti Barito, Mahakam, dan Kahayan telah menyebabkan berbagai jalur air di lingkungannya mengalami pasang surut dan menciptakan arus air yang lemah sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk tempat terselenggaranya transportasi air. Melalui jalur-jalur air itulah berbagai komoditas dari pedalaman diangkut menuju muara, seperti ke Banjarmasin, Sampit, dan Samarida. Begitupun sebaliknya, barang impor dari daerah muara diangkut ke pedalaman atau didistribusikan hingga ke konsumen. Jutaan metrik ton batu bara, jutaan meter kubik kayu dan rotan, serta komoditas lainnya telah diangkut melalui sungai, berbagai jenis kanal, dan danau selama berpuluh tahun dalam lingkaran perekonomian masyarakat Kalimantan Selatan. Dengan demikian, jalur sungai telah menjadi tulang punggung kegiatan perekonomian Kalimantan Selatan. Melalui cara ini pula dapat dikatakan telah mendorong perekonomian Kalimantan Selatan terintegrasi ke perekonomian dunia. Oleh karenanya, berbicara sejarah lokal sangatlah penting melihat keterkaitan antara lingkungan geografis dan ekologisnya dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di lokasi tersebut.

Dalam konteks perekonomian, aktivitas perdagangan di Kalimantan Selatan yang menjadi daya tarik para pengusaha luar (internasional) adalah karena faktor geografis dan ekologisnya. Oleh karenanya, tidak

mengherankan jika di daerah ini telah hadir bahkan sebagian kemudian menetap berbagai etnis. Selain yang disebut penduduk asli Banjar dan Dayak, di wilayah ini banyak berdatangan etnis Jawa, Bugis, Makassar, Madura, Bali, Lombok, dan Melayu dari Sumatra. Selain itu, hadir juga bangsa Timur Asing (Cina dan Arab) dan Eropa terutama Belanda. Mereka menjadi penduduk setempat dan berinteraksi satu sama lain terutama dalam hubungan perdagangan. Orang Banjar awalnya tinggal di Hilir Barito. Mereka merupakan percampuran Melayu, Jawa, Madura, Arab, dan lain-lain yang hidup dari pertanian, perdagangan, nelayan, dan pertambangan. Orang Banjar atau suku Banjar bersama para pendatang lebih banyak menetap di daerah hilir (muara dan pantai). Adapun orang Dayak umumnya tinggal di daerah hulu (pedalaman dan dataran tinggi).

Adanya dinamika perekonomian dan potensi alam yang besar, membuat pemerintah Hindia Belanda memilih daerah Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah penting untuk ditempatkannya cabang DJB. Tujuannya tentu untuk memberi keuntungan besar bagi pemerintah, selain agar bank ini, dengan peran dan fungsinya, turut mengatur dan membantu pemerintah daerah untuk urusan keuangan dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah. Hal ini karena DJB berperan sebagai bank sirkulasi sekaligus sebagai bank komersial. Dalam aktivitas perdagangan di Kalimantan Selatan, DJB Bandjermasin bersama pemerintah setempat telah membantu penyediaan dana dan regulasi penjualan karet. Kondisi perekonomian semacam ini yang kemudian dilanjutkan oleh pemeritahan Indonesia dengan menempatkan Bank Indonesia sebagai kontinuitas dari DJB. Proses nasionalisasi yang bergulir telah mengubah DJB menjadi cikal bakal berdirinya Bank Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia telah hadir di dalam dinamika perekonomian masyarakat Kalimantan Selatan bahkan menjadi bagian penting dari sejarah lokal Kalimantan.

Buku ini diharapkan bermanfaat dan menjadi sumber pelajaran atau mungkin untuk kepentingan menelaah berbagai isu ekonomi yang bermunculan dewasa ini. Pelajaran yang dimaksud bukan saja mencakup persoalan perekonomian dan peran Bank Indonesia, tetapi juga terkait khazanah khususnya mengenai perkembangan arsitektur kantor Bank

Indonesia Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin. Selain itu, melalui buku ini para pembaca dapat mengetahui struktur perekonomian sejak masa kolonial, masa kemerdekaan, sampai masa kontemporer. Dalam kaitannya dengan berbagai struktur perekonomian adalah penting diketahui terkait kebijakan (*beleid*) yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda, Militer Jepang, dan Indonesia sesuai dengan ruang dan waktunya. Tidak kurang penting juga adalah memahami kinerja yang muncul dan berkembang dalam arus ekonomi global dari sebuah lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan yang melahirkan aktivitas ekspor-impor. Keunikan sumber daya lokal memberikan pemahaman kepada kita sebagai sebuah kekayaan negara yang mampu mewarnai dinamika perekonomian dunia. Maka, tema sejarah ekonomi yang melibatkan peran Bank Indonesia dalam konteks kelokalan menemukan nuansa baru dan wawasan yang luas tentang pentingnya memberikan perhatian terhadap jenis-jenis komoditas lokal, bahkan mungkin menjadi kategori flora dan fauna endemik yang mampu dipasarkan ke tingkat internasional.

Lazimnya titik perhatian sejarah ekonomi adalah proses dan masalah perubahan ekonomi yang berjalan bersama waktu, khususnya berkenaan dengan persoalan-persoalan perubahan struktural jangka panjang yang sangat mendasari esensi perkembangan ekonomi. Pada pandangan ekonom, inti perhatian dari sejarah ekonomi, tidak lebih sebagai studi tentang dinamika ekonomi. Dalam hal ini, gambaran perkembangan ekonomi di tingkat lokal Kalimantan Selatan dan peran Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di dalamnya merupakan sebuah fragmen dari luasnya perkembangan ekonomi Indonesia. Sesungguhnya, dinamika ekonomi merupakan studi tentang fenomena ekonomi dalam perspektif historis namun dengan suatu pandangan ke masa depan. Pandangan semacam ini barangkali penting bagi penelitian sejarah perekonomian berikutnya. Dengan demikian, sejarah akan mempunyai daya sebab yang juga turut memberikan hikmah pelajaran dan masukan bagaimana suatu kebijakan seharusnya diambil di masa depan.

Pada akhirnya, kiranya harus disadari bahwa pelajaran-pelajaran dari masa lalu dapat dipetik dan relevan bagi usaha-usaha kita dalam menghadapi tantangan-tantangan masa kini dan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip/Dokumen ANRI dan Bank Indonesia

Adattechtbundels XXXVI: Borneo, Zuid-Celebes, Ambon enz. 1933. 'sGravenhage: Martinus Nijhoff.

ANRI Bundel *BZO* (*Borneo's Zuid- en Oosterafdeeling*) No. 260, tahun 1884.

_____. No. 122.

_____. No. 127.

_____. No. 260.

ANRI. 2016. *Inventaris Arsip BI (1956–1957) 1960–1964*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

_____. 1965. *Surat-Surat Perjanjian antara Kesultanan Bandjarmasin dengan Pemerintah V.O.C., Bataafse Republik, Inggris dan Hindia-Belanda, 1635–1860*.

Arsip Bank Indonesia. Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1433, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 7 Januari 1908 dan 19 Agustus 1907.

_____. Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1433, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 20 Oktober 1909.

_____. Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1433. *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin,* 28 Februari 1910.

_____. Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1436. *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 21 November 1919 dan 14 Juni 1920.

_____. Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1436. *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 8 April 1922.

_____. Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1436, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 29 Desember 1923.

_____. Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1436, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 6 September 1935.

_____. Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1436, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 4 Desember 1936.

_____. Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 11 Oktober 1948.

_____. Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 14 Oktober 1948.

_____. Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 26 Februari 1949.

_____. Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 16 September 1950.

_____. Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1435, *Vertrouwelijk Brieven van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 27 Oktober 1950.

_____. Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1737, *Crediet Verleening van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 2 September 1941.

_____. Koleksi Arsip De Javasche Bank No. 1737, *Crediet Verleening van De Javasche Bank Agentschap Bandjermasin*, 26 Agustus 1941 dan 2 September 1941.

_____. Koleksi Arsip R. Hardjo Santoso, *De Javasche Bank Pada Masa Peperangan. Perang Asia Pasifik 1941–1945 dan Sesudahnya*.

_____. *Laporan Kepala Kantor Cabang BI Banjarmasin Tahun 1969*, 15 Maret 1969.

_____. *Laporan Kepala Kantor Cabang BI Banjarmasin pada Konferensi BERDIKARI 4 s.d. 8 Mei 1965 di Kantor Pusat Jakarta*.

_____. *Peraturan Dewan Gubernur No.14/3/PDG/2012 tanggal 2 April 2012* tentang Pangkat, Jabatan, Satuan Kerja, dan Eselon di BI.

_____. *Peraturan Dewan Gubernur No.18/13/INTERN tanggal 30 Maret 2016* tentang Organisasi BI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Gubernur No.15/10/PDG/2013 tanggal 31 Juli 2013.

_____. *Surat Edaran No.29/8/INTERN tanggal 5 Juni 1996* tentang Penyempurnaan Organisasi Kantor BI.

_____. *Surat Edaran No.14/10/INTERN tanggal 2 April 2012* tentang Nama Jabatan, Nama dan Rubrik Satuan Kerja dan Unit Kerja di BI.

Kolonial Verslag 1890–1900.

UU No.11 tahun 1953 tentang UU Pokok BI diundangkan di dalam Lembaran Negara tahun 1953 No. 40

Surat Kabar

Borneo Shimboen, Banjarmasin, 11/2/1944 Domei

De Locomotief, 18 Maret 1907.

De locomotief, 27 Mei 1909.

De Sumatra Post, 2 April 1932.

De Sumatra Post, 3 Agustus 1907.

Deli Courant, "Kolonien: De Javasche Bank", 27 Juni 1908.

Encyklopedia van Nederlands Indie, Jilid I.

Geïllustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië 1934, hlm. 73–74.

Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 19 Agustus 1907

H. J Schophuys. "Polder, Pembukaan Persawahan Pasang Surut Gaja Lama dan Gaja Baru", *Kompas*, 7 November 1969.

Kompas, "Berita Daerah: Baru Dua Perusahaan Kalimantan Selatan Dapat KIK & KMKP Kurang Pengertian tentang Intern Bank", 6 Desember 1976.

Kompas, "Kalimantan Selatan Melepaskan Diri dari Kemapanan", 24 Februari 1995.

Kompas, "Meredupnya Kilau Intan Martapura", 19 Agustus 1997.

Kompas, "Pelabuhan Banjarmasin Perlu Dikembangkan", 7 Agustus 1998.

Kompas, "Petani Lahan Kering Mendapat Bantuan Modal", 1 Mei 1993.

Kompas, "Rp 5 milyar lebih, kredit bagi pengusaha lemah", 12 September 1978.

Kompas, "Sungai Balangan di Kalimantan Selatan Tercemar Limbah Batu Bara", 19 Maret 1994.

Plan voor eene Expeditie naar Midden-Oost-Borneo, 1925.

Republik Indonesia, Kalimantan, 1953.

Soeara Kalimantan, Oktober 1926.

Soeara Kalimantan, Oktober 1926.

Soerabaijasch Handelsblad, 19 Agustus 1907

Kalimantan Raya, No. 28, 8 April 1942.

The Encyclopedia Americana vol. III. (New York: Americana Corporation, 1937).

Disertasi/Tesis/Skripsi/Makalah/Karya tidak Diterbitkan.

"De Bandjermasinsche Afschuwelijkheid", *BKI* Bag. III, (Batavia: G. Kolff & Co., 1860).

"De Oprichting van Volkscredietbanken Op de Buitenbezettingen", *TBB,* Bag. ke-48, (Batavia: G. Kolff & Co., 1915).

Agoes, Azrianzyah A. (2016). The Politics of Natural Resource Use: A Comparative Study of Forest Exploitation in Indonesia and Cambodia, Illinois: Tesis, Northern Illinois University.

Alqadrie, Dian Rosandra. (2011). "Morfologi Kota Pontianak". Yogyakarta: Tesis, Universitas Gadjah Mada.

Fong, Goh Yoon. (1969). "Trade and Politics in Banjarmasin, 1700–1747". London: Tesis, University of London.

Hadinata, Irwan Yudha. (2017). "Transformasi Kota Sungai-Rawa Banjarmasin". Yogyakarta: Disertasi, Universitas Gadjah Mada.

Tundjung. (2004). Karet dari Hulu Sungai: Budidaya, Perdagangan, dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian di Kalimantan Selatan 1900-1940. Universitas Indonesia: Disertasi, Depok.

Jurnal/Artikel

Borneo Research Bulletin *Vol*. 25. Virginia: Departement of Anthropology, College of William and Mary.

Handinoto, (1993). "Arsitek G. C. Citroen dan Perkembangan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya (1915-1940)", dalam *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 19*, Surabaya: Universitas Kristen Petra press, hlm. 1–16.

_____, H. and Hartono, S., (2006). "Arsitektur Transisi di Nusantara dari Akhir Abad 19 ke Awal Abad 20 (Studi Kasus Komplek Bangunan Militer di Jawa pada Peralihan Abad 19 ke 20)". *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*, *34*(2), hlm. 81–92.

Hartono, S. and Handinoto, H. (2007). "The Amsterdam School dan Perkembangan Arsitektur Kolonial di Hindia Belanda antara 1915–1940". *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*, *35*(1), hlm. 46.

Hilmawan, Rian dan Siti Amalia. (2020). "Coal and Mineral and its impact on human development index: An Empirical Study in South and East Kalimantan Region, Indonesia", *International Journal of Energy Economics and Policy,* Vol. 10 No.1.

Hoevel, W. R. van., "Opmerkingen en Aanteekeningen Gehouden op Eene Reis op de Rivier van Banjermasin", *TNI Bag. II* tahun ke-13.

J. C. Vergouwen, (1921). "Tatah-en Soengeirechten", *Kolonial Tijdschrijft,* tahun ke-10, Redaktur/ Editor G. Gonggrijf dan D. G. Stibe.

Li, Ai. (2020). "*Analysis on the Current Situation and Future Outlook of Coal Market in Indonesia*", E3S Web of Conferences 2020 International Conference on Energy Big Data and Low-carbon Development Management (EBLDM 2020), Nanjing, China.

Poffenberger, M. (1997). "Rethinking Indonesian Forest Policy: Beyond the Timber Barons". *Asian Survey*, Vol. 37, No. 5, May, 1997.

Rokhim Rofikoh, Wardatul Adawiyah, Ruri Eka Fauziah Nasution. (2018). "The Negative Impact of Coal Mining Company on Health, Environment, Climate Change, Economic Sustainability and Macroeconomic", E3S Web Conf. Vol. 74, 2018 International Conference Series on Life Cycle Assessment: Life Cycle Assessment as A Metric to Achieve Sustainable Development Goals (ICSoLCA 2018).

Sachs Jeffrey D, Andrew M. Warner. (1995). "Natural Resource Abundance and Economic Growth", Natural Bureau of Economic Research, Working Papers 5398.

_____, Wing Thye Woo, Naoyuki Yoshino, dan Farhad Taghizadeh-Hesary. "Why Is Green Finance Important?". ADBI Working Paper 917, 22 Januari 2019.

Setiawan, F. "Strategi Peningkatan Sektor UMKM dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah pada Digitalisasi dalam Mengakselerasi Pengembangan UMKM". *Jurnal Administrasi Publik Vol. 7 No. 2 (2021).*

Subiyakto, Bambang. (2011). "Anjir, Bubuhan dan Kayuh Baimbai, Sumber Daya Budaya Masyarakat Banjar" dalam Heddy Shri Ahimsa-Putra (ed). *Arkeologi dan Sumber Daya Budaya di Kalimantan, Masalah dan Apresiasi*. Banjarbaru: IAAI Komda Kalimantan.

Sudaryanto, S., Rahayu, A. dan Wakhidah, S., (2019), "Ejaan van Ophuijsen (1901–1947)"dalam Iklan Tempo Doeloe dan Kebermaknaannya dalam Pengembangan Bahasa Indonesia. *Jurnal Lentera (Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Bahasa Indonesia)*, *2*(2), hlm. 154–166.

van Niel, Robert, (1981), "The Effect of Export Cultivations in Nineteenth-century Java", *Modern Asian Studies*, Vol. 15 No. 1.

W. R. van Hoevel, (1857), "Opmerkingen en Aanteekeningen Gehouden op Eene Reis op de Rivier van Banjermasin", *TNI* Bag. II tahun Ke-13, Zalt bonnel: Joh Nonen en Zoon.

Yoshimasa, Shibata, (1996). "The Monetary Policy in the Netherlands East Indies under the Japanese Administration" dalam *BKI,* tahun 1996, nomor 4.

Buku/Bagian Buku

Abdullah, Taufik. (1986). *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.

Ahyat, Ita Syamtasiyah. (2012). *Kesultanan Banjarmasin Pada Abad Ke-19: Ekspansi Pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan*. Tangerang Selatan: SAM.

Alumnus Fak. Pertanian UGM. (1981). *Sistem Pertanian Hemat Energi*. Yogyakarta.

Artha, Artum. (1970). *Sejarah Kota Banjarmasi.* Banjarmasin: Museum Lambung Mangkurat.

Aziddin, Yustan. (1984). *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud.

B. Schuitemakker. (1938). "Korte Schets van den Landbouw in het Oosmoesson Rijstggebied in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo" dalam Vereeniging van Landbouwconsulenten in Nederlandsc-Indie, "Landbouw" *Landbouwkundig Tijschrijft voor Nederlandsch-Indie*, Veertiende Jaargang 1938. Buitenzorg: Archipel Drukkerij.

Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan. (2005). *Urang Banjar dan Kebudayaannya*, Banjarmasin: Pustaka Banua.

Bangert. (1860). "Verslag der Reis in de Binnenwaarts Gelegene Streeken van Doeson Ilir", dalam *TBG* Bag. IX. Batavia: Lange & Co.,

Basry, Hassan. (1961). *Kisah Gerila Kalimantan, dalam Revolusi Indonesia 1945–1949*. Banjarmasin: Yayasan Lektur Lambung Mangkurat.

Bock. (1887). *Reis in Oost- en Zuid-Borneo, van Koetei naar Banjermassin*. 'sGravenhage: Martinus Nijhoff.

Boomgaard, Petter. (2007). *A World of Water Rain, Rivers, and Seas in Southeast Asian Histories*. Leiden: KITLV Press.

Booth, Anne. (1988), "Evolusi Kebijakan Fiskal dan Peranan Pemerintah dalam Perekonomian Kolonial" dalam Anne Booth, et al (eds.), *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Broersma, R. (1927). *Handel en Bedrijf Zuid- en Oost-Borneo*. 'sGravenhage: G. Naeff.

Cense, A. A. (1928). *De Kroniek van Badjarmasin*. Amsterdam: C. A Mees, Zantpoort.

Dana Listiana. (2012). "Permukiman Cina di Banjarmasin: Perkembangannya Hingga Awal Kemerdekaan" dalam *Potret Kampung-Kampung Pendatang di Banjarmasin*, STAIN Pontianak Press.

Darsono, dkk. (2016). *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Daud, Alfani. (1997). *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: Rajawali Press.

Djiwandono, J. Soedradjad., dkk. (2005). *Sejarah BI Periode 1: 1945–1959.* Jakarta: Bank Indonesia.

Djojohadikusomo, Sumitro. (1987). *Perdagangan dan Industri dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Feriyanto, Nur. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Hageman, J. (1857). "Bijdrage tot de Gesohiedenis van Borneo", *BTG* Bag. VI. Batavia: Lange & Co.

Ideham, M. Suriansyah. (2007). *Urang Banjar dan Kebudayaannya*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Jacobs, Els M. (2006). *Merchant in Asia: The Trade of The Dutch east India Company during the Eighteenth Century*. Leiden: CNWS Publications.

Jusi, M. (1962). Indonesia.Angkatan Darat. Komando Daerah Militer X Lambung Mangkurat, *Kodam X/LM Membangun*.

Kartodirdjo, Sartono.et al., (1975), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid IV. Jakarta: Depdikbud.

Knappen. (2001). *Fores of Fortune, The Environmental History of Southeast Borneo, 1600 1880*. Leiden: KITLV Press.

Leirissa, R.Z., dkk. (1984). *Sejarah Sosial Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Lesley, Potter., (1993), "Banjarese in and Beyond Hulu Sungai, South Kalimantan: A Study of Cultural Independence, Economic Opportunity and Mobility", dalam J. Thomas Lindbland (ed). *New Chalenges in the Modern Economic History of Indonesia*. Leiden: Programme of Indonesia Studies.

Lindblad, Thomas J. (1988). *Between Dayak and Dutch, The Economic History of Southeast Kalimantan, 1880–1942*. Dordrecht-Holland: Foris Publications.

_____. (1993). *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia*. Leiden: Programme of Indonesia Studies.

Lobeck, A. K. (1981). *Geomorfologi: Pengenalan Kepada Kajian Pandangan Darat*. Kuala Lumpur: Kementrian Pelajaran Malaysia.

Lockwood, Rupert. (1983). *Armada Hitam*. Jakarta: Gunung Agung.

Maks H. G., (1861), "Reis Naar Kapoeas en Kahajan in de Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo", *TBG* Bag. X. Batavia: Lange & Co.

Mallinckrodt, H. (1918). "De Adat Gemeenschappen in Zuid-Borneo", *Koloniale Studien,* Bag. I tahun ke-2. Weltevreden: Albrecht & Co.

Meyners, H. G. J. L. (1886). *Bijdragen tot de Geschiedenis van het Bandjermasinsche Rijk 1863-1886*. Leiden: E. J. Brill.

Mitchell, J. B., (1960). *Historical Geography.* London: The English Universities Press Limited.

Mubyarto dan Sartono Kartodirdjo, (1988). *Pembangunan Pedesaan Di Indones*ia. Yogyakarta: Liberti dan P3PK UGM.

Mubyarto, dkk., (1993). *Desa-Desa Kalimantan*. Yogyakarta: Aditya Media dan P3PK UGM.

Nawawi, Ramli, dkk,. (1986). *Sejarah Kota Banjarmasin*. Jakarta: Depdikbud.

_____, Tamny Ruslan, dan Yustan Aziddin. (1986). *Sejarah Kota Banjarmasin*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Nieuwenhuis, A. W. (1994). *Di Pedalaman Borneo: Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda,* Jakarta: Gramedia.

Nursid Sumaatmadja, (1988), *Studi Geografi: Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan,*. Bandung : Alumni.

Post, Peter. (2002). "Karakteristik Kewirausahaan Jepang dalam Ekonomi Indonesia sebelum Perang" dalam Lindblad (ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia.* Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara dan Pustaka Pelajar.

_____. (2009). "Indonesianisasi and Japanization: The Japanese and The Shifting Fortunes of pribumi Entrepreneurship", J. Thomas Lindblad & Peter Post (eds), *Indonesian Economic Decolonization in Regional and International Perspective*. Leiden: KITLV Press.

Prince, G. (2002). "Kebijaksanaan Moneter Indonesia dan Posisi Bank Jawa pada Masa Kolonial" dalam J. Thomas Lindblad, *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dan Pustaka Pelajar.

Purwanto, Bambang (2002), "Ekonomi Karet Rakyat Indonesia, Tahun 1890an sampai 1940", dalam J. T. Lindblad (ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara dan Pustaka Pelajar.

Ras, J. J. (1968). *Hikajat Bandjar*. Leiden, The Hegue: Martinus Nijhoff.

Riwut, Tjilik. (1958). *Kalimantan Memanggil.* Jakarta: Endang.

Ross, M. L. (2001). *Timber Booms and Institution Breakdown in Southeast Asia*. New York: Cambridge University Press.

Saleh, M. Idwar. (1958). *Sedjarah Bandjarmasin*. Bandung: KPPK Balai Pendidikan Guru.

_____. (1981). *Banjarmasih*. Banjarmasin: Museum Negeri Lambung Mangkurat P r o p Kalimantan Selatan.

Saleh, M. Idwar, dkk. (1978). *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Depdikbud.

S., Michael Bennet. (1955). *Banking Deregulation in Indonesia.* Pennsylvania: University of Pennsylvania Jurnal of International Law.

Sayoga, Budi Harjo, dkk. (t.t.). *Kamus Sejarah Indonesia II, Nation Building (1951 1998).* Jakarta: Kemendikbud.

Seman, Syamsiar. (1982). *Rumah Adat Banjar*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sukiman, Djoko. (2000). *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di J a w a (Abad XVIII-medio abad XX).* Yogyakarta: Bentang Budaya.

Sutrisno Kutoyo, Sri Sutjiatiningsih. ed., (1977). *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tim Penulis. (1953). *Republik Indonesia: Propinsi Kalimantan*. Jakarta: Kementerian Penerangan.

Tim Penulis. (2014). *Peran dan Fungsi BI Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.* Jakarta:B a n k Indonesia.

Tjilik Riwut. (1979). *Kalimantan Membangun*. Jakarta: Jayakarta Agung.

Wertheim, W. F. (1956). *Indonesia Society in Transition*. Bandung: Sumur Bandung.

Internet

Bappeda Prov. Kalimantan Timur. "Minatur Green Economy Kaltim dan Program Pertumbuhan Hijau Kalsel". https://bappeda.kaltimprov.go.id/postingan/714-miniatur diakses 1 September 2021

_____. "Pembahasan Awal Ruang Lingkup Pelaksanaan Program Pertumbuhan Hijau di Provinsi Kalimantan Selatan". http://bappeda.kalselprov.go.id/pembahasan-awal-ruang-lingkup-pelaksanaan-program-pertumbuhan-hijau-di-provinsi-kalimantan-selatan/

"Dari Benteng Tatas, Tata Kota Banjarmasin Digagas", https://jejakrekam.com/2017/02/09/dari benteng-tatas-tata-kota-banjarmasin-digagas/ diakses 22 Mei 2021

"Data Hutan Kalimantan Selatan" https://www.forestdigest.com/detail/989/data-hutan kalimantan-selatan

"Foto: Hijaunya Hutan Kalimantan yang Jadi Paru-Paru Dunia" https://news.detik.com/foto news/d-5310684/foto-hijaunya-hutan-kalimantan-yang-jadi-paru-paru-dunia/

Hartono dan Hadinoto, (2006), dalam https://dimensi.petra.ac.id/index.php/ars/article view/16540/16532 (2006)

Hendari F. Isnaeni, "Sejarah Mata Uang", diunduh dari https://www.kemenkeu.go.id/publikasi berita/sejarah-uang-di-nusantara/.

Kompas.com, "Kesultanan Banjar Sejarah Sistem Pemerintahan dan Masa Kejayaan", 14 April 2021 https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/14/135847779/ kesultanan-banjar sejarah-sistem-pemerintahan-dan-masa-kejayaan?page=all. Diakses tanggal 15 Mei 2021, dan http://p2k.um-surabaya.ac.id/id3/2-3045-2942/Kerajaan Banjar_41792_p2k-um surabaya.html diakses 10 Agustus 2021

Kompas.id. "Pasar Terapung di Kalsel Mulai Terapkan Pembayaran Digital". https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/04/09/pasar-terapung-di-Kalsel-mulai-terapkan-digitalisasi-pembayaran/ diakses 1 September 2021

Masyur Sammy, "Melintas Batas Benteng Tatas Dibina Inggris hingga Bumi Hangus", https:// jejakrekam.com/2019/08/30/melintas-batas-benteng-tatas-dibina-inggris h i n g g a - b u m i - hangus/. Diakses 22 Mei 2021.

Media Indonesia, "Kalsel Dorong Pengembangan Industri Kelapa Sawit", 20 Februari 2019, https://mediaindonesia.com/nusantara/218033/Kalsel-dorong-pengembangan-industri-kelapa-sawit

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pacu Hilirisasi Sektor Industri", https://kalteng.go.id/berita/read/1456/pemerintah-provinsi-kalimantan-tengah-pacu-hilirisasi-sektor-industri diakses 1 September 2021.

Septi Wulan Sari, "Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa", An-Nisbah, Vol. 03, No. 01, Oktober 2016. Diunduh dari https://media.neliti.com/media/publications/63979-ID-perkembangan-dan-pemikiran uang-dari-mas.pdf.

SERI BUKU SEJARAH DAN *HERITAGE* KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

1. BERJUANG DENGAN UANG MEMPERTAHANKAN DAN MEMAJUKAN REPUBLIK INDONESIA: SEMANGAT JUANG OTORITAS DAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA

Sumatera Timur pada abad ke-19 merupakan pusat perkebunan dengan komoditas bernilai jual tinggi. Namun, intensitas ekspor impor dalam perdagangan berimbas pada maraknya peredaran uang asing. Sejak masa kolonial, setidaknya ada sembilan mata uang asing yang beredar dan lebih populer dibanding mata uang gulden. Buku ini bercerita sejarah peredaran mata uang di sumatera timur yang tidak hanya dijadikan sebagai sekadar alat tukar, namun memberikan kita pemahaman baru bahwa uang sebagai alat perjuangan.

2. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR, MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI: DINAMIKA KOTA SURABAYA DAN JAWA TIMUR SEBAGAI PENYANGGA EKONOMI BANGSA

Sejak ratusan tahun berdirinya Surabaya, kota ini telah menjadi daerah strategis, baik dalam perdagangan maupun pertahanan. Pada masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), Surabaya dijadikan sebagai kota pertahanan, ditandai dengan berdirinya benteng serta pabrik senjata. Surabaya juga menjadi kota pertama bagi Belanda untuk mendirikan pabrik pencetakan uang logam di Nusantara. Buku berjudul "Membangun Infrastruktur, Memperkuat Ketahanan Ekonomi:

Dinamika Kota Surabaya dan Jawa Timur sebagai Penyangga Ekonomi Bangsa" ini menjelaskan sejarah Perekonomian Kota Surabaya dan Jawa Timur serta peran De Javasche Bank hingga Bank Indonesia di kota ini.

3. MENGAWAL SEMANGAT KEWIRAUSAHAAN: PERAN SAUDAGAR DALAM MEMAJUKAN RODA EKONOMI SUMATERA BARAT

Buku "Mengawal Semangat Kewirausahaan: Peran Saudagar Dalam Memajukan Roda Ekonomi Sumatera Barat" mengangkat sejarah perekonomian dan kisah perjuangan para saudagar Minang yang menjadi aktor ekonomi bersanding dengan pengusaha-pengusaha Belanda dan Tionghoa di Sumatera Barat. Perdagangan yang marak terjadi di Sumatera Barat sudah berlangsung jauh sebelum kedatangan Belanda. Pada masa klasik itu, Pantai Barat Sumatera mendatangkan komoditas-komoditas langka berkualitas, seperti kamfer, kemenyan dan emas. Kedatangan pedagang Arab, Tionghoa dan Tamil membuka gerbang yang lebih luas bagi pedagang Minang untuk berjejaring dengan negeri luar dan semangat merantau.

4. MENEGAKKAN KEDAULATAN DAN KETAHANAN EKONOMI: BANK INDONESIA DALAM PUSARAN SEJARAH KALIMANTAN BARAT

Sebagai salah satu provinsi di Pulau Kalimantan yang luasnya seperlima pulau tersebut, Kalimantan Barat memiliki garis pantai yang menghadap langsung ke jalur perdagangan maritim dunia, yakni Selat Malaka dan Laut China Selatan. Berdasarkan kondisi demografisnya, perekonomian wilayah barat dari bumi Kalimantan ini digerakkan oleh jaringan perdagangan dari hulu ke hilir melalui wilayah pedalaman ke pesisir pantai. Karakteristik

wilayah dengan sungai yang panjang, lebar dan dalam menjadi moda transportasi andalan, di samping keberadaan pelabuhan di pesisir pantai yang ramai disinggahi pedagang dan pelaut asing. Kekayaan hasil bumi dan tambang telah menjadi magnet yang mendatangkan para penambang dari Cina dan pedagang dari Eropa.

5. HARMONI DALAM PERBEDAAN: BANK INDONESIA DALAM DINAMIKA EKONOMI SOLO RAYA

Buku "Harmoni dalam Perbedaan: Bank Indonesia dalam Dinamika Ekonomi Solo Raya" ini merupakan hasil kajian terhadap sejarah ekonomi Solo yang sarat akan kearifan lokal. Buku ini sekaligus menjadi kontribusi Bank Indonesia melalui knowledge asset yang dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan pembangunan daerah yang didasari oleh kearifan lokal. Kehadiran buku ini juga sekaligus melengkapi keberadaan tangible asset dalam bentuk museum sebagai heritage eks Kantor De Javasche Bank Solo.

6. PUSAT EKONOMI MARITIM MAKASSAR DAN PERANAN BANK INDONESIA DI SULAWESI SELATAN

Makassar lekat dengan identitas sebagai pusat ekonomi maritim sejak berabad lalu, berkat keberadaan bandar niaga yang selalu ramai. Aktivitas perdagangan yang ramai mampu menstimulus perekonomian Makassar untuk berkembang menjadi yang paling maju di wilayah timur Nusantara. Untuk memperluas jaringan operasinya, DJB melebarkan sayap dengan membuka kantor-kantor cabang di seluruh Hindia Belanda, salah satunya di Makassar pada tahun 1864. Pertimbangan utama pembukaan De Javasche Bank Agentschap Makassar adalah keberadaan pelabuhan yang ramai, yang tentunya terjadi peredaran uang yang besar.

7. GELIAT KOTA BANDUNG: DARI KOTA TRADISIONAL MENUJU MODERN

Sejak awal pendiriannya, Kota Bandung telah menjadi pedoman dalam pengembangan dan perencanaan tata kota. Berada di wilayah pedalaman, letak geografis Kota Bandung telah mendukung kota ini yang sempat diusulkan sebagai ibu kota Hindia Belanda menggantikan Batavia pada masa kolonial. Bandung terus berbenah diri, pasca pengakuan kedaulatan, Bandung mendadak sibuk manakala kota ini dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Zaman terus berganti, Kota Bandung terus bertransformasi. Buku berjudul "Geliat Kota Bandung Dari Kota Tradisional Menuju Modern" menjabarkan sisi lain Kota Bandung dalam lintasan sejarah, mulai dari perekonomian Kota Bandung dan Jawa Barat serta peran De Javasche Bank hingga Bank Indonesia di kota ini.

8. BERSINERGI DALAM KEISTIMEWAAN: PERAN BANK INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI YOGYAKARTA

Berada di jantung wilayah Jawa sekaligus sebagai pusat dari kebudayaan Jawa, Yogyakarta tampil begitu istimewa. Di bidang ekonomi, perkebunan tumbuh menjadi basis perekonomian Yogyakarta pada masa kolonial. Sempat menjadi ibu kota revolusioner Republik Indonesia di awal kemerdekaan, Yogyakarta memainkan peran penting sebagai lokasi yang tepat guna menyempurnakan organisasi dalam negeri. Keunikan kebudayaan dan kreativitas masyarakatnya telah berhasil mengubah perekonomiannya dari ekonomi kolonial perkebunan menjadi ekonomi lokal yang mandiri berbasis kerakyatan. Buku berjudul "Bersinergi Dalam Keistimewaan: Peran Bank Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi

Yogyakarta" menguraikan sejarah perekonomian Yogyakarta serta peran De Javasche Bank hingga Bank Indonesia di era kontemporer.

9. OEDJAN MAS DI BUMI SRIWIJAYA: BANK INDONESIA DAN *HERITAGE* DI SUMATRA SELATAN

Dikenal sebagai budaya maritim warisan Kerajaan Sriwijaya, Sumatra Selatan hadir dengan kekayaan alamnya dan menjadi salah satu kantung ekonomi Pemerintah Hindia Belanda. Kemajuan ekonomi membawanya pada puncak kemakmuran atau masa "Oedjan Mas." Riuhnya aktivitas perekonomiannya melandasi pendirian De Javasche Bank Agentschap Palembang yang menjadi cikal bakal kehadiran Bank Indonesia di Sumatra Selatan. Sebagai upaya mendokumentasikan *institutional memory*, buku ini hadir sebagai kontribusi Bank Indonesia untuk memperkaya kajian ilmu sejarah ekonomi.

10. DARI RIMBA MENJADI KOTA: BANK INDONESIA DALAM EVOLUSI MALANG RAYA

Malang merupakan wilayah yang mulanya kurang dianggap penting oleh pemerintah kolonial. Evolusi ekonomi di sektor perkebunan membawanya menjadi salah satu wilayah penopang ekonomi di Jawa Timur dan berhasil menjawab keraguan pemerintah kolonial sebagai salah satu wilayah yang diperhitungkan. Perkembangan ekonomi wilayah yang masif menginisiasi berdirinya De Javasche Bank Agentschap Malang pada 1916 dan menjadi awal mula lahirnya Bank Indonesia di Kota Malang. Sebagai upaya mendokumentasikan *institutional memory*, buku ini hadir sebagai kontribusi Bank Indonesia untuk memperkaya kajian ilmu sejarah ekonomi.

11. MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH MODAL: BANK INDONESIA DALAM DINAMIKA PEREKONOMIAN ACEH

Posisi geografis, potensi alam yang melimpah, serta kegigihan perjuangan rakyat Aceh terangkum dalam catatan sejarah. Aceh pada masa Kesultanan Aceh Darussalam telah berhasil menjelma menjadi satu kekuatan politik dan ekonomi di Selat Malaka dan Lautan Hindia. Seiring perkembangannya, Aceh era Revolusi menjadi satu-satunya wilayah yang gagal dikuasai kembali oleh Belanda sekaligus menjadi tumpuan harapan bagi Republik. Berbagai bantuan fisik maupun materi diberikan rakyat Aceh. Atas segala kontribusi yang diberikan, Sukarno pun menjuluki Aceh sebagai "daerah modal". Sebagai upaya mendokumentasikan *institutional memory*, buku ini hadir guna memperkaya referensi akademis di bidang ilmu sejarah ekonomi.

12. SEMARANG SEBAGAI SIMPUL EKONOMI: BANK INDONESIA DALAM DINAMIKA PEREKONOMIAN JAWA TENGAH

Letaknya yang strategis dan kekayaan alam yang melimpah telah mengantarkan Semarang terhubung dengan kota-kota pantai utara Jawa sejak era Kerajaan Majapahit. Semarang tumbuh sebagai pelabuhan penting di Jawa dan turut berimplikasi terhadap ramainya aktivitas perekonomian dan perdagangan. Keberhasilan Semarang di bidang ekonomi nampak melalui interaksi antara wilayah pedalaman dan pesisir yang mampu membawa Semarang dikenal sebagai wilayah simpul ekonomi. Bergeliatnya perekonomian menginisiasi DJB mendirikan kantor cabang pertamanya di Semarang pada 1 Maret 1829. Sebagai upaya mendokumentasikan *institutional memory*, buku ini hadir guna memperkaya referensi akademis di bidang ilmu sejarah ekonomi.

Dr. H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H.

Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (2021-2024)

Visi KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan), merupakan cita-cita dan tujuan yang dicapai melalui rangkaian kebijakan, program, dan kegiatan yang melibatkan seluruh elemen banua. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong dan menggerakkan segala potensi daerah. Menggerakkan pembangunan daerah dengan memandang jauh ke depan serta membawa nilai-nilai adiluhung akar budaya warisan para leluhur.

Untuk itu, perlu kiranya menilik perjalanan Kalimantan Selatan di masa lampau. Sungai, ragam rupa potensi alam, serta keterlibatan masyarakat Kalimantan Selatan, melalui budaya dagang di wilayah hulu dan hilir serta interaksi kemitraan dengan para pedagang dari bangsa luar, turut mendukung gairah ekonomi Kalimantan Selatan di masa silam yang perlu dihidupkan kembali di era kontemporer saat ini.

Buku berjudul **"Dinamika Perekonomian Hulu-Hilir Sungai: Bank Indonesia dalam Lintasan Sejarah Kalimantan Selatan"** menjadi suatu publikasi menarik persembahan Bank Indonesia. Melalui buku ini kiranya dapat menjadi pengingat sekaligus rujukan edukatif dalam menumbuhkan kembali geliat ekonomi Kalimantan Selatan saat ini dan mendatang. Bersama dengan Bank Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus bersinergi dalam upaya mengendalikan inflasi, digitalisasi sistem pembayaran, serta mendorong kemajuan UMKM guna membawa Kalimantan Selatan bangkit kembali sebagai wilayah komersial yang berdaya saing unggul.

Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta, M. S.

Menteri Riset dan Teknologi (2011-2014) dan Menteri Lingkungan Hidup (2009-2011)

Alam Kalimantan Selatan begitu erat dengan kehadiran sungai sebagai denyut kehidupan masyarakat. Sejarah telah merekam bagaimana Kalimantan Selatan tumbuh sebagai salah satu wilayah yang berperan besar di bidang ekonomi sejak masa lampau. Pada sektor pertambangan misalnya, batu bara menjadi salah satu komoditas utama wilayah ini yang telah menopang perekonomian Kalimantan Selatan sejak masa kolonial hingga saat ini. Namun, menjadi suatu ironi manakala eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya, tidak dibarengi dengan perhatian terhadap keadaan lingkungan.

Sudah saatnya Provinsi Kalimantan Selatan berdampingan dengan Bank Indonesia untuk menggali dan mengembangkan sumber pendapatan dari aktivitas *green economy*, mengingat tambang adalah *non renewable resources*, serta meningkatkan ekspor barang jadi atau setengah jadi untuk meningkatkan nilai tambah, mengurangi over eksploitasi, dan tentu akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Sudah sepatutnya Kalimantan Selatan perlu menaruh fokus pada keberlangsungan alam dan lingkungan hidup. Dengan begitu, menguatnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dapat sejalan dengan keadaan alam dan ekosistem lingkungan yang tetap terjaga. Kehadiran buku berjudul **"Dinamika Perekonomian Hulu-Hilir Sungai: Bank Indonesia dalam Lintasan Sejarah Kalimantan Selatan"** kiranya dapat dijadikan sebagai bahan refleksi bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil pelajaran melalui kontribusi pemikiran dan wawasan guna memajukan daerah ini melalui pembangunan berkelanjutan yang tak hanya mementingkan sektor ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan sektor lingkungan hidup dan sosial.

Prof. (Emeritus) Helius Sjamsuddin, Ph.D.,M.A.

Guru Besar Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia

Kalimantan Selatan telah sejak lama terintegrasi ke dalam lalu lintas perdagangan dan perekonomian global. Berbagai komoditas di sejumlah sektor seperti produk kehutanan, perkebunan, dan pertambangan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pada abad ke-20 Kalimantan Selatan menjadi produsen komoditas ekspor karet yang tak hanya menguntungkan pemerintah kolonial, namun juga begitu dirasakan dampaknya bagi masyarakat lokal. Pada subsektor ekonomi lainnya seperti batu bara turut mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah ini. Atas kemajuan ekonominya, muncul gagasan dari pemerintah kolonial untuk mendirikan kantor cabang DJB di Banjarmasin sebagai bank sirkulasi sekaligus bank komersial. DJB Agentschap Bandjermasin diberi mandat dalam mengatur permodalan, perkreditan, serta mengatur lalu lintas pembayaran dan sirkulasi uang gulden di wilayah tersebut.

Selama ini kajian tentang Kalimantan lebih banyak dititikberatkan pada tema-tema sejarah politik. Terbitnya buku ini menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dari Bank Indonesia di bidang sejarah ekonomi sekaligus sebagai pemantik penelitian dan penulisan sejarah ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya buku **"Dinamika Perekonomian Hulu-Hilir Sungai: Bank Indonesia dalam Lintasan Sejarah Kalimantan Selatan"** ini pada tahun 2022, berarti ulang tahun *Centennial Plus* (1907-2022). Bank Indonesia sudah menjadi sebuah *legacy*, sebuah *heritage* bangsa, khususnya bagi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, perlu juga bagi kita untuk lebih bijak dan tidak berlebih-lebihan dalam melihat hubungan antara sejarah dan *heritage*.

BI INSTITUTE
www.bi.go.id/id/institute